

# Memperluas Dampak, Menjaga Keberlanjutan

*Expanding Impact,  
Fostering Sustainability*





# Daftar Isi

## Table of Contents

<b>01</b>	<b>Strategi Keberlanjutan</b> Sustainability Strategy	<b>6</b>	Perubahan Signifikan pada Perusahaan dan Rantai Pasokan Significant Changes in the Company and Supply Chain	104	
<b>02</b>	<b>Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan</b> Sustainability Performance Overview	<b>34</b>	Pendekatan atau Prinsip Pencegahan Approach or Prevention Principles	105	
<b>03</b>	<b>Penjelasan Direksi</b> Statement of the Board of Directors	<b>40</b>	Inisiatif Eksternal External Initiatives	105	
<b>04</b>	<b>Tentang Laporan Keberlanjutan</b> About Sustainability Report	<b>54</b>	Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications	106	
	Prinsip Pelaporan Reporting Principles	55	<b>06</b>	<b>Tata Kelola Keberlanjutan</b> Sustainability Governance	<b>120</b>
	Rujukan Laporan Reporting References	56	Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Good Corporate Governance (GCG) Principles	123	
	Cakupan dan Batasan Laporan Reporting Scope and Boundary	56	Struktur Tata Kelola Governance Structure	124	
	Siklus, Periode Pelaporan dan Pernyataan Penggunaan Reporting Cycle, Period and Statement of Use	56	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) General Meeting of Shareholders (GMS)	128	
	Perubahan Terkait Laporan Changes Related to the Report	57	Kebijakan Mengenai Perlakuan Adil terhadap Pemegang Saham Policy on Fair Treatment of Shareholders	128	
	Pernyataan Ulang Informasi Restatement of Information	62	Kriteria Pemilihan Dewan Komisaris dan Direksi Criteria for the Appointment of the Board of Commissioners and Board of Directors	129	
	Verifikasi oleh Pihak Independen Independent Verification	62	Dewan Komisaris Board of Commissioners	129	
	Aksesibilitas dan Umpan Balik Accessibility and Feedback	63	Direksi Board of Directors	130	
<b>05</b>	<b>Profil Perusahaan</b> Company Profile	<b>64</b>	Keberagaman Badan Tata Kelola Governance Diversity	131	
	Identitas Perusahaan Corporate Identity	66	Total Kehadiran Rapat Direksi dan Dewan Komisaris Meeting Attendance of the Board of Directors and the Board of Commissioners	131	
	Riwayat Singkat Brief History	68	Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Performance Assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors	131	
	Visi, Misi dan Nilai Keberlanjutan Sustainability Vision, Mission and Values	72	Pengawasan terkait Keberlanjutan Perusahaan Supervision of Corporate Sustainability	132	
	Nama dan Alamat Kantor Cabang dan/atau Kantor Perwakilan Name and Address of Branch Office and/or Representative Office	76	Peran Badan Tata Kelola Tertinggi dalam Pelaporan Keberlanjutan Role of the Highest Governance Body in Sustainability Reporting	132	
	Struktur Organisasi Organizational Structure	82	Komunikasi Masalah Penting, serta Mekanisme untuk Mencari Nasihat dan Mengemukakan Masalah Communication of Critical Issues and Mechanisms for Seeking Advice and Raising Issues	133	
	Skala Perusahaan Business Scale	84	Pedoman Perilaku Code of Conduct	133	
	Demografi Karyawan Employee Demographics	85	Rasio Kompensasi Total Tahunan Annual Total Compensation Ratio	135	
	Wilayah Kerja dan Pasar yang Dilayani Operational Area and Market	98	<i>Whistleblowing System</i> Whistleblowing System	135	
	Produk, Layanan dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan Products, Services, and Business Activities	100	Penilaian Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan Risk Assessment on the Implementation of Sustainable Finance	137	
	Sinergi PNM dengan Entitas Anak dan Entitas Afiliasi PNM Synergy with Subsidiaries and Affiliates	102	Prinsip Manajemen Risiko Risk Management Principles	139	
	Keanggotaan dalam Asosiasi Association Membership	103			
	Rantai Pasokan Supply Chain	103			



Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan Competency Development Related to Sustainable Finance	156
Keanggotaan PNM dalam UN <i>Global Compact</i> (UNGC) PNM Membership in the UN Global Compact (UNGC)	160
Kebijakan Antikorupsi Anti-Corruption Policy	160
Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Policy (AML/CTF)	162
Pencegahan Benturan Kepentingan Prevention of Conflicts of Interest	162
Kontribusi Politik Political Contributions	163
Tata Kelola Teknologi Informasi Information Technology Governance	163
Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Stakeholder Engagement	164
Perjanjian Perundingan Kolektif Collective Bargaining Agreements	165
Permasalahan Terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan Challenges in the Implementation of Sustainable Finance	168
<b>07 Kinerja Keberlanjutan</b> <b>Sustainability Performance</b>	<b>170</b>
Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan Building Sustainability Culture	172
<b>08 Kinerja Ekonomi Keberlanjutan</b> <b>Sustainable Economic Performance</b>	<b>174</b>
Sekilas Ekonomi Global dan Nasional Overview of Global and National Economy	176
Kinerja Sektor Pembiayaan UMKM MSME Financing Sector Performance	177
Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia Role of MSMEs in the Indonesian Economy	178
Peran PNM dalam Pengembangan UMKM Role of PNM in MSMEs Development	179
Strategi Bisnis dan Operasional PNM Tahun 2025 PNM Business and Operational Strategy for 2025	180
Kinerja Ekonomi PNM Tahun 2025 PNM Economic Performance in 2025	181
Distribusi Nilai Ekonomi Economic Value Distribution	184
Pengungkapan Kerangka Governansi, Pengelolaan dan Pengendalian Aspek Perpajakan Disclosure on Governance, Management, and Control of Tax Aspects	185
Bantuan Finansial dari Pemerintah Government Financial Assistance	187
Program Pensiun Manfaat Pasti dan Program Pensiun Lainnya Defined Benefit Pension Program and Other Pension Programs	187
Nilai Moneter Produk dan Layanan yang Ditinjau untuk Memberikan Manfaat Sosial Monetary Value of Products and Services Reviewed for Social Benefits	191

<b>09 Kinerja Lingkungan Keberlanjutan</b> <b>Sustainable Environmental Performance</b>	<b>192</b>
Komitmen PNM terhadap Lingkungan PNM Commitment to the Environmental	195
Implikasi Finansial Serta Risiko dan Peluang Lain Akibat dari Perubahan Iklim Financial Implications as well as Other Risks and Opportunities Arising from Climate Change	197
Penggunaan Material Ramah Lingkungan Use of Environmentally Friendly Materials	199
Pengelolaan Energi Energy Management	200
Pengelolaan Emisi Gas Rumah Kaca Greenhouse Gas (GHG) Emissions Management	203
Pengelolaan Air dan Air Limbah Water and Wastewater Management	208
Pengelolaan Limbah Waste Management	210
Tumpahan yang Signifikan Significant Spills	211
Keanekaragaman Hayati Biodiversity	211
Pengaduan Masalah Lingkungan Environmental Complaints	212
Biaya Lingkungan Environmental Costs	212

<b>10 Kinerja Sosial Keberlanjutan</b> <b>Sustainable Social Performance</b>	<b>214</b>
Landasan Kebijakan Policy Framework	217
Ketenagakerjaan Employment	219
Lingkungan Kerja yang Layak dan Aman Decent and Safe Working Environment	235
Tanggung Jawab kepada Masyarakat Responsibility to the Community	239
Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan Responsibility for Sustainable Product/Service Development	253
Layanan Setara untuk Konsumen/Nasabah Equal Services for Consumers/Customers	254
Inisiatif Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Initiatives to Improve Financial Literacy	259
<b>Daftar Pengungkapan Sesuai POJK 51/POJK.03/2017</b> Disclosure Index in Accordance with POJK 51/POJK.03/2017	<b>262</b>
<b>Indeks Konten GRI Standard 2021</b> GRI Standard Content Index 2021	<b>265</b>
<b>Tautan GRI Standar dengan Sustainable Development Goals (SDGS)</b> Linkage of GRI Standards with Sustainable Development Goals (SDGS)	<b>272</b>
<b>Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen</b> Written Verification from Independent Party	<b>280</b>
<b>Lembar Umpan Balik</b> Feedback Form	<b>281</b>
<b>Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Tahun Sebelumnya</b> Responses to Feedback on the Previous Year's Report	<b>283</b>



# 01

## **Strategi Keberlanjutan**

*Sustainability Strategy*



# Strategi Keberlanjutan [OJK A.1]

## Sustainability Strategy [OJK A.1]



Strategi keberlanjutan PNM diwujudkan melalui *Sustainability House* yang menjadi landasan utama dalam penerapan praktik ESG di seluruh lini bisnis. Dengan visi “Menjadi Lembaga Keuangan Terkemuka Melalui Pelayanan, Pemberdayaan, dan Penciptaan Nilai Tambah Bagi Pengusaha Ultra Mikro, Mikro, dan Kecil secara Berkelanjutan”, PNM membangun tiga sasaran strategis.

Ketiga sasaran tersebut ditopang oleh tiga pilar keberlanjutan (lingkungan, sosial, dan tata kelola & ekonomi), yang keseluruhan kerangkanya diimplementasikan secara selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) serta budaya perusahaan BRILiaN Way PNM.

Di samping itu, PNM berkomitmen menerapkan keuangan berkelanjutan berdasarkan prinsip 5P (*People, Planet, Prosperity, Peace, dan Partnership*) yang sejalan dengan prinsip dan regulasi keuangan berkelanjutan. Komitmen itu sejalan dengan arahan BP BUMN melalui Surat No. S-468/MBU/09/2024, yang menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2025 mengintegrasikan aspek *Environmental, Social, dan Governance* (ESG).

PNM sustainability strategy is embodied through the *Sustainability House*, which serves as the primary foundation for the implementation of ESG practices across all business lines. Guided by the vision “Becoming a Leading Financial Institution Through Service, Empowerment and Creation of Added Value for Ultra Micro, Micro and Small Entrepreneurs in Sustainable Manner”, PNM has established three strategic objectives.

These objectives are supported by three sustainability pillars, namely environmental, social, and governance & economic, with the overall framework implemented in alignment with the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Company’s BRILiaN Way PNM corporate culture.

In addition, PNM is committed to implementing sustainable finance based on the 5Ps (*People, Planet, Prosperity, Peace, and Partnership*) principle, which aligns with sustainable finance principles and regulations. This commitment aligns with the directives of the SOE Regulatory Agency, through Letter No. S-468/MBU/09/2024, which emphasizes that the preparation of the 2025 Company Work Plan and Budget integrates Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects.



## Pilar Lingkungan Hidup Environmental Pillar

Selanjutnya, pada pilar lingkungan hidup, PNM mengimplementasikan keuangan berkelanjutan melalui komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan pengelolaan dampak operasional yang bertanggung jawab. PNM berkontribusi dalam penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang layak, serta mendukung upaya pelestarian ekosistem laut dan darat sebagai bagian dari penciptaan nilai jangka panjang yang berkelanjutan.

Implementasi pilar lingkungan hidup diwujudkan melalui berbagai program strategis, antara lain *Ecolife* PNM dan PNM Hijaukan Indonesia yang mendorong peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan, Sanitasi SMART untuk mendukung kualitas kesehatan dan lingkungan pemukiman, serta PNM Peduli Terumbu Karang sebagai bentuk kontribusi terhadap pelestarian ekosistem pesisir dan laut. Selain itu, PNM mengembangkan inisiatif Budidaya Maggot sebagai solusi pengelolaan limbah organik yang bernilai ekonomi dan ramah lingkungan.

Dalam rangka memperkuat tata kelola lingkungan di internal perusahaan, PNM juga melakukan perhitungan emisi gas rumah kaca cakupan 1 dan 2 pada 100% lokasi operasional sebagai dasar pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan secara terukur. Pendekatan ini mencerminkan komitmen PNM untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan lingkungan ke dalam proses bisnis, sekaligus mendukung agenda transisi menuju ekonomi rendah karbon secara bertahap dan berkelanjutan.

Sejalan dengan upaya tata kelola lingkungan, PNM juga memperkuat pengelolaan risiko berkelanjutan melalui identifikasi risiko ESG, khususnya risiko iklim, sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko yang lebih *robust* dan terintegrasi. Identifikasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan potensi dampak perubahan iklim terhadap operasional, aset, dan keberlanjutan layanan PNM. Melalui pemetaan risiko fisik dan transisi terkait iklim, PNM berupaya memperkuat ketahanan Perusahaan terhadap dinamika lingkungan dan mendukung penerapan tata kelola risiko yang selaras dengan prinsip ESG dan praktik keberlanjutan jangka panjang.

PNM telah menyusun *Disruption Risk Assessment* di seluruh 58 cabang yang tersebar di Indonesia serta melakukan pemetaan potensi bencana sebagai upaya untuk mengidentifikasi risiko fisik, operasional, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha. Risiko bencana tersebut telah diidentifikasi dan dicantumkan dalam *risk register* Perusahaan, serta dilengkapi dengan identifikasi awal risiko ESG sebagai dasar penguatan pengelolaan risiko berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut atas hasil identifikasi risiko tersebut, PNM menetapkan langkah-langkah mitigasi yang dituangkan dalam berbagai kebijakan dan pedoman operasional. Kebijakan tersebut meliputi Petunjuk Pelaksanaan *Emergency Response Plan*, Petunjuk Pelaksanaan Lokasi Alternatif pada Kondisi Darurat

Under the environmental pillar, PNM implements sustainable finance through its commitment to environmental. Conservation and responsible management of operational impacts. PNM contributes to improving access to clean water and proper sanitation, while also supporting the conservation of marine and terrestrial ecosystems as part of its long-term sustainable value creation.

The implementation of the environmental pillar is realized through various strategic programs, including *Ecolife* PNM and PNM Hijaukan Indonesia, which aim to enhance public awareness and participation in environmental protection; SMART Sanitation to support improved public health and residential environmental quality; and PNM Peduli Terumbu Karang, as PNM contribution to the preservation of coastal and marine ecosystems. In addition, PNM has developed a Maggot Cultivation Initiative as an environmentally friendly and economically valuable solution for organic waste management.

To strengthen internal environmental governance, PNM has conducted Scope 1 and Scope 2 greenhouse gas emissions calculations across 100% of its operational locations, serving as a basis for measurable environmental impact management and control. This approach demonstrates PNM commitment to integrating environmental sustainability principles into its business processes, while supporting a gradual and sustainable transition toward a low-carbon economy.

In line with environmental governance measures, PNM has also strengthened sustainable risk management through the identification of ESG risks, particularly climate-related risks, as part of a more robust and integrated risk management framework. This identification considers the potential impacts of climate change on PNM operations, assets, and service sustainability. Through the mapping of physical and transition climate risks, PNM seeks to enhance corporate resilience and support risk governance aligned with ESG principles and long-term sustainability practices.

PNM has conducted a *Disruption Risk Assessment* across all 58 branches throughout Indonesia, along with disaster risk mapping to identify physical, operational, and environmental risks that may affect business continuity. These disaster-related risks have been documented in the Company's risk register and supplemented by preliminary ESG risk identification to strengthen sustainable risk management.

As a follow-up to the identified risks, PNM has established mitigation measures stipulated in various policies and operational guidelines, including *Emergency Response Plan* Guidelines, *Alternative Location Guidelines* in Disaster Emergency Conditions, *Branch and Unit Business Continuity*



Bencana, Petunjuk Pelaksanaan *Business Continuity Plan* Kantor Cabang dan Unit, serta Petunjuk Pelaksanaan Tanggap Darurat Kantor Cabang dan Unit. Penerapan kebijakan ini mencerminkan komitmen PNM dalam memperkuat ketahanan operasional, meningkatkan kesiapsiagaan terhadap risiko iklim dan bencana, serta mendukung keberlanjutan usaha secara jangka panjang.



### Pilar Sosial Social Pillar

PNM menjalankan pilar sosial sebagai bagian integral dari komitmen Perusahaan dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat, khususnya nasabah ultra mikro dan komunitas rentan. Melalui berbagai inisiatif pengembangan kapasitas seperti Madani Entrepreneurship Academy dan Madani Upskilling Academy, PNM berfokus pada peningkatan kompetensi kewirausahaan, literasi keuangan, serta keterampilan teknis dan non-teknis yang relevan dengan kebutuhan usaha dan dunia kerja. Program-program ini dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi, meningkatkan daya saing usaha, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat secara inklusif.

Di bidang pendidikan, PNM berupaya memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran bagi anak-anak dan generasi muda melalui program Ruang Pintar PNM, Belajar Seasik Bermain, dan PNM Scholarship. Inisiatif ini mencakup penyediaan sarana belajar yang inklusif, pendekatan pembelajaran kreatif bagi anak usia dini, serta dukungan pendidikan formal bagi pelajar dan mahasiswa berprestasi dari keluarga prasejahtera. Melalui intervensi pendidikan yang berkelanjutan, PNM berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan generasi masa depan yang berdaya saing.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, PNM juga melaksanakan program di bidang kesehatan dan ketahanan pangan melalui Madani Care Stunting dan Rumah Pangan PNM. Program ini berfokus pada pencegahan stunting, peningkatan kesadaran gizi, serta pemenuhan akses terhadap pangan yang aman dan bergizi. Dengan melibatkan pemangku kepentingan lokal dan memanfaatkan potensi komunitas, PNM mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sehat, tangguh, dan mandiri.

Dalam rangka memperkuat kohesi sosial dan pemberdayaan komunitas, PNM mengembangkan program berbasis komunitas seperti Lorong Mekaar serta berbagai inisiatif di bawah payung PNM Humanity. Program-program ini bertujuan untuk membangun ekosistem sosial dan usaha yang saling mendukung, meningkatkan kualitas lingkungan sosial, serta memperkuat solidaritas di tingkat komunitas. Pendekatan kolaboratif menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan dampak sosial yang dihasilkan.

Selain program reguler, PNM juga menjalankan Bantuan Bencana Alam dan Kemanusiaan insidental sebagai bentuk respon cepat terhadap kondisi darurat dan kebutuhan mendesak masyarakat. Program ini dilaksanakan secara adaptif dan akuntabel untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak. Melalui keseluruhan inisiatif

Plan Guidelines, and Branch and Unit Emergency Response Guidelines. The implementation of these policies reflects PNM commitment to strengthening operational resilience, enhancing preparedness for climate and disaster risks, and supporting long-term business sustainability.

PNM implements the social pillar as an integral part of its commitment to creating sustainable social impact through community empowerment, particularly for ultra micro customers and vulnerable communities. Through various capacity-building initiatives such as the Madani Entrepreneurship Academy and Madani Upskilling Academy, PNM focuses on enhancing entrepreneurial competencies, financial literacy, and technical as well as soft skills relevant to business development and workforce needs. These programs are designed to promote economic self-reliance, improve business competitiveness, and strengthen inclusive community economic resilience.

In the education sector, PNM seeks to expand access to and improve the quality of learning for children and youth through programs such as Ruang Pintar PNM (PNM Smart Space), Belajar Seasik Bermain (Fun Learning), and the PNM Scholarship. These initiatives include the provision of inclusive learning facilities, creative learning approaches for early childhood education, and formal education support for high-achieving students from underprivileged backgrounds. Through sustained educational interventions, PNM contributes to improving human capital quality and developing a competitive future generation.

To enhance community quality of life, PNM also implements programs in the areas of health and food security through Madani Care Stunting and Rumah Pangan PNM (PNM Food Space). These programs focus on stunting prevention, increasing nutritional awareness, and improving access to safe and nutritious food. By engaging local stakeholders and leveraging community potential, PNM promotes the development of healthier, more resilient, and self-reliant communities.

To strengthen social cohesion and community empowerment, PNM develops community-based programs such as Lorong Mekaar and various initiatives under the PNM Humanity platform. These programs aim to build mutually supportive social and business ecosystems, improve the quality of the social environment, and enhance community solidarity. A collaborative approach is key to ensuring the sustainability of the social impact generated.

In addition to its regular programs, PNM also provides incidental disaster relief and humanitarian assistance as a rapid response to emergency situations and urgent community needs. These initiatives are implemented in an adaptive and accountable manner to ensure targeted assistance and meaningful impact for affected communities. Through the comprehensive





pilar sosial tersebut, PNM menegaskan perannya sebagai institusi pembiayaan yang tidak hanya berorientasi pada kinerja bisnis, tetapi juga pada penciptaan nilai sosial yang berkelanjutan.

### **Pilar Tata Kelola & Ekonomi** Governance & Economic Pillar

Adapun pada pilar hukum tata kelola, PNM menerapkan praktik tata kelola berkelanjutan sebagai bagian dari prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan ini mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN. Program pada pilar ini selaras dengan kegiatan GCG, termasuk pelibatan pemangku kepentingan, pengembangan kompetensi di bidang keberlanjutan, pengelolaan risiko, serta pembagian tugas dan tanggung jawab antar unit kerja dalam penerapan keuangan berkelanjutan.

Dalam pilar ekonomi, PNM sebagai lembaga jasa keuangan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan akses pembiayaan yang inklusif, pengembangan kapasitas usaha, dan pengelolaan kinerja keuangan yang prudent dan bertanggung jawab. Pilar ekonomi ini menjadi fondasi utama PNM dalam menjalankan perannya sebagai katalis pemberdayaan ultra mikro dan mikro khususnya perempuan prasejahtera.

Menjadi penting bagi PNM untuk melakukan penguatan pada kualitas portofolio pembiayaan dan mengembangkan produk/layanan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi dan risiko jangka panjang. Melalui model pembiayaan berbasis pendampingan dan pemberdayaan, PNM tidak hanya mendorong pertumbuhan kinerja keuangan Perseroan, tetapi juga memperkuat kemampuan nasabah dalam mengelola usaha, menghadapi ketidakpastian ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

*Orange Bonds* menjadi bagian penting dari strategi keberlanjutan pilar ekonomi PNM dalam menjembatani kebutuhan pendanaan Perseroan dengan agenda keuangan berkelanjutan. Dana yang dihimpun melalui penerbitan *Orange Bonds* dialokasikan untuk mendukung pembiayaan dan pendampingan usaha perempuan prasejahtera, sehingga tidak hanya memperkuat struktur pendanaan PNM, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan bagi nasabah dan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan PNM untuk menghubungkan kinerja keuangan dengan dampak pembangunan, sejalan dengan prinsip *impact-oriented financing*.

Dengan strategi keberlanjutan pilarekonomi ini, PNM menegaskan perannya sebagai lembaga pembiayaan dan pemberdayaan yang tidak semata berorientasi pada pertumbuhan jangka pendek, tetapi berfokus pada penciptaan nilai ekonomi jangka panjang yang resilien, inklusif, dan selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan nasional.

implementation of its social pillar initiatives, PNM affirms its role as a financing institution that is not solely business-oriented, but also committed to delivering sustainable social value creation.

Under the governance pillar, PNM implements sustainable governance practices as an integral part of its Good Corporate Governance (GCG) framework. These practices are guided by the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, as stipulated in the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs. Programs under this pillar are aligned with GCG activities, including stakeholder engagement, sustainability competency development, risk management, and the clear allocation of roles and responsibilities across organizational units in implementing sustainable finance.

Within the economic pillar, PNM, as a financial services institution, plays a key role in improving community welfare through the provision of inclusive financing access, business capacity development, and the prudent and responsible management of financial performance. This pillar serves as the foundation of PNM role as a catalyst for empowering ultra micro and micro enterprises, particularly underprivileged women.

Strengthening the quality of the financing portfolio and developing products and services that are adaptive to economic dynamics and long-term risks are key priorities for PNM. Through a financing model that integrates mentoring and empowerment, PNM not only drives the Company's financial performance but also enhances customers' capacity to manage their businesses, navigate economic uncertainty, and achieve sustainable welfare improvements.

The *Orange Bonds* constitutes a critical component of PNM economic pillar sustainability strategy, bridging the Company's funding needs with the sustainable finance agenda. Proceeds from the issuance of *Orange Bonds* are allocated to support financing and business assistance for underprivileged women entrepreneurs, thereby strengthening PNM funding structure while generating sustainable economic value for customers and communities. This approach enables PNM to link financial performance with development impact, in line with impact-oriented financing principles.

Through this economic pillar sustainability strategy, PNM reaffirms its role as a financing and empowerment institution that is not solely focused on short-term growth, but is committed to creating resilient, inclusive, and long-term economic value aligned with the national sustainable development agenda.



## RAKB sebagai Implementasi Keuangan Berkelanjutan

### RAKB as the Implementation of Sustainable Finance

Sebagai perusahaan yang berkomitmen pada praktik berkelanjutan, PNM menyadari pentingnya membangun sistem keuangan yang tangguh dan berkelanjutan. Komitmen ini tercermin dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) di mana PNM menegaskan tujuan untuk mencapai pertumbuhan keuangan yang sehat, optimal, dan berkelanjutan. Pendekatan keuangan berkelanjutan ini memungkinkan PNM memberikan dukungan yang selaras dengan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara menyeluruh.

Dalam penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), penerapan prinsip keuangan berkelanjutan dirancang secara menyeluruh melalui program kerja yang mencakup perencanaan jangka pendek (satu tahun) dan jangka panjang (lima tahun). Seluruh perencanaan tersebut disusun sejalan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Peraturan ini memuat delapan prinsip keuangan berkelanjutan yang menjadi dasar pelaksanaan dan pengembangan praktik keuangan berkelanjutan di perusahaan yaitu:

- Prinsip investasi bertanggung jawab;
- Prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan;
- Prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup;
- Prinsip tata kelola;
- Prinsip komunikasi yang informatif;
- Prinsip inklusif;
- Prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas; dan
- Prinsip koordinasi dan kolaborasi.

Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan keselarasan dengan harapan pemegang saham terkait aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam praktik bisnis yang berkelanjutan. Menyikapi hal ini, Manajemen PNM mulai mengidentifikasi potensi risiko pada 2025, termasuk bencana alam terkait perubahan iklim yang dapat memengaruhi sektor ekonomi masyarakat, serta perubahan teknologi yang berpotensi menimbulkan disrupsi bisnis. Dalam menghadapi risiko tersebut, PNM menjadikan keberlanjutan sebagai landasan strategi bisnisnya.

Risiko-risiko sebagaimana tersebut di atas telah menjadi bagian dari strategi dan program prioritas yang tertuang dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Tahun 2025 menandai tahun kedua PNM menyusun RAKB dengan fokus pada pengembangan sistem keuangan yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung upaya pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi, pengelolaan lingkungan secara bijak, dan mendukung komitmen Indonesia dalam *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC) untuk menurunkan emisi sebesar 31,89% dengan upaya mandiri, serta 43,20% dengan bantuan internasional.

Program prioritas RAKB 2025 menekankan penguatan inisiatif keberlanjutan sebagai respons strategis terhadap dinamika bisnis serta tantangan di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola. Untuk itu, PNM akan menyusun *framework* dan *roadmap*

As a company committed to sustainable practices, PNM recognizes the importance of building a resilient and sustainable financial system. This commitment is reflected in the Company's Long-Term Plan (RJPP) and the Work Plan and Budget (RKAP), in which PNM affirms its objective to achieve sound, optimal, and sustainable financial growth. This sustainable finance approach enables PNM to provide support that is fully aligned with economic, social, and environmental objectives in an integrated manner.

In preparing the Sustainable Finance Action Plan (RAKB), the implementation of sustainable finance principles is designed comprehensively through work programs covering both short-term (one year) and long-term (five year) planning horizons. All such planning is aligned with Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 on Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies. This regulation outlines eight sustainable finance principles that serve as the foundation for the implementation and development of sustainable finance practices, as follows:

- Principle of responsible investment;
- Principle of sustainable business strategy and practices;
- Principle of social and environmental risk management;
- Principle of governance;
- Principle of informative communication;
- Principle of inclusivity;
- Principle of developing priority leading sectors; and
- Principle of coordination and collaboration.

These principles reflect alignment with shareholder expectations regarding environmental, social, and governance (ESG) aspects in sustainable business practices. In response, PNM Management began identifying potential risks in 2025, including climate change-related natural disasters that may affect community economic sectors, as well as technological changes that could lead to business disruption. To address these risks, PNM has positioned sustainability as a core foundation of its business strategy.

The aforementioned risks have been incorporated into the strategic direction and priority programs stipulated in the Sustainable Finance Action Plan (RAKB). The year 2025 marked the second year of PNM RAKB implementation, with a focus on developing a stable, inclusive, and sustainable financial system, while simultaneously supporting efforts to reduce socio-economic disparities, promote prudent environmental management, and contribute to Indonesia's commitment under the *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC) to reduce greenhouse gas emissions by 31.89% through independent efforts, and 43.20% with international support.

The 2025 RAKB priority programs emphasize the strengthening of sustainability initiatives as a strategic response to evolving business dynamics and environmental, social, and governance challenges. To this end, PNM will develop a sustainability





keberlanjutan yang menjadi landasan dan pedoman pengambilan keputusan secara holistik dan terukur sehingga seluruh aspek operasional perusahaan selaras dengan tujuan keberlanjutan jangka panjang dan visi perusahaan.

Inisiatif keberlanjutan diharapkan tidak hanya diterapkan secara internal, tetapi juga meluas ke ekosistem perusahaan, termasuk nasabah. Salah satu langkah utama adalah pemetaan nasabah kelompok Mekaar di mana PNM akan mengidentifikasi dan mendorong praktik keberlanjutan di kalangan nasabah. Program ini bertujuan meningkatkan inklusi keuangan secara berkelanjutan, memastikan para pengusaha mikro tidak hanya memperoleh akses pembiayaan, tetapi juga dibekali literasi keberlanjutan yang kuat.

Lebih dari itu, PNM akan melanjutkan transformasi fase 2 untuk produk pembiayaan mikro berbasis komunitas yang dirancang untuk memperkuat model pembiayaan inklusif dan memperluas dampak sosial. Selain itu, PNM akan memperluas pelaksanaan program keuangan berkelanjutan, termasuk literasi keuangan dan pengembangan kapasitas. Program-program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nasabah dalam mengelola bisnis secara efisien dan berkelanjutan, menjadikan literasi keuangan sebagai fondasi optimalisasi pembiayaan, serta memperkuat kapabilitas mereka dalam praktik keuangan berkelanjutan.

Penyusunan RAKB diharapkan menjadi panduan yang terstruktur bagi PNM dalam menerapkan praktik keuangan berkelanjutan. Sejak berdiri sebagai lembaga jasa keuangan non-bank, PNM telah konsisten menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai ESG melalui produk-produk unggulannya yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat. Dengan pendekatan strategis ini, PNM tidak hanya berperan sebagai pelopor di sektor keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Berikut 9 (Sembilan) Kegiatan Prioritas RAKB Tahun 2025 beserta pencapaiannya per 31 Desember 2025.

framework and roadmap to serve as a holistic and measurable foundation for decision-making, ensuring that all operational aspects of the Company are aligned with long-term sustainability objectives and the Company's vision.

Sustainability initiatives are expected to be implemented not only internally but also extended across the Company's broader ecosystem, including its customers. One of the key initiatives is the mapping of Mekaar customer groups, through which PNM will identify and encourage sustainable practices among customers. This program aims to enhance sustainable financial inclusion by ensuring that micro-entrepreneurs not only gain access to financing but are also equipped with strong sustainability literacy.

Furthermore, PNM will continue the Phase 2 transformation of its community-based microfinance products, designed to strengthen inclusive financing models and expand social impact. In addition, PNM will broaden the implementation of sustainable finance programs, including financial literacy and capacity-building initiatives. These programs aim to enhance customers' knowledge and skills in managing businesses efficiently and sustainably, position financial literacy as a foundation for optimizing financing utilization, and strengthen customer capabilities in sustainable financial practices.

The preparation of the RAKB is expected to serve as a structured guideline for PNM in implementing sustainable finance practices. Since its establishment as a non-bank financial institution, PNM has consistently demonstrated its commitment to ESG values through its flagship products, which emphasize community empowerment. Through this strategic approach, PNM not only acts as a pioneer in the financial sector but also as an agent of change that delivers positive impacts on society and the environment. The following section presents the 9 (nine) Priority RAKB Activities for 2025 along with their achievements as of December 31, 2025.

Tabel Target dan Pencapaian Kegiatan RAKB Tahun 2025  
Table of RAKB Target and Achievement for 2025

No.	Nama Kegiatan Prioritas Program Name	Indikator Keberhasilan Success Indicator	Capaian per 31 Desember 2025 Achievement as of December 31, 2025	Hambatan (jika ada) Challenge (if any)	Tindak Lanjut Follow Up
1	Pemetaan nasabah kelompok Mekaar Mekaar Group Customer Mapping	Hasil pemetaan nasabah Kelompok Mekaar berdasarkan metadata Bappenas. Mapping results of Mekaar Group customers based on Bappenas metadata.	Telah tersedia Hasil Riset Pemetaan Nasabah Kelompok Mekaar yang bertujuan menganalisis penerapan ESG dalam aktivitas usaha, Menyusun modul praktik baik dan rekomendasi pengembangan yang dikaitkan dengan SDGs serta mengidentifikasi potensi sektor usaha untuk keberlanjutan dan mengukur kontribusinya terhadap pilar ESG. The research output on Mekaar Group Customer Mapping was completed, aimed at analyzing the implementation of ESG principles in business activities, developing best-practice modules and development recommendations aligned with the SDGs, as well as identifying potential business sectors for sustainability and measuring their contributions to specific SDG targets.	Tidak ada hambatan signifikan. No significant obstacles were identified.	Implementasi modul praktik baik hasil dari riset pemetaan nasabah kelompok Mekaar. Implementation of Best Practice Modules Derived from Mekaar Group Customer Mapping Research.
2	Identifikasi risiko ESG dan iklim ESG and Climate Risk Identification	Laporan identifikasi risiko ESG dan peta risiko perubahan iklim. Report on ESG risk identification and climate change risk map.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapatnya laporan <i>Disruption Risk Assessment</i> di seluruh 58 cabang PNM di seluruh Indonesia serta terdapat Pemetaan Potensi Bencana.</li> <li>2. Terdapat identifikasi risiko bencana yang telah tercantum dalam risk register dan identifikasi awal mengenai risiko ESG.</li> <li>3. Terdapat langkah mitigasi Perusahaan yang tertuang dalam kebijakan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Petunjuk Pelaksanaan <i>Emergency Response Plan</i>.</li> <li>• Petunjuk Pelaksanaan Lokasi Alternatif pada Kondisi Darurat Bencana.</li> <li>• Petunjuk Pelaksanaan <i>Business Continuity Plan</i> Kantor Cabang dan Unit.</li> <li>• Petunjuk Pelaksanaan Tanggap Darurat Kantor Cabang.</li> </ul> </li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A <i>Disruption Risk Assessment</i> report was completed for all 58 PNM branches across Indonesia, accompanied by disaster potential mapping.</li> <li>2. Disaster risks were identified and incorporated into the corporate risk register, along with an initial identification of ESG-related risks.</li> <li>3. The Company established mitigation measures as stipulated in the following policies: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emergency Response Plan Implementation Guidelines.</li> <li>• Guidelines on Alternative Locations under Disaster Emergency Conditions.</li> <li>• Business Continuity Plan (BCP) Implementation Guidelines for Branch Offices and Units.</li> <li>• Emergency Response Guidelines for Branch Offices and Units.</li> </ul> </li> </ol>	Pemahaman internal SDM mengenai risiko dan dampak perubahan iklim. Lack of awareness and understanding of climate change risks and impacts.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemutakhiran <i>risk register</i> dengan mengintegrasikan aspek ESG dan/atau perubahan iklim.</li> <li>2. Melakukan <i>in-depth analysis</i> dampak dan peluang perubahan iklim.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Updating the risk register by integrating ESG and/or climate change aspects.</li> <li>2. Conducting in-depth analysis of climate change impacts and opportunities.</li> </ol>



No.	Nama Kegiatan Prioritas Program Name	Indikator Keberhasilan Success Indicator	Capaian per 31 Desember 2025 Achievement as of December 31, 2025	Hambatan (jika ada) Challenge (if any)	Tindak Lanjut Follow Up
3	Transformasi produk pembiayaan mikro berbasis komunitas Community-Based Microfinance Product Transformation	<i>Piloting</i> produk madani tumbuh fase 2 mencakup <i>upgrading</i> penggunaan teknologi dan tata kelola. Pilot implementation of Madani Tumbuh Phase 2 product, including enhanced use of technology and governance.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah diimplementasikan <i>Piloting</i> Produk Madani Tumbuh Fase 2, yang mencakup peningkatan penggunaan teknologi dan tata kelola secara nasional.</li> <li>Total penyaluran MT 200 Periode Januari-Agustus 2025 adalah sebesar Rp595.786.500.000/Lebih dari Rp500 juta.</li> <li>The pilot implementation of Madani Tumbuh Phase 2 was carried out nationwide, encompassing upgrades in the use of technology and improvements in governance.</li> <li>Total disbursement of Madani Tumbuh 200 for the period January–August 2025 amounted to IDR595,786,500,000 (exceeding IDR500 billion).</li> </ul>	Tidak ada hambatan signifikan. No significant obstacles were identified.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan kebijakan produk, UAT, dan <i>piloting</i> aplikasi <i>mobile</i> dan <i>web</i>.</li> <li>Penyusunan ketentuan dan kebijakan produk, <i>development</i>.</li> <li>Formulating product policies, User Acceptance Testing (UAT), and piloting mobile and web applications.</li> <li>Developing product regulations and policies, product development, and piloting.</li> </ol>
4	Program Produktivitas Account Officer Account Officer Productivity Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dilaksanakannya pelatihan untuk masing-masing AO minimal 24 jam pelatihan dalam setahun dengan cakupan 50% AO.</li> <li>Jumlah <i>outstanding</i> yang dikelola oleh AO.</li> <li>Implementation of training for each Account Officer (AO) with a minimum of 24 training hours per year, covering at least 50% of AOs.</li> <li>Amount of outstanding portfolio managed by AOs.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Telah dilaksanakan pelatihan bagi seluruh <i>Account Officer</i> (AO) dengan rata-rata 52 jam pelatihan per tahun dan cakupan mencapai 100% AO.</li> <li>Terdapat 15,02% <i>Account Officer</i> (AO) yang memiliki rata-rata total produktivitas plafon lebih dari 160 juta rupiah per bulan pada periode Januari hingga Agustus 2025.</li> <li>Training was conducted for all Account Officers (AOs), with an average of 52 training hours per AO per year and 100% coverage.</li> <li>A total of 15.02% of Account Officers (AOs) achieved an average monthly productivity ceiling exceeding IDR160 million during the period of January–August 2025.</li> </ol>	Tidak ada hambatan signifikan. No significant obstacles were identified.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Program <i>capacity building</i> secara berkelanjutan untuk AO</li> <li>Pelaksanaan <i>Knowledge Sharing</i> tematik sesuai dengan kebutuhan karyawan unit dan cabang.</li> <li>Kolaborasi antar Divisi dalam peningkatan kompetensi untuk level KUM dan SAO.</li> <li>Conducting continuous capacity building programs for Account Officers (AO).</li> <li>Implementing thematic knowledge-sharing sessions tailored to the needs of unit and branch employees.</li> <li>Conducting inter-divisional collaboration to enhance competencies at the KUM and SAO levels.</li> </ol>
5	<i>Framework</i> dan <i>roadmap</i> keberlanjutan Sustainability Framework and Roadmap	Pengesahan dan sosialisasi <i>framework</i> dan <i>roadmap</i> periode 2025–2029. Approval and dissemination of the sustainability framework and roadmap for the 2025–2029 period.	Telah disusun dan disahkan <i>framework</i> serta <i>roadmap</i> keberlanjutan, dan telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh pihak terkait. The sustainability framework and roadmap were developed and formally approved, and dissemination was carried out to all relevant stakeholders.	Masih terdapat kesenjangan pemahaman dari divisi terkait. There remains a gap in understanding among the relevant divisions.	<ol style="list-style-type: none"> <li><i>Monitoring</i> dan evaluasi ketercapaian program ESG/Keberlanjutan 2025.</li> <li>Integrasi program ESG 2026 dalam RKAP dan Rencana Bisnis 2026.</li> <li>Sosialisasi secara berkala.</li> <li>Monitoring and evaluating the achievement of ESG/ Sustainability programs in 2025.</li> <li>Integrating ESG programs for 2026 into the 2026 RKAP and Business Plan.</li> <li>Regular socialization.</li> </ol>

No.	Nama Kegiatan Prioritas Program Name	Indikator Keberhasilan Success Indicator	Capaian per 31 Desember 2025 Achievement as of December 31, 2025	Hambatan (jika ada) Challenge (if any)	Tindak Lanjut Follow Up
6	Perhitungan emisi cakupan 1 dan 2 untuk 100% lokasi operasional Scope 1 and Scope 2 Emissions Calculation for 100% of Operational Locations	Hasil perhitungan emisi untuk seluruh wilayah operasional. Emissions calculation results covering all operational areas.	Telah terkumpul data energi dari bahan bakar dan listrik untuk perhitungan emisi cakupan 1 dan 2 hingga bulan Agustus, dengan cakupan kantor pusat, kantor cabang, dan anak perusahaan. ( <i>cut off data per Agustus</i> ). Energy consumption data from fuel and electricity were collected for the calculation of Scope 1 and Scope 2 emissions up to August, covering the head office, branch offices, and subsidiaries (data cut-off as of August).	Masih terdapat keterbatasan dalam penyediaan data pada beberapa sumber emisi. Selain itu terdapat pergantian PIC yang menyebabkan proses pengumpulan data melewati <i>timeline</i> yang telah ditetapkan. There are still limitations in the availability of data for several emission sources. In addition, changes in the designated persons in charge (PICs) have caused delays in the data collection process beyond the established timeline.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Improvement</i> manajemen data emisi GRK.</li> <li>2. Memperluas cakupan perhitungan emisi cakupan 1, 2, dan 3</li> <li>3. Menyusun inisiatif dekarbonisasi.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Improving greenhouse gas (GHG) emissions data management.</li> <li>2. Expanding the scope of emissions calculations for Scope 1, Scope 2, and Scope 3.</li> <li>3. Developing decarbonization initiatives.</li> </ol>
7	Program Literasi Keuangan Financial Literacy Program	Program Literasi Keuangan untuk minimal 850.000 nasabah termasuk syariah. Financial literacy program for at least 850,000 customers, including sharia-based customers.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sampai dengan bulan juni, telah tersedia 30 modul materi literasi keuangan dalam bentuk video.</li> <li>2. Jumlah nasabah yang mengakses materi literasi keuangan tercatat sebanyak 1.815.531 nasabah/ hampir 2 juta nasabah.</li> <li>3. Telah terdapat dalam Riset Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Nasabah Mekaar Analisis Tahun 2025.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. As of June, 30 financial literacy modules in the form of video materials were developed.</li> <li>2. A total of 1,815,531 customers, nearly 2 million, accessed the financial literacy materials.</li> <li>3. The program was included in the 2025 Analysis of the Mekaar Customers' Financial Literacy and Inclusion Index Research.</li> </ol>	Membuat Mekaar Digi susah diakses di beberapa daerah. Limitations in internet connectivity have made the Mekaar Digi platform difficult to access in certain regions.	Evaluasi kinerja dan dampak program literasi keuangan. Evaluating the performance and impact of the financial literacy program.



No.	Nama Kegiatan Prioritas Program Name	Indikator Keberhasilan Success Indicator	Capaian per 31 Desember 2025 Achievement as of December 31, 2025	Hambatan (jika ada) Challenge (if any)	Tindak Lanjut Follow Up
8	Program Pendidikan dan Pelatihan di bidang Keuangan Berkelanjutan Education and Training Program in Sustainable Finance	<p>40% karyawan PNM memahami topik keuangan berkelanjutan yang membawahi divisi berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Treasury.</li> <li>2. Akuntansi Manajemen dan Keuangan.</li> <li>3. Manajemen Risiko Operasional dan Korporasi.</li> <li>4. Manajemen Risiko Kredit.</li> <li>5. Kepatuhan.</li> <li>6. Jasa Manajemen dan TJSL.</li> <li>7. Pengembangan Kapasitas Usaha.</li> <li>8. Pengembangan Bisnis.</li> <li>9. Pengadaan dan Pengelolaan Infrastruktur.</li> <li>10. Rencana Strategis Perusahaan.</li> <li>11. Unit Usaha Syariah.</li> <li>12. Transformation Office.</li> <li>13. Human Capital Development.</li> <li>14. Human Capital Services.</li> </ol> <p>40% of PNM employees have an understanding of sustainable finance topics across the following divisions:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Treasury.</li> <li>2. Management Accounting and Finance.</li> <li>3. Operational and Corporate Risk Management.</li> <li>4. Credit Risk Management.</li> <li>5. Compliance.</li> <li>6. Management Services and CSR.</li> <li>7. Business Capacity Development.</li> <li>8. Business Development.</li> <li>9. Procurement and Infrastructure Management.</li> <li>10. Corporate Strategic Planning.</li> <li>11. Sharia Business Unit.</li> <li>12. Transformation Office.</li> <li>13. Human Capital Development.</li> <li>14. Human Capital Services.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dilakukan pelatihan keuangan berkelanjutan dengan topik <i>Finance for Non-Finance, Asset &amp; Liabilities Management</i>, dan Sosialisasi <i>Internal Control over Financing Reporting (ICoFR)</i> yang dapat dilihat dari laporan <i>executive summary</i>.</li> <li>2. Telah ada <i>blueprint</i> mengenai <i>Human Capital Maturity Score: Aspiration &amp; Roadmap Implementation 2025-2029</i> sebagai rencana penilaian HC <i>Maturity</i>.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sustainable finance training was conducted on topics including Finance for Non-Finance, Asset &amp; Liabilities Management, and internal socialization of Internal Control over Financing Reporting (ICoFR), as reflected in the executive summary report.</li> <li>2. A blueprint for the Human Capital Maturity Score: Aspiration &amp; Roadmap Implementation 2025-2029 was developed as a plan for assessing human capital maturity.</li> </ol>	<p>Topik pelatihan belum spesifik pada keuangan berkelanjutan.</p> <p>The training topics have not yet been specifically focused on sustainable finance.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan program pelatihan yang lebih tematik dan sesuai dengan kebutuhan PNM misalnya terkait IFRS S1, S2, <i>climate risk</i>, dll.</li> <li>2. Meningkatkan target dan dampak program pelatihan di bidang keberlanjutan.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementing more thematic training programs tailored to PNM needs, such as those related to IFRS S1 and S2, climate risk, and other relevant topics.</li> <li>2. Enhancing the targets and impact of sustainability-related training programs.</li> </ol>

No.	Nama Kegiatan Prioritas Program Name	Indikator Keberhasilan Success Indicator	Capaian per 31 Desember 2025 Achievement as of December 31, 2025	Hambatan (jika ada) Challenge (if any)	Tindak Lanjut Follow Up
9	Program TJSL berdampak SDGs CSR Programs with SDGs Impact	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat 5 program yang mendukung pencapaian SDGs.</li> <li>Analisa dampak 4 program TJSL terhadap SDGs (SROI).</li> <li>There are 5 programs that support the achievement of the SDGs.</li> <li>Impact analysis of 4 TJSL programs on the SDGs (SROI).</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh program TJSL PNM (17 Program) memiliki dampak terhadap SDGs (<i>Sustainable Development Goals</i>).</li> <li>Pengukuran SROI untuk 4 program TJSL di antaranya yaitu Ruang Pintar, Madani Vokasi <i>Academy</i>, Kampung Madani, dan Beasiswa Pendidikan.</li> <li>All PNM CSR programs (17 programs) have a measurable impact on the Sustainable Development Goals (SDGs).</li> <li>SROI measurements were conducted for four CSR programs, namely Ruang Pintar, Madani Vokasi <i>Academy</i>, Kampung Madani, and Education Scholarship Program.</li> </ol>	<p>Terdapat perubahan program TJSL dari identifikasi awal, sehingga perlu penyesuaian dalam laporan RAKB.</p> <p>There were changes to the Corporate Social Responsibility (CSR) programs compared to the initial identification, thereby necessitating adjustments to the RAKB report.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun laporan kontribusi pencapaian SDGs melalui program TJSL.</li> <li>Meningkatkan program TJSL berbasis CSV.</li> <li>Preparing a report on contributions to the achievement of the SDGs through CSR programs.</li> <li>Enhancing TJSL programs based on CSV.</li> </ol>

### RAKB PNM Tahun 2026 PNM RAKB for 2026

Sesuai dengan POJK No. 51/POJK.03/2017 bahwa RAKB wajib disampaikan setiap tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan, maka PNM telah menyusun RAKB Tahun 2026. Berikut kegiatan prioritas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2026:

In accordance with POJK Number 51/POJK.03/2017, which requires the Sustainable Finance Action Plan (RAKB) to be submitted annually to the Financial Services Authority (OJK), PNM has prepared the RAKB for 2026. The priority activities under the 2026 RKAB are as follows:

No.	Program Prioritas Priority Program	Indikator Keberhasilan Success Indicator
1	Penyusunan <i>Framework</i> Keuangan Berkelanjutan Development of a Sustainable Finance Framework	Dokumen <i>framework</i> keuangan berkelanjutan untuk instrumen <i>orange bonds</i> Sustainable finance framework document for orange bonds instruments
2	Pengembangan Produk Eksisting yang Mendukung Perluasan <i>Core</i> Bisnis Berbasis Keuangan Berkelanjutan Development of Existing Products to Support the Expansion of Our Core Business in Sustainable Finance	Dokumen kajian pengembangan produk baru Study document on new product development
3	Penyusunan <i>Impact Report</i> dan Penerbitan Obligasi Tahap Selanjutnya Preparation of the Impact Report and Issuance of the Next Tranche of Bonds	Pelaporan <i>impact report</i> ke OJK dan penerbitan instrumen <i>orange bonds</i> tahap selanjutnya Submission of the impact report to the OJK and issuance of the next tranche of orange bonds
4	Identifikasi dan Analisa Risiko Iklim Identification and Analysis of Climate Risks	Hasil Identifikasi Risiko Fisik dan Transisi Results of the Physical and Transition Risk Assessment
5	Perhitungan Emisi Cakupan 1, 2, dan 3 untuk Perjalanan Dinas Calculation of Scope 1, 2, and 3 Emissions from Business Travel	Hasil inventarisasi emisi cakupan 1, 2, dan 3 untuk perjalanan dinas Results of Scope 1, 2, and 3 emissions inventory for business travel
6	Program Literasi Keuangan Financial Literacy Program	Program Literasi Keuangan untuk minimal 1.500.000 nasabah termasuk syariah Financial Literacy Program for at least 1,500,000 customers, including Sharia customers



No.	Program Prioritas Priority Program	Indikator Keberhasilan Success Indicator
7	Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Keuangan Berkelanjutan Education and Training in Sustainable Finance	<p>50% AO mendapatkan 24 jam pelatihan dan peningkatan pemahaman 60% karyawan dari divisi yang membawahi bidang keuangan berkelanjutan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tresuri dan Pendanaan</li> <li>2. Akuntansi Manajemen dan Keuangan</li> <li>3. Manajemen Risiko Operasional dan Korporasi</li> <li>4. Manajemen Risiko Kredit</li> <li>5. Kepatuhan</li> <li>6. Jasa Manajemen dan TJSL</li> <li>7. Pengembangan Kapasitas Usaha</li> <li>8. Pengembangan Bisnis</li> <li>9. Pengadaan dan Pengendalian Infrastruktur</li> <li>10. Rencana Strategis Perusahaan</li> <li>11. Unit Usaha Syariah</li> <li>12. <i>Strategic Transformation</i></li> <li>13. <i>Human Capital Development</i></li> <li>14. <i>Human Capital Services</i></li> </ol> <p>50% of AO staff received 24 hours of training, and 60% of employees from the divisions overseeing the following sustainable finance areas saw an increase in their understanding:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Treasury and Funding</li> <li>2. Management Accounting and Finance</li> <li>3. Operational and Corporate Risk Management</li> <li>4. Credit Risk Management</li> <li>5. Compliance</li> <li>6. Management Services and TJSL</li> <li>7. Business Capacity Development</li> <li>8. Business Development</li> <li>9. Infrastructure Procurement and Control</li> <li>10. Corporate Strategic Planning</li> <li>11. Sharia Business Unit</li> <li>12. Strategic Transformation</li> <li>13. Human Capital Development</li> <li>14. Human Capital Services</li> </ol>
8	Program TJSL Berdampak SDGs CSR Programs with SDG Impacts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat 6 program yang mendukung pencapaian SDGs</li> <li>• Analisa dampak 4 program TJSL terhadap SDGs (SR01)</li> <li>• Terdapat 1 program CSV</li> <li>• There are 6 programs supporting the achievement of the SDGs</li> <li>• Analysis of the impact of 4 TJSL programs on the SDGs (SR01)</li> <li>• There is 1 CSV program</li> </ul>
9	Laporan Keberlanjutan dengan Pendekatan IFRS S1 dan S2 Sustainability Report using the IFRS S1 and S2 Approach	<p>Terpublikasinya Laporan Keberlanjutan dengan pendekatan IFRS S1 dan S2</p> <p>Publication of the Sustainability Report using the IFRS S1 and S2 Approach</p>
10	Kajian Identifikasi Risiko HAM di Kantor Pusat dan Cabang Sampel Human Rights Risk Assessment at the Head Office and Sample Branches	<p>Dokumen kajian risiko HAM di Kantor Pusat dan Cabang (sampel) yang disahkan oleh Manajemen</p> <p>Human rights risk assessment document for the Head Office and Branches (sample) approved by Management</p>
11	Pengembangan Produk Baru yang Mendukung Perluasan Core Bisnis berbasis Keuangan Berkelanjutan berupa Kelompok Membina dan Mengelola Sampah (KEMBANGS) Development of New Products Supporting the Expansion of the Core Business Based on Sustainable Finance in the Form of the Waste Management and Development Group (KEMBANGS)	<p>Dokumen kajian pengembangan produk baru Kelompok Membina dan Mengelola Sampah (KEMBANGS)</p> <p>Document on the study of new product development for the Waste Management and Development Group (KEMBANGS)</p>
12	Peningkatan Produktivitas melalui <i>Diary</i> AO, aplikasi untuk mengatur dan mengelola aktivitas harian AO secara lebih efektif dan efisien Productivity Improvement through <i>Diary</i> AO, an application to organize and manage daily AO activities more effectively and efficiently	<p>85% karyawan (AO) telah menyelesaikan aktivitas operasional maksimum jam 18.00 waktu setempat</p> <p>85% of employees (AOs) have completed their operational activities by 6:00 PM local time</p>

## Laporan Verifikasi Orange Movement 2025

### Orange Movement Verification Report 2025

Laporan verifikasi pasca penerbitan ini menyajikan evaluasi komprehensif atas kesesuaian penerbitan Orange Sukuk dan Obligasi PNM Fase I dan II Tahun 2025 terhadap Prinsip-Prinsip Obligasi Orange, sekaligus menegaskan komitmen PT Permodalan Nasional Madani dalam mendorong inklusi keuangan berbasis gender dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Melalui alokasi dana yang terarah, proses seleksi yang ketat, serta transparansi pelaporan dan pengukuran dampak, PNM tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap kerangka kerja yang berlaku, tetapi juga memperkuat peran strategisnya dalam menciptakan dampak sosial-ekonomi yang nyata, khususnya bagi perempuan pengusaha mikro di seluruh Indonesia.

This post-issuance verification report presents a comprehensive evaluation of the compliance of the issuance of the Orange Sukuk and PNM Bonds Phases I and II 2025 with the Orange Bonds Principles, while reaffirming PT Permodalan Nasional Madani's commitment to promoting gender-based financial inclusion and achieving the Sustainable Development Goals. Through targeted fund allocation, a rigorous selection process, and transparent reporting and impact measurement, PNM not only ensures compliance with applicable frameworks but also strengthens its strategic role in creating tangible socio-economic impact, particularly for women micro-entrepreneurs across Indonesia.

### Obligasi dan Sukuk PNM Mendorong Perubahan Sistemik dan Transformatif Gender

#### PNM Bonds And Sukuk Driving Systemic and Transformational Gender Change

PT Permodalan Nasional Madani (PNM), sebagai lembaga terkemuka yang berfokus pada pembiayaan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi, terus menegaskan komitmennya sebagai pilar penting dalam mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Secara intrinsik, upaya pembiayaan PNM selaras dengan berbagai standar global, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN SDGs) yang menitikberatkan pada pengurangan kemiskinan, kesetaraan gender, dan inklusi ekonomi, serta Prinsip Obligasi Orange (*Orange Bonds Principles/OBPs*). Komitmen dalam memperluas inklusi keuangan, terutama bagi perempuan dan kelompok yang kurang terlayani, mendorong PNM menjadi penerbit Sukuk Orange pertama di dunia.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM), as a leading institution focused on financing and empowering Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) as well as cooperatives, continues to reaffirm its commitment as a key pillar in driving growth and maintaining the stability of Indonesia's economy. Intrinsicly, PNM financing initiatives are aligned with various global standards, including the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs), which emphasize poverty reduction, gender equality, and economic inclusion, as well as the Orange Bonds Principles (OBPs). Its commitment to expanding financial inclusion particularly for women and underserved communities has positioned PNM as the world's first issuer of Orange Sukuk.





Realisasi komitmen tersebut tercermin melalui penerbitan Obligasi Berkelanjutan *Orange* Sosial I PNM Fase I Tahun 2025 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan *Orange* Sosial I PNM Fase I Tahun 2025, yang kemudian dilanjutkan dengan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan *Orange* Sosial II PNM Fase II Tahun 2025. Seluruh penerbitan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terkait penerbitan efek bersifat utang berkelanjutan (POJK 18/2023), memperoleh peringkat idAAA dan idAAAasy, serta mendapat dukungan dari *Impact Investment Exchange* (IIX) sebagai penggagas *Orange Movement global*.

**Fase I:**

Pada Juli 2025, PNM menerbitkan Obligasi Berkelanjutan *Orange* Sosial I PNM Fase I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan *Orange* Sosial I PNM Fase I, 2025, dengan nilai penerbitan masing-masing sebesar IDR1 triliun dan IDR1,75 triliun. Penerbitan obligasi ini mendapat respon yang sangat positif dari investor, dengan tingkat kelebihan pemesanan sebesar 1.376 kali, sementara sukuk berhasil terjual habis sesuai dengan nilai targetnya.

**Fase II:**

Pada September 2025, PNM juga menerbitkan *Social Orange Sustainable* Sukuk Mudharabah I PNM Fase II, 2025, dengan nilai emisi sebesar IDR1,02 triliun. Fase II mengalami kelebihan permintaan sebesar 10.990 kali selama proses *bookbuilding*.

Untuk mengukur dampak sosial ekonomi atas penerbitan *Orange* Sukuk serta Obligasi Fase I dan Fase II Tahun 2025, *Orange Movement* telah menerbitkan laporan verifikasi dengan hasil sebagai berikut:

 **Ruang Lingkup**  
Scope

Verifikasi pasca penerbitan memastikan kesesuaian penerbitan yang disebutkan di sini dengan Prinsip-Prinsip Obligasi *Orange* yang lebih luas:

**Prinsip 1:**

Alokasi Modal yang Ber-perspektif *Gender*

**Prinsip 2:**

Kapasitas dan Keragaman Ber-perspektif *Gender* dalam Kepemimpinan

**Prinsip 3:**

Transparansi dalam Proses Investasi dan Pelaporan

 **Metodologi**  
Methodology

Studi dilakukan untuk mengevaluasi konfirmasi dampak di kalangan pelanggan PNM dengan populasi pelanggan total sekitar 1.500.000. Pendekatan sampling acak diterapkan secara nasional, dan survei didistribusikan kepada 1.794 pelanggan yang dipilih secara proporsional di 38 provinsi di Indonesia untuk memastikan representasi geografis.

The realization of this commitment is reflected in the issuance of the *Orange Social Sustainable Bonds I PNM Phase I Year 2025* and the *Orange Social Sustainable Mudharabah Sukuk I PNM Phase I Year 2025*, followed by the *Orange Social Sustainable Mudharabah Sukuk II PNM Phase II Year 2025*. All issuances were conducted in compliance with the regulations of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) concerning sustainable debt securities (POJK 18/2023), have obtained ratings of idAAA and idAAAasy, and are supported by the *Impact Investment Exchange* (IIX) as the initiator of the *Orange Movement*.

**Phase I:**

In July 2025, PNM issued *PNM Sustainable Orange Social Bonds I Phase I 2025* and *PNM Sustainable Orange Social Sukuk Mudharabah I Phase I 2025*, with issuance values of IDR1 trillion and IDR1.75 trillion, respectively. The bond issuance received a highly positive response from investors, with an oversubscription rate of 1,376 times, while the sukuk was fully subscribed in line with its target issuance amount.

**Phase II:**

In September 2025, PNM also issued *PNM Sustainable Orange Social Sukuk Mudharabah I Phase II 2025*, with a total issuance value of IDR1.02 trillion. Phase II recorded an oversubscription of 10,990 times during the *bookbuilding* process.

To measure the social economic impact of the issuance of the *Orange Sukuk* as well as the *Phase I and Phase II Bonds in 2025*, the *Orange Movement* has issued a verification report with the following results:

The post-issuance verification ensures that the issuances referred to herein are aligned with the broader *Orange Bonds Principles*:

**Principle 1:**

Gender-Responsive Capital Allocation

**Principle 2:**

Gender-Responsive Capacity and Diversity in Leadership

**Principle 3:**

Transparency in Investment Processes and Reporting

The study was conducted to assess and validate impact outcomes among PNM customers, with a total customer population of approximately 1,500,000. A nationwide random sampling approach was applied, and the survey was distributed to 1,794 customers selected proportionally across 38 provinces in Indonesia to ensure geographic representation.

Pengumpulan data menggunakan metodologi campuran, menggabungkan survei online yang didistribusikan melalui WhatsApp dan SMS dengan wawancara telepon yang dibantu oleh petugas survei. Total 489 tanggapan valid diperoleh dan dimasukkan dalam analisis. Pada tingkat kepercayaan 95%, hasil survei memiliki margin kesalahan diperkirakan sekitar  $\pm 4,4\%$ , dengan asumsi distribusi tanggapan yang konservatif ( $p = 0,5$ ).

Data collection employed a mixed-methods approach, combining online surveys distributed via WhatsApp and SMS with telephone interviews assisted by survey enumerators. A total of 489 valid responses were obtained and included in the analysis. At a 95% confidence level, the survey results have an estimated margin of error of approximately  $\pm 4.4\%$ , assuming a conservative response distribution ( $p = 0.5$ ).

### Distribusi Geografis Responden Geographic Distribution of Respondents

Wilayah Region	Persentase pelanggan PNM (PNM, 2024) Percentage of PNM Customers (2024)	Persentase Responden Percentage of Respondents
Jawa Java	58,6%	57,78%
Sumatra	26,7%	24,04%
Bali & Nusa Tenggara	6,5%	6,26%
Sulawesi	5,9%	6,87%
Kalimantan	2,0%	4,65%
Maluku & Papua	<1%	0,40%

Distribusi responden mencerminkan representasi geografis yang luas di seluruh Indonesia. Sebagian besar responden berada di Jawa (57,78%), diikuti oleh Sumatra (24,04%). Proporsi yang lebih kecil tercatat di Sulawesi (6,87%), Bali dan Nusa Tenggara (6,26%), serta Kalimantan (4,65%), sementara Maluku dan Papua (0,40%) hanya menyumbang porsi minimal dari sampel. Distribusi ini menunjukkan bahwa tanggapan survei sebagian besar terkonsentrasi di Jawa dan Sumatra, sesuai dengan konsentrasi populasi dan distribusi basis pelanggan PNM.

The respondent distribution reflects broad geographic representation across Indonesia. The majority of respondents are located in Java (57.78%), followed by Sumatra (24.04%). Smaller proportions are recorded in Sulawesi (6.87%), Bali and Nusa Tenggara (6.26%), and Kalimantan (4.65%), while Maluku and Papua (0.40%) contribute only a minimal share of the sample. This distribution indicates that survey responses are largely concentrated in Java and Sumatra, in line with population concentration and the distribution of PNM customer base.

### Keselarasan dengan Prinsip-prinsip Obligasi Orange Alignment with the Orange Bonds Principles

#### Penjelasan Kesesuaian dengan Prinsip 1: Alokasi Modal yang Ber-perspektif Gender

PNM menerapkan kriteria berbasis gender yang jelas, memprioritaskan dukungan bagi perusahaan yang dimiliki dan dipimpin oleh perempuan. PNM menawarkan solusi pembiayaan terintegrasi melalui berbagai produk dan layanan, dua di antaranya adalah program PNM Mekaar dan Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM).

Untuk Fase I dan II 2025, 100% dana dialokasikan melalui PNM Mekaar. PNM Mekaar adalah layanan pinjaman modal berbasis kelompok untuk perempuan kurang mampu yang merupakan wirausaha UMKM, dengan pendapatan per kapita maksimum US\$1,99 per hari. Selain penyaluran pembiayaan, PNM Mekaar juga memberikan bimbingan dan pelatihan dalam pengembangan kapasitas bisnis kepada pelanggan mereka yang merupakan wirausaha mikro. Kegiatan utama yang didanai melalui PNM Mekaar meliputi:

1. Pinjaman kelompok
2. Pinjaman usaha mikro
3. Pinjaman inklusi keuangan
4. Program pelatihan Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU)

#### Explanation of Alignment with Principle 1: Gender-Responsive Capital Allocation

PNM applies clearly defined gender-based criteria, prioritizing support for women-owned and women-led enterprises. The Company offers integrated financing solutions through a range of products and services, two of which are the PNM Mekaar program and the Micro Capital Service Unit (ULaMM).

For Phase I and II 2025, 100% of the proceeds were allocated through the PNM Mekaar program. PNM Mekaar is a group-based microfinance lending service for underprivileged women engaged in MSME activities, with a maximum per capita income of US\$1.99 per day. In addition to distributing financing, PNM Mekaar also provides guidance and training in business capacity development to their customers who are micro-entrepreneurs. The key activities financed through PNM Mekaar include:

1. Group-based lending
2. Micro Business Loan
3. Financial inclusion loans
4. Business Capacity Development (PKU) training programs



**Ringkasan Alokasi:**

Per Februari 2026, PNM telah mempertahankan alokasi 100% dari hasil penerbitan *Social Orange Sustainable Bonds I PNM Fase I (2025)*, *Social Orange Sustainable Sukuk Mudharabah I PNM Fase I (2025)*, dan *Social Orange Sustainable Sukuk Mudharabah I PNM Fase II (2025)*. Sebagai proyek yang memenuhi syarat di bawah Kerangka Kerja Obligasi Sosial dan *Orange*, PNM Mekaar menggunakan dana ini untuk membiayai proyek-proyek baru dan yang sudah ada dalam portofolio pembiayaan sosial PNM guna menghasilkan manfaat sosial yang nyata.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 18/2023 dan sejalan dengan Kerangka Kerja Pembiayaan Sosial PNM, perusahaan melaksanakan proses seleksi dan evaluasi yang ketat untuk portofolio dan *pipeline* pembiayaannya. Proses ini memastikan bahwa semua proyek yang didanai secara ketat mematuhi sektor-sektor yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kerangka kerja.

Rincian komprehensif mengenai Pelaporan Dampak dan Alokasi dijelaskan dalam Prinsip Obligasi *Orange 3 (OBP3)*, yang menetapkan persyaratan transparansi dan akuntabilitas berkelanjutan sepanjang masa berlaku instrumen.

**Allocation Summary:**

As of February 2026, PNM has maintained a 100% allocation of proceeds from the issuance of PNM Sustainable Orange Social Bonds I Phase I (2025), PNM Sustainable Orange Social Sukuk Mudharabah I Phase I (2025), and PNM Sustainable Orange Social Sukuk Mudharabah I Phase II (2025). As eligible projects under the Social and Orange Bonds Framework, PNM Mekaar utilizes these proceeds to finance both new and existing projects within PNM social financing portfolio, with the objective of generating tangible social benefits.

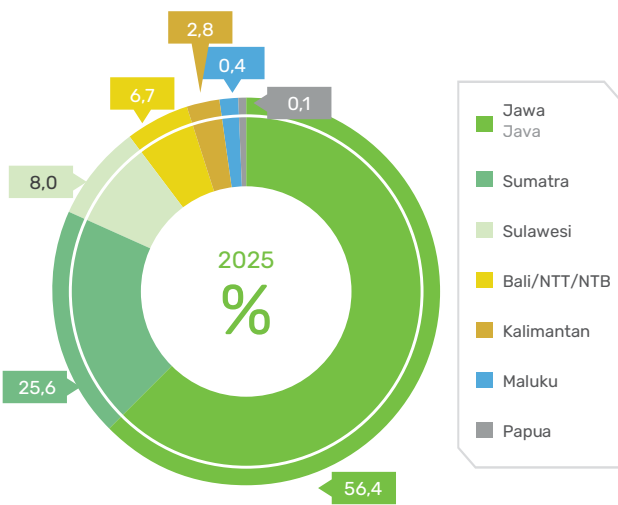
In accordance with OJK Regulation No. 18/2023 and in alignment with PNM Social Financing Framework, the Company implements a rigorous selection and evaluation process for its financing portfolio and pipeline. This process ensures that all funded projects strictly comply with the eligible sectors defined under the framework.

Comprehensive details on Impact and Allocation Reporting are outlined under Orange Bonds Principle 3 (OBP3), which establishes requirements for transparency and ongoing accountability throughout the life of the instrument.

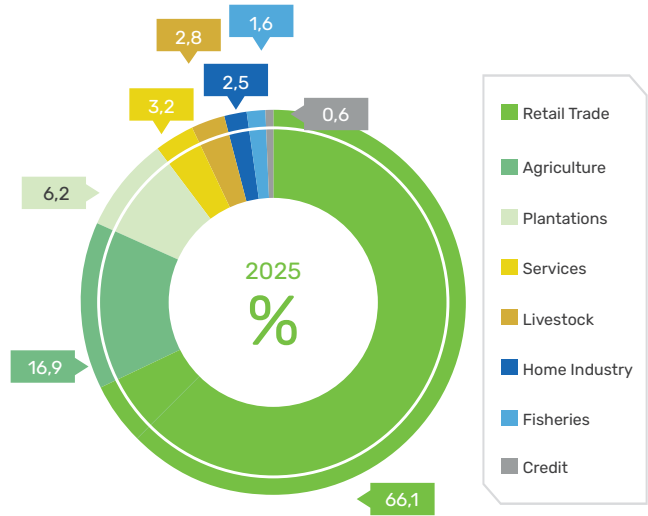
**Tabel Alokasi Rinci dari Dana yang Diperoleh**  
Detailed Allocation of Proceeds Table

Fase Phase	Jenis Pembiayaan Financing Type	Alokasi Pendapatan (Rp) Allocated Amount (IDR)	Persentase Percentage (%)	Pendapatan yang Belum Dialokasikan (Rp) Unallocated Proceeds (IDR)	Keselarasan dengan Kerangka Kerja Alignment with Frameworks
<b>Fase I</b> Phase I					
PNM Mekaar (Fase Obligasi I) PNM Mekaar (Bond Phase I)	Pembiayaan dan Pembiayaan Ulang Financing and Refinancing	1.000.000.000	100	N/A	Sesuai Aligned
PNM Mekaar (Sukuk Fase I) PNM Mekaar (Sukuk Phase I)	Pembiayaan dan Pembiayaan Ulang Financing and Refinancing	1.750.000.000	100	N/A	Sesuai Aligned
<b>Fase II</b> Phase II					
PNM Mekaar (Sukuk Fase II) PNM Mekaar (Sukuk Phase II)	Pembiayaan dan Pembiayaan Ulang Financing and Refinancing	1.020.000.000	100	N/A	Sesuai Aligned

Gambaran Grafis Alokasi dari Fase I dan Fase II  
Graphical Overview of Allocation of Proceeds from Phase I and II



Gambar 2: Distribusi Geografis Fase I dan II  
Chart 2: Geographic Distribution of Phase I and II



Gambar 3: Distribusi Sektor Fase I dan II  
Chart 3: Sector Distribution of Phase I and II

**Keselarasan dengan Prinsip 2:  
Kapasitas dan Keragaman Berbasis Gender dalam  
Kepemimpinan**

- Lebih dari 30% tim kepemimpinan (misalnya, Direksi, pejabat eksekutif, dan/atau Komite Investasi) adalah perempuan.
- Lebih dari 30% anggota tim yang bekerja pada fungsi inti *Orange Bonds* (misalnya strukturisasi, uji tuntas, pengelolaan portofolio, hubungan investor, dan/atau pelaporan) adalah perempuan
- Tim pimpinan dan/atau tim yang bekerja pada fungsi inti Obligasi *Orange* mencakup perempuan dan berasal dari etnis yang sama dengan populasi sasaran di satu atau lebih wilayah di mana hasil penjualan Obligasi *Orange* akan dialokasikan.

**Deskripsi kesesuaian dengan Prinsip 2**

Berdasarkan data institusional, PNM secara signifikan melampaui target untuk OBP 2b dan 2c, didorong oleh representasi perempuan sebesar 93,67% di divisi Mekaar dan tenaga kerja total yang 87,08% terdiri dari perempuan. Selain itu, PNM selaras dengan OBP 2a karena target keragaman *gender* di tingkat Dewan Komisaris melebihi target 30%.

- **Kesesuaian dengan Prinsip 2a**  
Per 31 Desember 2025, PNM telah memperkuat komitmennya terhadap keragaman kepemimpinan, dengan proporsi perempuan secara keseluruhan di organisasi meningkat menjadi 27,11%, naik secara stabil dari 25,51% pada 2024. Kemajuan ini mendukung tujuan institusional Prinsip OBP 2a, yang menekankan pentingnya representasi perempuan dan komunitas yang kurang terlayani dalam struktur kepemimpinan penerbit.

**Alignment with Principle 2:  
Gender-Responsive Capacity and Diversity in Leadership**

- More than 30% of the leadership team (e.g., Board of Directors, executive officers, and/or Investment Committee) are women.
- More than 30% of team members working in core Orange Bonds functions (e.g., structuring, due diligence, portfolio management, investor relations, and/or reporting) are women.
- The leadership team and/or teams working in core Orange Bonds functions include women and reflect the same ethnic background as the target population in one or more regions where the Orange Bonds proceeds are allocated.

**Description of Alignment with Principle 2**

Based on institutional data, PNM significantly exceeds the targets set under OBP 2b and 2c, driven by female representation of 93.67% within the Mekaar division and an overall workforce composition of 87.08% women. In addition, PNM is aligned with OBP 2a, as gender diversity at the Board of Commissioners level exceeds the 30% target threshold.

- **Alignment with Principle 2a**  
As of 31 December 2025, PNM has strengthened its commitment to leadership diversity, with the overall proportion of women within the organization increasing to 27.11%, up steadily from 25.51% in 2024. This progress supports the institutional objectives of OBP Principle 2a, which emphasize the importance of representation of women and underserved communities within the issuer's leadership structure.

Pertumbuhan ini terutama didorong oleh Dewan Komisaris, yang mencapai kesetaraan gender dengan tren kenaikan yang signifikan, meningkat dari 33,33% menjadi 50% pada periode pelaporan saat ini. Tingkat Kepala Departemen menunjukkan momentum positif, dengan representasi perempuan meningkat dari 25,45% menjadi 28,57%. Meskipun tingkat Kepala Divisi mengalami penyesuaian persentase kecil akibat jumlah total karyawan yang lebih besar, jumlah absolut perempuan dalam peran ini tetap stabil.

This growth has been primarily driven by the Board of Commissioners, which achieved gender parity with a significant upward trend, increasing from 33.33% to 50% in the current reporting period. At the Department Head level, positive momentum is observed, with female representation rising from 25.45% to 28.57%. While the Division Head level experienced a slight percentage adjustment due to a larger overall employee base, the absolute number of women in these roles remained stable.

Perubahan ini menunjukkan bahwa meskipun jalur karir untuk manajemen menengah hingga senior telah diperkuat dan kesetaraan telah tercapai di tingkat Departemen, pencapaiannya mendekati 30% dari persyaratan yang ditetapkan.

This change indicates that while career pathways for middle to senior management have been strengthened and parity has been achieved at the Department level, overall representation is approaching the 30% threshold set by the requirement.

Departemen Department	Per 31 Desember 2024 As of 31 December 2024			Per 31 Desember 2025 As of 31 December 2025		
	Total Karyawan Total Employees	Jumlah Karyawan Perempuan Number of Female Employees	Persentase Karyawan Perempuan Percentage of Female Employees	Total Karyawan Total Employees	Jumlah Karyawan Perempuan Number of Female Employees	Persentase Karyawan Perempuan Percentage of Female Employees
Direksi Board of Directors	6	1	16,67%	6	0	0%
Dewan Komisaris Board of Commissioners	6	2	33,33%	6	3	50%
Kepala Divisi Head of Division	23	6	26,08%	28	6	21,43%
Kepala Departemen Head of Department	110	28	25,45%	126	36	28,57%
<b>Jumlah Total</b>	<b>145</b>	<b>37</b>	<b>25,51%</b>	<b>166</b>	<b>45</b>	<b>27,11%</b>

- Kesesuaian dengan Prinsip 2b dan 2c**  
Per 31 Desember 2025, distribusi tenaga kerja PNM mencerminkan komitmen yang kuat terhadap operasional yang berperspektif *gender*, terutama di divisi Mekaar yang menerima 100% hasil dari Fase I dan II. Divisi Mekaar menjadi motor utama dampak gender, dengan perempuan menyumbang 93,67% dari 61.572 karyawan, meningkat 2.260 karyawan perempuan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

- Alignment with Principles 2b and 2c**  
As of 31 December 2025, PNM workforce distribution reflects a strong commitment to gender-responsive operations, particularly within the Mekaar division, which received 100% of the proceeds from Phase I and II. The Mekaar division serves as the primary driver of gender impact, with women accounting for 93.67% of its 61,572 employees, representing an increase of 2,260 female employees compared to previous years.

Selain itu, baik tingkat Kantor Pusat maupun Cabang menunjukkan representasi perempuan yang kuat, masing-masing sebesar 38,10% dan 44,47%, mencerminkan perekrutan baru 209 karyawan perempuan selama tahun tersebut. PNM melaporkan bahwa 0,02% tenaganya mengidentifikasi diri sebagai Penyandang Disabilitas (PwDs), dengan semua 17 orang berada di tingkat pejabat/staf.

In addition, both Head Office and Branch levels demonstrate strong female representation, at 38.10% and 44.47%, respectively, reflecting the recruitment of 209 new female employees during the year. PNM also reports that 0.02% of its workforce identifies as persons with disabilities (PwDs), with all 17 individuals positioned at the officer/staff level.



Akhirnya, tenaga kerja PNM didistribusikan secara strategis di seluruh kepulauan Indonesia, memastikan dampak yang benar-benar nasional dan memperkuat komitmen penerbit terhadap kesetaraan *gender* dan pengambilan keputusan investasi yang inklusif:

- Jawa: Tetap menjadi pusat operasional terbesar dengan 2.525 karyawan, mewakili sekitar 48% dari total tenaga kerja.
- Sumatra: Wilayah terbesar kedua dengan 1.485 karyawan, mewakili 28% dari tenaga kerja.
- Sulawesi dan Bali/Nusa Tenggara: Wilayah ini tetap memiliki representasi yang kuat dengan 438 dan 422 karyawan, masing-masing.
- Kalimantan, Maluku, dan Papua: Tenaga kerja sisanya tersebar di Kalimantan (240), Maluku (95), dan Papua (50), memastikan kehadiran PNM bahkan di wilayah terpencil di negara ini.

Untuk semakin memperkuat penerapan nilai-nilai tersebut secara kelembagaan, PNM mengadopsi Kebijakan Hak Asasi Manusia yang disetujui oleh Dewan Direksi pada Desember 2025. Komponen utama kebijakan ini meliputi mekanisme pelapor yang kuat, inisiatif kerja sama bipartit, dan komitmen khusus terhadap Uji Tuntas Hak Asasi Manusia (HRDD).

Keanekaragaman regional ini, dikombinasikan dengan tenaga kerja mayoritas perempuan dan kerangka kerja hak asasi manusia yang terstruktur, menunjukkan bahwa PNM tidak hanya memenuhi kuota gender tetapi juga secara aktif mendorong desentralisasi ekonomi. Dengan memastikan bahwa kesempatan kepemimpinan dan pekerjaan melampaui pusat utama di Jawa, PNM berhasil menyelaraskan pertumbuhan operasionalnya dengan dampak sosial yang terukur.

Furthermore, PNM workforce is strategically distributed across the Indonesian archipelago, ensuring a truly nationwide impact and reinforcing the issuer's commitment to gender equality and inclusive investment decision-making.

- Java: Remains the largest operational hub with 2,525 employees, representing approximately 48% of the total workforce.
- Sumatra: The second-largest region with 1,485 employees, accounting for 28% of the workforce.
- Sulawesi and Bali/Nusa Tenggara: These regions maintain strong representation, with 438 and 422 employees, respectively.
- Kalimantan, Maluku, and Papua: The remaining workforce is distributed across Kalimantan (240), Maluku (95), and Papua (50), ensuring PNM presence even in remote areas across the country.

To further strengthen the institutionalization of these values, PNM adopted a Human Rights Policy approved by the Board of Directors in December 2025. The key components of this policy include robust grievance mechanisms, bipartite collaboration initiatives, and a dedicated commitment to Human Rights Due Diligence (HRDD).

This regional diversity, combined with a predominantly female workforce and a structured human rights framework, demonstrates that PNM not only meets gender-related thresholds but also actively promotes economic decentralization. By ensuring that leadership and employment opportunities extend beyond key hubs in Java, PNM aligns its operational growth with measurable social impact.

Departemen Department	Per 31 Desember 2024 As of 31 December 2024			Per 31 Desember 2025 As of 31 December 2025		
	Total Karyawan Total Employees	Jumlah Karyawan Perempuan Number of Female Employees	Persentase Karyawan Perempuan Percentage of Female Employees	Total Karyawan Total Employees	Jumlah Karyawan Perempuan Number of Female Employees	Persentase Karyawan Perempuan Percentage of Female Employees
Kantor Pusat Head Office	1.557	591	37,95%	1.706	650	38,10% ▲
Cabang Branch	4.099	1.706	41,61%	4.174	1.856	44,47% ▲
UlaMM*	2.780	949	34,13%	2.588	810	31,30%
Mekaar	59.648	55.415	92,90%	61.572	57.675	93,67% ▲
<b>Jumlah Total</b>	<b>68.084</b>	<b>58.661</b>	<b>86,15%</b>	<b>70.040</b>	<b>60.991</b>	<b>87,08% ▲</b>

**Catatan:** 100% dari hasil penjualan Fase I dan II telah dialokasikan secara eksklusif untuk Mekaar; prioritas utama tetap pada perluasan berkelanjutan divisi dalam hal representasi *gender*.

**Note:** 100% of the proceeds from Phase I and II have been exclusively allocated to Mekaar; the primary focus remains on the continued expansion of the division in terms of gender representation.



## Kapasitas dan Keberagaman Gender dalam Kepemimpinan

Capacity and Gender Diversity in Leadership



\*PNM melampaui target untuk OBP 2b dan 2c, sementara melampaui persyaratan OBP 2a secara khusus melalui komposisi *gender* Dewan Komisaris (50% perempuan).

\*PNM exceeded targets for OBP 2b and 2c, while exceeding OBP 2a requirements specifically through the gender composition of the Board of Commissioners (50% female).

### Kesesuaian dengan Prinsip 3: Transparansi dalam Proses Investasi dan Pelaporan

- Transparansi dalam proses investasi untuk memastikan pendekatan berbasis *gender* terus diterapkan sesuai dengan Prinsip 1 dan 2, dengan memberikan kerangka kerja awal kepada investor pada saat penerbitan Obligasi *Orange*.

Informasi yang disediakan bagi investor pada saat penerbitan:

- Untuk memastikan penerapan pendekatan berbasis gender secara berkelanjutan sesuai dengan Prinsip 1 dan 2, memberikan kerangka kerja awal kepada investor pada saat penerbitan Obligasi *Orange* mengenai: Dampak yang diharapkan dari Obligasi *Orange*, proses pemilihan proyek, perusahaan, atau tujuan lain yang akan didanai oleh hasil penjualan Obligasi *Orange*, termasuk cara evaluasi konsistensi dengan Prinsip-prinsip tersebut; dan Bagaimana penggunaan dana Obligasi *Orange* akan dipantau selama masa berlaku obligasi untuk konsistensi dengan Prinsip 1, serta prinsip "tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan".
- Informasi spesifik yang disediakan untuk investor pada saat penerbitan harus mencakup hal-hal berikut: Kerangka kerja mengenai dampak yang diharapkan. Pendekatan evaluasi dan seleksi proyek. Pendekatan pengelolaan hasil (penerapan prinsip 'tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan' untuk memastikan pendekatan berbasis gender yang berkelanjutan).
- Melakukan konfirmasi tahunan mengenai dampak (*output*, hasil, dampak) yang dicapai oleh obligasi melalui wawancara, survei, atau metode lain untuk mengumpulkan data langsung dari sampel populasi sasaran dana obligasi (misalnya, perempuan, anak perempuan, atau individu lain yang mengalami hasil atau dampak terkait kesetaraan *gender*).

### Compliance with Principle 3: Transparency in Investment Processes and Reporting

- Transparency in the investment process to ensure a gender-based approach continues to be applied in accordance with Principles 1 and 2, by providing an initial framework to investors at the time of Orange Bonds issuance.

Information provided to investors at the time of issuance:

- To ensure the continued implementation of a gender-based approach in accordance with Principles 1 and 2, provide an initial framework to investors at the time of Orange Bonds issuance regarding: The expected impact of the Orange Bonds; the process for selecting projects, companies, or other purposes to be funded by the proceeds of the Orange Bonds sale, including how consistency with the Principles will be evaluated; and How the use of Orange Bonds proceeds will be monitored throughout the life of the bond for consistency with Principle 1, as well as the principle of "no significant adverse impacts."
- Specific information provided to investors at the time of issuance should include the following: The framework for the expected impact; The project evaluation and selection approach; The results management approach (application of the "no significant adverse impact" principle to ensure a sustainable gender-based approach).
- Conduct annual confirmation of the impact (output, outcome, impact) achieved by the bond through interviews, surveys, or other methods to collect data directly from a sample of the bond fund's target population (e.g., women, girls, or other individuals experiencing gender equality-related outcomes or impacts).

- Selama masa berlaku Obligasi *Orange*, menyediakan laporan tahunan kepada investor mengenai: Dampak kesetaraan gender yang dicapai menggunakan metrik yang dipisahkan berdasarkan *gender* (yaitu, metrik yang diukur, ditabulasi, dan disajikan secara terpisah berdasarkan gender); Dampak yang signifikan dan disengaja yang dialami oleh perempuan dan anak perempuan sebagai akibat dari penggunaan hasil penjualan Obligasi *Orange*.

### Penjelasan kesesuaian dengan Prinsip 3

- Keselarasan dengan Prinsip 3c:  
Transparansi dalam Pelaporan

Menggunakan pedoman pelaporan yang tercantum dalam dokumen ICMA "*Working Towards a Harmonized Framework for Impact Reporting for Social Bonds*", PNM melaporkan, sesuai dengan ketersediaan informasi, metrik keluaran/hasil/dampak yang relevan, yang dapat mencakup indikator-indikator berikut:

- Jumlah Total Pelanggan PNM Mekaar.
- Ukuran Pinjaman Rata-Rata.
- Demografi pelanggan PNM Mekaar.

Melalui hasil penerbitan *Social Orange Sustainable*, PNM membiayai total 855.344 nasabah (termasuk 376.926 nasabah baru) pada Fase I (Obligasi dan Sukuk), dan tambahan 255.792 nasabah (termasuk 146.319 nasabah baru) pada Fase II (Sukuk). Fase-fase tersebut mencatat ukuran pinjaman rata-rata sebesar IDR3,93 Juta (Fase I Obligasi dan Sukuk) dan IDR3,9 Juta (Fase II Sukuk).

Sesuai dengan Prinsip Obligasi *Orange* 3 (Transparansi dan Pelaporan), dampak PT Permodalan Nasional Madani telah dikonfirmasi melalui survei pelanggan akhir di seluruh Indonesia. Hasil tingkat pelanggan dilaporkan di bawah ini:

### Ringkasan dari Konfirmasi Dampak Pelanggan Akhir

495 pelanggan yang membeli produk atau layanan dari proyek atau perusahaan yang didanai oleh hasil penjualan Obligasi dan Sukuk telah mengonfirmasi dampak produk atau layanan tersebut melalui indikator-indikator kunci berikut:

- Throughout the term of the Orange Bonds, provide an annual report to investors on: The gender equality impact achieved using gender-disaggregated metrics (i.e., metrics measured, tabulated, and presented separately by gender); The significant and intended impact experienced by women and girls as a result of the use of Orange Bonds proceeds.

### Explanation of Alignment with Principle 3

- Alignment with Principle 3c:  
Transparency in Reporting

Using the reporting guidelines outlined in the ICMA document "*Working Towards a Harmonized Framework for Impact Reporting for Social Bonds*," PNM reports, subject to information availability, relevant output/outcome/impact metrics, which may include the following indicators:

- Total Number of PNM Mekaar Customers.
- Average Loan Amount.
- Demographics of PNM Mekaar Customers.

Through the proceeds of the Social Orange Sustainable issuance, PNM financed a total of 855,344 customers (including 376,926 new customers) in Phase I (Bonds and Sukuk), and an additional 255,792 customers (including 146,319 new customers) in Phase II (Sukuk). These phases recorded an average loan size of IDR3.93 million (Phase I Bonds and Sukuk) and IDR3.9 million (Phase II Sukuk).

In accordance with Orange Bonds Principle 3 (Transparency and Reporting), PT Permodalan Nasional Madani's impact has been confirmed through end-customer surveys across Indonesia. Customer-level results are reported below:

### Summary of End-Customer Impact Confirmation

495 customers who purchased products or services from projects or companies funded by the proceeds of Bond and Sukuk sales have confirmed the impact of those products or services through the following key indicators:



**Ketersediaan Produk/Layanan**

Product/Service Availability



88% pelanggan menilai produk/layanan sebagai 'Mudah diakses', termasuk 72% yang menggambarkannya sebagai 'Sangat Mudah'.

"Aksesibilitas" menilai seberapa mudah pelanggan dapat mengakses produk atau layanan perusahaan, terutama di daerah terpencil atau yang kurang terlayani. Hal ini mencakup ketersediaan fisik, jarak titik distribusi, aksesibilitas *online*, inklusivitas bahasa, dan kemudahan pemesanan atau pembelian.

88% of customers rate the products/services as "Easy to Access," including 72% who describe them as "Very Easy."

"Accessibility" assesses how easily customers can access a company's products or services, especially in remote or underserved areas. This includes physical availability, distance to distribution points, online accessibility, language inclusivity, and the ease of ordering or purchasing.

**Keterjangkauan Produk/Layanan**

Product/Service Affordability



94% pelanggan menganggap produk/layanan tersebut 'terjangkau', termasuk 63% yang menggambarkannya sebagai 'sangat terjangkau'.

"Keterjangkauan" menilai apakah produk atau layanan perusahaan dihargai secara wajar dan dapat diakses oleh pelanggan dari berbagai tingkat pendapatan.

Hal ini mencakup keseimbangan antara biaya dan nilai yang diberikan, memastikan bahwa produk/layanan esensial tidak terlalu mahal bagi audiens target, terutama di segmen berpenghasilan rendah.

94% of customers consider the products/services to be "Affordable," including 63% who describe them as "Very Affordable."

"Affordability" assesses whether a company's products or services are priced reasonably and are accessible to customers across different income levels.

This includes balancing cost with the value provided, ensuring that essential products/services are not prohibitively expensive for the target audience, especially those in lower-income segments.





### Kualitas Produk/Layanan

Product/Service Quality



Responden  
Median

94% pelanggan menilai produk/layanan sebagai 'Kualitas Tinggi', termasuk 69% yang menilai sebagai 'Kualitas Sangat Baik'.

"Kualitas" menilai persepsi pelanggan terhadap standar penawaran perusahaan.

Hal ini mencakup ketahanan, fungsionalitas, keandalan, dan kesesuaian dengan fitur yang diiklankan. Produk/layanan berkualitas tinggi secara konsisten memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan, berkontribusi pada kepuasan keseluruhan dan penggunaan

94% of customers rate the products/services as "High Quality," including 69% who consider them to be of "Very High Quality."

"Quality" assesses customers' perceptions of the standard of a company's offerings.

This includes durability, functionality, reliability, and alignment with advertised features. High-quality products/services consistently meet or exceed customer expectations, contributing to overall satisfaction and repeat usage.

### Dampak pada Komunitas & Lingkungan

Impact on Communities & The Environment



Responden  
Median

90% pelanggan percaya bahwa 'Produk/Layanan bermanfaat bagi Komunitas atau Lingkungan', termasuk 74% yang menganggap 'Layanan sangat berdampak'.

"Dampak pada komunitas dan lingkungan" mengevaluasi bagaimana pelanggan memandang dampak yang lebih luas dari produk atau layanan perusahaan terhadap komunitas dan lingkungan.

Hal ini mencakup faktor-faktor seperti penggunaan bahan berkelanjutan, promosi praktik etis, dukungan terhadap ekonomi lokal, dan kontribusi terhadap konservasi lingkungan atau kesejahteraan sosial.

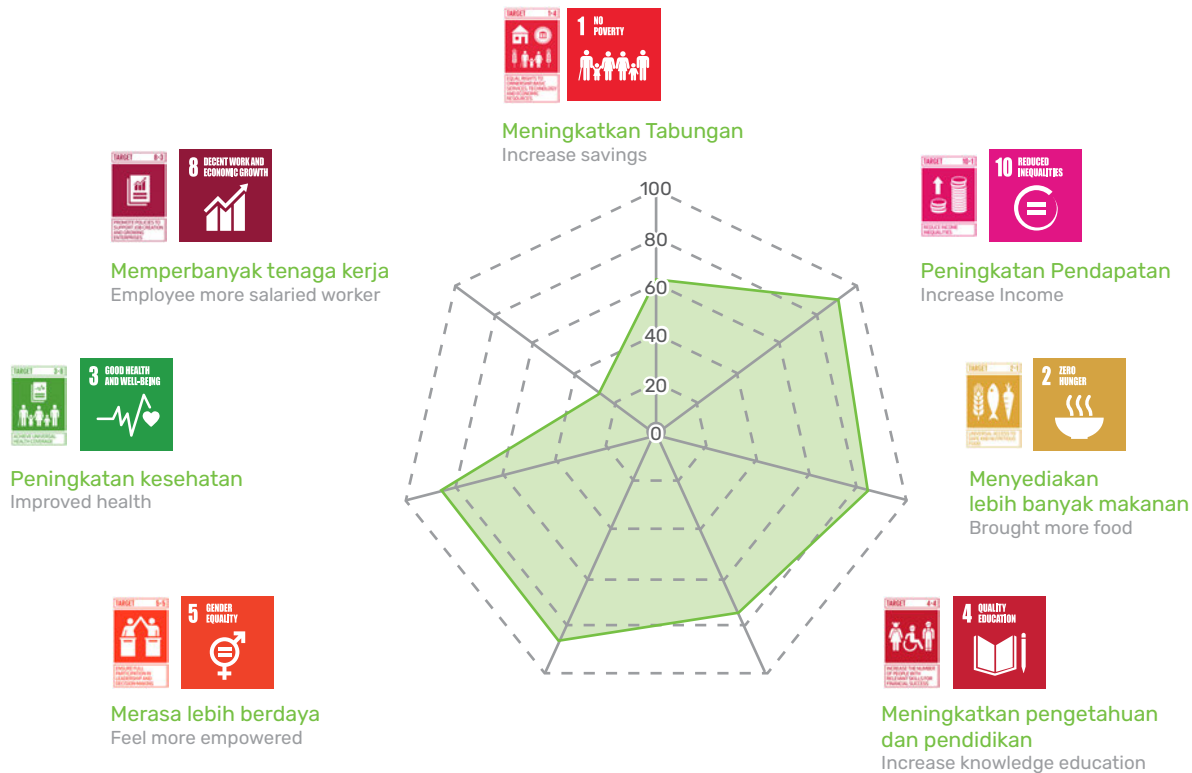
90% of customers believe that the "Products/Services benefit Communities or the Environment," including 74% who consider the "Services to have a very strong impact."

"Impact on communities and the environment" evaluates how customers perceive the broader effects of a company's products or services on society and the environment.

This includes factors such as the use of sustainable materials, promotion of ethical practices, support for local economies, and contributions to environmental conservation or social well-being.




Konfirmasi Dampak: Hasil SDG Multidimensi  
Impact Confirmation: Multidimensional SDG Outcomes

% Responden yang menyatakan adanya dampak hasil  
% of Respondents claiming impact outcome



TPB/SDGs	Dimensi Dampak yang Dilaporkan Dimensions of Reported Impact	Tingkat Verifikasi Penerima Manfaat Beneficiary Verification Rate	Sub-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) Sustainable Development Goals (SDG) Sub-targets
	Peningkatan Pendapatan Increased Income	91%	SDG 10.1: Mempertahankan pertumbuhan pendapatan kelompok terbawah 40% populasi SDG 10.1: Sustain income growth of the bottom 40% of the population
	Perempuan melaporkan merasa berdaya Women reported feeling empowered	86%	SDG 5.5: Memastikan perempuan memiliki keikutsertaan dan kesempatan yang setara SDG 5.5: Ensure women's full and effective participation and equal opportunities
	Peningkatan kesehatan/lebih baik Improved health/better access to healthcare	86%	SDG 3.8: Memastikan akses ke layanan kesehatan esensial berkualitas SDG 3.8: Ensure access to quality essential healthcare services
	Menyediakan lebih banyak makanan Brought more food	85%	SDG 2.1: Memastikan akses ke makanan yang aman, bergizi, dan cukup SDG 2.1: Ensure access to safe, nutritious and sufficient food



TPB/SDGs	Dimensi Dampak yang Dilaporkan Dimensions of Reported Impact	Tingkat Verifikasi Penerima Manfaat Beneficiary Verification Rate	Sub-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) Sustainable Development Goals (SDG) Sub-targets
	Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan Increase skill and knowledge	74%	SDG 4.4: Meningkatkan jumlah pemuda dan dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan SDG 4.4: Increase the number of youth and adults with relevant skills
	Meningkatkan tabungan Increase savings	65%	SDG 1.4: Memastikan akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi dan layanan keuangan SDG 1.4: Ensure equal access to economic resources and financial services
	Memperbanyak tenaga kerja dengan gaji tetap Employ more people with fixed salary	29%	SDG 8.3: Mendukung kegiatan produktif dan penciptaan pekerjaan yang layak SDG 8.3: Support productive activities and decent job creation

**Catatan:** Hasil didasarkan pada tanggapan survei yang dilaporkan sendiri oleh pelanggan. Indikator SDG hanya digunakan untuk keselarasan konseptual. Hasil tidak mewakili pengukuran resmi indikator SDG, statistik nasional, atau atribusi kausal.

**Note:** Results are based on customers' self-reported survey responses. SDG indicators are used for conceptual alignment only. The results do not represent official SDG indicator measurements, national statistics, or causal attribution.

### Ringkasan Hasil Survei Konfirmasi Dampak

Survei konfirmasi dampak menggambarkan dampak sosial-ekonomi dari layanan pembiayaan dan dukungan PNM, berdasarkan masukan dari sekitar 500 klien perempuan. Hasil survei konfirmasi dampak menunjukkan bahwa penerbitan Obligasi dan Sukuk PNM mendorong perubahan sistemik dan transformatif *gender* di beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama peningkatan stabilitas keuangan, dengan 91% responden melaporkan peningkatan pendapatan dan 65% mencatat perbaikan dalam tabungan.

Dengan memanfaatkan "lensa *Orange*", data menunjukkan pergeseran mendalam dari akses keuangan dasar menuju ketahanan holistik.

#### 1. Mendorong Ketahanan Ekonomi (SDG 1.4)

Tujuan penerbitan obligasi dan sukuk dalam mengurangi kemiskinan didukung kuat oleh data, dengan 91% responden mengonfirmasi peningkatan pendapatan dan 65% melaporkan peningkatan tabungan. Korelasi tinggi ini menunjukkan bahwa modal yang disediakan tidak hanya digunakan untuk likuiditas jangka pendek tetapi berhasil membangun keamanan ekonomi rumah tangga jangka panjang.

### Summary of Impact Confirmation Survey Results

The impact confirmation survey illustrates the socio-economic impact of PNM financing services and support, based on feedback from approximately 500 female clients. The results indicate that the issuance of PNM Bonds and Sukuk has driven systemic and gender-transformative changes across several Sustainable Development Goals (SDGs), particularly in improving financial stability, with 91% of respondents reporting increased income and 65% noting improved savings.

By applying an "Orange Lens," the data reveals a meaningful shift from basic financial access toward holistic resilience

#### 1. Driving Economic Resilience (SDG 1.4)

The objective of bond and sukuk issuance in alleviating poverty is strongly supported by the data, with 91% of respondents confirming increased income and 65% reporting higher savings. This strong correlation suggests that the capital provided is not only used for short-term liquidity but also effectively contributes to long-term household economic security.



**2. Kesejahteraan Holistik dan Keamanan Pangan (SDGs 2.1 & 3.8)**

Manfaat sosial dari penerbitan ini tercermin dari peningkatan signifikan dalam standar hidup dasar. 85% pelanggan melaporkan peningkatan keamanan pangan, dan 86% mengonfirmasi hasil kesehatan yang lebih baik atau akses yang lebih baik ke layanan kesehatan. Angka-angka ini membuktikan bahwa layanan keuangan PNM memungkinkan rumah tangga untuk memprioritaskan investasi modal manusia yang esensial, mendorong mereka naik ke tingkat yang lebih tinggi dalam rantai nilai kesejahteraan.

**3. Transformasi dan Pemberdayaan Gender (SDG 5.5)**

Yang krusial bagi kelas aset *Orange*, 86% responden perempuan melaporkan adanya peningkatan rasa pemberdayaan melalui produk dan layanan PNM. Indikator ini melampaui sekadar inklusi keuangan, karena menunjukkan bahwa penerbitan tersebut secara efektif berkontribusi dalam mengatasi hambatan struktural terhadap kesetaraan gender serta memperkuat kapasitas dan kemandirian perempuan di kawasan ASEAN.

**4. Modal Manusia dan Penguasaan Keterampilan (SDG 4.4 & 8.3)**

Pengembangan kapasitas tetap menjadi salah satu pilar utama dalam model PNM, dengan 74% peserta melaporkan adanya peningkatan yang terukur dalam keterampilan dan pengetahuan. Sementara itu, penciptaan lapangan kerja formal dengan skema gaji tetap masih berada pada tingkat yang relatif moderat, yaitu 29%. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan peran PNM sebagai katalisator bagi pertumbuhan kewirausahaan serta proses formalisasi sektor informal, melampaui peran sebagai sekadar penyedia pembiayaan mikro konvensional.

**2. Holistic Well-being and Food Security (SDGs 2.1 & 3.8)**

The social benefits of the issuance are reflected in significant improvements in basic living standards. 85% of customers reported improved food security, while 86% confirmed better health outcomes or improved access to healthcare services. These figures demonstrate that PNM financial services enable households to prioritize essential human capital investments, helping them move up the welfare value chain.

**3. Gender Transformation and Empowerment (SDG 5.5)**

Crucial to the Orange asset class, 86% of female respondents reported increased empowerment through PNM products and services. This indicator goes beyond financial inclusion, showing that the issuance effectively contributes to addressing structural barriers to gender equality and strengthening women's capacity and independence across the ASEAN region.

**4. Human Capital and Skills Development (SDGs 4.4 & 8.3)**

Capacity building remains a key pillar of PNM model, with 74% of participants reporting measurable improvements in skills and knowledge. Meanwhile, formal job creation with fixed salaries remains relatively moderate at 29%. Overall, these findings reinforce PNM role as a catalyst for entrepreneurial growth and the formalization of the informal sector, going beyond the role of a conventional microfinance provider.

02

# Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan

*Sustainability  
Performance Overview*





# Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan

## Sustainability Performance Overview

### Kinerja Aspek Ekonomi [OJK B.1]

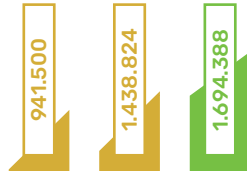
#### Economic Performance [OJK B.1]

#### Pinjaman yang Diberikan Loans



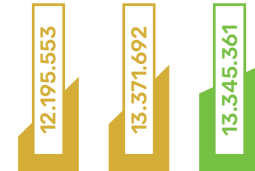
2023 2024 2025  
dalam jutaan rupiah  
in million IDR

#### Pembiayaan Modal Capital Financing



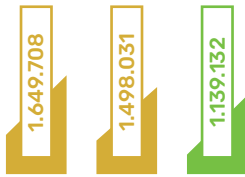
2023 2024 2025  
dalam jutaan rupiah  
in million IDR

#### Pendapatan Bunga dan Syariah - Bersih Interest and Sharia Revenues - Net



2023 2024 2025  
dalam jutaan rupiah  
in million IDR

#### Laba Tahun Berjalan Income for the Year

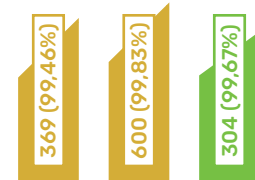


2023 2024 2025  
dalam jutaan rupiah  
in million IDR

#### Kuantitas Produk/Jasa Product/Service Quantity

- | Year   | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------|------|------|
| 2 (dua):<br>2 (two):   |      |      |      |
| 1. Jasa Pembiayaan (PNM Mekaar dan PNM ULaMM)<br>Financing Services (PNM Mekaar and PNM ULaMM) |      |      |      |
| 2. Jasa Lainnya<br>Other Services  |      |      |      |

#### Pelibatan Pemasok Lokal atau Dalam Negeri (Barang dan Jasa) Engagement of Local or Domestic Suppliers (Products and Services)



2023 2024 2025  
dalam jutaan rupiah  
in million IDR

### Produk Ramah Lingkungan \*)

#### Environmentally Friendly Products\*)



2023  
Miliar Rupiah  
Millions of Rupiah



2024



2025



2023  
Miliar Rupiah  
Millions of Rupiah



2024



2025

\*) Produk ramah lingkungan yang dimaksud didefinisikan sebagai produk keuangan berkelanjutan yang disalurkan kepada UMKM.

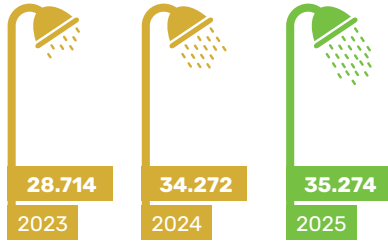
\*) The environmentally friendly products referred to herein are defined as sustainable financial products extended to MSMEs.



**Kinerja Aspek Lingkungan [OJK B.2]**  
Environmental Performance [OJK B.2]

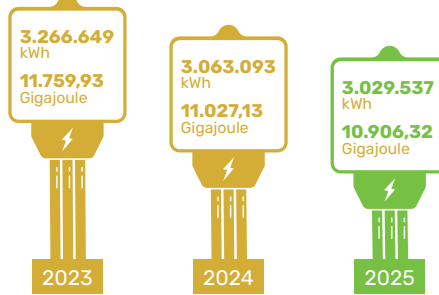
**Kinerja Aspek Lingkungan [OJK B.2]**  
Environmental Performance [OJK B.2]

**Penggunaan Air PDAM\*)**  
Water Usage\*)

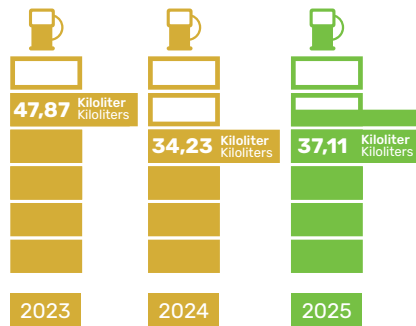


Meter Kubik  
Cubic Meter

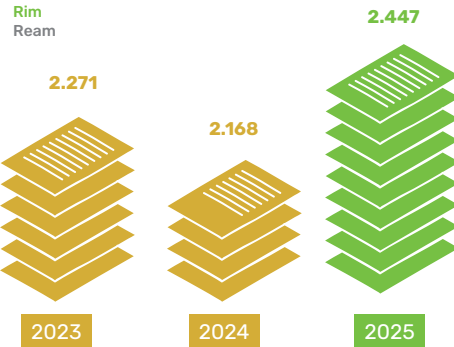
**Penggunaan Energi Listrik\*)**  
Electricity Consumption\*)



**Penggunaan BBM\*)**  
Fuel Consumption\*)



**Penggunaan Kertas\*)**  
Paper Usage\*)



**Emisi Gas Rumah Kaca dari Penggunaan BBM (Cakupan 1)**  
Greenhouse Gas Emissions from Fuel Consumption (Scope 1)

**103 TonCO<sub>2</sub>eq**

**Penambahan (Pengurangan) Emisi Gas Rumah Kaca dari Penggunaan BBM (Cakupan 1)**  
Increase (Decrease) in Greenhouse Gas Emissions from Fuel Consumption (Scope 1)

**8 TonCO<sub>2</sub>eq**

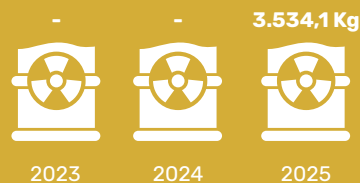
**Emisi Gas Rumah Kaca dari Penggunaan Listrik (Cakupan 2)**  
Greenhouse Gas Emissions from Electricity Use (Scope 2)

**2.636 TonCO<sub>2</sub>eq**

**Penambahan (Pengurangan) Emisi Gas Rumah Kaca dari Penggunaan Listrik (Cakupan 2)**  
Increase (Decrease) in Greenhouse Gas Emissions from Electricity Use (Scope 2)

**(225) TonCO<sub>2</sub>eq**

**Penambahan (Pengurangan) Limbah B3**  
Increase (Decrease) in Waste B3



\*) Tahun 2022 dan 2023 belum dilakukan perhitungan sehingga tidak tersedia data penambahan (pengurangan) tahun 2023 dan 2024.

\*) Calculations for 2022 and 2023 have not yet been performed, so data on increases (decreases) for 2023 and 2024 is not available.

**Penambahan (Pengurangan) Air Limbah**  
Increase (Decrease) in Wastewater



\*) Tahun 2022 belum dilakukan perhitungan sehingga tidak tersedia data penambahan (pengurangan) tahun 2023.

\*) Calculations for 2022 have not yet been performed, so data on the increase (decrease) for 2023 is not available.



**Pelestarian Keanekaragaman Hayati**  
Biodiversity Conservation



\*) Data Kantor Pusat

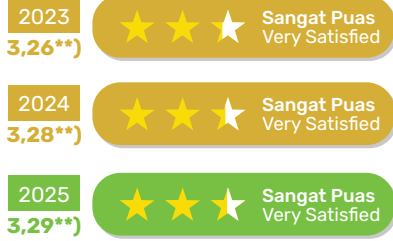
\*) Head Office Data

**Kinerja Aspek Sosial [OJK B.3]**  
Social Aspect Performance [OJK B.3]

**Kinerja Aspek Sosial [OJK B.3]**  
Social Aspect Performance [OJK B.3]

**Kepuasan Pegawai**  
Employee Satisfaction

Persen  
Percent

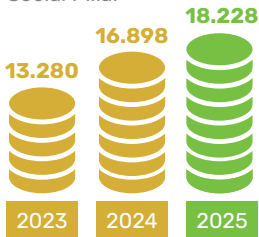


**Kecelakaan Kerja (Fatal)**  
Work Accident (Fatalities)



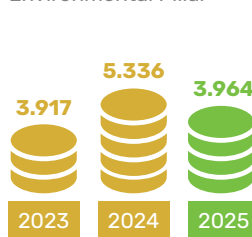
**Penyaluran Dana TJSL**  
CSR Fund Distribution

**Pilar Sosial**  
Social Pillar



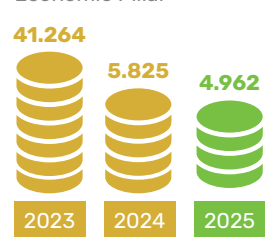
Jutaan Rupiah  
Millions of Rupiah

**Pilar Lingkungan**  
Environmental Pillar



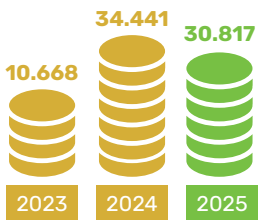
Jutaan Rupiah  
Millions of Rupiah

**Pilar Ekonomi**  
Economic Pillar



Jutaan Rupiah  
Millions of Rupiah

**Pembiayaan Program PUMK & Kegiatan TJSL Lainnya**  
Financing under the PUMK Program & Other CSR Activities



Jutaan Rupiah  
Millions of Rupiah

**Mitra Binaan**  
Fostered Partner



Perusahaan atau Mitra  
Company or Partner

**Pengaduan Nasabah\*)**  
Customer Complaint\*)

Jumlah Pengaduan  
Total of Complaints



**Kepuasan Nasabah**  
Customer Satisfaction

%



\*) Berdasarkan data via APPL OJK.

\*\*) Sesuai standar penilaian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Holding BUMN Ultra Mikro.

\*) Based on data obtained via the OJK APPL application.

\*\*) In accordance with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk's assessment standards as the Ultra Micro SOE Holding.



03

# Penjelasan Direksi

*Statement of  
the Board of Directors*







# Penjelasan Direksi [GRI 2-22][OJK D.1]

## Statement of The Board of Directors [GRI 2-22][OJK D.1]



**Arief Mulyadi**  
Direktur Utama  
President Director



## Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali mencatatkan kinerja yang baik sepanjang tahun 2025. Di tengah dinamika dan tantangan perekonomian nasional, Perusahaan mampu mempertahankan pertumbuhan yang sehat, berkualitas, dan berkelanjutan.

Sepanjang tahun buku ini, PNM terus memperkuat fundamental bisnis melalui peningkatan kualitas pembiayaan, pengelolaan risiko yang pruden, serta perluasan akses layanan kepada pengusaha ultra mikro di berbagai wilayah Indonesia. Komitmen terhadap pengembangan pembiayaan berbasis syariah dan inovasi pendanaan berkelanjutan turut memperkokoh struktur permodalan serta menegaskan arah transformasi Perusahaan menuju lembaga pembiayaan yang tangguh dan adaptif.

Lebih dari sekadar pencapaian kinerja keuangan, kami meyakini bahwa kekuatan utama PNM terletak pada konsistensi dalam menjalankan misi pemberdayaan, khususnya bagi perempuan prasejahtera. Melalui pendampingan usaha dan penguatan literasi keuangan, Perusahaan berupaya memastikan bahwa pertumbuhan bisnis berjalan seiring dengan terciptanya dampak sosial yang nyata, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

## **Pertumbuhan Lapangan Usaha Pembiayaan UMKM Tahun 2025** MSME Financing Sector in 2025

Pada tahun 2025, lapangan usaha pembiayaan kepada sektor UMKM menunjukkan pertumbuhan yang tetap solid di tengah dinamika ekonomi global yang menantang. Ketahanan perekonomian nasional yang tumbuh sebesar 5,11% berdasarkan data Badan Pusat Statistik menjadi fondasi penting bagi peningkatan aktivitas usaha mikro dan kecil. Stabilitas konsumsi domestik, terkendalnya inflasi, serta dukungan kebijakan fiskal dan moneter turut menciptakan ruang ekspansi bagi penyaluran pembiayaan, khususnya pada segmen ultra mikro dan mikro.

Dari sisi struktur pembiayaan, peningkatan akses permodalan UMKM didorong oleh optimalisasi program Kredit Usaha Rakyat serta pertumbuhan kredit UMKM perbankan yang tetap positif. Kebijakan yang pro-UMKM, termasuk perluasan subsidi bunga dan penjaminan kredit, berkontribusi terhadap meningkatnya kepercayaan lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan. Di saat yang sama, kualitas pembiayaan relatif terjaga, tercermin dari rasio pembiayaan bermasalah yang terkendali sebagaimana dilaporkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Secara sektoral, pertumbuhan pembiayaan UMKM terutama terjadi pada sektor perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, makanan dan minuman, serta jasa berbasis ekonomi kreatif. Digitalisasi proses bisnis dan pemanfaatan platform daring memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan kebutuhan modal kerja dan investasi. Tren ini menunjukkan

## Dear Shareholders and Stakeholders,

We would like to convey our gratitude to God Almighty for His grace and blessings, which allowed PT Permodalan Nasional Madani (PNM) to once again record a good performance throughout 2025. Amidst the dynamics and challenges of the national economy, the Company has successfully maintained sound, high-quality, and sustainable growth.

Throughout this fiscal year, PNM continuously strengthened its business fundamentals by enhancing financing quality, implementing prudent risk management, and expanding service access for ultra-micro entrepreneurs across various regions of Indonesia. Our commitment to developing Sharia-based financing and sustainable funding innovations has further fortified our capital structure and reaffirmed the Company's transformation toward becoming a resilient and adaptive financing institution.

Beyond financial performance, we believe that PNM core strength lies in our consistency in carrying out our empowerment mission, particularly for underprivileged women. Through business assistance and the strengthening of financial literacy, the Company strives to ensure that business growth goes hand-in-hand with creating a tangible, inclusive, and sustainable social impact for the community.

In 2025, the financing sector for the MSME (Micro, Small, and Medium Enterprises) segment showed solid growth despite challenging global economic dynamics. The resilience of the national economy, which grew by 5.11% according to data from the Statistics Indonesia (BPS), served as a vital foundation for the increase in micro and small business activities. Stable domestic consumption, controlled inflation, and supportive fiscal and monetary policies created expansionary room for financing distribution, particularly within the ultra-micro and micro segments.

In terms of financing structure, increased access to MSME capital was driven by the optimization of the People's Business Credit (KUR) program and the continued positive growth of bank-led MSME credit. Pro-MSME policies, including expanded interest subsidies and credit guarantees, contributed to rising confidence among financial institutions in loan disbursement. Simultaneously, financing quality remained relatively stable, as reflected in the controlled non-performing loan (NPL) ratios reported by the Financial Services Authority (OJK).

Sectorally, growth in MSME financing occurred primarily in wholesale and retail trade, processing industries, food and beverage, and creative economy-based services. The digitalization of business processes and the utilization of online platforms expanded market access while increasing the need for working capital and investment. This trend demonstrates

bahwa UMKM semakin adaptif terhadap perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi, sehingga mendorong permintaan pembiayaan yang lebih variatif dan produktif.

Secara keseluruhan, perkembangan lapangan usaha pembiayaan UMKM pada 2025 mencerminkan fondasi ekonomi kerakyatan yang semakin kuat dan inklusif. Sinergi antara pemerintah, otoritas keuangan, dan lembaga pembiayaan berhasil menjaga momentum pertumbuhan sekaligus meningkatkan kualitas pembiayaan. Dengan demikian, sektor ini tidak hanya berperan sebagai penopang stabilitas ekonomi nasional, tetapi juga sebagai penggerak utama penciptaan lapangan kerja dan penguatan struktur ekonomi domestik yang berkelanjutan.

that MSMEs are becoming increasingly adaptive to changing consumer behavior and technological developments, thereby driving more varied and productive demand for financing.

Overall, the development of the MSME financing sector in 2025 reflected an increasingly strong and inclusive grassroots economic foundation. Synergy between the government, financial authorities, and financing institutions successfully maintained growth momentum while improving financing quality. Consequently, this sector serves not only as a pillar of national economic stability but also as a primary driver for job creation and the strengthening of a sustainable domestic economic structure.

## PNM dan Keuangan Berkelanjutan PNM and Sustainable Finance

Sebagai emiten, PNM melaksanakan penerapan keuangan berkelanjutan sesuai ketentuan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Regulasi tersebut menegaskan bahwa sektor jasa keuangan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Bagi PNM, kepatuhan terhadap ketentuan ini tidak hanya merupakan kewajiban regulatif, tetapi juga bagian integral dari arah dan strategi bisnis Perusahaan.

PNM meyakini bahwa keberhasilan usaha tidak semata diukur dari pencapaian kinerja keuangan, melainkan juga dari kontribusi nyata terhadap pelestarian lingkungan dan pemberdayaan sosial. Oleh karena itu, seluruh aktivitas usaha, mulai dari pembiayaan, penyertaan modal, hingga jasa manajemen dan kemitraan, dijalankan dengan mengedepankan prinsip investasi bertanggung jawab. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap keputusan bisnis mempertimbangkan aspek tata kelola, sosial, dan lingkungan, sekaligus memperkuat pengelolaan risiko serta menjaga kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

Melalui program unggulannya, PNM Mekaar, Perusahaan memperluas akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi pengusaha ultra mikro, khususnya perempuan prasejahtera. Dukungan tersebut tidak hanya membuka peluang usaha dan meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal. Dengan jaringan layanan yang tersebar luas hingga ke berbagai pelosok daerah, PNM terus memperkuat perannya dalam memperluas inklusi keuangan, mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta memastikan bahwa prinsip keuangan berkelanjutan terimplementasi secara nyata dalam setiap lini operasional Perusahaan.

As a reporting entity, PNM implements sustainable finance practices in accordance with OJK Regulation Number 51/2017. This regulation underscores the strategic role of the financial services sector in driving economic growth that harmonizes economic, social, and environmental interests. For PNM, compliance is more than a regulatory mandate; it is a core pillar of our long-term business strategy.

We believe that true corporate success is measured not only by financial benchmarks but by our tangible contribution to environmental stewardship and social empowerment. Consequently, our entire business spectrum, from financing and equity participation to management services and partnerships, is guided by the principles of responsible investment. This approach ensures that every business decision integrates ESG (Environmental, Social, and Governance) factors, thereby strengthening our risk management and safeguarding our long-term business continuity.

Through our flagship PNM Mekaar program, we continue to broaden access to seamless and affordable financing for ultra-micro entrepreneurs, with a primary focus on underprivileged women. This support does more than unlock business potential and bolster household economic capacity; it serves as a powerful catalyst for local job creation. Leveraging a service network that reaches the country's most remote regions, PNM remains committed to advancing financial inclusion and bridging regional disparities, ensuring that the principles of sustainable finance are deeply embedded in every facet of our operations.





## Kebijakan PNM untuk Merespons Tantangan dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan PNM Policy in Addressing Sustainability Strategy Challenges

Strategi keberlanjutan PNM dirumuskan melalui kerangka *Sustainability House* yang menjadi fondasi penerapan praktik ESG di seluruh lini bisnis. Kerangka ini diturunkan dari visi Perusahaan untuk menjadi lembaga keuangan terkemuka melalui pelayanan, pemberdayaan, dan penciptaan nilai tambah secara berkelanjutan bagi pengusaha ultra mikro, mikro, dan kecil. Tiga sasaran strategis yang dibangun PNM ditopang oleh pilar lingkungan, sosial, serta tata kelola dan ekonomi, yang diimplementasikan selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan budaya BRILiaN Way PNM. Komitmen tersebut juga mengacu pada POJK No. 51/POJK.03/2017 serta arahan BP BUMN melalui Surat No. S-468/MBU/09/2024 yang menegaskan integrasi aspek ESG dalam perencanaan dan penganggaran perusahaan.

Pada pilar lingkungan, PNM merespons tantangan perubahan iklim dan risiko lingkungan melalui penguatan tata kelola serta pengelolaan dampak operasional secara terukur. Perseroan menjalankan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan, pengelolaan sanitasi, perlindungan ekosistem pesisir dan darat, serta pengolahan limbah yang memiliki nilai ekonomi. Di sisi internal, PNM melakukan pengukuran emisi dan pemetaan risiko iklim sebagai bagian dari manajemen risiko terintegrasi, termasuk penyusunan *disruption risk assessment*, pemetaan potensi bencana, serta penetapan kebijakan *business continuity* dan tanggap darurat guna memastikan ketahanan operasional dalam menghadapi risiko fisik maupun risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Komitmen tersebut selaras dengan dukungan PNM terhadap target *Net Zero Emission* (NZE) Indonesia 2060, sejalan dengan visi *Holding Ultra Mikro* yang dipimpin oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dalam kerangka kolaborasi strategis, PNM bersama PLN Icon Plus melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) antara lain melalui penanaman 1.000 pohon sebagai kontribusi nyata terhadap pengurangan emisi dan pemulihan lingkungan. Sinergi ini mencerminkan peran PNM dalam mendorong ekonomi hijau di mana pembiayaan ultra mikro tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan sebagai bagian integral dari strategi jangka panjang Perseroan.

Sebagai langkah konkret pengurangan emisi dari aktivitas operasional, PNM juga menghadirkan armada kendaraan listrik bagi para *Account Officer* melalui kolaborasi dengan PLN Icon Plus. Inisiatif bertajuk PNM Green Move: *Empower the Future* ini menjadi simbol komitmen Perseroan dalam mendukung transisi energi bersih nasional sekaligus meningkatkan efisiensi mobilitas lapangan. Penggunaan kendaraan listrik tidak hanya menekan jejak karbon operasional, tetapi juga menunjukkan transformasi menuju praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan. Melalui berbagai langkah tersebut, PNM menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi ultra mikro berjalan selaras dengan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan pencapaian NZE 2060.

PNM sustainability strategy is anchored in the “Sustainability House” framework, which serves as the foundation for integrating ESG practices across all business lines. This framework is derived from the Company’s vision to become a preeminent financial institution through service, empowerment, and sustainable value creation for ultra-micro, micro, and small Entrepreneurs. Our three strategic objectives are supported by environmental, social, and governance/economic pillars, implemented in alignment with the Sustainable Development Goals (SDGs) and the BRILiaN Way PNM corporate culture. This commitment also adheres to OJK Regulation Number 51/2017 and Ministry of SOEs directives, which mandate the integration of ESG aspects into corporate planning and budgeting.

In the environmental pillar, PNM responds to climate change and environmental risks by strengthening governance and managing operational impacts through measurable metrics. The Company leads various initiatives to enhance community awareness and participation in environmental conservation, sanitation management, ecosystem protection, and waste-to-value processing. Internally, PNM conducts emission assessments and climate risk mapping as part of its integrated risk management. This includes developing disruption risk assessments, mapping potential disasters, and establishing business continuity and emergency response policies to ensure operational resilience against both physical risks and transition risks toward a low-carbon economy.

This commitment supports Indonesia’s 2060 Net Zero Emission (NZE) target and aligns with the vision of the Ultra Micro Holding led by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. For our strategic collaboration, PNM and PLN Icon Plus have executed Corporate Social Responsibility (CSR) programs, including the planting of 1,000 trees as a tangible contribution toward carbon sequestration and environmental restoration. This synergy reflects PNM pivotal role in driving a green economy, where ultra-micro financing is not merely oriented toward economic growth, but is deeply rooted in environmental sustainability as an integral component of the Company’s long-term strategy.

As a concrete step toward decarbonization, PNM has deployed an electric vehicle (EV) fleet for its Account Officers through a partnership with PLN Icon Plus. This initiative, titled “PNM Green Move: Empower the Future”, signifies the Company’s support for the national clean energy transition while optimizing field mobility. Beyond reducing our carbon footprint, this shift demonstrates a broader transformation toward eco-friendly business practices, ensuring that ultra-micro economic empowerment remains in lockstep with environmental sustainability.



Pada pilar sosial, PNM memperkuat strategi keberlanjutan melalui pendekatan pemberdayaan yang komprehensif bagi nasabah ultra mikro dan komunitas rentan. Program peningkatan kapasitas kewirausahaan, literasi keuangan, pendidikan, kesehatan, serta ketahanan pangan dirancang untuk menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan dan inklusif. PNM juga mengembangkan program berbasis komunitas guna memperkuat kohesi sosial dan membangun ekosistem usaha yang saling mendukung, sekaligus menyiapkan mekanisme respons cepat terhadap kondisi darurat dan bencana. Melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, Perseroan memastikan bahwa pertumbuhan usaha berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya perempuan prasejahtera ultra mikro.

Komitmen tersebut diperkuat melalui penerbitan *Orange Bonds* dan *Sukuk Bonds* senilai Rp3,77 triliun atau setara US\$226 juta sebagai instrumen pembiayaan berbasis dampak sosial. Langkah ini menandai komitmen PNM dalam menghubungkan pendanaan berkelanjutan dengan pemberdayaan inklusif di akar rumput di mana dana yang dihimpun dimanfaatkan untuk memperluas akses pembiayaan, pendampingan, serta penguatan kapasitas usaha perempuan prasejahtera. PNM mencatat sejarah sebagai penerbit *Orange Bonds* pertama di Indonesia dan kedua di Asia, serta *Sukuk Bonds* pertama di Indonesia dan dunia, yang menempatkan Perseroan sebagai inovator instrumen keuangan berbasis dampak pemberdayaan yang selaras dengan agenda *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Melalui instrumen ini, setiap akses pembiayaan diharapkan menjadi jalan penguat bagi perempuan untuk tumbuh, berdaya, dan menghadirkan dampak nyata bagi keluarganya.

Dari sisi implementasi di tingkat nasabah, PNM telah melakukan pemetaan kelompok nasabah Mekaar berbasis indikator keberlanjutan yang menunjukkan sejumlah kekuatan intrinsik. Modal sosial tercermin kuat melalui keterlibatan komunitas dan budaya gotong royong, sementara disiplin pengelolaan keuangan menjadi kompetensi inti yang menopang ketahanan usaha. Praktik baik ESG juga telah terlihat pada penggunaan energi terbarukan rumah tangga, pengelolaan sampah, literasi keuangan, pencatatan keuangan sederhana, hingga kepatuhan pada prosedur kredit. Tantangan ke depan adalah mentransformasikan praktik subsisten tersebut menjadi sistem yang lebih terstandar dan terinstitusionalisasi tanpa menghilangkan fleksibilitas dan keguyuban yang menjadi fondasi resiliensi ekonomi ultra mikro. Sejalan dengan itu, PNM juga melakukan kajian *Human Rights Due Diligence* (HRDD) sebagai bagian dari komitmen untuk memastikan praktik bisnis yang menghormati hak asasi manusia dalam seluruh rantai nilai pemberdayaan.

Under the social mandate, we strengthen our sustainability strategy through a comprehensive empowerment approach for ultra-micro clients and vulnerable communities. Programs in entrepreneurship capacity building, financial literacy, education, health, and food security are designed to create inclusive and lasting social impact. PNM also develops community-based programs designed to foster social cohesion and build a mutually supportive business ecosystem, while establishing rapid-response mechanisms for emergencies and natural disasters. Through multi-stakeholder collaboration, the Company ensures that business growth translates into an improved quality of life for the community, particularly for underprivileged women in the ultra-micro segment.

This commitment is further solidified by the issuance of *Orange Bonds* and *Sukuk Bonds* totaling IDR3.77 trillion (approximately US\$ 226 million) as social-impact financing instruments. This milestone underscores PNM dedication to bridging the gap between sustainable capital and inclusive grassroots empowerment, where the proceeds are utilized to expand financing access, provide mentorship, and build the business capacity of underprivileged women. PNM has made history as the first *Orange Bonds* issuer in Indonesia and the second in Asia, as well as the first *Sukuk Bond* issuer of its kind both in Indonesia and globally. These achievements establish the Company as a leading innovator in impact-linked financial instruments aligned with the *Environmental, Social, and Governance* (ESG) agenda. Through these instruments, every credit facility is designed to serve as a catalyst for women to grow, become empowered, and deliver a tangible impact for their families.

At the customer level, PNM has mapped Mekaar client groups based on sustainability indicators, revealing significant intrinsic strengths. Strong social capital is evident through active community engagement and the traditional culture of mutual cooperation, while disciplined financial management has become a core competency supporting business resilience. ESG best practices are already emerging in areas such as household renewable energy adoption, waste management, financial literacy, basic bookkeeping, and strict adherence to credit procedures. The challenge ahead lies in transforming these subsistence-level practices into more standardized and institutionalized systems, without compromising the flexibility and communal synergy that form the bedrock of ultra-micro economic resilience. In line with this commitment, PNM has also conducted a *Human Rights Due Diligence* (HRDD) assessment to ensure that our business practices respect human rights across the entire empowerment value chain.



Pada pilar tata kelola dan ekonomi, PNM mengintegrasikan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 ke dalam seluruh proses bisnis dan pengambilan keputusan. Implementasi GCG tersebut menjadi fondasi dalam memperkuat kualitas portofolio, meningkatkan efektivitas manajemen risiko, serta memastikan kepatuhan dan transparansi di setiap lini operasional. Perseroan juga terus mengembangkan produk yang adaptif terhadap dinamika ekonomi serta memperkuat pembiayaan berbasis pendampingan guna menjaga keberlanjutan kinerja dan ketahanan usaha nasabah.

Dari sisi ekonomi, PNM berfokus pada penciptaan nilai jangka panjang yang resilien dan inklusif melalui penguatan ekosistem ultra mikro. Strategi pembiayaan yang terintegrasi dengan pendampingan dan pemberdayaan menjadi kunci dalam meningkatkan kapasitas usaha perempuan prasejahtera produktif. Pendekatan ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa ekspansi bisnis Perseroan tetap selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan nasional.

Sejalan dengan komitmen tersebut, PNM menjalankan Program Sirkuler Ekonomi KEMBANGS (Kelompok Membina dan Mengelola Sampah) sebagai wujud sinergi antara tata kelola yang bertanggung jawab dan pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan. Melalui pengelolaan bank sampah, berbagai jenis limbah seperti minyak jelantah, botol dan tutup plastik, kardus, kertas, serta sampah plastik dikumpulkan di Bank Sampah Unit (BSU) untuk kemudian diolah oleh rekanan resmi menjadi produk bernilai ekonomi. Skema penukaran sampah menjadi rupiah memberikan manfaat finansial bagi masyarakat sekaligus berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.

### Penerapan Keuangan Berkelanjutan Tahun 2025 Sustainable Finance Implementation in 2025

Sepanjang tahun 2025, seluruh insan PNM telah menunjukkan dedikasi dan komitmen terbaik dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya guna mendorong pencapaian kinerja Perusahaan secara optimal. Upaya tersebut tidak hanya difokuskan pada peningkatan kinerja ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kontribusi sosial serta menjaga keberlanjutan lingkungan.

Kolaborasi yang solid antara manajemen dan seluruh karyawan menjadi fondasi utama dalam merealisasikan berbagai inisiatif strategis Perusahaan. Sinergi tersebut menghasilkan capaian kinerja yang membanggakan, sebagaimana diuraikan berikut ini:

Under the Governance and Economic Pillar, PNM integrates the principles of *Good Corporate Governance* (GCG), in accordance with Ministry of SOEs Regulation Number PER-2/MBU/03/2023, into all business processes and decision-making. This GCG framework serves as the foundation for enhancing portfolio quality, improving risk management effectiveness, and ensuring strict compliance and transparency across all operational lines. Furthermore, the Company continues to develop products that are adaptive to economic dynamics while strengthening our assistance-based financing model to safeguard performance sustainability and client business resilience.

From an economic perspective, PNM focuses on generating resilient and inclusive long-term value by fortifying the ultra-micro ecosystem. A financing strategy integrated with mentorship and empowerment remains the key to scaling the business capacity of productive, underprivileged women. This approach not only drives community-level economic growth but also ensures that the Company's business expansion remains aligned with the national sustainable development agenda.

In line with this commitment, PNM operates the KEMBANGS Circular Economy Program (Waste Management and Mentorship Group) as a manifestation of the synergy between responsible governance and environment-based economic empowerment. Through waste bank management, various types of waste, including used cooking oil, plastic bottles and caps, cardboard, paper, and plastic film, are collected at Waste Bank Unit (BSU) to be processed by official partners into economically valuable products. This "waste-to-cash" scheme provides direct financial benefits to the community while contributing to a cleaner, healthier, and more sustainable environment.

In 2025, every individual at PNM demonstrated the utmost dedication and commitment to fulfilling their roles and responsibilities to drive optimal corporate performance. These efforts were not only focused on enhancing economic performance but were also directed toward strengthening social contributions and maintaining environmental sustainability.

The solid collaboration between management and all employees served as the primary foundation for realizing the Company's various strategic initiatives. This synergy resulted in excellent performance achievements, as follows:



## Kinerja Aspek Ekonomi Economic Performance

Pencapaian kinerja aspek ekonomi PNM mengacu pada target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disusun setiap tahun secara komprehensif dan realistis. RKAP memuat arah kebijakan, rencana peningkatan kinerja, serta strategi pelaksanaan yang terukur, dengan mempertimbangkan dinamika eksternal dan internal Perusahaan. Penyusunan RKAP mengedepankan prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko yang terintegrasi, serta berlandaskan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga mendukung keberlanjutan dan ketahanan usaha dalam jangka panjang. Selain itu, PNM juga telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, baik RAKB Jangka Pendek (1 tahun) maupun RAKB Jangka Panjang (5 tahun). RAKB tersebut memuat perencanaan prioritas program Keuangan Berkelanjutan, sistem pengawasan serta evaluasi atas program terpilih PNM.

Sepanjang 2025, PNM membukukan pencapaian yang mencerminkan kinerja ekonomi yang solid. Perusahaan membukukan pinjaman yang diberikan sebesar Rp44.741,62 miliar atau 100,07% dari RKAP tahun 2025, naik 2,64% dari tahun sebelumnya; pembiayaan modal sebesar Rp1.694,39 miliar atau 88,49% dari RKAP, naik 17,76% dibandingkan tahun 2024; pendapatan usaha sebesar Rp16.922,52 miliar atau 99,8% dari RKAP tahun 2025, naik 1,43% dari tahun sebelumnya; sedangkan laba bersih sebesar Rp1.139,13 miliar atau 95,00% dari RKAP tahun 2025, turun 23,96% dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan pencapaian kinerja ekonomi PNM tahun 2025, Perusahaan mencatatkan nilai ekonomi langsung yang dihasilkan sebesar Rp13.028,75 miliar, naik 0,16% dibandingkan tahun 2024. Adapun nilai ekonomi yang didistribusikan tercatat sebesar Rp13.471,97 miliar naik 2,89% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, nilai ekonomi yang ditahan tercatat sebesar 184,1 miliar, turun 65,88% dibandingkan tahun 2024.

Selain merealisasikan berbagai program dan target dalam RKAP 2025 di atas, PNM juga telah menyusun dan melaksanakan sembilan program prioritas sebagaimana disampaikan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2025. Keseluruhan program telah berhasil dijalankan dengan baik. Program Pendidikan dan Pelatihan di bidang Keuangan Berkelanjutan misalnya, PNM telah melakukan pelatihan keuangan berkelanjutan dengan topik *Finance for Non-Finance*, *Asset & Liabilities Management*, dan Sosialisasi *Internal Control over Financing Reporting* (ICoFR) yang dapat dilihat dari laporan *executive summary*, serta telah ada *blueprint* mengenai *Human Capital Maturity Score: Aspiration & Roadmap Implementation 2025-2029* sebagai rencana penilaian *HC Maturity*. Adapun program literasi keuangan, jumlah nasabah yang mengakses materi literasi keuangan tercatat sebanyak 1.815.531 nasabah, serta telah dirilis riset Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Nasabah Mekaar Analisis Tahun 2025.

PNM economic performance achievements refer to the targets set in the Annual Work Plan and Budget (RKAP), which is prepared comprehensively and realistically each year. The RKAP contains policy directions, performance improvement plans, and measurable implementation strategies, taking into account the Company's external and internal dynamics. The preparation of the RKAP prioritizes prudential principles, the implementation of integrated risk management, and is based on good corporate governance principles to support long-term business sustainability and resilience. In addition, PNM has prepared a Sustainable Finance Action Plan (RAKB), consisting of both a Short-Term RAKB (1 year) and a Long-Term RAKB (5 years). The RAKB contains priority planning for Sustainable Finance programs, as well as oversight and evaluation systems for PNM selected programs.

Throughout 2025, PNM recorded achievements that reflect solid economic performance. The company recorded loans disbursed amounting to IDR44,741.62 billion, or 100.07% of the 2025 Budget Plan, up 2.64% from the previous year; capital financing of IDR1,694.39 billion, or 88.49% of the Budget Plan, up 17.76% compared to 2024; operating revenue of IDR16,922.52 billion, or 99.8% of the 2025 Budget Plan, up 1.43% from the previous year; while net profit was IDR1,139.13 billion, or 95.00% of the 2025 Budget Plan, down 23.96% from the previous year.

Based on PNM economic performance in 2025, the Company recorded direct economic value generated of IDR13,028.75 billion, increase by 0.16% compared to 2024. Economic value distributed amounted to IDR13,471.97 billion, representing an increase of 2.89% compared to the previous year. Meanwhile, economic value retained was recorded at 184.1 billion, decrease by 65.88% compared to 2024.

In addition to realizing the various programs and targets in the 2025 RKAP above, PNM also formulated and implemented nine priority programs as outlined in the 2025 Sustainable Finance Action Plan (RAKB). All programs were successfully executed. Regarding Education and Training in the field of Sustainable Finance, for example, PNM conducted sustainable finance training on topics such as Finance for Non-Finance, Asset & Liabilities Management, and the Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) Socialization, as detailed in the executive summary report. Furthermore, a blueprint regarding the Human Capital Maturity Score: Aspiration & Roadmap Implementation 2025-2029 has been established as a roadmap for HC Maturity assessment. As for the financial literacy program, the number of clients accessing financial literacy materials reached 1,815,531, and the 2025 Analysis of the Mekaar Client Financial Literacy and Inclusion Index has been released.



### Kinerja Aspek Lingkungan Environmental Performance

Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan menjadi prinsip yang senantiasa dijunjung PNM dalam menjalankan bisnis pembiayaan. Sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian, Perusahaan menghindari pembiayaan kepada UMKM yang berpotensi merusak lingkungan atau menimbulkan dampak negatif, sekaligus menitikberatkan pada dukungan terhadap produk dan layanan berkelanjutan yang memberikan manfaat sosial bagi masyarakat, baik melalui pembiayaan konvensional maupun syariah. Pendekatan ini memastikan bahwa pertumbuhan usaha selaras dengan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

Komitmen PNM terhadap kinerja lingkungan juga tercermin dalam berbagai inisiatif internal yang menitikberatkan pada efisiensi energi dan pengurangan emisi. Di Kantor Pusat, penggunaan listrik berhasil ditekan melalui pengaturan waktu operasional serta disiplin mematikan lampu dan perangkat elektronik di area yang tidak digunakan, yang berdampak pada penurunan emisi gas rumah kaca cakupan 2. Di samping itu, perusahaan aktif menjaga keanekaragaman hayati melalui pengelolaan sampah organik dan anorganik serta perlindungan ekosistem laut, termasuk konservasi terumbu karang di lima lokasi-lokasi strategis yaitu Makassar, Manado, Palu, Pontianak dan Tasikmalaya.

Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan, PNM juga merealisasikan Program TJSL BUMN di pilar lingkungan melalui kegiatan penanaman pohon di 31 lokasi berbagai wilayah di Indonesia dengan jumlah total 86.936 batang untuk mendukung kelestarian lingkungan dan ketahanan pangan. Program ini dilengkapi dengan edukasi masyarakat dan pengelolaan sampah di 31 titik lokasi sehingga memperkuat sinergi antara pencapaian kinerja operasional, keberlanjutan lingkungan, dan dampak sosial yang nyata bagi komunitas di sekitar lokasi kegiatan.



### Kinerja Aspek Sosial Social Performance

PNM menempatkan pengembangan kompetensi karyawan sebagai fondasi utama dalam pencapaian kinerja operasional. Sepanjang 2025, seluruh karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti berbagai program pelatihan yang dirancang untuk memperkuat kemampuan teknis, kepemimpinan, serta kesiapan menjalankan peran strategis di masa depan. Evaluasi menyeluruh dilakukan untuk menilai kualitas materi, penyampaian *trainer*, infrastruktur pendukung, serta dampak pasca-pelatihan, sehingga hasil pembelajaran dapat digunakan untuk merancang program yang lebih efektif dan tepat sasaran. Hingga akhir tahun, puluhan ribu karyawan telah mengikuti enam kategori pelatihan dengan tingkat partisipasi mencapai 100%, menegaskan keterlibatan tinggi dalam pengembangan kapasitas individu.

Compliance with environmental regulations is a principle that PNM consistently upholds in its financing business. As part of our commitment to prudential principles, we avoid providing financing to MSMEs that have the potential to damage the environment or cause negative impacts. Instead, we emphasize support for sustainable products and services that offer social benefits, through both conventional and Sharia-based financing. This approach ensures that business growth is aligned with the principles of sustainability and social responsibility.

PNM commitment to environmental performance is also demonstrated in various internal initiatives focused on energy efficiency and emission reduction. At the Head Office, electricity consumption has been successfully reduced through optimized operational hours and a strict policy of switching off lights and electronic devices in unused areas. These efforts have directly contributed to a reduction in Scope 2 Greenhouse Gas (GHG) emissions. Furthermore, the Company is active in preserving biodiversity through the management of organic and inorganic waste, as well as the protection of marine ecosystems, including coral reef conservation across five strategic locations: Makassar, Manado, Palu, Pontianak, and Tasikmalaya.

As part of our social and environmental responsibility, PNM has implemented the Ministry of SOEs' CSR Program under the environmental pillar. This involved tree-planting activities across 31 locations throughout Indonesia, with a total of 86,936 trees planted to support environmental conservation and food security. This program was integrated with community education and waste management initiatives across 31 locations, thereby reinforcing the synergy between operational performance, environmental sustainability, and a tangible social impact for the communities in our operational areas.

PNM identifies employee competency development as the primary foundation for achieving operational excellence. Throughout 2025, all employees were provided with equal opportunities to participate in various training programs designed to strengthen technical skills, leadership capabilities, and readiness for future strategic roles. A comprehensive evaluation was conducted to assess material quality, trainer delivery, supporting infrastructure, and post-training impact, ensuring that learning outcomes are utilized to design more effective and targeted programs. By year-end, tens of thousands of employees had participated across six training categories with a 100% participation rate, underscoring high engagement in individual capacity building.



Sejalan dengan pengembangan kompetensi, PNM menegaskan komitmen terhadap hak asasi manusia melalui kebijakan "Komitmen Perusahaan terhadap Hak Asasi Manusia" yang melengkapi pedoman perilaku (*Code of Conduct*). Prinsip-prinsip utama mencakup penghormatan kebebasan berpendapat, hak untuk berunding, kesejahteraan dan martabat karyawan, penghapusan kerja paksa, pekerja anak, perdagangan manusia, serta penghapusan diskriminasi dan kekerasan. Kebijakan ini menjadi landasan bagi seluruh kegiatan operasional Perusahaan, menjamin perlakuan adil dan setara bagi karyawan maupun nasabah, sekaligus memastikan aspek sosial terintegrasi dalam setiap proses bisnis PNM.

Upaya sosial PNM juga tercermin dalam penguatan layanan dan pemberdayaan nasabah, termasuk penambahan akses kantor unit di daerah rendah populasi dan tertinggal. Perusahaan melaksanakan berbagai program literasi dan inklusi keuangan seperti Membina Memberdaya, Pertemuan Komunitas Bisnis, Portal Digi Nasabah, Kampung Madani, Klasterisasi, dan Mekaarpreneur. Survei kepuasan nasabah menunjukkan mayoritas responden puas terhadap produk dan layanan PNM, yang mendukung pengembangan layanan lebih relevan, memperkuat hubungan dengan nasabah, dan meningkatkan loyalitas komunitas pengusaha UMKM.

Lebih jauh, PNM mengintegrasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui Program TJSL, yang menjadi bagian strategis dari keberlanjutan usaha. Program ini menitikberatkan pada pemberdayaan kelompok perempuan prasejahtera, khususnya melalui Mekaar, sehingga membangun ekosistem ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Selain menciptakan dampak sosial yang nyata, TJSL memperkuat reputasi PNM sebagai institusi yang responsif terhadap isu sosial dan lingkungan. Total dana TJSL sebesar Rp22,817 miliar digunakan untuk mendukung pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan, sekaligus berkontribusi pada pencapaian TPB/SDGs.

Atas pencapaian kinerja di atas, PNM mendapat apresiasi dari pihak ketiga melalui serangkaian penghargaan. Sepanjang tahun 2025, penghargaan yang diterima Perusahaan antara lain *The Best Company for Comprehensive ESG Implementation Practices*, *Kategori Merit Achievement in Digital Learning & Education Empowerment*, *Strengthening Local Economic Resilient and Holistic Entrepreneurship Training*, *Outstanding In Women Empowerment*, *Community Empowerment*, *Best ESG Reporting & Transparency*, dan *Best Sustainable Branding Initiative* (Platinum).

In conjunction with competency development, PNM reaffirms its commitment to human rights through the "Corporate Commitment to Human Rights" policy, which complements the Code of Conduct. Core principles include respect for freedom of expression, collective bargaining rights, employee welfare and dignity, and the elimination of forced labor, child labor, human trafficking, as well as the eradication of discrimination and violence. This policy serves as the cornerstone for all corporate operations, guaranteeing fair and equitable treatment for both employees and clients, while ensuring that social aspects are integrated into every PNM business process.

PNM social initiatives are further reflected in the strengthening of services and customer empowerment, including the expansion of branch offices in low-population and disadvantaged areas. The Company implements various financial literacy and inclusion programs, such as Membina Memberdaya (Integrated Mentorship and Empowerment), Business Community Meetings, the Digi Nasabah Portal, Kampung Madani (Madani Village), Clustering, and Mekaarpreneur. Customer satisfaction surveys indicate that the majority of respondents are satisfied with PNM products and services, which supports the development of more relevant services, strengthens customer relationships, and enhances loyalty within the MSME community.

Furthermore, PNM integrates social and environmental responsibility through the CSR Program, which is a strategic component of business sustainability. This program focuses on empowering underprivileged women, specifically through Mekaar, to build an inclusive and sustainable economic ecosystem. In addition to creating tangible social impact, CSR bolsters PNM reputation as an institution responsive to social and environmental issues. A total CSR budget of IDR22.817 billion was utilized to support economic, social, and environmental pillars, contributing to the achievement of the SDGs.

In recognition of the aforementioned performance, PNM received appreciation from third parties through a series of awards. Throughout 2025, the accolades received by the Company included *The Best Company for Comprehensive ESG Implementation Practices*; *Merit Achievement in Digital Learning & Education Empowerment*; *Strengthening Local Economic Resilience and Holistic Entrepreneurship Training*; *Outstanding in Women Empowerment and Community Empowerment*; *Best ESG Reporting & Transparency*; and *Best Sustainable Branding Initiative* (Platinum).



## Strategi Pencapaian Target Target Achievement Strategy

Keberhasilan PNM dalam membukukan kinerja unggul pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan merupakan hasil kerja kolektif seluruh insan perusahaan dalam menjalankan strategi dan kebijakan yang terarah. Perseroan meyakini bahwa keberlanjutan kinerja sosial dan lingkungan sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam mencapai target ekonomi sebagaimana ditetapkan dalam RKAP Tahun 2025. Oleh karena itu, sinergi antara manajemen dan karyawan terus diperkuat agar setiap program mampu memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan usaha sekaligus pemberdayaan masyarakat prasejahtera produktif.

Sepanjang tahun 2025, PNM menjalankan berbagai inisiatif strategis yang berfokus pada penciptaan nilai ekonomi dan sosial bagi Indonesia. Agenda tersebut mencakup PKM *re-engineering*, penguatan peran *Group Leader*, implementasi Program Pemberdayaan 2.0, optimalisasi perusahaan anak, serta akselerasi perbaikan kualitas pembiayaan. Perseroan juga mendorong inovasi model bisnis melalui pengembangan produk baru, memperkuat kepemimpinan teknologi melalui digitalisasi dan peningkatan sistem IT, serta meningkatkan kualitas investasi lewat penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan desain ICoFR & ESG. Pengembangan talenta melalui penguatan *human capital* turut menjadi prioritas untuk memastikan pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam aspek keberlanjutan, PNM meningkatkan *awareness* ESG tidak hanya di lingkungan internal, tetapi juga hingga ke level nasabah melalui edukasi dan pendampingan yang terintegrasi dalam proses pembiayaan. Efektivitas manajemen risiko ESG terus diperkuat melalui identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko secara sistematis agar potensi dampak dapat dimitigasi sejak dini. Perseroan juga melakukan adopsi praktik terbaik penerapan ESG melalui *peers benchmarking* guna memastikan implementasi yang selaras dengan standar industri dan perkembangan regulasi.

Untuk memastikan konsistensi pelaksanaan inisiatif keberlanjutan, PNM memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas divisi melalui peran ESG champion di berbagai unit kerja. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap program berjalan terkoordinasi, terukur, dan sejalan dengan strategi perusahaan. Melalui pemantauan berkala, pelaporan manajemen, serta audit operasional rutin dan surprise audit di seluruh jaringan layanan, Perseroan menjaga disiplin operasional sekaligus memperkokoh fondasi bagi pencapaian kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan.

PNM success in recording remarkable performance across economic, social, and environmental dimensions is the result of the collective efforts of the entire workforce in executing focused strategies and policies. The Company believes that the sustainability of social and environmental performance is heavily influenced by the ability to achieve economic targets as stipulated in the 2025 Annual Work Plan and Budget (RKAP). Thus, the synergy between management and employees is continuously strengthened to ensure that every program delivers a tangible impact on business growth while empowering productive, underprivileged communities.

Throughout 2025, PNM executed various strategic initiatives focused on creating economic and social value for Indonesia. This agenda included PKM *re-engineering*, strengthening the role of Group Leaders, implementing the Empowerment 2.0 Program, optimizing subsidiaries, and accelerating improvements in financing quality. The Company also drove business model innovation through new product development, reinforced technological leadership via digitalization and IT system upgrades, and enhanced investment quality through strengthened governance, risk management, and the design of ICoFR & ESG frameworks. Talent development through the strengthening of human capital remained a priority to ensure healthy and sustainable business growth.

In terms of sustainability, PNM increased ESG awareness not only internally but also at the customer level through education and mentorship integrated into the financing process. The effectiveness of ESG risk management was reinforced through systematic identification, measurement, and control to mitigate potential impacts at an early stage. Furthermore, the Company adopted ESG best practices through peer benchmarking to ensure implementation remains aligned with industry standards and evolving regulatory requirements.

To ensure consistency in sustainability initiatives, PNM strengthened cross-divisional synergy and collaboration through the appointment of ESG Champions across various business units. This approach ensures that every program is coordinated, measurable, and aligned with corporate strategy. Through periodic monitoring, management reporting, and routine operational audits, including surprise audits across the service network, the Company maintains operational discipline while solidifying the foundation for sustainable economic, social, and environmental performance.



## Prospek dan Peluang Outlook and Opportunities

Prospek perekonomian Indonesia pada tahun 2026 dipandang tetap solid meskipun menghadapi tantangan global dan dinamika ekonomi dunia. Berbagai lembaga internasional dan otoritas domestik memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran moderat hingga meningkat dibandingkan 2025. Proyeksi ini mencerminkan fundamental ekonomi yang kuat, didukung oleh konsumsi domestik yang stabil, peningkatan investasi, serta sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi untuk menjaga momentum pertumbuhan. Kondisi makro yang sehat ini diharapkan memberikan landasan yang kokoh bagi pengembangan sektor usaha, khususnya UMKM, sehingga peluang ekspansi dan akses pembiayaan dapat meningkat secara signifikan.

Dalam konteks pembiayaan UMKM, stabilitas ekonomi membuka peluang bagi peningkatan permintaan kredit dan akses modal bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Target ekspansi kredit yang ditetapkan oleh otoritas keuangan menjadi landasan bagi perluasan pembiayaan UMKM, seiring pemulihan aktivitas ekonomi dan penetrasi digitalisasi layanan keuangan yang semakin luas. Hal ini menegaskan bahwa dukungan pembiayaan akan terus menjadi faktor penting dalam memperkuat kapasitas usaha, mendorong pertumbuhan usaha mikro, dan memperkuat inklusi keuangan di seluruh pelosok Indonesia.

Bagi PNM, tahun 2026 menjadi momentum strategis untuk memperluas jangkauan pembiayaan dan memperkuat dampak sosial-ekonomi yang inklusif. Kondisi ekonomi yang kondusif mendorong pengembangan produk pembiayaan yang inovatif dan adaptif bagi UMKM, termasuk melalui program PNM Mekaar dan pembiayaan ULaMM berbasis teknologi. Perseroan menargetkan peningkatan pinjaman, modal kerja, pendapatan usaha, dan laba bersih, disertai kebijakan strategis yang responsif terhadap dinamika 2026 agar pertumbuhan bisnis berjalan selaras dengan keberlanjutan masyarakat.

Seiring ekspansi tersebut, PNM memperluas analisis risiko perubahan iklim dengan mengidentifikasi peluang dan dampak yang relevan terhadap model bisnis serta mengintegrasikannya dalam perencanaan dan manajemen risiko. Perseroan juga melanjutkan penerbitan *Orange Bonds* tahap 3 hingga 6 beserta penyusunan *impact report*, serta merancang strategi dekarbonisasi untuk menurunkan jejak emisi dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Sinergi langkah-langkah ini memperkuat pertumbuhan yang sehat sekaligus kontribusi terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

The outlook for the Indonesian economy in 2026 remains solid, despite global challenges and evolving international economic dynamics. Various international institutions and domestic authorities project national economic growth to range from moderate to an increase compared to 2025. This projection reflects strong economic fundamentals, supported by stable domestic consumption, increased investment, and coordinated fiscal and monetary policy synergies to maintain growth momentum. This healthy macroeconomic environment is expected to provide a robust foundation for sector development, particularly for MSMEs, thereby significantly increasing opportunities for expansion and access to financing.

In the context of MSME financing, economic stability creates opportunities for increased credit demand and capital access for micro, small, and medium entrepreneurs. Credit expansion targets set by financial authorities serve as the basis for broadening MSME financing, alongside the recovery of economic activity and the deepening penetration of digital financial services. This underscores that financing support will continue to be a significant factor in strengthening business capacity, driving micro-enterprise growth, and bolstering financial inclusion throughout Indonesia.

For PNM, 2026 represents a strategic momentum to expand its financing reach and strengthen inclusive socio-economic impact. Conducive economic conditions encourage the development of innovative and adaptive financing products for MSMEs, including through the PNM Mekaar program and technology-based ULaMM financing. The Company targets growth in loans, working capital, operating revenue, and net profit, accompanied by strategic policies responsive to 2026 dynamics to ensure that business growth remains aligned with community sustainability.

In line with this expansion, PNM is broadening its climate change risk analysis by identifying opportunities and impacts relevant to its business model and integrating them into planning and risk management. The Company is also proceeding with the issuance of *Orange Bonds* Phases 3 through 6, along with the preparation of impact reports and the design of a decarbonization strategy to reduce its emission footprint and support the transition toward a low-carbon economy. These synergistic steps reinforce healthy growth while contributing to inclusive and sustainable development.



**Apresiasi**  
Acknowledgments

Keberhasilan PNM meraih kinerja terbaik sepanjang tahun 2025 merupakan buah dari kerja keras, dedikasi, dan sinergi seluruh insan PNM. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dewan Komisaris atas arahan dan pengawasan strategis yang senantiasa mendukung pencapaian ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh nasabah dan mitra bisnis yang telah mempercayakan pengembangan usaha mereka melalui PNM, serta kepada regulator yang senantiasa memberikan panduan dan dukungan dalam menjalankan praktik keuangan yang berkelanjutan. Keberhasilan ini menegaskan bahwa kolaborasi yang solid antara manajemen, karyawan, dan pemangku kepentingan mampu menghasilkan kinerja optimal sekaligus memperkuat fondasi Perusahaan menghadapi tantangan masa depan.

Kami juga ingin mengapresiasi seluruh karyawan PNM yang telah bekerja penuh dedikasi untuk mewujudkan visi Perusahaan, mulai dari inovasi produk dan digitalisasi layanan hingga pemberdayaan nasabah dan komunitas. Terima kasih atas komitmen dan semangat kolaboratif yang telah membawa PNM mencapai hasil yang membanggakan. Ke depan, PNM berkomitmen untuk terus memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, keberlanjutan sosial, dan pelestarian lingkungan, sambil menjalin kerja sama yang erat dengan semua pemangku kepentingan. Bersama-sama, kami optimistis dapat menjaga momentum pertumbuhan dan menciptakan nilai tambah yang berkesinambungan bagi masyarakat dan bangsa.

PNM success in achieving its best performance throughout 2025 is the result of the hard work, dedication, and synergy of every individual at PNM. To that end, we would like to express our highest appreciation to the Board of Commissioners for their strategic guidance and oversight, which consistently supported these achievements. We also extend our gratitude to all our customers and business partners for entrusting their business development to PNM, as well as to the regulators for their ongoing guidance and support in implementing sustainable financial practices. This success reaffirms that solid collaboration between management, employees, and stakeholders is capable of generating optimal performance while strengthening the Company's foundation to face future challenges.

We would also like to commend all PNM employees who have worked with full dedication to realize the Company's vision, ranging from product innovation and service digitalization to the empowerment of customers and communities. Thank you for the commitment and collaborative spirit that have led PNM to these remarkable results. Moving forward, PNM remains committed to strengthening inclusive economic growth, social sustainability, and environmental preservation while maintaining close cooperation with all stakeholders. Together, we firmly believe in our ability to maintain growth momentum and create sustainable added value for the community and the nation.

Jakarta, April 2026  
Jakarta, April, 2026

Atas Nama Direksi  
On Behalf of the Board of Directors

**PT Permodalan Nasional Madani**

**Arief Mulyadi**  
**Direktur Utama**  
President Director

04

**Tentang  
Laporan  
Keberlanjutan**

*About Sustainability Report*





## Tentang Laporan Keberlanjutan About the Sustainability Report



Laporan Keberlanjutan merupakan sarana bagi PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan kegiatan usaha serta pengelolaan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang ditimbulkan. Setiap tahun, PNM secara konsisten menerbitkan Laporan Keberlanjutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan Perusahaan. Laporan Keberlanjutan PNM Tahun 2025 ini merupakan penerbitan kelima, sementara laporan sebelumnya diterbitkan pada 21 April 2025.

The Sustainability Report serves as a means for PT Permodalan Nasional Madani (PNM) to demonstrate accountability and transparency in conducting its business activities and in managing the economic, environmental, and social impacts arising from its operations. Each year, PNM consistently publishes a Sustainability Report as an integral part of the Company's Annual Report. The 2025 PNM Sustainability Report is the Company's fifth publication, with the previous report issued on April 21, 2025.



Penerbitan laporan ini merupakan bentuk pemenuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang mewajibkan PNM sebagai lembaga pembiayaan untuk menerapkan ketentuan tersebut sejak 1 Januari 2020. Selain sebagai wujud transparansi atas kinerja dan dampak operasional Perusahaan, laporan ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran bagi para pemangku kepentingan mengenai komitmen dan kontribusi PNM dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). [GRI 2-3]

The publication of this report fulfills the requirements of Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 51/POJK.03/2017 on Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, which obliges PNM, as a financing institution, to implement sustainable finance provisions starting from January 1, 2020. In addition to serving as a form of transparency regarding the Company's performance and operational impacts, this report is also intended to provide stakeholders with an overview of PNM commitment and contribution to supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). [GRI 2-3]

## Prinsip Pelaporan Reporting Principles

Laporan PNM disusun dengan merujuk pada delapan prinsip pelaporan sebagaimana ditentukan dalam GRI 1: Landasan 2021 sebagai berikut:

1. Akurasi:  
Perusahaan melaporkan informasi yang benar dan cukup terperinci agar dapat dilakukan penilaian dampak organisasi.
2. Keseimbangan:  
Perusahaan melaporkan informasi dengan cara netral dan menyediakan gambaran yang seimbang tentang dampak negatif dan positif organisasi.
3. Kejelasan:  
Perusahaan menyajikan informasi dengan cara yang dapat diakses dan dapat dipahami.
4. Keterbandingan:  
Perusahaan memilih, menyusun, dan melaporkan informasi secara konsisten agar mereka dapat melakukan analisis mengenai perubahan dalam dampak organisasi seiring waktu dan analisis dampak ini yang berkaitan dengan dampak organisasi lain.
5. Kelengkapan:  
Perusahaan menyediakan informasi yang memadai agar penilaian dampak organisasi dapat dilakukan selama periode pelaporan.
6. Konteks keberlanjutan:  
Perusahaan melaporkan informasi tentang dampak mereka dalam konteks yang lebih luas dari pembangunan berkelanjutan.
7. Ketepatan waktu:  
Perusahaan melaporkan informasi secara rutin dan menyediakan informasi tersebut secara tepat waktu bagi pengguna informasi untuk mengambil keputusan.
8. Keterverifkasian:  
Perusahaan mengumpulkan, mencatat, menyusun, dan menganalisis informasi dengan cara sedemikian rupa sehingga informasi tersebut dapat diteliti untuk menentukan kualitasnya.

PNM Sustainability Report is prepared with reference to the eight reporting principles as stipulated in GRI 1: Foundation 2021, as follows:

1. Accuracy:  
The Company reports information that is accurate and sufficiently detailed to enable an assessment of organizational impacts.
2. Balance:  
The Company reports information in a neutral manner and provides a balanced overview of both negative and positive impacts.
3. Clarity:  
The Company presents accessible and understandable information.
4. Comparability:  
The Company selects, compiles, and reports information consistently to enable analysis of changes in organizational impacts over time and comparison with impacts of other organizations.
5. Completeness:  
The Company provides sufficient information to allow an assessment of organizational impacts for the reporting period.
6. Sustainability Context:  
The Company reports information on its impacts within the broader context of sustainable development.
7. Timeliness:  
The Company reports information regularly and provides it in a timely manner to enable informed decision-making.
8. Verifiability:  
The Company collects, records, compiles, and analyzes information in a manner that allows it to be examined to determine its quality.



## Rujukan Laporan

### Reporting References

Laporan ini disusun dengan mengacu pada POJK No. 51/POJK.03/2017, SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, serta GRI Standards Universal 2021 (Standar GRI) yang diterbitkan oleh *Global Sustainability Standards Board* (GSSB). Selain itu, Perusahaan juga merujuk Metrik ESG-IDX 2024 serta *International Financial Reporting Standards Sustainability 1* (IFRS S1) dan IFRS S2, yang telah diadopsi di Indonesia menjadi Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK 1 dan PSPK 2). Untuk memudahkan pembaca menelusuri kesesuaian isi laporan dengan berbagai standar tersebut, kami menyertakan penanda khusus berupa huruf dan angka sesuai Lampiran II POJK No. 51/2017, SEOJK No. 16/2021, Metrik ESG-IDX 2024, serta mencantumkan kode pengungkapan GRI pada bagian yang relevan. Ringkasan kecocokan isi laporan dengan seluruh rujukan disajikan pada bagian akhir laporan ini.

Seluruh data keuangan dalam laporan ini disajikan dalam mata uang Rupiah, kecuali dinyatakan lain, dan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Indonesia. Adapun data keberlanjutan disusun menggunakan metode pengukuran yang berlaku secara internasional. Untuk menjangkau pembaca yang lebih luas, laporan ini diterbitkan dalam dua bahasa—Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Selain itu, guna mendukung analisis tren kinerja Perusahaan, data kuantitatif disajikan dengan prinsip daya banding (*comparability*) untuk minimal tiga tahun pelaporan.



## Cakupan dan Batasan Laporan

### Reporting Scope and Boundary

Laporan ini mencakup kegiatan operasional Kantor Pusat PNM, Kantor Cabang PNM, Kantor Layanan ULamm dan Kantor Unit PNM Mekaar di bidang ekonomi, lingkungan dan sosial beserta dampak yang ditimbulkannya selama periode 1 Januari-31 Desember 2025, termasuk di dalamnya dampak yang bermakna positif. [GRI 2-2]



## Siklus, Periode Pelaporan dan Pernyataan Penggunaan

### Reporting Cycle, Period, and Statement of Use

Sebagai bagian tak terpisahkan dari Laporan Tahunan Perusahaan, laporan ini terbit setahun sekali. PNM telah melaporkan informasi yang dikutip pada indeks konten GRI untuk periode dari 1 Januari-31 Desember 2025 sesuai dengan Standard GRI. [GRI 2-3]

This report is prepared with reference to POJK Number 51/POJK.03/2017, SEOJK Number 16/SEOJK.04/2021 concerning Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies, as well as the GRI Standards Universal 2021 issued by the Global Sustainability Standards Board (GSSB). In addition, the Company refers to the ESG-IDX Metrics 2024 and International Financial Reporting Standards Sustainability 1 (IFRS S1) and IFRS S2, which have been adopted in Indonesia as the Sustainability Disclosure Standards Statements (PSPK 1 and PSPK 2). To facilitate readers in identifying alignment with these various standards, the report includes specific markers in the form of letters and numbers in accordance with Appendix II of POJK Number 51/2017, SEOJK Number 16/2021, ESG-IDX Metrics 2024, and relevant GRI disclosure codes. A summary of the report's alignment with all applicable references is presented at the end of this report.

All financial data in this report are presented in Indonesian Rupiah, unless otherwise stated, and are prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK). Sustainability data are compiled using internationally recognized measurement methods. To reach a broader audience, this report is published in two languages—Indonesian and English. Furthermore, to support trend analysis of the Company's performance, quantitative data are presented with comparability for a minimum of three reporting years.

This report covers the operational activities of PNM Head Office, PNM Branch Offices, ULamm Service Offices, and PNM Mekaar Unit Offices, including their economic, environmental, and social impacts during the period from January 1 to December 31, 2025, including material positive impacts. [GRI 2-2]

As an integral part of the Company's Annual Report, this Sustainability Report is published annually. PNM has reported information cited in the GRI content index for the period from January 1 to December 31, 2025 in accordance with the GRI Standards. [GRI 2-3]



**Perubahan Terkait Laporan**  
Changes Related to the Report

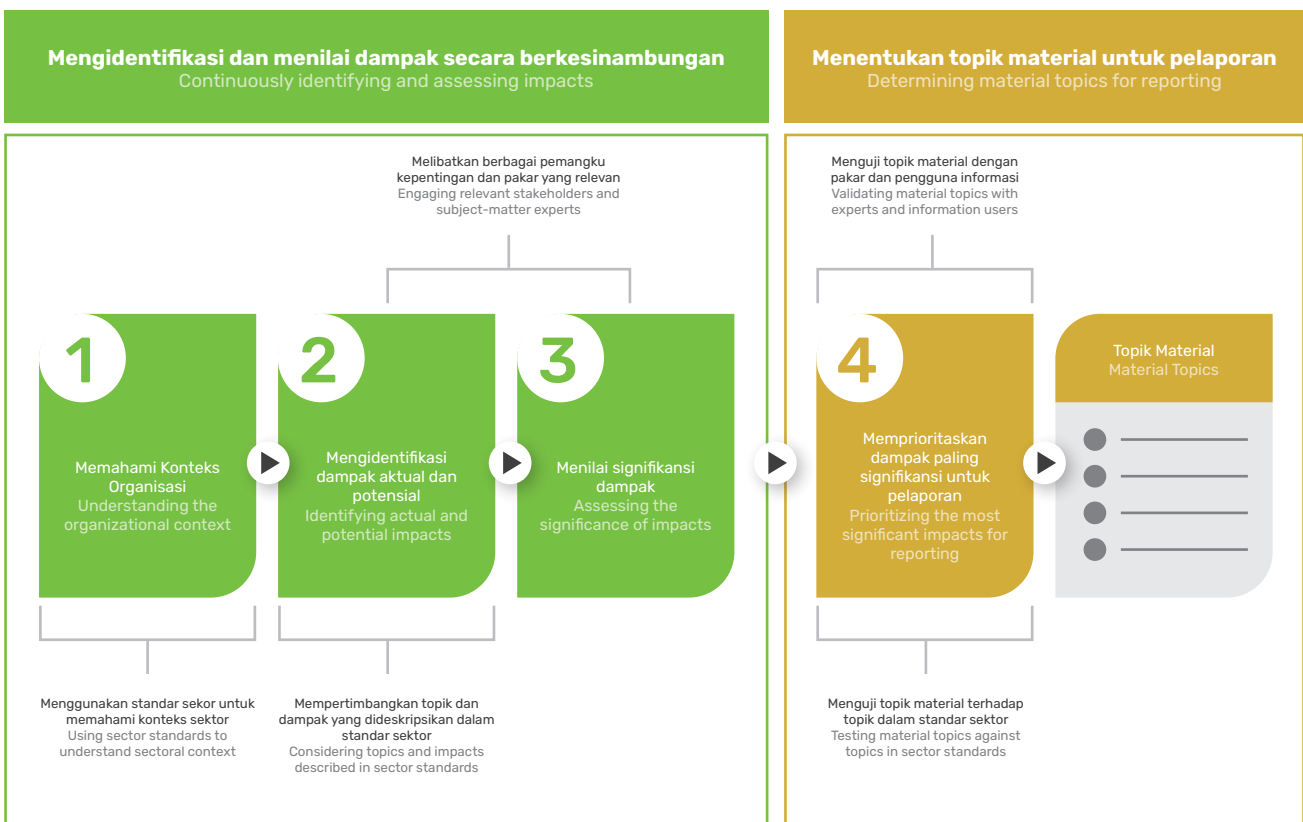
Pada Laporan Keberlanjutan 2025 terdapat perubahan terkait topik material dibanding tahun sebelumnya. Penetapan adanya perubahan dilakukan setelah Perusahaan melakukan peninjauan terhadap topik material tahun 2024 dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal sesuai panduan GRI *Standards* Universal Tahun 2021. Melalui peninjauan tersebut, selain mengidentifikasi dan menilai dampak secara berkesinambungan, sekaligus Perusahaan dapat memastikan bahwa topik material dalam laporan ini mewakili dampak paling signifikan selama tahun pelaporan.

In the 2025 Sustainability Report, there are changes to material topics compared to the previous year. These changes were determined following a review of the 2024 material topics, involving both internal and external stakeholders in accordance with the GRI *Standards* Universal 2021 guidelines. Through this review process, the Company not only identified and assessed impacts on an ongoing basis, but also ensured that the material topics presented in this report represent the most significant impacts during the reporting year.

Peninjauan secara internal dan eksternal dilakukan melalui *Focus Group Discussion* secara tatap muka di Kantor Pusat PNM, Jakarta, pada Kamis, 30 Oktober 2025, yang diikuti oleh pemangku kepentingan internal Perusahaan, yaitu manajemen dan karyawan lintas divisi, termasuk para penanggung jawab penyusunan laporan. Adapun pihak eksternal yang terlibat adalah konsultan/mitra/pengguna laporan. Dalam diskusi tersebut disepakati untuk menambahkan dua topik material baru yang GRI 406 Non-Diskriminasi dan GRI 413 Masyarakat Lokal sehingga jumlah topik material menjadi 11 topik. [GRI 3-1]

The internal and external review was conducted through a *Focus Group Discussion* held in person at the PNM Head Office in Jakarta on Thursday, October 30, 2025. Participants included internal stakeholders, namely management and employees from various divisions, including those responsible for preparing the report. External participants consisted of consultants, partners, and report users. As a result of the discussion, it was agreed to add two new material topics, namely GRI 406 Non-Discrimination and GRI 413 Local Community, bringing the total number of material topics to 11. [GRI 3-1]

**Proses untuk Menentukan Topik Material**  
Process for Determining Material Topics



Setelah dilakukan peninjauan oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal, selanjutnya topik laporan tahun 2025 tersebut diajukan ke Direksi, dan telah mendapatkan persetujuan sebagai topik material terpilih. Daftar topik material Laporan Keberlanjutan Perusahaan Tahun 2025 selengkapnya adalah sebagai berikut: [GRI 3-2]

After being reviewed by internal and external stakeholders, the reporting topics for 2025 were subsequently submitted to the Board of Directors and approved as the selected material topics. The complete list of material topics for the Company's 2025 Sustainability Report is presented in the following table: [GRI 3-2]

**Tabel Topik Material Tahun 2025**  
Table of Material Topics for 2025

Topik Material Material Topic	Kenapa Topik ini Material Why This Topic is Material	Nomor Pengungkapan GRI Standards Disclosure Number GRI Standards	Boundary Boundary		
			Di dalam PNM In PNM	Di luar PNM Outside PNM	
<b>Ekonomi</b> Economy					
Kinerja Ekonomi Economic Performance	Menggambarkan pencapaian dan kinerja Perusahaan selama tahun pelaporan It describes the Company's achievements and performance during the reporting year	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan Direct economic value generated and distributed		
		201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim Financial implications and other risks and opportunities arising from climate change	√	√
		201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya Obligations related to defined benefit pension plans and other pension programs		
		201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah Financial implications and other risks and opportunities arising from climate change		
Dampak Ekonomi Tak Langsung Indirect Economic Impact	Menggambarkan manfaat atas keberadaan Perusahaan bagi masyarakat di sekitarnya It describes the benefits of the Company's presence for surrounding communities	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan Infrastructure investment and services supported	√	√
		203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan Significant indirect economic impacts		
Antikorupsi Anti-Corruption	Menggambarkan komitmen Perusahaan terhadap penyelenggaraan usaha yang bersih dan transparan It describes the Company's commitment to conducting clean and transparent business practices	205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi Operations assessed for corruption-related risks		
		205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi Communication and training on anti-corruption policies and procedures	√	√
		205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil Confirmed incidents of corruption and actions taken		
<b>Lingkungan</b> Environment					
Energi Energy	Menggambarkan kepedulian Perusahaan terhadap pengelolaan energi tak terbarukan yang ketersediaannya kian terbatas It describes the Company's concern for managing non-renewable energy resources whose availability is increasingly limited	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi Energy consumption within the organization		
		302-2	Konsumsi energi di luar organisasi Energy consumption outside the organization		
		302-3	Intensitas energi Energy intensity	√	
		302-4	Pengurangan konsumsi energi Energy consumption reduction		
		302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa. Reduction in energy required for products and services		



Topik Material Material Topic	Kenapa Topik ini Material Why This Topic is Material	Nomor Pengungkapan GRI Standards Disclosure Number GRI Standards	Boundary		
			Di dalam PNM In PNM	Di luar PNM Outside PNM	
Air dan Efluen Water and Effluent	Menggambarkan kepedulian Perusahaan terhadap pengelolaan sumber daya air bersih yang ketersediaannya kian terbatas It describes the Company's concern for managing clean water resources whose availability is increasingly limited	303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama Interactions with water as a shared resource		
		303-2	Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air Impact management related to water discharge	√	√
		303-3	Pengambilan air Water withdrawal		
		303-4	Pembuangan air Water disposal		
		303-5	Konsumsi air Water consumption		
Emisi Emissions	Menggambarkan kepedulian Perusahaan terhadap emisi gas rumah kaca yang berdampak besar terhadap perubahan iklim It describes the Company's concern regarding greenhouse gas emissions that have a significant impact on climate change	305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung Direct GHG emissions (Scope 1)		
		305-2	Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung Indirect GHG emissions (Scope 2)		
		305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya Other indirect GHG emissions (Scope 3)		
		305-4	Intensitas emisi GRK GHG emission intensity	√	√
		305-5	Pengurangan emisi GRK Reduction of GHG emissions		
		305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS) Ozone depleting substances (ODS) emissions		
		305-7	Nitrogen Oksida (NOX), sulfur oksida (SOX), dan emisi udara signifikan lainnya Nitrogen Oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air emissions		
<b>Sosial</b> Social					
Kepegawaian Employment	Menggambarkan komitmen Perusahaan tentang pentingnya pengelolaan pegawai/SDM It describes the Company's commitment to the importance of managing employees and human resources	401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan New employee hires and employee turnover		
		401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees	√	
		401-3	Cuti melahirkan Maternity leave		



Topik Material Material Topic	Kenapa Topik ini Material Why This Topic is Material	Nomor Pengungkapan GRI Standards Disclosure Number GRI Standards	Boundary Boundary		
			Di dalam PNM In PNM	Di luar PNM Outside PNM	
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Occupational Health and Safety	Menggambarkan komitmen Perusahaan tentang pentingnya mewujudkan lingkungan kerja yang sehat dan aman It describes the Company's commitment to creating a healthy and safe working environment	403-1	Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Occupational health and safety management system	√	
		403-2	Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden Hazard identification, risk assessment and incident investigation		
		403-3	Layanan kesehatan kerja Occupational health services		
		403-4	Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja Participation, consultation and communication of workers regarding occupational safety and health		
		403-5	Pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja Training for workers on occupational health and safety		
		403-6	Peningkatan kualitas kesehatan pekerja Improving the quality of workers' health		
		403-7	Pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis Prevention and mitigation of the impacts of occupational safety and health that are directly related to business relationships		
		403-8	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Workers covered by the occupational health and safety management system		
		403-9	Kecelakaan kerja Work-related injuries		
		403-10	Penyakit akibat kerja Occupational disease		
Pelatihan dan Pendidikan Training and Education	Menggambarkan komitmen Perusahaan dalam upaya meningkatkan kompetensi pekerja It describes the Company's commitment to enhancing employee competencies	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan Average hours of training per year per employee	√	
		404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs		
		404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier Percentage of employees who receive regular reviews of performance and career development		
Non-Diskriminasi Non-Discrimination	Menggambarkan komitmen Perusahaan dalam menerapkan kesamaan dan kesetaraan antar-sesama dalam menjalankan operasional usaha It describes the Company's commitment to promoting equality and non-discrimination in its business operations	406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan Cases of discrimination and measures taken to address them	√	



Topik Material Material Topic	Kenapa Topik ini Material Why This Topic is Material	Nomor Pengungkapan GRI Standards Disclosure Number GRI Standards	Boundary Boundary		
			Di dalam PNM In PNM	Di luar PNM Outside PNM	
Masyarakat Lokal Local Community	Menggambarkan komitmen Perusahaan dalam melibatkan masyarakat melalui berbagai program, termasuk mengukur dampak yang ditimbulkannya It describes the Company's commitment to engaging with the community through various programs, including measuring the resulting impacts	413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan Operations involving local community participation, impact assessments, and community development initiatives	✓	✓
		413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal Operations with actual or potential significant adverse impacts on local communities		

Tabel Dampak Topik Material terhadap Pemangku Kepentingan  
Table of Material Topic Impacts on Stakeholders

Topik Material Material Topic	Regulator/ Pemerintah Regulator/ Government	Nasabah/UMK Customer/MSE	Investor Investor	Karyawan Employee	Mitra/Vendor Partner/Vendor	Masyarakat Lokal Local Community
Kinerja Ekonomi Economic Performance	Kontribusi pada stabilitas sektor keuangan & kepatuhan pelaporan Contribution to financial sector stability & compliance reporting	Keberlanjutan akses pembiayaan Sustainability of financing access	Profitabilitas & prospek dividen Profitability & dividend prospects	Stabilitas pekerjaan Job stability	Keberlanjutan kerja sama Sustainability of partnerships	Pertumbuhan ekonomi daerah Regional economic growth
Dampak Ekonomi Tak Langsung Indirect Economic Impact	Mendukung inklusi keuangan nasional Supporting national financial inclusion	Peningkatan pendapatan & kapasitas usaha Increase in income & business capacity	Kontribusi sosial meningkatkan nilai perusahaan Social contribution enhancing corporate value	Penguatan peran pendampingan Strengthening the role of mentoring/support	Mendorong permintaan jasa lokal Encouraging demand for local services	Pemberdayaan ekonomi komunitas Community economic empowerment
Antikorupsi Anti-Corruption	Kepatuhan POJK & GCG Compliance with POJK & GCG	Transparansi layanan Service transparency	Pengurangan risiko reputasi & hukum Reduction of reputational & legal risks	Perlindungan whistleblower & etika kerja Whistleblower protection & work ethics	Pengadaan yang adil Fair procurement	Meningkatkan kepercayaan publik Enhancing public trust
Energi Energy	Kepatuhan efisiensi energi Compliance with energi efficiency regulations	-	Efisiensi biaya operasional Operational cost efficiency	Efisiensi fasilitas kerja Workplace facility efficiency	-	Dampak lingkungan lebih rendah Lower environmental impact
Air & Efluen Water & Effluent	Kepatuhan aturan air & limbah Compliance with water & waste management	-	-	Penggunaan air bertanggung jawab Responsible water use	-	Menghindari potensi pencemaran Avoiding potential pollution
Emisi Emissions	Dukungan pada target penurunan emisi Supporting emission reduction targets	-	Meningkatkan profil ESG Enhancing ESG profile	Digitalisasi mengurangi perjalanan dinas Digitalization reduces business travel	-	Kualitas lingkungan lebih baik Improved environmental quality

Topik Material Material Topic	Regulator/ Pemerintah Regulator/ Government	Nasabah/UMK Customer/MSE	Investor Investor	Karyawan Employee	Mitra/Vendor Partner/Vendor	Masyarakat Lokal Local Community
Kepegawaian Employment	Kepatuhan ketenagakerjaan Compliance with labor regulations	Pelayanan lebih optimal karena SDM lebih baik Better service quality due to improved human resources	Stabilitas operasional Operational stability	Kesejahteraan, hak, dan peluang karier Employee welfare, rights, and career opportunities	-	-
Kesehatan & Keselamatan Kerja (K3) Occupational Health and Safety (OHS)	Kepatuhan standar K3 Compliance with OHS standards	Layanan lebih lancar tanpa gangguan operasional Smoother services without operational disruptions	Mengurangi risiko operasional Reduced operational risks	Perlindungan dari kecelakaan kerja Protection from workplace accidents	-	-
Pelatihan & Pendidikan Training & Education	Kesesuaian SDM dengan kebutuhan sektor Alignment of human resources with sector needs	Peningkatan kualitas layanan & pendampingan Improved service quality & mentoring	SDM kompeten meningkatkan kinerja Competent human resources enhance performance	Peningkatan skill & karier Skills and career development	-	Edukasi keuangan bagi masyarakat Financial education for the community
Non-Diskriminasi Non-Discrimination	Kepatuhan kesetaraan & HAM Compliance with equality & human rights	Layanan lebih adil & inklusif More equitable & inclusive services	Menekan risiko sosial Mitigating social risks	Lingkungan kerja aman, inklusif Safe and inclusive working environment	-	Citra positif perusahaan Positive corporate image
Masyarakat Lokal Local Community	Mendukung program pembangunan daerah Supporting regional development programs	Akses pelatihan & pembiayaan Access to training & financing	Meningkatkan nilai keberlanjutan perusahaan Enhancing the company's sustainability value	Keterlibatan sosial SDM Employee social engagement	-	Pemberdayaan sosial-ekonomi lokal Local socio-economic empowerment

### Pernyataan Ulang Informasi Restatement of Information

Untuk mendukung validitas isi laporan, apabila terdapat pernyataan ulang informasi yang diberikan dalam laporan sebelumnya, kami memberi tanda \*disajikan kembali.\* [GRI 2-4]

To support the validity of the report's content, any information restated from previous reports is marked as "re-stated." [GRI 2-4]

### Verifikasi oleh Pihak Independen Independent Verification

Saat ini, Laporan Keberlanjutan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Tahun 2025 masih menunggu hasil verifikasi oleh Penyedia Jasa Assurance (*Assurance Services Provider*) independen yaitu PT Sucofindo sesuai dengan standar AA1000. Pihak assesor tidak terlibat dalam proses penyusunan laporan dan dengan demikian tidak ada benturan kepentingan. [GRI 2-5]

Currently, PT Permodalan Nasional Madani's (PNM) 2025 Sustainability Report is still awaiting verification by an independent Assurance Services Provider, PT Sucofindo, in accordance with the AA1000 standard. The assurance provider was not involved in the report's preparation process; therefore, there is no conflict of interest. [GRI 2-5]



## Aksesibilitas dan Umpan Balik Accessibility and Feedback

PNM mengajak para pemangku kepentingan untuk mengakses dan mengunduh Laporan Keberlanjutan melalui situs resmi: <http://www.pnm.co.id>. Kami membuka ruang dialog dan menyambut setiap komentar, ide, maupun umpan balik guna mendukung peningkatan kualitas pelaporan di periode mendatang. Seluruh masukan tersebut dapat disampaikan kepada kami melalui: [GRI 2-3]

PNM invites stakeholders to access and download the Sustainability Report via the official website: <http://www.pnm.co.id>. We provide a platform for dialogue and welcome comments, ideas, or feedback to help improve the quality of reporting in future periods. All inputs can be submitted to us through: [GRI 2-3]


Sekretaris Perusahaan  
Corporate Secretary

### PT Permodalan Nasional Madani (PNM)

Kantor Pusat:  
Head Office:

Menara PNM | PNM Tower  
Jl. Kuningan Mulia No. 9F, RT 004/RW 010  
Kuningan Center Lot 1 (Kav 1),  
Kelurahan | Sub District Karet,  
Kecamatan | District Setiabudi,  
Jakarta Selatan | South Jakarta 12920  
Telepon | Telephone: +6221 2511404 (*hunting*)  
Faksimile | Facsimile: +6221 2511405, 251155  
*E-mail*: [info@pnm.co.id](mailto:info@pnm.co.id)



The background features a soft-focus photograph of two women in a professional setting, possibly a meeting. One woman with long dark hair is seen from the back, wearing a light-colored top. Another woman in a blue shirt is partially visible to her right. A large, semi-transparent blue circle is overlaid on the right side of the image. The overall lighting is warm and golden, with a bokeh effect of light spots.

05

**Profil  
Perusahaan**

*Company Profile*



# Identitas Perusahaan

## Corporate Identity



**Nama Perusahaan [GRI 2-1]**  
Company Name [GRI 2-1]

---

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI

**Nama Panggilan**  
Company Brand

---

PNM

**Bidang Usaha [GRI 2-6]**  
Line of Business [GRI 2-6]

---

Jasa Keuangan Non Bank  
Non-Bank Financial Services

**Tanggal Pendirian**  
Date of Establishment

---

1 Juni 1999  
June 1, 1999

**Dasar Hukum Pendirian**  
Legal Basis of Establishment

---

**Jasa Keuangan Non Bank**  
Non-Bank Financial

- Peraturan Pemerintah RI No. 38 tanggal 25 Mei 1999
- Peraturan Menteri Kehakiman No. C-11.609.HT.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999
- SK Menteri Keuangan No. 487/KMK.017.1999 tanggal 13 Oktober 1999
- Indonesian Government Regulation Number 38 dated May 25, 1999
- Minister of Justice Regulation Number C-11.609.HT.01.TH.99 dated June 23, 1999
- Decree of the Minister of Finance Number 487/KMK.017.1999 dated October 13, 1999

**Kepemilikan Saham [GRI 2-1]**  
Share Ownership [GRI 2-1]

---

99,99997

0,00003

- 0,00003% Pemerintah Republik Indonesia (Saham Seri A Dwiwarna)  
0.00003% Republic of Indonesia (Series A Dwiwarna)
- 99,99997% PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Saham Seri B)  
99.99997% PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Series B)



**Entitas Anak**  
Subsidiaries

- PNM Investment Management
- PNM Venture Capital



**Jumlah Pegawai**  
Number of Employees

71.566 Orang  
71,566 People



**Modal Dasar**  
Authorized Capital

Rp9.200.000.000.000  
IDR9,200,000,000,000



**Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh**  
Issued and Fully Paid-Up Capital

Rp3.800.000.000.000  
IDR3,800,000,000,000



**Data Jaringan Kantor**  
Office Network Data

- 1 Kantor Pusat  
1 Head Office
- 58 Kantor Cabang  
58 Branch Offices
- 620 Kantor Layanan ULamm  
620 ULaMM Service Offices
- 3.977 Kantor Layanan PNM Mekaar  
3,977 PNM Mekaar Service Offices



**Sekretaris Perusahaan**  
Corporate Secretary

Lalu Dodot Patria Ary Suprianto



**Alamat Kantor Pusat [GRI 2-1] [OJK C.2]**  
Head Office Address [GRI 2-1] [OJK C.2]

Menara PNM | PNM Tower

Jl. Kuningan Mulia No. 9F, RT 004 | RW 010  
Kuningan Center Lot 1 (Kav 1),  
Kelurahan | Sub District Karet, Kecamatan | District Setiabudi,  
Jakarta Selatan | South Jakarta 12920

**Telepon**  
Telephone

+62-21 2511-404 (Hunting)  
1500-654 (Call Center)

**E-mail**  
E-mail

info@pnm.co.id

**Faksimile**  
Facsimile

+62-21-2511405, 251155

**Website**  
Website

www.pnm.co.id

Permodalan Nasional Madani

pnm\_persero

@PTPNM\_official

PT PNM Official

@liffeatpnm



## Riwayat Singkat Brief History



PT Permodalan Nasional Madani, selanjutnya disebut “PNM” atau “Perusahaan”, didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan jasa pembiayaan, termasuk kredit program dan jasa manajemen, guna mendukung pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta kegiatan usaha lain yang menunjang sektor tersebut. Pendirian PNM didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

PT Permodalan Nasional Madani, hereinafter referred to as “PNM” or the “Company”, was established with the purpose of providing financing services, including program loans and management services, to support the development of cooperatives, small and medium enterprises, as well as other business activities that support these sectors. PNM was established pursuant to Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 38 of 1999 dated May 25, 1999 concerning State Capital Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Limited Liability Company (Persero) in the Framework of Developing Cooperatives and Small and Medium Enterprises.



Pendirian tersebut dituangkan dalam Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 Juni 1999 yang dibuat di hadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999. Akta tersebut juga telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah Nomor 4758/BH.09.05/VIM/99 tanggal 27 Agustus 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No. 5681 (“Akta No.1”).

Seiring dengan perkembangan usaha, Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir sebagaimana tertuang pada Akta Nomor 18 tanggal 7 Juni 2023 dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan tertanggal 5 Juli 2023 Nomor AHU-0037792.AH.01.02. TAHUN 2023 serta pelaporannya telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 05 Juli 2023 Nomor AHU-AH.01.09-0134474.

Pada awal beroperasi, PNM memiliki 6 (enam) kantor cabang yang tersebar di Bandung, Surabaya, Makassar, Semarang, Medan, dan Padang, dengan kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) yang dilaksanakan secara tidak langsung melalui Lembaga Keuangan Mitra, seperti bank umum, BPR, dan koperasi dengan skema kredit program. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 487/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999, PNM ditunjuk sebagai Koordinator Penyaluran Kredit Program, untuk menyalurkan dan mengelola 12 skim kredit program eks Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).

Sebagai bentuk transformasi bisnis, pada tahun 2008 PNM mulai melakukan pembiayaan langsung kepada pengusaha mikro melalui pembentukan Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM). Unit ini memberikan akses permodalan sekaligus pendampingan usaha melalui Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU). Dimulai dengan membuka 4 (empat) Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) yaitu Unit Guntur di Garut, Unit Cicalengka di Bandung, Unit Cihideung di Tasikmalaya (26 Juli 2008) dan Unit Mayor Oking di Bogor (27 Juli 2008). Hingga saat ini, jumlah unit ULaMM telah berkembang menjadi 620 unit layanan di seluruh Indonesia.

The establishment of PNM was stipulated in Deed of Establishment Number 1, dated June 1, 1999, made before Ida Sofia, S.H., a Notary in Jakarta, and was approved by the Minister of Law and Human Rights based on Decree Number C-11.609.HT.01.01.TH.99, dated June 23, 1999. It was registered at the Central Jakarta Company Registration Office under Number 4758/BH.09.05/VIM/99, dated August 27, 1999, and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 73, dated September 10, 1999, Supplement No. 5681 (“Deed Number 1”).

Over the years, the Deed of Establishment has undergone multiple amendments, with the latest amendment documented in the Deed No. 18 dated June 7, 2023, executed before Hadijah, S.H., a Notary in Jakarta, which Deed has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia pursuant to the Decision dated July 5, 2023, Number AHU-0037792.AH.01.02. 2023, and its report has been received and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia pursuant to the Letter of Receipt of Notification of Amendments to the Articles of Association dated July 5, 2023, No. AHU-AH.01.09-0134474.

At the commencement of its operations, PNM operated 6 (six) branch offices located in Bandung, Surabaya, Makassar, Semarang, Medan, and Padang. At that time, empowerment activities for Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives (MSMECs) were carried out indirectly through Partner Financial Institutions, such as commercial banks, Rural Banks (BPR), and cooperatives, under program credit schemes. Furthermore, pursuant to the Decree of the Minister of Finance Number 487/KMK.017/1999 dated October 13, 1999, PNM was appointed as the Coordinator for the Distribution of Program Credit, responsible for the disbursement and management of 12 (twelve) former Bank Indonesia Liquidity Credit (KLBI) program credit schemes.

As part of its business transformation, in 2008 PNM commenced direct financing to micro-entrepreneurs through the establishment of Micro Capital Service Units (ULaMM). These units provide access to capital as well as business assistance through the Business Capacity Development Program (PKU). The initiative began with the opening of four (4) ULaMM units, namely Guntur Unit in Garut, Cicalengka Unit in Bandung, Cihideung Unit in Tasikmalaya (July 26, 2008), and Mayor Oking Unit in Bogor (July 27, 2008). To date, the number of ULaMM units has expanded to 620 service units across Indonesia.

Pada akhir tahun 2015, PNM melakukan ekspansi bisnis pada kelompok wanita prasejahtera dengan produk PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), dengan membuka 2 (dua) kantor cabang PNM Mekaar yaitu Kantor Unit Mekaar Cilincing dan Penjaringan, guna membuka akses pembiayaan yang berbasis kelompok bagi masyarakat perempuan prasejahtera di sekitar Jakarta. Hingga akhir tahun 2025 total nasabah PNM Mekaar sudah mencapai 13.171.699 nasabah. Pada tahun yang sama, Pemerintah Indonesia melakukan Penambahan Penyertaan Modal ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PNM sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) melalui APBN-Perubahan 2015 ditetapkan Dalam PP Nomor 117 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani.

At the end of 2015, PNM expanded its business to serve underprivileged women through the launch of PNM Mekaar (Fostering a Prosperous Family) by opening 2 (two) PNM Mekaar Unit Offices, namely Mekaar Cilincing Branch and Mekaar Penjaringan Branch, to provide group-based financing access for underprivileged women communities in and around Jakarta. As of the end of 2025, the total number of PNM Mekaar customers had reached 13,171,699 customers. In the same year, the Government of the Republic of Indonesia injected additional state capital into the Company in the amount of IDR1,000,000,000,000 (one trillion Rupiah) through the 2015 Revised State Budget, as stipulated in Government Regulation Number 117 of 2015 concerning Additional State Capital Participation of the Republic of Indonesia in the Share Capital of PT Permodalan Nasional Madani (Persero).





Pada 2 Juli 2021 melalui PP Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk yang atas pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia kepada PT PNM (Persero) menjadi sebanyak 3.799.999 saham Seri B. Atas penyertaan tersebut telah diaktakan berdasarkan Akta Notaris Hadijah SH, nomor 59 Tanggal 28 Oktober 2021 telah berubah menjadi PT Permodalan Nasional Madani, dengan perubahan komposisi kepemilikan saham sebagai berikut: Negara Republik Indonesia selaku pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebanyak 1 saham atau sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Seri B sebanyak 3.799.999 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham atau sejumlah Rp3.799.999.000.000 (tiga triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Pada tahun 2021, Perusahaan memasuki babak baru dalam perjalanan usahanya. Seiring dengan semakin pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional, Pemerintah Republik Indonesia mengambil inisiatif untuk membentuk  *Holding*  Ultra Mikro yang terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Permodalan Nasional Madani, dan PT Pegadaian. Pembentukan  *holding*  ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM di tanah air.

Bergabungnya PNM ke dalam  *Holding*  Ultra Mikro ini, memberikan semangat baru bagi Perusahaan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas program pemberdayaan usaha ultra mikro dan UMK, terutama bagi perempuan prasejahtera dan pengusaha ultra mikro yang selama ini belum terlayani oleh lembaga keuangan formal.

On July 2, 2021, pursuant to Government Regulation Number 73 of 2021 concerning Additional State Capital Participation of the Republic of Indonesia in the Share Capital of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, the Government of the Republic of Indonesia increased its capital participation in PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk through the transfer of all Series B shares owned by the Government of the Republic of Indonesia to PT Permodalan Nasional Madani (Persero), totaling 3,799,999 Series B shares. This capital participation was formalized under Notarial Deed Number 59 dated October 28, 2021 of Notary Hadijah, S.H., resulting in PT Permodalan Nasional Madani, with the following shareholding composition: the Government of the Republic of Indonesia as the holder of Series A Dwiwarna shares, consisting of 1 share with a value of IDR1,000,000 (one million Rupiah), and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the holder of 3,799,999 Series B shares with a total value of IDR3,799,999,000,000 (three trillion seven hundred and ninety-nine billion nine hundred and ninety-nine million Rupiah).

In 2021, the Company entered a new phase in its business journey. In line with the increasingly strategic role of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the national economy, the Government of the Republic of Indonesia initiated the establishment of the Ultra Micro Holding, comprising PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Permodalan Nasional Madani, and PT Pegadaian. The formation of this holding aims to enhance the empowerment of MSMEs nationwide.

PNM integration into the Ultra Micro Holding has provided renewed momentum for the Company to expand its outreach and improve the effectiveness of empowerment programs for ultra-micro enterprises and MSMEs, particularly underprivileged women and ultra-micro entrepreneurs who have previously had limited access to formal financial institutions.



## Visi, Misi dan Nilai Keberlanjutan [OJK C.1] Sustainability Vision, Mission and Values [OJK c.1]

Visi dan Misi Keberlanjutan PNM telah selaras dengan Visi dan Misi PNM yang lebih menekankan pada aspek ekonomi dan sosial.

PNM Sustainability Vision and Mission are in line with PNM Vision and Mission to place greater emphasis on economic and social aspects.





# Visi Keberlanjutan

## Sustainability Vision



Menjadi Lembaga Keuangan Terkemuka Melalui Pelayanan, Pemberdayaan dan Penciptaan Nilai Tambah Bagi Pengusaha Ultra Mikro, Mikro dan Kecil secara Berkelanjutan

Becoming a Leading Financial Institution Through Service, Empowerment and Creation of Added Value for Ultra Micro, Micro and Small Business Actors in Sustainable Manner.

# Misi Keberlanjutan

## Sustainability Mission



- Meningkatkan akses layanan pembiayaan lebih luas kepada masyarakat dan pemberdayaan berkesinambungan yang memberikan manfaat nyata terhadap peningkatan kapasitas usaha nasabah
- Memperkuat kinerja usaha dengan profitabilitas terus meningkat melalui pendapatan yang terus tumbuh, melakukan inovasi untuk bekerja lebih efisien dan efektif, pengelolaan risiko terkendali serta tata kelola yang baik
- Mengembangkan ekosistem, memberikan kontribusi secara finansial dan sumber pertumbuhan nasabah mikro kecil kepada holding ultra mikro
- Meningkatkan produktivitas dan kompetensi pegawai menjadi terbaik, beretika serta profesional dalam mengelola pembiayaan berbasis kelompok
- Increase wider access to financing services for the community and sustainable empowerment which provides real benefits for customers' business capacity increase
- Strengthen business performance with continuously increasing profitability through growing revenues, innovation to more efficient and effective work, controlled risk management and good governance
- Develop an ecosystem, provide financial contributions and sources of growth for micro and small customers for ultra micro holding
- Increase employee productivity and competency to become the best, ethical and professional in managing group-based financing

# Nilai Keberlanjutan

## Sustainability Value

Sejalan dengan bidang usaha Perusahaan, fokus nilai keberlanjutan diarahkan pada aspek ekonomi dan sosial melalui komitmen untuk mendorong perbaikan ekonomi nasional, khususnya dengan meningkatkan nilai tambah bagi para pengusaha UMKMK.

In accordance with the Company's business activities, values of sustainability are emphasized more on economic and social aspects, namely by committing to support the national economy improvement by increasing the added value of MSMEs.



# BRILLIAN WAY PNM



## Integrity



**Menjunjung tinggi profesionalismes, etika, dan kejujuran dengan mempertimbangkan risiko dalam setiap tindakan**

**Upholding professionalism, ethics, and honesty while considering risks in every action**

- Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku
- Menolak dan melaporkan segala bentuk tindakan yang tidak jujur atau bertentangan dengan etika kerja
- Menjadi teladan dalam menjunjung tinggi nilai integritas, baik dalam sikap maupun tindakan sehari-hari
- Carrying out duties with full responsibility in accordance with applicable policies and procedures
- Rejecting and reporting any form of dishonest actions or those contrary to work ethics
- Serving as a role model in upholding integrity in both attitude and daily actions



## Collaborative



**Bersinergi dan berkontribusi aktif untuk mencapai tujuan bersama**

**Collaborating and actively contributing to achieve shared goals**

- Mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi dan tim
- Membangun komunikasi dalam menyampaikan ide dan solusi yang membangun
- Memberikan pelayanan terbaik untuk pencapaian kinerja bisnis
- Prioritizing the interests of the Company over personal and team interests
- Building communication in delivering constructive ideas and solutions
- Providing the best service to achieve business performance



## Accountability



**Tanggung jawab penuh terhadap pengembangan diri, disiplin dalam eksekusi untuk hasil optimal**

**Full responsibility for self-development, discipline in execution for optimal results**

- Melaksanakan pekerjaan secara transparan, jujur, dan bertanggung jawab
- Menyelesaikan tugas sesuai dengan komitmen dan tepat waktu
- Meningkatkan kompetensi diri dan tim untuk mencapai kinerja yang unggul
- Performing work in a transparent, honest, and accountable manner
- Completing tasks in accordance with commitments and in a timely manner
- Enhancing individual and team competencies to achieve superior performance



## Growth Mindset



**Adaptif, inovatif, dan terbuka terhadap proses pembelajaran di setiap tahap perubahan**

**Adaptive, innovative, and open to learning processes at every stage of change**

- Menumbuhkan dorongan untuk terus berkembang dan beradaptasi terhadap segala perubahan (memiliki *sense of crisis*)
- Menumbuhkan mental pantang menyerah (resiliensi) yang mendorong pertumbuhan terus menerus
- Mendorong semangat belajar untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan perilaku
- Fostering the drive to continuously grow and adapt to all changes (having a sense of crisis)
- Building resilience that encourages continuous growth
- Encouraging a learning spirit to enhance skills, knowledge, and behavior



## Customer Focus



**Berempati memberikan layanan dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan nasabah**

**Empathetic in providing services and solutions aligned with customer needs**

- Memberikan pelayanan terbaik kepada semua pihak internal (seluruh unit kerja) maupun eksternal (nasabah)
- Memahami kebutuhan nasabah dengan memberikan solusi yang terbaik
- Membangun kepercayaan dengan nasabah untuk meningkatkan nilai tambah dan hubungan jangka panjang
- Delivering the best service to all internal parties (all work units) and external parties (customers)
- Understanding customer needs by providing the best solutions
- Building trust with customers to enhance value creation and long-term relationships


**Nama dan Alamat Kantor Cabang dan/atau Kantor Perwakilan**  
 Name and Address of Branch Office and/or Representative Office


No.	Satuan Unit	Alamat Address	Telepon Telephone	E-mail dan Website E-mail and Website
1	Aceh	Jln. Ir. HM. Thaher No. 55 Kelurahan   Sub-district Lueng Bata, Kecamatan   District Lueng Bata Kota   City Banda Aceh 23127	(0651) 40288	pnmbna@pnm.co.id www.pnm.co.id
2	Ambon	Jl. Jendral Sudirman, Batu Merah (Turun-turun Batu Merah), Kecamatan   District Sirimau, Kota   City Ambon, Maluku 97128	(0911) 3940000	pnmambon@gmail.com www.pnm.co.id
3	Balikpapan	Jl. Syarifuddin Yoes Gang Pelita 1 No. 26, RT 012, Kelurahan   Sub-district Sepinggang Raya, Kecamatan   District Balikpapan Selatan   South Balikpapan, Kota   City Balikpapan 76115	(0542) 7203830	pnmbpn@pnm.co.id www.pnm.co.id
4	Bandung	Jl. Ibrahim Adjie No. 416, Kelurahan   Sub-district Binong, Kecamatan   District Batununggal, Kota   City Bandung Provinsi   Province Jawa Barat   West Java 40275	(022) 87355164	pnmbandung@gmail.com www.pnm.co.id
5	Bangka Belitung	Jl. Depati Amir No. 209, RT 003/RW 007, Kelurahan   Sub-district Keramat, Kecamatan   District Rangkui, Kota   City Pangkal Pinang, Provinsi   Province Kepulauan Bangka Belitung   Bangka Belitung Islands 33134	(0717) 9102299	bkb.pnm@gmail.com www.pnm.co.id
6	Banjarmasin	Jl. Bumi Mas Raya No. 7, RT 006/RW 003, Kelurahan   Sub-district Pemurus Baru, Kecamatan   District Banjarmasin Selatan   South Banjarmasin, Kota   City Banjarmasin, Kalimantan Selatan   South Kalimantan 70236	(0511) 6742696	pnmbjm@gmail.com www.pnm.co.id





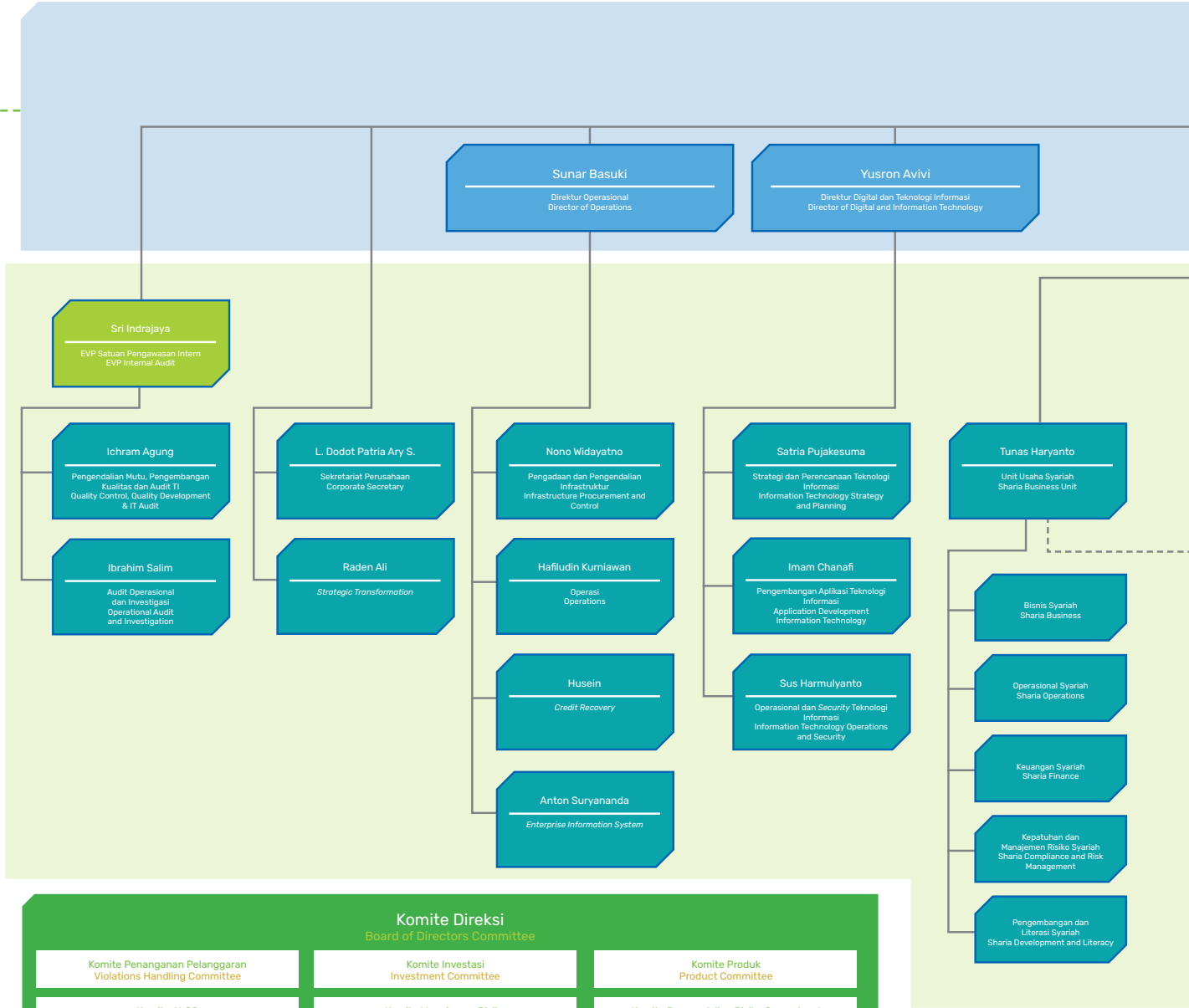
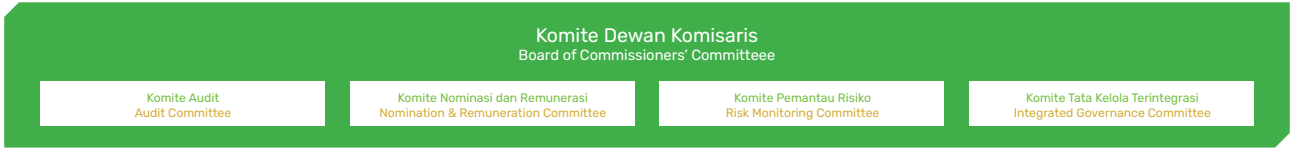


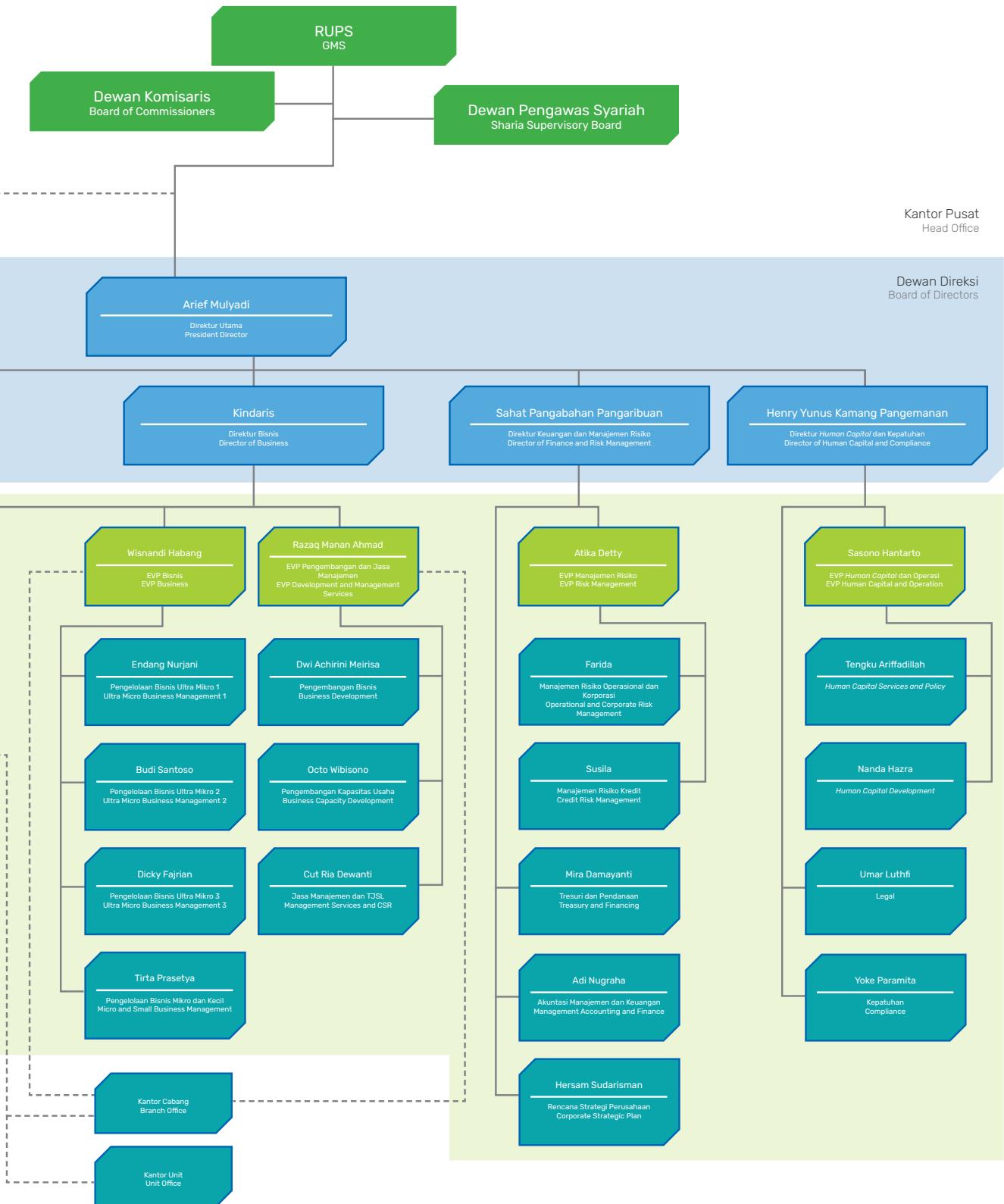




# Struktur Organisasi [GRI 2-9]

## Organizational Structure [GRI 2-9]





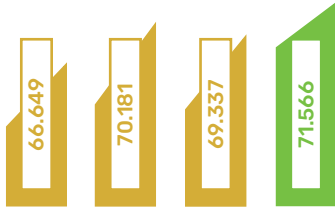
1. Keselarasan fungsi divisi sesuai perubahan nomenklatur 2 (dua) Direktorat menjadi Direktorat Keuangan & Manajemen Risiko serta Direktorat Human Capital & Kepatuhan.
2. Penempatan UUS langsung di bawah Direktur Bisnis.
3. Pengembangan fungsi-fungsi pada Struktur Organisasi UUS untuk penguatan koordinasi lintas unit kerja terutama dalam pengelolaan Bisnis Syariah, Operasional Syariah, Keuangan Syariah, Kepatuhan dan Manajemen Risiko Syariah, serta Pengembangan dan Literasi Syariah.

1. Alignment of divisional functions in accordance with the change in nomenclature of two (2) Directorates into the Directorate of Finance & Risk Management and the Directorate of Human Capital & Compliance.
2. Placement of the Sharia Business Unit (UUS) directly under the Director of Business.
3. Development of functions within the UUS Organizational Structure to strengthen cross-unit coordination, particularly in the management of Sharia Business, Sharia Operations, Sharia Finance, Sharia Compliance and Risk Management, as well as Sharia Development and Literacy.

# Skala Perusahaan [GRI 2-6, 2-7][OJK C.3]

## Business Scale [GRI 2-6, 2-7][OJK C.3]

### Jumlah Karyawan Number of Employees



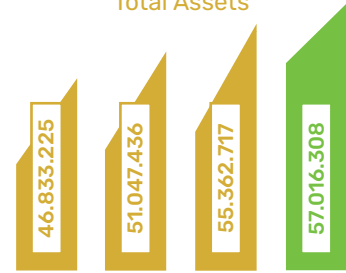
2022 2023 2024 2025  
dalam jutaan rupiah  
in million IDR

### Pendapatan Bunga dan Syariah - Bersih Interest and Sharia Revenues - Net



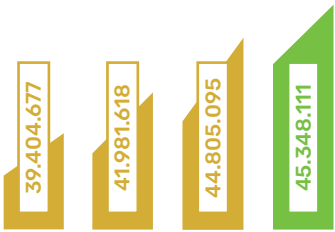
2022 2023 2024 2025  
dalam jutaan rupiah  
in million IDR

### Total Aset Total Assets



2022 2023 2024 2025  
dalam jutaan rupiah  
in million IDR

### Total Liabilitas Total Liabilities



2022 2023 2024 2025  
dalam jutaan rupiah  
in million IDR

### Total Ekuitas Total Equity



2022 2023 2024 2025  
dalam jutaan rupiah  
in million IDR

### Total Kapitalisasi (Liabilitas, Hak Minoritas, dan Ekuitas) Total Capitalization (Liabilities, Minority Interests, and Equity)



2022 2023 2024 2025  
dalam jutaan rupiah  
in million IDR

### Total Kepemilikan Saham Total Share Ownership

Persentase  
Percentage

- 2022**
- 0,00003% Pemerintah Republik Indonesia (Saham Seri A Dwiwarna)
  - 99,99997% PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Saham Seri B)
  - 0,00003% by Government of the Republic of Indonesia (Series A Dwiwarna)
  - 99,99997% by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Series B)

- 2023**
- 0,00003% Pemerintah Republik Indonesia (Saham Seri A Dwiwarna)
  - 99,99997% PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Saham Seri B)
  - 0,00003% by Government of the Republic of Indonesia (Series A Dwiwarna)
  - 99,99997% by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Series B)

- 2024**
- 0,00003% Pemerintah Republik Indonesia (Saham Seri A Dwiwarna)
  - 99,99997% PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Saham Seri B)
  - 0,00003% by Government of the Republic of Indonesia (Series A Dwiwarna)
  - 99,99997% by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Series B)

- 2025**
- 0,00003% Pemerintah Republik Indonesia (Saham Seri A Dwiwarna)
  - 99,99997% PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Saham Seri B)
  - 0,00003% by Government of the Republic of Indonesia (Series A Dwiwarna)
  - 99,99997% by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Series B)

### Jumlah Produk dan Jasa Number of Products and Services

**2022**

**Jasa**  
Pembiayaan:  
• PNM Mekaar  
• ULaMM

**Jasa Lainnya:**  
Other Services:  
• Jasa Manajemen  
• Management Services

**Financing Services:**  
• PNM Mekaar  
• ULaMM

**2023**

**Jasa**  
Pembiayaan:  
• PNM Mekaar  
• ULaMM

**Jasa Lainnya:**  
Other Services:  
• Jasa Manajemen  
• Management Services

**Financing Services:**  
• PNM Mekaar  
• ULaMM

**2024**

**Jasa**  
Pembiayaan:  
• PNM Mekaar  
• ULaMM

**Jasa Lainnya:**  
Other Services:  
• Jasa Manajemen  
• Management Services

**Financing Services:**  
• PNM Mekaar  
• ULaMM

**2025**

**Jasa**  
Pembiayaan:  
• PNM Mekaar  
• ULaMM

**Jasa Lainnya:**  
Other Services:  
• Jasa Manajemen  
• Management Services

**Financing Services:**  
• PNM Mekaar  
• ULaMM

## Demografi Karyawan [GRI 2-7, 2-8][OJK C.3] Employee Demographics [GRI 2-7, 2-8][OJK C.3]

Per 31 Desember 2025, jumlah pegawai PNM tercatat sebanyak 71.566 orang, bertambah 2.229 orang atau 3,21% dibandingkan tahun 2024 dengan karyawan sebanyak 69.337 orang. Penambahan terjadi karena adanya pembukaan unit baru Mekaar dan penyesuaian kelolaan nasabah per AO Mekaar Komposisi pegawai selengkapnya, termasuk pegawai yang bukan pegawai langsung yaitu pegawai alih daya, disajikan dalam tabel berikut:

As of December 31, 2025, PNM recorded a total of 71,566 employees, an increase of 2,229 employees, or 3.21% compared to 69,337 employees in 2024. The increase was attributable to the establishment of new Mekaar units and adjustments to the number of customers managed per Mekaar Account Officer (AO). A comprehensive elaboration of the workforce, including both direct employees and non-direct employees such as outsourced personnel, is presented in the following table:




**Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin**

Table of Employee Composition by Employment Status and Gender

Status Kepegawaian Employee Status	2025			2024			2023			2022		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
Tetap Permanent	3.052	3.799	6.851	2.900	3.187	6.087	2.829	1.744	4.573	2.627	1.416	4.043
Kontrak Non-Permanent	1.791	3.104	4.895	1.872	3.565	5.437	2.007	4.507	6.514	2.151	4.127	6.278
Alih Daya Outsourced Staff	5.299	54.521	59.820	5.490	52.323	57.813	5.988	53.106	59.094	6.650	49.678	56.328
<b>Jumlah Total</b>	<b>10.142</b>	<b>61.424</b>	<b>71.566</b>	<b>10.262</b>	<b>59.075</b>	<b>69.337</b>	<b>10.824</b>	<b>59.357</b>	<b>70.181</b>	<b>11.428</b>	<b>55.221</b>	<b>66.649</b>


**Tabel Pegawai Sementara [IDX S-04]**

Table of Non-Permanent Employees [IDX S-04]

Uraian Description	Jumlah Pegawai Number of Employees				Persentase Pegawai Percentage of Employees			
	2025	2024	2023	2022	2025	2024	2023	2022
Jumlah pegawai perusahaan yang dipegang oleh kontraktor dan/atau konsultan (alih daya) Number of Contractors and/or Consultants (Outsourced Staff)	59.820	57.813	59.094	56.328	83,59%	83,38%	84,20%	84,51%



**Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Jabatan dan Jenis Kelamin**  
Table of Employee Composition by Position and Gender

Level Jabatan Position	2025			2024			2023			2022		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
Komisaris Board of Commissioners	3	3	6	4	2	6	3	2	5	3	2	5
Direktur Board of Directors	6	-	6	5	1	6	4	-	4	4	1	5
Manajemen Puncak Top Management	28	6	34	26	6	32	23	6	29	26	6	32
Manajemen Menengah Middle Management	318	96	414	332	106	438	305	187	492	297	166	463
Manajemen Pelaksana Executive Management	2.247	5.708	7.955	2.133	5.531	7.664	2.360	5.315	7.675	3.393	4.859	8.252
Staf Staff	2.241	1.090	3.331	2.271	1.106	3.377	2.254	771	3.025	1.053	509	1.562
Alih Daya Outsourced Staff	4.355	54.452	58.807	4.589	52.252	56.841	5.013	53.000	58.013	5.908	49.612	55.520
Non-Staf Non-Staff	944	69	1.013	902	71	973	862	76	938	744	66	810
<b>Jumlah Total</b>	<b>10.142</b>	<b>61.424</b>	<b>71.566</b>	<b>10.262</b>	<b>59.075</b>	<b>69.337</b>	<b>10.824</b>	<b>59.357</b>	<b>70.181</b>	<b>11.428</b>	<b>55.221</b>	<b>66.649</b>




**Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Wilayah Kerja dan Jenis Kelamin**

Table of Employee Composition by Work Area and Gender

Wilayah Kerja Work Area	2025			2024			2023			2022		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
Kantor Pusat Head Office	1.435	888	2.323	1.093	735	1.828	997	689	1.686	923	629	1.552
Aceh	102	1.475	1.577	56	1.035	1.091	58	1.091	1.149	58	919	977
Ambon	37	286	323	33	242	275	43	259	302	41	198	239
Balikpapan	60	437	497	35	182	217	40	150	190	35	135	170
Bandung	177	2.327	2.504	133	1.493	1.626	143	1.523	1.666	142	1.453	1.595
Bangka Belitung	56	355	411	38	366	404	38	300	338	36	232	268
Banjarmasin	85	609	694	85	589	674	82	490	572	77	475	552
Banjarnegara	104	734	838	135	751	886	205	630	835	236	468	704
Banyuwangi	264	479	743	216	451	667	235	535	770	233	547	780
Baubau	57	249	306	45	207	252	51	195	246	59	171	230
Bekasi	102	2.093	2.195	99	1.755	1.854	87	1.742	1.829	87	1.666	1.753
Blitar	86	253	339	107	239	346	99	270	369	84	248	332
Bogor	73	1.389	1.462	58	1.306	1.364	61	1.352	1.413	61	1.264	1.325
Bojonegoro	243	591	834	228	532	760	211	530	741	223	602	825
Cimahi	-	-	-	54	680	734	54	752	806	50	714	764
Cirebon	137	1.020	1.157	167	944	1.111	206	1.032	1.238	324	950	1.274
Denpasar	126	2.164	2.290	112	1.934	2.046	149	1.957	2.106	103	1.830	1.933
Depok	47	774	821	41	636	677	47	586	633	48	535	583
Garut	77	1.379	1.456	88	1.387	1.475	89	1.619	1.708	94	1.432	1.526
Indramayu	106	937	1.043	119	972	1.091	146	977	1.123	212	911	1.123
Jakarta	108	939	1.047	111	844	955	105	965	1.070	100	980	1.080
Jambi	127	1.077	1.204	157	934	1.091	197	948	1.145	236	758	994
Jember	431	970	1.401	521	942	1.463	498	1.095	1.593	412	1.210	1.622
Kabangjahe	73	951	1.024	91	977	1.068	94	946	1.040	93	859	952
Karawang	3	3	6	5	2	7	4	2	6	5	3	8
Kediri	215	656	871	255	617	872	242	640	882	275	640	915
Kendari	62	360	422	77	302	379	88	280	368	87	262	349
Lamongan	121	757	878	110	712	822	129	728	857	156	778	934
Lampung	280	2.494	2.774	411	2.576	2.987	985	1.958	2.943	625	1.949	2.574
Madiun	324	639	963	238	620	858	285	614	899	231	614	845
Magelang	122	697	819	140	674	814	169	620	789	213	556	769
Makassar	129	2.063	2.192	133	1.949	2.082	148	1.962	2.110	162	1.791	1.953
Malang	267	774	1.041	243	786	1.029	213	790	1.003	251	725	976
Manado	81	1.106	1.187	78	1.015	1.093	75	1.066	1.141	81	1.015	1.096
Mataram	254	1.840	2.094	227	1.805	2.032	239	1.887	2.126	196	1.770	1.966



Wilayah Kerja Work Area	2025			2024			2023			2022		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
Medan	102	1.990	2.092	129	2.249	2.378	137	2.328	2.465	140	1.862	2.002
Mojokerto	196	580	776	158	588	746	172	606	778	213	644	857
Pacitan	-	-	-	116	110	226	117	113	230	108	139	247
Padang	202	1.707	1.909	421	1.538	1.959	185	1.680	1.865	330	1.406	1.736
Palembang	184	2.195	2.379	183	2.256	2.439	279	2.195	2.474	258	2.149	2.407
Palopo	65	288	353	74	266	340	78	277	355	79	225	304
Palu	124	921	1.045	81	835	916	68	789	857	62	776	838
Pati	191	1.331	1.522	190	1.296	1.486	196	1.344	1.540	332	1.246	1.578
Pekanbaru	130	1.414	1.544	198	1.503	1.701	186	1.317	1.503	418	1.279	1.697
Pematang Siantar	83	1.512	1.595	95	1.577	1.672	95	1.571	1.666	97	1.237	1.334
Pontianak	70	581	651	75	532	607	77	518	595	83	430	513
Probolinggo	455	961	1.416	424	938	1.362	370	994	1.364	284	1.059	1.343
Purwokerto	149	1.079	1.228	147	1.036	1.183	188	1.069	1.257	257	999	1.256
Samarinda	-	-	-	34	189	223	35	128	163	33	105	138
Semarang	126	911	1.037	159	891	1.050	160	844	1.004	220	779	999
Serang	62	1.458	1.520	56	1.504	1.560	53	1.583	1.636	49	1.566	1.615
Singaraja	-	-	-	31	11	42	33	34	67	60	91	151
Sintang	44	215	259	45	209	254	45	134	179	43	101	144
Solo	125	777	902	145	715	860	169	682	851	243	551	794
Subang	80	615	695	77	667	744	77	672	749	84	613	697
Sukabumi	81	1.515	1.596	85	1.513	1.598	87	1.494	1.581	88	1.356	1.444
Surabaya	816	1.710	2.526	810	1.718	2.528	575	1.873	2.448	580	1.943	2.523
Tangerang	91	1.431	1.522	85	1.437	1.522	79	1.433	1.512	80	1.375	1.455
Tarakan	20	87	107	21	76	97	20	50	70	20	45	65
Tasikmalaya	153	1.464	1.617	135	1.466	1.601	197	1.632	1.829	242	1.491	1.733
Tegal	197	1.688	1.885	193	1.655	1.848	252	1.653	1.905	335	1.395	1.730
Tulungagung	176	364	540	134	323	457	122	367	489	108	350	458
Wonogiri	122	302	424	93	247	340	116	211	327	147	169	316
Yogyakarta	127	563	690	129	539	668	144	586	730	186	551	737
<b>Jumlah</b>	<b>10.142</b>	<b>61.424</b>	<b>71.566</b>	<b>10.262</b>	<b>59.075</b>	<b>69.337</b>	<b>10.824</b>	<b>59.357</b>	<b>70.181</b>	<b>11.428</b>	<b>55.221</b>	<b>66.649</b>


**Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Wilayah Kerja dan Status Kepegawaian**

Table of Employee Composition by Work Area and Employment Status

Wilayah Kerja Work Area	2025				2024			
	Tetap Permanent	Kontrak Non-Permanent	Alih Daya Outsourced Staff	Jumlah Total	Tetap Permanent	Kontrak Non- Permanent	Alih Daya Outsourced Staff	Jumlah Total
Kantor Pusat Head Office	1.462	429	432	2.323	922	452	454	1.828
Aceh	89	110	1.378	1.577	69	61	961	1.091
Ambon	30	36	257	323	22	43	210	275
Balikpapan	54	60	383	497	30	29	158	217
Bandung	169	142	2.193	2.504	107	111	1.408	1.626
Bangka Belitung	30	34	347	411	23	39	342	404
Banjarmasin	62	91	541	694	70	81	523	674
Banjarnegara	77	43	718	838	73	47	766	886
Banyuwangi	95	44	604	743	94	50	523	667
Baubau	44	25	237	306	39	29	184	252
Bekasi	96	93	2.006	2.195	79	119	1.656	1.854
Blitar	44	36	259	339	36	46	264	346
Bogor	60	81	1.321	1.462	62	80	1.222	1.364
Bojonegoro	67	58	709	834	69	57	634	760
Cimahi	0	0	0	0	56	47	631	734
Cirebon	105	83	969	1.157	105	92	914	1.111
Denpasar	167	127	1.996	2.290	147	121	1.778	2.046
Depok	48	41	732	821	39	50	588	677
Garut	98	91	1.267	1.456	97	89	1.289	1.475
Indramayu	71	90	882	1.043	77	93	921	1.091
Jakarta	84	63	900	1.047	87	68	800	955
Jambi	100	80	1.024	1.204	93	93	905	1.091
Jember	122	115	1.164	1.401	123	132	1.208	1.463
Kabangjahe	67	67	890	1.024	70	102	896	1.068
Karawang	4	2	0	6	4	2	1	7
Kediri	95	62	714	871	98	66	708	872
Kendari	69	32	321	422	66	49	264	379
Lamongan	93	47	738	878	85	54	683	822
Lampung	167	201	2.406	2.774	162	212	2.613	2.987
Madiun	151	76	736	963	127	74	657	858
Magelang	90	53	676	819	89	56	669	814
Makassar	122	141	1.929	2.192	136	143	1.803	2.082
Malang	90	81	870	1.041	89	83	857	1.029

2023				2022			
Tetap Permanent	Kontrak Non-Permanent	Alih Daya Outsourced Staff	Jumlah Total	Tetap Permanent	Kontrak Non-Permanent	Alih Daya Outsourced Staff	Jumlah Total
792	425	469	1.686	644	359	549	1.55
52	75	1.022	1.149	40	78	859	977
20	46	236	302	19	39	181	239
28	35	127	190	20	31	119	170
92	139	1.435	1.666	80	143	1.372	1.595
19	41	278	338	12	33	223	268
50	85	437	572	48	76	428	552
53	65	717	835	47	66	591	704
77	73	620	770	54	59	667	780
33	31	182	246	28	39	163	230
50	142	1.637	1.829	48	141	1.564	1.753
36	49	284	369	34	38	260	332
53	85	1.275	1.413	43	91	1.191	1.325
51	72	618	741	46	64	715	825
41	59	706	806	38	59	667	764
84	112	1.042	1.238	72	114	1.088	1.274
78	196	1.832	2.106	81	158	1.694	1.933
26	61	546	633	24	60	499	583
74	114	1.520	1.708	74	107	1.345	1.526
57	112	954	1.123	47	116	960	1.123
53	101	916	1.070	43	104	933	1.080
59	111	975	1.145	54	106	834	994
101	147	1.345	1.593	88	133	1.401	1.622
58	97	885	1.040	51	99	802	952
3	3	-	6	5	3	-	8
84	69	729	882	73	74	768	915
53	56	259	368	49	58	242	349
51	86	720	857	48	77	809	934
92	271	2.580	2.943	86	261	2.227	2.574
101	116	682	899	95	102	648	845
72	76	641	789	52	84	633	769
117	162	1.831	2.110	112	164	1.677	1.953
63	101	839	1.003	63	110	803	976





Wilayah Kerja Work Area	2025				2024			
	Tetap Permanent	Kontrak Non-Permanent	Alih Daya Outsourced Staff	Jumlah Total	Tetap Permanent	Kontrak Non- Permanent	Alih Daya Outsourced Staff	Jumlah Total
Manado	84	84	1.019	1.187	64	97	932	1.093
Mataram	124	119	1.851	2.094	97	138	1.797	2.032
Medan	137	136	1.819	2.092	145	162	2.071	2.378
Mojokerto	75	56	645	776	66	63	617	746
Pacitan	0	0	0	0	43	25	158	226
Padang	110	119	1.680	1.909	108	136	1.715	1.959
Palembang	124	116	2.139	2.379	95	162	2.182	2.439
Palopo	55	38	260	353	49	57	234	340
Palu	68	92	885	1.045	62	94	760	916
Pati	147	61	1.314	1.522	136	80	1.270	1.486
Pekanbaru	111	123	1.310	1.544	111	121	1.469	1.701
Pematang Siantar	111	88	1.396	1.595	99	108	1.465	1.672
Pontianak	79	46	526	651	70	64	473	607
Probolinggo	117	76	1.223	1.416	101	91	1.170	1.362
Purwokerto	103	59	1.066	1.228	103	59	1.021	1.183
Samarinda	0	0	0	0	23	37	163	223
Semarang	92	73	872	1.037	106	91	853	1.050
Serang	80	100	1.340	1.520	64	110	1.386	1.560
Singaraja	0	0	0	0	21	12	9	42
Sintang	34	30	195	259	27	41	186	254
Solo	108	60	734	902	124	62	674	860
Subang	54	67	574	695	58	61	625	744
Sukabumi	122	58	1.416	1.596	105	81	1.412	1.598
Surabaya	181	132	2.213	2.526	192	137	2.199	2.528
Tangerang	92	84	1.346	1.522	78	103	1.341	1.522
Tarakan	8	19	80	107	7	21	69	97
Tasikmalaya	128	97	1.392	1.617	133	95	1.373	1.601
Tegal	139	112	1.634	1.885	121	137	1.590	1.848
Tulungagung	65	46	429	540	62	47	348	457
Wonogiri	64	30	330	424	54	32	254	340
Yogyakarta	117	40	533	690	118	43	507	668
<b>Jumlah</b>	<b>6.851</b>	<b>4.895</b>	<b>59.820</b>	<b>71.566</b>	<b>6.087</b>	<b>5.437</b>	<b>57.813</b>	<b>69.337</b>

2023				2022			
Tetap Permanent	Kontrak Non-Permanent	Alih Daya Outsourced Staff	Jumlah Total	Tetap Permanent	Kontrak Non-Permanent	Alih Daya Outsourced Staff	Jumlah Total
42	108	991	1.141	39	110	947	1.096
54	165	1.907	2.126	54	157	1.755	1.966
121	188	2.156	2.465	110	174	1.718	2.002
54	69	655	778	41	69	747	857
40	29	161	230	29	42	176	247
86	149	1.630	1.865	76	155	1.50	1.736
73	165	2.236	2.474	61	158	2.188	2.407
45	51	259	355	45	45	214	304
41	96	720	857	29	85	724	838
86	112	1.342	1.540	78	117	1.383	1.578
72	156	1.275	1.503	64	149	1.484	1.697
62	132	1.472	1.666	63	131	1.140	1.334
52	75	468	595	50	67	396	513
59	112	1.193	1.364	56	111	1.176	1.343
69	95	1.093	1.257	67	91	1.098	1.256
19	32	112	163	20	23	95	138
86	103	815	1.004	78	100	821	999
42	129	1.465	1.636	37	119	1.459	1.615
21	15	31	67	20	15	116	151
23	37	119	179	20	35	89	144
95	96	660	851	96	95	603	794
40	84	625	749	40	82	575	697
60	125	1.396	1.581	48	119	1.277	1.444
119	211	2.118	2.448	116	214	2.193	2.523
53	114	1.345	1.512	49	115	1.291	1.455
4	20	46	70	4	18	43	65
92	133	1.604	1.829	77	141	1.515	1.733
89	158	1.658	1.905	80	145	1.505	1.730
53	47	389	489	48	47	363	458
53	33	241	327	47	34	235	316
95	62	573	730	83	69	585	737
<b>4.573</b>	<b>6.514</b>	<b>59.094</b>	<b>70.181</b>	<b>4.043</b>	<b>6.278</b>	<b>56.328</b>	<b>66.649</b>




**Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Table of Employee Composition by Education Level

Tingkat Pendidikan Education Level	2025			2024			2023			2022		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
S3 Doctoral	3	0	3	1	-	1	3	1	4	2	1	3
S2 Master's Degree	208	83	291	159	82	241	142	72	214	97	40	137
S1 Bachelor's Degree	3.745	7.732	11.477	3.619	6.284	9.903	3.541	5.706	9.247	3.455	3.967	7.422
Diploma Associate Degree	561	1.107	1.668	601	1.027	1.628	634	1.066	1.700	654	845	1.499
SMA dan Sederajat Senior High School or Equivalent	5.625	52.502	58.127	5.882	51.682	57.564	6.504	52.512	59.016	7.220	50.368	57.588
<b>Jumlah Total</b>	<b>10.142</b>	<b>61.424</b>	<b>71.566</b>	<b>10.262</b>	<b>59.075</b>	<b>69.337</b>	<b>10.824</b>	<b>59.357</b>	<b>70.181</b>	<b>11.428</b>	<b>55.221</b>	<b>66.649</b>


**Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia**

Table of Employee Composition by Age

Usia Age	2025			2024			2023			2022		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
18-25	3.895	48.198	52.094	4.287	50.629	54.916	5.033	53.412	58.445	5.915	51.416	57.331
26-33	2.664	12.180	14.844	2.474	7.537	10.011	2.441	5.159	7.600	2.374	3.152	5.526
34-41	2.016	831	2.847	2.085	715	2.800	2.093	619	2.712	2.091	514	2.605
42-49	1.295	165	1.460	1.186	144	1.330	1.058	129	1.187	892	110	1.002
>50	271	50	321	230	50	280	199	38	237	156	29	185
<b>Jumlah Total</b>	<b>10.142</b>	<b>61.424</b>	<b>71.566</b>	<b>10.262</b>	<b>59.075</b>	<b>69.337</b>	<b>10.824</b>	<b>59.357</b>	<b>70.181</b>	<b>11.428</b>	<b>55.221</b>	<b>66.649</b>


**Tabel Jumlah Level Pegawai yang Dimiliki oleh Laki-Laki dan Perempuan Berdasarkan Kelompok Umur [IDX S-02]**

Table of Employee Levels by Gender and Age Group [IDX S-02]

Rentang Usia Age Group	2025								Jumlah Total
	Level Jabatan Employee Level								
	Entry level		Mid level		Senior level		Executive level		
Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female		
18-25	3.895	48.198	1	0	0	0	0	0	52.094
26-33	2.575	12.100	88	79	1	1	0	0	14.844
34-41	1.784	658	215	168	15	3	2	2	2.847
42-49	1.012	116	256	44	24	5	3	0	1.460
>50	146	18	65	18	33	10	27	4	321



2024

Rentang Usia Age Group	Level Jabatan Employee Level								Jumlah Total
	Entry level		Mid level		Senior level		Executive level		
	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female	
18-25	4.287	50.628	0	1	0	0	0	0	54.916
26-33	2.392	7.466	81	68	1	2	0	1	10.011
34-41	1.861	582	206	131	18	2	3	0	2.803
42-49	916	104	242	36	25	4	28	5	1.360
>50	120	15	50	21	32	9	0	0	247

2023

Rentang Usia Age Group	Level Jabatan Employee Level								Jumlah Total
	Entry level		Mid level		Senior level		Executive level		
	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female	
18-25	5.033	53.408	0	3	0	1	0	0	58.445
26-33	2.358	5.077	79	80	4	1	0	1	7.600
34-41	1.873	502	206	115	14	2	0	0	2.712
42-49	800	92	227	28	27	9	4	0	1.187
>50	95	9	46	18	32	7	26	4	237

2022

Rentang Usia Age Group	Level Jabatan Employee Level								Jumlah Total
	Entry level		Mid level		Senior level		Executive level		
	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female	
18-25	5.912	51.414	3	2	0	0	0	0	57.331
26-33	2.295	3.065	72	86	7	1	0	0	5.526
34-41	1.858	422	223	90	10	2	0	0	2.605
42-49	653	80	204	23	29	6	6	1	1.002
>50	76	9	33	11	23	5	24	4	185

**Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**  
Table of Employee Composition by Gender

Jenis Kelamin Gender	2025	2024	2023	2022
Pria Male	10.142	10.262	10.824	11.428
Wanita Female	61.424	59.075	59.357	55.221
<b>Jumlah Total</b>	<b>71.566</b>	<b>69.337</b>	<b>70.181</b>	<b>66.649</b>


**Tabel Kesetaraan Gender [IDX S-01]**

Table of Gender Equality [IDX S-01]

Level Jabatan Employee Level	2025				2024			
	Pria Male		Wanita Female		Pria Male		Wanita Female	
	Jumlah Pegawai Number of Employees	Persentase Pegawai (%) Percentage of Employees (%)	Jumlah Pegawai Number of Employees	Persentase Pegawai (%) Percentage of Employees (%)	Jumlah Pegawai Number of Employees	Persentase Pegawai (%) Percentage of Employees (%)	Jumlah Pegawai Number of Employees	Persentase Pegawai (%) Percentage of Employees (%)
Entry level	9.412	92,80%	61.090	99,46%	9.576	93,32%	58.795	99,53%
Mid level	625	6,16%	309	0,50%	579	5,64%	257	0,44%
Senior level	73	0,72%	19	0,03%	76	0,74%	17	0,03%
Executive level	32	0,32%	6	0,01%	31	0,30%	6	0,01%
<b>Jumlah Total</b>	<b>10.142</b>	<b>100,00%</b>	<b>61.424</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.262</b>	<b>100,00%</b>	<b>59.075</b>	<b>100,00%</b>

Level Jabatan Employee Level	2023				2022			
	Pria Male		Wanita Female		Pria Male		Wanita Female	
	Jumlah Pegawai Number of Employees	Persentase Pegawai (%) Percentage of Employees (%)	Jumlah Pegawai Number of Employees	Persentase Pegawai (%) Percentage of Employees (%)	Jumlah Pegawai Number of Employees	Persentase Pegawai (%) Percentage of Employees (%)	Jumlah Pegawai Number of Employees	Persentase Pegawai (%) Percentage of Employees (%)
Entry level	10.159	93,86%	59.088	99,55%	10.794	94,45%	54.990	99,58%
Mid level	558	5,16%	244	0,41%	535	4,68%	212	0,38%
Senior level	77	0,71%	20	0,03%	69	0,60%	14	0,03%
Executive level	30	0,28%	5	0,01%	30	0,26%	5	0,01%
<b>Jumlah Total</b>	<b>10.824</b>	<b>100,00%</b>	<b>59.357</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.428</b>	<b>100,00%</b>	<b>55.221</b>	<b>100,00%</b>





## Wilayah Kerja dan Pasar yang Dilayani [GRI 2-1, 2-6][OJK C.3]

### Operational Area and Market [GRI 2-1, 2-6][OJK C.3]

PNM beroperasi di seluruh wilayah di Indonesia. Hal itu sejalan dengan Visi dan Misi PNM yaitu membantu Pengusaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) untuk meningkatkan kelayakan usaha. Per 31 Desember 2025, PNM memiliki 1 Kantor Pusat, 58 Kantor Cabang PNM, 620 Unit ULaMM dan 3.977 Unit PNM Mekaar yang melayani 36 Provinsi, 452 Kabupaten/Kota madya, dan 3.114 Kecamatan.



Jaringan Layanan PNM Desember 2025  
PNM Service Network December 2025

**58** Cabang  
Branches

**620** Kantor Unit ULaMM  
ULaMM Unit Offices

**3.977** Kantor Unit Mekaar  
Mekaar Unit Offices

**452** Kabupaten/Kota  
Districts/City





PNM operates across all regions of Indonesia, in line with its Vision and Mission to assist Micro, Small, Medium Enterprises, and Cooperatives (MSMECs) in enhancing business viability. As of December 31, 2025, PNM had 1 Head Office, 58 PNM Branch Offices, 620 ULaMM Units, and 3,977 PNM Mekaar Units, serving 36 provinces, 452 regencies/cities, and 3,114 districts.



**1** Kantor Pusat  
Head Office

**36** Provinsi  
Provinces

**3.114** Kecamatan  
Sub-Districts



## Produk, Layanan dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan [GRI 2-6][OJK C.4]

Products, Services, and Business Activities [GRI 2-6][OJK C.4]



### Jasa Pembiayaan Financing Services

#### • PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera)

Seiring dengan perkembangan usaha, pada tahun 2015 Perusahaan memperkenalkan layanan pembiayaan modal bagi perempuan prasejahtera pengusaha ultra mikro melalui program PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). PNM Mekaar dilengkapi dengan penyertaan pendampingan usaha dan pelayanan secara berkelompok. Hingga akhir tahun 2025, PNM Mekaar tersebar di 3.977 Kantor Layanan dengan cakupan wilayah di 3.021 kecamatan di Indonesia.

##### 1. PNM Mekaar

PNM Mekaar merupakan program layanan pemberdayaan berbasis kelompok dengan sasaran diutamakan perempuan prasejahtera yang memiliki potensi usaha. PNM Mekaar memiliki tipe pembiayaan Syariah yaitu Mekaar Syariah yang merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang diutamakan bagi perempuan prasejahtera pengusaha ultra mikro.

##### 2. Produk Pendamping

###### a. Produk Mekaar WASH

Produk Mekaar WASH adalah produk pembiayaan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas air konsumsi, memberikan akses kepemilikan sarana air bersih dan sarana sanitasi. Produk Mekaar WASH juga memiliki tipe pembiayaan syariah, yaitu Mekaar WASH Syariah, yang menggunakan pola akad *Murabahah bil Wakalah*.

###### b. Produk HOME

Produk HOME adalah produk pembiayaan yang diperuntukkan untuk renovasi tempat usaha dan/atau rumah nasabah yang dijadikan sebagai tempat usaha dan/atau yang mendukung usaha. Produk HOME juga memiliki tipe pembiayaan syariah, yaitu HOME Syariah, yang menggunakan pola akad *Murabahah bil Wakalah*.

#### • PNM Mekaar (Fostering Prosperous Family Economy)

In line with business development, in 2015 the Company introduced capital financing services for underprivileged women entrepreneurs in the ultra-micro segment through the PNM Mekaar program. PNM Mekaar provides group-based business mentoring and financing services. As of December 31, 2025, PNM Mekaar operates through 3,977 Service Units covering 3,021 districts across Indonesia.

##### 1. PNM Mekaar

PNM Mekaar is a group-based empowerment program primarily targeting low-income women with business potential. PNM Mekaar offers a Sharia-compliant financing option called Mekaar Syariah, which is a group-based empowerment service in accordance with Islamic law, based on fatwas and/or statements of Sharia compliance from the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council, and is primarily intended for low-income women who are ultra-micro entrepreneurs.

##### 2. Supplementary Product

###### a. Mekaar WASH Products

Mekaar WASH products are financing products designed to improve the quality of drinking water and provide access to clean water and sanitation facilities. Mekaar WASH also offers a Sharia-compliant financing option, Mekaar WASH Syariah, which utilizes the *Murabahah bil Wakalah* contract structure.

###### b. HOME Product

The HOME Product is a financing product designed for the renovation of business premises and/or customers' homes that are used as business premises and/or that support a business. The HOME Product also offers a Sharia-compliant financing option, namely HOME Syariah, which utilizes the *Murabahah bil Wakalah* contract structure.





- **ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro)**

Pada Agustus 2008, Perusahaan memperkenalkan inovasi layanan pembiayaan modal bagi pengusaha mikro dan kecil dengan pembiayaan langsung, baik kepada perorangan maupun Bidang Usaha, yang dijalankan melalui Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM). Layanan ini tidak hanya memberikan akses permodalan, tetapi juga dilengkapi dengan pelatihan, jasa konsultasi, pendampingan, serta dukungan pengelolaan keuangan dan akses pasar bagi nasabah. Hingga akhir tahun 2025, ULaMM memiliki 620 kantor unit yang tersebar di 30 provinsi di seluruh Indonesia.

1. PNM ULaMM

PNM ULaMM merupakan layanan pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil melalui penyaluran pembiayaan yang diberikan secara langsung kepada perorangan yang memiliki usaha individual. PNM ULaMM juga memiliki tipe pembiayaan Syariah yaitu ULaMM Syariah yang merupakan penyaluran pembiayaan yang dilakukan sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bagi pengusaha UMKM.

- **Jasa Lainnya**  
Other Services

- **Jasa Manajemen**

Perusahaan memiliki dua aktivitas Jasa Manajemen, yaitu Jasa Manajemen untuk penguatan Lembaga keuangan mikro dan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat prasejahtera. Terutama melalui kolaborasi TJSL/CSR atau program pemberdayaan khusus melibatkan berbagai pihak seperti BUMN/BUMD, perusahaan swasta, NGO, dan lain sebagainya untuk memperluas jangkauan dampak positif perusahaan.

- **ULaMM (Micro Capital Service Units)**

In August 2008, the Company introduced an innovative working capital financing service for micro and small business owners, providing direct financing to both individuals and business entities through the Micro Capital Service Unit (ULaMM). This service not only provides access to capital but also includes training, consulting services, mentoring, as well as financial management support and market access for customers. By the end of 2025, ULaMM will have 620 branch offices spread across 30 provinces throughout Indonesia.

1. PNM ULaMM

PNM ULaMM is a working capital loan service for micro and small businesses through financing provided directly to individuals who own sole proprietorships. PNM ULaMM also offers a Sharia-compliant financing option, ULaMM Syariah, which provides financing in accordance with Islamic law based on fatwas and/or statements of Sharia compliance from the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council for MSME business owners.

- **Management Services**

The company offers two types of management services: management services aimed at strengthening microfinance institutions and community empowerment, particularly for low-income communities. This is primarily achieved through TJSL/CSR collaborations or specialized empowerment programs involving various stakeholders, such as state-owned enterprises (SOEs), local government-owned enterprises (LGOs), private companies, NGOs, and others, to expand the company's positive impact.



## Sinergi PNM dengan Entitas Anak dan Entitas Afiliasi

PNM Synergy with Subsidiaries and Affiliates



### Entitas Anak

Subsidiaries

#### PNM Investment Management

Manajemen Investasi dilaksanakan melalui PT PNM Investment Management (PNM IM). PNM IM adalah Perusahaan Manajer Investasi yang mengelola produk-produk investasi di pasar modal yaitu reksa dana dan kontrak pengelolaan dana. Selain memiliki izin sebagai Manajer Investasi, PNM IM juga memiliki izin sebagai penasihat investasi.

Investment Management is carried out through PT PNM Investment Management (PNM IM). PNM IM is an Investment Management Company that manages capital market investment products, including mutual funds and fund management contracts. In addition to being licensed as an Investment Manager, PNM IM is also licensed to act as an investment advisor.

#### PNM Venture Capital

Pembiayaan modal ventura dilaksanakan melalui anak perusahaan PT PNM Venture Capital (PNM VC). PNM VC memberikan dukungan permodalan langsung kepada usaha kecil dan menengah dalam bentuk pembiayaan bagi hasil kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU).

Venture capital financing is carried out through the subsidiary PT PNM Venture Capital (PNM VC). PNM VC provides direct capital support to small and medium enterprises in the form of profit-sharing financing to Partner Companies (PPU).



### Entitas Afiliasi

Affiliates

#### PT PNM Ventura Syariah

Modal Ventura Syariah dan Jasa Manajemen  
 Shariah Venture Capital and Management Services

#### PT Mitra Utama Madani

Jasa Alih Daya  
 Outsourcing Services

#### PT Mitra Niaga Madani

Jasa penyewaan properti, jasa pengembangan properti, jasa penyewaan ruang kantor, jasa jual beli properti, jasa konstruksi (kontraktor), jasa konsultan konstruksi  
 Property Leasing Services, Property Development Services, Office Space Leasing, Property Sales and Purchase, Construction Services (Contractor), Construction Consultancy Services

#### PT Mitra Tekno Madani

Jasa Manajemen IT  
 IT Management Services

#### PT Micro Madani Institute

Jasa Alih Daya, Pelatihan, dan Sertifikasi  
 Outsourcing, Training, and Certification Services

#### PT Mitra Bisnis Madani

Persewaan dan Perdagangan  
 Leasing and Trading

#### PT Mitra Dagang Madani

Perdagangan dan Jasa  
 Trading and Services

#### PT Grosir Madani Utama

Perdagangan dan Jasa  
 Trading and Services

#### PT Madani Maju Bersama

Perdagangan dan Jasa  
 Trading and Services

#### PT Integra Solusi Madani

Perdagangan Platform Teknologi Informasi  
 Information Technology Platform Trading



## Keanggotaan dalam Asosiasi [GRI 2-28][OJK C.5]

### Association Membership [GRI 2-28][OJK C.5]

Per 31 Desember 2025, PNM sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan belum menjadi anggota ataupun pengurus asosiasi yang berfokus pada pembiayaan usaha. Kondisi ini disebabkan oleh karakteristik usaha PNM yang memiliki kekhususan dalam sektor layanan keuangan di Indonesia.

As of December 31, 2025, PNM, as a financial services company, is not yet a member or board member of any associations focused on business financing. This is due to PNM unique business characteristics within Indonesia's financial services sector.



## Rantai Pasokan [GRI 2-6]

### Supply Chain [GRI 2-6]

Pengelolaan rantai pasokan serta pengadaan barang dan jasa sangat penting bagi keberhasilan bisnis PNM karena berperan dalam mengoptimalkan biaya serta meningkatkan efisiensi operasional. Sebagai anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) sebagai Holding BUMN Ultra Mikro, pengadaan barang dan jasa di PNM mengikuti regulasi/ketentuan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara di antaranya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Supply chain management and procurement of goods and services are critical to PNM business success, as they play a key role in cost optimization and operational efficiency. As a subsidiary of PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) under the Ultra Micro SOE Holding, PNM procurement activities comply with regulations and guidelines issued by the SOE Regulatory Agency (SOE), including Minister of SOE Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 on Governance Guidelines and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

Pengelolaan rantai pasokan serta pengadaan barang dan jasa merupakan bagian penting dalam keberhasilan operasional PNM karena berkontribusi pada optimalisasi biaya dan peningkatan efisiensi. Sebagai anak perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam Holding BUMN Ultra Mikro, proses pengadaan di PNM mengacu pada ketentuan BP BUMN, termasuk Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Mitra pengadaan PNM meliputi penyedia jasa teknologi informasi, peralatan kantor, jasa percetakan, sarana/prasarana dan lain-lain. Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, kualitas, dan transparansi, seluruh proses pengadaan dilaksanakan secara elektronik melalui platform *e-Proc* PNM di <https://www.pnm.co.id/eproc/pnm>.

The management of the supply chain and procurement of goods and services is integral to PNM operational success, contributing to cost optimization and efficiency improvement. As a subsidiary of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk within the Ultra Micro SOE Holding, PNM procurement processes follow SOE Ministry of SOE regulations, including Minister of SOE Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 on Governance Guidelines and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. PNM procurement partners include providers of IT services, office equipment, printing services, facilities/infrastructure, and others. To ensure efficiency, effectiveness, quality, and transparency, all procurement processes are conducted electronically through PNM e-Proc platform at <https://www.pnm.co.id/eproc/pnm>.

#### PNM e-Proc Platform

<https://www.pnm.co.id/eproc/pnm>



Dalam menjalankan pengadaan barang dan jasa, PNM menerapkan prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, terbuka, serta akuntabel. Tujuan utamanya mencakup penyediaan barang dan jasa yang tepat mutu, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia; mendukung terciptanya nilai tambah bagi BUMN; meningkatkan efisiensi; memperluas penggunaan produk dalam negeri; memperkuat peran pengusaha nasional termasuk UMK; serta mendorong sinergi antar BUMN, anak perusahaan, dan perusahaan terafiliasi.

In carrying out procurement of goods and services, PNM applies principles of efficiency, effectiveness, competitiveness, transparency, fairness, openness, and accountability. The main objectives include providing goods and services with the right quality, quantity, timing, cost, location, and suppliers; supporting value creation for SOEs; enhancing efficiency; expanding the use of domestic products; strengthening the role of national enterprises including micro, small, and medium enterprises (MSMEs); and promoting synergy among SOEs, subsidiaries, and affiliated companies.

Sebagai implementasi regulasi tersebut, PNM memprioritaskan penggunaan pemasok lokal yang beroperasi dalam satu provinsi dengan wilayah kerja Perusahaan. Apabila kebutuhan tidak dapat dipenuhi oleh pemasok lokal, PNM bekerja sama dengan pemasok nasional, dan jika masih tidak terpenuhi, kerja sama dapat diperluas kepada pemasok internasional. Selain berpotensi memberikan harga yang lebih kompetitif, pemanfaatan pemasok lokal juga berkontribusi pada pengurangan jejak karbon dan memberikan dampak lingkungan yang lebih positif. Adapun daftar pemasok dan nilai kontraknya dalam rantai pasokan PNM disajikan sebagai berikut:

In implementing these regulations, PNM prioritizes the use of local suppliers operating within the same province as the Company's operational area. If local suppliers are unable to meet requirements, PNM collaborates with national suppliers, and if still unmet, procurement may extend to international suppliers. Utilizing local suppliers not only potentially provides more competitive pricing but also contributes to carbon footprint reduction and generates positive environmental impacts. The list of suppliers and contract values within PNM supply chain is presented as follows:

**Tabel Pemasok Barang dan Jasa beserta Nilai Kontrak Tahun 2022-2025 [IDX S-04]**  
 Table of Goods and Services Suppliers and Contract Values for 2022-2025 [IDX S-04]

Keterangan Description	Jumlah Pemasok Barang dan Jasa Number of Goods and Services Suppliers				Nilai Kontrak (Rp Juta) Contract Value (Million Rupiah)			
	2025	2024	2023	2022	2025	2024	2023	2022
Lokal Local	243	535	90	65	41.340	198.098	38.680	35.681
Nasional National	61	65	279	359	155.982	1.264.596	86.639	87.819
Internasional/Asing International/Foreign	1	1	2	1	33.227	56.047	34.130	36.946
<b>Jumlah Total</b>	<b>305</b>	<b>601</b>	<b>371</b>	<b>425</b>	<b>230.551</b>	<b>1.518.742</b>	<b>159.449</b>	<b>123.500</b>

## Perubahan Signifikan pada Perusahaan dan Rantai Pasokan [GRI 2-6][OJK C.6]

### Significant Changes in the Company and Supply Chain [GRI 2-6][OJK C.6]

Selama tahun 2025, PNM masih dapat terus melakukan pengembangan usaha bisnis dan perluasan jaringan. Sementara itu, perubahan pada rantai pasok berupa pengurangan jumlah pemasok dari 601 pemasok pada tahun 2024 menjadi 305 pemasok pada tahun 2025. Perubahan tersebut diikuti dengan berkurangnya nilai kontrak dari Rp1,52 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp230,55 miliar pada tahun 2025. Meskipun demikian, perubahan rantai pasokan ini tidak berdampak signifikan terhadap upaya PNM mewujudkan target dan kinerja selama tahun pelaporan.

Throughout 2025, PNM continued to pursue business development and expand its network. During the same period, changes in the supply chain resulted in a reduction in the number of suppliers from 601 in 2024 to 305 in 2025. This adjustment was accompanied by a decrease in total contract value from IDR1.52 trillion in 2024 to IDR230.55 billion in 2025. Nevertheless, these supply chain changes did not have a significant impact on PNM ability to achieve its targets and performance during the reporting period.



## Pendekatan atau Prinsip Pencegahan [GRI 2-23]

### Approach or Prevention Principles [GRI 2-23]

Pendekatan Pengelolaan Manajemen Risiko Perusahaan mengacu pada standar ISO 31000:2018 secara komprehensif, terukur, adaptif, berkelanjutan serta terintegrasi dengan perusahaan anak. Di tengah dinamika ekonomi global, isu lingkungan, financial inklusi, volatilitas pasar keuangan, serta tantangan pada segmen ultra mikro, Perusahaan senantiasa melakukan kaji ulang atas potensi risiko, baik risiko kredit, likuiditas, pasar, operasional, hukum, strategik, kepatuhan, maupun risiko reputasi, secara terukur dan terkelola dengan baik. Identifikasi, dan mitigasi manajemen risiko yang merupakan bagian dari strategi pengendalian risiko yang diterapkan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam penyusunan RKAP maupun strategi pengelolaan Bisnis dan Operasional Perusahaan.

Penguatan kebijakan, kaji ulang metodologi penilaian risiko, serta peningkatan kualitas pemantauan portofolio pembiayaan menjadi fokus utama sepanjang tahun. Selain itu, integrasi sistem teknologi informasi, salah satunya *Dashboard Operational Risk Assessment* (OPERA), *Credit Risk Informations Management System* (CRIMS), Aplikasi Penyusunan *Risk Register*, *leading indicator* maupun sistem lainnya, turut meningkatkan kualitas proses identifikasi dan pengendalian risiko serta kecepatan respons terhadap potensi risiko yang berkembang, termasuk dalam mendukung transformasi digital dan perluasan layanan kepada nasabah.

Budaya sadar risiko (*risk awareness culture*) semakin tertanam di seluruh jenjang organisasi. Upaya internalisasi manajemen risiko melalui pelatihan, sosialisasi kebijakan, serta penguatan three lines model telah memperjelas peran dan tanggung jawab setiap unit kerja dalam mengelola risiko. Uraian lebih lengkap mengenai Manajemen Risiko disajikan dalam Bab Tata Kelola Keberlanjutan pada laporan ini.

### Inisiatif Eksternal External Initiatives

Dalam menjalankan kegiatan bisnis serta pelaporan kinerja keberlanjutan, PNM mengacu pada berbagai prinsip, standar, dan inisiatif yang dikembangkan oleh lembaga nasional maupun internasional, termasuk bentuk sertifikasi dan standar khusus di bidang terkait. Penerapan beragam standar tersebut telah memperoleh pengakuan dari pemangku kepentingan eksternal melalui berbagai penghargaan.

The Company's Risk Management Approach is based on the ISO 31000:2018 standard and is comprehensive, measurable, adaptive, sustainable, and integrated with its subsidiaries. Amid global economic dynamics, environmental issues, financial inclusion, financial market volatility, and challenges in the ultra-micro segment, the Company continuously reviews potential risks—including credit, liquidity, market, operational, legal, strategic, compliance, and reputational risks—in a measured and well-managed manner. Risk identification and mitigation, which form part of the implemented risk control strategy, have become an integral part of the strategic decision-making process, including in the preparation of the Annual Business Plan (RKAP) and the Company's business and operational management strategies.

Strengthening policies, reviewing risk assessment methodologies, and improving the quality of financing portfolio monitoring have been key priorities throughout the year. Additionally, the integration of information technology systems—including the Operational Risk Assessment (OPERA) Dashboard, the Credit Risk Information Management System (CRIMS), the Risk Register Compilation Application, leading indicators, and other systems—has further enhanced the quality of risk identification and control processes, as well as the speed of response to emerging risks, including in supporting digital transformation and the expansion of services to customers.

A risk-aware culture is becoming increasingly ingrained at all levels of the organization. Efforts to internalize risk management through training, policy dissemination, and the strengthening of the three-lines model have clarified the roles and responsibilities of each work unit in managing risk. A more detailed description of Risk Management is presented in the Sustainability Governance chapter of this report.

In conducting business activities and reporting on sustainability performance, PNM adheres to various principles, standards, and initiatives developed by national and international institutions, including certifications and specific standards in relevant fields. The implementation of these various standards has earned recognition from external stakeholders through various awards.

# Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications

## Penghargaan Awards



**Tanggal**  
Date  
18 Desember 2025  
December 18, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
Kumparan

**Impactful Corporate Communication in Social Empowerment**

**Nama Event**  
Event Name  
Kumparan Awards Impact Maker



**Tanggal**  
Date  
17 Desember 2025  
December 17, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
Kementerian UMKM

**Mitra Formalisasi Usaha Mikro Terbaik**  
Top Partner in Microenterprise Formalization

**Nama Event**  
Event Name  
Anugerah Mitra Usaha Mikro 2025



**Tanggal**  
Date  
8 Desember 2025  
December 8, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
Info Bank

**TOP 100 CEO OF THE YEAR 2025**

**Nama Event**  
Event Name  
TOP 100 CEO AND THE FUTURE LEADERS FORUM 2025



**Tanggal**  
Date  
5 Desember 2025  
December 5, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
Pikiran Rakyat

**Brand With Purpose: Woman with Empowerment**

**Nama Event**  
Event Name  
Anugerah Pikiran Rakyat Media Network 2025



**Tanggal**  
Date  
4 Desember 2025  
December 4, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
Disway

**Kategori BUMN Jasa Keuangan Populer**  
Popular State-Owned Financial Services Category

**Nama Event**  
Event Name  
Disway Awards 2025

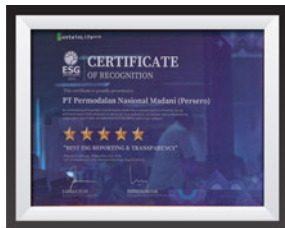


**Tanggal**  
Date  
3 Desember 2025  
December 3, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
BUMN Track

**Best Social Media & Influencer Engagement (Gold)**  
**Best Sustainable Branding Initiative (Platinum)**

**Nama Event**  
Event Name  
BUMN Branding & Marketing Award 2025



**Tanggal**  
Date  
28 November 2025  
November 28, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
Sustainlife Today

**Best ESG Reporting & Transparency**

**Nama Event**  
Event Name  
ESG Initiative Awards 2025



**Tanggal**  
Date  
28 November 2025  
November 28, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
Nusantara TV

**Penggerak Ekonomi Lokal & Pemberdayaan**  
Catalyst for Local Economic Development and Empowerment

**Nama Event**  
Event Name  
Anugerah Bakti Nusantara



**Tanggal**  
Date  
25 November 2025  
November 25, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
Detik.com

**Inkubator Perempuan Pengusaha Ultra Mikro**  
Ultra Micro Women Entrepreneurs Incubator

**Nama Event**  
Event Name  
Detik.com Awards 2025



**Tanggal**  
Date  
25 November 2025  
November 25, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
SWA Media

**Indonesia Most Trusted Companies**

**Nama Event**  
Event Name  
CGPI Awarding & Conference



**Tanggal**  
Date  
20 November 2025  
November 20, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
iNews

**Anugerah Penggerak Sektor Keuangan**  
Financial Sector Catalyst Award

**Nama Event**  
Event Name  
Anugerah Penggerak Nusantara 2025



**Tanggal**  
Date  
20 November 2025  
November 20, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
Investor Daily

**Community Empowerment**

**Nama Event**  
Event Name  
Investor Daily ESG Appreciation 2025



**Tanggal**  
Date  
12 November 2025  
November 12, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
Business News

*The Greatest Champions of GRC Excellence & Leadership Performance 2025*  
*The Best Chief Executive Officer (CEO) 2025 – Arief Mulyadi*  
*The Best Chief Human Capital & Compliance Officer 2025 – Henry Yunus Kamang Pangemanan*  
*The Best Corporate Secretary 2025 – Lalu Dodot Patria Ary*

**Nama Event**  
Event Name  
GRC & Leadership Awards 2025



**Tanggal**  
Date  
10 November 2025  
November 10, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
GarudaTV

*Outstanding in Women Empowerment*

**Nama Event**  
Event Name  
Garuda TV "INDONESIA KITA AWARDS"



**Tanggal**  
Date  
10 November 2025  
November 10, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
Plus Idea Komunika

*Strengthening Local Economic Resilient and Holistic Entrepreneurship Training*

**Nama Event**  
Event Name  
Indonesia Sustainable Synergy Award 2025



**Tanggal**  
Date  
7 November 2025  
November 7, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
tvOne

*Inovasi Keuangan Orange Bonds Untuk Pemberdayaan Perempuan Indonesia*  
*Orange Bonds: A Financial Innovation for the Empowerment of Indonesian Women*

**Nama Event**  
Event Name  
TvOne Inovasi Membangun Negeri 2025

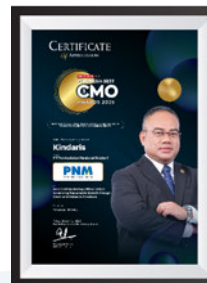


**Tanggal**  
Date  
31 Oktober 2025  
October 31, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
CNN

*Excellence in Sustainable Financial Innovation for Inclusive Development*

**Nama Event**  
Event Name  
CNN Indonesia Awards 2025



**Tanggal**  
Date  
31 Oktober 2025  
October 31, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
WartaEkonomi

*Best Chief Marketing Officer 2025 in Advancing Sustainable Growth through Green and Inclusive Initiatives (Financial Services)*

**Nama Event**  
Event Name  
Indonesia Best CMO Awards 2025



**Tanggal**  
Date  
29 Oktober 2025  
October 29, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
IPEMI

**The Most Empowering Company for MSMEs in Strengthening Socio-Economic Resilience and Responsible Operational Activities**

**Nama Event**  
Event Name  
Anugerah Penggerak UMKM Indonesia 2025



**Tanggal**  
Date  
16 Oktober 2025  
October 16, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
Kemenko PM

**Kategori Dedikasi dan Kontribusi Patriot PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
Dedication and Contribution Category – Community Empowerment Patriot

**Nama Event**  
Event Name  
Mandaya Award



**Tanggal**  
Date  
16 Oktober 2025  
October 16, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
Detik.com

**Kategori Tanggung Jawab Bisnis: Pendorong UMKM Naik Kelas Berkelanjutan**  
Business Responsibility Category:  
Driving the Sustainable Advancement of MSMEs

**Kategori Kesejahteraan Masyarakat: Penggerak Pemberdayaan Perempuan Prasejahtera**  
Community Welfare Category:  
Catalyst for the Empowerment of Underprivileged Women

**Nama Event**  
Event Name  
Liputan6



**Tanggal**  
Date  
14 Oktober 2025  
October 14, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
CNBC

**Global Microfinance & Female Empowerment Award**

**Nama Event**  
Event Name  
Road to CNBC Indonesia Awards 2025 - Best Financial Services



**Tanggal**  
Date  
10 Oktober 2025  
October 10, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
IDX Channel

**Transformasi Digital untuk Ekosistem Pembiayaan Ultra Mikro yang Berdaya**  
Digital Transformation for an Empowered Ultra Micro Financing Ecosystem

**Nama Event**  
Event Name  
IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2025

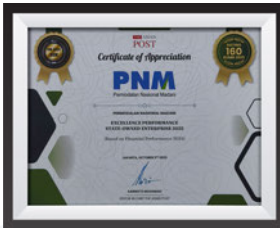


**Tanggal**  
Date  
9 Oktober 2025  
October 9, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
Internasional Creatives Exchange

**Outstanding Contribution to Inclusive Entrepreneurship - Creative Economy Empowerment for Inclusive Growth and Sustainable**

**Nama Event**  
Event Name  
Indonesia Creative Award 2025



**Tanggal**  
Date  
2 Oktober 2025  
October 2, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
The Asian Post

**Excellence Performance State-Owned Enterprise 2025**

**Nama Event**  
Event Name  
The Asian Post Best SOE 2025



**Tanggal**  
Date  
30 September 2025  
September 30, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
Investor Trust

**Kategori Merit Achievement in Digital Learning & Education Empowerment**  
Merit Achievement in Digital Learning & Education Empowerment

**Nama Event**  
Event Name  
CSR Awards 2025



**Tanggal**  
Date  
30 September 2025  
September 30, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
Investor Trust

**Kategori Sukuk Mudharabah (Perusahaan penerbit Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023 Seri B)**  
Sukuk Mudharabah Category (Issuer of PNM Sustainable Sukuk Mudharabah I - Phase II, 2023, Series B)

**Nama Event**  
Event Name  
Best Sharia Awards 2025



**Tanggal**  
Date  
17 September 2025  
September 17, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
Bisnis Indonesia

**The Most Impactful Community Resilience through Multifinance**

**Nama Event**  
Event Name  
Bisnis Indonesia Financial Awards 2025





**Tanggal**  
Date  
10 September 2025  
September 10, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
SWA Media

*Corporate Secretary in Compliance based in Jury Assessment,  
With the predicate : Very Good*

**Nama Event**  
Event Name  
Corporate Secretary Champion 2025



**Tanggal**  
Date  
3 September 2025  
September 3, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
MetroTV

*World's Largest Women Microfinance Institution*

**Nama Event**  
Event Name  
Prominent Awards 2025



**Tanggal**  
Date  
28 Agustus 2025  
August 28, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
Baznas

**Dradjad Hari Wibowo - Tokoh Pendukung Zakat Sejahteraan Umat**  
Dradjad Hari Wibowo - Figure Supporting Zakat for Community Prosperity

**Arief Mulyadi - Tokoh Pendukung Zakat Sejahteraan Umat**  
Arief Mulyadi - Figure Supporting Zakat for Community Prosperity

**Nama Event**  
Event Name  
Baznas Awards 2025



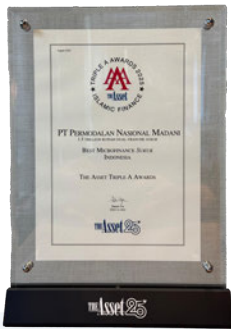
**Tanggal**  
Date  
28 Agustus 2025  
August 28, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
MAW

**Lembaga Bisnis Berpengaruh**  
Influential Business Institution

**Nama Event**  
Event Name  
MAW Talk Award





**Tanggal**  
Date  
27 Agustus 2025  
August 27, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
The Asset

*Best Microfinance Sukuk Indonesia*

**Nama Event**  
Event Name  
The Asset Triple A Awards



**Tanggal**  
Date  
22 Agustus 2025  
August 22, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
OJK

**PUJK Lembaga Keuangan Khusus dan Fintech dengan Program Literasi Keuangan Teraktif**  
Specialized Financial Institutions and Fintech PUJK with the Most Active Financial Literacy Programs

**PUJK dengan Pembentukan OJK Peduli Syariah Termasuk**  
PUJK with the Most Extensive OJK Peduli Syariah Initiatives

**Nama Event**  
Event Name  
Financial Literacy Award 2025



**Tanggal**  
Date  
14 Agustus 2025  
August 14, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
Detik.com

**Apresiasi atas Penguatan Ekonomi Lokal dalam Pengembangan Desa Wisata**  
Recognition for Strengthening the Local Economy through the Development of Tourism Villages

**Nama Event**  
Event Name  
Anugerah Ekonomi Hijau



**Tanggal**  
Date  
8 Agustus 2025  
August 8, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
The Economics

**50 Popular PR Person Awards 2025 - Lalu Dodot Patria Ary**

**Nama Event**  
Event Name  
50 Popular PR Person Awards 2025





**Tanggal**  
Date  
8 Agustus 2025  
August 8, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
The Iconomics

**Corporate Reputation Awards 2025 - Special Funding Category**

**Nama Event**  
Event Name  
6<sup>th</sup> Corporate Reputation Awards 2025



**Tanggal**  
Date  
18 Juli 2025  
July 18, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
Solopos

**Pelopor Pembiayaan Berbasis Komunal**  
Pioneer of Community-Based Financing

**Nama Event**  
Event Name  
SBI Awards 2025



**Tanggal**  
Date  
4 Juli 2025  
July 4, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
Infobank

**Ibu Veronica Colondam : Infobank The Most 500 Outstanding Women 2025 In Financial Sector & State-Owned Enterprise**

**Ibu Nurhaida : Infobank The Most 500 Outstanding Women 2025 In Financial Sector & State-Owned Enterprise**

**Ibu Triswahu Herlina : Infobank The Most 500 Outstanding Women 2025 In Financial Sector & State-Owned Enterprise**

**Nama Event**  
Event Name  
THE MOST OUTSTANDING WOMEN 2025 Financial Literacy & WOMENomics Talk Show: The Secret to Economy Growth in Uncertainty



**Tanggal**  
Date  
3 Juli 2025  
July 3, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
IDX Channel

**Strategi Terintegrasi Membangun Ekosistem Keuangan Ultra Mikro yang Berkelanjutan**  
Integrated Strategy to Build a Sustainable Ultra Micro Finance Ecosystem

**Nama Event**  
Event Name  
Anugerah ESG



**Tanggal**  
Date  
30 Juni 2025  
June 30, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
Bisnis Indonesia

*The Most Sustainable Microfinance & SME Empowerment*

**Nama Event**  
Event Name  
Bisnis Indonesia Award



**Tanggal**  
Date  
26 Juni 2025  
June 26, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
Info Ekonomi

*Special Achievement for Subsidiary BUMN*

**Nama Event**  
Event Name  
7<sup>th</sup> Indonesia Top Digital PR Award 2025



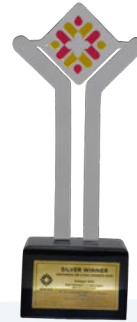
**Tanggal**  
Date  
19 Juni 2025  
June 19, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
Plus Idea Komunika

*The Most Innovative Future Finance Awards 2025 for Fostering Socio-Economic Empowerment and Providing Inclusive Financial Products and Services*

*Arief Mulyadi - The Best CEO in the Financial Services Industry 2025 for Significant Revenue Growth and Fostering Socio-Economic Empowerment*

**Nama Event**  
Event Name  
Innovative Future Finance Awards 2025



**Tanggal**  
Date  
19 Juni 2025  
June 19, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
PR Indonesia

*Silver Winner - ESG dengan Sub Kategori Lingkungan (Environmental)*  
Silver Winner – ESG (Environmental Subcategory)

**Nama Event**  
Event Name  
Indonesia DEI & ESG Awards (IDEAS) 2025





**Tanggal**  
Date  
15 Mei 2025  
May 15, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
MCorp

**Triswahyu Herlina - Dewi BUMN 2025**

**Nama Event**  
Event Name  
Dewi BUMN



**Tanggal**  
Date  
15 Mei 2025  
May 15, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
MCorp

**Silver Winner - The Most Promising Company In Marketing 3.0, Kategori Perusahaan BUMN**  
Silver Winner - The Most Promising Company in Marketing 3.0, State-Owned Enterprise Category

**Nama Event**  
Event Name  
BUMN Entrepreneurial Marketing Awards 2025



**Tanggal**  
Date  
25 April 2025  
April 25, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
Herstory

**Indonesia Top Financial Woman Leaders 2025 in Optimizing Funding Sources Diversification to Support Financing and Empowerment Programs**

**Nama Event**  
Event Name  
Indonesia Top Financial Woman Leaders Award 2025



**Tanggal**  
Date  
20 Maret 2025  
March 20, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
Info Ekonomi

**TOP Digital Corporate Brand Award 2025 kategori Subsidiary BUMN**

TOP Digital Corporate Brand Award 2025 in the Subsidiary of State-Owned Enterprises category

**Nama Event**  
Event Name  
Top Digital Corporate Brand Award 2025



**Tanggal**  
Date  
20 Maret 2025  
March 20, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
Info Bank

**The Most Reputable State Owned Enterprise Sub-Holding CEO in Digital Brand 2025 : Arief Mulyadi**

**Nama Event**  
Event Name  
14<sup>th</sup> Digital Brand Awards 2025



**Tanggal**  
Date  
26 Februari 2025  
February 26, 26

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
First Indonesia

*The Best Company for The Community Empowerment Programme*

*The Best Company for Comprehensive ESG Implementation Practices*

*CEO Committed to ESG Implementation Programme*

**Nama Event**  
Event Name  
Indonesia Sustainability Award



**Tanggal**  
Date  
26 Februari 2025  
February 26, 26

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
PR Indonesia

*Program Komunikasi Social Responsibility Sub Kategori Community Based Development ; Gratis Belajar di Ruang Pintar*  
Based Development Subcategory: Gratis Belajar di Ruang Pintar

*Terpopuler di Media Online dan Media Sosial 2024 Sub Kategori Anak Usaha BUMN Social Responsibility Communication Program – Community-Most Popular in Online and Social Media 2024 – State-Owned Enterprise Subsidiary Subcategory*

**Nama Event**  
Event Name  
PR Indonesia Awards



**Tanggal**  
Date  
25 Februari 2025  
February 25, 26

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
WartaEkonomi

*Triswahu Herlina as Best CFO 2025 for promoting Financial Inclusion and Sustainable Growth in Microfinance to Support Economic Development*

**Nama Event**  
Event Name  
The Best CFO 2024



**Tanggal**  
Date  
14 Februari 2025  
February 14, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
tvOne

*Kolaborasi dalam pemberdayaan Perempuan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi kerakyatan*  
Collaboration in women's empowerment that drives inclusive grassroots economic growth

**Nama Event**  
Event Name  
HUT ke-17 tvOne



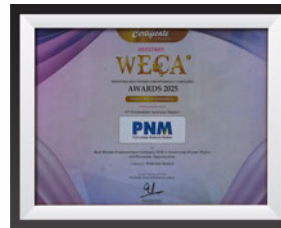


**Tanggal**  
Date  
14 Februari 2025  
February 14, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
SWA Media

**Bapak Arief Mulyadi**  
**Predikat: Best CEO With Distinction**  
**Kategori Omset >10 Triliun**  
Mr. Arief Mulyadi  
Title: Best CEO with Distinction  
Category: Revenue Above IDR10 Trillion

**Nama Event**  
Event Name  
SWA : The Best CEO & Best CFO 2024



**Tanggal**  
Date  
11 Februari 2025  
February 11, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
Herstory

**Best Women Empowerment Company 2025 in Advancing Women Rights and Economic Opportunities**

**Nama Event**  
Event Name  
WECA



**Tanggal**  
Date  
24 Januari 2025  
January 24, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
WartaEkonomi

**Best Public Relations 2025 in Transforming Initiative Programs with Improving Public Awareness and Creative Communication Strategies**

**Nama Event**  
Event Name  
Indonesia Public Relations Award 2025



**Tanggal**  
Date  
16 Januari 2025  
January 16, 2025

**Lembaga Pemberi Penghargaan**  
Awarded by  
IDN Times

**Inspiring News Maker 2024 : Arief Mulyadi**

**Nama Event**  
Event Name  
Anugerah IDN Times





**ISO 37001:2016**  
**Tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)**  
ISO 37001:2016 on Anti-Bribery Management System (ABMS)

Lembaga Pemberi Sertifikasi  
Certified by

PT Sucofindo

Masa Berlaku  
Validity Period

29 September 2023 s/d 28 September 2026  
September 29, 2023 – September 28, 2026



**ISO 27001:2013**  
**Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)**  
ISO 27001:2013 on Information Security Management System

Lembaga Pemberi Sertifikasi  
Certified by

PT British Standards Institution

Masa Berlaku  
Validity Period

16 Januari 2023 s/d 31 Oktober 2025  
January 16, 2023 – October 31, 2025



**ISO 27001:2022**  
**Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)**  
ISO 27001:2013 on Information Security Management System

Lembaga Pemberi Sertifikasi  
Certified by

PT British Standards Institution

Masa Berlaku  
Validity Period

26 September 2025 s/d 15 Januari 2029  
September 26, 2025 – January 15, 2029



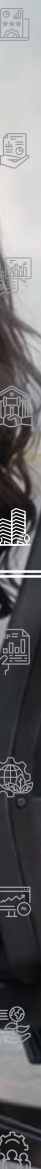
**ISO 37301:2021**  
**Tentang Sistem Manajemen Kepatuhan**  
ISO 37301:2021 on Compliance Management System

Lembaga Pemberi Sertifikasi  
Certified by

PT British Standards Institution

Masa Berlaku  
Validity Period

27 Januari 2026 s/d 26 Januari 2029  
January 27, 2026 – January 26, 2029





06

**Tata Kelola  
Keberlanjutan**

*Sustainability Governance*



## Tata Kelola Keberlanjutan Sustainability Governance



PNM secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai fondasi pertumbuhan dan keberlanjutan usahanya. Komitmen ini memastikan Perusahaan menjalankan operasional secara transparan, akuntabel, dan beretika sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan. Tata kelola yang kuat juga membantu menjaga keselarasan aktivitas bisnis dengan ekspektasi publik, meningkatkan citra positif, dan membangun reputasi perusahaan yang kredibel.

Implementasi GCG turut mendorong efisiensi operasional dan perbaikan kinerja keuangan. Melalui mekanisme pengawasan internal yang ketat, pemanfaatan sumber daya menjadi lebih efektif. Selain itu, proses pengambilan keputusan yang transparan dan terstruktur memungkinkan setiap langkah strategis didasarkan pada analisis yang komprehensif sehingga berkontribusi pada peningkatan profitabilitas perusahaan.

PNM juga memanfaatkan penerapan GCG untuk memperkuat pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara berkelanjutan. Selain mengejar kinerja finansial, Perusahaan memastikan bahwa setiap kebijakan dan aktivitas operasional mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan sehingga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam menjalankan GCG secara optimal, PNM berpedoman pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2019 Tahun 2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) serta Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) yang diterbitkan oleh KNKG.

PNM consistently implements the principles of Good Corporate Governance (GCG) as the foundation for its growth and business sustainability. This commitment ensures that the Company operates transparently, accountably, and ethically, strengthening public trust and confidence among all stakeholders. Strong governance also aligns business activities with public expectations, enhances positive corporate image, and builds a credible reputation.

The GCG implementation drives operational efficiency and financial performance improvement. Through rigorous internal oversight mechanisms, resource utilization becomes more effective. In addition, transparent and structured decision-making processes allow every strategic step to be based on comprehensive analysis, contributing to increased company profitability.

PNM also leverages GCG implementation to strengthen the execution of social and environmental responsibilities sustainably. Beyond pursuing financial performance, the Company ensures that every policy and operational activity considers social and environmental impacts, thereby supporting the achievement of sustainable development goals.

In practicing GCG optimally, PNM refers to various regulations, including Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law Number 1 of 2025 as the third amendment to Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, Ministry of SOE Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs, Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.05/2019 of 2019 on the Supervision of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) and the Indonesian Corporate Governance General Guidelines (PUG-KI) issued by KNKG.





## Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) Principles

Kemampuan PNM untuk tetap bertahan dan terus bertumbuh menunjukkan kuatnya komitmen Perseroan dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten di seluruh tingkat organisasi. Lima prinsip utama GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, dan Kewajaran menjadi dasar dalam menjaga kesinambungan usaha (*sustainability*) sekaligus memastikan terpenuhinya kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, yang mencakup hal-hal berikut:

1. **Transparansi** (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
2. **Akuntabilitas** (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Persero/ Organ Perum sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
3. **Pertanggungjawaban** (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat;
4. **Kemandirian** (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa Benturan Kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat; dan
5. **Kewajaran** (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PNM juga merujuk pada pembaruan yang dilakukan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) melalui penerbitan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI). Pedoman ini menegaskan empat pilar governansi korporat yaitu Perilaku beretika, Akuntabilitas, Transparansi, dan Keberlanjutan yang pertama kali diperkenalkan dalam PUG-KI 2021 sebagai penyempurnaan atas nilai dasar TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan *Fairness*) yang sebelumnya digunakan pada PUG-KI 2019. Empat prinsip dasar dalam PUG-KI 2021 tersebut adalah:

### 1. Perilaku Beretika

Dalam melaksanakan kegiatannya, korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (*respect*), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

PNM ability to endure and grow demonstrates its strong commitment to consistently applying GCG principles across all organizational levels. The five main GCG principles, which comprise Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness, serve as the foundation for business continuity while ensuring stakeholder interests are met. The implementation of these principles is carried out in accordance with the provisions of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines on Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, which include the following:

1. **Transparency**, namely openness in decision-making processes and disclosure of material and relevant information regarding the Company;
2. **Accountability**, namely Clarity of function, execution, and responsibility of corporate organs to ensure effective management;
3. **Responsibility**, namely compliance where corporate management with laws, regulations, and sound corporate principles;
4. **Independency**, where professional management free from conflicts of interest and undue influence from any party not aligned with regulations and sound corporate principles;
5. **Fairness**, namely equality in fulfilling stakeholders' rights arising from agreements and statutory provisions.

PNM also refers to the updates by the National Governance Policy Committee (KNKG) through the Indonesian Corporate Governance General Guidelines (PUG-KI), emphasizing four pillars, namely Ethical Behavior, Accountability, Transparency, and Sustainability. These principles, introduced in PUG-KI 2021 as an enhancement of the previous TARIF values (Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness) from PUG-KI 2019, The four basic principles in PUG-KI 2021 are defined as follows:

### 1. Ethical Behavior

In carrying out its activities, the Corporation consistently upholds integrity, treats all parties with respect, fulfills its commitments, and builds as well as maintains moral values and trust in a consistent manner. The Corporation gives due consideration to the interests of shareholders and other stakeholders based on the principles of fairness and equality, and is managed independently so that each corporate organ does not dominate one another and cannot be intervened by any other party.



2. Akuntabilitas  
Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.
3. Transparansi  
Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
4. Keberlanjutan  
Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan.

## Struktur Tata Kelola Governance Structure

Struktur tata kelola PNM terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Masing-masing organ Perseroan menjalankan fungsi dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku, dengan tetap menjaga independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab demi kepentingan Perusahaan

PNM menerapkan sistem dua badan (*two-tier system*) yang memisahkan secara jelas fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris dan fungsi pengelolaan oleh Direksi. Kedua organ tersebut memiliki wewenang dan tanggung jawab yang tegas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. [GRI 2-9][IDX G-03]

Selain Undang-Undang Perseroan Terbatas, struktur tata kelola PNM juga berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Mengacu pada peraturan tersebut, definisi RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.

2. Accountability  
The Corporation accounts for its performance in a transparent and equitable manner. Accordingly, the Corporation must be managed properly, measurably, and in line with its corporate interests, while continuing to take into account the interests of shareholders and other stakeholders. Accountability is a prerequisite for achieving sustainable performance.
3. Transparency  
To maintain objectivity in conducting its business, the Corporation provides material and relevant information in a manner that is easily accessible and understood by stakeholders. The Corporation takes the initiative to disclose not only matters required under applicable laws and regulations, but also information that is important for decision-making by shareholders, creditors, and other stakeholders.
4. Sustainability  
The Corporation complies with prevailing laws and regulations and is committed to fulfilling its responsibilities to society and the environment in order to contribute to sustainable development. This commitment is carried out through cooperation with all relevant stakeholders to enhance their quality of life in a manner that is aligned with the Corporation's business interests and the sustainable development agenda.

PNM governance structure comprises the General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, and Board of Directors, in accordance with Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies. Each corporate organ performs functions and authorities under applicable regulations, maintaining independence in carrying out duties for the Company's benefit.

PNM applies a two-tier system, clearly separating the supervisory function of the Board of Commissioners from the management function of the Board of Directors. Both organs have defined authorities and responsibilities as stipulated in the Articles of Association and relevant laws. [GRI 2-9][IDX G-03]

In addition to the Limited Liability Company Law, PNM governance structure also refers to the Ministry of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. According to this regulation, the definitions of the General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, and Board of Directors are as follows:

1. General Meeting of Shareholders (GMS), which is the highest corporate organ in the Company, holding all authorities not delegated to the Board of Directors or the Board of Commissioners.
2. Board of Commissioners, namely the corporate organ responsible for supervision and providing advice to the Board of Directors in managing the Company's operations.



3. Direksi adalah Organ BUMN yang bertanggung jawab atas kepengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Untuk mendukung efektivitas pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung yang terdiri atas Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Manajemen Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Sementara itu, Direksi didukung oleh berbagai komite yaitu Komite Penanganan Pelanggaran, Komite ALCO, Komite Pembiayaan, Komite *Human Capital*, Komite Investasi, Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Komite TJSL, Komite Produk, Komite Pengendalian Risiko Operasional, Komite Pengarah IT, dan Komite Remedial (WECOM). Di antara organ pendukung tersebut, Komite TJSL merupakan komite yang bertugas mengambil keputusan dan mengawasi manajemen dampak Perusahaan terhadap aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. [GRI 2-13]

Sebagai perusahaan pembiayaan, PNM wajib menerapkan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Laporan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik atau POJK Keuangan Berkelanjutan, yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2020. Dalam Lampiran II peraturan tersebut diatur bahwa harus terdapat pegawai, pejabat, dan/atau unit kerja yang bertanggung jawab atas penerapan keuangan atau kegiatan berkelanjutan. Sejalan dengan ketentuan tersebut, PNM menetapkan bahwa tanggung jawab penerapan keuangan berkelanjutan berada pada seluruh jajaran Direksi sesuai bidang masing-masing. Fokus implementasinya berada pada aspek ekonomi dan sosial, sesuai karakteristik usaha PNM sebagai perusahaan pembiayaan bagi pengusaha UMKM. Implementasi keuangan berkelanjutan tersebut dijalankan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). [OJK E.1]

Pelaksanaan TJSL PNM mengacu pada ketentuan terbaru yaitu Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program TJSL BUMN, sebagaimana telah diubah melalui PER-06/MBU/09/2022 dan perubahan terakhir dalam PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program TJSL BUMN. Adapun penyusunan RAKB merujuk pada Lampiran I POJK Keuangan Berkelanjutan.

Berpedoman pada arahan Kementerian BUMN yang berubah menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BPBUMN) per 6 Oktober 2025 dengan disahkannya Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, penyusunan Rencana Kerja (RK) TJSL PNM diselenggarakan dengan prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) serta dikelompokkan ke dalam empat pilar yaitu Pilar Ekonomi, Pilar Sosial, Pilar Lingkungan Hidup, serta Pilar Hukum dan Tata Kelola. Program TJSL dilaksanakan oleh Divisi Jasa Manajemen dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berada di bawah supervisi Direktur Bisnis. Tugas dan tanggung jawab Divisi Jasa Manajemen dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah sebagai berikut. [OJK E.1][GRI 2-13]

3. Board of Directors, namely the organ responsible for managing the SOE in the interest and objectives of the SOE and representing the SOE both inside and outside the court.

To support effective oversight, the Board of Commissioners is assisted by supporting committees, which include the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Management Monitoring Committee, and Integrated Governance Committee. Meanwhile, the Board of Directors is supported by several committees, including the Violations Handling Committee, ALCO Committee, Financing Committee, Human Capital Committee, Integrated Risk Management Committee, Investment Committee, Risk Management Committee, CSR Committee, Product Committee, Operational Risk Control Committee, IT Steering Committee, and Remedial (WECOM) Committee. Among these, the CSR Committee is responsible for decision-making and overseeing the management of the Company's economic, environmental, and social impact. [GRI 2-13]

As a financing company, PNM is required to implement OJK Regulation Number 51/POJK.03/2017 on Implementation of Sustainable Financial Reporting for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies (Sustainable Finance POJK), effective from January 1, 2020. Annex II of the regulation requires the appointment of employees, officials, and/or work units responsible for sustainable finance implementation. Accordingly, PNM assigns responsibility for sustainable finance implementation to all levels of the Board of Directors according to their respective fields, focusing on economic and social aspects in line with PNM business as a financing company for MSMEs. Sustainable finance implementation is carried out through the Corporate Social Responsibility Program (CSR) and the Sustainable Finance Action Plan (RAKB). [OJK E.1]

The implementation of PNM CSR refers to the latest regulations, specifically Ministry of State-Owned Regulation Number PER-05/MBU/04/2021 on SOE CSR Programs, as amended by PER-06/MBU/09/2022 and PER-1/MBU/03/2023 regarding Special Assignments and SOE CSR Programs. The preparation of RAKB refers to Annex I of the Sustainable Finance POJK.

Guided by the Ministry of SOEs which became the State-Owned Enterprises Regulatory Agency (BP BUMN) on October 6, 2025, following the enactment of Law Number 16 of 2025, the Fourth Amendment to Law Number 19 of 2003 on SOEs, PNM CSR Work Plan is aligned with Sustainable Development Goals (SDGs) and categorized into four pillars: Economic, Social, Environmental, and Legal & Governance. The CSR Program is implemented by the Management Services and Corporate Social and Environmental Responsibility Division (CSR Division) under the supervision of the Director of Business. The duties and responsibilities of the Social and Environmental Responsibility (TJSL) Management Services Division are as follows. [OJK E.1][GRI 2-13]

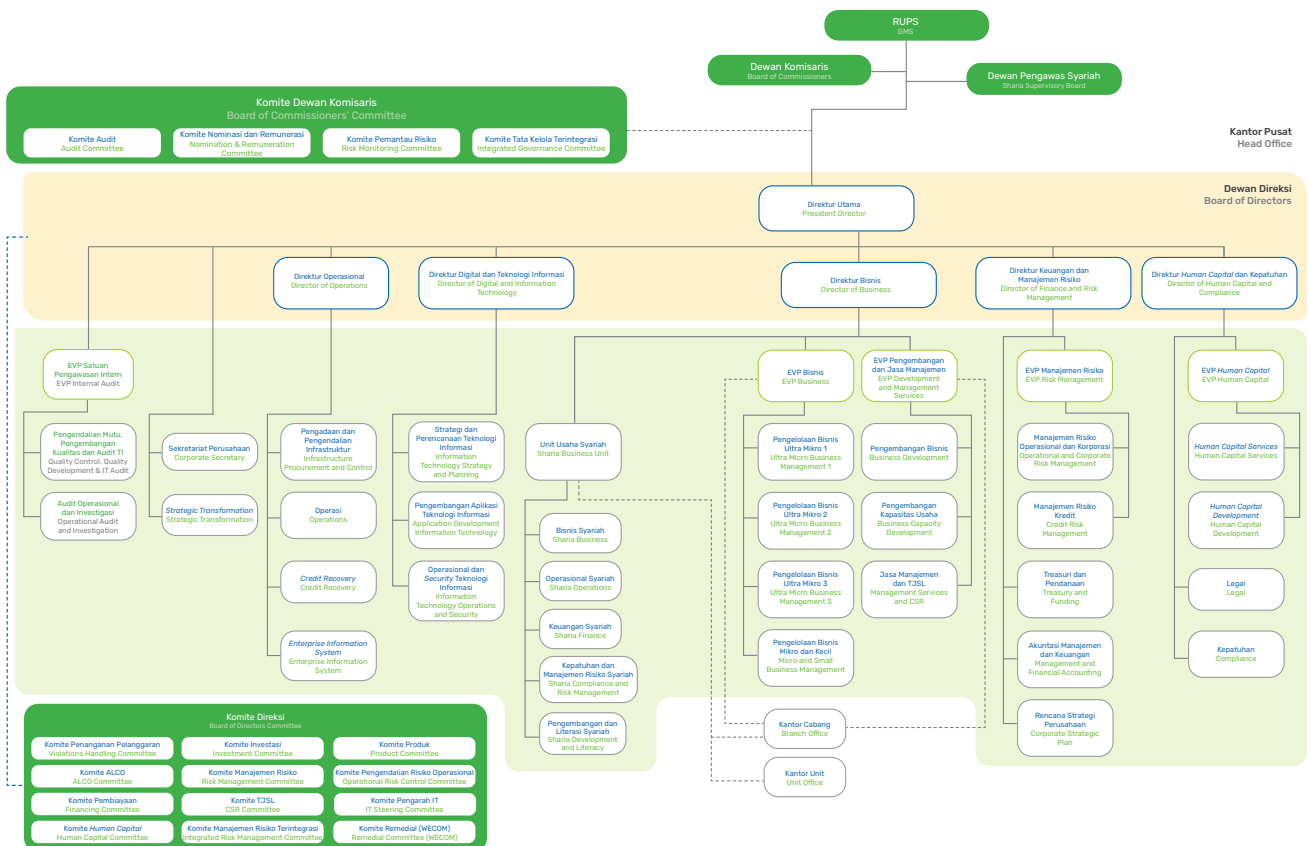
1. Penyusunan strategi, program kerja dan anggaran Divisi Jasa Manajemen dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
  2. Penyusunan kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan fungsi Jasa Manajemen, Kemitraan, dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
  3. Pelaksanaan kegiatan Jasa Manajemen meliputi, namun tidak terbatas pada:
    - a. Melakukan survei dan analisa basis data sebagai dasar dalam pembuatan desain Program Jasa Manajemen;
    - b. Menyusun proposal permohonan Program Jasa Manajemen Kantor Pusat;
    - c. Meninjau/mereview permohonan Jasa Manajemen dari Kantor Cabang;
    - d. Mempersiapkan kegiatan program pemberdayaan untuk Usaha Ultra Mikro, Mikro dan Kecil;
    - e. Memantau pelaksanaan pelatihan dan pendampingan kepada Usaha Ultra Mikro, Mikro dan Kecil di Kantor Cabang PNM;
    - f. Melaksanakan program Jasa Manajemen;
    - g. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Program Jasa Manajemen, baik di Kantor Cabang maupun Kantor Pusat.
  4. Pengelolaan Program Jasa Kemitraan meliputi, namun tidak terbatas pada:
    - a. Menyusun perencanaan Program Jasa Kemitraan;
    - b. Menjalni kerja sama kemitraan dengan pihak ketiga (penyandang dana);
    - c. Menyiapkan dan meninjau proposal permohonan Jasa Kemitraan, baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang PNM;
    - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pencapaian target pembiayaan Program Jasa Kemitraan baik secara kuantitas maupun kualitas untuk disampaikan kepada penyandang dana.
  5. Pengelolaan program TJSL Perusahaan meliputi:
    - a. Menyusun perencanaan Program TJSL;
    - b. Melakukan evaluasi dan seleksi atas permohonan Pendanaan Usaha Ultra Mikro, Mikro dan Kecil (PUMK) yang diajukan oleh dan untuk menetapkan Mitra Binaan;
    - c. Menyiapkan dan menyalurkan program TJSL kepada masyarakat yang menjadi target penerima manfaat;
    - d. Melakukan *monitoring* dan pembinaan kepada Mitra Binaan;
    - e. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan;
    - f. Melakukan pembukuan dan penatakelolaan atas dokumen TJSL, yang meliputi dokumen pembiayaan Program TJSL;
    - g. Memonitor kegiatan penagihan angsuran (*collection*) PUMK;
    - h. Melakukan evaluasi kelayakan dan verifikasi terhadap restrukturisasi PUMK;
    - i. Membantu Direksi dalam melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Program TJSL;
    - j. Menyusun laporan berkala dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) dalam lingkup program TJSL;
    - k. Menyusun laporan keuangan dan pelaksanaan program TJSL.
1. Prepare strategies, work programs, and budgets for the CSR Division.
  2. Develop policies and procedures related to Management Services, Partnerships, and CSR functions in compliance with applicable Company regulations.
  3. Implement Management Services activities, including but not limited to:
    - a. Conducting surveys and database analyses as the basis for the program design;
    - b. Preparing proposals for Management Services programs at the Head Office;
    - c. Reviewing Management Services requests from Branch Offices;
    - d. Preparing empowerment programs for Ultra Micro, Micro, and Small Enterprises;
    - e. Monitoring training and assistance for Ultra Micro, Micro, and Small Enterprises at Branch Offices;
    - f. Implementing Management Services programs;
    - g. Monitoring and evaluating program implementation at both Branch and Head Offices.
  4. Manage Partnership Services programs, including:
    - a. Planning Partnership Services programs;
    - b. Establishing partnerships with third parties (fund providers);
    - c. Preparing and reviewing partnership proposals at Head and Branch Offices;
    - d. Monitoring and evaluating financing targets' achievement in terms of quantity and quality for reporting to fund providers.
  5. Manage the Company's CSR program, including:
    - a. Planning CSR programs;
    - b. Evaluating and selecting funding applications for Ultra Micro, Micro, and Small Enterprises to determine beneficiary partners;
    - c. Preparing and distributing CSR programs to target beneficiaries;
    - d. Monitoring and guiding beneficiaries;
    - e. Administering training and guidance activities;
    - f. Maintaining bookkeeping and document management for CSR, including financing documents;
    - g. Monitoring PUMK installment collection activities;
    - h. Conducting feasibility evaluation and verification for PUMK restructuring;
    - i. Assisting the Board of Directors in evaluating CSR program implementation;
    - j. Preparing periodic and sustainability reports within the CSR program scope;
    - k. Preparing financial statements and CSR program implementation reports.



6. Berkoordinasi dan bersinergi dengan Unit Kerja terkait pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan keuangan berkelanjutan.
7. Sebagai sekretariat Komite TJSL di Perusahaan.
8. Pengelolaan nasabah *Write-Off* LKMS.
9. Mengidentifikasi, mengukur, *monitoring*, evaluasi dan mengendalikan risiko terkait pelaksanaan fungsi Divisi Jasa Manajemen dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
10. Berkoordinasi dan membina hubungan baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal agar proses kerja Divisi Jasa Manajemen dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berjalan sesuai dengan ketentuan.
11. Pemantauan tata kelola dan kepatuhan serta pelaksanaan fungsi supervisi, pembinaan, dan pengawasan pada seluruh personil di Divisi Jasa Manajemen dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) agar dapat berjalan sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan, baik ketentuan eksternal maupun internal.
12. Pelaporan kegiatan pengelolaan Divisi Jasa Manajemen dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) kepada Komite, Direktur atau *Executive Vice President* yang membawahkan Divisi Jasa Manajemen dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan pihak terkait.

6. Coordinate and collaborate with relevant work units regarding sustainable finance management and implementation.
7. Act as secretariat for the CSR Committee.
8. Manage Write-Off LKMS clients.
9. Identify, measure, monitor, evaluate, and control risks related to the CSR Division's functions in accordance with applicable regulations.
10. Coordinate and maintain good relations with internal and external parties to ensure CSR Division operations comply with regulations.
11. Monitor governance and compliance, supervise, guide, and oversee all CSR Division personnel in accordance with internal and external rules.
12. Report CSR Division activities to the Committee, Director, or Executive Vice President supervising the CSR Division and other relevant parties.

### Bagan Struktur Tata Kelola Tahun 2025 2025 Governance Structure Chart



\*) Informasi selengkapnya tentang Struktur Tata Kelola PNM dan kelengkapannya disampaikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2025 yang terbit terpisah, namun menjadi satu kesatuan dengan laporan ini.

\*) Further information on PNM Governance Structure and its related components are presented in the Good Corporate Governance Chapter of the Company's 2025 Annual Report, which is published separately but forms an integral part of this report.



## Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

General Meeting of Shareholders (GMS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perusahaan dengan kewenangan tertinggi yang memegang seluruh wewenang yang tidak dilimpahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Penyelenggaraan RUPS wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perusahaan secara transparan dan akuntabel. Dalam setiap pengambilan keputusan, RUPS harus memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, khususnya debitor, kreditur, dan pemegang saham minoritas.

RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan wajib dilaksanakan paling lambat enam (6) bulan setelah tahun buku berakhir. RUPS Tahunan terkait pengesahan RKAP diselenggarakan selambat-lambatnya pada akhir Januari setelah dimulainya tahun buku baru, sementara RUPS Tahunan untuk persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan laporan keuangan tahunan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni. Adapun RUPS Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan permintaan Pemegang Saham dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Selama tahun 2025, Perusahaan menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS sebagaimana tabel berikut:

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest corporate organ, holding all powers not delegated to the Board of Directors or the Board of Commissioners. The implementation of GMS must comply with statutory regulations and the Company's Articles of Association in a transparent and accountable manner. In every decision-making process, the GMS must consider the interests of all stakeholders, particularly debtors, creditors, and minority shareholders.

The GMS is divided into Annual GMS and Extraordinary GMS. The Annual GMS must be held no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year. The Annual GMS for approval of the Work Plan and Budget (RKAP) is held no later than the end of January of the new fiscal year, while the Annual GMS for approval of the Annual Report and financial statements must be conducted no later than June. Meanwhile, the Extraordinary GMS can be convened at any time based on a request from the Shareholders and/or the Board of Commissioners and/or the Board of Directors.

In 2025, the Company held 2 (two) GMS, as detailed in the following table:

Jenis RUPS GMS Type	Waktu dan Tempat Place and Time	
RUPS RKAP The Annual Budget Plan GMS	Hari/tanggal Day/Date	: 30 Januari 2025 January 30, 2025
	Waktu Time	: 15.00 WIB-Selesai   Until Completion
	Tempat Place	: The Gade Tower
RUPS Tahunan Annual GMS	Hari/tanggal Day/Date	: 24 Juni 2025 June 24, 2025
	Waktu Time	: 10.30 WIB-Selesai   Until Completion
	Tempat Place	: The Gade Tower



## Kebijakan Mengenai Perlakuan Adil terhadap Pemegang Saham [IDX G-08]

Policy on Fair Treatment of Shareholders [IDX G-08]

PNM menjamin perlakuan yang adil terhadap seluruh pemegang saham dengan menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kesetaraan dalam setiap pengambilan keputusan strategis dan operasional. Perusahaan memastikan bahwa hak-hak pemegang saham, termasuk hak untuk memperoleh informasi yang akurat, hak untuk berpartisipasi dalam rapat umum, serta hak atas dividen dan manfaat lainnya, dihormati dan dilindungi secara konsisten. Selain itu, PNM menjalankan mekanisme pengawasan internal dan kebijakan komunikasi yang transparan untuk mencegah adanya praktik diskriminatif atau penyalahgunaan wewenang sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan saling percaya antara manajemen dan pemegang saham, mendukung tata kelola perusahaan yang kuat dan berkelanjutan.

PNM ensures fair treatment for all shareholders by implementing the principles of transparency, accountability, and equality in every strategic and operational decision. The Company guarantees that shareholders' rights, including the right to accurate information, the right to participate in general meetings, and the right to dividends and other benefits, are consistently respected and protected. Furthermore, PNM operates internal oversight mechanisms and transparent communication policies to prevent discriminatory practices or abuse of authority, thereby fostering a harmonious and trust-based relationship between management and shareholders. This approach supports strong and sustainable corporate governance.



Perlakuan adil terhadap pemegang saham diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT PNM Nomor: SK-055/PNM-DIR/VII/25 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) pada Bab II Pemegang Saham, Huruf A Pemegang Saham, Nomor 3. Hak-hak Pemegang Saham, huruf b. Perusahaan memastikan perlakuan adil terhadap Pemegang Saham, termasuk pemegang saham Seri B.

Fair treatment of shareholders is regulated in Decree of PT PNM Board of Directors Number SK-055/PNM-DIR/VII/25 regarding Code of Corporate Governance, Chapter II on Shareholders, Letter A, Clause 3. The Company ensures equitable treatment of all shareholders, including Series B shareholders.



### Kriteria Pemilihan Dewan Komisaris dan Direksi [IDX G-06]

Criteria for the Appointment of the Board of Commissioners and Board of Directors [IDX G-06]

Pemilihan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PNM dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN, serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Proses ini memastikan setiap pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

The appointment of PNM Board of Commissioners and Board of Directors is carried out in accordance with applicable laws and regulations, including Minister of SOE Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 on Code of Corporate Governance and Significant SOE Activities, Minister of SOE Regulation Number PER-3/MBU/03/2023 on SOE Organs and Human Resources, and OJK Regulation Number 33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. This process ensures that the appointment of candidates is conducted transparently, accountably, and in line with good corporate governance principles.

Kriteria calon anggota Dewan Komisaris meliputi integritas, dedikasi, pemahaman tentang manajemen perusahaan, pengetahuan di bidang usaha terkait, serta kemampuan menyediakan waktu yang memadai untuk melaksanakan tugas. Sementara itu, calon anggota Direksi dinilai berdasarkan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku baik, dan dedikasi tinggi untuk memajukan perusahaan. Dengan mekanisme dan kriteria tersebut, PNM memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi yang terpilih memiliki kompetensi, integritas, dan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan serta penguatan tata kelola yang berkelanjutan.

The Board of Commissioners candidates are evaluated on integrity, dedication, understanding of corporate management, knowledge in relevant business areas, and availability to fulfill duties. Meanwhile, the Board of Directors candidates are assessed based on expertise, integrity, leadership, experience, honesty, good conduct, and high dedication to advance the Company. These criteria ensure that the appointed Board of Commissioners and Board of Directors possess the competence, integrity, and commitment to support the Company's strategic objectives and strengthen sustainable governance.



### Dewan Komisaris Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang menjalankan fungsi pengawasan secara umum maupun khusus sesuai ketentuan Anggaran Dasar, serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam pelaksanaan pengurusan Perusahaan. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun atau hingga penutupan RUPS Tahunan, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

The Board of Commissioners serves as the corporate organ supervising both general and specific functions per the Articles of Association and provides advice to the Board of Directors in corporate management. Members are appointed for a term of 5 (five) years or until the closing of the Annual GMS and may be reappointed for 1 (one) additional term.

Per 31 Desember 2025, susunan Dewan Komisaris sesuai dengan nomenklatur nomor SK-195/MBU/07/2025, nomor: 2266-DIR/HBS/07/2025 tanggal 04 Juli 2025 tentang Pemberhentian, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komisaris PT Permodalan Nasional Madani, terdiri dari 6 (enam) orang dengan beragam usia dan latar belakang pendidikan, sama dengan tahun sebelumnya. Komposisi Dewan Komisaris terdiri dari satu Komisaris Utama/Komisaris Independen, 2 (dua) Komisaris Independen, dan 3 (tiga) Komisaris. Adapun komposisi menurut *gender*, Dewan Komisaris pada tahun pelaporan terdiri dari 3 (tiga) pria dan 3 (tiga) wanita. Komposisi Dewan Komisaris selengkapnya adalah sebagai berikut: [GRI 2-11]

As of December 31, 2025, the Board of Commissioners, per decree numbers SK-195/MBU/07/2025 and 2266-DIR/HBS/07/2025 dated July 4, 2025 regarding Dismissal and Appointment of members, consists of 6 (six) members with diverse ages and educational backgrounds, unchanged from the previous year. The composition includes 1 (one) President Commissioner/Independent Commissioner, 2 (two) Independent Commissioners. 3 (three) Commissioners By gender, the Board comprises 3 (three) males and 3 (three) females. The full composition of the Board of Commissioners is as follows: [GRI 2-11]

No.	Jabatan Position	Nama Name
1	Komisaris Utama/Komisaris Independen President Commissioner/Independent Commissioner	Dradjad Hari Wibowo
2	Komisaris Independen Independent Commissioner	Veronica Colondam
3	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nurhaida
4	Komisaris Commissioner	Ardhya Pratiwi Setiowati
5	Komisaris Commissioner	Iwan Taufiq Purwanto
6	Komisaris Commissioner	Anas Puji Istanto

### Direksi Board of Directors

Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal masa jabatan anggota Direksi berakhir dan RUPS belum dapat menetapkan penggantinya, maka tugas-tugas anggota Direksi yang lowong tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengisian jabatan Direksi yang kosong.

Per 31 Desember 2025, susunan Direksi PNM sesuai dengan nomenklatur nomor SK-194/MBU/07/2025, nomor: 2265-DIR/HBS/07/2025 tanggal 04 Juli 2025 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Permodalan Nasional Madani, terdiri dari 6 (enam) orang dengan berbagai usia dan latar belakang pendidikan dengan salah satunya sebagai Direktur Utama, sama dengan tahun sebelumnya. Adapun komposisi menurut gender, Direksi pada tahun pelaporan terdiri dari 6 (enam). Komposisi Direksi PNM selengkapnya adalah sebagai berikut: [GRI 2-11]

The Board of Directors is the corporate organ responsible for managing the Company in the interest and for the purpose of the Company, and represents the Company both in and out of court in accordance with the Articles of Association. The term of office for members of the Board of Directors is 5 (five) years and may be reappointed for 1 (one) additional term. In the event that a Director's term ends and the GMS has not yet appointed a replacement, the duties of the vacant Director position are carried out in accordance with the provisions for filling vacant Director positions.

As of December 31, 2025, the Board of Directors of PNM, per decree numbers SK-194/MBU/07/2025 and 2265-DIR/HBS/07/2025 dated July 4, 2025 regarding dismissal, changes in position nomenclature, reassignment of duties, and appointment of members, consists of 6 (six) members with diverse ages and educational backgrounds, including 1 (one) President Director, unchanged from the previous year. By gender, the Board of Directors in the reporting year consists of 6 (six) members. The full composition of PNM Board of Directors is as follows:

[GRI 2-11]

No.	Jabatan Position	Nama Name
1	Direktur Utama President Director	Arief Mulyadi
2	Direktur Bisnis Director of Business	Kindaris
3	Direktur Operasional Director of Operations	Sunar Basuki
4	Direktur Digital dan Teknologi Informasi Director of Digital and Information Technology	Yusron Avivi
5	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Sahat Pangabahan Pangaribuan
6	Direktur <i>Human Capital</i> dan Kepatuhan Director of Human Capital and Compliance	Henry Yunus Kamang Pangemanan

**Keberagaman Badan Tata Kelola**  
Governance DiversityKeberagaman Manajemen dan Independensi (*Board Diversity and Independence*) [IDX G-01]Management Diversity and Independence (*Board Diversity and Independence*) [IDX G-01]

Tipe Manajemen Perusahaan Company Management	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Pihak Independen Independent Party
Dewan Komisaris Board of Commissioners	3	3	6
Direksi Board of Directors	6	0	6

**Total Kehadiran Rapat Direksi dan Dewan Komisaris**  
Meeting Attendance of the Board of Directors and the Board of Commissioners

Total kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris ke Rapat Dewan [IDX G-02]

Total Attendance of Directors and Commissioners at Board Meetings [IDX G-02]

Uraian Description	Jumlah Rapat Dewan (Di Tahun Pelaporan) Number of Board Meetings (In the Reporting Year)	Rata-rata Persentase Kehadiran Direksi/Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan (Di Tahun Pelaporan) Average attendance of the Board of Directors at Board Meetings (In the Reporting Year)
Jumlah Kehadiran Direksi ke Rapat Dewan Attendance of the Board of Directors at Board Meetings	13	100%
Jumlah Kehadiran Dewan Komisaris ke Rapat Dewan Attendance of the Board of Commissioners at Board Meetings	13	100%

**Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi [IDX G-04]**  
Performance Assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors [IDX G-04]

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi PNM dilakukan secara rutin setiap tahun sesuai dengan ketentuan dalam *Board Manual* PNM. Evaluasi kinerja didasarkan pada *Key Performance Indicators* (KPI) yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan mencakup penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota sesuai dengan rencana kerja tahunan yang telah disampaikan sebelumnya. Proses penilaian ini bertujuan memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi menjalankan fungsi pengawasan, pengambilan keputusan, dan kepemimpinan secara efektif, mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan, serta menjaga tata kelola yang baik.

Kriteria evaluasi kinerja Dewan Komisaris meliputi beberapa aspek antara lain perencanaan, pengawasan dan pemberian nasihat, pelaporan, serta kemampuan beradaptasi atau aspek dinamis. Penilaian dilakukan oleh pemegang saham melalui RUPS, dengan memperhatikan pemenuhan tanggung jawab umum maupun tanggung jawab khusus sesuai posisi jabatan masing-masing anggota. Adapun proses pelaksanaan penilaian terhadap kinerja Direksi dapat dilihat dari pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi secara individu serta kolektif yang dinilai oleh Pemegang Saham dan dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada anggota Direksi yang bersangkutan sejak tanggal pengangkatannya.

The performance of PNM Board of Commissioners and Board of Directors is evaluated annually in accordance with the provisions of the PNM Board Manual. The evaluation is based on Key Performance Indicators (KPI) set by the General Meeting of Shareholders (GMS) and includes assessment of each member's execution of duties and responsibilities according to the annual work plan submitted previously. This assessment process ensures that the Board of Commissioners and Board of Directors perform oversight, decision-making, and leadership functions effectively, supporting the achievement of the company's strategic objectives while maintaining good corporate governance.

Evaluation criteria for the Board of Commissioners include aspects such as planning, supervision and advisory roles, reporting, and adaptability. The evaluation is conducted by shareholders through the GMS, taking into account the fulfillment of general and specific responsibilities according to each member's position. Performance evaluation of the Board of Directors is measured through individual and collective KPI achievements, assessed by shareholders via the GMS. Formal evaluation criteria are communicated openly to Directors from their date of appointment.



Dengan mekanisme penilaian tersebut, PNM memastikan bahwa proses evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi bersifat transparan, objektif, dan mendukung peningkatan kinerja manajemen serta penguatan tata kelola perusahaan secara keseluruhan.

### **Pengawasan terkait Keberlanjutan Perusahaan [IFRS S1.27][IFRS S2.6]** Supervision of Corporate Sustainability [IFRS S1.27][IFRS S2.6]

Dewan Komisaris PNM bertanggung jawab mengawasi risiko dan peluang terkait keberlanjutan dengan memastikan bahwa kebijakan, strategi, dan praktik perusahaan selaras dengan tujuan jangka panjang dan prinsip tata kelola yang baik. Pengawasan ini mencakup evaluasi keterampilan yang dimiliki oleh Dewan, penerimaan dan analisis informasi secara rutin, serta penilaian pengaruh risiko dan peluang terhadap perencanaan dan pencapaian tujuan bisnis. Selain itu, Dewan secara berkala yaitu 12 (dua belas) kali dalam setahun rapat internal dewan komisaris dan 12 (dua belas) kali dalam setahun rapat gabungan BOC BOD diadakan bulan sekali menilai kemajuan perusahaan dalam mencapai target keberlanjutan, sehingga pengambilan keputusan strategis didukung oleh informasi yang akurat dan mekanisme pengawasan yang efektif.

Sementara itu, manajemen PNM memiliki peran penting dalam menilai dan mengelola risiko serta peluang terkait keberlanjutan dengan memastikan implementasi kebijakan dan strategi perusahaan berjalan efektif. Peran ini mencakup tanggung jawab atas identifikasi dan mitigasi risiko keberlanjutan, penjelasan struktur organisasi yang mendukung pengelolaan risiko, proses komunikasi internal untuk menyampaikan informasi terkait, serta mekanisme pemantauan yang sistematis. Melalui peran ini, manajemen memastikan bahwa risiko dan peluang keberlanjutan dikelola secara terintegrasi, mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan, dan memperkuat tata kelola yang berkelanjutan.

### **Peran Badan Tata Kelola Tertinggi dalam Pelaporan Keberlanjutan [GRI 2-14]** Role of the Highest Governance Body in Sustainability Reporting [GRI 2-14]

PNM wajib menerapkan keuangan berkelanjutan yang laporannya disampaikan melalui pelaporan keberlanjutan seperti diamanatkan dalam POJK Keuangan Berkelanjutan. Dengan demikian, sebagai salah satu lembaga jasa keuangan, penyampaian laporan keberlanjutan merupakan kewajiban bagi Perseroan. Berkaitan dengan hal ini, selain memberikan persetujuan atas topik material terpilih, manajemen dan karyawan lintas divisi, termasuk para penanggung jawab penyusunan Laporan Keberlanjutan senantiasa mendorong agar laporan yang diterbitkan PNM terus ditingkatkan kualitas dan kelengkapan kontennya sehingga memenuhi panduan laporan yaitu POJK Keuangan Berkelanjutan dan GRI Universal Standards 2021.

Through this mechanism, PNM ensures that the performance evaluation process of the Board of Commissioners and the Board of Directors is transparent and objective, as well as contributes to improved management performance and strengthened corporate governance.

The Board of Commissioners of PNM is responsible for overseeing sustainability-related risks and opportunities by ensuring that the Company's policies, strategies, and practices are aligned with its long-term objectives and principles of good corporate governance. This oversight includes evaluating the competencies possessed by the Board, receiving and analyzing information on a regular basis, as well as assessing the impact of risks and opportunities on business planning and the achievement of business objectives. In addition, the Board holds regular meetings, namely 12 (twelve) internal Board of Commissioners meetings per year and 12 (twelve) joint BOC-BOD meetings per year, conducted on a monthly basis, to assess the Company's progress in achieving its sustainability targets. This ensures that strategic decision-making is supported by accurate information and effective oversight mechanisms.

Meanwhile, PNM management plays a strategic role in identifying and managing sustainability risks and opportunities, ensuring effective implementation of company policies and strategies. This includes establishing risk mitigation measures, organizational structures that support risk management, internal communication processes, and systematic monitoring mechanisms. Through this role, management ensures integrated management of sustainability risks and opportunities, supporting strategic objectives and strengthening sustainable governance.

PNM is required to implement sustainable finance, and its reports are submitted through sustainability reporting as mandated in the POJK on Sustainable Finance. Therefore, as one of the financial services institutions, submitting a sustainability report is mandatory for the Company. In this regard, in addition to approving the selected material topics, management and employees across divisions, including those responsible for preparing the Sustainability Report, continually encourages the improvement of the quality and completeness of the content in the report to meet the reporting guidelines, namely the POJK on Sustainable Finance and the GRI Universal Standards 2021.



## Komunikasi Masalah Penting, serta Mekanisme untuk Mencari Nasihat dan Mengemukakan Masalah [GRI 2-16, 2-26]

Communication of Critical Issues and Mechanisms for Seeking Advice and Raising Concerns [GRI 2-16, 2-26]

PNM mendefinisikan masalah penting atau kritis sebagai isu atau keluhan dari pemangku kepentingan yang berpotensi atau secara nyata menimbulkan dampak negatif signifikan terhadap aspek ekonomi, lingkungan, sosial, tata kelola, maupun reputasi Perusahaan. Isu dianggap penting apabila terkait dengan dampak aktual atau risiko serius, dugaan pelanggaran etika dan kepatuhan, pelanggaran hak pemangku kepentingan, atau hal-hal yang dapat memengaruhi kepercayaan publik dan keputusan strategis Perusahaan.

Untuk memastikan akses komunikasi yang terbuka dan responsif, PNM menyediakan berbagai kanal pengaduan dan konsultasi, termasuk layanan pengaduan resmi, kanal pengaduan masyarakat, serta mekanisme *Whistleblowing System* (WBS) yang menjamin kerahasiaan pelapor. Setiap masukan ditangani melalui proses terstruktur mulai dari verifikasi awal hingga tindak lanjut dan pemberian umpan balik, sehingga suara pemangku kepentingan berkontribusi langsung pada penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kinerja keberlanjutan.

Dalam pengelolaan WBS, seluruh pengaduan ditelaah terlebih dahulu oleh Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran, dan isu yang dinilai kritis dibahas lebih lanjut bersama Direksi serta Dewan Komisaris agar penanganannya objektif dan akuntabel. Selain itu, Divisi Jasa Manajemen dan Kemitraan di bawah supervisi Direktur Operasional berperan mengantisipasi dan mengelola isu strategis terkait aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Selama tahun pelaporan, tidak terdapat masalah penting atau kritis yang dilaporkan melalui WBS maupun kanal pengaduan lainnya.



## Pedoman Perilaku [GRI 2-23]

Code of Conduct [GRI 2-23]

Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) merupakan standar etika yang menjadi acuan bagi seluruh Insan PNM dalam berperilaku, bekerja, dan mengambil keputusan. Pedoman ini dirancang untuk membentuk dan memastikan kesesuaian perilaku dengan nilai budaya perusahaan sehingga mendukung pencapaian visi dan misi Perusahaan. Pedoman Perilaku berlaku bagi seluruh karyawan, pejabat, anggota Direksi, serta Dewan Komisaris, dan pelaksanaannya membutuhkan komitmen penuh dari seluruh Insan PNM.

Untuk memastikan pemahaman yang merata, PNM melakukan sosialisasi Pedoman Perilaku secara rutin dan memperbarui ketentuannya melalui pembahasan di tingkat divisi dan manajemen. Penyebarluasan pedoman dilakukan melalui sistem *Digital Performance Management* (DPM) sehingga seluruh Insan PNM dapat mengaksesnya dengan mudah. [GRI 2-24]

PNM defines critical issues as stakeholder concerns that have potential or actual significant negative impacts on economic, environmental, social, governance, or reputational aspects. Issues are considered critical if they relate to actual impacts, serious risks, suspected ethical or compliance violations, breaches of stakeholder rights, or matters affecting public trust and strategic decisions.

To ensure open and responsive communication, PNM provides multiple channels, including official complaint services, public complaint channels, and a Whistleblowing System (WBS) ensuring confidentiality. Inputs are handled through a structured process from verification to follow-up and feedback, ensuring stakeholders' voices directly contribute to policy refinement and sustainability performance improvement.

All WBS complaints are initially reviewed by the Violation Handling Team, and critical issues are further discussed with the Board of Directors and Board of Commissioners to ensure objective and accountable handling. Additionally, the Management Services and Partnerships Division, under the supervision of the Director of Operations, manages strategic issues related to economic, environmental, and social aspects. During the reporting year, no critical issues were reported via WBS or other complaint channels.

The Code of Conduct provides ethical standards for all PNM personnel in behavior, work, and decision-making, aligning conduct with the company's cultural values to support achievement of its vision and mission. The Code applies to all employees, officers, members of the Board of Directors and Board of Commissioners, and requires full commitment from all personnel.

To ensure widespread understanding, PNM regularly socializes and updates the Code at divisional and management levels. Distribution is facilitated via the Digital Performance Management (DPM) system for easy access by all PNM personnel. [GRI 2-24]



Sebagai bentuk penegakan disiplin, PNM menetapkan sanksi bagi setiap pelanggaran Pedoman Perilaku sesuai ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaduan atas dugaan pelanggaran dapat disampaikan kepada Divisi *Human Capital Services* melalui *e-mail* dengan melampirkan bukti pendukung. Pelanggaran yang ditindak mencakup pelanggaran indisipliner, ketidakpatuhan terhadap SOP dan kebijakan perusahaan, serta pelanggaran yang berkaitan dengan tindak pidana. Per 31 Desember 2025, jumlah pelanggaran dan sanksi yang dijatuhkan adalah sebagai berikut:

For disciplinary enforcement, PNM imposes sanctions for Code violations in accordance with internal regulations and applicable laws. Complaints regarding suspected violations can be submitted to the Human Capital Services Division via e-mail with supporting evidence. Violations include disciplinary infractions, non-compliance with SOPs and company policies, and criminal-related violations. As of December 31, 2025, the number of violations and sanctions imposed are as follows:

### Jumlah Pelanggaran dan Sanksi yang Diberikan Number of Violations and Sanctions Imposed

No.	Bisnis Business	Jumlah Pelanggaran Number of Violations		
		2025	2024	2023
1	ULaMM	25	23	33
2	PNM Mekaar	142	626	206
3	Kantor Pusat Head Office	0	5	1
<b>Jumlah Total</b>		<b>167</b>	<b>654</b>	<b>240</b>

No.	Jenis Sanksi Sanction Type	ULaMM			PNM Mekaar		
		2025	2024	2023	2025	2024	2023
1	Surat Teguran (ST) Letter of Leprimand	30	50	43	123	291	115
2	Surat Peringatan (SP) 1 First Warning Letter	101	27	151	353	900	398
3	Surat Peringatan (SP) 2 Second First Warning Letter	0	1	0	0	0	7
4	Surat Peringatan (SP) 3 Third First Warning Letter	0	0	0	0	0	10
5	Surat Peringatan Pertama dan Terakhir First and Final Warning Letter	43	26	36	275	1.244	231
6	PHK Karyawan Aktif Termination of Active Employees	19	5	2	172	57	0
7	PHK Pencatatan HRIS Termination Recorded in HRIS	24	45	77	452	1.186	374
<b>Jumlah Total</b>		<b>217</b>	<b>154</b>	<b>309</b>	<b>1.357</b>	<b>3.678</b>	<b>1.135</b>

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pelanggaran dan sanksi yang dijatuhkan pada tahun 2025 mengalami kenaikan pada ULaMM dan penurunan pada PNM Mekaar dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan ini mencerminkan dinamika kepatuhan di lingkungan kerja serta efektivitas pengendalian internal yang berjalan. Untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran, PNM menerapkan sejumlah langkah penguatan, antara lain penegakan sanksi yang lebih tegas, peningkatan edukasi bagi seluruh karyawan, serta penguatan kontrol bisnis secara berkala.

Based on the table above, the number of violations and sanctions imposed in 2025 increased at ULaMM and decreased at PNM Mekaar compared to the previous year. This change reflects the dynamics of compliance in the workplace as well as the effectiveness of internal controls. To minimize violations, PNM implements several reinforcement measures, including stricter enforcement of sanctions, enhanced education for all employees, and periodic strengthening of business controls.



**Rasio Kompensasi Total Tahunan [GRI 2-21]**  
Annual Total Compensation Ratio [GRI 2-21]

Untuk memenuhi prinsip transparansi dalam pengelolaan remunerasi, PNM mengungkapkan perbandingan antara total kompensasi tahunan pada posisi dengan tingkat remunerasi tertinggi di perusahaan dengan rata-rata kompensasi karyawan. Pendekatan ini digunakan untuk menilai proporsionalitas, kesetaraan, serta konsistensi kebijakan remunerasi bagi seluruh insan perusahaan. Selain itu, PNM juga memantau keseimbangan pertumbuhan kompensasi tahunan antara posisi dengan kompensasi tertinggi dan karyawan secara umum, guna memastikan bahwa struktur remunerasi tetap adil, terkendali, dan sejalan dengan kinerja perusahaan maupun kontribusi masing-masing kelompok jabatan.

Merujuk pada remunerasi berbasis kinerja Dewan Komisaris dan Direksi PNM tahun 2025 sebagaimana disampaikan dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2025, rasio kompensasi total tahunan antara Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan disajikan sebagai bagian dari komitmen transparansi Perusahaan dalam pengelolaan remunerasi.

Penetapan remunerasi tersebut mempertimbangkan kinerja Perusahaan, pencapaian target strategis, serta kondisi pasar tenaga kerja. PNM memastikan bahwa kebijakan remunerasi dilaksanakan secara transparan dan berkeadilan melalui mekanisme evaluasi berkala oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, guna menjaga keselarasan antara kompensasi pimpinan, kontribusi karyawan, dan kinerja keberlanjutan Perusahaan.

To uphold transparency in remuneration management, PNM discloses the comparison between the annual total compensation of the highest-paid position in the company and the average employee compensation. This approach is used to assess proportionality, equality, and consistency of remuneration policies across all company personnel. Furthermore, PNM monitors the balance of annual compensation growth between the highest-paid positions and general employees to ensure that the remuneration structure remains fair, controlled, and aligned with company performance as well as the contribution of each job group.

With reference to the performance-based remuneration of PNM's Board of Commissioners and Board of Directors for 2025, as presented in the Company's 2025 Annual Report, the ratio of total annual compensation among the Board of Commissioners, Board of Directors, and employees is presented as part of the Company's commitment to transparency in remuneration management.

The determination of such remuneration takes into account the Company's performance, the achievement of strategic targets, and labor market conditions. PNM ensures that the remuneration policy is implemented transparently and fairly through a periodic evaluation mechanism by the Nomination and Remuneration Committee, to maintain alignment between executive compensation, employee contributions, and the Company's sustainable performance.

No.	Perihal Regarding	Rasio Ratio
1	Direktur Utama terhadap Direktur President Director to Directors	1:0,85
2	Komisaris Utama terhadap Anggota Dewan Komisaris President Commissioner to Members of the Board of Commissioners	1:0,90
3	Direktur Utama terhadap Komisaris Utama President Director to President Commissioner	1:0,45
4	Direktur Utama terhadap Karyawan Tertinggi President Director to Highest-Paid Employee	1:0,39
5	Direktur Utama terhadap Karyawan Terendah President Director to Lowest-Paid Employee	1:0,01
6	Karyawan Tertinggi terhadap Karyawan Terendah Highest-Paid Employee to Lowest-Paid Employee	1:0,03



**Whistleblowing System [GRI 2-25, 2-26]**  
Whistleblowing System [GRI 2-25, 2-26]

PNM menerapkan *Whistleblowing System* (WBS) sebagai kanal pelaporan atas dugaan pelanggaran yang telah atau berpotensi terjadi, baik yang melibatkan pegawai maupun pihak lain

PNM implements a *Whistleblowing System* (WBS) as a reporting channel for alleged or potential violations, whether involving employees or other parties related to company operations.

yang terkait dengan operasional perusahaan. Mekanisme ini memungkinkan laporan disampaikan secara aman dan rahasia, termasuk oleh pelapor yang mungkin berada di dalam maupun di luar lingkup kejadian. WBS berperan penting dalam memperkuat praktik tata kelola yang baik dengan menyediakan sarana yang terpercaya bagi pejabat, karyawan, maupun pihak eksternal, termasuk nasabah, untuk melaporkan indikasi pelanggaran secara bertanggung jawab. Penerapan WBS dikukuhkan melalui SR Direksi PT PNM Nomor SK-047/PNM-DIR/V/24 tentang Kebijakan Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

### 1. Penyampaian dan Media Laporan Pelanggaran

Pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan karyawan Perusahaan ditujukan kepada Direksi. Perusahaan menerima setiap pengaduan pelanggaran yang diajukan oleh pelapor secara tertulis.

Pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan karyawan Perusahaan dilakukan secara tertulis dengan mekanisme sebagai berikut:

- Melalui *e-mail* ke [antifraud@pnm.co.id](mailto:antifraud@pnm.co.id)
- Whatsapp ke nomor 082112345555
- Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Direksi up Satuan Pengawasan Intern dengan cara diantarkan langsung atau melalui pos kepada Perusahaan dengan alamat:

#### Direksi

PT Permodalan Nasional Madani  
U.p. Satuan Pengawasan Intern  
Menara PNM  
Jl. Kuningan Mulia No. 9F, Kuningan Center Lot 1, Karet,  
Setiabudi-Jakarta Selatan 12920

### 2. Perlindungan Bagi *Whistleblower*

Perusahaan berkewajiban memberikan perlindungan kepada setiap pelapor untuk mendorong keberanian dan kesediaan dalam menyampaikan dugaan pelanggaran. Upaya perlindungan ini dirancang agar pelapor merasa aman, terlindungi, dan bebas dari risiko pembalasan. Bentuk perlindungan tersebut mencakup:

- Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan.
- Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikannya.

Perusahaan memberikan jaminan kerahasiaan identitas terlapor sampai terbukti adanya pelanggaran.

### 3. Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Pada dasarnya semua pengaduan yang masuk akan diterima, namun untuk proses lebih lanjut akan disaring terlebih dahulu. Pada tahun 2025 pengaduan yang masuk berkaitan dengan dugaan *fraud* dan tidak terkait dengan dugaan *fraud*.

This mechanism allows reports to be submitted safely and confidentially, including by whistleblowers both inside and outside the organization. The WBS plays a crucial role in strengthening good governance practices by providing a trusted means for officers, employees, and external parties, including clients, to responsibly report indications of violations. The WBS is formalized through Decree of PNM Board of Directors Number SK-047/PNM-DIR/V/24 concerning Whistleblowing System.

### 1. Submission and Reporting Channels

Reports of violations committed by the Company's officials and employees are addressed to the Board of Directors. The Company accepts all reports of violations submitted by whistleblowers in written form.

Reports by company officers and employees are submitted to the Board of Directors in writing via the following mechanisms:

- E-mail to [antifraud@pnm.co.id](mailto:antifraud@pnm.co.id)
- Whatsapp to 082112345555
- Submit an official letter addressed to the Board of Directors up to the Internal Audit by delivering it directly or by post to the Company at the following address:

#### Board of Directors

PT Permodalan Nasional Madani  
Attn: Internal Audit  
Menara PNM  
Jl. Kuningan Mulia No. 9F, Kuningan Center Lot 1,  
Karet, Setiabudi-South Jakarta 12920

### 2. Protection for Whistleblowers

The Company is obligated to provide protection to encourage whistleblowers to report suspected violations. The protection measures ensure that whistleblowers feel safe, secure, and free from retaliation, including:

- Guaranteeing confidentiality of the whistleblower's identity and report contents.
- Ensuring protection from any adverse treatment.

The Company guarantees the confidentiality of the reported party's identity until a violation is confirmed.

### 3. Reportable Violations

All incoming reports are accepted, but will be filtered for further processing. In 2025, reports were related to allegations related to suspected fraud and those not related to suspected fraud.





#### 4. Pengelola Laporan Pelanggaran

Unit Kerja pengelola penanganan pengaduan dugaan pelanggaran dibentuk oleh Direksi yang bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan kebijakan penanganan pengaduan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan karyawan perusahaan. Tim ini beranggotakan perwakilan dari Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direksi, dengan Kepala Divisi SPI bertindak sebagai ketua. Tim bertugas menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran secara profesional dan objektif untuk memastikan penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan perusahaan.

#### 5. Sosialisasi *Whistleblowing System*

Perusahaan telah mempublikasikan dan mensosialisasikan Kebijakan Penanganan Pengaduan Pelanggaran kepada seluruh pejabat, karyawan, serta pemangku kepentingan melalui berbagai media perusahaan antara lain:

- Mencetak dan mendistribusikan dokumen kebijakan.
- Website* Perusahaan.
- E-mail*.

#### 6. Jumlah Pengaduan dan Proses Pengaduan

Per 31 Desember 2025, dari 647 pengaduan yang masuk melalui WBS, sebanyak 355 pengaduan memenuhi kriteria dan ditindaklanjuti oleh perusahaan. Dari jumlah itu, sebanyak 77 di antaranya telah selesai ditindaklanjuti dan terdapat 20 pengaduan yang masih berjalan dalam proses. Sedangkan pengaduan yang tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi kriteria (informasi tidak lengkap) sebanyak 278 pengaduan, sedangkan pengaduan yang bukan merupakan pengaduan pelanggaran (*fraud*) melainkan berupa pertanyaan/kritik/saran terkait perusahaan dan rekrutmen/kepegawaian sebanyak 292 item.

#### 7. Sanksi/Tindak Lanjut Atas Pengaduan Tahun 2025

Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses selama tahun 2025 adalah sebanyak 57 permasalahan yang dilakukan investigasi oleh SPI terbukti dan telah dikenakan sanksi.

#### 4. Report Management

The unit responsible for handling complaints regarding alleged violations is established by the Board of Directors, which is accountable for the effective implementation of policies regarding the handling of complaints about violations committed by company officials and employees. This team consists of representatives from the Internal Audit Unit (SPI) and/or other officials appointed by the Board of Directors, with the Head of the SPI Division serving as chair. The team is tasked with following up on every report of a violation professionally and objectively to ensure a resolution in accordance with company regulations.

#### 5. Whistleblowing System Socialization

The WBS policy has been published and disseminated to all officers, employees, and stakeholders through various company channels, including:

- Printed and distributed policy documents.
- Company website.
- E-mail communications.

#### 6. Number of Reports and Processing

As of December 31, 2025, of the 647 complaints received through the Whistleblowing System (WBS), 355 complaints met the criteria and were followed up by the Company. Of these, 77 cases have been resolved, while 20 complaints are still in progress. Meanwhile, 278 complaints could not be followed up as they did not meet the required criteria due to incomplete information. In addition, 292 submissions were not classified as fraud complaints, but rather consisted of inquiries, criticisms, or suggestions related to the Company and recruitment/employment matters.

#### 7. Sanctions/Follow-up on Reports in 2025

There were 57 sanctions/follow-ups on reports that were completed, and were confirmed by IAU investigation and sanctions imposed.



### Penilaian Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan [GRI 2-23][OJK E.3] [IFRS S1.44][IFRS S2.25] Risk Assessment on the Implementation of Sustainable Finance [GRI 2-23][OJK E.3] [IFRS S1.44][IFRS S2.25]

Proses penilaian risiko terkait keberlanjutan di PNM dilakukan melalui penerapan kerangka manajemen risiko yang menyeluruh, pemenuhan persyaratan peraturan yang berlaku maupun yang sedang berkembang, serta evaluasi ukuran dan cakupan risiko secara sistematis. Proses ini mencakup langkah-langkah pengelolaan risiko keberlanjutan dan integrasinya ke dalam manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan, sehingga seluruh risiko dapat diidentifikasi, dimitigasi, dan dipantau

The risk assessment process related to sustainability at PNM is conducted through the implementation of a comprehensive risk management framework, compliance with applicable and emerging regulatory requirements, and systematic evaluation of risk magnitude and scope. This process includes steps for managing sustainability risks and integrating them into the company's overall risk management, ensuring that all risks can be identified, mitigated, and monitored effectively to support the

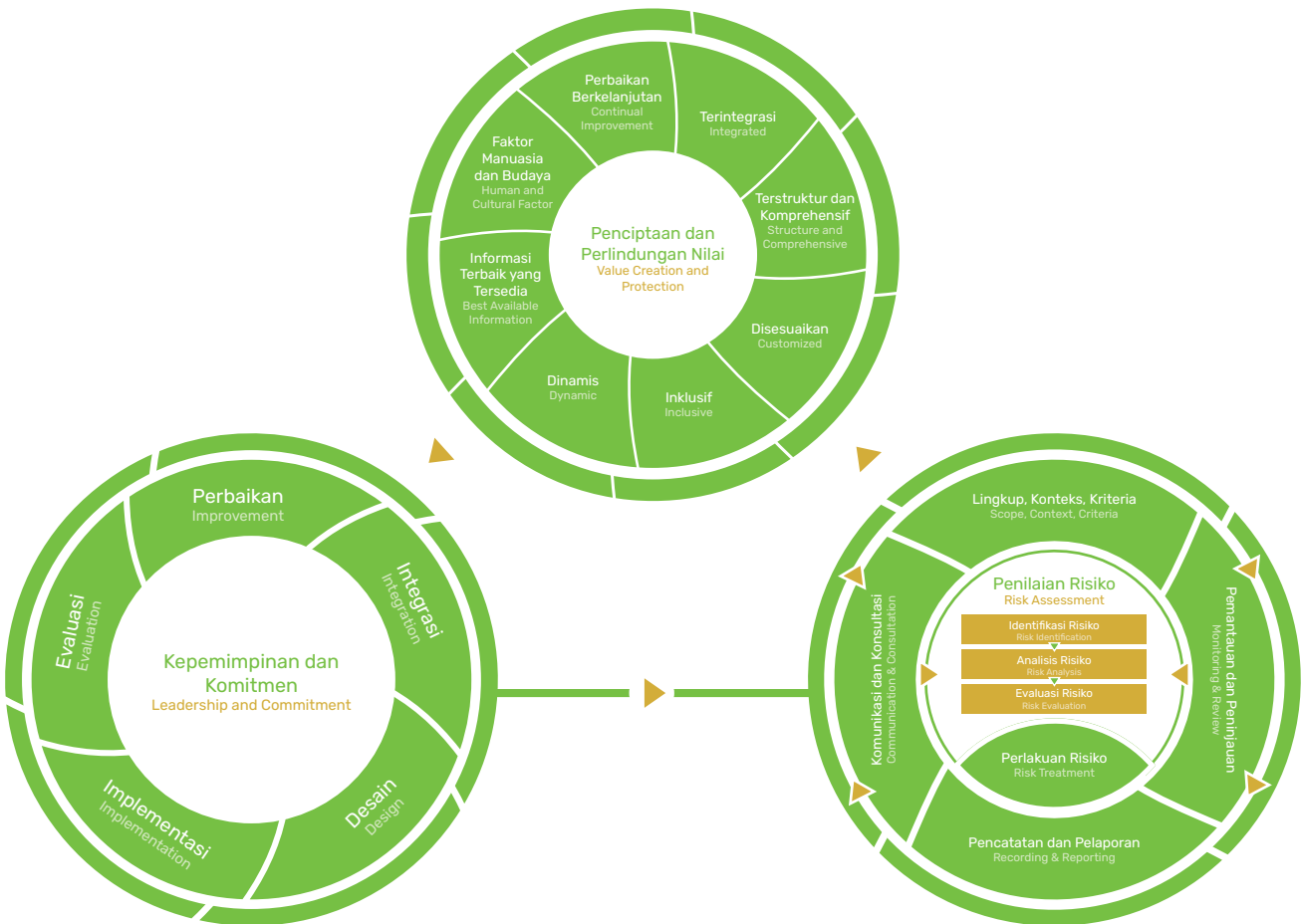
secara efektif untuk mendukung pencapaian tujuan strategis dan keberlanjutan perusahaan. Menyadari bahwa berbagai risiko dapat muncul dalam kegiatan operasional dan berpotensi memengaruhi pencapaian kinerja serta target, PNM menerapkan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan penanganan risiko, termasuk risiko terkait penerapan keuangan berkelanjutan, berdasarkan SK Direksi PT PNM Nomor: SK-073/PNM-DIR/X/25 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.

Selain itu, manajemen risiko PNM juga mengikuti ketentuan dalam POJK No. 44/POJK.05/2020 serta mengadopsi *Enterprise Risk Management (ERM)* yang selaras dengan ISO 31000:2018. Penilaian risiko inheren dilakukan setiap triwulan dan dituangkan dalam Profil Risiko serta *Risk Register* Korporasi. Konsep ERM yang digunakan secara ringkas dapat dilihat pada diagram berikut:

achievement of strategic objectives and corporate sustainability. Recognizing that various risks may arise in operations and potentially impact performance and target achievement, PNM implements a process for the identification, measurement, monitoring, control, and handling of risks, including those related to the implementation of sustainable finance, based on Decree of PNM Board of Directors Number SK-073/PNM-DIR/X/25 regarding Guidelines for Risk Management Implementation.

Furthermore, PNM risk management adheres to the provisions of POJK Number 44/POJK.05/2020 and adopts Enterprise Risk Management (ERM) aligned with ISO 31000:2018. Inherent risk assessments are conducted quarterly and documented in the Risk Profile and Corporate Risk Register. A summary of the ERM concept applied is illustrated in the diagram below:

**Gambar Siklus Penerapan Manajemen Risiko ISO 31000:2018**  
Diagram of Risk Management Implementation Cycle ISO 31000:2018





**Prinsip Manajemen Risiko**  
Risk Management Principles

Prinsip Manajemen Risiko menjadi landasan utama dalam pengelolaan risiko dan harus menjadi acuan dalam pengembangan kerangka kerja serta proses Manajemen Risiko di Perusahaan. Berpedoman pada ISO 31000:2018, prinsip ini membantu Perusahaan mengelola dampak ketidakpastian terhadap pencapaian sasaran dan tujuan strategis, sebagaimana digambarkan pada ilustrasi berikut:

Risk Management Principles serve as the fundamental basis for risk management and must guide the development of the Company's risk management framework and processes. Referring to ISO 31000:2018, these principles assist the Company in managing the impact of uncertainty on the achievement of its objectives and strategic goals, as illustrated in the diagram below:

**Gambar Prinsip Manajemen Risiko**  
Diagram of Risk Management Principles



Penjelasan dari Prinsip Manajemen Risiko sebagai berikut:

- a. Terintegrasi (*Integrated*), meliputi Tata Kelola Perusahaan, Manajemen Mutu, Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Manajemen Bencana, Manajemen Kepatuhan, serta Audit.

The principles of Risk Management are elaborated as follows:

- a. Integrated, encompassing Corporate Governance, Quality Management, Occupational Health and Safety Management, Disaster Management, Compliance Management, and Audit.



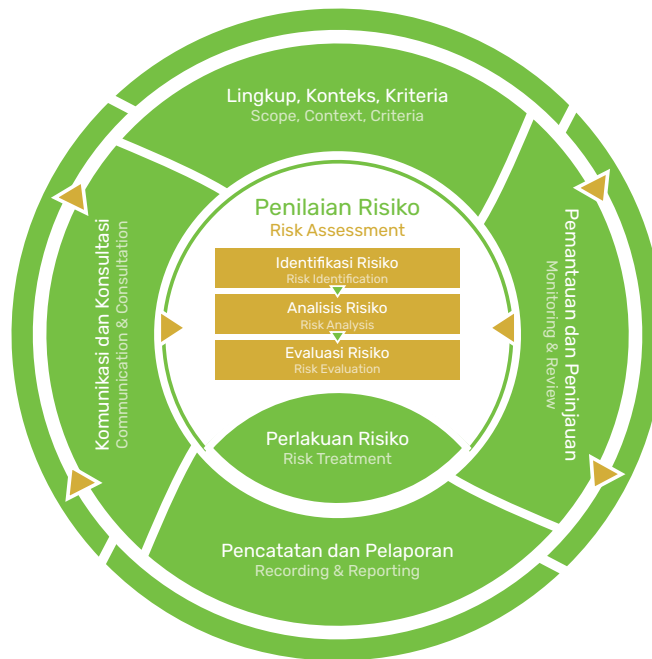
- b. Diimplementasikan melalui pendekatan yang Terstruktur dan Komprehensif (*Structured and Comprehensive*) mencakup seluruh aspek bisnis dan operasional Perusahaan.
- c. Disesuaikan (*Customized*) secara proporsional dengan konteks eksternal dan kebutuhan internal Perusahaan yang berkaitan dalam rangka pencapaian sasaran Perusahaan, serta sesuai dengan karakteristik aktivitas bisnis.
- d. Inklusif (*Inclusive*) terhadap pemangku kepentingan atas pengetahuan, pandangan dan persepsi untuk mendorong kesadaran dan Manajemen Risiko terinformasi.
- e. Dinamis (*Dynamic*) terhadap perubahan internal dan eksternal Perusahaan, khususnya yang dapat melemahkan efektivitas pengelolaan risiko Perusahaan serta mengantisipasinya dalam bentuk sebuah kendali yang dipersiapkan, maupun perubahan kerangka kerja Manajemen Risiko sesuai yang dibutuhkan.
- f. Informasi terbaik yang tersedia (*Best Available Information*) untuk membangun, mempertahankan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko Perusahaan, baik berupa informasi eksplisit maupun tacit, yang tersedia di internal Perusahaan maupun yang dapat diakses di lingkungan eksternal Perusahaan yang didasarkan atas informasi historis, saat ini dan kemungkinan di masa yang akan datang.
- g. Faktor Manusia dan Budaya (*Human and Cultural Factor*) di lingkungan Perusahaan memastikan kecukupan peningkatan kesadaran manajemen dan karyawan mengenai pentingnya Manajemen Risiko, serta kecukupan sosialisasi kerangka kerja dan/atau prosedur pengelolaan risiko kepada masing-masing pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam Manajemen Risiko Perusahaan.  
Perilaku dan budaya manusia baik secara signifikan memberi pengaruh terhadap semua aspek Manajemen Risiko pada seluruh tingkatan dan tahapan, termasuk kapabilitas, persepsi dan intensi dari pihak eksternal dan internal yang dapat memfasilitasi atau menghambat pencapaian sasaran Perusahaan, demikian halnya dengan budaya dapat menjadi bagian dari pengendalian risiko, maupun sebaliknya dapat menjadi sumber risiko.
- h. Perbaikan Berkelanjutan (*Continuous Improvement*) terhadap kerangka kerja Manajemen Risiko maupun prosesnya ditujukan agar pengelolaan risiko dipraktikkan Perusahaan senantiasa relevan dan dapat mendukung operasional/bisnis serta pencapaian sasaran melalui peningkatan kapabilitas para pihak internal yang terlibat, atau peningkatan ketersediaan sumber daya yang lebih memadai maupun melalui peningkatan keandalan infrastruktur pendukung yang digunakan.

- b. Implemented through a Structured and Comprehensive approach, covering all aspects of the Company's business and operations.
- c. Customized proportionally to the external context and internal needs relevant to the achievement of the Company's objectives, and aligned with the characteristics of its business activities.
- d. Inclusive of stakeholders' knowledge, views, and perceptions to promote awareness and informed Risk Management.
- e. Dynamic, in responding to internal and external changes, particularly those that may weaken the effectiveness of the Company's risk management, and in anticipating such changes through prepared controls or adjustments to the Risk Management framework as required.
- f. Based on the Best Available Information, to establish, maintain, and enhance the effectiveness of the Company's risk management, utilizing both explicit and tacit information available internally as well as accessible from the external environment, and grounded in historical, current, and forward-looking information.
- g. The Human and Cultural Factors within the Company ensure the adequacy of efforts to enhance management and employee awareness regarding the importance of Risk Management, as well as the sufficiency of socialization of the risk management framework and/or procedures to each stakeholder involved in the Company's Risk Management processes.  
Human behavior and culture significantly influence all aspects of Risk Management at every level and stage, including the capabilities, perceptions, and intentions of both external and internal parties that may either facilitate or hinder the achievement of the Company's objectives. Likewise, culture can function as part of risk control mechanisms or, conversely, become a source of risk itself.
- h. Continuous Improvement of the Risk Management framework and its processes, aimed at ensuring that risk management practices remain relevant and capable of supporting operations and business activities as well as the achievement of objectives, through enhanced capabilities of involved internal parties, improved availability of adequate resources, and increased reliability of supporting infrastructure.

**Proses Manajemen Risiko**  
Risk Management Process

Berdasarkan ISO 31000:2018, Proses Manajemen Risiko merupakan penerapan sistematis dari kebijakan dan prosedur melalui serangkaian tahapan yang mencakup komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, asesmen risiko, penanganan risiko, pemantauan dan evaluasi, serta pencatatan dan pelaporan. Penjelasan dari setiap tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

Based on ISO 31000:2018, the Risk Management Process is the systematic implementation of policies and procedures through a series of stages that include communication and consultation, establishment of context, risk assessment, risk treatment, monitoring and review, as well as recording and reporting. The explanation of each stage is as follows:



Proses manajemen risiko di PNM dilaksanakan secara menyeluruh, mencakup tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh tahapan tersebut diterapkan pada faktor-faktor risiko yang bersifat material, baik kuantitatif maupun kualitatif, yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap kondisi keuangan dan stabilitas operasional Perusahaan. [GRI 2-12]

The risk management process at PNM is carried out comprehensively, covering the stages of identification, measurement, monitoring, and control, as per the applicable regulations. This risk management process is implemented for all material risk factors, which include both quantitative and qualitative risks that significantly impact the Company's financial condition. [GRI 2-12]

Faktor-faktor risiko adalah berbagai parameter yang mempengaruhi eksposur risiko.

Risk factors are various parameters that influence exposure to risk.

1. Identifikasi Risiko

PNM mengidentifikasi risiko dengan menganalisis seluruh jenis dan karakteristik risiko yang terdapat pada setiap kegiatan usaha, termasuk risiko atas produk dan jasa-jasa lainnya. Proses identifikasi risiko sangat menentukan cakupan dan skala tahapan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis PNM dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko, paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas baru melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

1. Risk Identification

PNM identifies risks by analyzing all types and characteristics of risks present in each business activity, including risks related to products and other services. The risk identification process is crucial as it determines the scope and scale of the subsequent measurement, monitoring, and control stages. Risk identification is proactive and encompasses all PNM business activities, analyzing the sources and potential occurrences of risks and their impacts. This process is carried out by analyzing all sources of risk, with at least a focus on risks arising from new products and activities through an appropriate risk management process prior to them being introduced or executed.



## 2. Pengukuran Risiko

Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko PNM sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko wajib dilakukan secara berkala, baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis PNM. Pendekatan dan metodologi pengukuran dapat bersifat kuantitatif, kualitatif atau merupakan kombinasi antara keduanya.

Sistem pengukuran risiko dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dilakukan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha PNM, produk, transaksi dan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perusahaan.

## 3. Pemantauan Risiko

Aktivitas pemantauan risiko dilakukan dengan cara mengevaluasi eksposur risiko yang terdapat dalam seluruh portofolio produk dan kegiatan usaha Perusahaan serta efektivitas proses manajemen risiko. Pemantauan dan pelaporan risiko yang bersifat material atau yang berdampak kepada kondisi permodalan PNM antara lain dapat didasarkan atas penilaian potensi risiko dengan menggunakan *historical trend*.

Penyempurnaan proses pelaporan risiko dilakukan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha PT PNM, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material. PNM menyiapkan suatu sistem *back up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem back up tersebut. Hasil pemantauan risiko dapat digunakan untuk menyempurnakan proses risiko yang ada.

## 4. Pengendalian Risiko

Proses pengendalian risiko dilaksanakan dengan memperhatikan sistem pengendalian internal Perusahaan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertujuan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan keberlangsungan usaha PNM. Kerangka kerja proses pengendalian risiko didasarkan atas suatu hasil evaluasi atas eksposur risiko yang terdapat pada seluruh portofolio produk dan aktivitas fungsional PT PNM.

Prosedur dan metodologi pengendalian risiko ditetapkan oleh Direksi PNM dengan memperhatikan kompleksitas usaha, kondisi implementasi dan kemampuan sistem manajemen risiko internal serta ketentuan yang berlaku. Penetapan prioritas dan cara pengendalian risiko harus mempertimbangkan pemetaan risiko inheren PNM melalui

## 2. Risk Measurement

The risk measurement system is used to assess PNM risk exposure as a reference for control actions. Risk measurement must be performed regularly, both for products, portfolios, and all business activities of PNM. The approach and methodology of measurement may be quantitative, qualitative, or a combination of both.

The risk measurement system is regularly evaluated and improved as needed to ensure the assumptions, accuracy, fairness, data integrity, and procedures used to measure risks are appropriate. Enhancements to the risk measurement system are made whenever there are changes in PNM business activities, products, transactions, and risk factors that may affect the Company's financial condition.

## 3. Risk Monitoring

Risk monitoring activities are conducted by evaluating the risk exposure present in the entire product portfolio and business activities of the Company, as well as the effectiveness of the risk management process. Monitoring and reporting of material risks or risks affecting PNM capital condition may be based on the assessment of potential risks using historical trends.

The reporting process for risk monitoring is improved if there are changes in PNM business activities, products, transactions, risk factors, information technology, and risk management information systems that are material. PNM prepares a backup system and effective procedures to prevent disruptions in the risk monitoring process and regularly checks and reassesses the backup system. The results of risk monitoring can be used to improve the existing risk management processes.

## 4. Risk Control

The risk control process is carried out with consideration of the Company's internal control system, which is designed in accordance with applicable regulations, and aims to manage specific risks that could jeopardize the continuity of PNM operations. The risk control framework is based on an evaluation of the risk exposure found across the entire product portfolio and functional activities of PNM.

Risk control procedures and methodologies are established by the Board of Directors of PNM, taking into account the complexity of operations, implementation conditions, and the capabilities of the internal risk management system, along with applicable regulations. The establishment of priorities and risk control methods must consider the



analisis terhadap besarnya potensi kerugian finansial dan kemungkinan kejadian risiko serta pertimbangan asas manfaat dan biaya. Prioritas utama dalam mitigasi adalah terhadap risiko yang memiliki dampak kerugian tinggi atau frekuensi kejadian tinggi. Mitigasi dalam bentuk penyempurnaan dan pelaksanaan pengendalian risiko.

inherent risk mapping of PNM through an analysis of the potential financial loss and the likelihood of risk occurrence, as well as cost-benefit considerations. Mitigation priorities are focused on risks with the highest potential for loss or the highest frequency of occurrence. This involves enhancing and implementing controls to manage and reduce these risks.

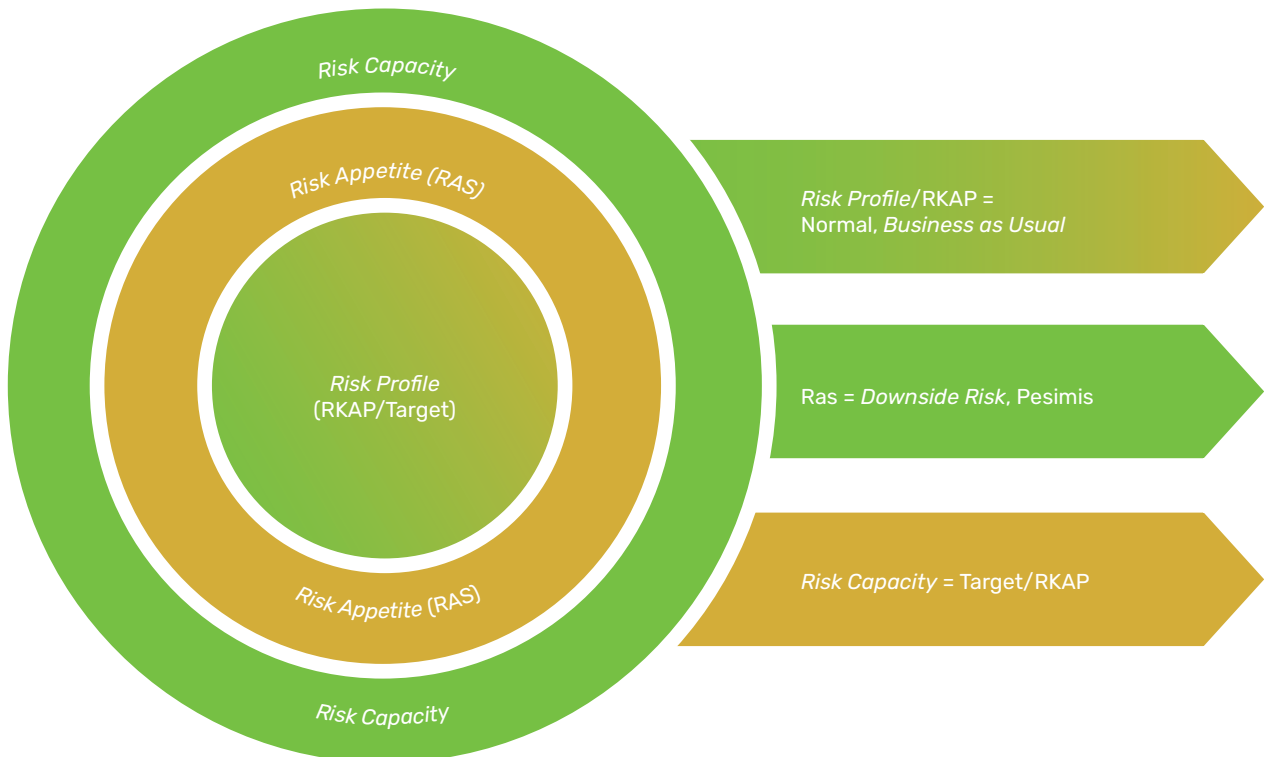
Selain melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian, terdapat proses pendukung lainnya dalam proses manajemen risiko di PNM di antaranya:

In addition to conducting the identification, measurement, monitoring, and control processes, there are other supporting processes in PNM risk management, including:

1. Komunikasi kepada manajemen dan unit-unit kerja Perusahaan sehingga setiap individu dalam Perusahaan memahami kesadaran risiko, budaya risiko, kematangan risiko. Proses komunikasi ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengukur kesiapan organisasi dalam mengatasi risiko dan untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko tersebut.
2. Konsultasi, untuk menjamin tersedianya dukungan yang memadai dari setiap kegiatan manajemen risiko dan menjadikan setiap kegiatan dapat tercapai dan tepat sasaran.
3. *Monitoring* dan *review* (sistem pengendalian intern), yang bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan sesuai dengan perencanaan serta sebagai dasar untuk melakukan perbaikan secara berkala terhadap proses manajemen risiko.

1. Communication to management and business units within the Company to ensure every individual understands risk awareness, risk culture, and risk maturity. This communication process is carried out as an effort to assess the organization's readiness to manage risks and to evaluate the application of the risk management process.
2. Consultation to ensure sufficient support for each risk management activity, making each activity achievable and targeted.
3. Monitoring and review (internal control system), which aim to ensure that risk management implementation is in line with the plan and serves as the basis for periodic improvements to the risk management process.

**Risk Appetite Statement**  
Risk Appetite Statement



*Risk Appetite*/tingkat risiko yang akan diambil merupakan tingkat dan jenis risiko yang bersedia diambil PNM dalam rangka mencapai sasarannya. Penetapan *Risk Appetite* digunakan sebagai panduan objektif dalam membuat keputusan strategis terkait dengan pengelolaan risiko, sebagai perangkat bagi manajemen dalam melaksanakan tata kelola bisnis dengan baik serta sebagai panduan dari Manajemen PNM kepada divisi/unit kerja mengenai jenis dan jumlah risiko yang dapat diterima dan dikelola.

Tingkat risiko yang dapat diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis Perusahaan, baik dalam Rencana Jangka Panjang maupun Rencana Bisnis. *Risk appetite* mencakup seluruh jenis risiko material yang relevan dengan kegiatan operasional PNM. Direksi menetapkannya dalam bentuk pernyataan kuantitatif, kualitatif, serta batas ketidaktoleranan (*zero tolerance*) terhadap risiko tertentu yang berkaitan dengan tujuan bisnis. Penetapan ini dievaluasi setiap tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan dengan mempertimbangkan dinamika tujuan perusahaan serta perubahan kondisi lingkungan usaha.

Framework penetapan *Risk Appetite* adalah sebagai berikut:

Risk Appetite defines the level and types of risks that PNM is prepared to take on in order to achieve its goals. Setting the Risk Appetite provides a clear, objective framework for making strategic decisions related to risk management. It serves as a tool for management to ensure effective business governance and provides guidance to divisions/units on the acceptable and manageable types and amounts of risk.

The level of risk to be taken is reflected in the Company's business strategy and objectives (Long-Term Plan and Business Plan), and encompasses all material risks in the Company's operations. The Board of Directors of PT PNM sets the Risk Appetite in the form of quantitative, qualitative statements, and zero tolerance related to PNM business goals and objectives. Risk Appetite is reviewed annually or as needed, considering changes in the Company's business plans and objectives, as well as changes in the business environment.

The framework for establishing Risk Appetite is as follows:





Risiko Risk	Parameter	Nilai Minimum Minimum Score	Nilai Maksimal Maximum Score	RAS 2025	Desember 2025 December 2025
Kredit Credit	Maks. NPL <i>Gross</i> Maximum Gross NPL	1,67%	2,61%	2,80%	1,67%
	Min. NPL <i>Coverage</i> Minimum NPL Coverage	296,04%	437,75%	225,00%	437,75%
	Maks. LaR Maximum LaR	8,49%	13,70%	16,00%	8,49%
	Min. LaR <i>Coverage</i> Minimum LaR Coverage	69,88%	85,91%	50,00%	85,91%
Pasar Market	Maks. <i>Unrealized Loss</i> AFS terhadap Modal Maximum Unrealized Loss AFS to Capital	0,06%	0,07%	1,00%	0,06%
	Min. <i>Net Interest Margin</i> Minimum Net Interest Margin	13,26%	16,91%	2,50%	15,62%
Likuiditas Liquidity	Min. <i>Current Ratio</i> Minimum Current Ratio	141,85%	161,03%	130,00%	144,64%
Operational Non IT Non-IT Operational	Maks. Net Potensi Kerugian Operasional terhadap Pendapatan Maximum Net Operational Loss Potential to Revenue	0,03%	0,26%	1,00%	0,26%
	Maks. <i>Turnover</i> AO dan AOM perbulan Maximum Monthly AO and AOM Turnover	1,58%	5,58%	4,25%	2,24%
	Maks. Frekuensi <i>Fraud 3 Months Moving Avg</i> Maximum Fraud Frequency (3-Month Moving Average)	2	37	50	32
Operational IT IT Operational	Maks. <i>Downtime Infrastructure Network</i> Bulanan Maximum Monthly Infrastructure Network Downtime	0 H/M	7 H/M	7 H/M	0 H/M
	Min. <i>Success Rate</i> Mekaar Digi Minimum Mekaar Digi Success Rate	97,67%	99,64%	98,00%	99,64%
	Min. <i>Respond &amp; Resolution Time</i> Minimum Respond & Resolution Time	99,21%	99,79%	98,00%	99,73%
	Min. Nilai <i>Security Scorecard</i> Minimum Security Scorecard Rating	80	91	80	82
Hukum Legal Matters	Maks. Posisi Nominal Gugatan Aktif yang Dihadapi Maximum Nominal Amount of Active Litigation	Rp48,9 M	Rp236,3 M	Rp76,50 M	Rp54,67 M
	Maks. Jumlah Kerugian <i>Inkracht</i> (Rp Miliar) Maximum Amount of Final and Binding Losses (IDR Billion)	Rp0 M	Rp0 M	Rp16 M	Rp0 M
Stratejik Strategic	Maks. <i>Gearing Ratio</i> Maximum Gearing Ratio	3,01x	3,46x	5x	3,09x
	Min. <i>ROA Pre Tax</i> Bulanan Minimum Monthly Pre-Tax ROA (Return on Assets)	3,13%	5,30%	2,82%	2,76%
	Maks. <i>Cost to Income Ratio</i> (CIR) Maximum CIR (Cost to Income Ratio)	65,03%	71,23%	70,00%	71,42%
	Min. Rasio Permodalan/CAR Minimum CAR (Capital Adequacy Ratio)	34,68%	39,78%	25,00%	39,78%
Kepatuhan Compliance	Maks. Nominal Denda (Rp Miliar) Maximum Fine Amount (IDR Billion)	Rp0 M	Rp0 M	Rp1 Miliar	Rp92 juta
	Maks. Jumlah Pelanggaran <i>12 Months Moving</i> Maximum Number of Violations (12-Month Moving)	0	6	15	6

Risiko Risk	Parameter	Nilai Minimum Score	Nilai Maksimal Maximum Score	RAS 2025	Desember 2025 December 2025
Reputasi Reputation	Maks. Jumlah ( <i>Complain</i> terhadap Total Transaksi (Juta) Bulanan Maximum Number of Complaints per Total Monthly Transactions (in Millions))	1 Komplain/1 jt Trx	1 Komplain/1 jt Trx	50 Komplain/1 jt Trx	1 Komplain/1 jt Trx
	Maks. Jumlah Pemberitaan Negatif 3 Months Moving Avg Maximum Number of Negative Press Coverage (3-Month Moving Average)	0	12	20	2

• Jenis Risiko dan Cara Pengelolaannya [GRI 2-24]

• Types of Risks and Their Management Approaches [GRI 2-24]

Penjelasan Description	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
<p><b>Risiko Kredit</b> Credit Risk</p> <p>Risiko kredit terjadi akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk risiko kredit akibat kegagalan nasabah, risiko konsentrasi pembiayaan, <i>counterparty credit risk</i>, dan <i>settlement risk</i>.</p> <p>Credit risk arises from the failure of customers or other parties to fulfill their obligations to the Company in accordance with the agreed terms, including credit risk due to customer defaults, financing concentration risk, counterparty credit risk, and settlement risk.</p>	<p>Dalam penerapan manajemen risiko kredit, PNM melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemisahan pejabat kredit bidang.</li> <li>2. Pengembangan <i>internal risk rating</i> sebagai alat bantu pada proses identifikasi dan pengukuran tingkat risiko calon nasabah.</li> <li>3. Pengembangan <i>early warning system</i> sebagai alat bantu pada proses pemantauan tingkat risiko kredit secara portofolio.</li> <li>4. Penetapan kebijakan risiko kredit, di antaranya tata kelola, pengelolaan limit pemutus pembiayaan, penentuan batasan eksposur risiko yang dapat diterima, pengelolaan limit berdasarkan geografis dan pengelolaan limit konsentrasi per industri/sector.</li> </ol> <p>Pengembangan sistem informasi berupa <i>Dashboard Monitoring</i> Risiko Kredit untuk mengukur kualitas kredit hingga level unit kerja, segmen bisnis dan sektor industri untuk membantu proses pengelolaan risiko kredit secara portofolio.</p> <p>In implementing credit risk management, PNM undertakes the following actions:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Separation of credit officials by field.</li> <li>2. Development of an internal risk rating system to assist in the process of identifying and measuring the risk level of potential customers.</li> <li>3. Development of an early warning system to aid in monitoring the portfolio-level credit risk.</li> <li>4. Establishment of credit risk policies, including governance, management of financing limit breakers, determination of acceptable risk exposure limits, management of limits based on geography, and concentration limit management by industry/sector.</li> </ol> <p>The development of an information system in the form of a Credit Risk Monitoring Dashboard is implemented to assess credit quality at the level of work units, business segments, and industry sectors, helping in the management of credit risk at the portfolio level.</p>
<p><b>Risiko Pasar</b> Market Risk</p> <p>Risiko yang muncul pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko Pasar meliputi risiko nilai tukar, kewajiban yang bersumber dari suku bunga, beban bunga, <i>net interest margin</i>, pertumbuhan modal, WACOB, Sensitivitas IRR dan <i>Unrealized loss</i> AFS.</p> <p>Market risk arises from balance sheet positions and administrative accounts due to changes in market prices, including risks related to fluctuations in the value of assets that can be traded or leased. Market risk includes risks such as exchange rate risk, obligations stemming from interest rates, interest expenses, net interest margin, capital growth, WACOB (Weighted Average Cost of Borrowing), IRR (Internal Rate of Return) sensitivity, and unrealized losses on available-for-sale (AFS) assets.</p>	<p>Pengukuran risiko pasar di PNM dilakukan secara berkala bulanan, triwulanan dan tahunan.</p> <p>Dalam manajemen risiko pasar, PNM memiliki Komite ALCO yang tertuang pada Surat Keputusan Direksi Nomor SK 096/PNM-DIR/XI/25 tentang Komite <i>Asset and Liability Committee</i> (ALCO).</p> <p>Market risk measurement at PNM is conducted on a monthly, quarterly, and annual basis.</p> <p>Market risk measurement at PNM is conducted regularly on a monthly, quarterly, and annual basis. In market risk management, PNM has an ALCO Committee, as outlined in the Decree of the Board of Directors Number SK 096/PNM-DIR/XI/25 regarding The Asset and Liability Committee (ALCO).</p>

<p><b>Penjelasan</b> Description</p>	<p><b>Mitigasi Risiko</b> Risk Mitigation</p>	
<p><b>Risiko Likuiditas</b> Liquidity Risk</p>		
<p>Risiko yang disebabkan Perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu dari sumber pendanaan arus kas dan/ atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan.</p> <p>The risk caused by the Company's inability to meet maturing obligations from cash flow sources and/or high-quality liquid assets that can be pledged, without disrupting the Company's activities and financial condition.</p>	<p>Guna mendukung pengelolaan likuiditas, Perusahaan menetapkan kebijakan pengelolaan risiko likuiditas.</p>	<p>To support liquidity management, the Company establishes a liquidity risk management policy.</p>
<p><b>Risiko Operasional</b> Operational Risk</p>		
<p>Risiko operasional terjadi karena adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya gangguan eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan.</p> <p>Kejadian risiko operasional merupakan kejadian risiko yang melekat pada setiap proses bisnis dan operasional yang dijalankan Perusahaan. Risiko operasional dapat memicu terjadi risiko reputasi, risiko hukum, risiko kepatuhan, serta risiko lainnya apabila risiko operasional tidak dikelola dengan baik.</p> <p>Operational risk arises from the inadequacy or failure of internal processes, human errors, system failures, or external disruptions that affect the Company's operations. Operational risk events are inherent in every business and operational process run by the Company. If operational risks are not managed effectively, they can trigger reputational risk, legal risk, compliance risk, and other types of risk.</p>	<p>Pengendalian risiko operasional di PNM dilakukan dengan cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemisahan fungsi <i>Maker</i>, <i>Checker</i> dan <i>Approval</i> dalam setiap aktivitas operasional Perusahaan sesuai dengan tingkat risiko dengan tujuan untuk memastikan kebenaran aktivitas Perusahaan.</li> <li>2. Identifikasi risiko dilaksanakan melalui penyusunan/pengkinian <i>Risk Control Self Assessment</i> (RCSA) yang dilakukan pada setiap bulan dan triwulan menggunakan data historis kejadian risiko operasional dan kelemahan kontrol, serta rencana bisnis ke depan. Kejadian risiko operasional meliputi <i>fraud</i>, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan kejadian bencana/eksternal.</li> <li>3. Pengukuran risiko dilakukan bersama dengan identifikasi pada saat penyusunan RCSA.</li> <li>4. Pemantauan risiko dilakukan oleh unit kerja selaku <i>risk owner</i> dan Divisi Manajemen Risiko terhadap <i>Key Risk Indicator</i> (KRI) dan data <i>anomaly</i> yang terdapat dalam <i>dashboard</i> pemantauan risiko.</li> <li>5. Pengendalian risiko dilakukan antara lain melalui:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan kebijakan dalam bentuk SOP yang berisi penetapan <i>internal control</i> untuk setiap aktivitas Perusahaan;</li> <li>b. Pelaksanaan <i>internal control</i> oleh pekerja yang menjalankan aktivitas Perusahaan di unit kerja/divisi sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>c. Melaksanakan internalisasi Budaya Sadar Risiko dan Kepatuhan di unit kerja/divisi;</li> <li>d. Pengendalian risiko pada produk dan/ atau aktivitas baru dalam bentuk <i>Risk Self Assessment</i> oleh <i>Product Owner</i> dan Penilaian Kecukupan Pengelolaan Risiko;</li> <li>e. Penyusunan kebijakan <i>Business Continuity Management</i> (BCM) dan pelaksanaan uji coba BCM secara berkala minimal satu tahun sekali untuk memastikan kesiap resiliensi Perusahaan dalam menghadapi bencana/krisis.</li> </ol> </li> </ol>	<p>Operational risk in PNM is mitigated by carrying out the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Separation of Maker, Checker, and Approval Functions in every operational activity of the Company based on the level of risk, with the aim of ensuring the accuracy and validity of company activities.</li> <li>2. Risk Identification through the preparation/updating of the Risk Control Self-Assessment (RCSA) on a monthly and quarterly basis. This process utilizes historical data of operational risk events and control weaknesses, as well as the Company's future business plans. Operational risk events include fraud, human errors, system failures, and external/disaster incidents.</li> <li>3. Risk Measurement in conjunction with the identification process during the preparation of the RCSA.</li> <li>4. Risk Monitoring by the work units as risk owners and the risk management division, focusing on Key Risk Indicators (KRIs) and anomaly data within the risk monitoring dashboard.</li> <li>5. Risk Control through the following measures:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Policy Development, creating Standard Operating Procedures (SOPs) that include internal controls for each company activity.</li> <li>b. Internal Control Execution by employees involved in company activities in their respective units/divisions, according to their authority.</li> <li>c. Internalization of Risk Awareness and Compliance Culture promoted within work units/divisions.</li> <li>d. Risk Control for New Products/Activities conducted by Product Owners and Risk Management Adequacy Assessment.</li> <li>e. Business Continuity Management (BCM) Policy Preparation and regular testing of BCM, at least once a year, to ensure the Company's resilience in facing disasters/crises</li> </ol> </li> </ol>



Penjelasan Description	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
<p><b>Risiko Hukum</b> Legal Risk</p>	
<p>Manajemen risiko hukum dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesadaran adanya potensi risiko hukum pada setiap aktivitas operasional dan bisnis Perusahaan sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan sedini mungkin, membantu memecahkan permasalahan hukum dan meminimalkan potensi kerugian akibat risiko hukum.</p> <p>Divisi Legal beserta jajarannya merupakan divisi yang berfungsi sebagai pengawas bidang hukum untuk menyediakan analisis dan advis hukum kepada seluruh pekerja pada setiap jenjang organisasi serta bertindak sebagai <i>second line</i> dalam melaksanakan proses manajemen risiko hukum.</p> <p>Legal risk management is carried out with the aim of raising awareness about the potential legal risks in every operational and business activity of the Company, so that preventive actions can be taken as early as possible, assisting in resolving legal issues, and minimizing potential losses from legal risks.</p> <p>The Legal Division, along with its staff, serves as the legal oversight division, providing legal analysis and advice to all employees at every organizational level and acting as the second line of defense in the implementation of the legal risk management process.</p>	<p>Dalam rangka meminimalkan potensi kejadian risiko hukum, secara berkala dilakukan sosialisasi aspek-aspek hukum yang berlaku untuk meningkatkan <i>awareness</i> pekerja dan unit kerja operasional terhadap konsekuensi hukum yang dapat terjadi dalam setiap aktivitas operasional dan bisnis yang dijalankan.</p> <p>Pengendalian risiko hukum dilakukan melalui beberapa cara antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Divisi Legal memberikan opini hukum atas perjanjian kerja sama (PKS)/ <i>agreement</i> antara PNM dengan pihak lain, untuk melindungi kepentingan hukum Perusahaan sebelum perjanjian/ <i>agreement</i> ditandatangani oleh pejabat PNM yang berwenang;</li> <li>2. Divisi Legal bekerja sama dengan pelaksana legal Cabang PNM di seluruh Indonesia untuk memantau potensi munculnya risiko hukum (baik dalam bentuk gugatan perdata maupun tuntutan pidana) dan dampak atas risiko hukum sebagaimana dimaksud dengan mekanisme pelaporan dan dokumentasi kasus-kasus hukum serta mensosialisasikan modus operasi kejahatan berikut prosedur penanganannya secara hukum untuk meminimalkan risiko hukum;</li> <li>3. Peningkatan kompetensi seluruh personil yang ada di Divisi Legal dalam mengenali potensi timbulnya risiko hukum serta melakukan pengendalian di Perusahaan;</li> <li>4. Pelaksana legal wilayah di Cabang memberikan pendampingan hukum sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>5. Divisi Legal memberikan pendampingan hukum sesuai dengan kewenangannya apabila terjadi kasus;</li> <li>6. Dalam hal adanya tuntutan hukum yang memiliki potensi kerugian sangat signifikan bagi Perusahaan dan/atau dapat berdampak negatif pada reputasi/kredibilitas/nama baik PNM, maka sebagai <i>contingency plan</i> harus dilakukan tindakan untuk mengurangi risiko hukum, antara lain melalui penggunaan jasa pengacara dan melaporkan perkembangannya kepada Direksi;</li> <li>7. Divisi Legal secara berkala dan sesuai kebutuhan dan kewenangannya berkoordinasi dengan regulator dan otoritas yang berwenang terhadap PNM untuk meminta masukan dan opini terkait dengan masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh Perusahaan;</li> <li>8. Sebagai bagian dari pemantauan terhadap risiko hukum, Divisi Legal berkoordinasi dengan Divisi Manajemen Risiko terkait dengan pelaporan profil risiko hukum PNM setiap bulan kepada Direksi.</li> </ol> <p>To minimize the potential occurrence of legal risks, periodic socialization of applicable legal aspects is conducted to raise awareness among employees and operational work units about the legal consequences that may arise from every operational and business activity carried out.</p> <p>Legal risk control is implemented through several measures, including:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The Legal Division provides legal opinions on cooperation agreements (PKS) or agreements between PNM and other parties, to protect the Company's legal interests before the agreement is signed by the authorized PNM officer.</li> <li>2. The Legal Division works with the legal staff at PNM branches across Indonesia to monitor potential legal risks (both in the form of civil lawsuits or criminal claims) and the impact of such legal risks, through a reporting and documentation mechanism for legal cases, as well as socializing crime operating methods and their legal handling procedures to minimize legal risks.</li> <li>3. Enhancing the competence of all personnel in the Legal Division to recognize the potential emergence of legal risks and to implement controls within the Company.</li> <li>4. Legal staff at branches provide legal assistance according to their authority.</li> <li>5. The Legal Division provides legal support according to its authority in the event of a legal case.</li> <li>6. In cases of legal claims with the potential for significant losses to the Company and/or that could negatively impact PNM reputation, credibility, or good name, contingency actions should be taken to mitigate the legal risks, such as using external legal counsel and reporting the developments to the Board of Directors.</li> <li>7. The Legal Division periodically and, as needed, coordinates with regulators and relevant authorities overseeing PNM to seek input and opinions related to legal issues faced by the Company.</li> <li>8. As part of monitoring legal risks, the Legal Division coordinates with the Risk Management Division to report the legal profile of PNM on a monthly basis to the Board of Directors.</li> </ol>



Penjelasan Description	Mitigasi Risiko Risk Mitigation	
<p><b>Risiko Strategik</b> Strategic Risk</p> <p>Risiko akibat ketidaktepatan Perusahaan dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber Risiko Strategik antara lain ditimbulkan dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.</p> <p>Strategic risk arises from the Company's inability to make decisions correctly and/or the execution of a strategic decision, as well as the failure to anticipate changes in the business environment. Sources of strategic risk include weaknesses in the strategy formulation process, inaccuracies in the formulation of strategies, errors in strategy implementation, and the failure to anticipate changes in the business environment.</p>	<p>Evaluasi risiko strategik PNM dilakukan Direksi secara berkala melalui forum yang membahas tentang strategi dan kebijakan risiko strategik, antara lain forum Bisnis <i>Performance Review</i>, ALCO, <i>Risk Management Committee</i>, dan Rapat Direksi yang digunakan untuk menyelaraskan strategi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi termasuk di dalamnya Rencana Jangka Panjang (RJPP) dan RKAP.</p> <p>RJPP dan RKAP di-<i>review</i> kembali setiap tahun berdasarkan perubahan lingkungan usaha dan rencana perusahaan. Sementara itu, Rencana Jangka Panjang menjadi pedoman dalam melakukan perencanaan setiap tahun dan dapat di-<i>review</i> apabila terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terhadap lingkungan bisnis dan sumber daya.</p> <p>Dalam rangka mitigasi risiko strategik, PNM telah mengimplementasikan perangkat pemantauan secara berkala melalui parameter yang tercermin pada profil risiko strategik. Pengukuran risiko strategik antara lain dilakukan dengan menganalisis eksposur dan membandingkan eksposur risiko dengan limit yang ditetapkan, antara lain ekspansi pinjaman, dana pihak ketiga, BOPO dan <i>fee-based income</i>. Penyusunan dan pelaksanaan tindak lanjut atas eksposur risiko strategik didokumentasikan dalam Rapat Komite Manajemen Risiko.</p>	<p>Strategic risk evaluation at PNM is carried out periodically by the Board of Directors through forums that discuss strategic risk strategy and policies, including the Business Performance Review, ALCO, Risk Management Committee, and Board of Directors meetings used to align the strategy with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. The formulation and monitoring of strategy implementation include the Company's Long-Term Plan (RJPP) and the Annual Work Plan and Budget (RKAP).</p> <p>RJPP and RKAP are reviewed annually based on changes in the business environment and the Company's plans. Meanwhile, the Long-Term Plan serves as a guideline for annual planning and can be reviewed if there are significant changes to the business environment and resources.</p> <p>In order to mitigate strategic risk, PNM has implemented monitoring tools periodically through parameters reflected in analyzing exposures and comparing risk exposures with established limits, including loan expansion, third-party funds, BOPO (Operational Expenses to Operating Income), and <i>fee-based income</i>. The preparation and implementation of follow-up actions on strategic risk exposures are documented in the Risk Management Committee meetings.</p>
<p><b>Risiko Kepatuhan</b> Compliance Risk</p> <p>Perusahaan Pembiayaan merupakan suatu industri yang <i>highly regulated</i>, sehingga PT PNM senantiasa melakukan <i>monitoring</i> atas kepatuhan terhadap ketentuan yang diterbitkan oleh Regulator maupun instansi berwenang lainnya. Sanksi regulator terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dimaksud bervariasi dari teguran, denda/penalti, hingga pencabutan lisensi. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan pada seluruh aktivitas PT PNM sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>The Financing Company is a highly regulated industry, which is why PNM continuously monitors compliance with the regulations issued by the Regulator and other relevant authorities. Sanctions imposed by the regulator for violations of these regulations vary from warnings, fines/penalties, to the revocation of licenses. Compliance risk management is carried out across all activities of PNM in accordance with the applicable regulations.</p>	<p>PNM menerapkan metodologi <i>Risk Based Approach</i> yang terangkum dalam kebijakan dan Prosedur Mutu (<i>Standard Operational Procedure</i>) terkait APU dan PPT untuk melindungi Perusahaan dari sasaran tindak pidana pencucian uang dan terorisme. Selain itu, adanya sistem AML (<i>Anti Money Laundering</i>) untuk memonitor transaksi yang mencurigakan. Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko kepatuhan, PT PNM juga melakukan <i>Enhanced Due Diligence</i> (EDD) sebagai proses yang lebih mendalam dari <i>Customer Due Diligence</i> (CDD), yang sebelumnya dikenal dengan <i>Know Your Customer</i> (KYC).</p>	<p>PNM implements a Risk-Based Approach methodology, outlined in its policies and Standard Operating Procedures (SOPs) related to Anti-Money Laundering (AML) and Countering the Financing of Terrorism (CFT), to protect the Company from being a target for money laundering and terrorism financing activities. Additionally, an AML system is in place to monitor suspicious transactions. As part of the compliance risk management process, PNM also conducts Enhanced Due Diligence (EDD), which is a more in-depth process than Customer Due Diligence (CDD), previously known as Know Your Customer (KYC).</p>



Penjelasan Description	Mitigasi Risiko Risk Mitigation	
<b>Risiko Reputasi</b> Reputation Risk		
<p>Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan <i>stakeholder</i> yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perusahaan. Fungsi pengendalian risiko reputasi dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan sebagai <i>public relations</i> PNM.</p> <p>Reputation risk arises from a decline in stakeholder trust, which is driven by negative perceptions of the Company. The function of controlling reputation risk is carried out by the Corporate Secretariat as the public relations arm of PNM.</p>	<p>Langkah yang dilakukan PNM dalam manajemen risiko reputasi antara lain melalui komunikasi yang konsisten, dengan menjaga keterbukaan informasi dan transparansi kepada seluruh <i>stakeholder</i>, serta menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak media dalam hal menjaga nama PNM secara korporat. Hal tersebut dilakukan dalam rangka meminimalkan dan menangani keluhan atau <i>complaint</i> dari <i>stakeholder</i> yang mengakibatkan timbulnya publikasi negatif terhadap PNM.</p> <p>Selain pengelolaan risiko reputasi dari aspek sisi publik, PNM juga mengelola risiko reputasi yang timbul dari interaksi dengan nasabah. PNM segera menindaklanjuti dan mengatasi adanya keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur risiko reputasi. Mitigasi risiko reputasi maupun kejadian yang menimbulkan risiko reputasi dilakukan dengan mempertimbangkan asas materialitas permasalahan dan biaya.</p> <p>Dalam rangka pengendalian risiko reputasi yang lebih besar di masa depan, tindakan pencegahan dan pemulihan risiko reputasi yang telah dilakukan diikuti dengan perbaikan pada kelemahan pengendalian dan prosedur yang memicu terjadinya risiko reputasi. Dalam rangka pengendalian risiko reputasi telah ditunjuk Sekretariat untuk menangani setiap informasi negatif. Proses pengelolaan risiko reputasi tertuang dalam Prosedur Pengaduan Nasabah (<i>Complaint Handling</i>) dengan SLA tertentu.</p>	<p>PNM takes several steps in managing reputation risk, including consistent communication by maintaining openness and transparency of information with all stakeholders. It also strives to build harmonious relationships with the media to safeguard the corporate reputation of PNM. These efforts aim to minimize and address complaints from stakeholders that could lead to negative publicity.</p> <p>In addition to managing public-facing reputation risks, PNM also manages reputation risks arising from interactions with customers. PNM promptly addresses customer complaints and legal claims that could increase exposure to reputation risk. Mitigation of reputation risk, as well as incidents that may trigger such risks, is carried out while considering the materiality of the issues and associated costs.</p> <p>For better future reputation risk management, preventive and recovery actions taken are followed by improvements in control weaknesses and procedures that triggered reputation risks. To further control reputation risk, the Corporate Secretariat has been appointed to handle any negative information. The reputation risk management process is outlined in the Complaint Handling Procedure with specific Service Level Agreements (SLAs).</p>

### Tinjauan atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Penilaian Risiko Pengelolaan risiko dilakukan pada 8 risiko utama dari seluruh aktivitas kegiatan Perusahaan dengan mengacu kepada ketentuan standar pengelolaan yang ditetapkan oleh pihak regulator. Proses penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dilakukan dengan secara berkesinambungan oleh *three-line models*, yaitu seluruh *risk owner* selaku *first line*, unit kerja kepatuhan dan manajemen risiko selaku *second line* dan unit internal audit selaku *third line*. Penilaian Risiko dilakukan setiap triwulanan dan dilaporkan kepada Pemegang Saham (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk), Dewan Komisaris dan Direksi.

### Review of the Effectiveness of the Risk Management System

Risk management is conducted across eight (8) key risks arising from all of the Company's operational activities, in accordance with the risk management standards established by the regulator. The implementation of risk management covering risk identification, measurement, monitoring, and control is carried out continuously through the three-lines model, namely: all risk owners as the first line, the compliance and risk management unit as the second line, and the internal audit unit as the third line. Risk assessments are conducted on a quarterly basis and reported to the Shareholder (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk), the Board of Commissioners, and the Board of Directors.

### Self-Assessment Risiko Risk Self-Assessment

Risiko Risk	Triwulan IV-2025 Quarter IV-2025		
	Risiko Inheren Inherent Risk	KPMR	Net Risk
Kredit Credit	2	2	2
Likuiditas Liquidity	2	2	2





Risiko Risk	Triwulan IV-2025 Quarter IV-2025		
	Risiko Inheren Inherent Risk	KPMR	Net Risk
Pasar Market	2	2	2
Operasional Operational	3	3	3
Hukum Legal	2	2	2
Stratejik Strategic	3	2	3
Kepatuhan Compliance	2	2	2
Reputasi Reputation	2	2	2
<b>Skor Profil Risiko</b> Risk Profile Score	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Risiko Risk	Triwulan IV-2025 Quarter IV-2025	
	Peringkat Komposit Composite Rating	Deskripsi Description
Risiko Inheren Inherent Risk	2	Low to Moderate
KPMR KPMR	2	Low to Moderate
Risiko Korporasi Corporate Risk	2	Low to Moderate

Risiko Inheren Inherent Risk	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Quality of Risk Management Implementation				
	Strong (1)	Satisfactory (2)	Fair (3)	Marginal (4)	Unsatisfactory (5)
Low (1)	1	1	2	3	3
Low to Moderate (2)	1	2	2	3	4
Moderate (3)	2	2	3	4	4
Moderate to High (4)	2	3	4	4	5
High (5)	3	3	4	5	5

**Profil Risiko PNM Posisi Triwulan IV - 2025 Disusun Berdasarkan Data Bulan Desember 2025**

Profil Risiko PNM posisi Triwulan IV-2025 disusun berdasarkan data Bulan Desember 2025. Secara komposit, Profil Risiko PNM Triwulan IV-2024 mendapatkan peringkat 2 (*Low to Moderate*) dari 8 (delapan) risiko yang dilakukan *self assessment*, yang mendapatkan peringkat risiko *moderate* yaitu risiko operasional dan risiko kepatuhan. Adapun yang mendapatkan peringkat *low to moderate* yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko strategi, risiko hukum dan risiko reputasi.

**PNM Risk Profile as of the Fourth Quarter of 2025 Prepared Based on December 2025 Data**

The PNM Risk Profile for the fourth quarter of 2025 was prepared based on data as of December 2025. On a composite basis, PNM risk profile in the fourth quarter of 2025 was rated Level 2 (Low to Moderate) based on the self-assessment conducted across eight (8) types of risk. Among these risks, Operational Risk and Compliance Risk were assessed at a Moderate level. Meanwhile, Credit Risk, Liquidity Risk, Market Risk, Strategic Risk, Legal Risk, and Reputation Risk were assessed at a Low to Moderate level.

## Pengukuran Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko PNM

Sebagai upaya dalam pencapaian program kerja rutin divisi dan KPI Perusahaan, Divisi Manajemen Risiko telah melakukan pelaksanaan pengukuran tingkat kematangan risiko (*Risk Maturity Index/RMI*) sesuai dengan arahan dari Pemegang Saham (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk). Parameter pengukuran ini terbagi menjadi 9 *building blocks*, yaitu:

1. *Risk strategy*, merupakan pendefinisian risiko (mencakup risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional (memperhitungkan risiko digital), kepatuhan, hukum, reputasi dan strategik) termasuk dengan proses pengambilan keputusan.
2. *Risk Appetite*, merupakan metodologi *risk appetite* (mencakup penetapan metodologi untuk *threshold* dan limit untuk 10 eksposur risiko) dan *early warning sign*.
3. *Risk Profile*, merupakan pelaporan kejadian risiko (mencakup risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional (memperhitungkan risiko digital), kepatuhan, hukum, reputasi dan strategik), profil risiko dan mitigasi risiko.
4. *Governance structure*, merupakan model *governance* dan tanggung jawab manajemen risiko.
5. *Risk Policies*, merupakan kebijakan risiko termasuk kebijakan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
6. *Monitoring dan Reporting*, merupakan pengawasan dan pelaporan serta aksi tindak lanjut.
7. *Modeling dan Analysis*, merupakan penilaian risiko dan *modeling* risiko.
8. *Risk Culture*, merupakan *assessment* budaya risiko, pelaporan *risk event* termasuk *Whistleblowing System* (WBS)
9. *Risk Technology*, merupakan sistem dan teknologi seperti penggunaan *spreadsheet*, *data warehouse*, *Business Continuity Management* (BCM)

Penilaian *Self Assessment* meliputi penilaian atas 8 Jenis Risiko utama yang dimiliki Perusahaan, dapat disimpulkan bahwa kondisi maturitas Manajemen Risiko mencapai penilaian "*Managed*" dengan skor 3,86.

Skor tingkat kematangan risiko Perusahaan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dari skor 3,80 pada tahun 2024 menjadi 3,86 pada tahun 2025.

## Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Direksi dan Dewan komisaris berpendapat bahwa penerapan sistem manajemen risiko telah diterapkan dengan baik secara proaktif oleh Perusahaan dengan memelihara tingkat profil risiko selama tahun 2025 pada level 2 (*Low to Moderate*) sesuai dengan penilaian mandiri yang telah dikoordinasikan dan terintegrasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai holding. Penilaian mandiri tersebut dilakukan setiap 3 bulan sekali selain dilaporkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk juga dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

## Measurement of PNM Risk Management Maturity Level

As part of the efforts to achieve the division's routine work programs and the Company's KPI, the Risk Management Division conducted a Risk Maturity Index (RMI) assessment in accordance with the direction of the Shareholder (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk). The assessment parameters are structured into nine building blocks, namely:

1. Risk Strategy, the definition of risks (including credit, market, liquidity, operational including digital risk compliance, legal, reputation, and strategic risks), including the related decision-making processes.
2. Risk Appetite, refers to the risk appetite methodology (including the establishment of methodologies for determining thresholds and limits for ten risk exposures) as well as early warning indicators.
3. Risk Profile, the reporting of risk events (covering credit, market, liquidity, operational including digital risk, compliance, legal, reputation, and strategic risks), risk profiling, and risk mitigation measures.
4. Governance Structure, the governance model and responsibilities related to risk management.
5. Risk Policies, the risk policies, including policies on the implementation of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CTF) programs.
6. Monitoring and Reporting, the supervision, reporting mechanisms, and follow-up actions.
7. Modeling and Analysis, the risk assessment and risk modeling processes.
8. Risk Culture, the assessment of risk culture, reporting of risk events, including the Whistleblowing System (WBS).
9. Risk Technology, the systems and technologies supporting risk management, such as the use of spreadsheets, data warehouses, and Business Continuity Management (BCM) systems.

Based on the self-assessment conducted across the Company's 8 (eight) primary risk types, the maturity level of PNM risk management implementation was assessed at the "Managed" level with a score of 3.86.

The Company's risk maturity score showed an improvement compared to the previous year, increasing from 3.80 in 2024 to 3.86 in 2025.

## Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Adequacy of the Risk Management System

The Board of Directors and the Board of Commissioners are of the view that the implementation of the Company's risk management system has been carried out effectively and proactively. Throughout 2025, the Company maintained its risk profile at Level 2 (Low to Moderate) based on the self-assessment conducted in coordination and integration with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the holding company. The self-assessment is conducted on a quarterly basis and is reported not only to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk but also to the Board of Commissioners.





Penyesuaian Kebijakan dan prosedur sebagai mitigasi risiko juga telah dilakukan secara komprehensif di mana sepanjang tahun 2025, Perusahaan telah melakukan penyusunan kebijakan baik baru mau pengkinian.

Policy and procedure adjustments as part of risk mitigation efforts have also been implemented comprehensively. Throughout 2025, the Company undertook the development of both new policies and updates to existing policies.

Klasifikasi Classification	Jumlah Total
Kebijakan Korporasi Corporate Policies	112
Kebijakan Bisnis dan Operasional Business and Operational Policies	74
Prosedur Procedures	150

Perusahaan juga telah memiliki *roadmap* pengembangan manajemen risiko sampai dengan tahun 2025 sesuai dengan rekomendasi dari hasil penilaian RMI tahun 2022 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui Konsultan PwC dalam rangka penguatan *risk management*.

The Company has also established a roadmap for the development of risk management through 2025, in line with the recommendations from the Risk Maturity Index (RMI) assessment conducted in 2022 by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk through PwC consultants, as part of strengthening the Company's risk management practices.

Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) pada September 2022 melalui pada Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PNM Nomor SK-006/PNM-KOM/IX/2022 tentang Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT PNM yang telah dirubah terakhir melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PNM Nomor SK-001/PNM-KOM/I/2023 tentang Perubahan Nomenklatur Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT Permodalan Nasional Madani sebagai komitmen Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan penerapan manajemen risiko perusahaan, sebelum ada KPMR, organ Dewan Komisaris yang membantu pengawasan untuk penerapan manajemen risiko Perusahaan dilekatkan pada fungsi Komite Audit.

The Board of Commissioners established the Risk Management Oversight Committee (KPMR) in September 2022 through the Decree of the Board of Commissioners of PT PNM No. SK-006/PNM-KOM/IX/2022 regarding the Risk Management and Compliance Committee of PT PNM. The decree was most recently amended through the Decree of the Board of Commissioners of PT PNM No. SK-001/PNM-KOM/I/2023 concerning the change of nomenclature of the Risk Management and Compliance Committee of PT Permodalan Nasional Madani. The establishment of this committee reflects the Board of Commissioners' commitment to overseeing the implementation of the Company's risk management. Prior to the establishment of KPMR, the oversight of risk management implementation was attached to the functions of the Audit Committee.

Divisi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko secara rutin melaporkan beberapa laporan hasil *monitoring* pelaksanaan manajemen risiko sebagai bukti penerapan manajemen risiko yang baik kepada Dewan Komisaris yaitu:

The division responsible for risk management regularly submits reports on the monitoring of risk management implementation to the Board of Commissioners as evidence of sound risk management practices.

Profil risiko dilaporkan setiap triwulanan dan Laporan Tinjauan Manajemen Risiko Kredit setiap semesteran. Pengkinian Pedoman Penerapan Manajemen Risiko melalui SK Direksi Nomor SK-073/PNM-DIR/X/25 agar sesuai dengan POJK No. 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan pedoman tersebut sudah disetujui oleh Dewan Komisaris.

The risk profile is reported quarterly, and the Credit Risk Management Review Report is issued semiannually. The Guidelines for the Implementation of Risk Management were updated via Board of Directors Decree No. SK-073/PNM-DIR/X/25 to comply with POJK No. 42 of 2024 concerning the Implementation of Risk Management for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions, and these guidelines have been approved by the Board of Commissioners.

Divisi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko telah mengimplementasikan risk register secara digital sebagai bagian dari penguatan sistem pengelolaan risiko. Selain itu, Perusahaan terus mendorong penguatan Budaya Sadar Risiko melalui berbagai inisiatif berbasis digital, seperti penyediaan flyer, wallpaper, dan video pelatihan, serta melalui program e-learning dan sertifikasi manajemen risiko yang mengacu pada standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

The division responsible for risk management has implemented a digital risk register as part of efforts to strengthen the risk management system. In addition, the Company continues to promote a risk-aware culture through various digital initiatives, such as providing flyers, wallpapers, and training videos, as well as through e-learning programs and risk management certifications that align with the standards of the National Professional Certification Agency (BNSP).

Terhitung sejak tanggal 23 September 2025, berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Nomor S-060/PNM-KOM/IX/25, fungsi pengelolaan risiko yang mencakup Divisi Manajemen Risiko Operasional dan Korporasi serta Divisi Manajemen Risiko Kredit ditempatkan di bawah koordinasi EVP Manajemen Risiko dan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko guna memastikan pengelolaan risiko yang terintegrasi dan komprehensif di tingkat Perusahaan.

Pada tahun ini Perusahaan juga melakukan penilaian tingkat kematangan penerapan manajemen risiko, penerapan tata Kelola Kepatuhan dan penerapan GCG dengan hasil sebagai berikut:

1. Penilaian tingkat kematangan penerapan manajemen risiko secara mandiri dengan *score* 3,86 (*Managed*).
2. Penilaian *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG) dengan *score* 92,92 (sembilan puluh dua koma sembilan puluh dua) masuk kategori Sangat Baik.
3. Penilaian *Self Assessment* tingkat Maturitas Kepatuhan dengan *score* 4,24 (empat koma dua puluh empat).
4. Penilaian *Self Assessment* tingkat Maturitas Tata Kelola dengan *score* 4,19 (empat koma sembilan belas).
5. PNM telah berkomitmen dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), dengan berpartisipasi melalui program *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) 2024 yang diselenggarakan pada tahun 2025 dengan perolehan nilai 85,55 (Sangat Terpercaya).

Penilaian tingkat maturitas di atas sebagai bentuk komitmen Perusahaan untuk senantiasa melakukan perbaikan dan pengembangan penerapan manajemen risiko ke depan.

### Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko

Direksi dan Dewan Komisaris secara berkelanjutan melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan manajemen risiko. Untuk memastikan pengendalian risiko berjalan efektif, Perusahaan menetapkan toleransi risiko dan limit risiko dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang dapat diterima (*risk appetite*), batas toleransi (*risk tolerance*), serta strategi bisnis Perusahaan secara keseluruhan.

#### 1. Penetapan Kerangka Manajemen Risiko

Hal-hal dalam penetapan kerangka manajemen risiko bagi Perusahaan termasuk kebijakan, prosedur dan limit antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Strategi Manajemen Risiko
  - Perumusan strategi Manajemen Risiko Perusahaan sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*) dan toleransi Risiko (*Risk Tolerance*);
  - Strategi Manajemen Risiko disusun bertujuan untuk memastikan bahwa eksposur Risiko pada Perusahaan telah dikelola secara terkendali sesuai

Effective September 23, 2025, pursuant to Board of Commissioners Approval Letter No. S-060/PNM-KOM/IX/25, the risk management functions, which include the Operational and Corporate Risk Management Division and the Credit Risk Management Division, are placed under the coordination of the EVP of Risk Management and the Director of Finance and Risk Management to ensure integrated and comprehensive risk management at the corporate level.

During the year, the Company also conducted several assessments related to risk management maturity, compliance governance, and the implementation of Good Corporate Governance (GCG), with the following results:

1. Self-assessment of risk management maturity level with a score of 3.86 (Managed).
2. The self-assessment of Good Corporate Governance (GCG) implementation resulted in a score of 92.92 (ninety-two point nine two), which falls within the "Very Good" category.
3. The self-assessment of Compliance Maturity Level resulted in a score of 4.24 (four point two four).
4. The self-assessment of Governance Maturity Level resulted in a score of 4.19 (four point one nine).
5. PNM has also demonstrated its commitment to implementing Good Corporate Governance principles by participating in the Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2024, conducted in 2025, achieving a score of 85.55, categorized as Highly Trusted.

The maturity assessments above reflect the Company's commitment to continuously improving and strengthening the implementation of risk management in the future.

### Evaluation of Risk Management Implementation

The Board of Directors and the Board of Commissioners continuously evaluate the effectiveness of the implementation of risk management. To ensure that risk controls operate effectively, the Company establishes risk tolerance and risk limits by taking into account the risk appetite, risk tolerance, limit, and the Company's overall business strategy.

#### 1. Establishment of the Risk Management Framework

The establishment of the Company's risk management framework, including policies, procedures, and limits, covers, among others, the following aspects:

- a. Risk Management Strategy
  - Formulation of the Company's Risk Management strategy in line with the overall business strategy, taking into account the level of risk to be undertaken (*Risk Appetite*) and *Risk Tolerance*;
  - The Risk Management strategy is designed to ensure that the Company's risk exposures are managed in a controlled manner in accordance with internal

- dengan kebijakan dan prosedur internal Perusahaan serta peraturan perundang-undangan.
- b. Tingkat Risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)
- Tingkat risiko yang akan diambil telah tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis;
  - Dalam penetapan toleransi risiko (*Risk Tolerance*), Perusahaan perlu mempertimbangkan strategi dan tujuan Perusahaan serta kemampuan Perusahaan dalam mengambil Risiko.
- c. Kebijakan dan Prosedur
- Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan menggambarkan bagaimana hubungan antara Manajemen Risiko dengan tujuan, strategi dan kondisi Perusahaan saat ini;
  - Kebijakan dan prosedur didesain dan diimplementasikan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko, profil Risiko serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau praktik Perusahaan yang sehat.
- d. Limit
- Perusahaan perlu memiliki limit Risiko yang sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*), toleransi risiko (*Risk Tolerance*), dan strategi Perusahaan secara keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan modal Perusahaan dalam menyerap eksposur Risiko disertai kerugian yang timbul, pengalaman kerugian, kemampuan SDM, dan kepatuhan terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.
  - Prosedur dan penetapan limit Risiko paling sedikit mencakup:
    - Akuntabilitas dan jenjang delegasi
    - Wewenang yang jelas;
    - Dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai untuk memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit;
    - Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala, sesuai dengan jenis Risiko, kebutuhan dan perkembangan Perusahaan; dan
  - Penetapan limit telah dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan Risiko, yang mencakup limit secara keseluruhan, limit per Risiko, dan limit per aktivitas bisnis Perusahaan yang memiliki eksposur Risiko.
  - Limit telah dipahami oleh setiap pihak yang terkait dan dikomunikasikan dengan baik termasuk apabila terjadi perubahan manajerial;
  - Dalam rangka pengendalian Risiko, limit digunakan sebagai ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi Risiko yang akan dilaksanakan manajemen;
- policies and procedures as well as applicable laws and regulations.
- b. Risk Appetite and Risk Tolerance
- The level of risk to be undertaken is reflected in the Company's business strategy and objectives;
  - In determining Risk Tolerance, the Company considers its strategy and objectives as well as its capacity to assume risk.
- c. Policies and Procedures
- The Company's Risk Management Policy describes the relationship between Risk Management and the Company's objectives, strategies, and current conditions;
  - Policies and procedures are designed and implemented with due consideration to the characteristics and complexity of business activities, the level of risk to be undertaken and risk tolerance, the risk profile, as well as regulations issued by authorities and/or sound corporate practices.
- d. Limits
- The Company maintains risk limits that are aligned with its Risk Appetite, Risk Tolerance, and overall strategy, while taking into account the Company's capital capacity to absorb risk exposures and potential losses, loss experience, human resource capabilities, and compliance with applicable internal and external requirements;
  - Procedures and the establishment of risk limits at a minimum cover:
    - Accountability and levels of delegation;
    - Clear authorities;
    - Adequate documentation of procedures and limit setting to facilitate reviews and audit trails;
    - Conducting periodic reviews of procedures and setting limits in accordance with the type of risk, the Company's needs, and its development; and
  - Risk limits are established comprehensively across all risk-related aspects, including overall limits, limits by risk type, and limits by business activity with risk exposure;
  - Risk limits are understood by all relevant parties and communicated effectively, including in the event of managerial changes;
  - For risk control purposes, limits serve as thresholds for determining the intensity of risk mitigation measures to be implemented by management;



- *Review* untuk Limit secara berkala telah dilakukan oleh Direksi dan/atau satuan kerja Manajemen Risiko untuk menyesuaikan terhadap perubahan kondisi yang terjadi.
- e. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko pada Perusahaan merupakan bagian utama dari proses penerapan Manajemen Risiko. Identifikasi Risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya Risiko beserta dampaknya.

Selama tahun 2025, Perusahaan telah melaksanakan audit operasional dan audit investigasi. Audit operasional dilaksanakan sebanyak 818 kali, sedangkan audit investigasi dilaksanakan sebanyak 165 kali.

- Periodic reviews of risk limits are conducted by the Board of Directors and/or the Risk Management unit to adjust to changes in prevailing conditions.
- e. Adequacy of Risk Identification, Measurement, Monitoring and Control Processes  
Risk identification, measurement, monitoring, and control constitute the core components of the Company's risk management implementation process. Risk identification is conducted proactively, covering all business activities, and aims to analyze sources of risk, the likelihood of occurrence, and their potential impacts.

Throughout 2025, the Company conducted operational audits and investigative audits. Operational audits were carried out 818 times, while investigative audits were conducted 165 times.

### Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan [GRI 2-17][OJK E.2][IDX G-05] Competency Development Related to Sustainable Finance [GRI 2-17][OJK E.2][IDX G-05]

PNM memberikan keleluasaan kepada Dewan Komisaris, Direksi, serta Divisi Jasa Manajemen dan Kemitraan sebagai penanggung jawab penerapan keuangan berkelanjutan untuk terus meningkatkan kompetensinya. Pengembangan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti pelatihan, *workshop*, seminar, hingga program sertifikasi. Informasi lebih lengkap mengenai pengembangan kompetensi sepanjang tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

PNM provides flexibility for the Board of Commissioners, the Board of Directors, as well as the Management Services and Partnership Division as the party responsible for the implementation of sustainable finance, to continuously enhance their competencies. Such development may be carried out through various forms, including training, workshops, seminars, and certification programs. More detailed information on competency development throughout 2025 is presented in the following table:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
<b>Dewan Komisaris</b> Board of Commissioners				
Veronica Colondam	Pelatihan Training	<i>Integrating Risk Into Strategic Decision Making</i>	10-12 Februari 2025 (Offline) February 10-12, 2025	University of Cambridge
	Pelatihan/Assesment Training/Assessment	Sertifikasi <i>Qualified Risk Governance Professional</i> (QRGP) Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Certification	6-7 November 2025 (Online) November 6-7, 2025 (Online)	CRMS
Nurhaida	Conference	<i>11<sup>th</sup> Indonesian Finance Association International Conference</i>	14-15 Oktober 2025 (Online) October 14-15, 2025 (Online)	Indonesian Finance Association (IFA)
	Pelatihan/Assesment Training/Assessment	Sertifikasi <i>Qualified Risk Governance Professional</i> (QRGP) Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Certification	13-14 November 2025 (Online) November 13-14, 2025 (Online)	CRMS
Dradjad H. Wibowo	Workshop/Seminar	<i>Executive Sharing on Sharia Financing</i>	22 Oktober 2025 (Offline) October 22, 2025 (Offline)	Divisi HCD HCD Division
Ardhya Pratiwi S.	Workshop/Seminar	<i>Executive Sharing on Sharia Financing</i>	22 Oktober 2025 (Offline) October 22, 2025 (Offline)	Divisi HCD HCD Division
Anas Puji Istanto	Workshop/Seminar	<i>Executive Sharing on Sharia Financing</i>	22 Oktober 2025 (Offline) October 22, 2025 (Offline)	Divisi HCD HCD Division



Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Iwan Taufiq P.	Workshop/Seminar	Executive Sharing on Sharia Financing	22 Oktober 2025 (Offline) October 22, 2025 (Offline)	Divisi HCD HCD Division
	Pelatihan/Assesment Training/Aessment	Sertifikasi Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Certification	13-14 November 2025 (Online) November 13-14, 2025 (Online)	CRMS
<b>Direksi</b> Board of Directors				
Arief Mulyadi	Workshop/Seminar	Sosialisasi Sistem Manajemen Kepatuhan ISO 37301:2021 Socialization on Compliance Management System ISO 37301:2021	11 Maret 2025 (Offline) March 11, 2025 (Offline)	Sigma Consulting
	Workshop/Seminar	Leaders Forum "Driving Strategic Focus and Boosting Business Performance"	7-9 Agustus 2025 (Offline) August 7-9, 2025 (Offline)	Divisi HCD HCD Division
	Workshop/Seminar	Forum Akuntan Manajemen-Kesiapan Akuntan Manajemen dalam Menghadapi Perubahan UU Tindak Korupsi Management Accountants Forum-Readiness of Management Accountants in Responding to Amendments to the Anti-Corruption Law	9 Agustus 2025 (Online) August 9 (Online)	Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)
	Workshop/Seminar	One Day Workshop-Menyusun SOP Keuangan dan Akuntansi Berdasarkan Format ISO One-Day Workshop-Developing Financial and Accounting SOPs in Accordance with ISO Standards	30 Agustus 2025 (Online) August 30, 2025 (Online)	Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)
	Workshop/Seminar	Syariah Literasi Knowledge Sharing Sharia Literacy Knowledge Sharing	21 Oktober 2025 (Offline) October 21, 2025 (Offline)	Divisi HCD HCD Division
	Pelatihan/Sertifikasi Training/Certification	Pelatihan dan Sertifikasi Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Batch II Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Training and Certification Batch II	13-14 November 2025 (Online) November 13-14, 2025 (Online)	CRMS Indonesia
Sunar Basuki	Workshop/Seminar	Sosialisasi Sistem Manajemen Kepatuhan ISO 37301:2021 Socialization on Compliance Management System ISO 37301:2021	11 Maret 2025 (Offline) March 11, 2025 (Offline)	Sigma Consulting
	Workshop/Seminar	Leaders Forum "Driving Strategic Focus and Boosting Business Performance"	7-9 Oktober 2025 (Offline) October 7-9, 2025 (Offline)	Divisi HCD HCD Division
	Workshop/Seminar	Syariah Literasi Knowledge Sharing Sharia Literacy Knowledge Sharing	21 Oktober 2025 (Offline) October 21, 2025 (Offline)	Divisi HCD HCD Division
	Pelatihan/Sertifikasi Training/Certification	Pelatihan dan Sertifikasi Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Batch I Socialization on Compliance Management System ISO 37301:2021 Training and Certification Batch I	6-7 November 2025 (Online) November 6-7, 2025 (Online)	CRMS Indonesia
	Workshop/Seminar	ExeLearn: Security Awareness for Top Level Management	24-28 November 2025 (e-learning) November 24-28, 2025 (e-learning)	Divisi HCD HCD Division

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Kindaris	Workshop/Seminar	Webinar "Kelangsungan Binsis di 2025: Pendekatan Risiko Hukum dan Manajemen Kepatuhan" Webinar on "Business Continuity in 2025: Legal Risk and Compliance Management Approach"	22 Januari 2025 (Online) January 22, 2025 (Online)	Institute of Compliance Profesional Indonesia
	Workshop/Seminar	Sosialisasi Sistem Manajemen Kepatuhan ISO 37301:2021 Socialization on Compliance Management System ISO 37301:2021 Training and Certification Batch	11 Maret 2025 (Offline) March 11, 1998 (Offline)	Sigma Consulting
	Workshop/Seminar	Leaders Forum "Driving Strategic Focus and Boosting Business Performance"	7-9 Agustus 2025 (Offline) August 7-9, 2025 (Offline)	Divisi HCD HCD Division
	Workshop/Seminar	Syariah Literasi Knowledge Sharing Sharia Literacy Knowledge Sharing	21 Oktober 2025 (Offline) October 21, 2025 (Offline)	Divisi HCD HCD Division
	Workshop/Seminar	ExeLearn: Security Awareness for Top Level Management	24-28 Oktober 2025 (e-learning) October 24-28, 2025 (e-learning)	Divisi HCD HCD Division
Yusron Avivi	Workshop/Seminar	Sosialisasi Sistem Manajemen Kepatuhan ISO 37301:2021	11 Maret 2025 March 11, 2025	Sigma Consulting
	Workshop/Seminar	Workshop Pemenuhan Initiative Cybersecurity Maturity	16-20 Juni 2025 June 16-20, 2025	Multimatics
	Workshop/Seminar	Leaders Forum "Driving Strategic Focus and Boosting Business Performance"	7-9 Agustus 2025 August 7-9, 2025	Divisi HCD HCD Division
	Workshop/Seminar	Syariah Literasi Knowledge Sharing Sharia Literacy Knowledge Sharing	21 Oktober 2025 October 21, 2025	Divisi HCD HCD Division
	Workshop/Seminar	Workshop Divisi OST dan PTI OST and PTI Division Workshop	20-22 November 2025 November 20-22, 2025	Divisi HCD HCD Division
	Workshop/Seminar	ExeLearn: Security Awareness for Top Level Management	24-28 November 2025 (e-learning) November 24-28, 2025 (e-learning)	Divisi HCD HCD Division
Sahat Pangabahan Pangaribuan	Workshop/Seminar	Sosialisasi Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) Socialization of Internal Control over Financial Reporting (ICoFR)	21 Juli 2025 (Offline) July 21, 2025 (Offline)	PWC Indonesia
	Workshop/Seminar	Leaders Forum "Driving Strategic Focus and Boosting Business Performance"	7-9 Agustus 2025 (Offline) August 7-9, 2025 (Offline)	Divisi HCD HCD Division
	Sertifikasi Certification	Sertifikasi CAFP (Certified Anti Fraud Professional) CAFP (Certified Anti-Fraud Professional) Certification	14-15 Oktober 2025 (Offline) October 14-15, 2025 (Offline)	Asia Anti Fraud
	Workshop/Seminar	Syariah Literasi Knowledge Sharing Sharia Literacy Knowledge Sharing	21 Oktober 2025 (Offline) October 21, 2025 (Offline)	Divisi HCD HCD Division
	Workshop/Seminar	Pelatihan dan Sertifikasi Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Batch I Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Training and Certification Batch I	6-7 November 2025 (Online) November 6-7, 2025 (Online)	CRMS Indonesia
	Workshop/Seminar	ExeLearn: Security Awareness for Top Level Management	24-28 November 2025 (e-learning) November 24-28, 2025 (e-learning)	Divisi HCD HCD Division



Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Henry Yunus Kamang Pangemanan	Workshop/Seminar	Leaders Forum "Driving Strategic Focus and Boosting Business Performance"	7-9 Agustus 2025 (Offline) August 27-28, 2025 (Offline)	Divisi HCD HCD Division
	Workshop/Seminar	9 <sup>th</sup> Asia-Pacific HR Forum	27-28 Agustus 2025 (Offline) August 27-28, 2025 (Offline)	Intipesan
	Sertifikasi Certification	Sertifikasi CAFP (Certified Anti Fraud Professional) CAFP (Certified Anti Fraud Professional) Certification	14-15 Oktober 2025 October 14-15, 2025	Asia Anti Fraud
	Workshop/Seminar	Syariah Literasi Knowledge Sharing Sharia Literacy Knowledge Sharing	21 Oktober 2025 (Offline) October 21, 2025 (Offline)	Divisi HCD HCD Division
	Sertifikasi Certification	Sertifikasi Kompetensi instruktur dan tenaga Pelatihan Skema Master/RCC Instructor and Training Personnel Competency Certification-Master/RCC Scheme	21 Oktober 2025 October 21, 2025	LSP Fit
	Sertifikasi Certification	Uji Sertifikasi Kompetensi instruktur dan tenaga Pelatihan Skema Master/RCC Instructor and Training Personnel Competency Certification Test- Master/RCC Scheme	28 Oktober 2025 October 28, 2025	LSP Fit
	Workshop/Seminar	AI at Work: Transforming How We Hire and Grow Talent	6 November 2025 November 6, 2025	LinkedIn
	Sertifikasi Certification	Pelatihan dan Sertifikasi Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Batch I Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Batch I Training and Certification	6-7 November 2025 (Online) November 6-7, 2025 (online)	CRMS Indonesia
Sertifikasi Certification	ExeLearn: Security Awareness for Top Level Management	24-28 November 2025 (e-learning) November 24-28, 2025 (e-learning)	PNM-Divisi HCD PNM-HCD Division	
<b>Divisi Jasa Manajemen dan Kemitraan</b> Management and Partnership Division				
Cut Ria Dewanti	Workshop	ESG Implementation	1-3 Oktober 2025 October 1-3, 2025	CRMS Indonesia

Selain pelatihan yang diikuti oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Divisi Jasa Manajemen dan Kemitraan, pelatihan terkait keuangan berkelanjutan juga diikuti oleh karyawan dari berbagai divisi lainnya, seperti yang tergambar pada tabel di bawah ini:

In addition to the training programs attended by the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Management Services and Partnership Division, sustainable finance-related training was also participated in by employees from various other divisions, as illustrated in the table below:

No.	Nama Pelatihan Training Name	Tanggal Pelatihan Training Date	Divisi Terundang Invited Division
1	Pelatihan Implementasi RAKB dan ESG PT Permodalan Nasional Madani Training on the Implementation of RAKB and ESG at PT Permodalan Nasional Madani	8 September 2025 September 8, 2025	Divisi PKA, AOV, SPR, PPI, OPR, HCS, HCD, PTI, ATI, OST, MIS, PBS, UUS, KPH, MRO, MRE, RSP, AMK, TFO PKA, AOV, SPR, PPI, OPR, HCS, HCD, PTI, ATI, OST, MIS, PBS, UUS, KPH, MRO, MRE, RSP, AMK, TFO Division
2	Knowledge Sharing Penyusunan Framework ESG dan RAKB Tahun 2026 Knowledge Sharing on the Development of the ESG Framework and 2026 RAKB	15 Oktober 2025 October 15, 2025	Divisi RSP, KPH, MRO, JMT, PKA, AOV, SPR, PPI, HCS, HCD, PTI, ATI, OST, MIS, PBS, PKU, UUS, KPH, MRO, MRE, TRS, TFO, AMK RSP, KPH, MRO, JMT, PKA, AOV, SPR, PPI, HCS, HCD, PTI, ATI, OST, MIS, PBS, PKU, UUS, KPH, MRO, MRE, TRS, TFO, AMK Division
3	Sosialisasi ESG di PNM ESG Socialization at PNM	10 November 2025 November 10, 2025	Seluruh Perwakilan Divisi (PIC PINTAR) All Division Representatives (PINTAR PICs)



### Keanggotaan PNM dalam UN Global Compact (UNGC) PNM Membership in the UN Global Compact (UNGC)

Pada tahun 2025, PNM belum menjadi anggota UN *Global Compact* (UNGC). Namun, Perusahaan berencana untuk bergabung sebagai langkah strategis dalam memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan yang diakui secara internasional. Sebagai inisiatif PBB yang menekankan hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan, dan antikorupsi, UNGC menawarkan kerangka kerja yang sejalan dengan mandat PNM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan dan pemberdayaan UMK. Melalui keanggotaan UNGC, PNM dapat menunjukkan kesungguhan dalam menerapkan standar etika global sekaligus meningkatkan kredibilitas di mata pemangku kepentingan, regulator, dan investor yang semakin menuntut transparansi serta praktik bisnis yang berkelanjutan. Langkah ini juga memperkuat posisi PNM dalam ekosistem keberlanjutan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Selain itu, keanggotaan UNGC memberikan kesempatan bagi PNM untuk terlibat dalam jaringan global perusahaan dan lembaga yang memiliki visi serupa dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Akses ke forum pembelajaran, praktik terbaik internasional, serta kolaborasi lintas sektor akan memperkaya kapasitas internal PNM dalam mengelola risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola. Inisiatif ini juga memperkuat posisi PNM sebagai lembaga keuangan yang berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sekaligus meningkatkan daya saing perusahaan melalui implementasi prinsip keberlanjutan yang lebih terstruktur, terukur, dan selaras dengan standar global.

In 2025, PNM had not yet become a member of the United Nations Global Compact (UNGC). However, the Company plans to join as a strategic step to strengthen its commitment to internationally recognized sustainability principles. As a United Nations initiative that emphasizes human rights, labor, the environment, and anti-corruption, the UNGC offers a framework that is aligned with PNM mandate to improve community welfare through financing and the empowerment of micro and small enterprises (MSEs). Through UNGC membership, PNM would be able to demonstrate its commitment to applying global ethical standards while enhancing its credibility in the eyes of stakeholders, regulators, and investors who increasingly demand transparency and sustainable business practices. This step would also reinforce PNM position within the sustainability ecosystem at both the national and international levels.

Furthermore, UNGC membership would provide PNM with opportunities to engage in a global network of companies and institutions that share a common vision in advancing sustainable development. Access to learning forums, international best practices, and cross-sector collaboration would enrich PNM internal capacity to manage environmental, social, and governance (ESG) risks. This initiative would also strengthen PNM role as a financial institution contributing to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), while enhancing the Company's competitiveness through a more structured, measurable, and globally aligned implementation of sustainability principles.



### Kebijakan Antikorupsi [IDX G-07] Anti-Corruption Policy [IDX G-07]

PNM mendukung komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi melalui koordinasi dengan berbagai lembaga penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi mencakup berbagai bentuk perbuatan melawan hukum, antara lain memperkaya diri sendiri atau orang/badan lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara (Pasal 2); penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara (Pasal 3); tindak penyuapan (Pasal 5, 6, dan 11); penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, 9, dan 10); pemerasan dalam jabatan (Pasal 12); tindak pidana terkait pemborongan (Pasal 7); serta gratifikasi (Pasal 12B dan 12C). [GRI 3-3]

Komitmen PNM terhadap kebijakan anti-korupsi diperkuat melalui identifikasi dan mitigasi pada proses bisnis yang memiliki tingkat risiko korupsi/penyuapan yang tinggi pengadaan barang dan jasa, Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan, dan bisnis usaha. Mitigasi yang dilakukan meliputi pelatihan antikorupsi secara berkala tentang etika bisnis, anti gratifikasi, dan etika kerja;

PNM supports the Government's commitment to combating corruption through coordination with various law enforcement agencies, including the Public Prosecutor's Office, the National Police, and the Corruption Eradication Commission (KPK). Based on Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 on Eradication of Criminal Acts of Corruption, corruption encompasses various unlawful acts, including, among others: self-enrichment or enrichment of another person/entity that causes losses to state finances or the national economy (Article 2); abuse of authority resulting in state losses (Article 3); bribery (Articles 5, 6, and 11); embezzlement in office (Articles 8, 9, and 10); extortion in office (Article 12); offenses related to procurement and contracting (Article 7); and gratification (Articles 12B and 12C). [GRI 3-3]

PNM commitment to anti-corruption policies is reinforced through the identification and mitigation of business processes with a high risk of corruption or bribery, including procurement of goods and services, human resources, finance, and business operations. Mitigation measures include regular anti-corruption training on business ethics, anti-gratification practices, and work





penerapan kebijakan anti gratifikasi yang jelas dan tegas; serta pelaksanaan audit internal dan eksternal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur terkait. Selain itu, PNM menjalankan berbagai kebijakan pencegahan korupsi, termasuk Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dan *Whistleblowing System*. Perusahaan juga menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan telah memperoleh sertifikasi SMAP dari PT Sucofindo.

[GRI 205-1]

Untuk memastikan efektivitas penerapan SMAP, PNM melaksanakan program sosialisasi kebijakan anti-korupsi kepada badan tata kelola (Dewan Komisaris dan Direksi), seluruh karyawan, serta mitra/vendor. Sosialisasi kepada badan tata kelola dan karyawan dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain Program SELARAS (untuk karyawan Kantor Pusat), SINAR (untuk karyawan Kantor Cabang dan PNM ULaMM), dan SABER (untuk karyawan Unit Mekaar). Materi yang disampaikan mencakup Kebijakan Penanganan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), serta Kebijakan Pengendalian Gratifikasi. Selain itu, PNM juga menyelenggarakan Pelatihan *Awareness* ISO 37001:2016 dan memanfaatkan media sosial perusahaan, *e-mail* internal, serta digital signage untuk memastikan seluruh karyawan (100%) memperoleh informasi terkait kebijakan dan prosedur antikorupsi sesuai SMAP.

Sosialisasi kepada mitra/vendor dan pemangku kepentingan lainnya dilakukan melalui *website* resmi PNM ([www.pnm.co.id](http://www.pnm.co.id)), yang memuat Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi. Larangan memberi atau menerima gratifikasi juga disampaikan melalui aplikasi IPROC yang mendukung proses pengadaan, manajemen kontrak, vendor, inventaris, dan aset. Selain itu, PNM memberikan sosialisasi eksternal melalui berbagai kegiatan seperti Webinar Peringatan Hari Korupsi Sedunia yang dilakukan pada tanggal 18 Desember dengan tema Satukan Aksi, Basmi Korupsi dengan narasumber Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK yaitu Bapak Amir Arief yang dihadiri oleh karyawan, vendor, notaris, dan nasabah PNM. Dengan langkah-langkah tersebut, semangat anti-penyuapan dan anti-korupsi tidak hanya diterapkan oleh PNM, tetapi juga dibangun secara konsisten bersama seluruh mitra/vendor yang terlibat dalam kegiatan usaha Perusahaan. [GRI 205-2]

Konsistensi PNM dalam menerapkan kebijakan anti-korupsi memberikan hasil positif, tercermin dari tidak adanya insiden korupsi yang terjadi sepanjang tahun pelaporan. Dengan demikian, Perusahaan tidak melakukan tindakan perbaikan khusus, baik secara internal maupun eksternal, dan tidak terdapat tindakan terhadap mitra/vendor seperti pemutusan kerja sama akibat dugaan tindak korupsi. [GRI 205-3]

ethics; the implementation of clear and firm anti-gratification policies; and the conduct of periodic internal and external audits to ensure compliance with relevant policies and procedures. In addition, PNM implements various corruption prevention policies, including the Gratification Control Policy and the Whistleblowing System. The Company has also implemented ISO 37001:2016 on the Anti-Bribery Management System (ABMS) and has obtained ABMS certification from PT Sucofindo. [GRI 205-1]

To ensure the effective implementation of the ABMS, PNM conducts socialization programs on anti-corruption policies for governance bodies (the Board of Commissioners and the Board of Directors), all employees, and partners/vendors. Socialization for governance bodies and employees is carried out through various programs, including SELARAS (for Head Office employees), SINAR (for Branch Office and PNM ULaMM employees), and SABER (for Mekaar Unit employees). The materials delivered include the Whistleblowing System, the Anti-Bribery Management System (ABMS), and the Gratification Control Policy. In addition, PNM conducts ISO 37001:2016 Awareness Training and utilizes the Company's social media, internal e-mail, and digital signage to ensure that all employees (100%) receive information related to anti-corruption policies and procedures in accordance with the ABMS.

Socialization for partners/vendors and other stakeholders is conducted through PNM official website ([www.pnm.co.id](http://www.pnm.co.id)), which publishes the Anti-Bribery Management System (ABMS) Policy and the Gratification Control Policy. The prohibition on giving or receiving gratification is also communicated through the IPROC application, which supports procurement processes, contract management, vendor management, inventory, and asset management. In addition, PNM conducts external outreach through various activities, such as the Webinar commemorating International Anti-Corruption Day held on 18 December under the theme "Unite in Action, Eradicate Corruption", featuring a keynote speaker, Mr. Amir Arief, Director of Socialization and Anti-Corruption Campaigns at the KPK, and attended by PNM employees, vendors, notaries, and customers. Through these initiatives, the spirit of anti-bribery and anti-corruption is not only implemented internally by PNM but is also consistently fostered together with all partners and vendors involved in the Company's business activities. [GRI 205-2]

PNM consistent implementation of anti-corruption policies has yielded positive results, as evidenced by the absence of any corruption incidents throughout the reporting year. Accordingly, the Company did not undertake any specific corrective actions, either internally or externally, and there were no actions taken against partners/vendors, such as termination of cooperation, due to alleged corruption cases. [GRI 205-3]



## Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)

Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Policy (AML/CFT)

Penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) menjadi sangat krusial bagi PNM sebagai lembaga jasa keuangan yang beroperasi dengan jaringan luas dan melayani jutaan pengusaha UMK di seluruh Indonesia. Dengan tingginya intensitas transaksi dan variasi profil nasabah, risiko penyalahgunaan layanan untuk aktivitas ilegal semakin meningkat, sehingga penerapan APU PPT yang kuat menjadi fondasi utama dalam menjaga integritas operasional. Kebijakan ini tidak hanya mencegah kerugian finansial dan risiko hukum, tetapi juga melindungi reputasi PNM sebagai institusi yang berkomitmen pada tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap regulasi Bank Indonesia, OJK, dan standar internasional.

Selain itu, penguatan implementasi APU PPT selaras dengan tuntutan pemangku kepentingan yang mengharapkan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan risiko yang matang dalam industri keuangan. Dalam konteks keberlanjutan, APU PPT mendukung terciptanya sistem keuangan yang bersih, aman, dan inklusif yang pada akhirnya memberi kepastian bagi keberlangsungan pembiayaan dan pendampingan usaha mikro. Melalui kebijakan dan pelaporan yang lebih komprehensif tentang APU PPT, Perusahaan dapat menunjukkan bahwa upaya pembangunan ekonomi masyarakat tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga dijalankan secara bertanggung jawab dan sesuai standar integritas global.

Komitmen PNM terhadap penerapan APU PPT diwujudkan dengan terbitnya Surat Keputusan Direksi PT Permodalan Nasional Madani Nomor: SK-036/PNM-DIR/IV/25 tentang Adendum Kesatu SK-126/PNM-DIR/XI/23 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Konsistensi PNM dalam menegakkan regulasi internal tersebut berdampak positif dengan tidak adanya pelanggaran terkait penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) selama tahun 2025.



## Pencegahan Benturan Kepentingan [IDX G-09]

Prevention of Conflicts of Interest [IDX G-09]

PNM secara proaktif mengidentifikasi dan mengelola potensi benturan kepentingan untuk menjaga integritas dan transparansi dalam seluruh kegiatan operasionalnya. Perusahaan memiliki kebijakan internal yang jelas, mencakup mekanisme pelaporan dan prosedur penanganan benturan kepentingan, serta rutin melakukan sosialisasi dan pengawasan agar seluruh pihak memahami kewajiban mereka, sehingga kepercayaan pemangku kepentingan tetap terjaga dan tata kelola perusahaan kuat. Benturan kepentingan sendiri didefinisikan sebagai kondisi di mana Insan PNM, karena kedudukan atau wewenangnya, memiliki kepentingan pribadi, golongan, atau keluarga yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan secara objektif. Rincian tentang benturan

The implementation of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CFT) policy is critically important for PNM as a financial services institution operating an extensive network and serving millions of micro and small enterprise (MSE) actors across Indonesia. Given the high volume of transactions and the diverse customer profiles, the risk of misuse of financial services for illegal activities is increasingly significant. Accordingly, a robust AML/CFT framework serves as a fundamental safeguard in maintaining operational integrity. This policy not only prevents financial losses and legal risks, but also protects PNM reputation as an institution committed to good corporate governance and compliance with regulations issued by Bank Indonesia, the Financial Services Authority (OJK), and international standards.

Furthermore, strengthening AML/CFT implementation aligns with stakeholder expectations for transparency, accountability, and sound risk management within the financial services industry. From a sustainability perspective, AML/CFT supports the creation of a clean, secure, and inclusive financial system, ultimately providing assurance for the continuity of financing and mentoring for micro-enterprises. Through more comprehensive AML/CFT policies and reporting, the Company demonstrates that its efforts to promote community economic development are not solely growth-oriented, but are also conducted responsibly and in accordance with global integrity standards.

PNM's commitment to implementing AML/CFT measures is demonstrated by the issuance of PT Permodalan Nasional Madani's Board of Directors' Decision No. SK-036/PNM -DIR/IV/25 regarding the First Amendment to Decision No. SK-126/PNM-DIR/XI/23 on Guidelines for the Implementation of the Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Proliferation Financing Program. PNM consistent enforcement of these internal regulations yielded positive results, as evidenced by the absence of any violations related to AML/CFT implementation throughout 2025.

PNM proactively identifies and manages potential conflicts of interest to safeguard integrity and transparency across all operational activities. The Company has established clear internal policies, including reporting mechanisms and procedures for handling conflicts of interest, and regularly conducts socialization and supervision to ensure that all parties understand their obligations. These efforts help maintain stakeholder trust and reinforce strong corporate governance. A conflict of interest is defined as a condition in which PNM personnel, by virtue of their position or authority, have personal, group, or familial interests that may influence the objective execution of duties and decision-making. Detailed provisions regarding conflicts of interest are set forth in Decree of the





kepentingan disampaikan dalam Surat Keputusan Direksi PNM Nomor: SK-042/PNM-DIR/VI/25 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), pada Bab III Norma Etika Perusahaan, Nomor 12 Benturan Kepentingan. Selaras dengan itu, Perusahaan juga mengeluarkan Surat Edaran Direksi PT PNM Nomor: SE-046/PNM-DIR/VIII/25 tentang Kebijakan Transaksi yang Berpotensi Menimbulkan Benturan Kepentingan dan Transaksi Afiliasi.

## Kontribusi Politik Political Contributions

Sebagai institusi yang beroperasi di sektor jasa keuangan dan memiliki mandat pemberdayaan ekonomi masyarakat, PNM menjunjung tinggi prinsip independensi dan tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan seluruh aktivitasnya. Sejalan dengan itu, Perusahaan memastikan bahwa perusahaan tidak memberikan dukungan dalam bentuk apa pun, baik dana, fasilitas, barang, jasa, maupun kontribusi tidak langsung, kepada partai politik, kandidat, atau kegiatan politik apa pun sepanjang tahun 2025. Kebijakan ini diterapkan untuk mencegah potensi konflik kepentingan dan memastikan setiap keputusan bisnis diambil secara profesional tanpa pengaruh kepentingan politik.

Untuk mendukung komitmen tersebut, PNM juga memperkuat pengendalian internal serta mekanisme pelaporan yang memastikan seluruh aktivitas perusahaan berada dalam koridor hukum dan regulasi yang berlaku. Seluruh karyawan, khususnya pada posisi strategis, diberikan pemahaman terkait larangan kontribusi politik yang dapat mengatasnamakan perusahaan. Pendekatan ini mencerminkan komitmen PNM terhadap transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam menjalankan operasional, sekaligus menunjukkan bahwa perusahaan berfokus pada penciptaan nilai ekonomi dan sosial tanpa keterlibatan dalam aktivitas politik praktis.

Komitmen PNM tidak berkontribusi terkait politik secara tegas diatur dalam SK Direksi PT PNM Nomor: SK-042/PNM-DIR/VI/25 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), Bab III Norma Etika Perusahaan, Nomor 19. Larangan Partisipasi dalam Kegiatan Politik, Secara rinci, setiap Insan PNM dilarang untuk:

1. Melakukan kegiatan politik dalam bentuk apapun atas nama PNM atau yang menggunakan dana dan fasilitas milik PNM;
2. Menjadi pengurus partai politik di seluruh tingkatan;
3. Memberikan kontribusi secara pribadi atau kelompok dengan harapan akan dibayar kembali oleh PNM.

## Tata Kelola Teknologi Informasi Information Technology Governance

Tata kelola Teknologi Informasi (*IT Governance*) memiliki peran strategis dalam memastikan keberlangsungan operasional dan efektivitas layanan PNM sebagai lembaga pembiayaan yang melayani jutaan nasabah di seluruh Indonesia. Dengan semakin meningkatnya ketergantungan pada teknologi digital, pengelolaan IT yang kuat menjadi fondasi utama dalam menjaga keandalan sistem, keamanan data, serta kualitas layanan

Board of Directors Number: SK-042/PNM-DIR/VI/25 on Code of Conduct, Chapter III on Corporate Ethics Standards, Item 12 (Conflicts of Interest). In alignment with this, the Company also issued the Board of Directors Circular Letter Number: SE-046/PNM-DIR/VIII/25 concerning Policy on Transactions Potentially Giving Rise to Conflicts of Interest and Affiliated Transactions.

As an institution operating in the financial services sector with a mandate to empower the community's economy, PNM upholds the principles of independence and good corporate governance in all of its activities. Accordingly, throughout 2025, the Company ensured that it did not provide any form of support, whether in the form of funds, facilities, goods, services, or indirect contributions, to political parties, candidates, or political activities of any kind. This policy is implemented to prevent potential conflicts of interest and to ensure that all business decisions are made professionally, free from political influence.

To support this commitment, PNM has strengthened internal controls and reporting mechanisms to ensure that all Company activities remain within the boundaries of applicable laws and regulations. All employees, particularly those in strategic positions, are provided with a clear understanding of the prohibition on political contributions made in the name of the Company. This approach reflects PNM commitment to transparency, integrity, and accountability in its operations, while demonstrating the Company's focus on creating economic and social value without engagement in practical political activities.

PNM firm commitment to refraining from political contributions is explicitly stipulated in Decree of the Board of Directors of PT PNM Number: SK-042/PNM-DIR/VI/25 on Code of Conduct, Chapter III on Corporate Ethics Standards, Item 19 (Prohibition of Participation in Political Activities). Specifically, all PNM personnel are prohibited from:

1. Engaging in political activities of any kind in the name of PNM or using PNM funds or facilities;
2. Serving as officials or administrators of political parties at any level; and
3. Making personal or group political contributions with the expectation of reimbursement by PNM.

Information Technology (*IT Governance*) plays a key role in ensuring the continuity of operations and the effectiveness of PNM services as a financing institution serving millions of customers across Indonesia. As reliance on digital technology continues to increase, strong IT governance has become a critical foundation for maintaining system reliability, data security, and service quality for customers and other

kepada nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola IT memungkinkan PNM untuk memastikan bahwa seluruh investasi, kebijakan, dan proses teknologi selaras dengan tujuan bisnis, standar keamanan, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini sekaligus mendukung upaya perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses kerja, dan mendorong inovasi layanan digital yang inklusif.

Selain mendukung kinerja operasional, tata kelola IT yang efektif juga menjadi elemen penting dalam pengelolaan risiko dan kepatuhan, terutama terkait perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan keandalan infrastruktur digital. Dengan adanya kerangka pengendalian dan *monitoring* yang kuat, PNM dapat meminimalkan potensi gangguan layanan, ancaman keamanan, serta penyalahgunaan data yang dapat berdampak negatif pada kepercayaan publik. Dalam konteks keberlanjutan, tata kelola IT bukan hanya memastikan keamanan dan efisiensi, tetapi juga mendorong transformasi digital yang bertanggung jawab, transparan, dan mendukung pencapaian tujuan strategis PNM dalam menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan.

Komitmen PNM terhadap tata kelola teknologi informasi diperkuat melalui penerbitan Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: SK-124/PNM-DIR/XII/2025. Pedoman ini disusun selaras dengan Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara sehingga memastikan bahwa pengelolaan teknologi informasi di PNM berjalan sesuai standar tata kelola yang baik dan ketentuan yang berlaku.

stakeholders. IT governance enables PNM to ensure that all technology investments, policies, and processes are aligned with business objectives, security standards, and the principles of good corporate governance. This, in turn, supports the Company's efforts to enhance operational efficiency, accelerate work processes, and drive inclusive digital service innovation.

Beyond supporting operational performance, effective IT governance is also a key element in risk management and regulatory compliance, particularly with respect to personal data protection, cybersecurity, and digital infrastructure reliability. Through robust control and monitoring frameworks, PNM can minimize the risk of service disruptions, security threats, and data misuse that could negatively affect public trust. From a sustainability perspective, IT governance not only ensures security and efficiency, but also promotes responsible and transparent digital transformation that supports PNM strategic objectives in creating sustainable economic, social, and environmental value.

PNM commitment to IT governance is reinforced through the issuance of the Information Technology Governance Guidelines, established by Decree of the Board of Directors Number: SK-124/PNM-DIR/XII/2025. These guidelines are formulated in alignment with the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines on Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, thereby ensuring that information technology management at PNM is conducted in accordance with sound governance standards and applicable regulations.

## Hubungan dengan Pemangku Kepentingan [GRI 2-29][OJK E.4] Stakeholder Engagement [GRI 2-29][OJK E.4]

PNM senantiasa membangun kerja sama dan hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Komunikasi yang terbuka dan transparan memungkinkan Perusahaan memahami kebutuhan serta ekspektasi para pemangku kepentingan, termasuk nasabah/konsumen, mitra bisnis, regulator, pemerintah, dan masyarakat. Melalui interaksi yang konstruktif, PNM dapat menumbuhkan kepercayaan dan menjalin kolaborasi jangka panjang yang menopang keberlanjutan operasional. Selain itu, hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan membantu Perusahaan mengidentifikasi risiko sosial dan lingkungan secara lebih dini sehingga kebijakan yang disusun dapat lebih responsif dan bertanggung jawab.

Perusahaan memaknai pemangku kepentingan sebagai individu atau entitas yang terdampak oleh kegiatan, produk, dan layanan perusahaan, sekaligus pihak yang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan strategi dan pencapaian target keberlanjutan. Mengingat peran penting tersebut, PNM berupaya secara optimal melibatkan pemangku kepentingan dalam seluruh proses operasional. Pelibatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat hubungan yang harmonis dan saling mendukung.

PNM continuously builds cooperative and harmonious relationships with all stakeholders, both internal and external. Open and transparent communication enables the Company to understand the needs and expectations of stakeholders, including customers/consumers, business partners, regulators, government institutions, and the community. Through constructive interaction, PNM fosters trust and establishes long-term collaboration that supports the sustainability of its operations. Moreover, strong stakeholder relationships help the Company identify social and environmental risks at an early stage, allowing policies to be more responsive and responsible.

The Company defines stakeholders as individuals or entities that are affected by the Company's activities, products, and services, as well as parties that have an influence on the success of its strategy and the achievement of sustainability targets. In view of this important role, PNM strives to actively involve stakeholders across all operational processes. Such engagement also serves as a means to strengthen harmonious and mutually supportive relationships.



Identifikasi pemangku kepentingan dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan berbagai unit dan divisi internal antara lain Sekretariat Perusahaan, Divisi Pengadaan dan Pengendalian Infrastruktur, Divisi Operasi, Divisi *Human Capital Services and Policy*, Divisi *Human Capital Development*, Divisi Operasional dan *Security* Teknologi Informasi, Divisi Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi, Divisi Strategi dan Perencanaan Teknologi Informasi, Divisi Kepatuhan, Divisi Legal, Divisi Manajemen Risiko Operasional dan Korporasi, Divisi Manajemen Risiko Kredit, Divisi *Credit Recovery*, Divisi Audit Operasional dan Investigasi, Divisi Pengendalian Mutu, Pengembangan Kualitas dan Audit TI, Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan, Divisi *Treasury*, Divisi Rencana Strategi Perusahaan, Divisi *Transformation Office*, Divisi Manajemen informasi Sistem, Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha, Divisi Pengembangan Bisnis, Divisi Jasa Manajemen dan TJSL, Divisi Pengelolaan Bisnis Ultra Mikro 1-3, Divisi Pengelolaan Bisnis Mikro dan Kecil, dan Unit Usaha Syariah.

Stakeholder identification is conducted through Focus Group Discussions (FGDs) involving various internal units and divisions, including the Corporate Secretariat, Procurement and Infrastructure Control Division, Operations Division, Human Capital Services and Policy Division, Human Capital Development Division, Information Technology Operations and Security Division, Information Technology Application Development Division, Information Technology Strategy and Planning Division, Compliance Division, Legal Division, Operational and Corporate Risk Management Division, Credit Risk Management Division, Credit Recovery Division, Operational and Investigative Audit Division, Quality Control, Quality Development, and IT Audit Division, Management Accounting and Finance Division, Treasury Division, Corporate Strategic Planning Division, Transformation Office Division, Information Systems Management Division, Business Capacity Development Division, Business Development Division; Management Services and TJSL Division, Ultra Micro Business Management Divisions 1-3, Micro and Small Business Management Division, and the Sharia Business Unit.

Berdasarkan hasil FGD tersebut pemangku kepentingan PNM beserta metode pendekatan dan bentuk keterlibatannya adalah sebagai berikut:

Based on the results of these FGDs, PNM stakeholders, along with the engagement approaches are as follows:

Pemangku Kepentingan Stakeholder Group	Topik Pembahasan Discussion Topic	Metode Pendekatan Approach Method	Frekuensi Frequency
Pemegang Saham Shareholder	Kinerja keuangan atau kinerja non finansial, informasi terkini tentang aksi dan arahan strategis PNM Financial and Non-Financial Performance, including up-to-date information on PNM strategic actions and direction	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	Minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Minimum of once a year
Nasabah Customer	Pelayanan nasabah atau kerahasiaan data nasabah Customer Service and Confidentiality of Customer Data	Pertemuan langsung dengan nasabah Direct meeting with customers	Sesuai dengan kebutuhan As needed
Pegawai Employee	Ketenagakerjaan atau kesejahteraan Employment and Employee Welfare	<i>Gathering</i>	Minimal 1 (satu) tahun sekali Minimum of once a year
Mitra Kerja Business Partner	Pengadaan barang dan jasa Procurement of Goods and Services	Proses Operasional Operational Process	Sesuai dengan kebutuhan As needed
Pemerintah Government	Legal dan kepentingan lembaga jasa keuangan Legal Affairs and Interests of Financial Services Institutions	Pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi lainnya Fulfillment of tax obligations and other statutory levies	Sepanjang tahun Throughout the year
Masyarakat Public	Kontribusi kepada masyarakat Contribution to the Community	Penerapan CSR CSR implementation	Sepanjang tahun Throughout the year

**Perjanjian Perundingan Kolektif [GRI 2-30]**  
Collective Bargaining Agreement [GRI 2-30]

Hubungan yang harmonis antara Perusahaan dan karyawan merupakan modal penting bagi PNM dalam menjalankan kegiatan usaha sekaligus mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, keberadaan forum komunikasi menjadi krusial untuk membangun rasa saling memahami dan saling percaya, serta untuk memperkuat internalisasi nilai budaya Perusahaan, yaitu BRILiAN Way PNM, melalui pemahaman atas peran masing-masing pihak.

A harmonious relationship between the Company and its employees is a vital foundation for PNM in conducting its business activities and achieving its established targets. Accordingly, the existence of an effective communication forum is essential to foster mutual understanding and trust, as well as to strengthen the internalization of the Company's cultural values, namely BRILiAN Way PNM, through a clear understanding of the respective roles of each party.

Di PNM, sarana komunikasi antara Pekerja dan Perseroan ini diwujudkan melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit yang berfungsi sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan musyawarah. LKS Bipartit berperan sebagai sarana pencegahan perselisihan hubungan industrial sekaligus mekanisme penyerapan aspirasi karyawan. Melalui forum ini, berbagai perbaikan di lingkungan Perusahaan dapat dibahas, termasuk upaya peningkatan produktivitas kerja melalui usulan dan pandangan bersama.

Lembaga kerja sama bipartit merupakan forum komunikasi dan konsultasi terkait hubungan industrial di suatu perusahaan, dengan anggota yang terdiri atas perwakilan pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi ketenagakerjaan, atau unsur pekerja/buruh. Sementara itu, lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah mengenai isu ketenagakerjaan dengan anggota yang mewakili organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, serta pemerintah.

Pembentukan LKS Bipartit di PNM bertujuan untuk mendukung terciptanya hubungan industrial yang harmonis melalui:

1. Penyamaan pemahaman dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di Perusahaan.
2. Pengembangan partisipasi dan motivasi kerja.
3. Peningkatan produktivitas kerja.
4. Memelihara dan meningkatkan komunikasi serta konsultasi antara Perusahaan dan wakil pekerja.
5. Menunjang pembinaan disiplin dan etos kerja.
6. Komunikasi yang terbuka di Perusahaan.

Adanya LKS Bipartit memberikan manfaat bagi Perusahaan dan karyawan/pekerja/buruh antara lain:

1. Mempererat hubungan silaturahmi dan keakraban antara manajemen dan pekerja.
2. Meningkatkan ketenangan kerja dan ketenangan pengusaha.
3. Melahirkan aspirasi untuk inovasi.
4. Mencegah terjadi dan berkembangnya masalah dalam hubungan industrial.

Dalam pelaksanaannya, tugas LKS Bipartit adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wadah pertemuan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
2. Sebagai wadah kebijakan pengusaha dan aspirasi pekerja atau buruh dalam rangka mencegah terjadinya permasalahan hubungan industrial di perusahaan
3. Sebagai wadah penyampaian saran, pertimbangan, dan pendapat kepada pengusaha, pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja atau serikat buruh dalam rangka penetapan dan pelaksanaan kebijakan perusahaan

LKS Bipartit mempunyai kewenangan untuk memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada pimpinan atau manajemen perusahaan.

At PNM, communication between employees and the company is facilitated through the Bipartite Cooperation Body (LKS), which serves as a forum for communication, consultation, and deliberation. The LKS Bipartit functions as a mechanism for preventing industrial relations disputes while also acting as a channel for capturing and accommodating employee aspirations. Through this forum, various improvements within the Company can be discussed, including initiatives to enhance work productivity through shared proposals and perspectives.

The bipartite cooperation institution is a forum for communication and consultation on industrial relations within a company, comprising representatives of the employer and registered labor unions/trade unions or employee representatives. Meanwhile, the tripartite cooperation institution is a forum for communication, consultation, and deliberation on labor issues involving representatives of employers' organizations, labor unions/trade unions, and the government.

The establishment of the LKS Bipartit at PNM aims to support the establishment of harmonious industrial relations by:

1. Harmonizing the understanding and implementation of Company policies and provisions.
2. Developing employee participation and work motivation.
3. Improving work productivity.
4. Maintaining and enhancing communication and consultation between the Company and employee representatives.
5. Supporting the development of discipline and work ethics.
6. Promoting open communication within the Company.

LKS Bipartit provides benefits for both the Company and employees/workers, including:

1. Strengthen rapport and foster closer relationships between management and employees.
2. Enhance workplace harmony and business continuity.
3. Encourage aspirations for innovation.
4. Prevent the emergence and escalation of industrial relations issues.

In carrying out its functions, the duties of the LKS Bipartit include:

1. Serve as a forum for periodic meetings and/or ad hoc meetings as necessary.
2. Act as a channel for conveying employer policies and employee aspirations in order to prevent industrial relations issues within the Company.
3. Provide suggestions, considerations, and opinions to the employer, employees/workers, and/or labor unions in relation to the formulation and implementation of Company policies.

The Bipartite Working Committee has the authority to provide advice and/or recommendations to the company's leadership or management.





LKS Bipartit dibangun atas dasar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Permenakertrans No. 32/MEN/2008 tentang Tata Cara Pembentukan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit
3. Surat Keputusan Direksi PT PNM Nomor SK-050/PNM-DIR/VI/24 tentang Pembentukan LKS Bipartit

Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur bahwa "Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja atau lebih wajib membentuk LKS Bipartit". Atas dasar tersebut LKS Bipartit PNM dibentuk per tanggal 25 November 2020, secara resmi LKS Bipartit PNM tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jakarta Pusat dengan Nomor 216/LKS-Bip/XI/2020. Per 29 Oktober 2025, LKS Bipartit PNM terdiri dari 12 (dua belas) orang pengurus, berdasarkan Memo No. M-1235/PNM-HCS/X/25 yang telah disetujui oleh Direksi. Keberadaan LKS Bipartit diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi yang efektif antara pihak pengusaha dan pekerja demi keharmonisan hubungan industrial antara kedua belah pihak.

The establishment and operation of the LKS Bipartit are based on the following regulations:

1. Law Number 13 of 2003 on Manpower.
2. Minister of Manpower and Transmigration Regulation No. 32/MEN/2008 on Procedures for the Establishment and Membership Structure of Bipartite Cooperation Institutions.
3. Board of Directors' Decision of PT PNM No. SK-050/PNM-DIR/VI/24 regarding the Establishment of a Bipartite Labor-Management Council

These regulations stipulate that "Every company employing 50 (fifty) or more workers is required to establish a Bipartite Cooperation Institution." Accordingly, the LKS Bipartit of PNM was established on November 25, 2020 and is officially registered with the Central Jakarta Provincial Manpower Office under Registration Number 216/LKS-Bip/XI/2020. As of October 29, 2025, the PNM Bipartite Labor-Management Council consists of 12 (twelve) members, pursuant to Memo No. M-1235/PNM-HCS/X/25, which has been approved by the Board of Directors. It is hoped that the existence of the PNM Bipartite Labor-Management Committee will serve as an effective communication channel between employers and employees to foster harmonious industrial relations between both parties.

No.	Nama Name	Keterangan Description
1	M. Zulfan Reza	Unsur Pengusaha Employer Representative
2	Andreas Adrianto	Unsur Pengusaha Employer Representative
3	Umar Luthfi	Unsur Pengusaha Employer Representative
4	Arif Fatma Adi	Unsur Pengusaha Employer Representative
5	Mira Damayanti	Unsur Pengusaha Employer Representative
6	Ayu Aulia Rahmitasari	Unsur Pengusaha Employer Representative
7	Octo Wibisono	Unsur Pekerja Employee Representative
8	Endang Nurjani	Unsur Pekerja Employee Representative
9	Farida	Unsur Pekerja Employee Representative
10	Susila	Unsur Pekerja Employee Representative
11	Rahadian Tri Nugroho	Unsur Pekerja Employee Representative
12	M. Dida Gursida Azhi	Unsur Pekerja Employee Representative



## Permasalahan terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan [OJK E.5]

Challenges in the Implementation of Sustainable Finance [OJK E.5]

Dukungan PNM terhadap penerapan keuangan berkelanjutan diwujudkan melalui pembiayaan maupun investasi pada instrumen keuangan dan proyek yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Secara khusus, sesuai dengan bidang usaha Perseroan, dukungan tersebut diberikan melalui penyaluran pembiayaan kepada UMKM.

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan menghadapi sejumlah tantangan eksternal dalam penerapan keuangan berkelanjutan di kalangan pengusaha UMKM, antara lain bencana alam terkait perubahan iklim, ketidakpastian geopolitik, dan perkembangan teknologi yang disruptif diidentifikasi sebagai faktor utama yang perlu diantisipasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, PNM telah menetapkan berbagai strategi dan solusi, meliputi menyiapkan bisnis model baru dalam PKM yang dilakukan berdasarkan *group selection*, memperkuat produk lanjutan berbasis *community based* sebagai jembatan untuk naik kelas, memperkuat ekosistem Ultra Mikro melalui peran ketua kelompok, meningkatkan literasi keuangan kepada nasabah melalui aktivitas pemberdayaan yang lebih komprehensif, penguatan pengelolaan *human capital*, peningkatan akses dan literasi digital untuk nasabah ultra mikro dan internal PNM & *upgrading* arsitektur IT untuk optimalisasi bisnis proses & peningkatan *security* IT agar optimal dan memadai, peningkatan maturitas kepatuhan dan tata kelola dan manajemen risiko, dan optimalisasi kontribusi perusahaan anak terhadap Perusahaan.

Selain tantangan eksternal, PNM juga menghadapi beberapa permasalahan internal dalam implementasi keuangan berkelanjutan, seperti diperlukan penguatan kapasitas dan pemahaman sumber daya manusia terkait prinsip keuangan berkelanjutan, belum terintegrasinya kebijakan dan proses bisnis secara menyeluruh, serta ketersediaan dan kualitas data ESG yang masih perlu diperkuat dan diperlukan Perluasan Core Bisnis Berbasis Keuangan Berkelanjutan Guna mengatasinya, Perusahaan telah mengambil langkah strategis dan solusi berupa penyusunan *framework* Keuangan Berkelanjutan, pengembangan produk eksisting yang mendukung perluasan *core* bisnis berbasis Keuangan Berkelanjutan, penyusunan *impact report* dan penerbitan obligasi tahap selanjutnya, identifikasi dan analisa risiko iklim, perhitungan emisi cakupan 1, 2, dan 3 untuk perjalanan dinas, program literasi keuangan, pendidikan dan pelatihan di bidang Keuangan Berkelanjutan, program TJSL berdampak SDGs, laporan keberlanjutan dengan pendekatan IFRS S1 dan S2, kajian identifikasi risiko HAM di Kantor Pusat dan Cabang Sampel, pengembangan produk baru yang mendukung perluasan *core* bisnis berbasis Keuangan Berkelanjutan berupa Kelompok Membina dan Mengelola Sampah (KEMBANGS) dan peningkatan produktivitas melalui *Diary AO*, aplikasi untuk mengatur dan mengelola aktivitas harian AO secara lebih efektif dan efisien.

PNM commitment to the implementation of sustainable finance is realized through the provision of financing and investments in financial instruments and projects that are aligned with sustainability principles. In particular, in line with the Company's core business, this commitment is implemented through the channeling of financing to Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs).

Throughout 2025, the Company encountered a number of external challenges in implementing sustainable finance among MSME actors. These challenges included climate change-related natural disasters, geopolitical uncertainty, and disruptive technological developments, which were identified as key factors requiring anticipation and mitigation. In response to these challenges, PNM has established various strategies and solutions, including the development of new business models in the Group-Based Empowerment Program (PKM) using a group selection approach; strengthening community-based advanced products as a pathway for MSMEs to move up the value chain, reinforcing the Ultra Micro ecosystem through the role of group leaders, enhancing financial literacy among customers through more comprehensive empowerment activities, strengthening human capital management, improving digital access and digital literacy for ultra-micro customers and PNM internal workforce, upgrading IT architecture to optimize business processes and enhance IT security to an adequate and optimal level; increasing the maturity of compliance, governance, and risk management, and optimizing the contribution of subsidiaries to the Company.

In addition to external challenges, PNM also encountered several internal issues in the implementation of sustainable finance, including the need to strengthen the capacity and understanding of human resources related to sustainable finance principles, the lack of full integration of policies and business processes, and the need to further improve the availability and quality of ESG data. Furthermore, there is a need to expand the Company's sustainable finance-based core business. To address these issues, the Company has undertaken strategic measures and solutions, including the development of a Sustainable Finance framework, enhancement of existing products to support the expansion of a sustainable finance-based core business, preparation of impact reports and subsequent bond issuance; identification and analysis of climate-related risks, calculation of Scope 1, 2, and 3 emissions, particularly related to official travel activities; implementation of financial literacy programs, education, and training in sustainable finance, execution of CSR programs with impacts aligned to the Sustainable Development Goals (SDGs), preparation of sustainability reports based on the IFRS S1 and S2 approach, human rights risk identification studies at the Head Office and selected branch offices, development of new products supporting the expansion of the sustainable finance-based core business, including the Waste Development and Management Group (KEMBANGS), and productivity enhancement through the use of the *Diary AO* application, which is designed to manage and organize Account Officers' daily activities more effectively and efficiently.





07

**Kinerja  
Keberlanjutan**

*Sustainability Performance*







## Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan [OJK F.1] Building Sustainability Culture [OJK F.1]

Dukungan PNM terhadap penerapan keuangan berkelanjutan diwujudkan melalui berbagai kebijakan antara lain penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, pemetaan produk dan layanan yang ditawarkan kepada nasabah berdasarkan Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan, serta pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Bagi Perusahaan, pelaksanaan TJSL memiliki makna strategis karena mencerminkan komitmen PNM untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan bagi Perusahaan, komunitas lokal, dan masyarakat luas.

Untuk memastikan penerapan keuangan berkelanjutan yang efektif, PNM berpedoman pada delapan prinsip sebagai panduan, yaitu:

- a. Prinsip investasi bertanggung jawab;
- b. Prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan;
- c. Prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup;
- d. Prinsip tata kelola;
- e. Prinsip komunikasi yang informatif;
- f. Prinsip inklusif;
- g. Prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas; dan
- h. Prinsip koordinasi dan kolaborasi

Berpedoman pada 8 (delapan) prinsip tersebut, PNM membangun dan meneguhkan budaya keberlanjutan yang terus disosialisasikan kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan. Upaya membangun budaya keberlanjutan dilakukan melalui berbagai media dan kesempatan antara lain situs/*website* resmi, media sosial, serta pertemuan antara manajemen dan karyawan maupun dengan mitra kerja, masyarakat, dan pemangku kepentingan eksternal lainnya, baik yang terjadwal maupun insidental.

Selaras dengan bidang usaha yang dijalankan, budaya keberlanjutan di PNM tercermin dalam penyediaan pembiayaan kepada UMKM berdasarkan kaidah keuangan berkelanjutan, termasuk memastikan tidak adanya dampak negatif terhadap lingkungan, pelaksanaan program TJSL, serta penerapan operasional kantor yang ramah lingkungan. Implementasi operasional ramah lingkungan dilakukan melalui berbagai inisiatif efisiensi, seperti pengurangan konsumsi energi listrik, bahan bakar, air, dan penggunaan kertas. Selain itu, PNM juga secara konsisten menerapkan budaya keberlanjutan melalui penciptaan lingkungan kerja yang aman dan sehat sesuai prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), dengan tujuan mencegah terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja.

PNM encourages the implementation of sustainable finance through various policies, including the preparation of a Sustainable Finance Action Plan, mapping of products and services offered to clients based on Sustainable Business Activity Criteria, and the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) programs. For the Company, CSR programs have strategic significance as they reflect PNM commitment to contributing to sustainable economic development while improving the quality of life and the environment for the Company, local communities, and society at large.

To ensure effective implementation of sustainable finance, PNM follows eight guiding principles:

- a. Principle of responsible investment;
- b. Principle of sustainable business strategy and practices;
- c. Principle of social and environmental risk management;
- d. Principle of governance;
- e. Principle of informative communication;
- f. Principle of inclusivity;
- g. Principle of developing priority leading sectors; and
- h. Principle of coordination and collaboration.

Guided by these 8 (eight) principles, PNM has built and continuously strengthened a sustainability culture, which is consistently communicated to all levels of management and employees. Efforts to foster this culture are carried out through various media and opportunities, including the official website, social media, meetings between management and employees, and interactions with business partners, communities, and other external stakeholders, both scheduled and incidental.

Aligned with its business operations, PNM sustainability culture is reflected in the provision of financing to MSMEs based on sustainable finance principles, including ensuring no negative environmental impact, conducting CSR programs, and implementing environmentally friendly office operations. Green operational initiatives include efficiency measures such as reducing electricity, fuel, water, and paper consumption. In addition, PNM consistently promotes sustainability by creating a safe and healthy work environment in accordance with Occupational Health and Safety (OHS) principles, aiming to prevent workplace accidents and occupational illnesses.





08

# Kinerja Ekonomi Keberlanjutan

*Sustainable Economic Performance*





## Kinerja Ekonomi Keberlanjutan Sustainable Economic Performance

Sebagai bagian dari industri jasa keuangan di Indonesia, PNM berkomitmen untuk menerapkan keuangan berkelanjutan sesuai POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Berdasarkan regulasi tersebut, keuangan berkelanjutan merupakan dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui penyesuaian aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial.

Bagi PNM, keselarasan ketiga aspek tersebut merupakan keharusan karena peran perusahaan tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan serta menunjukkan kepedulian terhadap isu sosial. PNM meyakini bahwa integrasi aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial menjadi fondasi penting dalam mewujudkan bisnis yang berkesinambungan serta mencapai kinerja optimal.

As part of Indonesia's financial services industry, PNM is committed to implementing sustainable finance in accordance with POJK Number 51/POJK.03/2017 concerning Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies. Under this regulation, sustainable finance is defined as comprehensive support from the financial services sector to promote sustainable economic growth by aligning economic, environmental, and social aspects.

For PNM, alignment of these three aspects is essential, as the Company's role goes beyond generating profits to also maintaining environmental sustainability and addressing social issues. PNM believes that integrating economic, environmental, and social considerations forms a critical foundation for building a sustainable business and achieving optimal performance.

### Sekilas Ekonomi Global dan Nasional Overview of Global and National Economy

Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 menghadapi tantangan signifikan akibat ketegangan perdagangan internasional, risiko geopolitik, dan dinamika pascapandemi yang belum sepenuhnya pulih. Menurut IMF, proyeksi awal pertumbuhan global sebesar 3,3% direvisi turun menjadi sekitar 2,8% karena dampak kebijakan tarif AS dan hambatan perdagangan lainnya. Meski kemudian diperbaiki menjadi 3,0–3,2% seiring meredanya sebagian tekanan global dan perbaikan kondisi keuangan, IMF menekankan bahwa laju pertumbuhan masih berada di bawah tren historis sebelum pandemi.

Pandangan Bank Dunia bahkan lebih konservatif, memperkirakan pertumbuhan ekonomi global hanya mencapai 2,3% pada 2025. Laporan *Global Economic Prospects* mencatat hampir 70% negara mengalami pemotongan proyeksi akibat lemahnya investasi, penurunan permintaan global, dan ketidakpastian perdagangan. Meski resesi global tidak diperkirakan, lembaga ini menekankan bahwa dekade 2020-an berpotensi menjadi periode pertumbuhan global terendah sejak 1960-an jika tren perlambatan berlanjut.

Dari sisi regional, tekanan global ini memengaruhi perdagangan, aliran modal, dan harga komoditas, sehingga negara-negara berkembang harus beradaptasi dengan kondisi yang lebih ketat. Penurunan laju pertumbuhan di banyak ekonomi utama juga meningkatkan risiko volatilitas pasar keuangan dan memperlambat pemulihan pascapandemi, terutama bagi sektor-sektor yang bergantung pada ekspor dan rantai pasok internasional.

Global economic growth in 2025 encountered significant challenges from international trade tensions, geopolitical risks, and post-pandemic dynamics that had not yet fully normalized. According to the International Monetary Fund (IMF), the initial global growth projection of 3.3% was revised downward to approximately 2.8% due to the impact of U.S. tariff policies and other trade barriers. Although the forecast was later adjusted upward to 3.0–3.2% as some global pressures eased and financial conditions improved, the IMF emphasized that growth remains below its pre-pandemic historical trend.

The World Bank presented an even more conservative outlook, projecting global economic growth of only 2.3% in 2025. Its *Global Economic Prospects* report noted that nearly 70% of countries experienced downward revisions to their growth forecasts due to weak investment, declining global demand, and persistent trade uncertainty. While a global recession is not anticipated, the institution warned that the 2020s could become the slowest decade of global growth since the 1960s should the current deceleration persist.

At the regional level, these global pressures have affected trade flows, capital movements, and commodity prices, requiring developing countries to adapt to tighter external conditions. Slower growth across many major economies has also heightened the risk of financial market volatility and delayed post-pandemic recovery, particularly in sectors reliant on exports and international supply chains.



Di tengah tantangan global tersebut, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat. Berdasarkan data resmi BPS, pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 mencapai 5,11%, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pencapaian ini didorong oleh konsumsi domestik yang tetap tinggi, investasi swasta dan pemerintah yang bertumbuh, serta ekspor yang memberikan kontribusi positif meskipun menghadapi perlambatan di pasar global.

Capaian ini menunjukkan bahwa Indonesia berhasil menjaga momentum pertumbuhan meski diwarnai perlambatan ekonomi global. Sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan upaya penguatan sektor riil terbukti efektif dalam mendukung daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga stabilitas makroekonomi. Dengan demikian, ekonomi nasional tetap *resilient*, sekaligus menunjukkan kemampuan Indonesia menghadapi dinamika global yang penuh ketidakpastian.

### Kinerja Sektor Pembiayaan UMKM MSME Financing Sector Performance

Kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah dinamika ekonomi global. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM yang berjumlah 65,5 juta masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Angka tersebut menegaskan peran strategis UMKM dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik, terutama saat terjadi perlambatan pertumbuhan global.

Dari sisi pertumbuhan usaha dan akses pembiayaan, sektor UMKM pada 2025 turut didukung oleh kebijakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan perbankan yang terus meningkat. Bank Indonesia mencatat bahwa pertumbuhan kredit UMKM tetap positif sejalan dengan membaiknya permintaan domestik dan stabilitas inflasi. Sementara itu, laporan stabilitas sektor jasa keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan kualitas pembiayaan UMKM relatif terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL) yang terkendali, mencerminkan perbaikan tata kelola dan kemampuan bayar pengusaha.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik, aktivitas produksi dan perdagangan yang melibatkan pengusaha skala mikro dan kecil mengalami peningkatan sepanjang 2025 didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di atas 5% pada tahun 2025 memberikan ruang ekspansi bagi UMKM, khususnya di sektor perdagangan, industri pengolahan, makanan dan minuman, serta ekonomi kreatif. Digitalisasi dan pemanfaatan *platform* daring juga semakin mendorong perluasan pasar UMKM, baik di dalam negeri maupun untuk ekspor.

Amid these global challenges, Indonesia's economy demonstrated strong resilience. Based on official data from Statistics Indonesia (BPS), national economic growth in 2025 reached 5.11%, an increase compared to the previous year. This achievement was supported by sustained domestic consumption, growth in both private and public investment, and exports that continued to contribute positively despite slowing global markets.

This performance reflected Indonesia's success in maintaining growth momentum despite the global economic deceleration. The synergy among fiscal and monetary policies, along with efforts to strengthen the real sector, has proven effective in supporting purchasing power, generating employment, and preserving macroeconomic stability. As a result, the national economy has remained resilient, demonstrating Indonesia's capacity to navigate an increasingly uncertain global environment.

The performance of Indonesia's Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in 2025 demonstrated strong resilience amid global economic dynamics. Based on data from the Ministry of Cooperatives and SMEs, approximately 65.5 million MSMEs have continued to serve as the backbone of the national economy, contributing around 61% to Gross Domestic Product (GDP) and absorbing more than 97% of the national workforce. These figures reaffirm the strategic role of MSMEs in maintaining domestic economic stability, particularly during periods of global economic slowdown.

In terms of business growth and access to financing, the MSME sector in 2025 was supported by the continued expansion of the People's Business Credit (KUR) program and increasing bank financing. Bank Indonesia reported that MSME credit growth remained positive, in line with improving domestic demand and stable inflation. Meanwhile, the Financial Services Authority (OJK) noted in its financial sector stability report that the quality of MSME financing remained relatively sound, with a well-controlled non-performing loan (NPL) ratio, reflecting improved governance and stronger repayment capacity among enterprise.

According to releases from Statistics Indonesia (BPS), production and trade activities involving micro and small enterprises increased throughout 2025, driven by sustained household consumption. Indonesia's economic growth, which exceeded 5% in 2025, provided expansion opportunities for MSMEs, particularly in the trade, manufacturing, food and beverage, and creative economy sectors. Digitalization and the utilization of online platforms further accelerated MSMEs' market expansion, both domestically and for export purposes.

Di sisi kebijakan, pemerintah terus memperkuat ekosistem UMKM melalui program digitalisasi, sertifikasi halal, kemudahan perizinan berbasis risiko, serta integrasi UMKM dalam rantai pasok industri nasional. Kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan sektor keuangan memperkuat transformasi UMKM agar lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Secara keseluruhan, kinerja UMKM tahun 2025 mencerminkan fondasi ekonomi rakyat yang semakin adaptif dan resilien, sekaligus menjadi penopang penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

In terms of policy, the Government continued to strengthen the MSME ecosystem through digitalization initiatives, halal certification programs, risk-based business licensing reforms, and the integration of MSMEs into national industrial supply chains. Cross-ministerial and financial sector collaboration has reinforced MSME transformation toward greater productivity, inclusiveness, and competitiveness. Overall, MSME performance in 2025 reflected an increasingly adaptive and resilient people-centered economic foundation, serving as a key pillar in sustaining national economic growth momentum.



## Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia

### Role of MSMEs in the Indonesian Economy

UMKM memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia karena menjadi kontributor terbesar terhadap aktivitas ekonomi nasional. Dengan proporsi lebih dari 99% dari total unit usaha, UMKM berfungsi sebagai fondasi pertumbuhan dan penggerak utama kegiatan produksi di berbagai sektor. Kontribusinya terhadap PDB yang mencapai sekitar 60% menjadikan keberlanjutan sektor ini krusial bagi stabilitas ekonomi, ketahanan sosial, serta terciptanya pertumbuhan yang lebih inklusif.

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in Indonesia's economy as the largest contributors to national economic activity. Representing more than 99% of total business units, MSMEs serve as the foundation for growth and a key driver of production across multiple sectors. Their contribution to GDP, reaching approximately 60%, makes the sustainability of this sector crucial for economic stability, social resilience, and inclusive growth.

Dari sisi sosial, UMKM merupakan penyerap tenaga kerja terbesar, menampung sekitar 96% angkatan kerja nasional. Kapasitas ini memperkuat inklusi ekonomi, membuka peluang bagi kelompok rentan, dan mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Melalui penciptaan peluang usaha, peningkatan pendapatan, dan pengembangan kapasitas komunitas, UMKM memainkan peran signifikan dalam pembangunan ekonomi lokal. Dukungan perusahaan dan lembaga keuangan terhadap sektor ini menjadi bagian penting dari strategi penciptaan nilai jangka panjang, baik melalui pembiayaan, pendampingan, maupun program pemberdayaan.

From a social perspective, MSMEs are the largest employers, absorbing around 96% of the national workforce. This capacity strengthens economic inclusion, provides opportunities for vulnerable groups, and promotes equitable development across regions. By promoting business opportunities, driving income growth, and enhancing community skills, MSMEs serve as key drivers of local economic development. Support from companies and financial institutions for this sector is an essential component of long-term value creation strategies, whether through financing, mentoring, or empowerment programs.

Meski memberikan kontribusi yang besar, UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan struktural, termasuk keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya literasi keuangan, serta kapasitas tata kelola yang belum optimal. Di sisi lain, UMKM merupakan kelompok usaha yang rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti gangguan rantai pasok, fluktuasi harga bahan baku, dan meningkatnya kejadian cuaca ekstrem. Namun, peluang transformasi tetap terbuka, antara lain melalui adopsi teknologi rendah karbon, peningkatan efisiensi energi, digitalisasi rantai pasok, serta penerapan praktik usaha berkelanjutan.

Despite their substantial contributions, MSMEs still face several structural challenges, including limited access to financing, low financial literacy, and suboptimal governance capacity. Additionally, MSMEs are highly vulnerable to the impacts of climate change, such as supply chain disruptions, fluctuations in raw material prices, and increasing frequency of extreme weather events. However, transformative opportunities remain available, including the adoption of low-carbon technologies, improved energy efficiency, supply chain digitalization, and the implementation of sustainable business practices.

Becermin pada kondisi faktual tersebut, penguatan UMKM menjadi elemen penting dalam strategi keberlanjutan nasional maupun korporasi. Perusahaan, lembaga pembiayaan, dan industri perbankan memiliki peran vital dalam membangun ekosistem UMKM yang lebih tangguh, inklusif, dan berketahanan iklim. Mengingat besarnya dampak UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, serta potensi mitigasi risiko sosial yang dihasilkan, pengembangan sektor ini layak ditetapkan sebagai topik material dalam kerangka keberlanjutan.

Reflecting on these realities, strengthening MSMEs has become a key element in both national and corporate sustainability strategies. Companies, financial institutions, and the banking industry play a vital role in building a more resilient, inclusive, and climate-adaptive MSME ecosystem. Given MSMEs' significant impact on economic growth, job creation, and potential for social risk mitigation, the development of this sector is deemed a material topic within the sustainability framework.



## Peran PNM dalam Pengembangan UMKM Role of PNM in MSMEs Development

PNM memainkan peran yang semakin strategis dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui program unggulannya, PNM Mekaar, Perusahaan berhasil menjangkau 23,1 juta nasabah ultra mikro per 31 Desember 2025. Dengan menyediakan akses pembiayaan yang mudah, terjangkau, dan tanpa agunan, program ini membuka kesempatan bagi pengusaha ultra mikro terutama perempuan untuk memulai, mempertahankan, dan mengembangkan usaha mereka. Hingga akhir 2025, total penyaluran pembiayaan PNM Mekaar tercatat mencapai Rp67.123,42 miliar.

Selain Mekaar, Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) yang dikelola PNM juga berperan penting dalam memperkuat ekosistem UMKM nasional. ULaMM hadir sebagai solusi bagi pengusaha UMKM yang belum memperoleh layanan dari perbankan konvensional, dengan menyediakan pembiayaan yang fleksibel serta pendampingan usaha. Komitmen ini sejalan dengan tekad Perusahaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kapasitas usaha masyarakat di berbagai sektor.

Peran PNM menjadi semakin signifikan karena tidak hanya berfokus pada penyediaan modal, tetapi juga menawarkan pendampingan dan pelatihan komprehensif bagi para nasabah. Melalui pendekatan tiga pilar yaitu Modal Finansial, Modal Intelektual, dan Modal Sosial, PNM memastikan bahwa pengusaha UMKM memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan jejaring yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas usaha. Proses pendampingan ini dilakukan melalui pertemuan kelompok mingguan, yang menjadi ruang bagi nasabah untuk berbagi pengalaman, membangun solidaritas, dan memperkuat kapasitas usaha secara berkelanjutan.

Kehadiran PNM turut memberikan dampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal. Dengan mendorong pertumbuhan usaha ultra mikro, Perusahaan berkontribusi pada peningkatan penyerapan tenaga kerja di sekitar lingkungan usaha nasabah. Dampak ini tidak hanya membantu mengurangi tingkat pengangguran, tetapi juga memperkuat pemerataan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

Untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanan, PNM terus memperbesar jaringan operasionalnya. Per 31 Desember 2025, Perusahaan telah memiliki 4.656 kantor layanan yang tersebar di 36 provinsi, 452 kabupaten/kota, dan 3.114 kecamatan di seluruh Indonesia. Ekspansi ini memungkinkan PNM menjangkau lebih banyak pengusaha UMKM, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Dengan demikian, PNM tidak hanya memperkuat keberlanjutan UMKM, tetapi juga memberikan kontribusi penting terhadap upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah.

PNM continues to play an increasingly strategic role in driving the growth of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Through its flagship program, PNM Mekaar, the Company has successfully reached 23.1 million ultra-micro customers as of 31 December 2025. By providing financing that is accessible, affordable, and collateral-free, this program creates opportunities for ultra-micro entrepreneurs particularly women to start, sustain, and grow their businesses. As of the end of 2025, total financing disbursed under the PNM Mekaar program reached IDR67,123.42 billion.

In addition to Mekaar, PNM Microfinance Service Units (ULaMM) play a vital role in strengthening the national MSME ecosystem. ULaMM serves as a solution for MSME entrepreneurs who have not yet accessed conventional banking services, offering flexible financing and business mentoring. This commitment aligns with the Company's mission to support people-centered economic growth by enhancing the business capacities of communities across various sectors.

PNM role extends beyond providing capital, offering comprehensive mentoring and training for its clients. Through a three-pillar approach, namely Financial Capital, Intellectual Capital, and Social Capital, PNM ensures that MSME entrepreneurs acquire the knowledge, skills, and networks necessary to improve business productivity. Mentoring is delivered through weekly group meetings, providing a space for clients to share experiences, build solidarity, and strengthen business capacities sustainably.

PNM presence also contributes to local job opportunities. By promoting the growth of ultra-micro enterprises, the Company helps increase employment around its clients' businesses. This impact not only reduces unemployment but also supports more equitable economic development across regions in Indonesia.

To expand its reach and enhance service quality, PNM continues to strengthen its operational network. As of 31 December 2025, the Company operated 4,656 service offices across 36 provinces, 452 regencies/cities, and 3,114 sub-districts throughout Indonesia. This expansion enables PNM to reach a broader range of MSME actors, including those in remote and underserved areas. Through these efforts, PNM not only reinforces the sustainability of MSMEs but also contributes significantly to the Government's initiatives to reduce regional economic disparities.





## Strategi Bisnis dan Operasional PNM Tahun 2025 [GRI 3-3]

PNM Business and Operational Strategy for 2025 [GRI 3-3]

Memasuki tahun 2025, PNM mengarahkan strategi bisnisnya pada penguatan kualitas pembiayaan dan pemberdayaan nasabah. Setelah berhasil memenuhi target penyaluran melalui PNM Mekaar sebesar Rp68,23 triliun dan ULaMM sebesar Rp1,72 triliun hingga akhir tahun 2024, dan jumlah nasabah sebanyak 14,40 juta orang, PNM mengambil pelajaran penting bahwa keberlanjutan usaha para pengusaha ultra mikro lebih ditentukan oleh kualitas pendampingan daripada pertumbuhan jumlah nasabah semata. Oleh karena itu, strategi 2025 tidak lagi menekankan ekspansi agresif, melainkan memastikan setiap nasabah mendapatkan dukungan yang memadai agar mampu mengembangkan usaha dan naik kelas.

Mandat tersebut juga sejalan dengan arahan pemerintah yang menekankan pentingnya penguatan konten pemberdayaan. Untuk itu, PNM memprioritaskan pengembangan kapasitas usaha melalui materi pelatihan yang lebih relevan, tata kelola usaha sederhana, peningkatan literasi keuangan, serta mitigasi risiko usaha sehari-hari. Mekanisme kelompok dan pertemuan mingguan tetap menjadi fondasi pemberdayaan, karena terbukti efektif dalam mengembangkan modal sosial, kedisiplinan, dan ketahanan usaha para perempuan prasejahtera yang menjadi mayoritas nasabah PNM.

Untuk mendukung pertumbuhan yang sehat, PNM menargetkan jumlah nasabah mencapai 16 juta pada 2025. Peningkatan tersebut diimbangi dengan perluasan program pelatihan di mana setiap hari PNM menyelenggarakan sekitar 60 kegiatan pemberdayaan, mencakup pelatihan, *coaching* dan *mentoring*. Sepanjang tahun, kegiatan pemberdayaan tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 15.000 sesi, memastikan bahwa setiap nasabah memiliki akses terhadap pengetahuan yang dapat meningkatkan daya saing usaha. Pendampingan intensif ini juga menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga rasio kredit bermasalah tetap rendah.

PNM juga memperluas jangkauan layanannya ke segmen masyarakat yang selama ini belum terjangkau lembaga keuangan formal, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen PNM untuk membuka akses pembiayaan dan peluang usaha bagi kelompok *unbankable* dan *invisible* market yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Meskipun secara bisnis wilayah 3T membutuhkan waktu lebih lama untuk menghasilkan keuntungan, PNM memandang ekspansi ini sebagai investasi jangka panjang yang akan memperkuat ketahanan ekonomi lokal sekaligus mendukung inklusi keuangan nasional.

Dari sisi kinerja, PNM menargetkan pertumbuhan laba bersih dua digit pada 2025 dengan mengandalkan peningkatan kualitas kredit, efisiensi operasional, dan kolaborasi bisnis yang semakin intens. Sepanjang 2024, PNM mencatatkan laba Rp1,50 triliun dan pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 9,64%, menjadi landasan kuat untuk pertumbuhan pada tahun berikutnya. Dengan fokus pada pemberdayaan, manajemen risiko yang lebih terintegrasi, serta perluasan layanan untuk

Entering 2025, PNM focuses its business strategy on strengthening the quality of financing and client empowerment. After achieving financing disbursement targets of IDR68.23 trillion through PNM Mekaar and IDR1.72 trillion through ULaMM by the end of 2024, and serving 14.40 million clients, PNM has drawn an important lesson, namely the sustainability of ultra-micro enterprises depends more on the quality of mentoring than on mere client growth. Therefore, the 2025 strategy emphasized ensuring that every client received adequate support to develop and upscale their business, rather than pursuing aggressive expansion.

This mandate aligned with government directives emphasizing the importance of empowerment content. PNM has prioritized capacity building through more relevant training materials, simple business governance, improved financial literacy, and mitigation of daily business risks. Group mechanisms and weekly meetings have remained the foundation of empowerment, having proven effective in developing social capital, discipline, and business resilience among underprivileged women, who comprise the majority of PNM clients.

To support healthy growth, PNM targeted 16 million clients in 2025. This increase was complemented by the expansion of training programs, with approximately 60 empowerment activities conducted daily, including training, coaching, and mentoring. Throughout the year, these activities were expected to exceed 15,000 sessions, ensuring that every client had access to knowledge that enhanced business competitiveness. This intensive mentoring also played a critical role in maintaining a low non-performing loan ratio.

PNM has also been expanding its services to segments of the population previously underprivileged by formal financial institutions, including regions classified as Frontier, Outermost, and Disadvantaged (3T). This initiative demonstrates PNM commitment to providing access to finance and business opportunities for the unbanked and invisible market groups, which hold significant growth potential. While business operations in 3T areas may take longer to generate returns, PNM views this expansion as a long-term investment that strengthens local economic resilience while supporting national financial inclusion.

From a performance perspective, PNM targeted double-digit net profit growth in 2025, relying on enhanced credit quality, operational efficiency, and intensified business collaboration. In 2024, PNM recorded a net profit of IDR1.50 trillion with net interest income growth of 9.64%, providing a solid foundation for growth in the following year. By focusing on empowerment, more integrated risk management, and expanded services for underserved segments, PNM is confident in its ability to improve





segmen prasejahtera, PNM optimistis dapat meningkatkan kinerja bisnis sekaligus menciptakan dampak sosial yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

Implementasi berbagai strategi tersebut merupakan penjabaran langsung dari inisiatif strategis Perusahaan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025. Penyusunan RKAP yang memuat sasaran kinerja ekonomi dan informasi pendukung lainnya dilakukan sebagai tindak lanjut atas Keputusan Menteri BUMN No. KEP-101/MBU/2002 tentang Penyusunan RKAP BUMN. Tanggung jawab atas pencapaian target pendapatan berada pada Divisi Operasi dan *Business Support*, sedangkan pengelolaan aspek keuangan menjadi kewenangan Divisi Keuangan dan Pendanaan. Adapun pengelolaan investasi masyarakat dilaksanakan oleh Sekretariat Perusahaan.

Untuk memastikan kinerja ekonomi Perusahaan berjalan sesuai target, PNM melakukan pemantauan berkala yang dilaporkan melalui laporan manajemen dan dibahas pada tingkat Direksi serta Dewan Komisaris. Langkah ini dilakukan untuk memastikan target kinerja ekonomi dapat tercapai secara optimal. Selain itu, PNM melaksanakan audit operasional rutin pada setiap Unit Mekaar, Unit ULaMM dan Cabang PNM serta melakukan audit tanpa pemberitahuan sebelumnya pada unit/cabang tertentu sesuai kebutuhan. [GRI 3-3]

Adapun inisiatif strategis PNM dalam menjalankan operasional bisnis tahun 2025 selengkapnya seperti dimuat dalam RKAP Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia
  - a. Keunggulan Proses: PKM *re-engineering*;
  - b. Pemberdayaan *Group Leader*;
  - c. Program Pemberdayaan 2.0;
  - d. Optimalisasi Perusahaan Anak;
  - e. Mengakselerasi Perbaikan Kualitas Pembiayaan.
2. Inovasi Model Bisnis
  - a. Inovasi produk.
3. Kepemimpinan Teknologi
  - a. Digitalisasi dan *Upgrading IT*.
4. Peningkatan Investasi
  - a. Tata Kelola dan Manajemen Risiko;
  - b. *Design ICoFR & ESG*.
5. Pengembangan Talenta
  - a. Penguatan Pengelolaan *Human Capital*.

### Kinerja Ekonomi PNM Tahun 2025 PNM Economic Performance in 2025

PNM menyadari bahwa keberhasilan implementasi strategi dan operasional dalam mencapai target RKAP 2025 sangat dipengaruhi oleh dukungan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Untuk memperoleh dukungan tersebut, Perusahaan secara konsisten melakukan sosialisasi atas berbagai strategi yang dijalankan. Kepada pemangku kepentingan internal, sosialisasi dilakukan melalui beragam media dan kesempatan, termasuk rapat manajemen yang terjadwal maupun pertemuan insidental. Upaya sosialisasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembangunan budaya keberlanjutan di lingkungan Perusahaan.

business performance while generating broader and sustainable social impact in Indonesia.

The implementation of these strategies is a direct reflection of the Company's strategic initiatives outlined in the Company's 2025 Work Plan and Budget (RKAP). The RKAP, which includes economic performance targets and supporting information, was prepared in accordance with Minister of SOE Regulation Number KEP-101/MBU/2002 on preparation of SOE RKAP. Responsibility for achieving revenue targets lies with the Operations and Business Support Division, while financial management falls under the Finance and Funding Division. Public investment management is handled by the Corporate Secretariat.

To ensure the Company's economic performance aligns with its targets, PNM conducts periodic monitoring, which is reported through management reports and discussed at the level of the Board of Directors and the Board of Commissioners. This measure is taken to ensure that economic performance targets can be achieved optimally. In addition, PNM carries out routine operational audits at each Mekaar Unit, ULaMM Unit, and PNM Branch, as well as unannounced audits at selected units/branches as needed. [GRI 3-3]

The strategic initiatives of PNM in executing business operations for 2025, as outlined in the Company's 2025 Work Plan and Budget (RKAP), are as follows:

1. Economic and Social Value for Indonesia
  - a. Process Excellence: PKM Re-engineering;
  - b. Empowerment of Group Leaders;
  - c. Empowerment Program 2.0;
  - d. Optimization of Subsidiaries;
  - e. Accelerating Improvement of Financing Quality.
2. Business Model Innovation
  - a. Product Innovation.
3. Technology Leadership
  - a. Digitalization and IT Upgrading.
4. Investment Enhancement
  - a. Governance and Risk Management;
  - b. ICoFR & ESG Design.
5. Talent Development
  - a. Strengthening Human Capital Management.

PNM recognizes that the successful implementation of its strategy and operations in achieving the 2025 RKAP targets depended heavily on support from both internal and external stakeholders. To secure this support, the Company consistently communicated its strategies. For internal stakeholders, communication was conducted through various channels and opportunities, including scheduled management meetings as well as ad hoc gatherings. This communication also contributed to fostering a sustainability culture within the Company.

Sementara itu, kepada pemangku kepentingan eksternal, seperti pemerintah, regulator, pemasok, dan masyarakat, sosialisasi dilakukan melalui pertemuan terjadwal maupun insidental, *public expose* melalui situs web, media sosial, media massa, dan kanal komunikasi lainnya.

Sejalan dengan proses sosialisasi tersebut, manajemen PNM bersama seluruh karyawan secara konsisten melaksanakan inisiatif strategis dan operasional sepanjang tahun 2025. Pelaksananya dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan solusi cepat dapat ditetapkan apabila muncul deviasi atau hambatan. Komitmen ini menjadi landasan tercapainya kinerja positif PNM pada tahun 2025, dengan hasil sebagai berikut:

For external stakeholders, including the government, regulators, suppliers, and the broader community, communication was carried out through scheduled and ad hoc meetings, public exposés via the Company website, social media, mass media, and other communication channels.

Aligned with this communication process, PNM management and all employees consistently implemented strategic and operational initiatives throughout 2025. Execution was monitored and evaluated continuously to ensure that swift solutions were implemented whenever deviations or obstacles arise. This commitment established the foundation for PNM positive performance in 2025, with the following results:

**Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Produksi/Operasional Tahun 2022-2025 [OJK F.2]**

Table of Comparison between Target and Realization of Production/Operations for 2022-2025 [OJK F.2]

Tahun Year	Pinjaman yang Diberikan Loans			Pembiayaan Modal Capital Financing		
	Target RKAP (Rp Miliar) RKAP Target (Billion Rupiah)	Realisasi (Rp Miliar) Realization (Billion Rupiah)	%	Target RKAP (Rp Miliar) RKAP Target (Billion Rupiah)	Realisasi (Rp Miliar) Realization (Billion Rupiah)	%
2025	44.709,95	44.741,62	100,07	1.914,88	1.694,39	88,49
2024	47.450,78	43.591,42	91,87	1.405,07	1.438,82	102,40
2023	46.234,55	46.042,21	99,58	1.331,59	941,50	70,70
2022	36.661,94	38.442,56	104,86	1.134,28	913,15	80,50

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2025, pinjaman yang diberikan sebesar Rp44.741,62 miliar atau 100,07% dari target sebesar Rp44.709,95 miliar. Adapun pembiayaan modal tercatat sebesar Rp1.694,39 miliar atau 88,49% dari target sebesar Rp1.914,88 miliar. Pencapaian realisasi pembiayaan tersebut di atas dipengaruhi oleh ada peningkatan porsi produk dengan plafon yang lebih besar pada pinjaman yang diberikan meningkatkan realisasi terhadap RKAP. Di sisi lain, tidak tercapainya target pembiayaan modal secara langsung disebabkan oleh peningkatan realisasi *write-off* (WO) di PNM VC menjadi Rp120,3 miliar, melampaui pagu *write-off* pada RKAP yaitu sebesar Rp60 miliar.

Sementara itu, realisasi pendapatan usaha tercatat sebesar Rp16.922,52 miliar, atau 99,8% dari target sebesar Rp16.952,21 miliar. Adapun laba bersih terbilang sebesar Rp1.139,13 miliar atau 95,00% dari target sebesar Rp1.198,98 miliar. Pencapaian pendapatan usaha dan laba bersih belum memenuhi target. Hal ini disebabkan oleh pergeseran portofolio ke produk berplafon besar dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah, yang berdampak pada penyusutan margin keuntungan.

Based on the table above, in 2025, total loans disbursed reached IDR44,741.62 billion, or 100.07% of the target of IDR44,709.95 billion. Meanwhile, capital financing amounted to IDR1,694.39 billion, or 88.49% of the target of IDR1,914.88 billion. The realization of financing as described above was influenced by an increased proportion of higher-ceiling loan products, which improved realization against the RKAP. On the other hand, the capital financing target was not achieved, primarily due to the higher realization of write-offs (WO) at PNM VC, which reached IDR120.3 billion, exceeding the RKAP write-off ceiling of IDR60 billion.

Meanwhile, operating revenue stood at IDR16,922.52 billion, or 99.8% of the target of IDR16,952.21 billion. Net profit amounted to IDR1,139.13 billion, or 95.00% of the target of IDR1,198.98 billion. The achievement of operating revenue and net profit has not yet met the target. This is due to a shift in the portfolio toward high-value products with lower interest rates, which has resulted in a narrowing of profit margins.

**Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Usaha Tahun 2022-2025**

Table of Comparison between Target and Realization of Operating Income for 2022-2025

Tahun Year	Pendapatan Usaha Operating Income		
	Target RKAP (Rp Miliar) RKAP Target (Billion Rupiah)	Realisasi (Rp Miliar) Realization (Billion Rupiah)	%
2025	16.952,21	16.922,52	99,8
2024	15.316,83	15.842,29	103,43
2023	14.140,39	14.732,27	104,19
2022	10.223,97	12.929,25	126,46

**Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Laba Bersih Tahun 2022-2025**

Table of Comparison between Target and Realization of Net Profit for 2022-2025

Tahun Year	Laba Bersih Net Profit		
	Target RKAP (Rp Miliar) RKAP Target (Billion Rupiah)	Realisasi (Rp Miliar) Realization (Billion Rupiah)	%
2025	1.198,98	1.139,13	95,00
2024	1.650,12	1.498,03	90,78
2023	1.479,61	1.649,71	111,50
2022	885,59	992,29	112,05

Terkait perbandingan target dan realisasi pembiayaan yang selaras dengan prinsip keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam regulasi, PNM merujuk pada penyaluran pembiayaan kepada segmen UMKM. Penyaluran tersebut terbagi ke dalam dua kategori yaitu PNM Mekaar dan ULaMM. Per 31 Desember 2025, penyaluran PNM Mekaar mencapai Rp67,12 miliar atau 94,01% dari target sebesar Rp71,40 miliar. Sedangkan penyaluran ULaMM terbilang sebesar Rp1.961,57 miliar atau 108,65% dari target sebesar Rp1.805,39 miliar. [OJK F.3]


In relation to the comparison between targets and realization of financing aligned with sustainable finance principles as regulated, PNM refers to financing disbursement to the MSME segment. The disbursement is divided into two categories, namely PNM Mekaar and ULaMM. As of 31 December 2025, PNM Mekaar disbursement reached IDR67.12 billion or 94.01% of the target of IDR71.40 billion. Meanwhile, ULaMM disbursement amounted to IDR1,961.57 billion or 108.65% of the target of IDR1,805.39 billion. [OJK F.3]

**Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pembiayaan kepada UMKM Tahun 2022-2025**

Table of Comparison between Target and Realization of MSME Financing for 2022-2025

Tahun Year	Penyaluran PNM Mekaar Disbursement to PNM Mekaar			Penyaluran ULaMM Disbursement to ULaMM		
	Target RKAP (Rp Miliar) RKAP Target (Billion Rupiah)	Realisasi (Rp Miliar) Realization (Billion Rupiah)	%	Target RKAP (Rp Miliar) RKAP Target (Billion Rupiah)	Realisasi (Rp Miliar) Realization (Billion Rupiah)	%
2025	71.400,00	67.123,42	94,01	1.805,39	1.961,57	108,65
2024	74.320,89	68.228,80	91,80	1.734,18	1.716,02	98,95
2023	66.246,90	68.544,77	103,47	2.100,47	1.635,81	77,88
2022	48.795,74	62.344,87	127,77	3.314,55	1.641,61	49,53




**Distribusi Nilai Ekonomi**  
 Economic Value Distribution

Berdasarkan capaian kinerja tersebut, distribusi nilai ekonomi PNM tahun 2025 yang meliputi nilai ekonomi langsung yang dihasilkan, nilai ekonomi yang didistribusikan, serta nilai ekonomi yang ditahan dapat dihitung. Nilai ekonomi yang dihasilkan mencerminkan manfaat ekonomi yang diperoleh Perusahaan selama menjalankan operasional, termasuk pendapatan bunga dan syariah bersih, pendapatan jasa giro, dividen, serta bunga deposito berjangka. Sementara itu, nilai ekonomi yang didistribusikan merupakan manfaat ekonomi yang dialirkan kepada para pemangku kepentingan, seperti pembayaran upah, pajak, pembayaran kepada pemasok, serta realisasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Adapun nilai ekonomi yang ditahan merupakan selisih antara nilai ekonomi yang dihasilkan dan yang didistribusikan, yang kemudian dialokasikan untuk mendukung pengembangan usaha Perusahaan. Distribusi nilai ekonomi selengkapnya disajikan pada tabel berikut: [GRI 201-1]

Based on the performance achievements, PNM economic value distribution for 2025, including direct economic value generated, economic value distributed, and economic value retained, can be calculated. Direct economic value generated reflects the economic benefits obtained by the Company during operations, including net interest and Sharia revenue, current account service fees, dividends, and term deposit interest. Economic value distributed represents the economic benefits transferred to stakeholders, such as employee wages, taxes, payments to suppliers, and expenditures on Corporate Social Responsibility (CSR) programs. Economic value retained is the difference between economic value generated and distributed, which is then allocated to support the Company's business development. A detailed distribution of economic value is presented in the table below: [GR 201-1]

**Tabel Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan dan Didistribusikan (Rp Juta)**  
 Table of Direct Economic Value Generated and Distributed (Million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022
<b>NILAI EKONOMI DIHASILKAN</b> ECONOMIC VALUE GENERATED				
Pendapatan Bunga dan Syariah - Bersih Interest and Sharia Revenue - Net	13.345.361	13.371.692	12.195.553	10.236.255
Pendapatan dari Jasa Giro, Dividen dan Bunga Deposito Berjangka Revenue from Current Account Services, Dividends and Time Deposit Interest	52.583	49.706	52.355	72.530
Pendapatan dari Kegiatan Manajer Investasi Revenue from Investment Manager Activities	66.046	120.125	41.102	42.080
Keuntungan Terealisasi atas Penjualan Efek Realized Gain on Sale of Securities	81.050	39.299	11.646	116.991
Pendapatan dari Jasa Konsultasi Manajemen Revenue from Management Consulting Services	55.050	11.546	11.900	7.808
Laba Penjualan Aset Tetap Profit on Sale of Fixed Assets	56.019	41.426	544	-
<b>Jumlah</b> Total	<b>13.656.109</b>	<b>13.633.794</b>	<b>12.313.100</b>	<b>10.475.664</b>
<b>NILAI EKONOMI DIDISTRIBUSIKAN</b> ECONOMIC VALUE DISTRIBUTED				
Beban Usaha Operating Expenses	13.028.753	12.557.247	10.685.595	9.358.600
Dividen Dividends	-	-	-	-
Pajak pada Pemerintah Taxes to the Government	380.083	473.617	498.668	263.931
Investasi Masyarakat (CSR) Community Investment (CSR)	63.136	63.287	55.474	72.834
<b>Jumlah</b> Total	<b>13.471.972</b>	<b>13.094.151</b>	<b>11.239.737</b>	<b>9.695.365</b>
<b>NILAI EKONOMI DITAHAN</b> ECONOMIC VALUE RETAINED				
Nilai Ekonomi Dihasilkan - Nilai Ekonomi Didistribusikan Economic Value Generated - Economic Value Distributed	184.137	539.643	1.073.363	780.299

Tabel Rasio Keuangan Tahun 2022-2025 (%)  
Table of Financial Ratios for 2022-2025 (%)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022
Rentabilitas Profitability	3,13	4,07	4,77	3,52
Likuiditas Liquidity	144,77	150,59	156,66	177,59
Solvabilitas Solvency	145,54	141,89	142,16	147,84
Profit Margin Profit Margin	6,40	8,59	11,02	7,60
Debt to Equity (x) Debt to Equity (x)	3,36	3,70	4,63	5,30
Rasio Laba (Rugi) terhadap Jumlah Aset Profit (Loss) to Total Assets Ratio	2,00	2,71	3,27	2,77
Rasio Laba (Rugi) terhadap Ekuitas Profit (Loss) to Equity Ratio	10,79	14,19	19,95	14,10
Rasio Laba (Rugi) terhadap Pendapatan Profit (Loss) to Income Ratio	6,73	8,83	11,11	7,72

Isu Material Material Issue	Metrik Metric	Target Target	Pencapaian 2025 Achievement in 2025
Kinerja Ekonomi (Rp Juta) Economic Performance (IDR Million)	Pendapatan Usaha Operating Income	16.952,21	16.922,52
	Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	1.577.600	1.519.215
	Penyaluran PNM Mekaar PNM Mekaar Disbursement	71.400	67.123,42
	Penyaluran ULaMM ULaMM Disbursement	1.805,39	1.961,57

**Pengungkapan Kerangka Governansi, Pengelolaan dan Pengendalian Aspek Perpajakan**  
Disclosure on Governance, Management, and Control of Tax Matters

PNM menerapkan pendekatan perpajakan yang bertanggung jawab sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik. Pedoman perpajakan Perusahaan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Permodalan Nasional Madani Nomor: SK-078/PNM-DIR/X/25 tentang Pedoman Perpajakan yang selaras dengan peraturan perpajakan nasional, prinsip kehati-hatian, dan etika bisnis yang transparan. Seluruh keputusan terkait pajak ditinjau secara berkala oleh Direksi dan didukung unit kepatuhan untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan terbaru, termasuk kewajiban pemotongan, penyetoran, serta pelaporan. Pendekatan ini tidak hanya ditujukan untuk meminimalkan risiko hukum dan finansial, tetapi juga untuk memastikan kontribusi optimal PNM terhadap penerimaan negara.

Pengelolaan risiko perpajakan di PNM dilaksanakan melalui sistem pengendalian internal yang terintegrasi dengan proses manajemen risiko korporasi. Prosedur pengawasan mencakup pemisahan tugas, audit internal berkala, serta pemantauan kepatuhan atas seluruh aktivitas yang berpotensi menimbulkan implikasi pajak. Secara keseluruhan, tata kelola ini membantu Perusahaan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memitigasi risiko perpajakan secara proaktif serta menegakkan budaya kepatuhan di seluruh tingkatan organisasi.

PNM implements a responsible approach to taxation as part of its good corporate governance. The Company's tax guidelines are established through PT Permodalan Nasional Madani Board of Directors Decision No. SK-078/PNM-DIR/X/25 on Tax Guidelines, which are consistent with national tax regulations, the principle of prudence, and transparent business ethics. All tax-related decisions are regularly reviewed by the Board of Directors and supported by the Compliance Unit to ensure alignment with the latest regulations, including obligations related to withholding, remittance, and reporting. This approach is designed not only to minimize legal and financial risks but also to ensure PNM optimal contribution to national revenue.

Tax risk management at PNM is carried out through an internal control system integrated with the corporate risk management process. Oversight procedures include separation of duties, periodic internal audits, and compliance monitoring for all activities with potential tax implications. Overall, this governance framework enables the Company to identify, assess, and proactively mitigate tax risks, while fostering a culture of compliance at all organizational levels.



PNM menjaga hubungan yang konstruktif dan terbuka dengan otoritas pajak melalui konsultasi rutin, kepatuhan atas permintaan klarifikasi, serta penyampaian informasi yang jujur dan akurat. Bila terdapat interpretasi aturan yang memerlukan klarifikasi, PNM selalu mengedepankan dialog dengan otoritas terkait agar tercapai pemahaman yang selaras dan sesuai ketentuan.

Pendekatan ini memastikan PNM menjalankan praktik perpajakan yang kredibel, profesional, serta mencerminkan komitmen pada keberlanjutan fiskal nasional.

Sebagai perusahaan yang beroperasi sepenuhnya di Indonesia, PNM melaporkan seluruh aktivitas usaha, pendapatan, laba sebelum pajak, pembayaran pajak, dan kewajiban pajak tanggungan dalam satu yurisdiksi. Perusahaan menyampaikan laporan pajak secara lengkap kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk laporan SPT Tahunan serta rekonsiliasi fiskal. Seluruh pembayaran pajak dilakukan tepat waktu dan tercatat dalam sistem pelaporan keuangan yang telah diaudit. Melalui transparansi informasi ini, PNM memastikan kontribusi nyata terhadap perekonomian Indonesia serta menciptakan akuntabilitas publik yang dapat diverifikasi.

Secara keseluruhan, pengungkapan perpajakan PNM mengintegrasikan prinsip kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas sebagai bagian dari strategi keberlanjutan Perusahaan. Pendekatan perpajakan yang bertanggung jawab mendukung stabilitas operasional dan memperkuat kontribusi PNM dalam pembangunan nasional, termasuk pembiayaan inklusif untuk pemberdayaan UMKM. Ke depan, PNM akan terus meningkatkan kualitas tata kelola pajak melalui digitalisasi proses, peningkatan kapasitas SDM, dan penyempurnaan manajemen risiko untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban perpajakan dijalankan secara efektif dan mendukung tujuan keberlanjutan jangka panjang.

Di PNM, pengelolaan pajak dilaksanakan oleh Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan di bawah koordinasi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, yang sekaligus menjadi organ tata kelola tertinggi yang berwenang meninjau dan menyetujui strategi perpajakan Perusahaan. Sebagai bagian dari perencanaan pajak, Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan secara rutin melakukan sosialisasi perpajakan di lingkungan perusahaan. Pada tahun 2025, kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan melalui pelatihan yang dilakukan secara *offline* dan *online*. Per 31 Desember 2025, Perusahaan telah merealisasikan pembayaran pajak sebesar Rp306,05 miliar, menurun dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp566,07 miliar.

PNM maintains constructive and transparent relationships with tax authorities by carrying out routine consultations, responding promptly to requests for clarification, and providing accurate and honest information. Whenever regulatory interpretations require clarification, PNM prioritizes dialogue with the relevant authorities to ensure a shared understanding in accordance with applicable laws.

This approach ensures that PNM tax practices are credible, professional, and aligned with national fiscal sustainability.

As a company operating entirely in Indonesia, PNM reports all business activities, revenue, profit before tax, tax payments, and deferred tax obligations within a single jurisdiction. The Company submits complete tax reports to the Directorate General of Taxes in compliance with applicable regulations, including annual Tax Return Report (SPT) and fiscal reconciliations. All tax payments are made on time and recorded in audited financial reporting systems. Through this transparency, PNM ensures a tangible contribution to Indonesia's economy and maintains verifiable public accountability.

Overall, PNM tax disclosure integrates compliance, transparency, and accountability principles as part of the Company's sustainability strategy. A responsible taxation approach supports operational stability and strengthens PNM contribution to national development, including inclusive financing for MSME empowerment. Moving forward, PNM will continue to enhance tax governance quality through digitalization of processes, capacity building for human resources, and improvement of risk management, ensuring that all tax obligations are executed effectively and in support of long-term sustainability goals.

Division under the coordination of the Director of Finance and Risk Management, who also serves as the highest governance authority responsible for reviewing and approving the Company's tax strategy. As part of tax planning, the Accounting, Management, and Finance Division regularly conducts tax socialization programs within the Company. In 2025, these programs were implemented through training sessions held both offline and online. As of 31 December 2025, the Company realized tax payments amounting to IDR306.05 billion, a decrease compared to IDR566.07 billion recorded in 2024.



### Bantuan Finansial dari Pemerintah Government Financial Assistance

Sejak tahun 2010, Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada BUMN melalui alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) guna memperkuat peran BUMN sebagai penggerak perekonomian nasional. Pada tahun 2025, BP BUMN dan Komisi VI DPR RI menyetujui pemberian PMN kepada 16 BUMN dengan total nilai Rp44,24 triliun. Dalam daftar tersebut, PNM tidak termasuk sebagai penerima. Dengan demikian, pada tahun 2025, Perusahaan tidak menerima dukungan finansial dari Pemerintah, baik dalam bentuk PMN, pembebasan atau kredit pajak, subsidi, hibah investasi, maupun bentuk bantuan lainnya. [GRI 201-4]

Since 2010, the Government has provided special attention to state-owned enterprises (SOEs) through the allocation of State Capital Participation (PMN) to strengthen SOEs' role as drivers of the national economy. In 2025, the Ministry of SOEs and Commission VI of the Indonesian House of Representatives approved PMN allocations for 16 SOEs totaling IDR44.24 trillion. PNM was not included as a recipient. Therefore, in 2025, the Company did not receive any financial support from the Government, including PMN, tax exemptions or credits, subsidies, investment grants, or other forms of assistance. [GRI 201-4]



### Program Pensiun Manfaat Pasti dan Program Pensiun Lainnya [GRI 201-3] Defined Benefit Pension Program and Other Pension Programs [GRI 201-3]

PNM menyelenggarakan program pensiun yang dirancang untuk memberikan manfaat bagi karyawan yang memasuki masa purnabakti sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan loyalitas selama bekerja. Program ini mengatur ketentuan terkait kesejahteraan pensiun dan disusun berdasarkan Peraturan Perusahaan PNM yang merujuk pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Secara khusus, pengelolaan Program Pensiun diatur dalam SK-041/PNM-DIR/V/24 serta SK-014/PNM-DIR/II/24. Mengacu pada SK-041/PNM-DIR/V/24, Program Pensiun mencakup beberapa ketentuan sebagai berikut: [GRI 3-3, 201-3]

PNM operates pension programs designed to provide benefits to employees entering retirement as recognition for their dedication and loyalty during their tenure. These programs outline pension welfare provisions and are developed in accordance with PNM Company Regulations, referencing Law Number 13 of 2003 on Manpower. Specifically, the pension program is managed under SK-041/PNM-DIR/V/24 and SK-014/PNM-DIR/II/24. According to SK-041/PNM-DIR/V/24, the Pension Program includes several provisions as follows: [GRI 3-3, 201-3]

#### Ketentuan Umum

1. Karyawan yang berhak menerima manfaat Program Dana Pensiun adalah Karyawan Tetap.
2. Pembayaran iuran Karyawan akan memotong Upah setiap bulan.
3. Komponen pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berasal dari iuran Karyawan sebesar 1% (satu persen) dan iuran Perusahaan sebesar 5% (lima persen) dari komponen yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
4. Program Dana Pensiun digunakan sebagai pemenuhan kewajiban Perusahaan kepada Karyawan untuk membayar uang pesangon, penghargaan masa bakti, dan/atau uang pisah apabila terjadi PHK atau setelah Karyawan memasuki Usia Pensiun.
5. Program Dana Pensiun dikelola oleh Pihak Pengelola Dana Pensiun yang ditunjuk oleh Perusahaan
6. Apabila terjadi perubahan pada Upah, maka pembayaran iuran akan mengikuti ketentuan Upah yang terbaru.
7. Himpunan iuran yang dibayarkan akan dikelola dan diinvestasikan pada produk investasi yang telah diputuskan oleh Manajemen Perusahaan.

#### General Provisions

1. Eligible participants of the Pension Fund Program are Permanent Employees.
2. Employee contributions will be deducted from monthly salaries.
3. Contribution components consist of 1% from the employee and 5% from the Company of the base amount determined by the Company.
4. The Pension Fund Program fulfills the Company's obligation to provide severance pay, service awards, and/or separation payments in the event of termination or upon reaching retirement age.
5. The Pension Fund Program is managed by the appointed Pension Fund Manager designated by the Company.
6. Any changes in salary will adjust the contribution amounts accordingly.
7. All collected contributions will be managed and invested in investment products approved by Company Management.

#### Persyaratan Karyawan Program Dana Pensiun

1. Karyawan yang didaftarkan pada Program Dana Pensiun adalah Karyawan Tetap yang status kepegawaiannya terikat langsung dengan Perusahaan dan/atau Karyawan Perusahaan yang ditugaskan ke Anak Perusahaan atau Afiliasi Perusahaan dengan jabatan selain Direksi.

#### Employee Eligibility for the Pension Fund Program

1. Registered employees are Permanent Employees directly employed by the Company and/or employees seconded to Subsidiaries or Affiliates, excluding members of the Board of Directors.



2. Program Dana Pensiun Iuran Pasti (PPIP) diberikan kepada Karyawan Tetap dengan masa pengangkatan minimal 5 (lima) tahun.
3. PPDKP diberikan kepada Karyawan yang telah diangkat menjadi Karyawan Tetap. Pada PPDKP terbagi menjadi dua skema, antara lain:
  - a. Program Pengelolaan Dana Kompensasi Pascakerja (PPDKP) dengan skema pesangon diberikan kepada Karyawan Tetap sebelum mencapai masa pengangkatan 5 (lima) tahun; atau
  - b. Program Pengelolaan Dana Kompensasi Pascakerja (PPDKP) sebagai persandingan dana PPIP yang akan diberikan kepada Karyawan Tetap dengan masa pengangkatan minimal 5 (lima) tahun.

### Jenis Program Dana Pensiun

1. Jenis Program Dana Pensiun terdiri dari Program Dana Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dan Program Pensiun Dana Kompensasi Pascakerja (PPDKP).
2. Besaran iuran Program Dana Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dijelaskan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3).
3. Seluruh himpunan iuran pada Program Dana Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dengan hasil pengembangannya akan dicatat dan dibukukan pada rekening masing-masing Karyawan.
4. Program Pensiun Dana Kompensasi Pascakerja (PPDKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan skema pesangon dapat diperhitungkan sebagai bagian dari kewajiban Perusahaan atas pemenuhan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah akibat Pemutusan Hubungan Kerja atau Pensiun.
5. Hasil investasi PPIP menjadi bagian dari manfaat pensiun Karyawan sesuai dengan Undang-Undang berlaku.
6. Hasil Investasi pada PPDKP menjadi hak penuh Perusahaan sebagai cadangan dana manfaat pascakerja.

### Pembayaran Manfaat Program Dana Pensiun

1. Pensiun Normal dibayarkan kepada Karyawan yang telah mencapai Usia Pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
2. Pensiun Dipercepat dibayarkan pada saat Karyawan berhenti bekerja terhitung 5 (lima) tahun sebelum mencapai Usia Pensiun normal. Karyawan dengan status kepegawaian masih aktif tidak diperbolehkan mengajukan Pensiun Dipercepat.
3. Pensiun Ditunda, pada:
  - a. PPIP apabila Karyawan mengalami PHK sebelum mencapai usia Pensiun Dipercepat, maka pembayarannya dilakukan setelah Karyawan mencapai Usia Pensiun Dipercepat; atau
  - b. PPDKP apabila Karyawan mengalami PHK sebelum mencapai usia Pensiun Dipercepat, maka pembayarannya dilakukan sesuai skema yang telah ditentukan oleh Perusahaan.
4. Pensiun Disabilitas yang terdapat pada PPIP dibayarkan kepada Karyawan apabila Karyawan mengalami cacat total tetap, sehingga mengakibatkan ketidakmampuan Karyawan untuk melakukan pekerjaannya.

2. Defined Contribution Pension Program (PPIP) is provided to Permanent Employees with a minimum tenure of 5 years.
3. Post-Employment Compensation Fund (PPDKP) is provided to Permanent Employees and is divided into two schemes:
  - a. The Post-Employment Compensation Fund Management Program (PPDKP) provides severance pay to permanent employees before they reach their five-year term of employment; or
  - b. The Post-Employment Compensation Fund Management Program (PPDKP) as a counterpart to PPIP funds which will be given to Permanent Employees with a minimum appointment period of 5 (five) years.

### Types of Pension Fund Programs

1. Pension Fund Program includes Defined Contribution Pension (PPIP) and Post-Employment Compensation Fund (PPDKP).
2. The amount of contributions to the Defined Contribution Pension Fund Program (PPIP) is explained as referred to in Article 3 paragraph (3).
3. All contributions to the Defined Contribution Pension Fund Program (PPIP) and the results of their development will be recorded and posted to each employee's account.
4. PPDKP contributions under the severance scheme count towards the Company's obligations for severance, service awards, or separation payments upon termination or retirement.
5. Investment returns from PPIP are part of employee retirement benefits, in accordance with applicable laws.
6. Investment returns from PPDKP are the exclusive property of the Company, serving as a reserve for post-employment benefits.

### Pension Benefit Payments

1. Normal Retirement, paid to employees upon reaching the retirement age specified by the Company.
2. Accelerated Retirement is paid when an employee stops working 5 (five) years before reaching the normal retirement age. Employees with active employment status are not permitted to apply for Accelerated Retirement.
3. Deferred Retirement:
  - a. For PPIP, if an employee is terminated before early retirement, payment is deferred until reaching early retirement age.
  - b. For PPDKP, payment follows the scheme defined by the Company.
4. Disability Pension, provided under PPIP in case of permanent total disability preventing the employee from performing their duties.



5. Meninggal Dunia, maka Manfaat Pensiun diberikan secara sekaligus kepada Ahli Waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

### Ketentuan Pembayaran Manfaat Program Dana Pensiun

1. Dalam hal Karyawan terindikasi *fraud* atau sedang menjalani masa skorsing, maka iuran dari Perusahaan akan dihentikan sementara sampai dengan skorsing dicabut.
2. Dalam hal Karyawan mangkir, maka Surat Perintah Bayar untuk manfaat PPDKP dan/atau Surat PHK akan ditahan oleh Perusahaan sampai dengan Karyawan bersangkutan melaporkan pengunduran dirinya kepada Perusahaan.
3. Dalam hal Karyawan terbukti melakukan *fraud* dan mendapatkan sanksi, maka iuran Perusahaan akan dihentikan sementara sampai dengan masa sanksi selesai
4. Dalam hal Karyawan terbukti melakukan *fraud* dan mengundurkan diri atau terjadi PHK, maka iuran Perusahaan akan dihentikan, dan Surat Perintah Bayar untuk PPDKP dan/atau Surat PHK/Surat Pensiun akan ditahan oleh Perusahaan sampai dengan Karyawan yang bersangkutan bertanggung jawab dengan mengembalikan kerugian Perusahaan yang timbul akibat perbuatannya.
5. Semua pembayaran dana pada PPDKP akan dibayarkan berdasarkan instruksi Perusahaan dengan menyampaikan Surat Perintah Bayar kepada Pihak Pengelola Dana Pensiun.

### Pihak Pengelola Dana Pensiun

Perusahaan bekerjasama dengan Pihak Pengelola Dana Pensiun, baik itu Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang memastikan keberlanjutan, keandalan, dan profesionalitas dalam pengelolaan Program Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Lain-lain

1. Pengelolaan, mekanisme, dan pembayaran Dana Pensiun dilakukan oleh Pihak Pengelola Dana Pensiun dengan mengacu pada perjanjian kerjasama yang telah disepakati dan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku.
2. Pembayaran iuran Karyawan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi Perusahaan.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan SK-014/PNM-DIR/II/24, Program Pensiun memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut:

### Ketentuan Masa Persiapan Pensiun (MPP)

1. Bagi Karyawan yang akan mencapai usia pensiun, kepadanya diberikan Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama 6 (enam) bulan sebelum jatuh tempo tanggal pensiunnya.
2. Masa Persiapan Pensiun (MPP) bersifat opsional, dan Karyawan dapat memilih untuk tidak menjalani MPP.

5. Death, paid in full to the employee's heirs according to Company regulations.

### Pension Fund Program Benefit Payment Provisions

1. In the event that an Employee is indicated to have committed fraud or is undergoing a suspension period, the Company's contribution will be temporarily stopped until the suspension is lifted.
2. In the event that an Employee is absent without notice, the Payment Order Letter for PPDKP benefits and/or the Termination Letter will be withheld by the Company until the Employee concerned submits their resignation to the Company.
3. In the event that an Employee is proven to have committed fraud and receives sanctions, the Company's contribution will be temporarily stopped until the sanction period is completed.
4. In the event that an Employee is proven to have committed fraud and resigns or is terminated, the Company's contribution will be stopped, and the Payment Order Letter for PPDKP and/or the Termination Letter/Pension Letter will be withheld by the Company until the Employee concerned takes responsibility by reimbursing the Company for any losses arising from their actions.
5. All payments of funds to PPDKP will be made based on the Company's instructions by submitting a Payment Order Letter to the Pension Fund Management Party.

### Pension Fund Manager

The Company collaborates with a Pension Fund Manager (Bank or Life Insurance Company) to ensure sustainability, reliability, and professionalism in pension management according to applicable regulations.

### Other Provisions

1. Management, mechanisms, and payments are carried out by the Pension Fund Manager in accordance with existing agreements and regulations.
2. Employee contributions, as referred to in Article 3, paragraph (3), may vary in accordance with the Company's circumstances.

Furthermore, based on the provisions of SK-014/PNM-DIR/II/24, the Pension Program includes the following terms and conditions:

### Retirement Preparation Period (MPP)

1. Employees approaching retirement are granted a 6 (six) month Retirement Preparation Period (MPP) prior to their official retirement date.
2. MPP is optional; employees may choose not to participate.

3. Dalam hal Karyawan menjalani MPP maka yang bersangkutan tetap mendapatkan gaji pokok, tunjangan fungsional, tunjangan jabatan atau tunjangan lain yang dikaitkan dengan kehadiran, sementara tunjangan transportasi tidak termasuk.
4. Tunjangan lain seperti asuransi kesehatan dan tunjangan cuti masih berlaku sesuai *plafond* sejak MPP sampai dengan efektif pensiun.

### Program Pembekalan Pensiun

1. Perusahaan memberikan program pembekalan sebelum Karyawan menjalani MPP dengan tujuan:
  - a. Memiliki pengetahuan dalam mengelola kesehatan fisik dan psikologis dalam mempersiapkan diri menghadapi masa pensiun;
  - b. Memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengelola keuangan;
  - c. Memiliki gambaran komprehensif mengenai bagaimana melakukan transformasi diri dari Karyawan menjadi wiraswasta atau di bidang lainnya.
2. Peserta pembekalan adalah Karyawan dengan minimal 5 (lima) tahun sebelum memasuki usia pensiun.
3. Program pembekalan pensiun adalah namun tidak terbatas sebagai berikut:
  - a. Survei Pra-Program  
Survei Pra-Program dilakukan untuk melihat minat dan menentukan materi yang paling diminati dan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki calon peserta.
  - b. Seminar  
Pelatihan melalui daring atau luring dengan materi sebagai kesiapan peralihan mental dari seorang Karyawan menjadi wiraswasta atau di bidang lain.
  - c. *Workshop*  
Kegiatan pelatihan atau pameran yang biasanya melibatkan interaksi aktif antara peserta.
  - d. Kunjungan ke Pengusaha  
Kunjungan ke tempat pengusaha UMKM dan/atau pengusaha binaan Perusahaan.
  - e. Forum Komunitas Pensiunan Perusahaan Peserta akan bergabung dalam komunitas di dalam jaringan nasabah Perusahaan agar terjadi proses komunikasi dan pembelajaran yang berkelanjutan.
4. Divisi yang bertanggung jawab melaksanakan program pembekalan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Divisi yang membawahkan fungsi *Human Capital Development* dan dapat bekerja sama dengan Divisi yang membawahkan fungsi Pengembangan Kapasitas Usaha.

3. During MPP, employees continue to receive basic salary, functional allowance, position allowance, or other attendance-linked allowances, excluding transportation allowance.
4. Other benefits, including health insurance and leave allowances, remain applicable according to policy until retirement

### Retirement Preparation Program

1. PNM provides a retirement preparation program to:
  - a. Equip employees with knowledge to manage physical and psychological health for retirement.
  - b. Develop skills for financial management.
  - c. Provide a comprehensive roadmap for transitioning from employee to entrepreneur or other career paths.
2. Participants are employees with at least 5 (five) years before retirement.
3. The program includes, but is not limited to:
  - a. Pre-Program Survey  
This program aims to assess interests and align with participant competencies.
  - b. Seminars  
Online or offline training for mental preparation in transitioning careers.
  - c. Workshops  
Training activities or exhibitions that typically involve active interaction among participants.
  - d. Business Visits  
Visits to micro, small, and medium enterprise (MSME) operators and/or enterprises fostered by the Company.
  - e. Company Retiree Community Participants will join a community within the Company's client network to facilitate ongoing communication, knowledge sharing, and continuous learning.
4. The division responsible for implementing the retirement preparation program as referred to in paragraph (3) is the division overseeing the Human Capital Development function and may collaborate with the division overseeing the Business Capacity Development function..





**Nilai Moneter Produk dan Layanan yang Ditinjau untuk Memberikan Manfaat Sosial [GRI FS7]**  
Monetary Value of Products and Services Reviewed for Social Benefits [GRI FS7]

PNM berkomitmen menyediakan produk dan layanan yang berorientasi pada keberlanjutan serta memberikan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat. Komitmen ini diwujudkan melalui penyaluran pembiayaan, termasuk layanan berbasis syariah, yang dirancang untuk mendukung pemberdayaan ekonomi kelompok usaha mikro. Adapun ragam produk dan layanan berkelanjutan yang disediakan PNM meliputi:

PNM is committed to offering products and services that prioritize sustainability and deliver tangible social benefits to communities. This commitment is realized through the provision of financing, including Sharia-compliant services, designed to empower micro-enterprise groups and support inclusive economic growth. The sustainable products and services offered by PNM include the following:

**Tabel Produk dan Layanan Berkelanjutan (Rp Miliar)**  
Table of Sustainable Products and Services (Billion Rupiah)

Produk dan Layanan Product and Service	Nilai Moneter Monetary Value			
	2025	2024	2023	2022
<b>Pembiayaan</b> Financing				
PNM Mekaar	67.123,42	68.288,80	68.544,77	62.344,87
ULaMM	1.961,57	1.716,02	1.635,81	1.641,61
<b>Pembiayaan Syariah</b> Sharia Financing				
PNM Mekaar Syariah	49.111,93	49.733,80	49.871,88	40.039,17
ULaMM Syariah	1.091,38	694,96	782,77	918,57



09

# Kinerja Lingkungan Keberlanjutan

*Sustainable Environmental  
Performance*



## Kinerja Lingkungan Keberlanjutan Sustainable Environmental Performance

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai salah satu lembaga keuangan dan pembiayaan terbesar di Indonesia memikul tanggung jawab penting dalam mendukung pelestarian lingkungan. Dengan posisi strategis tersebut, PNM memiliki peluang besar untuk mendorong transformasi praktik usaha yang lebih berkelanjutan bagi para Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi. Upaya ini sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan di mana sektor keuangan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem.

As one of the largest financial and financing institutions in Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) is significantly responsible for supporting environmental preservation. With this strategic position, PNM has a substantial opportunity to drive the transformation of more sustainable business practices among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and cooperatives. These efforts align with the spirit of sustainable development, where the financial sector is expected to promote inclusive and green economic growth while minimizing negative impacts on ecosystems.



Tanggung jawab terhadap lingkungan bagi lembaga pembiayaan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal 43, ayat (3), huruf c, ditegaskan pentingnya pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup. Penjelasan undang-undang tersebut menjabarkan bahwa sistem lembaga keuangan yang dimaksud adalah sistem yang mengintegrasikan persyaratan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup ke dalam kebijakan pembiayaan dan praktik lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank.

Environmental responsibility for financing institutions is governed by the Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, most recently amended by Law Number 6 of 2023 on Ratification of Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 2 of 2022 concerning Job Creation. Article 43, paragraph (3), letter c, which emphasizes the importance of developing environmentally friendly financial and capital market systems. The law explains that such financial systems integrate environmental protection and management requirements into financing policies and practices of financial institutions, both banks and non-banks.

Komitmen terhadap lingkungan dipertegas melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Regulasi ini mendefinisikan keuangan berkelanjutan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Merujuk peraturan ini, PNM sebagai lembaga pembiayaan wajib menerapkan keuangan berkelanjutan per 1 Januari 2020.

Commitment to the environment is further reinforced by the Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 51/POJK.03/2017 on Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies. This regulation defines sustainable finance as comprehensive support from the financial services industry for sustainable growth, achieved through alignment of economic, social, and environmental interests. In accordance with this regulation, PNM, as a financing institution, is required to implement sustainable finance starting from January 1, 2020.



Selaras dengan itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa keuangan berkelanjutan terdiri dari empat dimensi yaitu Mencapai keunggulan industri, sosial dan ekonomi dalam rangka mengurangi ancaman pemanasan global dan pencegahan terhadap permasalahan lingkungan hidup dan sosial lainnya; Memiliki tujuan untuk terjadinya pergeseran target menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif; Secara strategis mempromosikan investasi ramah lingkungan hidup di berbagai sektor usaha/ekonomi; dan Mendukung prinsip-prinsip pembangunan Indonesia sebagaimana tercantum dalam RPJM, yaitu 4P (*Pro-growth, Pro-jobs, Pro-poor, dan Pro-environment*).

In line with this, the OJK emphasizes that sustainable finance encompasses four dimensions, namely achieving excellence in industry, social, and economic performance to reduce the threats of global warming and prevent other environmental and social problems; pursuing a shift toward a competitive low-carbon economy; strategically promoting green investments across various business/economic sectors; and supporting Indonesia's development principles as outlined in the National Medium-Term Development Plan (RPJM), namely the 4Ps (Pro-growth, Pro-jobs, Pro-poor, and Pro-environment).

### **Komitmen PNM terhadap Lingkungan [GRI 3-3]** PNM Commitment to the Environment [GRI 3-3]

Kepedulian PNM terhadap lingkungan diwujudkan melalui penerapan keuangan berkelanjutan yang berfokus pada pembiayaan berbasis inklusi keuangan serta penguatan aspek sosial dan lingkungan. Perusahaan juga memastikan evaluasi risiko sosial dan lingkungan menjadi bagian terpadu dalam proses bisnis, termasuk memastikan bahwa pembiayaan tidak diberikan kepada sektor-sektor yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.

PNM demonstrates its environmental stewardship through the implementation of sustainable finance, focusing on inclusive financing and the strengthening of social and environmental considerations. The Company integrates social and environmental risk assessments into its business processes, ensuring that financing is not extended to sectors that could potentially cause environmental harm.

Sejalan dengan komitmen tersebut, PNM melakukan penyesuaian berbagai kebijakan agar selaras dengan prinsip lingkungan (*environmental*), sosial (*social*), dan tata kelola (*governance*) atau ESG. Penyesuaian ini mencakup pembaruan kriteria pemberian pembiayaan/kredit dan penyempurnaan *Standard Operating Procedure* (SOP) pembiayaan terkait penerapan keuangan berkelanjutan. Dalam proses kredit misalnya, Perusahaan melakukan digitalisasi melalui penambahan fitur pada aplikasi Mekaar Digi untuk menggantikan proses manual yang sebelumnya menggunakan formulir FP4 serta beberapa lembar dokumen pendukung seperti salinan identitas, Kartu Keluarga, dan Surat Pernyataan Suami. Pembaruan ini telah diatur dalam Buku Kebijakan Mekaar (BKM) sebagai bagian dari SOP pembiayaan Mekaar PNM.

In line with this commitment, PNM has updated various policies to align with Environmental, Social, and Governance (ESG) principles. These updates include revising financing and credit criteria and refining the standard operating procedures (SOPs) for financing in accordance with sustainable finance practices. For instance, in the credit process, the Company has digitalized workflows by enhancing the Mekaar Digi application, replacing manual processes previously dependent on FP4 forms and supporting documents such as identity cards, family cards, and husband's declaration letters. These updates have been incorporated into the Mekaar Policy Book (BKM) as part of the Mekaar PNM financing SOPs.

Hingga akhir tahun 2025, jumlah nasabah PNM mencapai 12.336.904 juta. Melalui penerapan Mekaar Digi, Perusahaan berhasil menghemat sebanyak 24.673.808 lembar kertas FP4 atau setara dengan 49.348 rim. Berdasarkan perhitungan salah satu produsen kertas di Indonesia, satu pohon akasia berukuran sekitar 5 (lima) meter mampu menghasilkan 23 rim kertas. Dengan demikian, pemanfaatan Mekaar Digi berkontribusi terhadap pengurangan penebangan pohon akasia dewasa sebanyak 2.146 batang.

By the end of 2025, PNM served 12,336,904 million customers. Through the implementation of Mekaar Digi, the Company has saved 24,673,808 sheets of FP4 paper, equivalent to 49,348 reams. According to calculations from an Indonesian paper manufacturer, a single mature acacia tree of approximately five meters in height can produce 23 reams of paper. As such, the adoption of Mekaar Digi has contributed to the preservation of 2,146 mature acacia trees.

Komitmen PNM terhadap pelestarian lingkungan juga tercermin dari penerapan operasional kantor yang ramah lingkungan dengan mengedepankan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Prinsip ini diwujudkan melalui pengelolaan yang lebih efisien terkait penggunaan material kertas, konsumsi energi (bahan bakar dan listrik), pengendalian emisi, pengelolaan limbah, pemanfaatan air, dan aspek-aspek lingkungan lainnya.

PNM commitment to environmental preservation is also reflected in the adoption of eco-friendly office operations guided by the 3R (Reduce, Reuse, Recycle) principles. This approach encompasses more efficient management of paper usage, energy consumption (fuel and electricity), emission control, waste management, water utilization, and other environmental aspects.

## Buku Saku ESG untuk Nasabah Mekaar

### ESG Pocketbook for Mekaar Customers

PNM bekerjasama dengan Daya Makara UI menerbitkan buku saku sebagai pegangan nasabah Mekaar terkait dengan *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Buku setebal 46 halaman bertajuk Buku Saku Praktik Baik, Sektor Ekonomi Berkelanjutan (ESG) Nasabah Mekaar 2025 berisi penjelasan lengkap tentang ESG, dari Apa itu ESG, Mengapa ESG Penting bagi Nasabah Mekaar, Penjelasan Pilar ESG dan Indikator SDGs (Pilar Lingkungan, Sosial, Tata Kelola), plus Ringkasan Indikator dan Kategori SDGs.

Sebagai panduan, buku ini mengupas serangkaian praktik baik di 8 sektor yaitu Praktik Baik Sektor Perikanan, Sektor Jasa, Sektor *Home Industry*, Sektor Peternakan, Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan, Sektor Perkebunan dan Sektor Kredit.

Mengapa ESG penting bagi nasabah Mekaar? Patut dipahami bahwa penerapan ESG pada Nasabah Mekaar bukanlah beban administratif atau aturan tambahan yang memberatkan, melainkan instrumen praktis untuk menjamin keberlanjutan usaha. Kerangka kerja ini membantu nasabah mengevaluasi operasional harian, memastikan usaha dapat bertahan lama, serta mampu tumbuh di masa depan. Penerapan prinsip ESG memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek:

1. Stabilitas dan Ketertiban Operasional: Upaya efisiensi bahan baku, penjagaan kualitas produk, dan konsistensi kerja membuat usaha lebih tangguh terhadap perubahan kondisi. Usaha yang tertib dan bertanggung jawab akan membangun reputasi positif dan kepercayaan pelanggan.
2. Mitigasi Risiko Usaha: ESG meminimalkan potensi konflik. Kepedulian lingkungan mencegah keluhan warga akibat limbah, sementara hubungan sosial yang baik mencegah konflik dengan karyawan atau komunitas. Di sisi lain, tata kelola keuangan yang disiplin mengurangi risiko kesalahan pengelolaan arus kas.
3. Meningkatkan Kredibilitas: Usaha yang dikelola secara jujur dan transparan akan mendapatkan kepercayaan lebih tinggi, tidak hanya dari pelanggan, tetapi juga dari kelompok, pendamping, mitra, hingga lembaga keuangan. Hal ini membuka akses lebih luas terhadap kerja sama dan pembiayaan.

Pentingnya ESG juga selaras dengan visi Mekaar dalam memberdayakan perempuan prasejahtera. Penerapan ESG tidak hanya memperkuat fondasi ekonomi nasabah, tetapi juga meningkatkan peran sosial dan kepercayaan diri mereka dalam keluarga dan masyarakat. Lebih jauh, praktik sederhana seperti pengurangan limbah dan peran dalam lingkungan sosial merupakan kontribusi nyata terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di tingkat lokal tanpa memerlukan investasi teknologi tinggi.

Perlu digaris bawahi bahwa ESG tidak identik dengan usaha berskala besar atau modern. Banyak praktik ESG sejatinya telah menjadi kearifan lokal dan kebiasaan sehari-hari pengusaha mikro. Modul ini hadir untuk mengapresiasi dan mengarahkan kebiasaan baik tersebut agar semakin kuat dan terstruktur.\*\*

In collaboration with Daya Makara UI, PNM has published a pocketbook to serve as a guide for Mekaar customers on Environmental, Social, and Governance (ESG) practices. The 46-page publication, titled Buku Saku Praktik Baik, Sektor Ekonomi Berkelanjutan (ESG) Nasabah Mekaar 2025 (Pocketbook of Best Practices: ESG for Mekaar Clients 2025), provides comprehensive explanations of ESG, covering topics such as; what ESG is and why it matters for Mekaar clients; detailed explanation of the ESG pillars and relevant SDG indicators (Environmental, Social, and Governance pillars); and a summary of indicators and SDG categories

As a practical guide, the book highlights a series of best practices across eight sectors, namely Fisheries, Services, Home Industry, Livestock, Agriculture, Trade, Plantation, and Credit.

Why does ESG Matter for Mekaar Clients? It is important to understand that implementing ESG for Mekaar clients is not an administrative burden or an additional regulation. Rather, it is a practical instrument to ensure business sustainability. This framework helps clients evaluate daily operations, maintain long-term viability, and position their business for future growth. Implementing ESG principles brings significant benefits across several dimensions as follows:

1. Operational Stability and Discipline: Efficient use of raw materials, product quality control, and consistent work practices make businesses more resilient to changing conditions. Disciplined and responsible operations build a positive reputation and enhance customer trust.
2. Business Risk Mitigation: ESG reduces potential conflicts. Environmental care prevents complaints from residents due to waste, while strong social relationships minimize disputes with employees or communities. On the governance side, disciplined financial management reduces the risk of cash flow mismanagement.
3. Enhanced Credibility: Businesses managed with honesty and transparency gain higher trust, not only from customers but also from peer groups, mentors, partners, and financial institutions. This, in turn, opens broader opportunities for collaboration and access to financing.

ESG implementation aligns with Mekaar's vision of empowering underprivileged women. It strengthens clients' economic foundations while enhancing their social role and self-confidence within their families and communities. Simple practices such as reducing waste and contributing to local social environments also provide tangible support toward Sustainable Development Goals (SDGs) at the local level, without requiring advanced technology investments.

large-scale or modern enterprises. Many ESG practices are rooted in local wisdom and everyday habits of micro-entrepreneurs. This module seeks to acknowledge, guide, and strengthen these good practices, ensuring they are structured, consistent, and sustainable.\*\*





## Implikasi Finansial Serta Risiko dan Peluang Lain Akibat dari Perubahan Iklim

Financial Implications as well as Other Risks and Opportunities Arising from Climate Change

Perubahan iklim dan pemanasan global merupakan masalah besar yang saat ini dihadapi warga dunia, termasuk Indonesia, dan menuntut kontribusi bersama dalam menanganinya. Penanganan dan antisipasi semakin mendesak untuk dilakukan karena dampak negatifnya kian terasa. Dampak yang terjadi, antara lain, cuaca ekstrem, suhu udara lebih panas dibanding sebelumnya, hujan turun lebih deras dan waktunya kian sulit ditebak; sebaliknya, saat musim kemarau datang maka waktunya lebih lama dari biasanya sehingga memicu gagal panen dan sebagainya. Tak hanya menimbulkan bencana lingkungan, perubahan iklim juga berdampak negatif terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. [GRI 3-3]

Bagi PNM sebagai lembaga pembiayaan, perubahan iklim membawa konsekuensi tersendiri, terutama mengingat keberadaan aset kantor layanan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap para debitur, yang dapat mengalami penurunan produktivitas atau gangguan usaha akibat cuaca ekstrem dan perubahan pola iklim. Situasi tersebut pada akhirnya berpotensi memengaruhi kelancaran pengembalian pinjaman. Menyadari besarnya risiko tersebut, Perusahaan berupaya melakukan berbagai penyesuaian operasional untuk merespons tantangan lingkungan global, khususnya terkait perubahan iklim.

Sebagai lembaga pembiayaan, perubahan iklim turut memberikan dampak terhadap PNM, terutama karena aset kantor layanan Perusahaan tersebar di berbagai wilayah Indonesia yang memiliki tingkat kerentanan iklim berbeda-beda. Kondisi serupa juga dirasakan oleh para debitur, di mana gangguan usaha akibat cuaca ekstrem atau perubahan pola iklim dapat memengaruhi kinerja mereka dan pada akhirnya berpotensi menurunkan kemampuan dalam memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman. Dengan mempertimbangkan risiko tersebut, Perusahaan berupaya melakukan berbagai penyesuaian operasional sebagai respon terhadap tantangan lingkungan global, khususnya terkait perubahan iklim.

Untuk mengantisipasi dan mengelola risiko tersebut, PNM melakukan evaluasi risiko iklim dengan mengacu pada rekomendasi *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD). Rekomendasi ini menjadi kerangka utama Perusahaan dalam memperkuat identifikasi, pengukuran, dan pengelolaan risiko serta peluang terkait perubahan iklim yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan. Implementasi TCFD juga bertujuan meningkatkan kualitas pelaporan PNM terkait risiko dan peluang perubahan iklim secara lebih transparan dan terstruktur.

Dalam kerangkanya, TCFD mengelompokkan risiko perubahan iklim menjadi dua kategori utama: risiko fisik dan risiko transisi. Risiko fisik mencakup kejadian cuaca ekstrem seperti banjir atau kekeringan, serta dampak jangka panjang seperti peningkatan suhu rata-rata global. Sementara itu, risiko transisi berkaitan dengan pergeseran menuju ekonomi rendah karbon, termasuk

Climate change and global warming are pressing global challenges, including in Indonesia, that require collective action to address. The urgency to anticipate and mitigate these impacts is increasing as their negative effects become more apparent. These impacts include extreme weather events, higher average temperatures, unpredictable and more intense rainfall, and prolonged dry seasons that can trigger crop failures and other disruptions. Beyond environmental consequences, climate change also negatively affects human life and other living organisms. [GRI 3-3]

For PNM as a financing institution, climate change carries specific implications, particularly given the Company's widespread branch network across diverse regions of Indonesia. These conditions also affect borrowers, who may experience reduced productivity or business disruptions due to extreme weather or shifting climate patterns, ultimately potentially impacting loan repayment performance. Recognizing these risks, the Company has undertaken various operational adjustments to respond proactively to global environmental challenges, particularly those related to climate change.

As a financing institution, climate change also impacts PNM, particularly because the Company's branch network is spread across regions in Indonesia with varying levels of climate vulnerability. Similar challenges are encountered by borrowers, whose business operations may be disrupted by extreme weather events or shifting climate patterns, potentially affecting their performance and, ultimately, their ability to meet loan repayment obligations. In light of these risks, the Company has implemented various operational adjustments to proactively respond to global environmental challenges, with a particular focus on climate change.

To anticipate and manage these risks, PNM conducts climate risk evaluations in line with the recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). These recommendations serve as the primary framework for strengthening the Company's processes in identifying, measuring, and managing climate-related risks and opportunities associated with financing activities. TCFD implementation also aims to enhance the transparency and structure of PNM reporting on climate-related risks and opportunities.

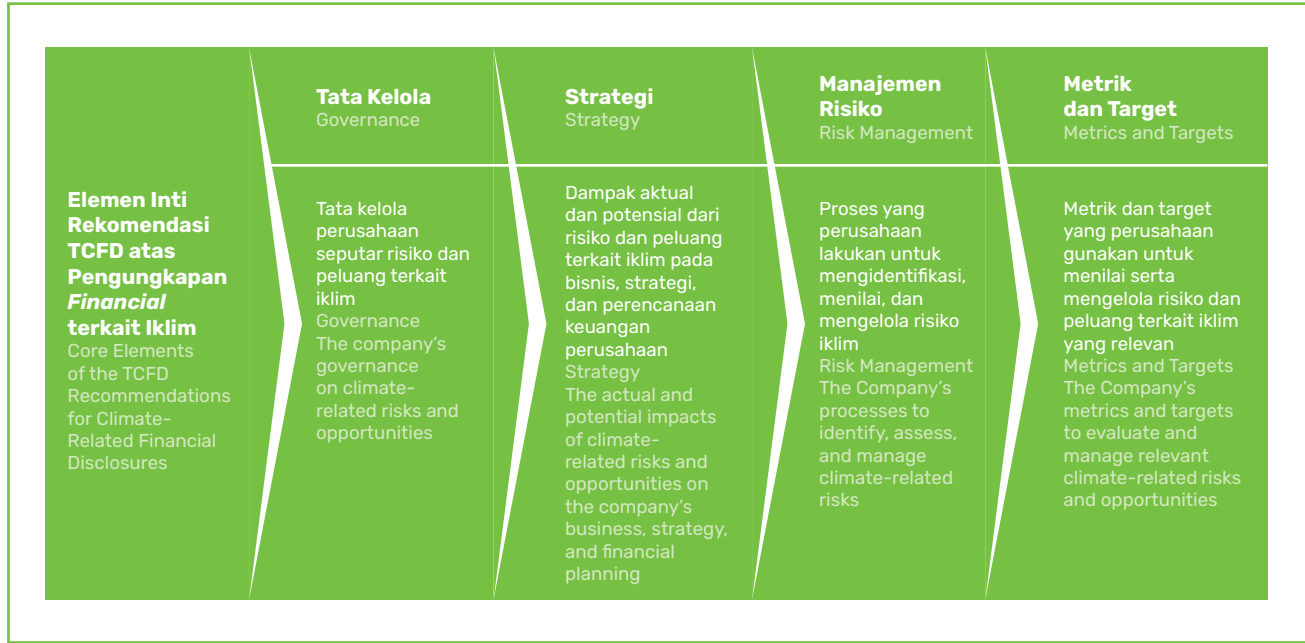
Within this framework, TCFD classifies climate risks into two main categories, namely physical risks and transition risks. Physical risks include extreme weather events such as floods or droughts, as well as long-term impacts such as rising global average temperatures. Transition risks, on the other hand, relate to the shift toward a low-carbon economy, including regulatory



perubahan regulasi, dinamika pasar, dan inovasi teknologi energi efisien. Dalam mengelola kedua jenis risiko tersebut, Perusahaan secara konsisten mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mengurangi dampak lingkungan yang dapat timbul dari kegiatan operasional bisnis.

changes, market dynamics, and energy-efficient technological innovations. In managing both types of risks, the Company consistently promotes the engagement of all stakeholders to mitigate environmental impacts arising from business operations.

Kerangka TCFD  
TCFD Framework



Identifikasi Risiko dan Peluang Perubahan Iklim bagi PNM [GRI 201-2]

Identification of Climate Change Risks and Opportunities for PNM [GRI 201-2]

Risiko Fisik Physical Risk	Pemicu Risiko Risk Trigger	Kemungkinan Terjadinya Risiko Likelihood of Occurrence	Risiko Risk	Potensi Dampak Finansial Potential Financial Impact	Langkah Mitigasi/Strategi untuk Merespon Risiko Mitigation Measures/ Strategies to Address Risks
Banjir Flood	Hujan ekstrem dalam waktu singkat, atau hujan terus menerus dalam waktu lama, kenaikan permukaan air laut Extreme rainfall over a short period or prolonged continuous rainfall; sea level rise	Tinggi High	Banjir bandang yang melanda wilayah operasional PNM Floods, including flash floods, affecting PNM operational areas	Penurunan <i>revenue</i> karena kendala pada angsuran (NPL naik) Decline in revenue due to installment disruptions (increase in NPL)	Pemetaan Potensi Bencana dan kebijakan mitigasi risiko Disaster potential mapping and risk mitigation policies
Angin Topan- Puting Beliuang Tropical Cyclone/ Tornado	Cuaca Ekstrem Extreme Weather	Tinggi High	Angin Topan- Puting Beliuang yang melanda wilayah operasional PNM Tropical cyclones/ tornadoes affecting PNM operational areas	Penurunan <i>revenue</i> karena kendala pada angsuran (NPL naik) Decline in revenue due to installment disruptions (increase in NPL)	Pemetaan Potensi Bencana dan kebijakan mitigasi risiko Disaster potential mapping and risk mitigation policies
Kebakaran Hutan Forest Fire	Kenaikan Suhu Bumi Rising global temperatures	Sedang Medium	Kebakaran hutan di sekitar wilayah operasional PNM Forest fires in areas surrounding PNM operational regions	Penurunan <i>revenue</i> karena kendala pada angsuran (NPL naik) Decline in revenue due to installment disruptions (increase in NPL)	Pemetaan Potensi Bencana dan kebijakan mitigasi risiko Disaster potential mapping and risk mitigation policies



Risiko Fisik Physical Risk	Pemicu Risiko Risk Trigger	Kemungkinan Terjadinya Risiko Likelihood of Occurrence	Risiko Risk	Potensi Dampak Finansial Potential Financial Impact	Langkah Mitigasi/Strategi untuk Merespon Risiko Mitigation Measures/ Strategies to Address Risks
Kekeringan Drought	Kenaikan Suhu Bumi Rising global temperatures	Sedang Medium	Kekeringan yang melanda wilayah operasional PNM Drought affecting PNM operational areas	Penurunan <i>revenue</i> karena kendala pada angsuran (NPL naik) Decline in revenue due to installment disruptions (increase in NPL)	Pemetaan Potensi Bencana dan kebijakan mitigasi risiko Disaster potential mapping and risk mitigation policies

Dalam menjalankan kegiatan pembiayaan UMKM, PNM menghadapi risiko transisi yang muncul akibat pergeseran menuju ekonomi rendah karbon. Risiko ini mencakup potensi perubahan regulasi, seperti kebijakan pajak karbon atau standar lingkungan yang dapat meningkatkan biaya operasional UMKM; perubahan teknologi yang menuntut adopsi praktik dan peralatan ramah lingkungan; serta pergeseran preferensi pasar, di mana konsumen semakin memilih produk dan jasa yang berkelanjutan. Dampak dari risiko transisi ini dapat berupa peningkatan biaya, kebutuhan investasi tambahan, hingga potensi hilangnya pangsa pasar bagi UMKM yang belum beradaptasi. Oleh karena itu, PNM secara proaktif melakukan asesmen risiko, memberikan pendampingan, serta mendorong UMKM untuk menerapkan praktik bisnis berkelanjutan agar tetap tangguh menghadapi transisi ekonomi hijau.

Perubahan iklim tidak hanya menghadirkan tantangan, tetapi juga membuka peluang bagi PNM untuk mendorong UMKM beradaptasi dan berinovasi menuju praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Peluang ini mencakup pengembangan produk pembiayaan hijau, pendampingan UMKM dalam penerapan teknologi ramah lingkungan, serta pemanfaatan insentif atau program pemerintah terkait ekonomi rendah karbon. Dengan mendukung UMKM yang berfokus pada efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan produk berkelanjutan, PNM dapat memperluas portofolio pembiayaan, meningkatkan reputasi institusi sebagai agen perubahan positif, dan sekaligus berkontribusi pada pencapaian target nasional pengurangan emisi gas rumah kaca.

In carrying out MSME financing activities, PNM faces transition risks arising from the shift to a low-carbon economy. These risks include potential regulatory changes, such as carbon tax policies or environmental standards that could increase MSME operating costs; technological changes that require the adoption of environmentally friendly practices and equipment; and shifting market preferences, where consumers increasingly choose sustainable products and services. The impact of these transition risks can include increased costs, additional investment needs, and the potential loss of market share for MSMEs that have not adapted. Therefore, PNM proactively conducts risk assessments, provides assistance, and encourages MSMEs to implement sustainable business practices in order to remain resilient in the face of the green economy transition.

Climate change not only presents challenges, but also opens up opportunities for PNM to encourage MSMEs to adapt and innovate towards more sustainable business practices. These opportunities include the development of green financing products, assisting MSMEs in the application of environmentally friendly technologies, and utilizing government incentives or programs related to the low-carbon economy. By supporting MSMEs that focus on energy efficiency, waste management, and sustainable products, PNM can expand its financing portfolio, enhance its reputation as an agent of positive change, and contribute to the achievement of national greenhouse gas emission reduction targets.

### Penggunaan Material Ramah Lingkungan [OJK F.5] Use of Environmentally Friendly Materials [OJK F.5]

Sebagai lembaga pembiayaan, PNM tidak menggunakan material ramah lingkungan khusus dalam operasionalnya. Namun, kebutuhan kertas sebagai bahan pendukung administrasi tetap tidak terhindarkan. Karena kertas berasal dari bahan baku pohon seperti akasia, PNM berkomitmen untuk menekan konsumsi kertas melalui berbagai inisiatif digital. Salah satunya adalah pemanfaatan aplikasi Mekaar Digi yang mempercepat proses bisnis PNM Mekaar di lapangan, mulai dari sosialisasi, Uji Kelayakan (UK), verifikasi, Persiapan Pembiayaan (PP), pencairan, hingga pengelolaan data angsuran mingguan nasabah.

PNM telah mengimplementasikan aplikasi *e-Office* yang menerapkan sistem *paperless* untuk surat-menyurat dan sejumlah formulir operasional, serta mengimplementasikan

As a financial institution, PNM does not directly utilize environmentally friendly materials in its operations. However, the use of paper for administrative support remains unavoidable. Since paper is derived from raw materials such as acacia trees, PNM is committed to reducing paper consumption through various digital initiatives. One of the key initiatives is the utilization of the Mekaar Digi application, which streamlines PNM Mekaar's field operations, from outreach, feasibility assessment (UK), verification, financing preparation (PP), disbursement, to weekly customer installment data management.

PNM has implemented an *e-Office* application that uses a paperless system for correspondence and various operational forms, alongside *e-Procurement* to ensure all procurement

*e-procurement* agar seluruh proses pengadaan berjalan secara digital. Untuk limbah kertas yang sudah tidak terpakai, PNM menyerahkannya kepada pihak ketiga untuk didaur ulang atau digunakan kembali dengan memastikan dokumen penting dihancurkan terlebih dahulu. Meskipun kertas merupakan material yang dapat didaur ulang, PNM belum memanfaatkan hasil daur ulang tersebut dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Per 31 Desember 2025, PNM menggunakan kertas 2.447 rim, naik dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 2.168 rim. Kenaikan dipengaruhi oleh meningkatnya intensitas kegiatan operasional dan bisnis. Selain itu, dalam periode transisi penerapan sistem *E-Office* dan *e-Procurement*, masih terdapat kebutuhan penggunaan dokumen fisik tertentu, baik untuk pemenuhan dokumen kepatuhan dan audit maupun dokumen antar Divisi, sehingga penggunaan kertas belum dapat dihindari sepenuhnya.

processes are conducted digitally. Paper waste that is no longer in use is handed over to third parties for recycling or reuse, ensuring that sensitive documents are securely destroyed beforehand. Although paper is recyclable, PNM has not yet incorporated recycled paper into daily operational activities.

As of December 31, 2025, PNM used 2,447 reams of paper, an increase from 2,168 reams in 2024. This increase resulted from the higher intensity of operational and business activities. Additionally, during the transitional period of implementing the *E-Office* and *e-Procurement* systems, certain physical documents remain necessary for compliance, audit requirements, and inter-division communications, meaning paper usage could not be entirely avoided.

**Tabel Penggunaan Kertas Tahun 2023-2025**  
 Table of Paper Usage in 2023-2025

Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024	2023
Penggunaan Kertas Paper Usage	Rim Ream	2.447	2.168	2.317

## Pengelolaan Energi Energy Management

PNM memanfaatkan dua sumber energi utama dalam operasionalnya yaitu listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dipasok oleh pihak ketiga. Listrik digunakan untuk penerangan serta pengoperasian berbagai peralatan elektronik dan sarana kantor seperti komputer, laptop, fotokopi, dan AC, sedangkan BBM menjadi sumber energi bagi kendaraan operasional. Mengingat sebagian besar listrik nasional masih berasal dari pembangkit berbasis batu bara dan BBM juga merupakan energi fosil yang tidak terbarukan, kedua sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas. Kondisi tersebut mendorong PNM untuk menerapkan berbagai langkah penghematan energi yang selaras dengan Instruksi Presiden No. 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air serta Permen ESDM No. 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik. [GRI 3-3]

Upaya penghematan listrik dilakukan melalui penggunaan lampu hemat energi (LED), pemadaman lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan, serta pengaturan operasional peralatan kantor. Hingga saat ini, PNM belum memanfaatkan energi baru terbarukan seperti panel surya untuk operasional kantor. Sementara itu, penghematan BBM diwujudkan antara lain melalui optimalisasi rapat daring untuk mengurangi kebutuhan perjalanan dinas menggunakan kendaraan operasional.

Upaya lain penghematan BBM juga dilakukan dengan pemanfaatan mobil dan motor listrik, baik di kantor pusat maupun kantor-kantor cabang. Hingga akhir tahun 2025, Perusahaan mengoperasikan sebanyak 12 mobil listrik di Kantor Pusat, 4

PNM utilizes two main energy sources in its operations, namely electricity and fuel oil (BBM), supplied by third parties. Electricity powers lighting and various office equipment, including computers, laptops, photocopiers, and air conditioning, while fuel oil serves as the energy source for operational vehicles. Given that a significant portion of the national electricity supply still comes from coal-fired power plants and that fuel oil is a non-renewable fossil fuel, the availability of both energy sources is limited. This situation drives PNM to implement energy-saving measures aligned with Presidential Instruction Number 13 of 2011 on Energy and Water Conservation and Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 13 of 2012 on Electricity Conservation. [GRI 3-3]

Electricity conservation includes using energy-efficient LED lighting, switching off lights and electronic devices when not in use, and optimizing office equipment operations. To date, PNM has not yet utilized renewable energy sources such as solar panels for its office operations. Meanwhile, fuel conservation is promoted through measures such as optimization of online meetings to reduce the need for official travel using operational vehicles.

Additional fuel-saving initiatives include the adoption of electric cars and motorcycles at both the Head Office and branch offices. By the end of 2025, PNM operated 12 electric cars and 4 electric motorcycles at the Head Office, along with 473 electric



motor listrik di Kantor Pusat, dan 473 motor listrik yang tersebar di kantor-kantor cabang. Efisiensi penggunaan listrik dan BBM sekaligus merupakan upaya PNM untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai salah satu penyebab pemanasan global dan perubahan iklim. [GRI 302-4, 305-5][OJK F.7, F.12][IDX E-03]

PNM merupakan perusahaan jasa keuangan yang bergerak di bidang pembiayaan di mana produk utamanya berupa pinjaman modal usaha yang tidak mengonsumsi energi secara langsung oleh nasabah sebagai pengguna akhir. Meskipun demikian, PNM menyadari bahwa perubahan iklim membuka peluang strategis untuk mengembangkan produk pembiayaan hijau yang dapat mendorong UMKM beralih ke praktik bisnis yang lebih efisien secara energi. Ke depan, PNM mempertimbangkan untuk meninjau kembali perkembangan portofolio pembiayaan berkelanjutan Perusahaan. [GRI 302-5]

Pada tahun 2025, PNM belum menetapkan tahun dasar untuk perhitungan energi karena masih dalam proses pengumpulan data historis yang diperlukan serta penyusunan metodologi yang sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, perbandingan dalam laporan ini adalah perbandingan dengan tahun sebelumnya.

motorcycles distributed across branch offices. Improving electricity and fuel efficiency simultaneously contributes to reducing Greenhouse Gas (GHG) emissions, one of the main drivers of global warming and climate change. [GRI 302-4, 305-5][OJK F.7, F.12][IDX E-03]

PNM is a financial services company engaged in financing, with its primary products consisting of working capital loans that are not directly consumed as energy by customers as end-users. Nevertheless, PNM recognizes that climate change presents strategic opportunities to develop green financing products that can encourage SMEs to transition to more energy-efficient business practices. Moving forward, PNM plans to review the development of the Company's sustainable financing portfolio. [GRI 302-5]

As of 2025, PNM has not yet established a base year for energy calculations, as it is still in the process of collecting the necessary historical data and developing a methodology that complies with applicable standards and regulations. Consequently, the comparisons in this report are made relative to the previous year.

**Tabel Konsumsi Listrik Tahun 2023-2025**  
Table of Electricity Consumption in 2023-2025

Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024	2023
Penggunaan Listrik Electricity Consumption	kWh	3.029.537	3.063.093	3.266.649
	Gigajoule	10.906,32	11.027,13	11.759,93

Konversi kWh ke Gigajoule: <https://www.convertunits.com/from/kWh/to/gigajoule>  
Penggunaan listrik bersumber dari invoice PLN

Conversion of kWh to Gigajoule: <https://www.convertunits.com/from/kWh/to/gigajoule>  
Electricity usage as shown on the PLN bill

Berdasarkan tabel di atas, penggunaan listrik Kantor Pusat tahun 2025 turun dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan 120,81 Gigajoule disebabkan oleh konsistensi penerapan program efisiensi energi, pengaturan waktu operasional kantor, serta peningkatan disiplin pemadaman lampu dan perangkat elektronik pada area kerja yang tidak digunakan. [GRI 302-1][OJK F.6]

The table shows that electricity consumption at the Head Office in 2025 decreased compared to the previous year. The decrease of 120.81 gigajoule was driven by the consistent implementation of energy efficiency programs, optimized office operational hours, and increased discipline in switching off lights and electronic devices in unused work areas. [GRI 302-1][OJK F.6]

Selanjutnya, sebagaimana tabel di bawah, penggunaan BBM Kantor Pusat tahun 2025 naik dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas operasional dan koordinasi bisnis yang memerlukan mobilitas fisik. Meskipun demikian, PNM tetap melakukan upaya pengendalian penggunaan BBM melalui optimalisasi perjalanan dinas, pemanfaatan rapat daring, serta peningkatan penggunaan mobil dan motor listrik sebagai bagian dari transisi menuju operasional yang lebih efisien dan ramah lingkungan. [GRI 302-1][OJK F.6]

Meanwhile, as shown in the table below, fuel (BBM) consumption at the Head Office in 2025 increased compared to the previous year. The rise was influenced by higher operational activity and business coordination that required physical mobility. Nevertheless, PNM continues to manage fuel use by optimizing official travel, leveraging online meetings, and increasing the use of electric cars and motorcycles as part of the transition toward more efficient and environmentally friendly operations. [GRI 302-1][OJK F.6]

## Tabel Konsumsi BBM Tahun 2023-2025

Table of Fuel Oil Consumption in 2023-2025

Jenis BBM Fuel Type	Satuan Unit	2025	2024	2023
		Kiloliter Kiloliters	37,11	34,23
	Gigajoule	1.491,82	1.375,96	1.924,24

Konversi Kiloliter ke Gigajoule: <https://www.unitconverters.net/energy/fuel-oil-equivalent-kiloliter-to-gigajoule.htm>

Jenis BBM yang digunakan adalah bensin dengan RON 92 dan diperoleh dari catatan pembelian sopir.

Conversion of Kiloliters to Gigajoules: <https://www.unitconverters.net/energy/fuel-oil-equivalent-kiloliter-to-gigajoule.htm>

The type of fuel used is RON 92 gasoline, as recorded in the driver's purchase log.

Sementara itu, untuk konsumsi energi di luar organisasi termasuk energi yang digunakan oleh pemasok dalam rantai pasokan, PNM belum dapat menyajikan datanya karena perjanjian kerja sama dengan para pemasok tidak memuat klausul mengenai pencatatan *volume* energi yang mereka gunakan. Meski demikian, sesuai Standar Akuntansi dan Pelaporan Rantai Nilai Korporat (Cakupan 3) dalam Protokol GRK, Perusahaan tetap melakukan identifikasi atas konsumsi energi relevan di luar organisasi, khususnya pada kategori hulu berupa perjalanan dinas menggunakan pesawat terbang. Dalam konteks laporan ini, perjalanan tersebut merujuk pada perjalanan Dewan Komisaris dan Direksi. Estimasi energi atau bahan bakar yang dikonsumsi dari perjalanan udara dihitung menggunakan kalkulator emisi karbon ICAO (*International Civil Aviation Organization*).

Meanwhile, for energy consumption outside the organization, including energy used by suppliers within the supply chain, PNM is unable to present complete data, as existing cooperation agreements with suppliers do not include clauses requiring them to record the volume of energy consumed. Nevertheless, in accordance with the Corporate Value Chain Accounting and Reporting Standard (Scope 3) under the GHG Protocol, the Company continues to identify relevant energy consumption outside the organization, particularly in upstream categories such as business travel by air. For the purposes of this report, such travel refers to flights taken by the Board of Commissioners and the Board of Directors. The estimated energy or fuel consumed from air travel is calculated using the ICAO (*International Civil Aviation Organization*) carbon emissions calculator.

## Konsumsi Energi dari Perjalanan Dinas dengan Pesawat oleh Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2023-2025

Energy Consumption from Air Travel by the Board of Commissioners and Board of Directors in 2023-2025

Tahun Year	Total Perjalanan Number of Trips	Total Jarak (KM) Total Distance (KM)	Total BBM (KG) Total Fuel (KG)	Total BBM Total Fuel		Total Energi (GJ) Total Energy (GJ)
				Liter Liters	Kiloliter Kiloliters	
2025	212	185.393	1.003.536	1.254.420	1.254,42	50.424,71
2024	159	131.264	727.216	909.020	909,02	36.540,45
2023	109	94.255	510.126	637.657,5	637,66	25.632,42

Konversi kilogram ke liter: <https://iataops.com/conversion/>  
Konversi liter ke Gigajoule: <https://www.unitconverters.net/energy/fuel-oil-equivalent-kiloliter-to-gigajoule.htm>

Conversion of kilograms to liters: <https://iataops.com/conversion/>  
Conversion of liters to Gigajoules: <https://www.unitconverters.net/energy/fuel-oil-equivalent-kiloliter-to-gigajoule.htm>

Merujuk tabel di atas, konsumsi energi dari perjalanan dinas dengan pesawat tahun 2025 naik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu sejalan dengan bertambahnya perjalanan dinas yang dilakukan Dewan Komisaris dan Direksi. [GRI 302-2]

Referring to the table above, energy consumption from business travel by air in 2025 increased compared to the previous year. This trend aligns with the increase in business travel undertaken by the Board of Commissioners and the Board of Directors. [GRI 302-2]

Berdasarkan data penggunaan energi di atas, maka intensitas energi Perusahaan adalah sebagai berikut: [GRI 302-3]

Based on the energy consumption data presented above, the Company's energy intensity is as follows: [GRI 302-3]

**Tabel Konsumsi Energi Tahun 2023-2025**  
Total Energy Consumption in 2023-2025

Jenis Energi Energy Type	Satuan Unit	2025	2024	2023
Listrik Electricity	Gigajoule	10.906,32	11.027,13	11.759,93
BBM (Bensin) Fuel Oil (Gasoline)	Gigajoule	1.491,82	1.375,96	1.924,24
Avtur dari Perjalanan Dinas dengan Pesawat Jet Fuel from Business Travel by Air	Gigajoule	50.424,71	36.540,45	25.632,42
<b>Jumlah</b> Total	<b>Gigajoule</b>	<b>62.822,85</b>	<b>48.943,54*</b>	<b>39.316,59*</b>
<b>Jumlah Pendapatan Usaha</b> Total Operating Income	<b>Miliar Rupiah</b> Billion Rupiah	<b>16.922,52</b>	<b>15.842,29</b>	<b>14.569,37</b>
Intensitas Energi Energy Intensity	GJ/Miliar Rupiah GJ/Billion Rupiah	3,71	3,09*	2,70*

\*) Disajikan kembali karena terdapat penambahan variabel yaitu Avtur dari Perjalanan Dinas dengan Pesawat.

\*) Re-presented due to the addition of a new variable: jet fuel for official business travel by airplane.

**Pengelolaan Emisi Gas Rumah Kaca**  
Greenhouse Gas (GHG) Emissions Management

Emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), metana (CH<sub>4</sub>), dan nitrogen oksida (N<sub>2</sub>O) merupakan kontributor utama pemanasan global dan perubahan iklim yang kini menjadi tantangan besar bagi dunia. Dampaknya meliputi meningkatnya risiko banjir, cuaca ekstrem seperti badai dan gelombang panas hingga kekeringan berkepanjangan. Oleh karena besarnya ancaman tersebut, upaya penurunan emisi menjadi prioritas bersama untuk meminimalkan konsekuensi yang semakin nyata.

Greenhouse gas emissions, including carbon dioxide (CO<sub>2</sub>), methane (CH<sub>4</sub>), and nitrous oxide (N<sub>2</sub>O), are major contributors to global warming and climate change, which have become significant global challenges. The impacts include increased risks of flooding, extreme weather events such as storms and heatwaves, and prolonged droughts. Given the severity of these threats, reducing emissions has become a shared priority to mitigate increasingly tangible consequences.

Menyadari urgensi tersebut, PNM berkomitmen untuk mengendalikan laju pemanasan global melalui pengelolaan emisi yang efektif, salah satunya dengan meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Upaya lain untuk menurunkan emisi di antaranya pemanfaatan kendaraan listrik dalam mendukung kegiatan operasional, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital guna mengurangi kebutuhan perjalanan dinas. Dalam laporan ini, emisi yang disajikan mencakup emisi GRK langsung (Cakupan 1) dari penggunaan BBM; emisi GRK tidak langsung (Cakupan 2) dari konsumsi listrik; serta emisi GRK tidak langsung lainnya (Cakupan 3) dari perjalanan dinas menggunakan pesawat terbang dan sejumlah sumber lainnya. Dari seluruh kategori tersebut, jenis emisi yang paling dominan adalah karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). [GRI 3-3][IDX E-01, E-07]

Recognizing this urgency, PNM is committed to controlling the pace of global warming through effective emissions management, including improving energy efficiency. Other initiatives to reduce emissions include deployment of electric vehicles to support operational activities, and optimization of digital technologies to reduce the need for business travel. This report presents emissions across three categories: direct GHG emissions (Scope 1) from fuel consumption; indirect GHG emissions (Scope 2) from electricity consumption; and other indirect GHG emissions (Scope 3), including those from business travel by air and other sources. Among all categories, carbon dioxide (CO<sub>2</sub>) remains the most dominant type of emission. [GRI 3-3][IDX E-01, E-07]

Pada tahun pelaporan, PNM belum menghitung gas selain CO<sub>2</sub>, baik CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O, HFC, PFC, SF<sub>6</sub>, maupun NF<sub>3</sub>. Cakupan data perhitungan emisi Cakupan 1, 2, dan 3 merujuk pada aktivitas di Kantor Pusat, yang dihitung berdasarkan batas kendali operasional Perusahaan.

During the reporting year, PNM did not account for greenhouse gases other than CO<sub>2</sub>, including CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O, HFCs, PFCs, SF<sub>6</sub>, and NF<sub>3</sub>. The scope of emissions calculations for Scopes 1, 2, and 3 refers to activities at the Head Office, which are calculated based on the Company's operational control boundaries.

Pada tahun 2025, PNM belum menetapkan tahun dasar untuk perhitungan emisi karena masih dalam proses pengumpulan data historis yang diperlukan serta penyusunan metodologi yang sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, perbandingan dalam laporan ini adalah perbandingan dengan tahun sebelumnya.

As of 2025, PNM has not yet established a base year for emissions calculations, as it is still in the process of collecting the necessary historical data and developing a methodology that complies with applicable standards and regulations. Consequently, the comparisons in this report are made relative to the previous year.



Untuk emisi GRK Cakupan 1, Perusahaan menggunakan metode perhitungan *Tier-1* yang umum diterapkan di Indonesia dan negara-negara *non-Annex 1*. Melalui metode ini, emisi dihitung berdasarkan data konsumsi energi yang dikalikan dengan faktor emisi *default IPCC 2006 (Intergovernmental Panel on Climate Change)*.

For Scope 1 GHG emissions, the Company applies the *Tier-1* calculation method, commonly used in Indonesia and other *non-Annex 1* countries. Under this method, emissions are calculated based on energy consumption data multiplied by the default emission factors from the *IPCC 2006 (Intergovernmental Panel on Climate Change)*.

Emisi Hasil Pembakaran Bahan Bakar  
Emissions From Fuel Combustion



Tabel Emisi Gas Rumah Languang (Cakupan 1) Tahun 2023-2025  
Table of Direct Greenhouse Gas Emissions (Scope 1) in 2023-2025

Konsumsi Bahan Bakar Fuel Consumption	Konsumsi Energi [Terajoule] Energy Consumption [Terajoules]			FE Default IPCC 2006 CO <sub>2</sub> (Kg/TJ)	Total Emisi CO <sub>2</sub> yang Dihasilkan (Ton) Total Emission CO <sub>2</sub> Generated (Ton)		
	2025	2024	2023		2025	2024	2023
Bensin Gasoline	1,49	1,37	1,92	69.300	103	95	133

Sumber: Diadaptasi dari Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional Kementerian Lingkungan Hidup 2012

Source: Adapted from the National Greenhouse Gas Inventory Guidelines issued by the Ministry of Environment (2012)

Berdasarkan tabel di atas, emisi cakupan 1 dari penggunaan BBM Kantor Pusat tahun 2025 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan disebabkan oleh meningkatnya aktivitas operasional dan koordinasi bisnis yang memerlukan mobilitas fisik. Meskipun demikian, PNM tetap melakukan upaya pengendalian penggunaan BBM melalui optimalisasi perjalanan dinas, pemanfaatan rapat daring, serta peningkatan penggunaan mobil dan motor listrik sebagai bagian dari transisi menuju operasional yang lebih efisien dan ramah lingkungan. **[GRI 305-1][OJK F.11][IDX E-01]**

Based on the table above, Scope 1 emissions from fuel consumption at the Head Office in 2025 increased from the previous year. It was driven by higher operational activities and business coordination that required physical mobility. Nevertheless, PNM has continuously managed fuel consumption through measures such as optimizing business trips, promoting virtual meetings, and increasing the use of electric cars and motorcycles as part of the transition toward more efficient and environmentally friendly operations.

Adapun penghitungan emisi cakupan 2 tahun 2025 dilakukan dengan mengalikan konsumsi listrik (dalam kWh per tahun) dengan faktor emisi Jawa Madura Bali (Jamali) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 163.K/HK.02/MEM.S/2021 tentang Penetapan Faktor Emisi Gas Rumah Kaca Sistem Ketenagalistrikan yaitu 0,87 kgCO<sub>2</sub>/kWh. Penghitungan tersebut berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana perhitungan dilakukan dengan merujuk pada *average grid emission factor* RUPTL PLN 2015-2024 yaitu sebesar 0,934 kgCO<sub>2</sub>/kWh (2017). Penyesuaian metode perhitungan dilakukan karena RUPTL PLN 2025-2034 sebagai lanjutan RUPTL sebelumnya tidak mengatur *average grid* secara spesifik.

Meanwhile, Scope 2 emissions for 2025 were calculated by multiplying electricity consumption (in kWh per year) with the emission factor for the Java-Madura-Bali (Jamali) system, as stipulated in the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 163.K/HK.02/MEM.S/2021 on Determination of Greenhouse Gas Emission Factors for the Electricity System, which is 0.87 kgCO<sub>2</sub>/kWh. This calculation differs from previous years, which referred to the average grid emission factor in PLN's 2015-2024 RUPTL of 0.934 kgCO<sub>2</sub>/kWh (2017). The adjustment in methodology was made because the 2025-2034 RUPTL, as a continuation of the previous plan, does not specifically define the average grid emission factor.

Seperti disampaikan pada tabel di bawah, emisi cakupan 2 dari penggunaan listrik Kantor Pusat tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Penurunan disebabkan oleh konsistensi penerapan program efisiensi energi, pengaturan waktu operasional kantor, serta peningkatan disiplin pemadaman lampu dan perangkat elektronik pada area kerja yang tidak digunakan. **[GRI 305-2][OJK F.11][IDX E-01]**

As shown in the table below, Scope 2 emissions from electricity consumption at the Head Office in 2025 decreased compared to the previous year. This reduction was attributed to consistent implementation of energy efficiency programs, adjustments to office operational hours, and improved discipline in turning off lights and electronic devices in unused work areas. **[GRI 305-2][OJK F.11][IDX E-01]**

### Tabel Emisi Gas Rumah Tidak Langsung (Cakupan 2) Tahun 2023-2025

Table of Indirect Greenhouse Gas Emissions (Scope 2) in 2023-2025

Konsumsi Energi Energy Consumption	Satuan Unit	Tahun Year			Emisi CO <sub>2</sub> e yang Dihasilkan (Ton) Total Emission CO <sub>2</sub> e Generated (Ton)		
		2025	2024	2023	2025	2024	2023
Listrik Electricity	kWh	3.029.537	3.063.093	3.266.649	2.636	2.861	3.051

Selanjutnya, perhitungan emisi cakupan 3 dari perjalanan dinas dengan pesawat terbang dihitung dengan kalkulator emisi karbon yang dikeluarkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (*International Civil Aviation Organization/ICAO*). Emisi dihitung berdasarkan kelas kabin (ekonomi dan premium/bisnis) dan jarak perjalanan antara bandara keberangkatan dan tujuan. Pada tahun 2025, perjalanan dinas merujuk pada perjalanan yang dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris, sama seperti tahun 2024. Adapun tahun 2023 merujuk perjalanan dinas Direksi. [GRI 305-3][OJK F.11] [IDX E-01]

Scope 3 emissions from business travel by airplane are calculated using the carbon emissions calculator provided by the International Civil Aviation Organization (ICAO). Emissions are determined based on cabin class (economy and premium/business) and the distance between the departure and destination airports. For 2025, business travel refers to trips undertaken by the Board of Directors and the Board of Commissioners, consistent with the approach in 2024. In 2023, the calculation only covered business travel by the Board of Directors. [GRI 305-2][OJK F.11] [IDX E-01]

### Tabel Emisi Gas Rumah Kaca (Cakupan 3) Tidak Langsung Lainnya Tahun 2023-2025

Table of Greenhouse Gas Emissions (Scope 3) in 2023-2025

2025		2024		2023	
Jumlah Penggunaan Pesawat Terbang Total Air Travel Usage	Emisi Emission (Ton CO <sub>2</sub> e)	Jumlah Penggunaan Pesawat Terbang Total Air Travel Usage	Emisi Emission (Ton CO <sub>2</sub> e)	Jumlah Penggunaan Pesawat Terbang Total Air Travel Usage	Emisi Emission (Ton CO <sub>2</sub> e)
212	28	159	20	109	14

Berdasarkan tabel di atas, emisi yang dihasilkan dari perjalanan dinas dengan pesawat tahun 2025 naik dibandingkan tahun sebelumnya, selaras dengan bertambahnya perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi.

Based on the table above, greenhouse gas emissions from business air travel in 2025 increased compared to the previous year, in line with the rise in business trips undertaken by the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Selain uraian di atas, secara lebih komprehensif, Perusahaan telah menghitung emisi gas rumah kaca sebagaimana tabel berikut: [IDX E-01]

In addition to the overview above, the Company has conducted a more comprehensive calculation of greenhouse gas emissions, as presented in the following table: [IDX E-01]

Nama Name	Contoh Sumber Emisi Source of Emissions	Total Emisi tCO <sub>2</sub> e Total Emissions tCO <sub>2</sub> e
<b>Kategori 1: Total Emisi Gas Rumah Kaca Langsung dan Pembuangan</b> Total Direct Greenhouse Gas Emissions and Disposal		
Emisi Langsung dari Pembakaran Stasioner Direct Emissions from Stationary Combustion	Emisi yang berasal dari pembakaran pada peralatan tetap yang dimiliki perusahaan seperti generator set, boiler, tungku Emissions generated from company-owned equipment such as generators, boilers, and furnaces	2.201,76
Emisi Langsung dari Pembakaran Bergerak Direct Emissions from Stationary Combustion	Emisi yang berasal dari kendaraan bermotor yang dimiliki perusahaan Emissions generated by company-owned vehicles	85,73
Emisi Fugitive Langsung Direct Fugitive Emissions	Pelepasan gas yang tidak disengaja akibat kebocoran. Berasal dari gas pendingin AC, pengolahan air limbah, kebocoran perpipaan, tangki penyimpanan Gas releases from leaks, including refrigerants in air conditioning, wastewater treatment, pipeline leaks, and storage tanks	396,7
<b>Total Emisi Langsung (Scope 1)</b> Total Direct Emissions (Scope 1)		<b>2.684,19</b>



Nama Name	Contoh Sumber Emisi Source of Emissions	Total Emisi tCO <sub>2</sub> e Total tCO <sub>2</sub> e Emissions
<b>Kategori 2: Emisi GRK Tidak Langsung dari Energi yang Di impor/Dibeli</b> Category 2: Indirect GHG Emissions from Imported/Purchased Energy		
Emisi tidak langsung dari konsumsi listrik yang diimpor/dibeli Indirect Emissions from Imported/Purchased Energy	Pembelian listrik Electricity purchases	2.635,7
<b>Total Emisi Langsung (Scope 2)</b> Total Direct Emissions (Scope 2)		<b>2.635,7</b>

Nama Name	Contoh Sumber Emisi Source of Emissions	Total Emisi tCO <sub>2</sub> e Total tCO <sub>2</sub> e Emissions
<b>Kategori 3: Total Emisi Gas Rumah Kaca (Cakupan 3) Tidak Langsung Lainnya dari Transportasi</b> Category 3: Total Greenhouse Gas Emissions (Scope 3) Other Indirect Emissions from Transportation		
Perjalanan dinas Business Travel	Perjalanan dinas karyawan yang dibayarkan oleh perusahaan Employee business trips funded by the company	766,78
<b>Kategori 4: Total Emisi Gas Rumah Kaca Tidak Langsung dari Produk yang Digunakan Perusahaan</b> Category 4: Total Indirect Greenhouse Gas Emissions from Products Used by the Company		
Pembelian Barang dan Jasa Purchase of Goods and Services	Emisi dari produk yang dibeli atau diperoleh oleh perusahaan, yang mencakup barang dan bahan mentah (produk berwujud) dan jasa (produk tidak berwujud) Emissions from products obtained by the company, including tangible goods and raw materials as well as intangible products or services	5.593,53
Capital equipment/goods Capital equipment/goods	Emisi dari produk akhir yang memiliki masa pakai lebih lama dan digunakan oleh perusahaan pelapor untuk memproduksi suatu produk. Contoh: komputer, printer, bangunan, mesin dan perlengkapan Emissions from end-use products with extended lifespans that the reporting company uses to produce goods or services, such as computers, printers, buildings, machinery, and equipment	8.266,55
Limbah yang dihasilkan dalam Kegiatan Operasional Waste Generated from Operational Activities	Limbah dan air limbah yang dihasilkan oleh aktivitas Perusahaan pelapor Emissions generated from waste and wastewater produced through the company's operational activities	8,82
Aset Sewaan Hulu Upstream Leased Assets	Emisi dari aktivitas pengoperasian aset yang disewa oleh Perusahaan pelapor. Termasuk di dalamnya: mobil sewaan yang digunakan untuk perjalanan bisnis atau mesin berat sewaan yang digunakan untuk proyek konstruksi perusahaan Emissions resulting from the use of leased assets by the reporting company, including rental vehicles used for business travel or heavy machinery leased for construction projects	85,73
<b>Total Emisi Tidak Langsung (Scope 3)</b> Total Indirect Emissions (Scope 3)		<b>14.721,41</b>
<b>Total Emisi GRK (Scope 1 and 2)</b> Total GHG Emissions (Scope 1 and 2)		<b>5.319,89</b>
<b>Total Emisi GRK (Scope 1, 2 and 3)</b> Total GHG Emissions (Scope 1, 2, and 3)		<b>20.041,3</b>



Selanjutnya, untuk menghitung intensitas emisi dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Intesitas Emisi} = \frac{\text{Jumlah Emisi Cakupan 1 + Cakupan 2 + Cakupan 3}}{\text{Jumlah Pendapatan Usaha}}$$

Emission Intensity =  $\frac{\text{Total Scope 1 + Scope 2 + Scope 3 Emissions}}{\text{Total Operating Income}}$

Subsequently, the calculation of emission intensity is carried out using the following formula:

Sesuai rumus di atas, intensitas emisi GRK tahun 2025 tercatat sebesar 1,18 Ton CO<sub>2</sub>e/Miliar Rupiah, dengan total emisi sebesar 20.041,3 tCO<sub>2</sub>e. Nilai ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 0,19 Ton CO<sub>2</sub>e/Miliar Rupiah. [GRI 305-4] [IDX E-02]

In accordance with the formula above, GHG emission intensity in 2025 was recorded at 1.18 Ton CO<sub>2</sub>e/Billion Rupiah, with total emissions of 20,041.3 tCO<sub>2</sub>e. This represents a decrease compared to 2024, which stood at 0.19 Ton CO<sub>2</sub>e/Billion Rupiah. [GRI 305-4][IDX E-02]

Selain emisi GRK Cakupan 1, 2, dan 3, serta emisi udara, Perusahaan mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait pembatasan penggunaan bahan yang berpotensi merusak lapisan ozon (*Ozone Depletion Potential/ODP*), atau yang dikenal sebagai Bahan Perusak Ozon (BPO). Zat ini umumnya ditemukan pada peralatan seperti pendingin ruangan (AC), kulkas, dan tabung pemadam api. BPO merupakan senyawa kimia yang dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan *stratosfer*, dan saat ini terdapat 23 senyawa yang termasuk kategori BPO antara lain CC-14, CH-3, CC-13, CH3BR, CFC-11, CFC-12, CFC-113, hingga Halon-1211, Halon-1301, dan R-502.

In addition to Scope 1, 2, and 3 GHG emissions, as well as air emissions, the Company fully supports government policies regarding the restriction of substances that can potentially deplete the ozone layer (Ozone Depletion Potential/ODP), commonly referred to as Ozone Depleting Substances (ODS). These substances are typically found in equipment such as air conditioners (AC), refrigerators, and fire extinguishers. ODS are chemical compounds that can react with ozone molecules in the stratosphere, and currently, there are 23 substances classified as ODS, including CCl<sub>4</sub>, CH<sub>3</sub>CCl<sub>3</sub>, CH<sub>3</sub>Br, CFC-11, CFC-12, CFC-113, Halon-1211, Halon-1301, and R-502.

Sebagai perusahaan pembiayaan, PNM tidak memproduksi, mengimpor, maupun mengekspor BPO dalam rangka operasional usahanya. Namun, Perusahaan tetap menggunakan beberapa senyawa aktif pada peralatan tertentu seperti refrigeran untuk AC dan kulkas, serta zat pemadam api pada Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Dalam penggunaannya, PNM memastikan pemilihan senyawa yang ramah lingkungan dan tidak merusak lapisan ozon. Contohnya, refrigeran yang digunakan adalah jenis R410A, sedangkan senyawa pemadam api untuk APAR berupa powder dan CO<sub>2</sub>. [GRI 305-6]

As a financing institution, PNM does not produce, import, or export ODS as part of its business operations. However, the Company continues to use certain active substances in specific equipment, such as refrigerants for AC units and refrigerators, and fire-suppressing agents in Portable Fire Extinguishers (APAR). In their use, PNM ensures the selection of environmentally friendly compounds that do not damage the ozone layer. For instance, the refrigerant used is R410A, while the fire-suppressing agents in APAR units consist of powder and CO<sub>2</sub>. [GRI 305-6]

Pengelolaan emisi udara lainnya yang menjadi perhatian Perusahaan mencakup nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>), sulfur oksida (SO<sub>x</sub>), serta emisi signifikan lainnya. Salah satu indikator utamanya adalah pemenuhan baku mutu kualitas udara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jenis emisi dan pencemar udara dapat berupa gas maupun partikulat, termasuk karbon monoksida (CO), nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>), sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>), dan hidrokarbon (HC). Hasil pengukuran di Menara PNM pada 19-20 September 2025 menunjukkan bahwa kadar NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub>, dan HC berada di bawah ambang baku mutu yang berlaku. [GRI 305-7]

PNM management of other air emissions includes nitrogen oxides (NO<sub>x</sub>), sulfur oxides (SO<sub>x</sub>), and other significant pollutants. One key indicator is compliance with air quality standards as regulated under the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 22 of 2021 on Environmental Protection and Management. Emission types and air pollutants may include gases or particulates, such as carbon monoxide (CO), nitrogen oxides (NO<sub>x</sub>), sulfur dioxide (SO<sub>2</sub>), and hydrocarbons (HC). Measurements conducted at Menara PNM on September 19-20, 2025 indicated that NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub>, and HC levels were below the applicable quality thresholds. [GRI 305-7]

Selain itu, untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, terutama emisi udara, PNM menerapkan berbagai kebijakan mitigasi, termasuk penanaman pohon yang berfungsi menyerap CO<sub>2</sub> sekaligus menghasilkan O<sub>2</sub>. Pada tahun 2025, Perusahaan menanam sebanyak 86.936 batang pohon. [GRI 305-7][IDX E-07]

Furthermore, to reduce greenhouse gas emissions, particularly air emissions, PNM implements various mitigation measures, including tree planting initiatives that absorb CO<sub>2</sub> while producing O<sub>2</sub>. In 2025, the Company planted a total of 86,936 trees. [GRI 305-7][IDX E-07]

**Hasil Pengukuran Baku Mutu Udara Ambien Area Lobby Kantor Pusat PNM tanggal 19-20 September 2025**

Results of Ambient Air Quality Measurements in the Lobby Area of the PNM Headquarters on September 19–20, 2025.

No.	Parameter Uji Parameters	Baku Mutu Referred Standard	Waktu Pengukuran Measurement Time	Hasil Uji Result	Satuan Unit	Metode Method
1	Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	150	1 Jam	38	µg/m <sup>3</sup>	SNI 7119.7-2017
2	Karbon Monoksida (CO)	10.000	1 Jam	3.178	µg/m <sup>3</sup>	IKM.KHT- 165 (AQMS)
3	Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )	200	1 Jam	40	µg/m <sup>3</sup>	SNI 7119.2-2017
4	Partikulat Debu < 100µm (TSP)	230	24 Jam	135	µg/m <sup>3</sup>	SNI 7119.3-2017
5	Partikulat Debu < 10µm (PM <sub>10</sub> )	75	24 Jam	36	µg/m <sup>3</sup>	SNI 7119.15-2016
6	Timbal (Pb)	2	24 Jam	0,02	µg/m <sup>3</sup>	IKM.KHT- 103 (ICP OES)

**Baku Mutu Referred Standard** : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021  
Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  
Lampiran VII. (Baku Mutu Udara Ambien)

**Keterangan Information** : • Metode Pengambilan Contoh telah terakreditasi oleh KAN No. LP-852-IDN  
(µg/m<sup>3</sup>) Konsentrasi dalam mikrogram per meter kubik,  
pada kondisi atmosfer normal, yaitu tekanan (P) 1 atm dan temperatur (T) 25°C

## Pengelolaan Air dan Air Limbah

### Water and Wastewater Management

PNM menyadari bahwa akses terhadap air bersih merupakan kebutuhan vital bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai salah satu hak asasi manusia. Sejalan dengan hal tersebut, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-6 menekankan pentingnya “memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.” Dalam rangka itu, Perusahaan berkomitmen untuk mengelola penggunaan air secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun masyarakat di sekitar wilayah operasional. [GRI 3-3, 303-1]

Untuk keperluan domestik perkantoran, PNM menggunakan air bersih atau air tawar ( $\leq 1.000$  mg/l Total Padatan Terlarut), misalnya untuk pembilasan kamar kecil, wudu, pencucian peralatan dapur, mobil, motor, dan kebutuhan serupa. Sumber air Kantor Pusat Perusahaan berasal dari Perumda Air Minum Jaya (PAM JAYA). [GRI 3-3]

Seiring waktu, ketersediaan air bersih mengalami tekanan yang semakin tinggi. Pasokan dari PDAM terbatas akibat pencemaran sumber air baku. Kondisi ini mendorong PNM untuk mengelola pemakaian air secara efisien, salah satunya melalui himbuan kepada seluruh karyawan agar menggunakan air dengan bijaksana dan secukupnya.

PNM recognizes that access to clean water is a vital necessity for human life and well-being, acknowledged by the United Nations (UN) as a fundamental human right. In line with this principle, Sustainable Development Goal (SDG) 6 emphasizes the importance of “ensuring availability and sustainable management of water and sanitation for all.” In support of this, the Company is committed to managing water use responsibly to avoid negative impacts on the environment and communities surrounding its operational areas. [GRI 3-3, 303-1]

For office domestic purposes, PNM utilizes clean or freshwater ( $\leq 1,000$  mg/L Total Dissolved Solids), for activities such as restroom use, ablution (wudu), washing kitchen utensils, vehicles, and similar needs. The Company’s Head Office water supply is sourced from Perumda Air Minum Jaya (PAM JAYA). [GRI 3-3]

Over time, the availability of clean water has come under increasing pressure. Supply from the local water utility (PDAM) is limited due to pollution of raw water sources. This situation has prompted PNM to implement measures to use water efficiently, including encouraging all employees to practice prudent and responsible water consumption.

**Tabel Volume Penggunaan Air tahun 2023-2025**  
Table of Water Usage in 2023-2025

Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024	2023
Air PDAM PDAM Water	M <sup>3</sup>	35.274	34.272	28.714

Sesuai tabel di atas, per 31 Desember 2025, volume penggunaan air Kantor Pusat naik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu dipengaruhi oleh meningkatnya intensitas aktivitas operasional di Kantor Pusat, termasuk bertambahnya jumlah aktivitas perkantoran dan pemanfaatan fasilitas gedung seiring dengan optimalisasi kehadiran pegawai. Penggunaan air diperoleh dari biaya penggunaan air dari komponen sewa gedung di mana Kantor Pusat PNM beroperasi dibagi dengan harga langganan per meter kubik. [GRI 303-3][OJK F.8][IDX E-04]

According to the table above, as of December 31, 2025, the water consumption at the Head Office increased compared to the previous year. This was driven by higher operational activity intensity at the Head Office, including an increase in office-related activities and greater use of building facilities due to optimized employee presence. Water usage was calculated based on the water component of the building lease costs where PNM Head Office operates, divided by the subscription price per cubic meter. [GRI 303-3][OJK F.8][IDX E-04]

Dalam hal pengelolaan air limbah (efluen), Perusahaan berkomitmen untuk mencegah pencemaran tanah dan perairan akibat pembuangan limbah. Seluruh pengelolaan dan pengujian kualitas air limbah kantor pusat dilakukan oleh Pal Jaya yang memiliki fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terakreditasi. Air limbah dibuang melalui Pal Jaya sesuai dengan volume penggunaan air, sehingga dapat disimpulkan bahwa volume air yang digunakan sama dengan volume air limbah. [GRI 303-2]

Regarding wastewater (effluent) management, the Company is committed to preventing soil and water pollution resulting from effluent discharge. All wastewater management and quality testing at the Head Office are conducted by Pal Jaya, which operates an accredited Wastewater Treatment Plant (WWTP). Wastewater is discharged through Pal Jaya in accordance with the volume of water used, indicating that the volume of water consumed is equivalent to the volume of wastewater generated. [GRI 303-2]

**Tabel Volume Pembuangan Air Limbah Tahun 2023-2025**  
Table of Volume of Wastewater Discharged in 2023-2025

Deskripsi Description	Satuan Unit	2025	2024	2023
Volume Air Limbah yang Dibuang Volume of Wastewater Discharged	M <sup>3</sup>	35.274	34.272	28.714

Sesuai tabel di atas, volume pembuangan air limbah Kantor Pusat tahun 2025 naik dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan dipengaruhi oleh meningkatnya penggunaan air bersih seiring meningkatnya intensitas aktivitas operasional di Kantor Pusat, termasuk bertambahnya jumlah aktivitas perkantoran dan pemanfaatan fasilitas gedung seiring dengan optimalisasi kehadiran pegawai. [GRI 303-4]

The table above indicates that the volume of wastewater discharged from the Head Office in 2025 increased compared to the previous year. This increase was influenced by the increase of clean water consumption in line with the rising intensity of operational activities at the Head Office, including an increase in office activities and utilization of building facilities as employee attendance is optimized. [GRI 303-4]

Berdasarkan volume pengambilan air dan pembuangan air limbah di atas, konsumsi air di Kantor Pusat pada tahun 2025 dapat dihitung, dan tercatat mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut: [GRI 303-5]

Based on the water withdrawal and wastewater discharge volumes above, the Head Office's water consumption in 2025 was recorded to have increased compared to 2024, as presented in the following table: [GRI 303-5]

**Tabel Volume Konsumsi Air Tahun 2023-2025**  
Table of Water Usage in 2023-2025

Deskripsi Description	Satuan Unit	2025	2024	2023
Volume Konsumsi Air Water Consumption Volume	M <sup>3</sup>	35.274	34.272	28.714





## Pengelolaan Limbah [OJK F.14] Waste Management [OJK F.14]

Operasional kantor PNM menghasilkan air limbah (*effluent*) dari pemanfaatan air bersih, serta berbagai limbah padat dan cair, baik B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) maupun non-B3 seperti sampah organik dan non-organik. Untuk mencegah pencemaran tanah, air, dan udara, Perusahaan mengelola limbah secara tertib sesuai dengan regulasi yang berlaku. Limbah padat non-B3 yang paling dominan adalah kertas bekas yang pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga. Begitu pula dengan limbah padat dan cair B3, seperti lampu bekas, *cartridge printer*, aki bekas dan oli bekas, yang juga dikelola melalui pihak ketiga. [OJK F.13, F.14, F.15]

Dalam rangka mendukung operasional kantor yang ramah lingkungan, PNM menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Untuk mengurangi limbah plastik kemasan minuman sekali pakai, Perusahaan mendorong penggunaan tumbler pribadi bagi karyawan. Selain itu, untuk mempermudah pengelolaan sampah, Perusahaan menyediakan tempat sampah yang memadai dengan pemisahan antara sampah organik, anorganik, dan B3. Pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga dengan biaya tertentu sesuai ketentuan. *Volume* limbah dan pengelolaannya disampaikan dalam tabel berikut: [OJK F.14][IDX E-05]

PNM office operations generate wastewater (*effluent*) from the use of clean water, as well as various solid and liquid wastes, including both hazardous (B3) and non-hazardous materials such as organic and inorganic waste. To prevent soil, water, and air pollution, the Company manages its waste in an orderly manner in accordance with applicable regulations. The most dominant non-hazardous solid waste is used paper, which is managed by third-party service providers. Similarly, hazardous solid and liquid wastes, such as used lamps, printer cartridges, used batteries, and used oil, are also handled through third-party management. [OJK F.13, F.14, F.15]

To support environmentally friendly office operations, PNM implements the 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) principles. To reduce single-use plastic packaging waste from beverages, the Company encourages employees to use personal tumblers. In addition, to facilitate proper waste management, adequate bins are provided with separation for organic, inorganic, and hazardous (B3) waste. Disposal to final waste management sites is carried out through cooperation with third-party service providers, with associated costs applied according to regulations. The volume of waste and its management is presented in the following table: [OJK F.14][IDX E-05]

**Tabel Volume Limbah Padat Non-B3 (Sampah) Tahun 2023-2025**

Total Non-Hazardous Solid Waste Volume in 2023-2025

Deskripsi Description	Satuan Unit	Jumlah Total		
		2025	2024	2023
Total limbah padat yang dihasilkan Total waste waste generated	Kg	54.005	55.617	72.377
Penggunaan kembali Reuse	Kg	-	-	-
Daur ulang Recycle	Kg	11.143	10.959	-
Pengolahan menjadi kompos Composting	Kg	-	-	-
Pembakaran masa Incineration	Kg	-	-	-
Tempat pembuangan akhir Landfill	Kg	42.862	44.658	72.377

**Tabel Volume Limbah B3 Tahun 2023-2025**  
Table of Hazardous Waste in 2023-2025

Deskripsi Description	Satuan Unit	Jumlah Total		
		2025	2024	2023*
Total berat limbah berbahaya yang dihasilkan Total Hazardous Waste Generated	Kg	5.416,4	1.882,3	-
Total berat limbah berbahaya yang diangkut dan diserahkan kepada pihak ketiga Total Hazardous Waste Transported and Handed Over to Third Parties	Kg	5.416,4	1.882,3	-

\*Pada tahun 2023, PNM belum melakukan pencatatan limbah B3.

\*In 2023, PNM has not yet recorded hazardous waste.



### Tumpahan yang Signifikan Significant Spills

Dalam menjalankan usaha, PNM tidak menggunakan zat kimia atau bahan-bahan cair berisiko yang dapat membahayakan kesehatan karyawan maupun merusak lingkungan jika terjadi tumpahan. Oleh karena itu, pada tahun pelaporan tidak tercatat insiden tumpahan signifikan yang berdampak terhadap karyawan, lingkungan, maupun masyarakat. [OJK F.15]

In conducting its business, PNM does not handle chemicals or liquid substances that pose a risk to employee health or the environment in the event of a spill. Therefore, during the reporting period, no significant spill incidents affecting employees, the environment, or the surrounding communities were recorded. [OJK F.15]

### Keanekaragaman Hayati Biodiversity

PNM menyadari bahwa keanekaragaman hayati memberikan berbagai manfaat penting bagi kehidupan manusia, termasuk mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan beragam jenis tumbuhan dan hewan. Selain itu, ekosistem yang kaya spesies berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan, seperti pengaturan iklim, penyerapan karbon, dan penyaringan air. Meskipun bidang usaha PNM tidak berdampak langsung terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati, Perusahaan tetap berkomitmen untuk berkontribusi dalam pelestariannya. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memastikan lokasi kegiatan usaha tidak berdekatan atau berada di kawasan konservasi atau wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. [OJK F.9]

PNM recognizes that biodiversity provides essential benefits to human life, including supporting food security through the provision of diverse plant and animal species. Biodiverse ecosystems also play a key role in maintaining environmental balance, such as regulating climate, absorbing carbon, and filtering water. Although PNM business operations do not directly impact the environment or biodiversity, the Company remains committed to contributing to its preservation. One of the measures undertaken is ensuring that business activities are not located near or within conservation areas or regions with high biodiversity value. [OJK F.9]

Selain itu, PNM turut berkontribusi melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BP BUMN di pilar lingkungan, salah satunya dengan penanaman pohon. Pada tahun 2025, kegiatan ini dilaksanakan di 31 lokasi antara lain di

Additionally, PNM contributes through its State-Owned Enterprise (SOEs) Corporate Social Responsibility (CSR) Program under the environmental pillar, including tree planting initiatives. In 2025, this activity was implemented across 31 locations,

Ambon, Bandung, Bangka Belitung, Banjarmasin, Banyuwangi, Bekasi, Bojonegoro, Cirebon, Garut, Indramayu, Jember, Lamongan, Makassar, Malang, Manado, Palembang, Palopo, Palu, Pati, Pematang Siantar, Purwokerto, Serang, Solo, Sukabumi, Surabaya, Tangerang, Tasikmalaya, Tegal, Tulungagung, Wonogiri dan Yogyakarta dengan total penanaman sebanyak 86.936 batang, mencakup pohon untuk lingkungan serta pohon yang mendukung ketahanan pangan.

Upaya lain untuk menjaga keanekaragaman hayati mencakup konservasi terumbu karang di 5 (lima) lokasi yaitu Makassar, Manado, Palu, Pontianak dan Tasikmalaya. Perusahaan juga melaksanakan kegiatan edukasi dan program pengelolaan sampah, baik sampah anorganik maupun sampah organik di 31 titik lokasi. [OJK F.10]

including Ambon, Bandung, Bangka Belitung, Banjarmasin, Banyuwangi, Bekasi, Bojonegoro, Cirebon, Garut, Indramayu, Jember, Lamongan, Makassar, Malang, Manado, Palembang, Palopo, Palu, Pati, Pematang Siantar, Purwokerto, Serang, Solo, Sukabumi, Surabaya, Tangerang, Tasikmalaya, Tegal, Tulungagung, Wonogiri, and Yogyakarta, with a total of 86,936 trees planted. These included both environmental trees and species that support food security.

Other efforts to protect biodiversity included coral reef conservation across 5 (five) locations, including Makassar, Manado, Palu, Pontianak, and Tasikmalaya. The Company also conducted educational programs and waste management initiatives, covering both organic and inorganic waste, across all 31 locations. [OJK F.10]

**Tabel Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Tahun 2023-2025**

Table of Biodiversity Conservation in 2023-2025

Deskripsi Description	Satuan Unit	2025	2024	2023
Penanaman Pohon Tree Planting	Bibit Seed	86.936	287.761	79.075
Transplantasi Terumbu Karang Coal Reef Transplantation	Titik Lokasi Location	5 Titik 5 Locations	5 Titik 5 Locations	2 Titik 2 Locations

### Pengaduan Masalah Lingkungan [OJK F.16]

Environmental Complaints [OJK F.16]

PNM berkomitmen untuk mematuhi seluruh regulasi lingkungan dalam menjalankan operasionalnya sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan keberlanjutan perusahaan. Komitmen ini diwujudkan melalui penerapan praktik-praktik ramah lingkungan yang selaras dengan peraturan perundang-undangan, termasuk pengelolaan energi, emisi, limbah, dan air limbah secara bertanggung jawab.

Sejalan dengan itu, PNM menyediakan saluran pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya, khususnya terkait potensi dampak lingkungan dari operasional perusahaan. Pengaduan dapat disampaikan melalui telepon, *website*, atau *e-mail*, dan Perusahaan berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap laporan serta mencari solusi terbaik. Hingga 31 Desember 2025, PNM tidak menerima pengaduan terkait lingkungan. [OJK F.16][GRI 2-27]

PNM is committed to full compliance with environmental regulations in the course of its operations as part of its corporate social responsibility and sustainability agenda. This commitment is reflected in the implementation of environmentally responsible practices aligned with prevailing laws and regulations, including the management of energy, emissions, waste, and wastewater.

In line with this commitment, PNM provides a dedicated grievance mechanism accessible to the public and other stakeholders, specifically to report potential environmental impacts arising from the Company's operations. Complaints can be submitted via telephone, the Company's website, or email, and PNM is committed to responding to each report and seeking the most appropriate solutions. As of December 31, 2025, PNM did not receive any environmental complaints. [OJK F.16][GRI 2-27]

### Biaya Lingkungan

Environmental Cost

PNM merealisasikan biaya lingkungan melalui pembiayaan Program TJSL Pilar Lingkungan pada tahun 2025 sebesar Rp3.813.183.880. Biaya Lingkungan pada tahun pelaporan digunakan untuk Program Sanitasi SMART sebesar 1.196.517.731, Program Penanaman Pohon dan Konservasi Terumbu Karang sebesar 475.128.190, Program *Ecolife* PNM sebesar 383.638.007 dan Program Budidaya Maggot sebesar 133.578.325. [OJK F.4]

PNM environmental expenditure in 2025 was realized through financing the Environmental Pillar of the Corporate Social Responsibility (CSR) Program, amounting to IDR3,813,183,880, a decrease compared to 2024, which totaled IDR5,864,820,188. Environmental expenses for the reporting year were allocated as follows: 1,196,517,731 for the SMART Sanitation Program, the Tree Planting and Coral Reef Conservation Program in the amount of 475,128,190, the PNM *Ecolife* Program in the amount of 383,638,007, and the Maggot Farming Program in the amount of 133,578,325. [OJK F.4]





10

# **Kinerja Sosial Keberlanjutan**

*Sustainable Social Performance*



## Kinerja Sosial Keberlanjutan Sustainable Social Performance



PNM memandang kinerja sosial sebagai bagian penting dari keberlanjutan mengingat mandat utama perusahaan dalam pemberdayaan pengusaha ultra mikro. Oleh karena itu, pengungkapan aspek sosial dalam laporan keberlanjutan bukan hanya kewajiban pelaporan, melainkan wujud transparansi atas dampak yang dihasilkan bagi karyawan, nasabah, dan masyarakat. Melalui penyampaian yang terbuka ini, PNM berupaya memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan dan memastikan bahwa nilai sosial yang tercipta terus berkembang secara berkelanjutan.

Dalam pengelolaan internal, PNM fokus pada penguatan kapasitas SDM serta penciptaan lingkungan kerja yang aman melalui penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Pengembangan talenta, pelatihan berkelanjutan, dan budaya kerja yang inklusif menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas layanan di lapangan. Pada saat yang sama, penerapan prinsip-prinsip K3 dilakukan secara konsisten untuk melindungi karyawan dari risiko operasional sehingga aktivitas pemberdayaan dapat berlangsung optimal dan berkesinambungan.

Di sisi eksternal, PNM terus meningkatkan kualitas layanan dan memastikan produk yang ditawarkan relevan, aman, serta memberikan perlindungan bagi nasabah. Hal ini diperkuat melalui peningkatan literasi keuangan, penyempurnaan proses layanan, dan pemanfaatan teknologi. Melalui program TJSJ yang terarah, PNM juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas usaha. Kombinasi antara kualitas layanan dan kontribusi sosial ini menjadi dasar bagi PNM dalam menciptakan dampak positif

PNM views social performance as a core element of sustainability, given the Company's primary mandate to empower ultra-micro entrepreneurs. Accordingly, disclosure of social aspects in the sustainability report is not merely a reporting obligation but also a demonstration of transparency regarding the impact generated for employees, customers, and communities. Through this disclosure, PNM aims to strengthen stakeholder trust and ensure that the social value created continues to grow sustainably.

Within the organization, PNM focuses on strengthening human capital capacity and creating a safe working environment through the consistent application of Occupational Health and Safety (OHS) standards. Talent development, continuous training, and an inclusive work culture form the foundation for enhancing service quality in the field. At the same time, the application of OHS principles protects employees from operational risks, ensuring that empowerment activities can proceed optimally and sustainably.

Externally, PNM continuously improves service quality and ensures that the products offered are relevant, safe, and provide adequate protection for customers. This is reinforced through financial literacy programs, service process improvements, and the utilization of technology. Through well-targeted Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives, PNM also delivers tangible benefits to communities via empowerment programs and business capacity-building activities. The combination of high-quality services and social contributions underpins PNM efforts



yang lebih luas dan berkelanjutan.



**Landasan Kebijakan [GRI 3-3]**  
Policy Framework [GRI 3-3]

Komitmen PNM untuk memenuhi tanggung jawab kepada segenap pemangku kepentingan internal maupun eksternal merujuk pada berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia di antaranya:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
6. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi;
9. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja;
12. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero);
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan;
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat;
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan.
19. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 2/SE0JK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pengusaha Jasa Keuangan;

Sejalan dengan regulasi tersebut, PNM kemudian menetapkan berbagai kebijakan internal yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan. Kebijakan internal tersebut di antaranya:

to generate a broader, sustainable positive impact.

PNM commitment to fulfilling its responsibilities to both internal and external stakeholders refers to a range of applicable regulations in Indonesia, including:

1. Law Number 1 of 1970 on Occupational Safety;
2. Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection;
3. Law Number 13 of 2003 on Manpower;
4. Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies;
5. Law Number 24 of 2011 on Social Security Organizing Agencies;
6. Law Number 6 of 2023 concerning Ratification of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation;
7. Law Number 17 of 2023 on Health;
8. Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection;
9. Government Regulation Number 50 of 2012 on Implementation of Occupational Health and Safety Management Systems;
10. Government Regulation Number 36 of 2021 on Wages;
11. Presidential Regulation Number 7 of 2019 on Occupational Diseases;
12. Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 on Governance Guidelines and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
13. Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 on Implementation of Sustainable Finance for Financial Institutions, Issuers, and Public Companies;
14. Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.05/2019 on Supervision of PT Permodalan Nasional Madani (Persero);
15. Financial Services Authority Regulation Number 31/POJK.07/2020 on Consumer and Public Services in the Financial Services Sector;
16. Financial Services Authority Regulation Number 22 of 2023 on Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector;
17. Financial Services Authority Regulation Number 3 of 2023 on Enhancing Financial Literacy and Inclusion for Consumers and the Public in the Financial Services Sector;
18. Financial Services Authority Regulation Number 12 of 2024 on Implementation of Anti-Fraud Strategies for Financial Service Institutions.
19. Financial Services Authority Circular Letter Number 2/SE0JK.07/2014 on Consumer Service and Complaint Resolution in the Financial Services Sector;

In line with the aforementioned regulations, PNM has established various internal policies tailored to the needs of each stakeholder group. These internal policies include:

1. Surat Keputusan Direksi PT Permodalan Nasional Madani No. SK-55/PNM-DIR/VII/25 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code Of Corporate Governance*);
  2. Surat Keputusan Direksi PT Permodalan Nasional Madani No. SK-030/PNM-DIR/IV/24 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
  3. Surat Keputusan Direksi PT Permodalan Nasional Madani No. SK-034/PNM-DIR/IV/24 tentang Kebijakan Pelindungan Konsumen;
  4. Surat Keputusan Direksi PT Permodalan Nasional Madani No. SK-036/PNM-DIR/IV/24 tentang Kebijakan Layanan Pengaduan Konsumen;
  5. Surat Keputusan Direksi PT Permodalan Nasional Madani No. SK-038/PNM-DIR/IV/24 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha;
  6. Surat Keputusan Direksi PT Permodalan Nasional Madani No. SK-047/PNM-DIR/V/24 tentang Kebijakan Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*);
  7. Surat Keputusan Direksi PT Permodalan Nasional Madani No. SK-043/PNM-DIR/V/24 tentang Kebijakan dan Strategi Keberlanjutan (*Sustainability Policy and Strategy*);
  8. Surat Keputusan Direksi PT Permodalan Nasional Madani No. SK-084/PNM-DIR/VIII/23 tentang Kebijakan Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Konsumen sebagaimana telah dilakukan Addendum dengan Surat Keputusan Direksi No. SK-063/PNMDIR/VII/24 tentang Addendum Kesatu No. SK-084/PNM-DIR/VIII/23 Tentang Kebijakan Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Konsumen.
  9. Surat Keputusan Direksi PT Permodalan Nasional Madani No. SK-083/PNM-DIR/IX/24 tentang Pedoman Pelindungan Data Pribadi;
  10. Surat Keputusan Direksi PT Permodalan Nasional Madani No. SK-108/PNM-DIR/XI/24 tentang Pedoman Penerapan Strategi *Anti Fraud*;
  11. Surat Keputusan Direksi PT Permodalan Nasional Madani No. SK-011/PNM-DIR/I/24 tentang Kebijakan Pengendalian Gratifikasi.
1. Decree of the Board of Directors Number SSK-55/PNM-DIR/VII/25 on Code of Corporate Governance;
  2. Decree of the Board of Directors Number SK-030/PNM-DIR/IV/24 on Occupational Health and Safety Management System (SMK3) Guidelines;
  3. Decree of the Board of Directors Number SK-034/PNM-DIR/IV/24 on Consumer Protection Policy;
  4. Decree of the Board of Directors Number SK-036/PNM-DIR/IV/24 on Consumer Complaint Service Policy;
  5. Decree of the Board of Directors Number SK-038/PNM-DIR/IV/24 on Business Continuity Management System Guidelines;
  6. Decree of the Board of Directors Number SK-047/PNM-DIR/V/24 on Whistleblowing System Policy;
  7. Decree of the Board of Directors Number SK-043/PNM-DIR/V/24 on Sustainability Policy and Strategy;
  8. Decree of the Board of Directors Number SK-084/PNM-DIR/VIII/23 on Consumer Financial Literacy and Inclusion Policy, as amended by Decree Number SK-063/PNM-DIR/VII/24, First Addendum to SK-084/PNM-DIR/VIII/23;
  9. Decree of the Board of Directors Number SK-083/PNM-DIR/IX/24 on Personal Data Protection Guidelines;
  10. Decree of the Board of Directors Number SK-108/PNM-DIR/XI/24 on Implementation Guidelines for Anti-Fraud Strategy;
  11. Decree of the Board of Directors Number SK-011/PNM-DIR/I/24 on Gratification Control Policy.

## Metrik dan Target

### Metric and Target

Isu Material Material Issue	Metrik Metric	Target Target	Pencapaian 2025 2025 Achievement
Retensi dan Pengembangan SDM HR Retention and Development	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat <i>turnover</i> tahunan</li> <li>• Jam pelatihan per karyawan</li> <li>• Annual Turnover Rate</li> <li>• Training Hours per Employee</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Turnover</i> rata-rata AO pada tahun 2025 sebesar 3,50%</li> <li>• Rata-rata 36 jam pelatihan per karyawan per tahun</li> <li>• The average turnover of AO in 2025 is 3.50%</li> <li>• 36 hours per employee per year</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Turnover</i> rata-rata AO pada tahun 2025 sebesar 3,49%</li> <li>• <i>Turnover</i> rata-rata PNM pada tahun 2025 sebesar 1,16%</li> <li>• Average turnover of AO in 2025 is 3.49%</li> <li>• Average turnover of PNM in 2025 is 1.16%</li> </ul>

## Ketenagakerjaan Employment

Karyawan memegang peran strategis dalam keberlanjutan PNM, terutama karena Perusahaan beroperasi di sektor pembiayaan yang sangat mengandalkan kualitas layanan kepada nasabah. Karyawan yang terampil, kompeten, dan berdedikasi merupakan aset utama yang memastikan operasional perusahaan berjalan optimal serta memenuhi standar kualitas yang diharapkan manajemen dan nasabah. Untuk menghadirkan pengalaman layanan yang unggul, PNM membutuhkan karyawan yang tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga profesional dan berorientasi pada pelayanan yang ramah. [GRI 3-3]

Kualitas karyawan yang unggul tidak hanya memastikan ketahanan operasional, tetapi juga membuka peluang bagi PNM untuk terus tumbuh dan memperkuat posisinya sebagai lembaga pembiayaan yang terpercaya. Menyadari peran strategis tersebut, PNM berkomitmen menerapkan strategi pengelolaan dan pengembangan karyawan secara menyeluruh. Pendekatan ini dimulai dari proses rekrutmen sebagai tahap awal penjangkaran talenta terbaik yang sesuai kebutuhan perusahaan hingga pengelolaan karyawan *existing* melalui berbagai program pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, dan peningkatan kesejahteraan.

### Rekrutmen dan Turnover Recruitment and Turnover

PNM melaksanakan proses rekrutmen secara terbuka dan nondiskriminatif, tanpa membedakan *gender*, suku, agama, ras, pandangan politik, maupun karakteristik lainnya. Setiap individu yang memenuhi kualifikasi memiliki kesempatan yang sama untuk melamar dan mengikuti proses seleksi, termasuk masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Rekrutmen dilakukan untuk berbagai tingkatan, mulai dari *fresh graduate* hingga profesional, guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang berkembang seiring dinamika organisasi. Seluruh tahapan seleksi dirancang untuk memastikan bahwa PNM memperoleh talenta terbaik yang sesuai dengan kompetensi dan nilai perusahaan.

Hingga 31 Desember 2025, sebagai implementasi Prosedur Mutu PNM/PM-02.05.01 tentang Rekrutmen Revisi 0.2 tanggal 11 November 2024 dan SK Direksi Nomor SK-034/PNM-DIR/IV/25 tentang Kebijakan Rekrutmen dan Seleksi Karyawan, PNM merekrut karyawan baru sebanyak 58.712 orang, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 52.915 orang. Rincian komposisi karyawan baru berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, dan wilayah kerja disajikan pada tabel-tabel berikut: [GRI 401-1].

Employees play a strategic role in PNM sustainability, particularly given the Company's operations in the financing sector, which heavily relies on the quality of service provided to clients. Skilled, competent, and dedicated employees are the Company's primary asset, ensuring that operations run optimally while meeting the quality standards expected by management and clients. To deliver an exceptional service experience, PNM requires employees who are not only technically proficient but also professional and customer-oriented. [GRI 3-3]

High-quality employees not only ensure operational resilience but also create opportunities for PNM to continue growing and strengthening its position as a trusted financial institution. Recognizing this strategic role, PNM is committed to implementing comprehensive employee management and development strategies. This approach begins with recruitment as the initial stage of sourcing top talent aligned with the Company's needs and extends to managing existing employees through competency development programs, performance evaluations, and welfare enhancements.

PNM conducts recruitment in an open and non-discriminatory manner, regardless of gender, ethnicity, religion, race, political affiliation, or other characteristics. Every individual meeting the qualifications has an equal opportunity to apply and participate in the selection process, including members of communities near the Company's operational areas. Recruitment is conducted across various levels, from fresh graduates to experienced professionals, to meet workforce needs in line with the organization's evolving dynamics. All stages of the selection process are designed to ensure that PNM secures the best talent in accordance with the Company's competencies and values.

As of December 31, 2025, in line with PNM Quality Procedure PM/PM-02.05.01 on Recruitment (Revision 0.2, November 11, 2024) and Decree of the Board of Directors Number SK-034/PNM-DIR/IV/25 on Employee Recruitment and Selection Policy, PNM recruited 58,712 new employees, an increase from 52,915 employees in 2024. The composition of new employees by gender, age group, and work location is presented in the following tables: [GRI 401-1].



## Komposisi Karyawan Baru Berdasarkan Jenis Kelamin

Composition of New Employees by Gender

Jenis kelamin Gender	Jumlah Karyawan/ Number of Employees 2025	Jumlah Karyawan/ Number of Employees 2024	Jumlah Karyawan/ Number of Employees 2023
Pria Male	3.720	4.847	6.158
Wanita Female	54.992	48.068	45.560
<b>Jumlah</b> Total	<b>58.712</b>	<b>52.915</b>	<b>51.718</b>

## Komposisi Karyawan Baru Berdasarkan Kelompok Usia

Composition of New Employees by Age Range

Rentang Usia Age Range	Jumlah Karyawan/ Number of Employees 2025	Jumlah Karyawan/ Number of Employees 2024	Jumlah Karyawan/ Number of Employees 2023
≤30 tahun ≤30 years	58.421	52.643	51.369
30-50 tahun 30-50 years	289	270	349
≥50 tahun ≥50 years	2	2	0
<b>Jumlah</b> Total	<b>58.712</b>	<b>52.915</b>	<b>51.718</b>

## Komposisi Karyawan Baru Berdasarkan Wilayah Kerja

Composition of New Employees by Work Location

Wilayah Kerja Work Location	Jumlah Karyawan/ Number of Employees 2025	Jumlah Karyawan/ Number of Employees 2024	Jumlah Karyawan/ Number of Employees 2023
Kantor Pusat Head Office	138	123	199
Kantor di Daerah (Kantor Cabang/Layanan) Regional Offices (Branch/Service Offices)	58.574	52.792	51.519
<b>Jumlah</b> Total	<b>58.712</b>	<b>52.915</b>	<b>51.718</b>

PNM secara rutin memantau efisiensi proses perekrutan dengan menghitung rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk setiap karyawan baru, sekaligus mencatat persentase perekrutan internal dari total rekrutmen. Pada 2025, rata-rata biaya perekrutan mencapai sekitar Rp295.000 per karyawan dengan 46% posisi diisi melalui promosi atau transfer internal. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengendalikan biaya operasional SDM, tetapi juga mendorong pengembangan karier karyawan yang sudah ada, memperkuat loyalitas, dan memastikan keberlanjutan kompetensi internal dalam mendukung tujuan strategis PNM.

Sepanjang 2025, PNM membuka 127 posisi baru dan berhasil mengisi 117 di antaranya, mencatat tingkat pengisian sebesar 92%. Hasil ini mencerminkan efektivitas proses rekrutmen dan promosi internal, sekaligus menegaskan komitmen PNM dalam mengembangkan karier karyawan yang ada. Dengan pengisian posisi yang cepat dan tepat, Perusahaan mampu

PNM regularly monitors the efficiency of its recruitment process by calculating the average cost incurred per new employee, while also tracking the percentage of internal hires relative to total recruitment. In 2025, the average recruitment cost reached approximately IDR295,000 per employee, with 46% of positions filled through internal promotion or transfer. This approach not only helps control HR operational costs but also encourages career development for existing employees, strengthens loyalty, and ensures the continuity of internal competencies in support of PNM strategic objectives.

Throughout 2025, PNM opened 127 new positions and 117 of which were successfully filled recording a fill rate of 92%. These results reflect the effectiveness of both the recruitment and internal promotion processes and underscore PNM commitment to developing the careers of existing employees. By ensuring positions are filled promptly and appropriately, the Company



memastikan kelancaran operasional dan kesiapan menghadapi tantangan strategis, sambil membangun SDM yang kompeten dan berkelanjutan. Selain bertambah melalui proses rekrutmen, jumlah karyawan PNM juga mengalami pengurangan akibat karyawan yang mengakhiri hubungan kerja dengan Perseroan berdasarkan alasan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan. Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 24.077 karyawan meninggalkan PNM, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 23.680 orang. Rincian komposisi karyawan yang keluar berdasarkan gender, kelompok usia, dan wilayah kerja disajikan pada tabel berikut: [GRI 401-1]

can maintain smooth operations and readiness to face strategic challenges, while building a competent and sustainable workforce. In addition to growth through recruitment, PNM workforce also decreased due to employees exiting the Company for legitimate reasons in accordance with applicable regulations. In 2025, 24,077 employees left PNM, increasing from 23,680 employees in 2024. The composition of employees who left the Company, based on gender, age group, and work location, is presented in the following tables: [GRI 401-1]

### Komposisi Karyawan Meninggalkan Perusahaan Berdasarkan Jenis Kelamin Composition of Employees Leaving the Company by Gender

Jenis Kelamin Gender	Jumlah Karyawan/ Number of Employees 2025	Jumlah Karyawan/ Number of Employees 2024	Jumlah Karyawan/ Number of Employees 2023
Pria Male	21.656	3.100	21.611
Wanita Female	2.421	20.580	4.315
<b>Jumlah Total</b>	<b>24.077</b>	<b>23.680</b>	<b>25.296</b>

### Komposisi Karyawan Meninggalkan Perusahaan Berdasarkan Kelompok Usia Composition of Employees Leaving the Company by Age Range

Rentang Usia Age Range	Jumlah Karyawan/ Number of Employees 2025	Jumlah Karyawan/ Number of Employees 2024	Jumlah Karyawan/ Number of Employees 2023
≤30 tahun ≤30 years	23.391	23.207	25.443
30-50 tahun 30-50 years	651	464	478
≥50 tahun ≥50 years	35	9	5
<b>Jumlah Total</b>	<b>24.077</b>	<b>23.680</b>	<b>25.926</b>

### Komposisi Karyawan Meninggalkan Perusahaan Berdasarkan Wilayah Kerja Composition of Employees Leaving the Company by Work Location

Wilayah Kerja Work Location	Jumlah Karyawan/ Number of Employees 2025	Jumlah Karyawan/ Number of Employees 2024	Jumlah Karyawan/ Number of Employees 2023
Kantor Pusat Head Office	87	54	103
Kantor di Daerah (Kantor Cabang/Layanan) Regional Offices (Branch/Service Offices)	23.990	23.626	25.823
<b>Jumlah Total</b>	<b>24.077</b>	<b>23.680</b>	<b>25.926</b>

## Penyebab Karyawan Meninggalkan Perusahaan

Reasons Employees Leaving the Company

Uraian Description	Jumlah Karyawan/ Number of Employees 2025	Jumlah Karyawan/ Number of Employees 2024	Jumlah Karyawan/ Number of Employees 2023
Mengundurkan Diri Resignation	22.932	22.724	25.277
Meninggal Dunia Deceased	26	22	38
Alasan Lainnya Other Reasons	1.119	934	611
<b>Jumlah Total</b>	<b>24.077</b>	<b>23.680</b>	<b>25.926</b>

Berdasarkan data karyawan yang bergabung maupun meninggalkan Perseroan, tingkat *turnover* karyawan PNM pada tahun 2025 tercatat sebesar 33,9%, turun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 34,2%. Untuk menekan tingkat *turnover*, Perusahaan menerapkan sejumlah kebijakan antara lain peningkatan selektivitas dan ketelitian dalam pemilihan kandidat, penyempurnaan proses onboarding, upaya meningkatkan keterikatan (*engagement*) karyawan beserta keluarga, pemberian insentif yang kompetitif, serta peninjauan berkala terhadap paket remunerasi. [GRI 401-1]

Based on data of employees joining and leaving the Company, PNM employee turnover rate in 2025 was 33.9%, decreasing from 34.2% in 2024. To manage and reduce turnover, the Company has implemented several policies, including enhancing the selectivity and rigor in candidate selection, improving the onboarding process, strengthening employee and family engagement, providing competitive incentives, and conducting periodic reviews of the remuneration package. [GRI 401-1]

## Tingkat Pergantian Pegawai Tahun 2025 [IDX S-03]

Employee Turnover Rate in 2025 [IDX S-03]

Uraian Description	Jumlah Pegawai (dalam tahun pelaporan) Number of Employees (in the reporting year)	Presentase Pegawai (dalam tahun pelaporan) Employee Percentage (in the reporting year)
Jumlah Pegawai <i>Resign</i> /Pemutusan Hubungan Kerja Number of Employees Resigning/Terminated	24.077 orang   people	33,64%
Jumlah Pegawai Baru/Pengganti Number of New/Replacement Employees	58.712 orang   people	82,06%

Tunjangan Karyawan Berdasarkan Status  
Employee Benefits by Employment Status

Berdasarkan status kepegawaian, karyawan PNM diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu karyawan tetap, kontrak, dan alih daya. Meskipun berbeda status, hal ini tidak memengaruhi jenis tunjangan yang diterima sebagaimana disajikan dalam tabel berikut: [GRI 401-2]

Based on employment status, PNM employees are classified into three categories: permanent, contract, and outsourced. Despite the differences in employment status, the types of benefits provided remain consistent across all categories, as presented in the table below: [GRI 401-2]

## Tabel Tunjangan Karyawan Berdasarkan Status

Table of Employee Benefits by Employment Status

Jenis Tunjangan Allowance Type	Karyawan Tetap Permanent Employees	Karyawan Kontrak Contractors	Karyawan Alih Daya Outsourced Employees
Tunjangan Fungsional Functional Allowance	√	√	√
Tunjangan Transport Transportation Allowance	√	√	√





Jenis Tunjangan Allowance Type	Karyawan Tetap Permanent Employees	Karyawan Kontrak Contractors	Karyawan Alih Daya Outsourced Employees
Tunjangan Kejuahan/Perumahan *) Distance/Housing Allowance *)	√	√	√
Tunjangan Cuti Leave Allowance	√	√	√
Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance	√	√	√

\*)diberikan khusus bagi karyawan yang domisilinya jauh dari kantor/sesuai dengan kebijakan PNM.  
\*)Provided specifically for employees who live far from the office/in accordance with PNM policy.

### Cuti Melahirkan Maternity and Paternity Leave

PNM memastikan pemenuhan hak-hak normatif seluruh karyawan, termasuk hak cuti melahirkan. Sesuai ketentuan perundang-undangan, karyawan perempuan berhak atas cuti melahirkan selama 45 hari sebelum dan 45 hari setelah persalinan. Fasilitas ini memungkinkan karyawan mempersiapkan proses kelahiran dengan baik dan setelah masa cuti berakhir, karyawan dapat kembali ke posisi semula. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Perusahaan Pasal 22 Ayat 3 huruf F yang telah disesuaikan dengan regulasi ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, karyawan laki-laki memperoleh cuti selama 5 (lima) hari kerja untuk mendampingi istri yang melahirkan. [GRI 3-3]

Berdasarkan data kepegawaian, pada tahun 2025, karyawan perempuan yang berhak cuti melahirkan yaitu mereka yang sudah menikah tercatat sebanyak 5.177 orang, di antara jumlah tersebut, yang mengambil cuti melahirkan sebanyak 1.921 orang. Dari jumlah itu, yang kembali bekerja setelah masa cuti berakhir sebanyak 1.883 orang atau 98%. Selanjutnya, sesuai data cuti karyawan tahun 2024, dari 1.094 orang karyawan perempuan yang mengambil cuti melahirkan tercatat sebanyak 859 orang atau 79% kembali bekerja hingga 12 bulan berikutnya. Sementara itu, karyawan laki-laki yang berhak cuti untuk mendampingi persalinan istrinya pada tahun 2025 tercatat sebanyak 5.629 orang, dan yang mengambil cuti sebanyak 309 orang dan 100% kembali bekerja setelah masa cutinya habis. Selanjutnya, sesuai data tahun 2024, dari 298 orang karyawan laki-laki yang cuti, sebanyak 281 orang atau 94% kembali bekerja dan tetap bekerja hingga 12 bulan berikutnya. [GRI 401-3]

PNM ensures the fulfillment of all employees' statutory rights, including maternity leave. In accordance with applicable labor regulations, female employees are entitled to 45 days of leave before and 45 days after childbirth. This provision allows employees to adequately prepare for delivery and to return to their original positions after the leave period. Meanwhile, under Company Regulation Article 22, Paragraph 3, Letter F, which aligns with labor laws and Law Number 4 of 2024 on Welfare of Mothers and Children during the First 1,000 Days of Life, male employees are entitled to 5 (five) working days of leave to accompany their spouse during childbirth. [GRI 3-3]

Based on employee data, in 2025, a total of 5,177 female employees were eligible for maternity leave, namely those who were married. Of this number, 1,921 employees took maternity leave. Among those who took maternity leave, 1,883 employees, or 98%, returned to work upon the completion of their leave period. Furthermore, based on employee leave data for 2024, of the 1,094 female employees who took maternity leave, 859 employees, or 79%, returned to work and remained employed for the subsequent 12 months. Meanwhile, in 2025, a total of 5,629 male employees were eligible for paternity leave to accompany their spouses during childbirth. Of this number, 309 employees took paternity leave, and 100% of them returned to work after the completion of their leave period. In addition, based on 2024 data, of the 298 male employees who took paternity leave, 281 employees, or 94%, returned to work and continued working for the subsequent 12 months. [GRI 401-3]

### Realisasi Cuti Melahirkan Tahun 2023-2025 Realization of Maternity and Paternity Leave in 2023-2025

Keterangan Description	2025		2024		2023	
	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female	Pria Male
Jumlah karyawan yang berhak mendapatkan hak cuti Number of employees entitled to maternity and paternity leave	5.177	5.629	3.875	5.615	3.851	5.758
Jumlah karyawan yang menggunakan hak cuti Number of employees using their leave entitlement	1.921	309	1.094	298	1.222	329



Keterangan Description	2025		2024		2023	
	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female	Pria Male
Jumlah karyawan yang kembali bekerja setelah masa cuti berakhir Number of employees returning to work after their leave period ended	1.883	309	1.073	298	1.204	329
Jumlah karyawan yang kembali bekerja setelah masa cuti berakhir, yang masih dipekerjakan kembali 12 bulan setelah kembali bekerja (cuti diambil pada tahun sebelumnya) Number of employees returning to work after their leave period ended and were still employed 12 months after returning to work (leave was taken in the previous year)	1.603	281	859	281	712	266
Tingkat karyawan yang menggunakan hak cuti yang kembali bekerja (%) Percentage of employees using their leave entitlement and returning to work (%)	98	100	98	100	99	100
Tingkat karyawan yang kembali setelah masa cuti berakhir, yang masih dipekerjakan kembali 12 bulan setelah kembali bekerja (%) Percentage of employees returning to work after their leave ended and remained employed 12 months after returning (%)	83	91	79	94	58	81

### Upah Minimum Regional [OJK F.20] Regional Minimum Wage [OJK F.20]

Pemenuhan upah minimum bagi PNM tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari strategi perusahaan dalam membangun hubungan industrial yang harmonis, mendorong produktivitas, serta menjaga keberlanjutan usaha. Dalam praktik pengupahan, Perseroan berupaya memenuhi prinsip keadilan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Sejalan dengan itu, PNM menerapkan sistem pengupahan yang bebas dari diskriminasi sehingga setiap karyawan, baik laki-laki maupun perempuan, memperoleh perlakuan yang setara. Dengan demikian, rasio gaji karyawan laki-laki dan perempuan, termasuk berdasarkan level jabatan, adalah sama. Apabila terdapat perbedaan tingkat upah, hal tersebut murni didasarkan pada capaian kinerja dan prestasi masing-masing individu. Komitmen ini sejalan dengan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan serta Konvensi ILO No. 100/1951 tentang Pengupahan yang Sama bagi Pekerja Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya (*Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value*).

Dalam memenuhi ketentuan terkait upah minimum, khususnya bagi karyawan tetap pada level terendah, Perusahaan memastikan pemberian remunerasi sesuai kebutuhan hidup layak. Besaran upah minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan harga kebutuhan pokok, tingkat inflasi, standar kelayakan hidup, dan variabel lain yang ditentukan pemerintah daerah di wilayah operasional Perusahaan. Berdasarkan prinsip tersebut, PNM menjamin bahwa remunerasi karyawan tetap level terendah telah memenuhi bahkan melampaui ketentuan upah minimum regional yang berlaku di masing-masing daerah.

Ensuring compliance with the regional minimum wage is not only a legal obligation for PNM but also a strategic component in fostering harmonious industrial relations, enhancing productivity, and supporting business sustainability. In its wage practices, the Company strives to uphold fairness to motivate employees and boost performance. Accordingly, PNM implements a non-discriminatory remuneration system, ensuring that all employees, both male and female, receive equal treatment. As such, the salary ratio between male and female employees, including by job level, is equal. Any wage differences are strictly based on individual performance and achievements. This commitment aligns with labor regulations and ILO Convention Number 100/1951 concerning Equal Remuneration for Male and Women Workers for Work of Equal Value.

In meeting minimum wage requirements, particularly for permanent employees at the lowest level, the Company ensures remuneration reflects a decent standard of living. The minimum wage is determined based on the cost of basic needs, inflation rates, living standards, and other variables set by local governments in the Company's operational regions. In line with this principle, PNM guarantees that the remuneration for permanent employees at the lowest level meets or even exceeds the applicable regional minimum wage.



Implementasi kebijakan remunerasi di PNM, termasuk bagi karyawan tetap di tingkat terendah, selaras dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Upah karyawan tetap di tingkat terendah dibandingkan UMR/Provinsi selengkapnya disampaikan dalam tabel berikut: [OJK F.20]

PNM remuneration policy implementation, including for permanent employees at the lowest level, aligns with the Minister of Manpower and Transmigration Decree Number 226 of 2000 concerning Amendments to Articles 1, 3, 4, 8, 11, 20, and 21 of Minister of Manpower Regulation Number PER-01/MEN/1999 on Minimum Wages, as well as the Ministry of Manpower Regulation Number 16 of 2024 on Determination of the 2025 Minimum Wage. The comparison of the Company's lowest-level permanent employee wages and regional minimum wages is presented in the table below: [OJK F.20]

**Tabel Upah Minimum Regional Tahun 2025 (Rupiah)**  
Table of Regional Minimum Wage in 2025 (IDR)

Unit Usaha Business Unit	Provinsi/Daerah (PT PNM) Province/Area (PT PNM)	Upah Minimum Provinsi/Kota/ Kabupaten Tahun 2025 Provincial, City, Regency Minimum Wage in 2025	Imbal Jasa Karyawan Tingkat Terendah Compensation for Entry-Level Employees	%
1	2	3	4	4:3
Kantor Pusat Head Office	UMP DKI Jakarta	5.396.761	5.700.000	106
Cabang Aceh Aceh Branch	UMP Aceh	3.685.616	3.779.194	103
Cabang Ambon Ambon Branch	Kota Ambon Ambon City	3.185.733	3.340.000	105
Cabang Balikpapan Balikpapan Branch	Kota Balikpapan Balikpapan City	3.701.509	4.060.000	110
Cabang Bandung Bandung Branch	Kota Bandung Bandung City	4.482.914	4.654.700	104
Cabang Bangka Belitung Bangka Belitung Branch	UMP Bangka Belitung	3.876.600	4.213.677	109
Cabang Banjarmasin Banjarmasin Branch	Kota Banjarmasin Banjarmasin City	3.599.182	3.906.851	109
Cabang Banjarnegara Banjarnegara Branch	Kabupaten Banjarnegara Banjarnegara Regency	2.170.475	2.700.000	124
Cabang Banyuwangi Banyuwangi Branch	Kabupaten Banyuwangi Banyuwangi Regency	2.810.139	3.266.000	116
Cabang Bau-Bau Bau-Bau Branch	UMP Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi Minimum Wage	3.073.552	3.499.293	114
Cabang Bekasi Bekasi Branch	Kota Bekasi Bekasi City	5.558.515	6.084.811	109
Cabang Blitar Blitar Branch	Kabupaten Blitar Blitar Regency	2.413.974	2.915.000	121
Cabang Bogor Bogor Branch	Kota Bogor Bogor City	5.126.897	5.306.400	104
Cabang Bojonegoro Bojonegoro Branch	Kabupaten Bojonegoro Bojonegoro Regency	2.525.132	3.103.443	123
Cabang Cirebon Cirebon Branch	Kota Cirebon Cirebon City	2.697.685	3.095.598	115
Cabang Denpasar Denpasar Branch	Kota Denpasar Denpasar City	3.298.117	3.446.500	104
Cabang Depok Depok Branch	Kota Depok Depok City	5.195.722	5.422.500	104
Cabang Garut Garut Branch	Kabupaten Garut Garut Regency	2.328.555	2.475.000	106



Unit Usaha Business Unit	Provinsi/Daerah (PT PNM) Province/Area (PT PNM)	Upah Minimum Provinsi/Kota/ Kabupaten Tahun 2025 Provincial, City, Regency Minimum Wage in 2025	Imbal Jasa Karyawan Tingkat Terendah Compensation for Entry-Level Employees	%
1	2	3	4	4:3
Cabang Indramayu Indramayu Branch	Kabupaten Indramayu Indramayu Regency	2.794.237	2.898.900	104
Cabang Jakarta Jakarta Branch	UMP DKI Jakarta	5.396.761	5.904.294	109
Cabang Jambi Jambi Branch	Kota Jambi Jambi City	3.607.223	3.732.800	103
Cabang Jember Jember Branch	Kabupaten Jember Jember Regency	2.838.642	3.190.000	112
Cabang Kabanjahe Kabanjahe Branch	Kabupaten Karo Karo Regency	3.577.282	4.263.425	119
Cabang Kediri Kediri Branch	Kota Kediri Kediri City	2.572.361	2.850.000	111
Cabang Kendari Kendari Branch	Kota Kendari Kendari City	3.314.390	3.500.000	106
Cabang Lamongan Lamongan Branch	Kabupaten Lamongan Lamongan Regency	3.012.164	3.426.584	114
Cabang Lampung Lampung Branch	Kota Bandar Lampung Bandar Lampung City	3.305.367	3.480.000	105
Cabang Madiun Madiun Branch	Kota Madiun Madiun City	2.422.105	2.840.550	117
Cabang Magelang Magelang Branch	Kabupaten Magelang Magelang Regency	2.467.488	3.131.854	127
Cabang Makassar Makassar Branch	Kota Makassar Makassar City	3.880.137	4.000.000	103
Cabang Malang Malang Branch	Kota Malang Malang City	3.507.693	3.949.824	113
Cabang Manado Manado Branch	Kota Manado Manado City	3.824.264	3.980.000	104
Cabang Mataram Mataram Branch	Kota Mataram Mataram City	2.859.620	3.284.263	115
Cabang Medan Medan Branch	Kota Medan Medan City	4.014.072	4.267.668	106
Cabang Mojokerto Mojokerto Branch	Kabupaten Mojokerto Mojokerto Regency	4.856.026	4.997.800	103
Cabang Padang Padang Branch	UMP Sumatera Barat West Sumatra Minimum Wage	2.994.193	3.100.000	104
Cabang Palembang Palembang Branch	Kota Palembang Palembang City	3.916.635	4.100.000	105
Cabang Palopo Palopo Branch	UMP Sulawesi Selatan South Sulawesi Minimum Wage	3.657.527	4.115.250	113
Cabang Palu Palu Branch	Kota Palu Palu City	3.386.588	3.500.000	103
Cabang Pati Pati Branch	Kabupaten Pati Pati Regency	2.332.350	2.905.004	125
Cabang Pekanbaru Pekanbaru Branch	Kota Pekanbaru Pekanbaru City	3.675.938	4.002.025	109
Cabang Pematang Siantar Pematang Siantar Branch	Kota Pematang Siantar Pematang Siantar City	2.992.559	3.363.200	112



Unit Usaha Business Unit	Provinsi/Daerah (PT PNM) Province/Area (PT PNM)	Upah Minimum Provinsi/Kota/ Kabupaten Tahun 2025 Provincial, City, Regency Minimum Wage in 2025	Imbal Jasa Karyawan Tingkat Terendah Compensation for Entry-Level Employees	%
1	2	3	4	4:3
Cabang Pontianak Pontianak Branch	Kota Pontianak Pontianak City	3.024.820	3.343.360	111
Cabang Probolinggo Probolinggo Branch	Kabupaten Probolinggo Probolinggo Regency	2.989.407	3.111.700	104
Cabang Purwokerto Purwokerto Branch	Kabupaten Purwokerto Purwokerto Regency	2.338.410	2.660.704	114
Cabang Semarang Semarang Branch	Kota Semarang Semarang City	3.454.827	3.842.566	111
Cabang Serang Serang Branch	Kota Serang Serang City	4.418.261	4.789.250	108
Cabang Sintang Sintang Branch	Kabupaten Sintang Sintang Regency	3.039.805	3.275.674	108
Cabang Solo Solo Branch	Kota Surakarta Surakarta City	2.416.560	3.070.675	127
Cabang Subang Subang Branch	Kabupaten Subang Subang Regency	3.508.627	3.860.000	110
Cabang Sukabumi Sukabumi Branch	Kota Sukabumi Sukabumi City	3.018.635	3.580.000	119
Cabang Surabaya Surabaya Branch	Kota Surabaya Surabaya City	4.961.753	5.100.000	103
Cabang Tangerang Tangerang Branch	Kota Tangerang Tangerang City	5.069.708	5.151.000	102
Cabang Tarakan Tarakan Branch	Kota Tarakan Tarakan City	4.460.405	4.620.000	104
Cabang Tasikmalaya Tasikmalaya Branch	Kota Tasikmalaya Tasikmalaya City	2.801.963	3.242.859	116
Cabang Tegal Tegal Branch	Kota Tegal Tegal City	2.376.684	2.583.250	109
Cabang Tulungagung Tulungagung Branch	Kabupaten Tulungagung Tulungagung Regency	2.470.800	3.076.460	125
Cabang Wonogiri Wonogiri Branch	Kabupaten Wonogiri Wonogiri Regency	2.180.588	2.850.000	131
Cabang Yogyakarta Yogyakarta Branch	Kota Yogyakarta Yogyakarta City	2.655.042	3.000.000	113

**Kesetaraan Kesempatan Bekerja [OJK F.18]**  
Equal Employment Opportunity [OJK F.18]

PNM secara konsisten membangun lingkungan kerja yang adil, setara, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi, sekaligus memandang keberagaman sebagai kekuatan strategis bagi perusahaan. Prinsip ini diterapkan sejak tahap rekrutmen hingga seluruh aspek pengelolaan SDM, termasuk pelatihan dan pengembangan kompetensi, pengelolaan karier, remunerasi, serta kesempatan untuk menduduki posisi strategis. Selaras dengan komitmen tersebut, PNM memastikan setiap karyawan baik laki-laki maupun perempuan memiliki peluang yang sama untuk berkontribusi, berkembang, dan meraih posisi kepemimpinan hingga tingkat *top management*. [GRI 3-3]

PNM consistently fosters a fair, equitable, and discrimination-free work environment, viewing diversity as a strategic asset for the Company. This principle is applied across all stages of human capital management, from recruitment to employee development, career management, remuneration, and access to strategic positions. In line with this commitment, PNM ensures that all employees, regardless of gender, have equal opportunities to contribute, grow, and attain leadership positions up to top management levels. [GRI 3-3]

Penerapan prinsip kesetaraan kesempatan kerja diperkuat dalam Peraturan Perusahaan, khususnya Pasal 4 mengenai persyaratan penerimaan karyawan, yang tidak memuat ketentuan berbasis *gender* dan menjamin terciptanya kesempatan kerja yang adil. Selain menempatkan latar belakang dan pengalaman profesional sebagai pertimbangan utama dalam proses rekrutmen, PNM juga menjaga integritas proses tersebut dengan menghindari potensi konflik kepentingan, termasuk praktik nepotisme, sehingga setiap rekrutmen dilakukan secara objektif berdasarkan kompetensi dan keahlian calon karyawan.

Kesungguhan PNM menerapkan kesetaraan kesempatan bekerja selaras dengan spirit Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." Selain itu, juga sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*), serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Komitmen PNM dalam menerapkan prinsip kesetaraan kesempatan kerja tercermin dari tidak ditemukannya insiden diskriminasi sepanjang tahun pelaporan. Kondisi ini menunjukkan efektivitas kebijakan dan praktik pengelolaan SDM yang telah berjalan, sehingga tidak diperlukan tindakan perbaikan terkait pengelolaan hubungan antar karyawan pada periode tersebut. [GRI 406-1]

### Kebijakan Mengenai Hak Asasi Manusia [IDX S-09] Human Rights Policy [IDX S-09]

PNM telah memiliki kebijakan spesifik terkait dengan hak asasi manusia bertajuk "Komitmen Perusahaan terhadap Hak Asasi Manusia" yang ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Direktur Human Capital pada 24 Desember 2025. Komitmen tersebut melengkapi penghormatan atas hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SK-042/PNM-DIR/VI/25 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), pada Bab III Norma Etika Perusahaan, Nomor 18 Tanggung Jawab PNM, huruf e mengenai Komitmen terhadap Program *Environmental, Social, dan Governance*. Dalam aspek sosial, Perusahaan menegaskan prinsip menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan dengan menghormati hak asasi manusia serta menjamin kesetaraan tanpa diskriminasi. Prinsip ini menjadi dasar bagi seluruh kegiatan operasional PNM, yaitu memastikan bahwa setiap kebijakan, praktik, dan interaksi dengan nasabah maupun karyawan mencerminkan penghormatan terhadap hak individu dan perlakuan adil bagi semua pihak sebagai wujud implementasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Adapun prinsip-prinsip utama Komitmen Perusahaan terhadap Hak Asasi Manusia di PNM mencakup 6 hal yaitu Menghormati kebebasan berpendapat dan bersuara; Menegakkan hak untuk berunding bersama; Menjamin kesejahteraan dan martabat karyawan; Penghapusan kerja paksa; Penghapusan pekerja anak dan pencegahan perdagangan manusia; serta Penghapusan diskriminasi dan kekerasan.

The implementation of equal employment opportunity is reinforced through the Company's regulations, particularly Article 4 on employee recruitment requirements, which contain no gender-based provisions and ensure fair access to employment. Recruitment decisions prioritize professional background and experience, while integrity is maintained by mitigating potential conflicts of interest, including nepotism, so that all hiring is conducted objectively based on candidate competence and expertise.

PNM commitment aligns with the spirit of Article 281 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia: "Every person has the right to be free from discriminatory treatment on any grounds and is entitled to protection against such discrimination." Additionally, it complies with Law Number 7 of 1984 on ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) and Presidential Instruction Number 9 of 2000 on Gender Mainstreaming in National Development.

The effectiveness of PNM policies and HR practices is reflected in the absence of reported discrimination incidents during the reporting year. This indicates that no corrective actions were required regarding employee relations during this period. [GRI 406-1]

PNM has a specific policy on human rights entitled "Company Commitment to Human Rights" signed by the President Director and Director of Human Capital on December 24, 2025. This commitment complements the respect for human rights as stated in the Board of Directors' Decree Number SK-042/PNM-DIR/VI/25 on Code of Conduct, Chapter III, Corporate Ethics Standards, Clause 18, subsection e regarding Commitment to Environmental, Social, and Governance (ESG) Programs. In the social dimension, the Company affirms its adherence to principles of humanity and fairness, upholding human rights and ensuring equality without discrimination. This principle serves as a foundation for all PNM operational activities, ensuring that all policies, practices, and interactions with employees and clients reflect respect for individual rights and equitable treatment as part of the Company's human rights implementation.

The main principles of the Company's Commitment to Human Rights at PNM include six points, namely Respecting freedom of opinion and expression; Upholding the right to collective bargaining; Ensuring the welfare and dignity of employees; Eliminating forced labor; eliminating child labor and preventing human trafficking; and eliminating discrimination and violence.

### Jumlah Kejadian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tahun 2025 [IDX S-07] Number of Human Rights Violations in 2025 [IDX S-07]

Jumlah Pelanggaran HAM pada Tahun Pelaporan Total Number of Human Rights Violations in the Reporting Year	0 kasus 0 cases
--	--------------------



### Kebijakan terkait Pelecehan Seksual dan/atau Diskriminasi [IDX S-08] Policy on Sexual Harassment and/or Discrimination [IDX S-08]

PNM memiliki kebijakan tegas yang melarang segala bentuk pelecehan seksual di lingkungan kerja. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Kategori Pelanggaran, Peraturan Perusahaan PNM 2024-2026, tindakan pelecehan seksual merupakan pelanggaran berat yang dapat mengakibatkan hubungan kerja tidak dapat dilanjutkan. Kebijakan ini diterapkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, profesional, dan menghormati hak-hak setiap karyawan, serta memastikan bahwa semua pegawai dapat bekerja tanpa rasa takut atau intimidasi.

PNM has a strict policy prohibiting all forms of sexual harassment in the workplace. As stipulated in Article 41, "Category of Violations," of the PNM Company Regulations 2024-2026, any act of sexual harassment is considered a serious violation that may result in termination of employment. This policy is implemented to ensure a safe, professional work environment that respects the rights of every employee, enabling all staff to work without fear, intimidation, or harassment.



### Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa [OJK F.19] Child Labor and Forced Labor [OJK F.19]

Tenaga kerja anak dan kerja paksa merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihapuskan. Sejalan dengan spirit tersebut, maka PNM menetapkan secara jelas batas minimal usia karyawan dan jam kerja. Untuk usia minimal karyawan, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Perusahaan hanya mempekerjakan karyawan yang telah berusia minimal 18 tahun. Kepatuhan terhadap regulasi tersebut dikukuhkan dalam Peraturan Perusahaan Periode 2024-2026, Pasal 4 poin (2), yang menyatakan bahwa salah satu syarat penerimaan pekerja yaitu telah mencapai usia kerja minimal 18 tahun. [IDX S-10]

Child labor and forced labor constitute serious human rights violations that must be eradicated. In line with this principle, PNM clearly defines the minimum working age and regulates working hours. Regarding minimum age, in compliance with the Republic of Indonesia Law Number 23 of 2002 on Child Protection, the Company employs only individuals who are at least 18 years old. This requirement is formalized in the Company Regulations 2024-2026, Article 4, point (2), which states that one of the conditions for employment is attainment of the minimum working age of 18 years. [IDX S-10]

Lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan, penentuan hari dan jam kerja didasarkan pada kebutuhan Perusahaan dengan mentaati ketentuan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan di atas, waktu kerja dalam Perusahaan diatur sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) jam per hari dan 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam satu minggu.
2. 8 (delapan) jam per hari dan 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu.
3. Waktu istirahat tidak diperhitungkan sebagai waktu kerja.

Furthermore, as stipulated in the Company Regulations, the determination of working days and hours is based on operational needs while adhering to applicable labor laws and regulations. Accordingly, working hours at PNM are organized as follows:

1. 7 (seven) hours per day and 40 (forty) hours per week for a 6-day workweek.
2. 8 (eight) hours per day and 40 (forty) hours per week for a 5-day workweek.
3. Rest periods are not counted as working hours.

Pengaturan waktu kerja dan istirahat:

Working Hours and Rest Periods:

Kantor Office	Hari Kerja Working Day	Jam Kerja Working Hour	Waktu Istirahat Rest Period
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat Head Office</li> <li>• Cabang PNM PNM Branch</li> </ul>	Senin – Jumat Monday – Friday	08.00 – 17.00	12.00 – 13.00
Unit ULaMM & Unit Mekaar (Regional dan Area) ULaMM Unit & Mekaar Unit (Regional and Area)	Senin – Jumat Monday – Friday Sabtu Saturday	08.00 – 16.00 08.00 – 14.00	12.00 – 13.00 12.00 – 13.00



Untuk menghindari praktik kerja paksa, Perusahaan juga telah mengatur tentang kerja lembur. Dalam hal ini, atas izin/perintah dari atasan langsung setiap karyawan yang melakukan pekerjaan lebih dari 8 (delapan) jam sehari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau melakukan pekerjaan lebih dari 7 (tujuh) jam sehari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, maka dihitung sebagai kerja lembur. Uang lembur hanya diberikan kepada karyawan dengan grade/pangkat di bawah *officer/supervisor*.

Komitmen PNM untuk mencegah praktik kerja paksa ditegaskan dalam Peraturan Perusahaan Periode 2024–2026 Pasal 3 ayat (1) mengenai Kebijakan Tenaga Kerja, yang mengatur bahwa hak dan kewajiban setiap individu yang akan bekerja di Perusahaan ditetapkan melalui perjanjian kerja tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ketentuan ini menegaskan bahwa seluruh hubungan kerja di PNM didasarkan pada persetujuan yang sah dan transparan, sekaligus memastikan bahwa praktik kerja paksa tidak terjadi dalam proses ketenagakerjaan. [IDX S-10]

Ketegasan PNM dalam menetapkan batas usia minimum dan pengaturan jam kerja mencerminkan kepatuhan penuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja), komitmen tidak mempekerjakan anak juga sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 *Concerning The Prohibition And Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak). Sementara itu, penentuan tentang jam kerja, termasuk kebijakan lembur, selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 105 *Concerning The Abolition of Forced Labour* (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa).

Konsistensi Perusahaan tidak mempekerjakan anak serta menolak segala bentuk kerja paksa membuahkan hasil positif, tercermin dari tidak adanya insiden pekerja anak maupun praktik kerja paksa di PNM sepanjang tahun pelaporan.

### **Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Karyawan [OJK F.22]** Employee Training and Capability Development [OJK F.22]

PNM secara berkesinambungan menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan untuk mengembangkan kompetensi karyawan sehingga mereka mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara maksimal. Pelatihan dan pendidikan karyawan dilakukan secara terstruktur dan terprogram dengan memetakan kondisi dan kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan strategi bisnis yang diturunkan dari visi dan misi Perusahaan. [GRI 3-3]

To prevent forced labor practices, the Company has also established provisions governing overtime work. In this regard, with the approval or instruction of the immediate supervisor, any employee who works more than 8 (eight) hours per day for 5 (five) working days in one week, or more than 7 (seven) hours per day for 6 (six) working days in one week, is deemed to have performed overtime work. Overtime compensation is only provided to employees with grades/positions below the *officer/supervisor* level.

PNM commitment to preventing forced labor practices is reaffirmed in the Company Regulation for the 2024–2026 period, Article 3 paragraph (1) concerning Labor Policy, which stipulates that the rights and obligations of every individual who works at the Company are established through a written employment agreement mutually agreed upon and signed by both parties. This provision underscores that all employment relationships at PNM are based on lawful and transparent consent, while also ensuring that forced labor practices do not occur in the Company's employment processes. [IDX S-10]

PNM firm stance in setting a minimum age requirement and regulating working hours reflects full compliance with prevailing laws and regulations. In addition to Law Number 13 of 2003 on Manpower and Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 1999 on Ratification of ILO Convention Number 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment, the commitment not to employ child labor is also aligned with Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2000 on Ratification of ILO Convention Number 182 Concerning Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour. Meanwhile, provisions on working hours, including overtime policies, are in line with Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 1999 on Ratification of ILO Convention Number 105 Concerning Abolition of Forced Labour.

The Company's consistent commitment to not employing child labor and to rejecting all forms of forced labor has yielded positive results, as reflected by the absence of any incidents of child labor or forced labor practices at PNM throughout the reporting year.

PNM continuously organizes training and education programs to develop employee competencies, enabling them to carry out their duties and responsibilities optimally. Employee training and education are conducted in a structured and well-programmed manner by mapping human resource conditions and needs in line with the Company's business strategy derived from its vision and mission. [GRI 3-3]



Pengembangan kompetensi di PNM mencakup dua kategori utama yakni kompetensi teknis dan kompetensi perilaku. Kompetensi teknis berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan spesifik sesuai bidang tugas masing-masing, sementara kompetensi perilaku berfokus pada pola perilaku kunci yang diharapkan muncul pada setiap peran di seluruh unit kerja. Implementasi kedua kompetensi ini berpedoman pada SK-071/PNM-DIR/VII/23 mengenai Kebijakan *Talent Management*; serta SK-040/PNM-DIR/VIII/22 tentang Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan SDM, sebagaimana diubah terakhir dengan SK-117/PNM-DIR/XII/25 tentang Addendum Kedua SK-040/PNM-DIR/VIII/22 tentang Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia.

Pendekatan manajemen pelatihan dan pendidikan karyawan bertujuan memberikan kontribusi nyata terhadap kinerja bisnis melalui pengembangan potensi karyawan sejak dini dan retensi talenta unggul. Selain itu, program ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan dan manajerial agar karyawan lebih siap menempati jenjang karier yang lebih tinggi. Oleh karena itu, PNM melaksanakan pengembangan kompetensi secara intensif, terukur, dan berkelanjutan.

Seluruh karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti program pengembangan kompetensi. Melalui partisipasi dalam pelatihan, karyawan diharapkan dapat memperkuat kemampuan teknis, mengasah potensi kepemimpinan, dan meningkatkan kesiapan untuk mengemban peran strategis di masa depan. Untuk memastikan efektivitas program, PNM melakukan evaluasi menyeluruh meliputi kualitas materi dan penyampaian *trainer*, kelengkapan infrastruktur pelatihan, pencapaian *learning growth*, serta penilaian dampak pasca-pelatihan dalam rentang waktu tiga hingga enam bulan setelah kegiatan dilaksanakan.

Per 31 Desember 2025, PNM telah menyelenggarakan 7 (tujuh) kategori kegiatan pengembangan kompetensi dengan total peserta sebanyak 69.018 karyawan. Adapun biaya yang dikeluarkan tercatat sebesar Rp138.569.983.105,49. Pengembangan kompetensi, termasuk rerata jam pelatihan menurut jenis kelamin dan level jabatan, selengkapnya disampaikan dalam tabel berikut: [GRI 404-1]

Competency development at PNM covers two main categories: technical competencies and behavioral competencies. Technical competencies relate to specific knowledge and skills required for each respective function, while behavioral competencies focus on key behavioral patterns expected to be demonstrated in every role across all work units. The implementation of these competencies is guided by Decree Number Decree Number SK-071/PNM-DIR/VII/23 on Talent Management Policy; and Decree Number SK-040/PNM-DIR/VIII/22 on Human Capital Education and Training Policy, as last amended by Decision Number SK-117/PNM-DIR/XII/25 on the Second Addendum to Decision Number SK-040/PNM-DIR/VIII/22 on Human Resources Education and Training Policy.

The Company's approach to managing employee training and education is aimed at making a tangible contribution to business performance through early development of employee potential and the retention of high-performing talent. In addition, these programs are designed to strengthen leadership and managerial capabilities so that employees are better prepared to assume higher career levels. Accordingly, PNM implements competency development initiatives in an intensive, measurable, and sustainable manner.

All employees are provided with equal opportunities to participate in competency development programs. Through participation in training, employees are expected to enhance their technical capabilities, sharpen their leadership potential, and improve their readiness to assume strategic roles in the future. To ensure program effectiveness, PNM conducts comprehensive evaluations covering the quality of training materials and trainer delivery, the adequacy of training infrastructure, the achievement of learning growth, as well as post-training impact assessments conducted within three to six months after program implementation.

As of December 31, 2025, PNM had conducted 7 (seven) categories of competency development activities with a total of 69.018 employee participants. The total cost incurred amounted to IDR138,569,983,105.49. Details of competency development activities, including the average training hours by gender and job level, are presented in the following table: [GRI 404-1]

**Tabel Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2023-2025**

Table on Employee Competency Development in 2023-2025

Uraian Description	Jumlah Karyawan yang Memperoleh Pelatihan Employees Participating in Training			Jam Pelatihan Training Hour			Rata-rata Jam Pelatihan Setiap Karyawan Average Training Hour per Employee		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023
Keseluruhan Overall	69.018	69.306	69.159	3.802.716	3.347.479	3.336.874	55,1 jam 55.1 hours	48 jam 48 hours	48 jam 48 hours
<b>Berdasarkan Jenis Kelamin</b> By Gender									
Laki-laki Male	8.972	10.237	10.147	491.302	491.376	489.586	55,1 jam 55.1 hours	48 jam 48 hours	48 jam 48 hours
Perempuan Female	60.046	59.069	59.012	3.311.414	2.856.103	2.847.288	55,1 jam 55.1 hours	48 jam 48 hours	48 jam 48 hours

Uraian Description	Jumlah Karyawan yang Memperoleh Pelatihan Employees Participating in Training			Jam Pelatihan Training Hour			Rata-rata Jam Pelatihan Setiap Karyawan Average Training Hour per Employee		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023
<b>Berdasarkan Kategori Jabatan Karyawan</b> Based on Employee Position Category									
Manajemen Management	259	248	241	14.270	11.656	11.628	55,1 jam 55.1 hours	48 jam 48 hours	48 jam 48 hours
Pelaksana Executive	68.759	69.058	68.918	3.788.446	3.335.823	3.325.246	55,1 jam 55.1 hours	48 jam 48 hours	48 jam 48 hours

\* Peserta mengikuti lebih dari satu kali pelatihan

\* Employee participating in more than two training programs

## Tabel Kategori Pelatihan Karyawan Tahun 2025 [GRI 404-2]

Table of Employee Training Category in 2025 [GRI 404-2]

No.	Kategori Pelatihan Training Category	Jumlah Kegiatan Number of Activities	Jumlah Peserta* Number of Participants*	Jam Belajar Training Hour
1	On Boarding Program	293	6.880	143.858
2	Competency Development	98	4.975	76.256
3	Leadership Development	206	8.837	125.316
4	Enhancement Program	1.512	317.494	1.667.817
5	Creative Learning	120	527	6.764
6	Pelatihan Eksternal/Publik External/Public Training	68	891.298	1.782.705
7	E-Learning	2.287	1.230.011	3.802.716
<b>Jumlah Total</b>		<b>293</b>	<b>6.880</b>	<b>143.858</b>

\*) Peserta mengikuti lebih dari satu kali pelatihan

\* Employee participating in more than two training programs

## Pelatihan dan Pengembangan Pegawai Tahun 2025 [IDX S-05]

Employee Training and Competency Development Programs in 2025 [IDX S-05]

Rata-rata Jam Pelatihan per Pegawai dalam Tahun Pelaporan Average Training Hour per Employee in the Reporting Period	Jumlah Pegawai yang Ikut Serta dalam Program Pelatihan Number of Employees Participating in the Training Programs	Persentase Jumlah Pegawai yang Ikut serta dalam Pelatihan (%) Percentage of Employees Participating in Training (%)
55,10 Jam/Pegawai 55,10 Hours/Employee	1.230.000 orang 1,230,000 people	100

Merujuk tabel di atas, pada 2025, sebanyak 1.230.000 karyawan PNM mengikuti program pengembangan kompetensi dengan 100% di antaranya berhasil menyelesaikan modul ketujuh kategori pelatihan. Tingkat partisipasi tersebut mencapai 100% dari total karyawan yang menunjukkan keterlibatan tinggi dalam pengembangan kapasitas individu. Hasil pengukuran tersebut menjadi dasar bagi PNM dalam menilai efektivitas program, mengidentifikasi area yang perlu diperkuat, dan merancang pelatihan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kinerja karyawan sekaligus kualitas layanan bagi nasabah.

Referring to the table above, in 2025, a total of 1,230,000 PNM employees participated in competency development programs, 100% of whom successfully completed the seventh module across the training categories. The participation rate reached 100% of the total employees, indicating a high level of engagement in individual capacity development. These measurement results serve as a basis for PNM to assess the effectiveness of the programs, identify areas that need strengthening, and design more targeted training to improve employee performance as well as the quality of service provided to customers.



Selain menyediakan program pendidikan dan pelatihan bagi karyawan aktif, Perusahaan juga menyelenggarakan pelatihan bagi karyawan yang akan memasuki masa pensiun melalui program bantuan peralihan. Program ini dirancang untuk membekali karyawan dengan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan yang diperlukan agar tetap produktif setelah pensiun. Peserta program meliputi karyawan berusia mulai 53 tahun atau tiga tahun sebelum mencapai usia pensiun 56 tahun.

Pada tahun pelaporan, pelatihan persiapan pensiun diselenggarakan pada bulan September 2025 di kota Bandung, dan diikuti oleh 19 karyawan beserta pasangannya. [GRI 404-2]

Untuk mendukung transparansi, akurasi laporan, dan perencanaan program pelatihan yang lebih strategis di masa mendatang, PNM secara rutin menghitung rata-rata pengeluaran terkait program pelatihan dan menyusun rincian (*breakdown*) setiap komponen biaya. Perincian ini memungkinkan Perusahaan memantau efisiensi anggaran, mengevaluasi alokasi sumber daya, dan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi pengembangan kompetensi karyawan. Dengan pemantauan dan *breakdown* yang jelas, PNM dapat meningkatkan efektivitas program pelatihan sekaligus mendukung perencanaan strategis dan pelaporan keberlanjutan yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2025, total pengeluaran untuk pengembangan kompetensi tercatat sebesar Rp138,5 miliar dengan rincian sebagai berikut:

In addition to providing educational and training programs for active employees, the Company also conducts training for employees approaching retirement through its transition assistance program. This program is designed to equip employees with the knowledge, skills, and preparedness needed to remain productive after retirement. Participants include employees aged 53 and above, or those within three years of reaching the retirement age of 56.

During the reporting year, retirement preparation training was held in September 2025 in Bandung and was attended by 19 employees along with their spouses. [GRI 404-2]

To support transparency, reporting accuracy, and the strategic planning of future training programs, PNM regularly calculates the average expenditure related to training programs and compiles a detailed *breakdown* of each cost component. This detailed accounting enables the Company to monitor budget efficiency, evaluate resource allocation, and ensure that every rupiah spent delivers maximum benefit to employee competency development. With clear monitoring and cost *breakdowns*, PNM can enhance the effectiveness of its training programs while supporting strategic planning and transparent, accountable sustainability reporting. In 2025, the total expenditure for competency development amounted to IDR138.5 billion with the following details:

Komponen Biaya Component	Jumlah (Rp) Total (IDR)	Persentase (%) Percentage (%)
Honorarium Narasumber/Jasa Konsultan (Materi, Modul) Speaker Honorarium/Consultant Fees (Materials, Modules)	31,9	23
Kegiatan Pelatihan (Akomodasi dan Transportasi, Kelas Pelatihan, dan lain-lain) Training Activities (Accommodation and Transportation, Training Classes, etc.)	90,1	65
Biaya Sistem dan Teknologi Pelatihan Training Systems and Technology Costs	6,7	5
Biaya Asesmen dan Evaluasi Assessment and Evaluation Costs	0,9	1
Beasiswa Scholarships	3,8	3
Biaya Sertifikasi & Lisensi Certification and Licensing Costs	5,1	4
<b>Jumlah</b> Total	<b>138,5</b>	<b>100</b>

**Penilaian Karyawan dan Jenjang Karier [OJK F.22][GRI 404-3]**  
Employee Performance Assessment and Career Progression [OJK F.22][GRI 404-3]

Penilaian kinerja karyawan merupakan proses penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di PNM. Melalui proses ini, manajemen dapat mengevaluasi pencapaian karyawan terhadap target, standar, dan ekspektasi yang telah ditetapkan, sekaligus memberikan umpan balik konstruktif yang mendorong peningkatan motivasi, kinerja, dan kepuasan kerja.

Employee performance assessment is a key process for maintaining and enhancing the quality of human resources at PNM. Through this process, management evaluates employees' achievements against established targets, standards, and expectations, while providing constructive feedback to boost motivation, performance, and job satisfaction.

PNM menerapkan penilaian kinerja secara adil kepada seluruh karyawan (100%) berdasarkan pencapaian kerja tanpa membedakan jenis kelamin. Penilaian dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun. Selain menjadi dasar pertimbangan untuk kenaikan upah, golongan atau jabatan, hasil penilaian tersebut juga menjadi basis dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan karier, termasuk promosi, rotasi/mutasi, maupun demosi. Selama tahun pelaporan, sebanyak 2.553 karyawan memperoleh promosi, 8.781 menjalani rotasi, dan 260 menerima demosi sesuai mekanisme yang berlaku.

PNM implements fair performance assessments for all employees (100%) based solely on work achievements, without gender distinction. Assessments are conducted 1 (one) times per year. In addition to serving as the basis for salary increases, job grades, or positions, the results of these assessments also inform career development decisions, including promotions, rotations/transfers, and demotions. During the reporting year, 2,553 employees received promotions, 8,781 underwent rotations, and 260 were subject to demotions in accordance with the applicable mechanisms.

**Tabel Peninjauan Rutin Kinerja Karyawan Tahun 2023-2025**

Table of Employee Performance Reviews for 2023-2025

Tahun Year	Promosi Promotion	Rotasi Rotation	Demosi Demotion
2025	2.553	8.781	260
2024	2.936	4.941	374
2023	4.401	5.702	379

### **Kepuasan Karyawan** Employee Satisfaction

PNM secara rutin melakukan survei kepuasan karyawan untuk memantau tingkat keterlibatan, motivasi, dan kesejahteraan karyawan. Pada tahun 2025, hasil survei menunjukkan rata-rata skor kepuasan sebesar 3,29 dari skala 1-4, yang menempatkan tingkat kepuasan karyawan pada kategori Sangat Puas, naik dibandingkan hasil tahun 2024 dengan skor 3,28 dengan kategori Sangat Puas. Hasil tersebut menjadi dasar bagi manajemen untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, merancang program pengembangan SDM yang lebih relevan, serta memperkuat budaya kerja yang inklusif dan kolaboratif, mendukung peningkatan kinerja individu maupun organisasi secara keseluruhan.

PNM regularly conducts employee satisfaction surveys to monitor levels of engagement, motivation, and well-being. In 2025, the survey results indicated an average satisfaction score of 3.29 on a 1-4 scale, placing employee satisfaction in the "Very Satisfied" category, an increase from the 2024 score of 3.28, which was also classified as "Very Satisfied". These results provide management with a foundation to identify areas for improvement, design more relevant HR development programs, and strengthen an inclusive and collaborative work culture, thereby supporting the enhancement of both individual and organizational performance.



## Lingkungan Kerja yang Layak dan Aman [OJK F.21] Decent and Safe Working Environment [OJK F.21]

Lingkungan kerja yang layak, aman, dan sesuai prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan fondasi penting bagi PNM dalam menjalankan operasional perusahaan. PNM meyakini bahwa lingkungan kerja yang aman dan nyaman memungkinkan karyawan bekerja dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Untuk itu, selain menyediakan fasilitas kerja yang memadai bagi karyawan kantor, Perusahaan juga mengimplementasikan berbagai program perlindungan bagi karyawan yang bertugas di lapangan. Program tersebut mencakup pelatihan K3, strategi mitigasi risiko, prosedur tanggap darurat, serta penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai kebutuhan, disertai penyediaan asuransi kecelakaan bagi karyawan yang bekerja di luar kantor. [GRI 3-3]

Upaya PNM dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat berpedoman pada Pedoman K3 Nomor PNM/PK-0011 yang menjadi acuan bagi seluruh insan PNM dalam menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja. Pedoman ini mencakup ketentuan mengenai penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja yang memenuhi standar K3, serta tata cara penggunaan dan perlakuan peralatan tersebut guna memastikan praktik kerja yang aman di seluruh lini operasional Perusahaan. [IDX S-11]

Penerapan K3 PNM juga mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. SK-030/PNM-DIR/IV/24 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Kebijakan yang berlaku untuk seluruh karyawan ini di dalamnya mengatur perihal langkah pencegahan, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), serta pembentukan Lembaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdiri dari: [GRI 403-1, 403-3, 403-7, 403-8]

1. Tim Tanggap Darurat;
2. Tim Penanggulangan Kebakaran;
3. Tim Pelayanan Kesehatan Kerja; dan
4. Tim *Floor Warden* (Penjaga Lantai).

Untuk mencapai tujuan K3 yakni terciptanya kondisi tanpa kecelakaan maupun penyakit akibat kerja, PNM melakukan pemetaan potensi bahaya, risiko tinggi, serta kemungkinan timbulnya penyakit akibat kerja. Melalui pemetaan ini, Perusahaan dapat menetapkan kebijakan dan langkah mitigasi yang tepat guna menghindari atau meminimalkan risiko tersebut. Rincian pemetaan risiko dan langkah mitigasinya disajikan pada tabel berikut: [GRI 403-2]

A decent, safe, and Occupational Health and Safety (OHS)-compliant work environment is a fundamental cornerstone for PNM in conducting its business operations. PNM believes that a safe and comfortable workplace enables employees to work with peace of mind, free from concerns about accidents or work-related illnesses. Accordingly, in addition to providing adequate office facilities, the Company also implements various protection programs for employees working in the field. These programs include OHS training, risk mitigation strategies, emergency response procedures, and the use of Personal Protective Equipment (PPE) as needed, along with accident insurance for employees working outside the office. [GRI 3-3]

PNM efforts to create a safe and healthy work environment are guided by the OHS Guidelines Number PNM/PK-0011, which serve as a reference for all PNM personnel in applying occupational safety and health standards. These guidelines cover provisions regarding the supply of OHS-compliant equipment and tools, as well as instructions for their proper use and handling to ensure safe work practices across all operational lines of the Company. [IDX S-11]

PNM OHS implementation also refers to Decree of the Board of Directors Number SK-030/PNM-DIR/IV/24 regarding Guidelines for the Occupational Safety and Health Management System (SMK3). This policy, applicable to all employees, regulates preventive measures, the implementation of the Occupational Health and Safety Management System (SMK3), and the establishment of OHS Committees, consisting of: [GRI 403-1, 403-3, 403-7, 403-8]

1. Emergency Response Team;
2. Fire Response Team;
3. Occupational Health Service Team; and
4. Floor Wardens.

To achieve the goal of OHS, namely to create a work environment free from accidents and work-related illnesses, PNM conducts hazard and high-risk assessments, as well as evaluations of potential occupational diseases. Through this mapping, the Company can establish appropriate policies and mitigation measures to prevent or minimize these risks. The risk mapping and mitigation details are provided in the following table: [GRI 403-2]



**Tabel Pemetaan Risiko Kerja dan Penyakit Akibat Kerja PNM**  
Table of PNM Work Risk and Occupational Disease Mapping

Unit/Divisi Kerja Berisiko Tinggi High-Risk Work Unit/Division	Risiko yang Dihadapi Risk Faced	Mitigasi Risiko yang Ditetapkan Perseroan Risk Mitigation Established by the Company
Bisnis Business	Kecelakaan Lalu Lintas Traffic Accident	Pelaksanaan sosialisasi aman dalam berkendara ( <i>safety riding</i> dan <i>safety driving</i> ) 2x/tahun Socialization on safety riding dan safety driving 2x/year

Kesiapsiagaan personel dalam penerapan K3 juga menjadi prioritas bagi PNM. Sepanjang tahun 2025, Perusahaan mengikutsertakan karyawan dalam berbagai program pendidikan dan pelatihan K3 sebagai berikut: [GRI 403-5]

Personnel preparedness in the implementation of Occupational Health and Safety (OHS) is also a priority for PNM. Throughout 2025, the Company enrolled employees in various OHS education and training programs as follows: [GRI 403-5]

**Tabel Pelatihan K3 Tahun 2025**  
Table of OHS Training Programs in 2025

No.	Tanggal Pelatihan Training Date	Nama Pelatihan Training Name	Penyelenggara Organizer	Jumlah Peserta Number of Participants
1	16 Januari 2025 January 16, 2025	Health Talk K3 PNM "Kesehatan Kulit dan Kecantikan" PNM OHS Health Talk: "Skin Health and Beauty"	Divisi HCD HCD Division	682
2	14 Februari 2025 February 14, 2025	Sosialisasi SE Tim Tanggap Darurat Bencana Socialization of the Circular Letter on the Disaster Emergency Response Team	Divisi HCD HCD Division	192
3	8-10 Mei 2025 May 8-10, 2025	Pelatihan Tanggap Darurat Kebencanaan Kantor Pusat dan Kantor Cabang Emergency Disaster Response Socialization at Head Office and Branch Office	Divisi HCD HCD Division	40
4	2-4 September 2025 September 2-4, 2025	Sosialisasi Tanggap Darurat Bencana Kantor Cabang dan Unit <i>Batch</i> 1-3 Emergency Disaster Response Socialization for Branch Offices and Units, Batches 1-3	Divisi HCD HCD Division	2.865
5	27-28 November 2025 November 27-28, 2025	Pelatihan Penggunaan Sistem Aplikasi <i>Monitoring K3</i> Training on the Use of OHS Monitoring Application	Divisi HCD HCD Division	16
6	Periodik Periodic	<i>Knowledge Sharing</i> Tematik- <i>Safety Riding</i> for AO Mekaar	Kantor Cabang Branch Office	21.167

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan lingkungan kerja yang layak dan aman sekaligus mendukung implementasi K3, Direksi PNM menerbitkan SK-031/PNM-DIR/IV/24 tentang Pembentukan Tim Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Keputusan ini memuat struktur kepengurusan Tim K3 beserta tugas dan tanggung jawabnya sebagai landasan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja di seluruh lingkungan Perusahaan. [GRI 403-4] [IDX S-11]

In an effort to create a safe and healthy work environment while supporting the implementation of Occupational Health and Safety (OHS), PNM Board of Directors issued a Decree Number SK-031/PNM-DIR/IV/24 Regarding the Formation of the Occupational Safety and Health Steering Committee (P2K3), which includes the structure of the OHS Team along with their duties and responsibilities. [GRI 403-4] [IDX S-11]

Kesungguhan PNM dalam mencapai tujuan K3 juga diperkuat melalui ketentuan dalam Peraturan Perusahaan yang menjadi acuan utama terkait kesejahteraan dan jaminan sosial karyawan. Ketentuan tersebut mencakup pengaturan hari dan jam kerja, kebijakan istirahat dan cuti, serta jaminan pemeriksaan kesehatan dan program kesejahteraan sosial. Divisi yang membawahi fungsi Pengelolaan dan Pengembangan SDM bertanggung jawab memastikan penerapan seluruh kebijakan kesejahteraan dan perlindungan kesehatan kerja tersebut berjalan efektif. Adapun

PNM commitment to achieving OHS objectives is further reinforced through provisions in the Company Regulations, which serve as the primary reference regarding employee welfare and social security. These provisions cover regulations on working days and hours, rest and leave policies, as well as health check guarantees and social welfare programs. The division overseeing Human Resource Management and Development is responsible for ensuring the effective implementation of all employee welfare and occupational health protection policies. Preventive



tindakan pencegahan yang dilakukan untuk menjaga kesehatan kerja karyawan meliputi hal-hal berikut: [GRI 403-7]

1. Menjaga kebersihan lingkungan kerja.  
Dalam menjaga kesehatan karyawan, lingkungan kerja yang bersih menjadi syarat mutlak terjaganya lingkungan kerja yang bersih.
2. Menjaga fasilitas untuk makan dan minum karyawan yang higienis.  
Area *pantry* atau dapur di lingkungan kerja menjadi faktor penting yang wajib dijaga kebersihannya, terlebih peralatan makan dan minum untuk karyawan agar selalu terjaga dan tetap higienis, sehingga terhindar dari kuman ataupun virus yang ada.
3. Melaksanakan identifikasi terhadap risiko bahaya kesehatan di tempat kerja.  
Dalam pelaksanaan identifikasi terhadap risiko penyakit yang timbul di lingkungan kerja ataupun antisipasi terhadap wabah/pandemi yang menyebar, perusahaan melalui tim kesehatan kerja yang ada akan berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit dan/atau merujuk dengan ketentuan undang-undang kesehatan yang berlaku.
4. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau dengan *hand sanitizer*.  
Terkait dengan pencegahan penyakit dan menjaga kebersihan serta kesehatan karyawan, sarana cuci tangan dan/atau *hand sanitizer* dapat disediakan oleh perusahaan.

Selain itu, untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja, PNM menyediakan berbagai perlengkapan pertolongan pertama yang dapat digunakan saat kondisi darurat antara lain: [GRI 403-7]

1. Kotak P3K tipe A, yaitu kotak P3K yang berisi peralatan dan obat-obatan ringan untuk Pertolongan Pertama pada Kecelakaan.
2. Tabung Oksigen 1 (satu) Meter Kubik, yaitu tabung yang berisi oksigen untuk pertolongan pertama pada pegawai yang membutuhkan oksigen.
3. Kursi Roda, yaitu alat bantu yang digunakan untuk pegawai yang mengalami kesulitan berjalan menggunakan kaki, baik dikarenakan oleh penyakit, cedera, maupun cacat.
4. Tandu, yaitu alat yang digunakan untuk memindahkan pasien cedera atau karena penyakit lainnya ke lokasi yang lebih aman untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut.
5. Alat Ukur Tensi, yaitu suatu alat yang digunakan untuk mengukur tensi/tekanan darah bagi Pegawai yang membutuhkan.
6. Alat Pengeras Suara/TOA, untuk digunakan mengatur proses evakuasi dalam kondisi darurat.
7. Thermometer Gun, yaitu alat pengukur suhu tubuh pegawai dan pengunjung atau tamu lainnya.
8. Tempat cuci tangan dengan air mengalir atau *hand sanitizer*.

Lebih jauh, PNM memberikan jaminan dan perlindungan keselamatan serta kesehatan kerja sesuai ketentuan yang berlaku melalui kepesertaan karyawan dalam Program BPJS Kesehatan serta asuransi komersial. Sejalan dengan itu, Perusahaan secara berkelanjutan membekali karyawan dengan sosialisasi terkait K3 guna meningkatkan pemahaman dan kompetensi, khususnya bagi personel yang ditugaskan sebagai penanggung jawab K3.

measures implemented to safeguard employee health include the following: [GRI 403-7]

1. Maintaining workplace cleanliness  
A clean work environment is essential for maintaining employee health.
2. Ensuring hygienic employee dining facilities  
The cleanliness of the pantry or kitchen area within the workplace is critical, especially in maintaining hygienic eating and drinking utensils to prevent exposure to germs or viruses.
3. Identifying health hazard risks in the workplace  
In identifying health risks that may arise in the workplace or in response to outbreaks/pandemics, the Company works with healthcare facilities and/or refers to applicable health regulations.
4. Providing handwashing or hand sanitizer facilities  
To prevent illness and maintain employee health, the Company provides handwashing facilities and/or hand sanitizers.

In addition, to anticipate workplace accidents, PNM also provides various equipment to give first aid in case of accidents, including: [GRI 403-7]

1. First Aid Kit Type A, which is a first aid kit containing light medical equipment and medications for First Aid in Accidents.
2. Oxygen Cylinder 1 (one) Cubic Meter, which is a cylinder containing oxygen for first aid for employees who need oxygen.
3. Wheelchair, which is an assistive device used by employees who have difficulty walking using their feet, either due to illness, injury, or disability.
4. Stretcher, which is a tool used to move injured patients or those with other illnesses to a safer location for further assistance.
5. Blood Pressure Measurement Tool, which is a device used to measure the blood pressure of employees who need it.
6. Loudspeaker/TOA, which is used to manage the evacuation process in an emergency.
7. Thermometer Gun, which is a tool to measure the body temperature of employees and other visitors or guests.
8. Handwashing Stations with running water or *hand sanitizer*.

Furthermore, PNM provides occupational safety and health protection in accordance with applicable regulations through employee participation in the BPJS Health Program and commercial insurance. In line with this, the Company continuously equips employees with OHS-related awareness and training to enhance understanding and competencies, particularly for personnel assigned as OHS officers.

Untuk memastikan kondisi kesehatan karyawan tetap terpantau, PNM menerapkan sejumlah kebijakan antara lain pelaksanaan *medical check-up* sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun, penyediaan fasilitas klinik dan tenaga dokter, serta penyelenggaraan kegiatan olahraga 8 (delapan) klub olahraga yang tergabung dalam PNM Club dan klub-klub tersebut melaksanakan 1-2 kali kegiatan dalam sepekan. Pembentukan klub-klub tersebut diharapkan dalam menunjang harmonisasi hubungan kerja di lingkungan Perusahaan. [GRI 403-3, 403-6]

Selanjutnya, untuk memastikan efektivitas penerapan K3, PNM melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala. Hasil evaluasi tersebut dilaporkan melalui Laporan Manajemen dan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada tahun berikutnya.

Sepanjang tahun 2025, manajemen dan karyawan telah menerapkan prinsip-prinsip K3 guna mendukung tidak adanya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Namun demikian, pada tahun pelaporan tercatat adanya kecelakaan kerja yang menimbulkan korban jiwa (fatalitas) 24 (dua puluh empat) kasus. Atas insiden tersebut, Perusahaan telah melakukan investigasi bahwa kecelakaan dipengaruhi oleh faktor risiko operasional di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas mobilitas dan keselamatan berkendara dalam pelaksanaan tugas. Perusahaan telah menetapkan mitigasi berupa pelaksanaan sosialisasi aman dalam berkendara (*safety driving* dan *safety riding*) serta peningkatan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan kerja. Selain itu, tercatat adanya insiden kecelakaan kerja ringan sebanyak 1.578, sedang sebanyak 768, dan berat (tanpa menimbulkan korban jiwa) sebanyak 62 kasus. Di sisi lain, tidak tercatat adanya penyakit akibat kerja di PNM selama tahun 2025. [GRI 403-9, 403-10]

To ensure employees' health is consistently monitored, PNM implements several policies, including conducting medical check-ups 3 (three) times a year, providing clinic facilities and medical personnel, and organizing sports activities through 8 (eight) sports clubs under the PNM Club, with each club conducting activities once or twice per week. The establishment of these clubs is intended to support harmony in workplace relationships. [GRI 403-3, 403-6]

Additionally, to ensure the effectiveness of OHS implementation, PNM conducts regular monitoring and evaluations. The results are reported through Management Reports and serve as the basis for preparing the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for the following year.

Throughout 2025, management and employees adhered to OHS principles to support a workplace free from accidents and occupational diseases. Nevertheless, during the reporting year, there were 24 (twenty-four) fatalities. Investigations revealed that these incidents were influenced by operational risks in the field, particularly related to mobility and driving safety during tasks. The Company has implemented mitigation measures, including safety driving and safety riding awareness programs and increased compliance with workplace safety procedures. In addition, there were 1,578 minor, 768 moderate, and 62 severe (non-fatal) work accidents recorded. On the other hand, no occupational diseases were reported at PNM during 2025. [GRI 403-9, 403-10]

**Jumlah Kecelakaan Kerja Tahun 2025 [IDX S-06]**  
Number of Work Accidents in 2025 [IDX S-06]

Frekuensi Kecelakaan Kerja dari Total Pegawai Work Accident Frequency per Total Employees	Persentase Kecelakaan Kerja Serius yang Berakibat Cedera Serius dan Fatal dari Total Pegawai (%) Percentage of Serious Work Accidents Resulting in Serious Injury or Fatality per Total Employees (%)
0,034 kali   times	1,19



## **Tanggung Jawab Kepada Masyarakat** Responsibility to the Community

Masyarakat merupakan salah satu pemangku kepentingan utama bagi PNM dalam mewujudkan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Perusahaan secara konsisten membangun komunikasi dan hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Upaya ini memungkinkan PNM memahami kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan layanan serta produk agar lebih relevan dan bermanfaat bagi pengusaha UMKM sebagai bagian dari komunitas di wilayah operasional Perusahaan. Selain memperkuat kepercayaan publik, hubungan yang baik juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai program yang dijalankan PNM.

Communities are one of PNM key stakeholders in achieving sustainable business growth. Therefore, the Company consistently builds communication and harmonious relationships with local communities. These efforts enable PNM to understand community needs and tailor services and products to be more relevant and beneficial for MSME actors as part of the communities within the Company's operational areas. In addition to strengthening public trust, good relationships also encourage active community participation in various programs run by PNM.

### **Dampak Operasi terhadap Masyarakat Sekitar [OJK F.23]** Impact of Operations on Local Communities [OJK F.23]

Kepatuhan terhadap regulasi di bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial merupakan prinsip fundamental yang dipegang PNM dalam menjalankan kegiatan usaha. Komitmen ini dibangun dengan tujuan memastikan bahwa keberadaan Perusahaan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat sekaligus meminimalkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul. [GRI 3-3]

Compliance with economic, environmental, and social regulations is a fundamental principle upheld by PNM in conducting business activities. This commitment aims to ensure that the Company's presence provides maximum benefit to communities while minimizing potential negative impacts. [GRI 3-3]

Sejak berdiri pada 1 Juni 1999, PNM konsisten berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan usaha masyarakat, khususnya melalui pembiayaan UMKM. Komitmen tersebut diwujudkan melalui inovasi layanan pembiayaan seperti Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) yang hadir sejak 2008 untuk memberikan pinjaman modal usaha kepada individu maupun pengusaha mikro dan kecil. Selain itu, sejak 2015 PNM menghadirkan program PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang menyediakan pembiayaan bagi perempuan prasejahtera pengusaha ultra mikro dengan tujuan mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga. [GRI 413-1]

Since its establishment on June 1, 1999, PNM has consistently contributed to supporting community business growth, particularly through MSME financing. This commitment is realized through innovative financing services such as the Micro Capital Service Unit (ULaMM), which has been in operation since 2008 to provide business capital loans to individuals as well as micro and small entrepreneurs. Additionally, since 2015, PNM has launched the PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) program, which provides financing for low-income women who are ultra-micro entrepreneurs with the aim of improving family well-being. [GRI 413-1]

Untuk memperluas manfaat bagi masyarakat, PNM juga secara berkesinambungan menyelenggarakan berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Program tersebut meliputi Ruang Pintar, *Madani Entrepreneur Academy* (MEA), Pemberdayaan Kampung Madani, serta pelatihan bagi karyawan dan nasabah. Selain itu, PNM turut melaksanakan kegiatan donasi, pemberian beasiswa, pemberdayaan ekonomi masyarakat, program sumber air bersih, pelestarian lingkungan, kampung peduli sampah, serta bantuan bencana dan kemanusiaan. [GRI 413-1]

To broaden the benefits for communities, PNM also continuously organizes various Corporate Social and Environmental Responsibility programs covering economic, social, and environmental aspects. These programs include Ruang Pintar, Madani Entrepreneur Academy (MEA), Pemberdayaan Kampung Madani, as well as training for employees and customers. In addition, PNM conducts donations, scholarship programs, community economic empowerment initiatives, clean water programs, environmental conservation, waste-conscious village programs, and disaster and humanitarian aid. [GRI 413-1]

Di sisi lain, dalam operasionalnya, PNM menyadari bahwa kegiatan pemberdayaan dan penyaluran pembiayaan yang diberikan menimbulkan sejumlah dampak negatif faktual maupun potensial. Dampak faktual dapat mencakup ketidaknyamanan masyarakat akibat frekuensi pertemuan kelompok di area padat penduduk, potensi ketegangan antaranggota kelompok karena perbedaan kemampuan pembayaran, serta risiko penyampaian informasi atau praktik pendampingan yang tidak

On the other hand, in its operations, PNM recognizes that empowerment activities and financing distribution may generate certain actual and potential negative impacts. Actual impacts may include community discomfort due to frequent group meetings in densely populated areas, potential tensions among group members due to differences in repayment capacity, and risks of information delivery or mentoring practices not fully meeting standards. Potential impacts include the risk of increased



sepenuhnya sesuai standar. Adapun dampak potensial meliputi risiko meningkatnya beban keuangan rumah tangga apabila pembiayaan tidak digunakan secara produktif, kerentanan terhadap keamanan data nasabah seiring digitalisasi, hingga munculnya persepsi negatif masyarakat terkait mekanisme pembiayaan atau penanganan keluhan. [GRI 413-2]

Untuk memitigasi berbagai risiko tersebut, PNM menerapkan pengaturan jadwal pertemuan yang lebih adaptif, memperkuat kompetensi petugas lapangan melalui pelatihan etika dan literasi keuangan, menyediakan program edukasi penggunaan pembiayaan yang bertanggung jawab, serta meningkatkan sistem keamanan data, termasuk *cybersecurity*. Selain itu, PNM mengoperasikan kanal pengaduan yang mudah diakses, melakukan sosialisasi berkelanjutan, memperkuat proses *monitoring*, dan memastikan seluruh unit layanan mematuhi standar operasional yang ketat guna menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat.

household financial burdens if financing is not used productively, vulnerability to customer data security with digitalization, and the emergence of negative community perceptions regarding financing mechanisms or complaint handling. [GRI 413-2]

To mitigate these risks, PNM implements adaptive meeting schedules, strengthens field officer competencies through ethics and financial literacy training, provides educational programs on responsible financing use, and improve data security systems, including cybersecurity. Furthermore, PNM operates easily accessible complaint channels, conducts continuous outreach, strengthens monitoring processes, and ensures all service units comply with strict operational standards to maintain harmonious relationships with communities.

### Titik Akses pada Wilayah Rendah Populasi atau Ekonomi Kurang Menguntungkan [GRI FS13]

Access Points in Low-Population or Economically Disadvantaged Areas [GRI FS13]

PNM berkomitmen untuk memperluas akses layanan bagi nasabah di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah dengan populasi rendah, kondisi ekonomi yang menantang, maupun daerah yang digolongkan sebagai daerah tertinggal. Komitmen ini diwujudkan melalui pengembangan jangkauan layanan yang merata dan inklusif sehingga masyarakat di berbagai karakteristik wilayah tetap memperoleh kesempatan untuk berkembang.

PNM strives to broaden access to its services across Indonesia, particularly in sparsely populated areas, economically disadvantaged regions, and underdeveloped communities. By providing inclusive and evenly distributed service coverage, the Company ensures that people in all regions have opportunities for growth and development.

Dalam pelaksanaannya, Perusahaan berpedoman pada data demografi terkini dari Sensus Penduduk BPS 2024 serta ketentuan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2020–2024. Rujukan tersebut memastikan bahwa strategi perluasan akses PNM didasarkan pada data yang valid, relevan, dan sesuai kebijakan nasional terkait pemerataan pembangunan.

In its implementation, the Company refers to the latest demographic data from the 2024 BPS Population Census and the provisions of Presidential Regulation (Perpres) Number 63 of 2020 on Designation of Underdeveloped Areas 2020–2024. These references ensure that PNM access expansion strategy is based on valid, relevant data and aligned with national policies on equitable development.

Sepanjang tahun 2025, PNM telah menambah akses kantor unit di daerah rendah populasi dan daerah tertinggal di Kabupaten Bangka Selatan. Dengan demikian, hingga akhir tahun 2025, sebaran kantor cabang yang beroperasi di daerah rendah populasi dan daerah tertinggal adalah sebagai berikut:

Throughout 2025, PNM expanded unit office access in low-population and underdeveloped areas in .South Bangka Regency. As of the end of 2025, the distribution of branch offices operating in low-population and underdeveloped areas is as follows:

Nama Unit Unit Name	Cabang Branch	Kota/Kabupaten City/Regency	Provinsi Province	Bisnis Business
M.TKSD-Tukak Sadai	PNM Bangka Belitung	Kabupaten Bangka Selatan South Bangka Regency	Kepulauan Bangka Belitung Bangka Belitung Islands	Mekaar
M.SPRB-Simpang Rimba				

Tabel Sebaran Kantor Cabang Wilayah Rendah Populasi dan Daerah Tertinggal Tahun 2023-2025\*)

Table of Distribution of Branch Offices in Low-Population and Underdeveloped Areas, 2023-2025\*)

No.	Wilayah Area	2025			2024			2023		
		ULaMM	PNM Mekaar	Jumlah Total	ULaMM	PNM Mekaar	Jumlah Total	ULaMM	PNM Mekaar	Jumlah Total
<b>Provinsi Sumatra Selatan</b> South Sumatra Province										
1	Kabupaten Musi Rawas Utara North Musi Rawas Regency	-	-	-	-	1	1	-	1	1
<b>Provinsi Lampung</b> Lampung Province										
2	Kabupaten Pesisir Barat West Coast Regency	-	-	-	-	1	1	-	-	-
<b>Provinsi Nusa Tenggara Barat</b> West Nusa Tenggara Province										
3	Kabupaten Lombok Utara North Lombok Regency	-	-	-	-	-	-	-	1	1
<b>Provinsi Nusa Tenggara Timur</b> East Nusa Tenggara Province										
4	Kabupaten Sumba Barat West Sumba Regency	-	-	-	-	-	-	-	1	-
5	Kabupaten Sumba Timur East Sumba Regency	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kabupaten Kupang Kupang Regency	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kabupaten Timor Tengah Selatan South Timor Tengah Regency	-	-	-	-	-	-	-	1	1
8	Kabupaten Belu Belu Regency	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kabupaten Sumba Barat Daya Southwest Sumba Regency	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kabupaten Manggarai Timur East Manggarai Regency	-	-	-	-	1	1	-	-	-
11	Kabupaten Malaka Malaka Regency	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b> Central Sulawesi Province										
12	Kabupaten Donggala Donggala Regency	-	-	-	-	-	-	-	3	3
13	Kabupaten Tojo Una-Una Tojo Una-Una Regency	-	-	-	-	1	1	2	1	3
14	Kabupaten Sigi Sigi Regency	-	-	-	-	-	-	-	-	-







No.	Wilayah Area	2025			2024			2023		
		ULaMM	PNM Mekaar	Jumlah Total	ULaMM	PNM Mekaar	Jumlah Total	ULaMM	PNM Mekaar	Jumlah Total
49	Kabupaten Muko Muko Muko Muko Regency	-	-	-	-	-	-	-	3	3
50	Kabupaten Rejang Lebong Rejang Lebong Regency	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Kabupaten Seluma Seluma Regency	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Kota Bengkulu Bengkulu City	-	-	-	-	2	2	-	-	-
<b>Jumlah Total</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>20</b>

\*) Sepuluh provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit menurut Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Juni 2024, adalah Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya, Kalimantan Utara, Papua, Gorontalo, Papua Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Barat dan Papua Pegunungan.

\*) The ten provinces with the lowest population, according to the Directorate General of Population and Civil Registration (Dukcapil), Ministry of Home Affairs, June 2024, are South Papua, West Papua, Southwest Papua, North Kalimantan, Papua, Gorontalo, Central Papua, North Maluku, West Sulawesi, and Highland Papua.

### Akses untuk Nasabah Penyandang Disabilitas [GRI FS14] Access for Customers with Disabilities [GRI FS14]

Selaras dengan prinsip penghormatan dan kesetaraan, PNM memberikan dukungan penuh bagi pengusaha penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mereka. Pemberdayaan tersebut dijalankan melalui program PNM Mekaar, yang membuka akses pembiayaan dan pendampingan usaha secara inklusif. Untuk memperluas jangkauan layanan bagi calon maupun nasabah penyandang disabilitas, Perseroan juga menjalin kerja sama dengan berbagai mitra strategis, termasuk Komisi Nasional (Komnas) Disabilitas. Hingga 31 Desember 2025, jumlah nasabah penyandang disabilitas yang tergabung dalam PNM Mekaar mencapai 7 (tujuh) orang.

In line with the principles of respect and equality, PNM provides full support for entrepreneurs with disabilities to develop their potential and creativity. This empowerment is implemented through the PNM Mekaar program, which offers inclusive access to financing and business mentoring. To expand service reach for prospective and existing customers with disabilities, the Company also collaborates with various strategic partners, including the National Disability Commission (Komnas Disabilitas). As of December 31, 2025, the number of customers with disabilities participating in PNM Mekaar amounted to 7 (seven) individuals.

### Berkreasi dalam Sunyi

Di sebuah sudut Karawang, Jawa Barat, canting menari di atas kain tanpa banyak suara. Hanya ada gerak tangan yang lincah dan mata yang fokus. Di sini, Inaraya dan sekitar 30 teman tuli, sebutan untuk tunarungu dalam mengembangkan potensi, sedang "melawan" sunyi melalui Kreasi Batik Tuli Indonesia. Selama ini, mereka adalah kelompok yang luput dari pandangan: secara fisik tampak bugar, namun pintu lapangan kerja kerap tertutup rapat karena kendala komunikasi.

"Saat mereka melamar kerja, enggak akan ada yang mau karena komunikasinya saja susah," ujar Inaraya, pendiri Kreasi Batik Tuli. Baginya, tantangan terbesar bukan pada disabilitasnya, melainkan pada dunia kerja yang enggan belajar memahami bahasa mereka.

Nasib komunitas ini mulai berubah saat PT Permodalan Nasional Madani (PNM) datang "meminang". Melalui Divisi Jasa Manajemen dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), PNM melihat potensi ekonomi yang besar di balik keterbatasan tersebut. Inaraya mengaku, kehadiran PNM seperti embusan angin segar bagi mereka yang selama ini terabaikan.

Tak sekadar menyuntikkan modal, PNM memboyong peralatan membuat batik hingga membuka akses pasar lewat berbagai pameran. "Sangat berarti, karena selama ini belum ada yang melirik keberadaan kami," kata Inaraya.

Strategi PNM memang spesifik: menyoar perempuan. Melalui program \*Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), perusahaan plat merah ini telah merangkul 14,9 juta nasabah di seluruh pelosok negeri. Menariknya, ekosistem ini dijalankan dari dan untuk perempuan, terbukti dengan komposisi karyawan PNM yang 98 persennya adalah kaum Hawa.

"Kami yakin perempuan adalah tonggak di rumah tangga," kata Cut Ria Dewanti, Kepala Divisi Jasa Manajemen dan TJSL PNM.

Bagi Cut Ria, mendampingi nasabah seperti Inaraya adalah komitmen jangka panjang. PNM enggan membiarkan nasabah "tumbuh sendirian" setelah diberi modal. Kolaborasi dengan berbagai entitas, mulai dari BUMN, swasta, hingga perusahaan multinasional, terus dijalin agar para pengusaha mikro ini semakin berkembang dan naik kelas.

Dalam acara Parade Wastra Nusantara, akhir juli 2024 lalu, Cut Ria tampak bangga mengenakan batik hasil karya teman tuli. Produk yang dihasilkan bukan sekadar kain bermotif, melainkan simbol kemandirian yang lahir dari kegigihan.

Langkah PNM dan Kreasi Batik Tuli adalah potret kecil dari ambisi besar: menciptakan ekonomi yang inklusif. Di mana kemajuan tidak hanya diukur dari angka-angka pertumbuhan, tapi dari seberapa banyak orang yang sebelumnya "tak terdengar" kini mampu bersuara lewat karya.\*

### Creating Art in Silence

In a quiet corner of Karawang, West Java, a canting flows across fabric without a sound. Swift hands and determined eyes tell the real story. Inaraya and about 30 deaf artisans are turning silence into empowerment through Kreasi Batik Tuli Indonesia. For years, they have been a community overlooked: physically capable, yet repeatedly shut out of job opportunities due to communication barriers.

"When they apply for jobs, many employers are unwilling to hire them due to communication barriers," said Inaraya, founder of Kreasi Batik Tuli. She believes the core issue lies not in their disability, but in the lack of willingness to bridge the communication gap.

Change began when PT Permodalan Nasional Madani (PNM) intervened. Through its Management Services and CSR Division, PNM identified untapped economic potential within the community. Inaraya described PNM support as a welcome boost for those who had long been marginalized.

Beyond financial assistance, PNM provided batik-making tools and created opportunities to reach wider markets through exhibitions. "It means a great deal to us, because for so long no one acknowledged our presence," Inaraya said.

PNM approach is clear: focus on women's empowerment. Through its Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera, or Fostering a Prosperous Family Economy) program, the state-owned company has supported 14.9 million customers nationwide. Remarkably, the ecosystem is powered by women themselves, with women making up 98 percent of PNM workforce.

"We see women as the backbone of the household," said Cut Ria Dewanti, Head of PNM Management Services and CSR Division.

For Cut Ria, assisting clients like Inaraya is not a short-term effort but an ongoing commitment. PNM is committed to ensuring that customers do not "grow alone" after receiving financial support. By building partnerships with state-owned enterprises, private firms, and multinational companies, PNM helps micro-entrepreneurs scale up and advance to the next stage of development.

At the Parade Wastra Nusantara in late July 2024, Cut Ria wore the artisans' batik with pride. Each piece tells a story. It is not just of pattern and color, but of courage and independence earned through resilience.

Together, PNM and Kreasi Batik Tuli represent something greater than a business partnership. They embody a commitment to an inclusive economy, where progress is not just about numbers, but about empowering those once unheard to stand tall through their work.



### Pengaduan Masyarakat [OJK F.24] Community Complaints [OJK F.24]

Kepatuhan terhadap regulasi merupakan prinsip fundamental yang dipegang PNM dalam menjalankan usaha sehingga setiap aktivitas operasionalnya dijalankan dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan. Meski demikian, sebagai wujud tanggung jawab dan transparansi, Perusahaan tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan apabila merasa terdampak oleh operasional PNM, serta berkomitmen menyelesaikan setiap pengaduan tersebut secara cepat, tepat, dan profesional.

Saluran pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, pegawai, maupun pihak lainnya mencakup *Whistleblowing System* (WBS) yang meliputi pelaporan terkait isu sosial dan lingkungan di seluruh wilayah operasional PNM. Penyampaian pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui *e-mail* ke [antifraud@pnm.co.id](mailto:antifraud@pnm.co.id), Whatsapp ke 082112345555, atau melalui surat resmi yang ditujukan kepada Direksi u.p. Satuan Pengawasan Intern, baik diantarkan langsung maupun dikirim melalui pos. Selain WBS, pengaduan juga dapat disampaikan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen OJK (APPK OJK) maupun *Call Center*.

Per 31 Desember 2025, PNM menerima pengaduan melalui ketiga saluran sebanyak 647 laporan, turun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 1.621 laporan. Dari pengaduan yang masuk pada tahun pelaporan, sebanyak 355 laporan memenuhi kriteria dan ditindaklanjuti oleh Perseroan dengan hasil sebanyak 77 laporan pengaduan sudah selesai ditindaklanjuti dan 20 laporan pengaduan masih dalam proses penyelesaian. Sedangkan

Compliance with regulations is a fundamental principle upheld by PNM in conducting its business, ensuring that all operational activities are carried out with due caution to prevent negative impacts on communities or the environment. Nevertheless, as part of its commitment to responsibility and transparency, the Company provides channels for the public to submit complaints if they feel affected by PNM operations and is committed to addressing all complaints promptly, accurately, and professionally.

Complaint channels available to the public, employees, or other parties include the Whistleblowing System (WBS), which covers reports related to social and environmental issues across all PNM operational areas. Complaints can be submitted in writing via e-mail to [antifraud@pnm.co.id](mailto:antifraud@pnm.co.id), Whatsapp to 082112345555, or by official letter addressed to the Board of Directors c.q. Internal Audit, delivered directly or sent by post. In addition to WBS, complaints can also be submitted through the OJK Consumer Protection Portal Application (APPK OJK) or the Call Center.

As of December 31, 2025, PNM received a total of 647 complaints through these channels, decreasing to 1,621 complaints in 2024. Of the complaints received during the reporting year, 355 met the criteria and were followed up by the Company, resulting in 77 complaints being resolved and 20 complaints still in process. Complaints that could not be followed up due to not meeting the criteria (e.g., incomplete information) amounted



laporan pengaduan yang tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi kriteria (informasi tidak lengkap) sebanyak 278 laporan. Adapun laporan yang bukan merupakan pengaduan pelanggaran (*fraud*) melainkan berupa pertanyaan/kritik/saran terkait perusahaan dan rekrutmen/kepegawaian sebanyak 292 laporan.

to 278 Meanwhile, submissions that were not fraud but rather inquiries, feedback, or suggestions regarding the Company or recruitment/HR amounted to 292 reports.

**Tabel Pengaduan Masyarakat Tahun 2023-2025**

Table on Community Complaints for 2023-2025

Uraian Description	Jumlah Keluhan yang Diterima Number of Complaints Received			Selesai Resolved			Dalam Proses In Process		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023
Pengaduan yang memenuhi kriteria Complaints that met the criteria	355	397	389	77	385	377	20	12	12
Pengaduan yang tidak memenuhi kriteria Complaints that did not meet the criteria	278	814 *)	295	-	-	-	-	-	-
Pertanyaan/kritik/saran terkait perusahaan dan rekrutmen/ kepegawaian Questions/feedback/ suggestions related to the Company and recruitment/ employment	292	410	4.557	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Total</b>	<b>925</b>	<b>1.621</b>	<b>5.241</b>	<b>77</b>	<b>385</b>	<b>377</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

\*) Termasuk pengaduan yang diminta melengkapi data

\*) Including complaints that require additional information

### Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) [OJK F.25][IDX S-12]

Corporate Social Responsibility (CSR) Programs [OJK F.25][IDX S-12]

PNM menjalankan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai wujud komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Program TJSL difokuskan pada pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan, peningkatan literasi keuangan, serta penguatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, PNM turut melaksanakan inisiatif pelestarian lingkungan, termasuk kegiatan penghijauan dan transplantasi terumbu karang. Seluruh upaya ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang positif serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB atau *Sustainable Development Goals*/SDGs. Di sisi lain, berdasarkan identifikasi yang dilakukan PNM, tidak terdapat dampak ekonomi negatif yang signifikan dari pelaksanaan program TJSL selama periode pelaporan. [GRI 3-3, 203-1, 203-2]

PNM implements the Corporate Social Responsibility (CSR) as a demonstration of the Company's commitment to supporting sustainable development. The CSR program focuses on community empowerment through entrepreneurship training, improved financial literacy, and strengthening the capacity of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). In addition, PNM undertakes environmental conservation initiatives, including reforestation and coral reef transplantation activities. These efforts not only contribute to the improvement of community welfare but also generate positive social and environmental impacts, supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). On the other hand, based on PNM's assessment, there were no significant negative economic impacts resulting from the implementation of the TJSL program during the reporting period. [GRI 3-3, 203-1, 203-2]



Perusahaan meyakini bahwa implementasi TJSL memberikan nilai strategis bagi keberlanjutan usaha. Melalui pemberdayaan kelompok perempuan prasejahtera, khususnya melalui program Mekaar, PNM membangun hubungan yang kuat dengan komunitas sekaligus membentuk basis nasabah yang loyal. Keberhasilan berbagai program TJSL juga memperkuat reputasi PNM sebagai institusi yang responsif terhadap isu sosial dan lingkungan, sebuah aspek penting dalam menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan. Dalam jangka panjang, TJSL tidak hanya berkontribusi pada ketahanan bisnis Perusahaan, tetapi juga mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di mana masyarakat dan perusahaan tumbuh secara beriringan. Informasi lengkap mengenai pelaksanaan program TJSL serta keterkaitannya dengan TPB/SDGs disajikan pada tabel berikut: [GRI 203-1, 203-2][IDX S-12]

The Company believes that implementing CSR provides strategic value for business sustainability. By empowering underprivileged women's groups, particularly through the Mekaar program, PNM builds strong community relationships while establishing a loyal customer base. The success of various CSR programs also strengthens PNM reputation as an institution that is responsive to social and environmental issues, an essential factor in maintaining stakeholder trust. In the long term, CSR not only contributes to the Company's business resilience but also fosters the establishment of an inclusive and sustainable economic ecosystem where communities and the Company grow together. Further information on the implementation of CSR programs and their alignment with the SDGs is presented in the following table: [GRI 203-1, 203-2][IDX S-12]

### RKAP dan Prognosis Program TJSL Tahun 2025

2025 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) and Social & Environmental Responsibility (TJSL) Program Forecast

No.	Nama Program Program Name	Prioritas TPB SDG Priority	Kegiatan Activity	Realisasi Penyaluran (Rp) Realized Distribution (IDR)	Pencapaian Achievement (%)
<b>Pilar Sosial</b> Social Pillar					
1	Madani Entrepreneurship Academy	4	2	1.243.782.750	213,33
2	Ruang Pintar PNM [GRI 203-1] PNM Smart Space [GRI 203-1]	4	34	2.915.041.332	170,00
3	Belajar Seasik Bermain [GRI 203-1] Fun Learning [GRI 203-1]	4	8.226	-	100,00
4	PNM <i>Scholarship</i>	4	4	5.405.125.000	111,64
5	<i>Madani Upskilig Academy</i>	4	1	153.180.000	150,00
6	<i>Madani Care Stunting</i>	1	22	486.014.354	263,80
7	Rumah Pangan PNM	2	19	1.122.700.450	126,67
8	PNM <i>Humanity</i>	5	11	357.901.002	120,00
9	Lorong Mekaar	1	16	430.969.607	133,33
10	Bantuan Bencana Alam dan Kemanusiaan Disaster and Humanitarian Aid	1	105	1.883.976.003	96,77
11	Insidental Incidental		51	213.293.085	388,99
<b>Sub Jumlah</b> Sub Total				<b>14.211.983.583</b>	<b>241,18</b>
<b>Pilar Lingkungan</b> Environmental Pillar					
1	<i>Ecolife</i> PNM	12	31	383.638.007	310,00
2	PNM Hijaukan Indonesia [GRI 203-1] Greening Indonesia with PNM [GRI 203-1]	15	42	1.624.321.627	246,67
3	Sanitasi SMART [GRI 203-1] SMART Sanitasion [GRI 203-1]	6	28	1.196.517.731	186,67
4	PNM Peduli Terumbu Karang Care for Coral Reef	14	5	475.128.190	166,67
5	Budidaya Maggot Maggot Farming	12	5	133.578.325	166,67
<b>Sub Jumlah</b> Sub Total				<b>3.813.183.880</b>	<b>105,44</b>

No.	Nama Program Program Name	Prioritas TPB SDG Priority	Kegiatan Activity	Realisasi Penyaluran (Rp) Realized Distribution (IDR)	Pencapaian Achievement (%)
<b>Pilar Ekonomi</b> Economic Pillar					
1	Difabel Bisa Berusaha Persons with Disabilities Can Succeed	8	17	381.016.993	232,50
2	Pemberdayaan Kampung Madani Empowerment of Madani Village	8	84	360.030.176	381,82
3	Madani Go <i>Entrepreneur</i>	8	6	110.490.850	506,00
4	Madani Vokasi <i>Academy</i>	8	10	525.882.950	440,00
5	Madani <i>Movement</i>	8	138	3.415.248.535	348,72
<b>Sub Jumlah</b> Sub Total				<b>4.792.669.504</b>	<b>295,56</b>
<b>Jumlah</b> Total				<b>22.817.836.967</b>	

Program pembangunan infrastruktur TJSL PNM seperti Ruang Pintar PNM, Belajar Seasik Bermain, *Ecolife* PNM dan Sanitasi SMART dilaksanakan secara pro bono, yaitu pemberian bantuan atau layanan secara cuma-cuma tanpa imbalan finansial, sebagai wujud komitmen PNM menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui penyediaan infrastruktur tersebut, Perusahaan tidak hanya membantu meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga memperkuat produktivitas dan kemandirian masyarakat prasejahtera, khususnya nasabah ultra mikro.

PNM's TJSL infrastructure development programs such as PNM Smart Rooms, Learning Through Play, PNM *Ecolife*, and SMART Sanitation are implemented on a pro bono basis, meaning assistance or services are provided free of charge without financial compensation, as a manifestation of PNM's commitment to delivering tangible benefits to the community. Through the provision of this infrastructure, the Company not only helps improve the quality of life but also strengthens the productivity and self-reliance of underprivileged communities, particularly ultra-micro customers.



## Perhitungan SROI dan IKM Program TJSL PNM Tahun 2025 [GRI 203-1, 203-2]

SROI and CSI Calculation for PNM CSR Programs in 2025 [GRI 203-1, 203-2]



PNM telah melakukan pengukuran dampak terhadap empat program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 menggunakan pendekatan *Social Return on Investment* (SROI) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hasil pengukuran ini menjadi dasar bagi PNM untuk mengevaluasi efektivitas program, memperkuat strategi pemberdayaan, serta memastikan bahwa setiap inisiatif TJSL memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan lingkungan.

Hasil pengukuran tersebut sekaligus membuktikan program-program PNM menghasilkan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan antara lain melalui peningkatan kapasitas usaha, perluasan peluang pendapatan, serta penguatan produktivitas masyarakat penerima manfaat.

PNM conducted impact measurements for four CSR programs implemented throughout 2025 using the Social Return on Investment (SROI) approach and the Community Satisfaction Index (CSI). The results of these measurements serve as the basis for PNM to evaluate program effectiveness, strengthen its empowerment strategies, and ensure that each CSR initiative delivers maximum benefits to society and the environment.

These measurement results also demonstrate that PNM's programs generate significant indirect economic impacts, including through enhanced business capacity, expanded income opportunities, and increased productivity among beneficiary communities.



### Tujuan Perhitungan SROI & IKM: Objectives of the SROI & CSI Calculation:

1. Menilai efektivitas dan keberlanjutan program TJSL

Sejauh mana program TJSL yang dilaksanakan memberikan hasil yang efektif, relevan, dan berdampak nyata bagi penerima manfaat.

2. Mengidentifikasi besaran manfaat sosial dan ekonomi yang tercipta

Mengetahui seberapa besar manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihasilkan dari setiap rupiah yang diinvestasikan.

3. Menyajikan ukuran keberhasilan yang melampaui indikator *output*

Menggambarkan perubahan kualitas hidup, peningkatan kapasitas, serta nilai sosial yang dirasakan masyarakat.

1. Assessing the effectiveness and sustainability of TJSL programs

Evaluating the extent to which the implemented TJSL programs deliver effective, relevant, and tangible outcomes for beneficiaries.

2. Identifying the magnitude of social and economic benefits generated

Determining the scale of social, economic, and environmental benefits created for every rupiah invested.

3. Providing performance measures beyond output indicators

Illustrating improvements in quality of life, capacity building, and the social value perceived by communities.



4. Menjawab kebutuhan informasi pemangku kepentingan dan mitra kerja  
 Membantu perusahaan merespons tren global dalam pengukuran dampak sosial, serta memperkuat posisi strategis program TJSL dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
4. Addressing the information needs of stakeholders and partners  
 Supporting the Company in responding to global trends in social impact measurement and strengthening the strategic role of TJSL programs in advancing the Sustainable Development Goals (SDGs).


**Nilai SROI & IKM**  
 SROI & IKM Score

**Kampung Madani Kopeng**  
 Kampung Madani Kopeng

**Indeks Kepentingan**  
 Indeks Kepentingan  
**88,50**

**Indeks Kinerja**  
 Performance Index  
**89,50**

**SROI Ratio**  
 SROI Ratio  
**2,12**
**Program Beasiswa Pendidikan**  
 Educational Scholarship Program

**Indeks Kepentingan**  
 Indeks Kepentingan  
**87,00**

**Indeks Kinerja**  
 Performance Index  
**88,50**

**SROI Ratio**  
 SROI Ratio  
**2,30**
**Madani Vokasi Academy**  
 Madani Vocational Academy

**Indeks Kepentingan**  
 Indeks Kepentingan  
**86,50**

**Indeks Kinerja**  
 Performance Index  
**88,00**

**SROI Ratio**  
 SROI Ratio  
**2,51**
**Ruang Pintar Terapung**  
 Ruang Pintar Terapung

**Indeks Kepentingan**  
 Indeks Kepentingan  
**85,00**

**Indeks Kinerja**  
 Performance Index  
**86,00**

**SROI Ratio**  
 SROI Ratio  
**2,43**



Makna SROI  
Meaning of SROI

Wilayah Region	SROI	Simpulan Conclusion
Kampung Madani Kopeng	2,12	Rasio di atas 2 menandakan program memiliki nilai keberlanjutan sosial yang kuat, dengan manfaat nyata tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga sosial-budaya. Program berhasil meningkatkan akses ekonomi keluarga, memperkuat jejaring sosial warga, dan memperbaiki kualitas hidup melalui pendekatan pemberdayaan komunitas berbasis kewirausahaan lokal.  A ratio above 2 indicates that the program has strong social sustainability value, with tangible benefits not only economically but also socially and culturally. The program has successfully improved household economic access, strengthened community social networks, and enhanced quality of life through a community empowerment approach based on local entrepreneurship.
Beasiswa Pendidikan Educational Scholarships	2,30	Investasi dalam pendidikan menghasilkan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan jangka panjang. Program ini tidak hanya meningkatkan akses pendidikan formal dan non formal, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan diri, serta mobilitas sosial keluarga penerima manfaat.  Investment in education results in increased long-term productivity and welfare. This program not only improves access to formal and non-formal education but also contributes to increased self-confidence and social mobility of beneficiary families.
Madani Vokasi Academy Madani Vocational Academy	2,51	Nilai SROI yang mencapai 2,51 menunjukkan bahwa program vokasi memiliki efektivitas tinggi dalam membangun kapasitas kerja dan kemandirian ekonomi masyarakat. Hasil ini mengindikasikan keberhasilan model <i>functional empowerment</i> , dimana peserta mulai mampu menerapkan keterampilan teknis dan nonteknis secara mandiri.  An SROI value reaching 2.51 indicates that the vocational program has high effectiveness in building workforce capacity and community economic independence. These results indicate the success of the functional empowerment model, where participants begin to be able to apply technical and non-technical skills independently.
Ruang Pintar Terapung	1,82	Program ini merepresentasikan inovasi pemanfaatan ruang terbatas di kawasan padat penduduk melalui konsep ruang belajar inklusif di atas permukaan air. Program ini berhasil menyediakan akses pendidikan dan kegiatan literasi bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera yang mengalami keterbatasan lahan dan sarana publik.  This program represents innovation in utilizing limited space in densely populated areas through the concept of an inclusive learning space above water surfaces. The program has successfully provided access to education and literacy activities for children from underprivileged families who experience limitations in land and public facilities.



Impact Highlight  
Impact Highlight

Kampung Madani Kopeng  
Kampung Madani Kopeng



35+

Anggota  
Members

Pengusaha Lokal pertanian dan peternakan  
Local agricultural and livestock business actors



70+

Masyarakat Terdampak  
Effected Communities

Jumlah Penerima Manfaat  
Number of Beneficiaries



Pendapatan Kas Kelompok Rumah Pangan  
Food House Group Cash Income

Rp1.201.750

Program Beasiswa Pendidikan  
Educational Scholarship Program



20/25

Anak  
Children

Peningkatan nilai dan motivasi belajar  
Improvement in academic performance and learning motivation



25+

Siswa  
Students

Menerima Bantuan Beasiswa  
Receiving Scholarship Assistance



Penghematan Biaya Sekolah  
School Cost Savings

Rp205.908.450

Madani Vokasi Academy  
Madani Vocational Academy



13/17

Penerima manfaat  
Beneficiaries

Berhasil mendapatkan kerja  
Successfully obtained employment



17+

Penerima Manfaat  
Beneficiaries

Mengikuti pelatihan keahlian teknis dan soft skills  
Participated in Technical and Soft Skills Training



Peningkatan Pendapatan Peserta  
Increase in Participants' Income

Rp165.179.976

Ruang Pintar Terapung  
Ruag Pintar Terapung



2 Neighborhood Unit

Mendapatkan Manfaat Program  
Benefited from the program

Inovasi pendidikan berbasis inklusi  
Inclusive Education Innovation



35+

Siswa  
Students

Jumlah Siswa Ruang Pintar  
Number of Ruang Pintar Students



## Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan

### Responsibility for Sustainable Product/Service Development

PNM memiliki tanggung jawab yang besar terhadap nasabahnya sebagai bagian dari misinya dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, terkhusus pengusaha UMKM. Produk pembiayaan melalui Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) dan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) dirancang untuk memberikan akses pembiayaan yang inklusif dan terjangkau. Selain pembiayaan, Perseroan juga menyediakan pendampingan dan pelatihan untuk membantu nasabah meningkatkan kapasitas usaha sehingga mereka tidak hanya mendapatkan modal tetapi juga keterampilan yang relevan untuk berkembang. Pendekatan tersebut menunjukkan komitmen PNM dalam menciptakan dampak sosial yang positif melalui produk-produk yang ditawarkan.

Sebagai institusi yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, PNM memastikan bahwa seluruh produk dan layanannya sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan inklusi. Transparansi proses, penetapan biaya yang kompetitif, serta kualitas layanan yang responsif menjadi prioritas untuk membangun dan menjaga kepercayaan nasabah. Selain itu, Perusahaan turut memberikan edukasi keuangan sebagai bagian dari perlindungan nasabah, agar mereka memahami manfaat, kewajiban, dan risiko pembiayaan yang diakses. Dengan demikian, PNM tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan finansial, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan UMKM yang tangguh dan berkelanjutan.

Dalam menjalankan usaha, PNM secara transparan mengungkapkan pemetaan target penyaluran pendanaan untuk memastikan alokasi yang tepat sasaran bagi nasabah yang memenuhi kriteria, termasuk usaha mikro, kelompok berpendapatan rendah, dan perempuan. Pendekatan ini memungkinkan Perusahaan untuk memonitor distribusi pembiayaan secara inklusif, menilai proporsi pendanaan yang diterima masing-masing segmen, serta merancang strategi pemberdayaan yang lebih efektif. Dengan demikian, PNM tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat akses keuangan bagi kelompok yang membutuhkan, sejalan dengan misi pemberdayaan UMKM dan inklusi sosial.

PNM holds significant responsibility toward its customers as part of its mission to empower community economies, particularly MSME actors. Financing products through the ULaMM Unit and Mekaar programs are designed to provide inclusive and affordable access to financing. Beyond financing, the Company also offers mentoring and training to help customers enhance their business capacities, ensuring they not only receive capital but also the relevant skills needed to grow. This approach demonstrates PNM commitment to creating positive social impact through the products it offers.

As an institution focused on community economic empowerment, PNM ensures that all its products and services adhere to principles of sustainability and inclusion. Transparent processes, competitive pricing, and responsive service quality are prioritized to build and maintain customer trust. In addition, the Company provides financial education as part of customer protection, helping them understand the benefits, obligations, and risks associated with the financing accessed. In this way, PNM functions not only as a financial service provider but also as a strategic partner in fostering resilient and sustainable MSME growth.

In conducting its business, PNM transparently discloses the target allocation of financing to ensure proper distribution to eligible customers, including micro-businesses, low-income groups, and women. This approach allows the Company to monitor inclusive financing distribution, evaluate the proportion of funding received by each segment, and design more effective empowerment strategies. Accordingly, PNM not only supports local economic growth but also strengthens financial access for underserved groups, aligning with its mission of MSME empowerment and social inclusion.





## Layanan Setara untuk Konsumen/Nasabah [OJK F.17]

Equal Services for Consumers/Customers [OJK F.17]

PNM memegang teguh prinsip layanan setara bagi seluruh nasabah sebagai fondasi dalam menjalankan misinya memberdayakan pengusaha UMKM. Perusahaan memastikan bahwa setiap nasabah, tanpa memandang agama, ras, suku, *gender*, pandangan politik, maupun latar belakang lainnya, mendapatkan akses yang sama terhadap seluruh produk dan layanan PNM. Kesetaraan tersebut diwujudkan melalui proses pengajuan pembiayaan yang transparan, pendampingan usaha yang inklusif, serta edukasi yang dapat dijangkau oleh seluruh nasabah, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil atau berpenduduk rendah.

Penerapan prinsip nondiskriminasi ini merupakan bentuk kepatuhan PNM terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 7 huruf c yang mewajibkan pengusaha untuk melayani konsumen secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Penjelasan atas pasal tersebut secara tegas melarang pembedaan mutu maupun jenis layanan kepada konsumen. Selain itu, sebagai Lembaga Jasa Keuangan, PNM juga menerapkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan sehingga seluruh layanan yang diberikan aman, adil, dan sesuai ketentuan.

Prinsip kesetaraan tidak hanya tercermin dalam proses pembiayaan, tetapi juga dalam keterbukaan PNM terhadap masukan dan umpan balik nasabah untuk peningkatan mutu layanan. Nasabah dapat menyampaikan pendapat, pertanyaan, maupun keluhan melalui berbagai kanal resmi, termasuk nomor telepon, *e-mail*, dan media sosial Perusahaan. Seluruh masukan yang diterima akan diproses dan ditindaklanjuti sesuai prosedur operasional standar yang berlaku.

Sesuai ketentuan, pengaduan nasabah harus diterima paling lambat tanggal 10 setiap tiga bulan, atau pada hari kerja berikutnya apabila jatuh pada hari libur. Tindak lanjut atas pengaduan diselesaikan paling lambat 20 hari kerja sejak diterimanya keluhan, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 20 hari kerja tambahan dalam kondisi tertentu. Dengan mekanisme tersebut, hingga 31 Desember 2025, pengaduan dari nasabah Mekaar tercatat sebanyak 238 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan) laporan, sedangkan pengaduan dari nasabah ULaMM tercatat sebanyak 7 (Tujuh) laporan. Seluruh pengaduan telah ditindaklanjuti sesuai standar dan ketentuan yang berlaku di PNM.



## Pelindungan Data Pribadi

Personal Data Protection

PNM menempatkan pelindungan data pribadi konsumen/nasabah sebagai salah satu prioritas utama dalam operasionalnya. Perusahaan memastikan seluruh informasi pribadi yang meliputi nama, alamat, nomor telepon, serta data keuangan dikelola secara aman dan hanya digunakan sesuai dengan tujuan layanan. Prosedur pengelolaan data mengikuti standar internal yang ketat, meliputi penyimpanan, akses terbatas, serta pengawasan rutin untuk mencegah penyalahgunaan

PNM upholds the principle of equal service for all customers as a foundation for its mission to empower MSME actors. The Company ensures that every customer, regardless of religion, race, ethnicity, gender, political views, or other backgrounds, receives equal access to all PNM products and services. Equality is implemented through transparent financing applications, inclusive business mentoring, and educational programs accessible to all customers, including those in remote or low-population areas.

The application of non-discrimination principles reflects PNM compliance with the Consumer Protection Law, particularly Article 7(c), which requires businesses to serve consumers honestly, fairly, and without discrimination. This provision explicitly prohibits differential treatment in terms of quality or type of services provided. Furthermore, as a Financial Services Institution, PNM also adheres to OJK Regulation Number 22 of 2023 on Consumer Protection in the Financial Services Sector, ensuring all services are safe, fair, and compliant.

The principle of equality is also reflected in PNM openness to customer feedback for service improvement. Customers can submit opinions, questions, or complaints through various official channels, including phone, e-mail, and the Company's social media platforms. All feedback is processed and addressed in accordance with standard operational procedures.

In line with regulations, customer complaints must be received no later than the 10<sup>th</sup> of each quarter, or on the next working day if the deadline falls on a public holiday. Follow-up must be completed within 20 working days from receipt, with a possible extension of an additional 20 working days under certain conditions. Using this mechanism, as of December 31, 2025, complaints from Mekaar customers amounted to 238 (two hundred and thirty-eight) reports, while complaints from ULaMM customers totaled 7 (seven) reports. All complaints have been addressed in accordance with PNM standards and regulations.

PNM prioritizes the protection of customers' personal data as a key aspect of its operations. The Company ensures that all personal information, including names, addresses, phone numbers, and financial data, is managed securely and used solely for service-related purposes. Data management procedures adhere to strict internal standards, including secure storage, restricted access, and routine monitoring to prevent misuse or data breaches. Customer data protection is governed by Decree



atau kebocoran informasi. Pelindungan data nasabah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: SK-083/PNM-DIR/IX/24 tentang Pedoman Pelindungan Data Pribadi.

Sejalan dengan komitmen melindungi data pribadi, PNM menerapkan kebijakan privasi yang transparan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelindungan data pribadi, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Nasabah diberikan informasi mengenai hak dan mekanisme pelindungan data, termasuk prosedur pengaduan apabila terjadi indikasi pelanggaran privasi. Melalui langkah-langkah ini, Perusahaan tidak hanya menjaga kerahasiaan data nasabah, tetapi juga membangun kepercayaan dan loyalitas nasabah sebagai mitra dalam pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi pengusaha UMKM.

Berkaitan dengan audit pelindungan data pribadi, PNM menyiapkan *audit trail* yang diperlukan untuk proses pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian dan pemeriksaan lainnya. *Audit trail* dapat disediakan untuk kegiatan audit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika proses penegakan hukum diperlukan, audit trail yang disediakan hanya yang terkait dengan kasus hukum tersebut.

Sebagai bentuk komitmen terhadap kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi, PT Permodalan Nasional Madani telah melaksanakan penerapan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Penerapan tersebut dilakukan melalui penyusunan dan implementasi *Record of Processing Activities* (ROPA) sebagai pendataan aktivitas pemrosesan data pribadi, pelaksanaan *Data Protection Impact Assessment* (DPIA) terhadap aktivitas pemrosesan data yang berisiko tinggi, penetapan kebijakan dan pedoman Pelindungan Data Pribadi, penguatan tata kelola dan pengendalian pemrosesan data pribadi, serta penerapan prinsip-prinsip Pelindungan Data Pribadi dalam setiap siklus pengelolaan data. Selain itu, PNM juga secara berkelanjutan melakukan upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan internal guna memastikan pelaksanaan Pelindungan Data Pribadi berjalan secara konsisten dan berkesinambungan.

### Dampak Produk/Jasa [OJK F.28] Product/Service Impact [OJK F.28]

Produk dan layanan PNM memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, khususnya bagi pengusaha UMKM. Produk yang ditawarkan Perseroan yaitu Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) dan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) terbukti berkontribusi nyata terhadap pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu, pendampingan usaha yang dilakukan Perseroan membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajemen keuangan para nasabah sehingga mendorong keberlanjutan bisnis mereka. Dengan demikian, produk dan layanan PNM berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan keluarga pengusaha UMKM, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat perekonomian lokal.

of the Board of Directors Number SK-083/PNM-DIR/IX/24 on Personal Data Protection Guidelines.

In line with its commitment to safeguarding personal data, PNM implements a transparent privacy policy and complies with relevant regulations on personal data protection, including Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection. Customers are informed of their rights and the mechanisms available to protect their data, including procedures for filing complaints in the event of a privacy violation. Through these measures, the Company not only safeguards customer confidentiality but also builds trust and loyalty as partners in economic empowerment, particularly for MSME actors.

In terms of personal data audits, PNM maintains the necessary audit trail for monitoring, law enforcement, dispute resolution, verification, testing, and other examinations. Audit trails can be provided for audit activities in accordance with applicable laws. If law enforcement actions are required, only audit trails relevant to the legal case are made available.

As a manifestation of its commitment to compliance with prevailing laws and regulations on Personal Data Protection, PT Permodalan Nasional Madani has implemented Personal Data Protection in accordance with applicable statutory provisions. This implementation has been carried out through the preparation and implementation of Records of Processing Activities (ROPA) to document personal data processing activities, the conduct of Data Protection Impact Assessments (DPIA) for high-risk data processing activities, the establishment of Personal Data Protection policies and guidelines, the strengthening of governance and controls over personal data processing, and the application of Personal Data Protection principles across all stages of the data management lifecycle. In addition, PNM continuously undertakes efforts to enhance internal awareness and compliance to ensure that the implementation of Personal Data Protection is carried out consistently and sustainably.

PNM products and services have a significant impact on communities, particularly MSME actors. The Company's products, namely ULaMM and Mekaar, have been proven to contribute directly to community empowerment and economic growth. Furthermore, business mentoring provided by the Company enhances customers' knowledge and financial management skills, supporting the sustainability of their businesses. As a result, PNM products and services directly contribute to increased household income for MSME actors, which in turn improves community living standards and strengthens local economies.

Lebih dari sekadar penyedia pembiayaan, PNM juga berperan dalam memperluas inklusi sosial dan pemberdayaan perempuan sebagai penggerak ekonomi keluarga. Program edukasi dan pelatihan yang diselenggarakan mendorong nasabah untuk berinovasi serta mengembangkan potensi ekonomi daerahnya. Dalam jangka panjang, upaya ini berkontribusi pada terbentuknya ekosistem usaha yang lebih sehat, pemerataan akses ekonomi, dan penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Beyond providing financing, PNM also plays a role in promoting social inclusion and women's empowerment as drivers of household economic development. Educational programs and training encourage customers to innovate and develop the economic potential of their regions. In the long term, these efforts contribute to the formation of a healthier business ecosystem, more equitable economic access, and a reduction in poverty levels across Indonesia.

### Dampak Penyaluran PNM Mekaar terhadap Ekonomi Makro Impact of PNM Mekaar on the Macro Economy

PNM secara berkala menyelenggarakan penelitian terkait dampak produk dan layanan yang diberikan Perusahaan terhadap pemberdayaan masyarakat (termasuk UMKM). Penelitian tahun 2025 menunjukkan sejumlah hasil yang menarik di antaranya terkait dampak pemberdayaan berdasarkan program yang diberikan PNM sebagaimana tabel berikut:

PNM periodically conducts studies regarding the impact of the products and services provided by the Company on community empowerment (including MSMEs). The 2025 study revealed several noteworthy findings, particularly regarding the empowerment impact generated by PNM programs, as presented in the following table:

Program Program	Deskripsi Description	Indeks (Skala 0-4) Index (0-4)	Penjelasan Explanation
 <b>Mba Maya</b>	Program pemberdayaan nasabah PNM Mekaar melalui pelatihan literasi keuangan, usaha, dan digital untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan daya saing pengusaha ultra mikro. PNM Mekaar Customer Empowerment Program through financial literacy, business, and digital training aimed at enhancing the capacity, independence, and competitiveness of ultra-micro entrepreneurs.	1,93	Materi utama yang disampaikan melalui program Mba Maya adalah Kepemimpinan dan Kemampuan Komunikasi. The main topics covered in Mba Maya's program are Leadership and Communication Skills.
 <b>PKU Akbar</b>	Program pelatihan massal berskala besar bagi nasabah PNM Mekaar untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas usaha Large-Scale Mass Training Program for PNM Mekaar customers designed to improve knowledge, skills, and overall business capacity.	1,89	Penyelenggaraan Program PKU Akbar dilaksanakan di ruangan besar yang menghadirkan narasumber yang kompeten. Pengisi materi yang paling diminati oleh nasabah adalah nasabah Mekaar lainnya yang telah berhasil mengembangkan usahanya. The PKU Akbar Program was conducted in a large venue featuring competent and qualified speakers. The most well-received session among participants was delivered by other Mekaar customers who had successfully developed their businesses.
 <b>Klasterisasi</b>	Program pendampingan nasabah berdasarkan jenis usaha sejenis untuk memperkuat ekosistem bisnis, meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, dan mendorong kemandirian ekonomi. A customer mentoring program tailored to specific business sectors to strengthen the business ecosystem, enhance business capacity, expand markets, and promote economic self-reliance.	1,86	Program klasterisasi mendukung pengembangan usaha pada pemilik usaha yang telah beroperasi sejak lama. Dampak yang dirasakan oleh nasabah lebih optimal dengan dukungan fasilitas untuk produksi. The clustering program supports business development, particularly for entrepreneurs who have been operating for an extended period. Customers reported that the program's impact was more optimal when accompanied by production facility support.



### Produk yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Nasabah [OJK F.27] Products Evaluated for Customer Safety [OJK F.27]

Seluruh produk dan layanan yang ditawarkan PNM telah memenuhi persyaratan regulator dan memperoleh persetujuan resmi sehingga terjamin aman bagi nasabah. Untuk meminimalkan potensi risiko, Perusahaan secara konsisten memberikan informasi mengenai karakteristik produk, termasuk berbagai risiko yang mungkin timbul, secara akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Dalam penyaluran pembiayaan PNM Mekaar misalnya, Perusahaan tidak mensyaratkan agunan fisik, sekaligus mendorong peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan, budaya menabung, dan kompetensi kewirausahaan nasabah. Sementara itu, pembiayaan ULaMM memberikan nilai tambah melalui jaringan layanan yang luas, proses yang profesional, kemudahan pembayaran angsuran, serta dukungan pelatihan dan pendampingan usaha. Seluruh fasilitas pembiayaan (100%) yang disalurkan dipastikan telah mengikuti kebijakan dan prosedur internal yang berlaku sehingga memberikan perlindungan optimal bagi nasabah sekaligus menjaga integritas operasional Perusahaan.

All products and services offered by PNM meet regulatory requirements and have received official approval, ensuring they are safe for customers. To minimize potential risks, the Company consistently provides information regarding product characteristics, including possible risks, in an accurate, honest, clear, and non-misleading manner. In the distribution of PNM Mekaar financing, for example, the Company does not require physical collateral while simultaneously encouraging customers to improve financial management skills, adopt a savings culture, and develop entrepreneurial competence. Meanwhile, ULaMM financing adds value through a wide service network, professional processes, ease of installment payments, and business training and mentoring support. All financing facilities (100%) distributed are ensured to follow applicable internal policies and procedures, providing optimal protection for customers while maintaining the Company's operational integrity.



### Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan [OJK F.26] Innovation and Development of Sustainable Financial Products/Services [OJK F.26]

Inovasi dan pengembangan produk serta layanan merupakan aspek penting bagi PNM dalam menyerap aspirasi dan memenuhi ekspektasi nasabah. Melalui upaya inovatif yang berkelanjutan, Perusahaan mampu menghadirkan produk yang relevan dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya pengusaha UMKM. Pengembangan produk yang didasarkan pada umpan balik nasabah memungkinkan terciptanya solusi keuangan yang lebih inklusif, mudah diakses, dan selaras dengan karakteristik lokal. Berbagai inisiatif digitalisasi juga meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam mengakses pembiayaan maupun layanan pendampingan. Pendekatan ini tidak hanya menjawab kebutuhan masa kini, tetapi juga memperkuat kepercayaan dan loyalitas nasabah, sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Innovation and development of products and services are important aspects for PNM to capture customer aspirations and meet expectations. Through continuous innovative efforts, the Company is able to provide products that are relevant and adaptive to community needs, particularly for MSME actors. Product development based on customer feedback enables the creation of more inclusive, accessible financial solutions aligned with local characteristics. Various digitalization initiatives also enhance efficiency and convenience in accessing financing and mentoring services. This approach not only meets current needs but also strengthens customer trust and loyalty while promoting sustainable economic empowerment.

Per 31 Desember 2025, inovasi dan pengembangan produk/jasa yang dilakukan PNM mencakup hal-hal berikut:

1. *Lentera* (Lokasi dan Potensi Nasabah Pra-Sejahtera) merupakan fitur yang dirancang untuk mendukung aktivitas canvassing AO Mekaar. Fitur ini memberikan informasi yang lebih terarah mengenai potensi calon nasabah yang dapat diprioritaskan untuk bergabung menjadi nasabah Mekaar. Dengan pendekatan berbasis data, diharapkan AO dapat lebih fokus dan efektif menjangkau calon nasabah yang benar-benar berpotensi untuk menjadi nasabah Mekaar.
2. *Newsletter* adalah fitur baru pada aplikasi SIMFONI yang bermanfaat untuk menampilkan data secara singkat seperti pencapaian, realisasi dan target untuk jumlah Pemenuhan AO dan Nasabah, Penyaluran, OSTerendah, indikator NPL dan LAR tertinggi. Data yang ditampilkan pada *Newsletter* tidak hanya *Update* Hari Ini namun juga *Update* pada Minggu Lalu. Terdapat juga *Achievement Ranking* dengan menampilkan TOP 5 Pencapaian OS, NOA, dan *Lending* untuk masing-

As of December 31, 2025, PNM product/service innovation includes the following:

1. *Lentera* (Lokasi dan Potensi Nasabah Pra-Sejahtera) is a feature designed to support Mekaar AO canvassing activities. This feature provides more targeted information regarding potential customers who can be prioritized to join Mekaar. With a data-driven approach, AOs are expected to focus more effectively on prospects with real potential to become Mekaar customers.
2. *Newsletter* is a new feature in the SIMFONI application that displays summarized data such as achievements, realizations, and targets for AO and customer fulfillment, disbursement, lowest OS, NPL indicators, and highest LAR. Data displayed in the *Newsletter* includes both Today's Update and Last Week's Update. There is also an Achievement Ranking showing the TOP 5 OS, NOA, and Lending achievements for each branch, region, area, and



masing kelolaan Cabang, *Region*, Area dan Unit sehingga memudahkan Pemimpin Cabang, MRM, MRPM, KAB, KAP dalam melihat perkembangan update masing-masing area kelolaannya.

3. KEMBANGS (Kelompok Membina dan Mengelola Sampah) merupakan produk yang mendukung perluasan *core business* berbasis keuangan berkelanjutan berupa ekosistem Bank Sampah yang terintegrasi dengan Aplikasi PNM Digi. Kegiatan pengembangan KEMBANGS berfokus pada upaya mengonversi sampah bernilai tinggi (*high value waste*) menjadi tabungan uang bagi anggota kelompok, sekaligus memperkuat inklusi keuangan dan pengembangan yang mencakup koordinasi antar tim internal dan mitra, panduan pelaksanaan kegiatan mulai dari sosialisasi, pelatihan, perancangan dan pembangunan aplikasi *mobile* dan *back office*, penyusunan sistem pelaporan serta transaksi keuangan terintegrasi, hingga pelaksanaan uji coba (*piloting*) di lokasi terpilih dan *roll out* bertahap guna memastikan implementasi berjalan efektif dan berkelanjutan. Model Operasional KEMBANGS dibangun melalui pembentukan kelompok Bank Sampah Unit (BSU) yang beranggotakan nasabah Mekaar dan non-nasabah. Kelompok campuran ini tidak hanya memperluas jangkauan program, tetapi juga membuka peluang akuisisi calon nasabah baru bagi PNM. Setiap BSU dipimpin oleh Ketua BSU yang berasal dari nasabah Mekaar dan bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan serta konsistensi operasional kelompok. Untuk mendukung pertumbuhan ekosistem, KEMBANGS juga menyediakan mekanisme pembentukan Bank Sampah Induk (BSI) sebagai pusat pengolahan skala besar. Mitra yang ingin mengembangkan BSI dan memerlukan tambahan modal dapat difasilitasi melalui pembiayaan ULaMM MT200, sehingga rantai nilai pengelolaan sampah dari tingkat unit hingga skala induk dapat berkembang secara menyeluruh dan berkelanjutan. Seluruh rangkaian tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam PNM Digi, sehingga ekosistem KEMBANGS tidak hanya berfungsi sebagai platform pengelolaan sampah, tetapi juga sebagai kanal baru yang menghubungkan komunitas, aktivitas produktif, dan akses permodalan. Dengan demikian, PNM memperkuat perannya dalam menciptakan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas, terukur, dan berkelanjutan. Piloting KEMBANGS telah dilaksanakan pada tahun 2025 di 3 (tiga) lokasi yaitu Tangerang, Purwokerto dan Depok dengan hasil yang positif, sehingga pada tahun 2026 produk ini akan dilanjutkan untuk tahapan implementasi.

### Produk Ditarik Kembali [OJK F.29] Product Recalls [OJK F.29]

Selama tahun 2025, tidak ada produk/layanan PNM yang ditarik kembali dengan alasan apapun.

unit, allowing Branch Leaders, MRM, MRPM, KAB, and KAP to monitor updates in their respective managed areas.

3. KEMBANGS (Waste Management and Development Group) is a product that supports the expansion of core business based on sustainable finance through an integrated Waste Bank ecosystem linked with PNM Digi. KEMBANGS development activities focus on converting high-value waste into cash savings for group members while strengthening financial inclusion and development, including coordination among internal teams and partners, guidance on activity implementation from outreach, training, mobile and back-office application design and development, reporting systems, integrated financial transactions, to piloting in selected locations and phased rollout to ensure effective and sustainable implementation. The KEMBANGS Operational Model is built through the establishment of Unit Waste Bank Groups (BSU) comprising Mekaar and non-Mekaar customers. Mixed groups not only expand program reach but also open opportunities to acquire new potential customers for PNM. Each BSU is led by a BSU Leader from Mekaar customers who is responsible for managing activities and operational consistency of the group. To support ecosystem growth, KEMBANGS also provides a mechanism for forming Central Waste Banks (BSI) as large-scale processing centers. Partners who want to develop a BSI and require additional capital can be facilitated through ULaMM MT200 financing, allowing the waste management value chain from unit to central scale to develop comprehensively and sustainably. The entire series is then integrated into PNM Digi, so the KEMBANGS ecosystem functions not only as a waste management platform but also as a channel connecting community, productive activities, and capital access. In this way, PNM strengthens its role in creating broader, measurable, and sustainable socio-economic impact. KEMBANGS piloting was conducted in 2025 in three locations, namely Tangerang, Purwokerto, and Depok, with positive results. Therefore, in 2026, this product will be continued into the implementation phase.

In 2025, there were no PNM products/services recalled for any reason.



### Survei Kepuasan Nasabah terhadap Produk dan Jasa [OJK F.30] Customer Satisfaction Survey on Products and Services [OJK F.30]

Survei kepuasan nasabah memegang peran strategis bagi PNM dalam meningkatkan kualitas produk dan layanan. Melalui survei, Perusahaan dapat memahami kebutuhan, harapan, serta pengalaman nasabah, termasuk tantangan yang dihadapi dalam mengakses layanan pembiayaan. Hasil survei ini menjadi dasar untuk merancang strategi peningkatan layanan, mengembangkan produk yang lebih relevan, dan memastikan setiap program memberikan manfaat nyata bagi nasabah. Selain itu, survei membantu PNM memperkuat hubungan dengan nasabah, membangun kepercayaan, dan meningkatkan loyalitas mereka. Untuk memudahkan pengumpulan masukan, PNM menyediakan kanal *e-mail* bagi nasabah dalam menilai kepuasan layanan. Pendekatan ini mendukung peran PNM sebagai mitra strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pengusaha UMKM.

Customer satisfaction surveys play a strategic role for PNM in enhancing the quality of its products and services. Surveys enable the Company to understand customer needs, expectations, and experiences, including challenges encountered in accessing financing services. The survey results serve as a basis for designing service improvement strategies, developing more relevant products, and ensuring that each program delivers tangible benefits to customers. In addition, the survey helps PNM strengthen relationships with customers, build trust, and enhance loyalty. To facilitate feedback collection, PNM provides an e-mail channel for customers to assess service satisfaction. This approach supports PNM role as a strategic partner in community economic empowerment, particularly for MSME actors.

Survei kepuasan dilakukan terhadap nasabah PNM Mekaar dan ULaMM dengan total sebanyak 5.620 responden. Metodologi survei yang digunakan adalah survei tatap muka (*face-to-face interview*) Berdasarkan survei tahun 2025, sebanyak 76,06% nasabah PNM Mekaar menyatakan sangat puas dengan produk dan layanan PNM. Sementara itu, survei kepuasan nasabah ULaMM menunjukkan 84,8% nasabah menyatakan sangat puas.

The customer satisfaction survey was conducted among PNM Mekaar and ULaMM customers, with a total of 5,620 respondents. The survey methodology used was face-to-face interviews. Based on the 2025 survey results, 76.06% of PNM Mekaar customers stated that they were very satisfied with PNM products and services. Meanwhile, the ULaMM customer satisfaction survey indicated that 84.8% of customers expressed a very high level of satisfaction.

**Tabel Survei Kepuasan Nasabah Tahun 2022-2025**  
Table of Customer Satisfaction Survey for 2022-2025

Uraian Description	2025	2024	2023	2022
PNM Mekaar	76,06%	83,22%	83,51%	82,44%
ULaMM	84,8%	86,24%	83,50%	80,89%



### Inisiatif Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan [FS16] Initiatives to Improve Financial Literacy [FS16]

Sebagai bagian dari Holding Ultra Mikro yang dibentuk pemerintah untuk memberdayakan UMKM, PNM berkomitmen meningkatkan literasi keuangan melalui pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan, sejalan dengan prinsip inklusi keuangan. Upaya ini berfungsi sebagai modal sosial dan intelektual yang melengkapi dukungan finansial yang diberikan Perseroan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di seluruh wilayah operasional PNM dan dikoordinasikan oleh Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha (Divisi PKU).

As part of the Ultra-Micro Holding established by the government to empower MSMEs, PNM is committed to improving financial literacy through training, mentoring, and empowerment, in line with the principles of financial inclusion. These efforts serve as social and intellectual capital that complements the financial support provided by the Company. These activities are carried out across all of PNM's operational regions and are coordinated by the Business Capacity Development Division (PKU Division).

Sepanjang tahun 2025, PNM menyelenggarakan program literasi keuangan berupa Membina Memberdaya (Mba Maya), PKU Akbar, PKM Bermakna (PKMB), Portal Digi Nasabah.

Throughout 2025, PNM will implement financial literacy programs including Membina Memberdaya (Mba Maya), PKU Akbar, PKM Bermakna (PKMB), and the Digi Nasabah Portal.



PNM secara rutin mengukur dampak kuantitatif dari setiap program yang dijalankan untuk memastikan efektivitasnya dalam meningkatkan inklusi keuangan. Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Nasabah Mekaar bertujuan untuk mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan nasabah Mekaar di tahun 2025. Studi ini mengacu pada dimensi dan indikator literasi dan inklusi keuangan versi OJK yang digunakan adalah kuantitatif (survei) di 104 region Mekaar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nasabah Mekaar memiliki indeks literasi keuangan sebesar 2,27 (dari skala 1-4) atau 42,33% (dari skala 0-100%). Sementara indeks inklusi keuangan nasabah Mekaar di tahun 2025 rata-rata sebesar 2,04 (dari skala 1-4) atau 34,67% (dari skala 0-100%). Dengan memantau capaian secara objektif, PNM dapat menilai kontribusi program terhadap perluasan akses keuangan, mengidentifikasi area yang perlu diperkuat, dan merancang strategi pemberdayaan yang lebih tepat sasaran bagi seluruh nasabah.

PNM regularly measures the quantitative impact of each program implemented to ensure its effectiveness in promoting financial inclusion. The Mekaar Customer Financial Literacy and Inclusion Index aims to measure the level of financial literacy and financial inclusion of Mekaar customers in 2025. This study refers to the financial literacy and inclusion dimensions and indicators issued by the Financial Services Authority and employs a quantitative (survey-based) approach across 104 Mekaar regions. The results show that, on average, Mekaar customers recorded a financial literacy index of 2.27 (on a scale of 1-4), equivalent to 42.33% (on a scale of 0-100%). Meanwhile, the average financial inclusion index of Mekaar customers in 2025 stood at 2.04 (on a scale of 1-4), or 34.67% (on a scale of 0-100%). Monitoring achievement objectively allow PNM to assess the program's contribution to expanding financial access, identify areas for improvement, and design more targeted empowerment strategies for all customers.

### Bentuk Pelatihan PT Permodalan Nasional Madani Types of Training at PT Permodalan Nasional Madani

Pada tahun 2025, program PNM terbagi menjadi 2 (dua) jenis pelatihan yaitu Pelatihan Dasar dan Pelatihan Lanjutan. Jumlah pelatihan yang telah dilaksanakan hingga akhir Desember 2025 tercatat sebanyak 52.394 dengan jumlah kehadiran peserta (akumulatif) sebanyak 1.853.170.

By 2025, the PNM program will consist of 2 (two) types of training: Basic Training and Advanced Training. As of the end of December 2025, a total of 52,394 training sessions had been conducted, with a cumulative total of 1,853,170 participants.

### Program Klasterisasi Divisi PKU Clustering Program of PKU Division

Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) mendampingi nasabah PNM melalui Program Klasterisasi yaitu pelatihan berseri yang diselenggarakan secara berkelompok. Program ini mengelompokkan nasabah berdasarkan pendekatan tertentu seperti jenis usaha yang sama dalam satu wilayah atau jenis usaha berbeda dalam wilayah yang sama. Berdasarkan pendekatan tersebut, per 31 Desember 2025 telah dilaksanakan sebanyak 514 kegiatan klaster usaha PNM.

The Business Capacity Development Division (PKU) supports PNM clients through the Clustering Program, a series of training sessions conducted in groups. This program groups clients based on specific criteria, such as businesses of the same type within a single region or different types of businesses within the same region. Based on this approach, as of December 31, 2025, a total of 514 PNM business cluster activities had been conducted.

### Program Pemberdayaan PT Permodalan Nasional Madani PT Permodalan Nasional Madani Empowerment Program

Selain program rutin dan klasterisasi, Divisi PKU melakukan kegiatan pemberdayaan lainnya kepada nasabah PNM di antaranya PKM Bermakna (PKMB), Digitalisasi Ketua Kelompok, Webinar, Pameran, Produk Nasabah Unggulan, Portal Digi Nasabah, Kampung Madani, dan Mekaarpreneur.

In addition to regular programs and clustering initiatives, the PKU Division conducts other empowerment activities for PNM clients, including PKM Bermakna (PKMB), Group Leader Digitalization, Webinars, Exhibitions, Featured Client Products, the Digi Nasabah Portal, Kampung Madani, and Mekaarpreneur.





# Daftar Pengungkapan Sesuai POJK 51/POJK.03/2017 [OJK G.4]

Disclosure Index in Accordance with POJK 51/POJK.03/2017 [OJK G.4]



No. Indeks Index	Nama Indeks Index Name	Halaman Page
<b>Strategi Keberlanjutan</b> Sustainability Strategy		
A.1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan Sustainability Strategy Explanation	6
<b>Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan</b> Sustainability Aspect Performance Highlights		
B.1	Aspek Ekonomi Economic Aspect	34
B.2	Aspek Lingkungan Hidup Environmental Aspect	35
B.3	Aspek Sosial Social Aspect	36
<b>Profil Perusahaan</b> Company Profile		
C.1	Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan Sustainability Vision, Mission and Values	72
C.2	Alamat Perusahaan Company Address	67
C.3	Skala Usaha Business Scale	84, 85, 98
C.4	Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan Products, Services and Business Activities Carried Out	100
C.5	Keanggotaan pada Asosiasi Association Membership	103
C.6	Perubahan Emiten dan Perusahaan Publik yang Bersifat Signifikan Significant Changes in the Issuer and Public Company	104
<b>Penjelasan Direksi</b> Statement from the Board of Directors		
D.1	Penjelasan Direksi Statement from the Board of Directors	40
<b>Tata Kelola Keberlanjutan</b> Sustainability Governance		
E.1	Penanggung Jawab Penerapan Keuangan berkelanjutan Person in Charge of Sustainable Finance Implementation	125
E.2	Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan Competency Development Related to Sustainable Finance	156
E.3	Penilaian Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan Risk Assessment on Sustainable Finance Implementation	137
E.4	Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Stakeholder Engagement	164
E.5	Permasalahan terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan Problems Related to Sustainable Finance Implementation	168
<b>Kinerja Keberlanjutan</b> Sustainability Performance		
F.1	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan Building Sustainability Culture	172
<b>Kinerja Ekonomi</b> Economic Aspect		
F.2	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi Comparison of Targets and Performance in Production, Portfolio, Financing or Investment Targets, Revenue, and Profit and Loss	182



No. Indeks Index	Nama Indeks Index Name	Halaman Page
F.3	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi Pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Penerapan Keuangan Berkelanjutan Comparison of Portfolio Targets and Performance, Financing or Investment Targets in Financial Instruments or Projects Aligned with Sustainable Finance Implementation	183
<b>Kinerja Lingkungan Hidup</b> Environmental Aspect		
<b>Aspek Umum</b> General Aspect		
F.4	Biaya Lingkungan Hidup Environmental Cost	212
<b>Aspek Material</b> Material Aspect		
F.5	Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan Use of Environmentally-Friendly Materials	199
<b>Aspek Energi</b> Energy Aspect		
F.6	Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan Amount and Intensity of Energy Consumption	201
F.7	Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan Initiatives and Achievements in Energy Efficiency and Use of Renewable Energy	201
<b>Aspek Air</b> Water Aspect		
F.8	Penggunaan Air Water Usage	209
<b>Aspek Keanekaragaman Hayati</b> Biodiversity Aspect		
F.9	Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati Impact of Operational Areas that are Near or Located in Conservation Areas or Have Biodiversity	211
F.10	Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati Biodiversity Conservation Initiatives	212
<b>Aspek Emisi</b> Emission Aspect		
F.11	Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya Amount and Intensity of Emissions by Type	204, 205
F.12	Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan Efforts and Achievements in Emission Reduction	201
<b>Aspek Limbah Dan Effluen</b> Waste and Effluent Aspects		
F.13	Jumlah Limbah dan Effluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis Amount of Waste and Effluent by Type	210
F.14	Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Effluen Waste and Effluent Management Mechanisms	210
F.15	Tumpahan yang Terjadi (Jika Ada) Spills (If Any)	210, 211
<b>Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup</b> Environmental-Related Complaint Aspect		
F.16	Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan Number and Nature of Environmental Complaints Received and Resolved	212
<b>Kinerja Sosial</b> Social Aspect		
F.17	Komitmen LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik untuk Memberikan Layanan Atas Produk dan/atau Jasa yang Setara Kepada Konsumen Commitment of the LJK, Issuer, or Public Company to Provide Equal Services for Products and/or Services to Consumers	254



No. Indeks Index	Nama Indeks Index Name	Halaman Page
<b>Aspek Ketenagakerjaan</b> Employment Aspect		
F.18	Kesetaraan Kesempatan Bekerja Equal Employment Opportunities	227
F.19	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa Child Labor and Forced Labor	229
F.20	Upah Minimum Regional Regional Minimum Wage	224, 225
F.21	Lingkungan Bekerja yang Layak Dan Aman Decent and Safe Working Environment	235
F.22	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai Employee Training and Competency Development	230, 233
<b>Aspek Masyarakat</b> Community Aspect		
F.23	Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar Operational Impact on the Surrounding Community	239
F.24	Pengaduan Masyarakat Community Complaint	245
F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Corporate Social Responsibility (CSR)	246
<b>Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan</b> Responsibility for Sustainable Product/Service Development		
F.26	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan Innovation and Development of Sustainable Financial Products/Services	257
F.27	Produk/Jasa Yang Sudah Dievaluasi Keamanannya Bagi Pelanggan Products/Services That Have Been Evaluated for Customer Safety	257
F.28	Dampak Produk/Jasa Impact of Products/Services	255
F.29	Jumlah Produk yang Ditarik Kembali Number of Product Recalls	258
F.30	Survei Kepuasan Pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan Customer Satisfaction Survey on Sustainable Financial Products and/or Services	259
<b>Lain-lain</b> Others		
G.1	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (jika Ada) Written Verification from Independent Party (if Any)	280
G.2	Lembar Umpan Balik Feedback Form	281
G.3	Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya Response to Feedback on the Previous Year's Sustainability Report	283
G.4	Daftar Pengungkapan Sesuai POJK 51/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik Disclosure Index in Accordance with POJK 51/2017 on Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies	262



# Indeks Konten GRI Standard 2021

## GRI Standard Content Index 2021

Standard GRI GRI Standards	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page	Pengecualian Exception		
			Persyaratan yang Dikecualikan Excluded Requirements	Alasan Reason	Penjelasan Description
GRI Pengungkapan Umum 2021 GRI General Disclosure 2021	2-1	Detail Organisasi Organizational Details	66, 67, 98		
	2-2	Entitas yang tercakup dalam pelaporan keberlanjutan organisasi Entities included in the organization's sustainability reporting	56		
	2-3	Periode pelaporan, frekuensi dan titik kontak Reporting period, frequency and contact point	55, 56, 63		
	2-4	Pernyataan ulang informasi Restatement of information	62		
	2-5	Penjaminan eksternal External assurance	62		
	2-6	Kegiatan, rantai nilai, dan hubungan bisnis lainnya Activities, value chain and other business relationships	66, 84, 98, 100, 103, 104		
	2-7	Karyawan Employee	84,85		
	2-8	Pekerja yang Bukan Pekerja Langsung Workers who are not employees	85		
	2-9	Struktur dan komposisi tata kelola Governance structure and composition	82,124		
	2-10	Nominasi dan seleksi untuk badan tata kelola tertinggi Nomination and selection of the highest governance body	Laporan Tahunan PNM 2025, Bab GCG, Hal. 454		
	2-11	Pejabat tata kelola tertinggi Chair of the highest governance body	129, 130		
	2-12	Peran pejabat tata kelola tertinggi dalam memantau dampak manajemen Role of the highest governance body in overseeing the management of impacts	141		
	2-13	Pendelegasian tanggung jawab untuk mengelola dampak Delegation of responsibility for managing impacts	125		
	2-14	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan Role of the highest governance body in sustainability reporting	132		
	2-15	Konflik kepentingan Conflict of interest	Laporan Tahunan PNM 2025, Bab GCG, Hal. 424		
	2-16	Komunikasi keprihatinan kritis Communication of critical concerns	133		

Standard GRI GRI Standards	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page	Pengecualian Exception		
			Persyaratan yang Dikecualikan Excluded Requirements	Alasan Reason	Penjelasan Description
2-17	Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi Collective knowledge of the highest governance body	156			
2-18	Evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi Evaluation of the performance of the highest governance body	Laporan Tahunan PNM 2025, Bab GCG, Hal. 431			
2-19	Kebijakan Remunerasi Remuneration Policies	Laporan Tahunan PNM 2025, Bab GCG, Hal. 458			
2-20	Proses penentuan remunerasi Process to determine remuneration	Laporan Tahunan PNM 2025, Bab GCG, Hal. 458			
2-21	Rasio kompensasi total tahunan Annual total compensation ratio	135			
2-22	Pernyataan tentang strategi pembangunan berkelanjutan Statement on sustainable development strategy	40			
2-23	Komitmen kebijakan Policy commitments	105, 133, 137			
2-24	Komitmen dalam menamakan kebijakan Commitment to implementing policies	133, 146			
2-25	Proses untuk memulihkan dampak negatif Processes to remediate negative impacts	135			
2-26	Mekanisme untuk mencari nasihat dan menyampaikan kekhawatiran Mechanisms for seeking advice and raising concerns	133, 135			
2-27	Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan Compliance with laws and regulations	212			
2-28	Keanggotaan asosiasi Membership associations	103			
2-29	Pendekatan terhadap keterlibatan pemangku kepentingan Approach to stakeholder engagement	164			
2-30	Perjanjian perundingan kolektif Collective bargaining agreements	165			



Topik Material Material Topics	Pengungkapan Disclosure	Halaman page	Pengecualian Exception		
			Persyaratan Yang Dikecualikan Excluded Requirements	Alasan Reason	Penjelasan Description
GRI 3: Topik Material 2021 GRI 3: Material Topics 2021	3-1	Proses untuk menentukan topik material Process to determine material topics	57		
	3-2	Daftar topik material List of material topics	58		
<b>PENGUNGKAPAN STANDAR KHUSUS</b> PARTICULAR STANDARD DISCLOSURES					
<b>TOPIK EKONOMI</b> ECONOMIC TOPIC					
<b>KINERJA EKONOMI</b> ECONOMIC PERFORMANCE					
GRI 3: Topik Material 2021 Material Topic 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics	180, 181, 187, 197		
GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016 Economic Performance 2016	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan Direct economic value generated and distributed	184		
	201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim Financial implications and other risks and opportunities arising from climate change	198		
	201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya Obligations related to defined benefit pension plans and other pension programs	187		
	201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah Financial implications and other risks and opportunities arising from climate change	187		
<b>DAMPAK EKONOMI TIDAK LANGSUNG</b> INDIRECT ECONOMIC IMPACT					
GRI 3: Topik Material 2021 Material Topic 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics	246		
GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung Indirect Economic Impact	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan Infrastructure investment and services supported	246, 247, 249		
	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan Significant indirect economic impacts	246, 247, 249		
<b>ANTIKORUPSI</b> ANTI-CORRUPTION					
GRI 3: Topik Material 2021 Material Topic 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics	160		

Topik Material Material Topics	Pengungkapan Disclosure	Halaman page	Pengecualian Exception		
			Persyaratan Yang Dikecualikan Excluded Requirements	Alasan Reason	Penjelasan Description
GRI 205: Antikorupsi 2016 Anti-Corruption 2016	205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi Operations assessed for corruption-related risks	161		
	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi Communication and training on anti-corruption policies and procedures	161		
	205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil Confirmed incidents of corruption and actions taken	161		
<b>TOPIK LINGKUNGAN</b> ENVIRONMENTAL TOPIC					
<b>ENERGI</b> ENERGY					
GRI 3: Topik Material 2021 Material Topic 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics	195, 200		
GRI 302: Energi 2016 Energy 2016	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi Energy consumption within the organization	201		
	302-2	Konsumsi energi di luar organisasi Energy consumption outside the organization	202		
	302-3	Intensitas energi Energy intensity	202		
	302-4	Pengurangan konsumsi energi Energy consumption reduction	201		
	302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa Reduction in energy required for products and services	201		
<b>AIR DAN EFLUEN</b> WATER AND EFFLUENT					
GRI 3: Topik Material 2021 Material Topic 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics	195, 208		
GRI 303: Air dan Effluen 2018 Water and Effluent 2018	303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama Interactions with water as a shared resource	208		
	303-2	Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air Impact management related to water discharge	209		
	303-3	Pengambilan air Water withdrawal	209		
	303-4	Pembuangan air Water disposal	209		
	303-5	Konsumsi air Water consumption	209		
<b>EMISI</b> EMISSIONS					
GRI 3: Topik Material 2021 Material Topic 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics	195, 203		



Topik Material Material Topics	Pengungkapan Disclosure	Halaman page	Pengecualian Exception		
			Persyaratan Yang Dikecualikan Excluded Requirements	Alasan Reason	Penjelasan Description
GRI 305: Emisi 2016 Emissions 2016	305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung Direct GHG emissions (Scope 1)	204		
	305-2	Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidaklangsung Indirect GHG emissions (Scope 2)	204, 205		
	305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya Other indirect GHG emissions (Scope 3)	205		
	305-4	Intensitas emisi GRK GHG emission intensity	207		
	305-5	Pengurangan emisi GRK Reduction of GHG emissions	201		
	305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS) Ozone depleting substances (ODS) emissions	207		
	305-7	Nitrogen Oksida (NOX), sulfur oksida (SOX), dan emisi udara signifikan lainnya Nitrogen Oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air emissions	207		
<b>TOPIK SOSIAL</b> SOCIAL TOPIC					
<b>KEPEGAWAIAN</b> EMPLOYMENT					
GRI 3: Topik Material 2021 Material Topic 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics	217, 219, 223		
GRI 401: Kepegawaian 2016 Employment 2016	401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan New employee hires and employee turnover	219, 221, 222		
	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees	222		
	401-3	Cuti melahirkan Maternity leave	223		
<b>KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA</b> OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY					
GRI 3: Topik Material 2021 Material Topic 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics	217, 235		



Topik Material Material Topics	Pengungkapan Disclosure	Halaman page	Pengecualian Exception		
			Persyaratan Yang Dikecualikan Excluded Requirements	Alasan Reason	Penjelasan Description
GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018 Occupational Health and Safety 2018	403-1	Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Occupational health and safety management system	235		
	403-2	Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden Hazard identification, risk assessment and incident investigation	235		
	403-3	Layanan kesehatan kerja Occupational health services	235, 238		
	403-4	Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja Participation, consultation and communication of workers regarding occupational safety and health	236		
	403-5	Pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja Training for workers on occupational safety and health	236		
	403-6	Peningkatan kualitas kesehatan pekerja Improving the quality of workers' health	238		
	403-7	Pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis Prevention and mitigation of the impacts of occupational safety and health that are directly related to business relationships	235, 237		
	403-8	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja Workers covered by the occupational health and safety management system	235		
	403-9	Kecelakaan kerja Work-related injuries	238		
	403-10	Penyakit akibat kerja Occupational disease	238		
<b>PELATIHAN DAN PENDIDIKAN</b> TRAINING AND EDUCATION					
GRI 3: Topik Material 2021 Material Topic 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics	217, 230		
GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016 Training and Education 2016	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan Average hours of training per year per employee	231		
	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs	232, 233		
	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier Percentage of employees who receive regular reviews of performance and career development	233		



Topik Material Material Topics	Pengungkapan Disclosure	Halaman page	Pengecualian Exception		
			Persyaratan Yang Dikecualikan Excluded Requirements	Alasan Reason	Penjelasan Description
<b>NON DISKRIMINASI</b> NON-DISCRIMINATION					
GRI 3: Topik Material 2021 Material Topic 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics	217, 227		
GRI 406: Non Diskriminasi 2016 Non- Discrimination 2016	406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan Cases of discrimination and measures taken to address them	228		
<b>MASYARAKAT LOKAL</b> LOCAL COMMUNITY					
GRI 3: Topik Material 2021 Material Topic 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics	217, 239		
GRI 413: Masyarakat Lokal 2016 Local Community 2016	413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan Operations involving local community participation, impact assessments, and community development initiatives	239		
	413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal Operations with actual or potential significant adverse impacts on local communities	240		
GRI G4: Pengungkapan Sektor Jasa Keuangan 2008 GRI G4: Financial Services Sector Disclosures 2008	FS7	Nilai portofolio produk dan jasa yang dirancang untuk mendukung kegiatan sosial dibagi menurut segmen bisnis Monetary value of products and services designed to deliver specific social benefits, by business segment			
	FS9	Nilai portofolio produk dan jasa yang dirancang untuk mendukung kegiatan sosial dibagi menurut segmen bisnis Monetary value of products and services designed to deliver specific social benefits, by business segment			
	FS13	Akses layanan di wilayah rendah populasi dan ekonomi Access points in low-populated or economically disadvantaged areas			
	FS14	Inisiatif untuk meningkatkan akses layanan keuangan bagi kalangan dengan keadaan khusus (disabilitas, hambatan bahasa/budaya dan lain-lain) Initiatives to improve access to financial services for disadvantaged people (e.g., people with disabilities, language barriers, etc.)			
	FS15	Kebijakan untuk produk dan layanan keuangan yang adil Policies for the fair design and sale of financial products and services			
	FS16	Inisiatif meningkatkan literasi keuangan menurut jenis penerima Initiatives to enhance financial literacy by type of beneficiary			



## Tautan GRI Standar dengan Sustainable Development Goals (SDGs)

### Linkage of GRI Standards with Sustainable Development Goals (SDGs)

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) berkomitmen untuk berkontribusi dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia. Kontribusi disampaikan melalui tautan antara program/kegiatan dalam Laporan Keberlanjutan, GRI *Standard* dan SDGs, sesuai panduan SDG Compass yang diterbitkan oleh GRI, *United Nations Global Compact*, dan *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), sebagaimana tabel di bawah ini:

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) is committed to contributing to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. This contribution is presented through the linkage between programs/activities disclosed in the Sustainability Report, GRI Standards, and the SDGs, in accordance with the SDG Compass guidelines issued by the Global Reporting Initiative (GRI), the United Nations Global Compact, and the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), as presented in the table below.

Logo	Tujuan SDG Goal	Bahasan dalam Laporan Scope of Disclosure	Kesesuaian dengan GRI Standar Alignment with GRI Standards	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page
	<p><b>1 TANPA KEMISKINAN</b></p> <p>Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun End poverty in all its forms everywhere</p>	Penyediaan lapangan kerja, pendapatan, upah dan tunjangan Provision of employment, income, wages, and benefits	GRI 201: Kinerja Ekonomi GRI 201: Economic Performance	201-1 Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan 201-3 Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya 201-1 Direct economic value generated and distributed 201-3 Defined benefit plan obligations and other	184  187
			GRI 401: Kepegawaian GRI 401: Employment	401-1 Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan 401-2 Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu 401-1 New employee hires and employee turnover 401-2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees	219, 221, 222  222
			GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung GRI 203: Indirect Economic Impacts	203-2 Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan 203-2 Significant indirect economic impacts	246, 247, 249
		GRI 413: Masyarakat Lokal GRI 413: Local Communities	413-1 Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan 413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs	239	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Program TJSL Pilar Sosial: Rumah Pangan PNM</li> <li>Program TJSL Pilar Ekonomi: Difabel Bisa Berusaha, Pemberdayaan Kampung Madani, Madani Go Entrepreneur, Madani Vokasi Academy, Madani Movement</li> <li>TJSL Social Pillar Program: PNM Food House</li> <li>TJSL Economic Pillar Program: Difabel Bisa Berusaha, Kampung Madani Empowerment, Madani Go Entrepreneur, etc.</li> </ul>			

Logo	Tujuan SDG Goal	Bahasan dalam Laporan Scope of Disclosure	Kesesuaian dengan GRI Standar Alignment with GRI Standards	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page	
 <p><b>2</b> TANPA KELAPARAN</p>	<p>Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan</p> <p>End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture</p>	<p>Penyediaan lapangan kerja, pendapatan, upah dan tunjangan</p> <p>Provision of employment, income, wages, and benefits</p>	<p>GRI 201: Kinerja Ekonomi GRI 201: Economic Performance</p>	<p>201-1 Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan</p>	184	
				<p>201-3 Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya</p> <p>201-1 Direct economic value generated and distributed 201-3 Defined benefit plan obligations and other retirement plans</p>	187	
			<p>GRI 401: Kepegawaian GRI 401: Employment</p>	<p>401-1 Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan</p>	219, 221, 222	
				<p>401-2 Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu</p> <p>401-1 New employee hires and employee turnover 401-2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees</p>	222	
			<p>GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung GRI 203: Indirect Economic Impacts</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program TJSL Pilar Sosial: Bantuan Bencana Alam dan Kemanusiaan, PN Humanity</li> <li>Program TJSL Pilar Ekonomi: Difabel Bisa Berusaha, Pemberdayaan Kampung Madani, Madani Go Entrepreneur, Madani Vokasi Academy, Madani Movement</li> <li>TJSL Social Pillar Program: Disaster and Humanitarian Assistance (PNM Humanity)</li> <li>TJSL Economic Pillar Program: Difabel Bisa Berusaha, Kampung Madani Empowerment, Madani Go Entrepreneur, Madani Vocational Academy, Madani Movement</li> </ul>	<p>203-2 Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan</p> <p>203-2 Significant indirect economic impacts</p>	246, 247, 249
					<p>413-1 Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan</p> <p>413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs</p>	239
	<p>GRI 413: Masyarakat Lokal GRI 413: Local Communities</p>					





Logo	Tujuan SDG Goal	Bahasan dalam Laporan Scope of Disclosure	Kesesuaian dengan GRI Standar Alignment with GRI Standards	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page
 <p><b>3</b> KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA</p>	<p>Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan sehat sesuai prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja</li> <li>• Program TJSL Pilar Sosial: Madani Care Stunting</li> <li>• Commitment to creating a safe and healthy working environment in accordance with Occupational Health and Safety (OHS) principles</li> <li>• - TJSL Social Pillar Program: Madani Care Stunting</li> </ul>	<p>GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja GRI 403: Occupational Health and Safety</p>	<p>403-1 Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja 403-2 Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden 403-3 Layanan kesehatan kerja 403-4 Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja 403-5 Pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja 403-6 Peningkatan kualitas kesehatan pekerja 403-7 Pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis 403-8 Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja 403-9 Kecelakaan kerja 403-10 Penyakit akibat kerja 403-1 Occupational health and safety management system 403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident investigation 403-3 Occupational health services 403-4 Worker participation, consultation, and communication on occupational health and safety 403-5 Worker training on occupational health and safety 403-6 Promotion of worker health 403-7 Prevention and mitigation of occupational health and safety impacts directly linked by business relationships 403-8 Workers covered by an occupational health and safety management system 403-9 Work-related injuries 403-10 Work-related ill health</p>	<p>235 235 235, 238 236 236 238 235, 237 235 238 238</p>



Logo	Tujuan SDG Goal	Bahasan dalam Laporan Scope of Disclosure	Kesesuaian dengan GRI Standar Alignment with GRI Standards	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page
<p><b>4</b> PENDIDIKAN BERKUALITAS</p>	<p>Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua</p> <p>Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all</p>	<p>Peningkatan kompetensi tanpa membedakan jenis kelamin dan latar belakang pegawai</p> <p>Competency development without discrimination based on gender and employee background</p>	<p>GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan</p> <p>GRI 404: Training and Education</p>	<p>404-1 Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan</p> <p>404-2 Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan</p> <p>404-3 Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier</p> <p>404-1 Average hours of training per year per employee</p> <p>404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs</p> <p>404-3 Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews</p>	<p>231</p> <p>232, 233</p> <p>233</p>
		<p>Program TJSL Pilar Sosial: Madani Entrepreneurship Academy, Ruang Pintar PNM, Belajar Seasik Bermain, PNM Scholarship, dan Madani Upskilling Academy, Madani Vokasi Academy</p> <p>TJSL Social Pillar Program: Madani Entrepreneurship Academy, Ruang Pintar PNM, Belajar Asyik Bermain, PNM Scholarship, and Madani Upskilling Academy/Madani Vocational Academy</p>	<p>GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung</p> <p>GRI 203: Indirect Economic Impacts</p>	<p>203-2 Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan</p> <p>203-2 Significant indirect economic impacts</p>	<p>246, 247, 249</p>
<p><b>5</b> KESETARAAN GENDER</p>	<p>Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan</p> <p>Achieve gender equality and empower all women</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberdayaan perempuan melalui PNM Mekaar, Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) dan PKU Akbar, Mekaarpreneur/Inkubasi Nasabah Naik Kelas</li> <li>Program TJSL Pilar Ekonomi: Difabel Bisa Berusaha, Pemberdayaan Kampung Madani, Madani Go Entrepreneur</li> <li>Women empowerment through PNM Mekaar, business capacity development programs (PKU and PKU Akbar), and Mekaarpreneur/customer incubation programs for business upgrading</li> </ul>	<p>GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung</p> <p>GRI 203: Indirect Economic Impacts</p>	<p>203-2 Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan</p> <p>203-2 Significant indirect economic impacts</p>	<p>246, 247, 249</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>TJSL Economic Pillar Programs: Difabel Bisa Berusaha, Kampung Madani Empowerment, and Madani Go Entrepreneur</li> </ul>	<p>GRI 413: Masyarakat Lokal</p> <p>GRI 413: Local Communities</p>	<p>413-1 Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan</p> <p>413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs</p>	<p>239</p>
			<p>GRI 406: Non Diskriminasi</p> <p>GRI 406: Non-Discrimination</p>	<p>406-1: Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan</p> <p>406-1 Incidents of discrimination and corrective actions taken</p>	<p>228</p>

Logo	Tujuan SDG Goal	Bahasan dalam Laporan Scope of Disclosure	Kesesuaian dengan GRI Standar Alignment with GRI Standards	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page
	<p>Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua</p> <p>Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all</p>	<p>Pengelolaan air dan air limbah secara bertanggung jawab</p> <p>Responsible water and wastewater management</p>	<p>GRI 303: Air dan Efluen GRI 303: Water and Effluents</p>	<p>303-1 Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama</p> <p>303-2 Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air</p> <p>303-3 Pengambilan air</p> <p>303-4 Pembuangan air</p> <p>303-5 Konsumsi air</p> <p>303-1 Interactions with water as a shared resource</p> <p>303-2 Management of water discharge-related impacts</p> <p>303-3 Water withdrawal</p> <p>303-4 Water discharge</p> <p>303-5 Water consumption</p>	<p>208</p> <p>209</p> <p>209</p> <p>209</p> <p>209</p>
		<p>Program TJSL Pilar Lingkungan: Sanitasi <i>SMART</i></p> <p>TJSL Environmental Pillar Program: <i>SMART</i> Sanitation</p>	<p>GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung GRI 203: Indirect Economic Impacts</p>	<p>203-1 Investasi infrastruktur dan dukungan layanan</p> <p>203-1 Infrastructure investments and services supported</p>	<p>246, 247, 249</p>
	<p>Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua</p> <p>Ensure access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all</p>	<p>Pengelolaan energi secara bijaksana, termasuk efisiensi yang dilakukan</p> <p>Efficient and responsible energy management practices</p>	<p>GRI 302: Energi GRI 302: Energy</p>	<p>302-1 Konsumsi energi dalam organisasi</p> <p>302-4 Pengurangan konsumsi energi</p> <p>302-1 Energy consumption within the organization</p> <p>302-4 Reduction of energy consumption</p>	<p>201</p> <p>201</p>
		<p>Program TJSL Pilar Ekonomi: Difabel Bisa Berusaha, Pemberdayaan Kampung Madani, Madani Go Entrepreneur, Madani Vokasi Academy</p> <p>TJSL Economic Pillar Programs: Difabel Bisa Berusaha, Kampung Madani Empowerment, Madani Go Entrepreneur, Madani Vocational Academy</p>	<p>GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung GRI 203: Indirect Economic Impacts</p>	<p>203-2 Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan</p> <p>203-2 Significant indirect economic impacts</p>	<p>246, 247, 249</p>
	<p>Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua</p> <p>Promote sustained, inclusive, and sustainable economic growth, full and productive employment, and decent work for all</p>	<p>Penyediaan lapangan kerja beserta hak-hak normatif bagi pekerja</p> <p>Provision of employment and protection of workers' normative rights</p>	<p>GRI 401: Kepegawaian GRI 401: Employment</p>	<p>401-1 Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan</p> <p>401-2 Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu</p> <p>401-1 New employee hires and employee turnover</p> <p>401-2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees</p>	<p>219, 221, 222</p> <p>222</p>
		<p>Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan</p> <p>413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs</p>	<p>GRI 413: Masyarakat Lokal GRI 413: Local Communities</p>	<p>239</p>	



Logo	Tujuan SDG Goal	Bahasan dalam Laporan Scope of Disclosure	Kesesuaian dengan GRI Standar Alignment with GRI Standards	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page
	<p>Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi</p> <p>Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization, and foster innovation</p>	<p>Pembangunan sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana infrastruktur, sarana kesehatan</p> <p>Development of educational facilities, places of worship, infrastructure, and healthcare facilities</p>	<p>GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung GRI 203: Indirect Economic Impacts</p>	<p>203-1 Investasi infrastruktur dan dukungan layanan 203-1 Infrastructure investments and services supported</p>	<p>246, 247, 249</p>
			<p>GRI 413: Masyarakat Lokal GRI 413: Local Communities</p>	<p>413-1 Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan 413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs</p>	<p>239</p>
	<p>Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara</p> <p>Reduce inequality within and among countries</p>	<p>Penyediaan lapangan kerja, pendapatan, upah dan tunjangan</p> <p>Provision of employment, income, wages, and benefits</p>	<p>GRI 201: Kinerja Ekonomi GRI 201: Economic Performance</p>	<p>201-1 Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan 201-3 Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya 201-1 Direct economic value generated and distributed 201-3 Defined benefit plan obligations and other retirement plans</p>	<p>184</p> <p>187</p>
			<p>GRI 401: Kepegawaian GRI 401: Employment</p>	<p>401-1 Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan 401-2 Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu 401-1 New employee hires and employee turnover 401-2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees</p>	<p>219, 221, 222</p> <p>222</p>
			<p>GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung GRI 203: Indirect Economic Impacts</p>	<p>203-2 Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan 203-2 Significant indirect economic impacts</p>	<p>246, 247, 249</p>
			<p>GRI 413: Masyarakat Lokal GRI 413: Local Communities</p>	<p>413-1 Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan 413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs</p>	<p>239</p>



Logo	Tujuan SDG Goal	Bahasan dalam Laporan Scope of Disclosure	Kesesuaian dengan GRI Standar Alignment with GRI Standards	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page
	<p><b>Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan</b> Ensure sustainable consumption and production patterns</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program TJSL Pilar Ekonomi: Difabel Bisa Berusaha, Pemberdayaan Kampung Madani, Madani Go Entrepreneur, Madani Vokasi Academy, Madani Movement</li> <li>Program TJSL Pilar Lingkungan/Ekonomi: Budidaya Magot</li> <li>TJSL Economic Pillar Programs: Difabel Bisa Berusaha, Kampung Madani Empowerment, Madani Go Entrepreneur, Madani Vocational Academy, and Madani Movement</li> <li>- TJSL Environmental/Economic Pillar Program: Maggot Cultivation</li> </ul>	<p>GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung GRI 203: Indirect Economic Impacts</p>	<p>203-2 Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan 203-2 Significant indirect economic impacts</p>	<p>246, 247, 249</p>
	<p><b>Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya</b> Take urgent action to combat climate change and its impacts</p>	<p>Pengurangan emisi sebagai penyebab pemanasan global dan perubahan iklim Emission reduction initiatives to address global warming and climate change</p>	<p>GRI 305: Emisi GRI 305: Emissions</p>	<p>305-1 Emisi GRK (Cakupan 1) langsung 305-2 Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung 305-3 Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya 305-4 Intensitas emisi GRK 305-5 Pengurangan emisi GRK 305-6 Emisi zat perusak ozon (ODS) 305-7 Nitrogen Oksida (NOX), sulfur oksida (SOX), dan emisi udara signifikan lainnya 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions 305-4 GHG emissions intensity 305-5 Reduction of GHG emissions 305-6 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) 305-7 Nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides (SOx), and other significant air emissions</p>	<p>204 204, 205 205 207 201 207 207</p>
		<p>Program TJSL Pilar Lingkungan: PNM Hijaukan Indonesia TJSL Environmental Pillar Program: PNM Hijaukan Indonesia</p>	<p>GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung GRI 203: Indirect Economic Impacts</p>	<p>203-2 Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan 203-2 Significant indirect economic impacts</p>	<p>246, 247, 249</p>
	<p><b>Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan</b> Conserve and sustainably use the oceans, seas, and marine resources for sustainable development</p>	<p>Program TJSL Pilar Lingkungan: PNM Peduli Terumbu Karang TJSL Environmental Pillar Program: PNM Cares for Coral Reefs</p>	<p>GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung GRI 203: Indirect Economic Impacts</p>	<p>203-2 Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan 203-2 Significant indirect economic impacts</p>	<p>246, 247, 249</p>



Logo	Tujuan SDG Goal	Bahasan dalam Laporan Scope of Disclosure	Kesesuaian dengan GRI Standar Alignment with GRI Standards	Pengungkapan Disclosure	Halaman Page
	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati Protect, restore, and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, halt and reverse land degradation, and halt biodiversity loss	Program TJSL Pilar Lingkungan: PNM Hijaukan Indonesia, EcoLife PNM TJSL Environmental Pillar Programs: PNM Hijaukan Indonesia and EcoLife PNM	GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung GRI 203: Indirect Economic Impacts	203-2 Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan 203-2 Significant indirect economic impacts	246, 247, 249
		Pengurangan emisi sebagai penyebab pemanasan global dan perubahan iklim Emission reduction initiatives to address global warming and climate change	GRI 305: Emisi GRI 305: Emissions	305-1 Emisi GRK (Cakupan 1) langsung 305-2 Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung 305-3 Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya 305-4 Intensitas emisi GRK 305-5 Pengurangan emisi GRK 305-6 Emisi zat perusak ozon (ODS) 305-7 Nitrogen Oksida (NOX), sulfur oksida (SOX), dan emisi udara signifikan lainnya 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions 305-4 GHG emissions intensity 305-5 Reduction of GHG emissions 305-6 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) 305-7 Nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides (SOx), and other significant air emissions	204 204, 205 205 207 201 207 207
	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all, and build effective, accountable, and inclusive institutions at all levels	Menjalankan usaha secara bersih dan transparan Conducting business in a clean and transparent manner	GRI 205: Antikorupsi GRI 205: Anti-Corruption	205-1 Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi	161
				205-2 Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi	161
				205-3 Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil	161



## Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen [OJK G.1]

### Written Verification from Independent Party [OJK G.1]

Saat ini, Laporan Keberlanjutan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Tahun 2025 masih menunggu hasil verifikasi oleh Penyedia Jasa Assurance (*Assurance Services Provider*) independen yaitu PT Sucofindo sesuai dengan standar AA1000. Pihak assesor tidak terlibat dalam proses penyusunan laporan dan dengan demikian tidak ada benturan kepentingan.

Currently, PT Permodalan Nasional Madani's (PNM) 2025 Sustainability Report is still awaiting verification by an independent Assurance Services Provider, PT Sucofindo, in accordance with the AA1000 standard. The assurance provider was not involved in the report's preparation process; therefore, there is no conflict of interest.





# Lembar Umpan Balik [OJK G.2]

## Feedback Form [OJK G.2]

Terima kasih atas perhatian Anda dalam membaca Laporan Keberlanjutan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Tahun 2025. Untuk mendukung peningkatan kualitas laporan pada periode berikutnya, kami mengharapkan kesediaan para pemangku kepentingan untuk memberikan umpan balik setelah menelaah laporan ini.

Thank you for reading the 2025 Sustainability Report of PT Permodalan Nasional Madani (PNM). In order to improve the quality of the report contents in the coming years, we would like to ask the stakeholders to kindly provide feedback after reading this report.

### Data Diri

#### Personal Data

<input type="text"/>	<b>Nama (bila berkenan)</b> Name (if willing)	:	.....
<input type="text"/>	<b>Institusi/Perusahaan</b> Institution/Company	:	.....
<input type="text"/>	<b>E-mail</b> E-mail	:	.....
<input type="text"/>	<b>Telp/HP</b> Telephone/Cellphone	:	.....

#### Golongan Pemangku Kepentingan:

- Pemegang Saham
- Nasabah
- Pegawai
- Mitra kerja
- Pemerintah
- Masyarakat
- Lain-lain, mohon sebutkan.....

#### Stakeholder Category:

- Shareholder
- Customer
- Employee
- Work Partner
- Government
- Public
- Others, please specify.....

Mohon pilih jawaban yang paling sesuai (beri tanda √) di dalam kotak yang tersedia:

Please select the most appropriate answer (mark √) in the box provided:

1. Laporan ini bermanfaat:

1. This report is useful:

<input type="checkbox"/> Sangat Tidak Setuju Strongly disagree	<input type="checkbox"/> Tidak Setuju Disagree	<input type="checkbox"/> Netral Neutral	<input type="checkbox"/> Setuju Agree	<input type="checkbox"/> Sangat Setuju Strongly agree
---	---	--	--	--

2. Laporan ini menggambarkan kinerja PNM dalam mendukung pembangunan berkelanjutan:

2. This report describes PNM performance in supporting sustainable development:

<input type="checkbox"/> Sangat Tidak Setuju Strongly disagree	<input type="checkbox"/> Tidak Setuju Disagree	<input type="checkbox"/> Netral Neutral	<input type="checkbox"/> Setuju Agree	<input type="checkbox"/> Sangat Setuju Strongly agree
---	---	--	--	--

3. Laporan ini mudah dimengerti:

3. This report is easy to understand:

<input type="checkbox"/> Sangat Tidak Setuju Strongly disagree	<input type="checkbox"/> Tidak Setuju Disagree	<input type="checkbox"/> Netral Neutral	<input type="checkbox"/> Setuju Agree	<input type="checkbox"/> Sangat Setuju Strongly agree
---	---	--	--	--



4. Laporan ini menarik:

- Sangat Tidak Setuju Strongly disagree  
  Tidak Setuju Disagree  
  Netral Netral  
  Setuju Agree  
  Sangat Setuju Strongly agree

4. This report is interesting:

5. Laporan ini meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap keberlanjutan bisnis PNM:

- Sangat Tidak Setuju Strongly disagree  
  Tidak Setuju Disagree  
  Netral Netral  
  Setuju Agree  
  Sangat Setuju Strongly agree

5. This report increases stakeholder confidence in PNM business sustainability:

Mohon mengisi dan memberikan pendapat dengan menjawab pernyataan berikut:

Please fill in and provide your opinion by answering the following statements:

1. Bagian laporan mana yang paling bermanfaat:

1. Which part of the report is the most useful:

.....

.....

.....

2. Bagian laporan mana yang paling menarik:

2. Which part of the report is the most interesting:

.....

.....

.....

3. Bagian laporan mana yang dinilai pengungkapannya masih kurang dan perlu ditambahkan:

3. Which part of the report is considered to have insufficient disclosure and needs addition:

.....

.....

.....

4. Mohon berikan saran/usul/komentar atas laporan ini:

4. Please provide suggestion/recommendation/comment on this report:

.....

.....

.....

Terima kasih atas partisipasinya. Mohon lembar ini dikirimkan ke: [GRI 2-3]

Thank you for your participation. Please kindly send this sheet to: [GRI 2-3]

Sekretaris Perusahaan  
Corporate Secretary

**PT Permodalan Nasional Madani (PNM)**

Kantor Pusat:  
Head Office:

Menara PNM | PNM Tower  
 Jl. Kuningan Mulia No. 9F, RT 004 | RW 010  
 Kuningan Center Lot 1 (Kav 1),  
 Kelurahan | Subdistrict Karet, Kecamatan | District Setiabudi,  
 Jakarta Selatan | South Jakarta 12920  
 Telepon | Telephone: +6221 2511404 (hunting)  
 Faksimile | Facsimile: +6221 2511405, 251155  
 E-mail: info@pnm.co.id



## Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Tahun Sebelumnya [OJK G.3]

### Responses to Feedback on the Previous Year's Report [OJK G.3]

Selama tahun 2025, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) tidak mendapat tanggapan dari para pemangku kepentingan berkaitan dengan Laporan Keberlanjutan Tahun 2024. Dengan demikian, dalam laporan ini tidak terdapat informasi secara spesifik tentang tindak lanjut yang diambil Perusahaan atas tanggapan dari pemangku kepentingan. Namun demikian, Perusahaan terus berupaya untuk menyempurnakan isi laporan agar memenuhi panduan penulisan yaitu POJK No.51/POJK.03/2017, SEOJK No.16/SEOJK.04/2021, GRI Universal Standard 2021, Metrik ESG-IDX 2024, serta International Financial Reporting Standards Sustainability 1 (IFRS S1) dan IFRS S2 –yang diadopsi Indonesia menjadi Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK 1) dan PSPK 2.

In 2025, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) did not receive any feedback from stakeholders regarding the 2024 Sustainability Report. Accordingly, this report does not contain specific information on follow-up actions taken by the Company in response to stakeholder feedback. Nevertheless, the Company continues to make ongoing efforts to enhance the quality and completeness of this report to ensure compliance with applicable reporting guidelines, including POJK Number 51/POJK.03/2017, SEOJK Number 16/SEOJK.04/2021, GRI Universal Standards 2021, IDX ESG Metrics 2024, as well as the International Financial Reporting Standards Sustainability Disclosure Standards, namely IFRS S1 and IFRS S2, which have been adopted in Indonesia as Sustainability Disclosure Standards (PSPK 1 and PSPK 2).







# 2025 Laporan Keberlanjutan Sustainability Report



Permodalan Nasional Madani

## Menara PNM | PNM Tower

Jl. Kuningan Mulia No. 9F, RT 004 | RW 010  
Kuningan Center Lot 1 (Kav 1),  
Kelurahan | Subdistrict Karet, Kecamatan | District Setiabudi,  
Jakarta Selatan | South Jakarta 12920

- ☎ Telp | Telephone : +62-21-2511404 (Hunting)
- ☎ Fax | Facsimile : +6221 2511405, 251155
- @ E-mail : info@pnm.co.id
- ☎ Call Center : 1500-654
- 🌐 www.pnm.co.id